

STUDI ISLAM INTERNASIONAL

KAJIAN DAN PENDEKATAN MULTIDISIPLINER

Buku Studi Islam Internasional Kajian Multidisipliner adalah hasil diskusi dan riset yang dilakukan oleh Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup. Studi Islam dengan jangkauan Internasional sesuai dengan Visi dan Misi dari Institut Agama Islam Negeri Curup yaitu Asia Tenggara. Perkembangan Studi Islam di Asia Tenggara berkembang pesat, terutama bagaimana mensikapi dampak dari virus Covid – 19, dimana setiap akademisi memberikan kontribusi pemikirannya untuk mencegah bahaya dari virus Covid – 19. Seperti kondisi di Indonesia, terjadi problematika dalam bidang agama, pendidikan, social dan budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan, sains dan teknologi, sehingga peran dari akademisi sangat dibutuhkan, sesuai dengan pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina dan Negara – Negara di Asia Tenggara merasakan perubahan besar dari dampak virus covid – 19. Sehingga hadirnya buku ini adalah kajian yang sangat penting untuk dilanjutkan kembali dalam bentuk kegiatan – kegiatan ilmiah, seminar, bedah buku, training, workshop dan riset lanjutan, semakin bertambah pengetahuan dalam mengembangkan setiap bidang ilmu dalam Studi Islam Internasional. Selamat Membaca



Penerbit LP2 IAIN Curup,
Jalan Dr. AK Gani No. 01 Dusun Curup
Kec. Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id>

ISBN 978-602-6884-58-9 (PDF)



9 786026 884589

STUDI ISLAM
INTERNASIONAL
KAJIAN DAN PENDEKATAN MULTIDISIPLINER

STUDI ISLAM
INTERNASIONAL
KAJIAN DAN PENDEKATAN MULTIDISIPLINER

STUDI ISLAM
INTERNASIONAL
KAJIAN DAN PENDEKATAN MULTIDISIPLINER



STUDI ISLAM INTERNASIONAL

KAJIAN DAN PENDEKATAN MULTIDISIPLINER

Dr. Fakhruddin, M.Pd.I - Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I - Dr. Sumarto, M.Pd.I -
Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd - Dr. Hartini, M.Pd.Kons - Dr. Hasep Saputra, MA -
Dr. Sutarto, M.Pd - H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D - Dr. Istan, S.E, MM, M.Pd -
Dr. Deri Wanto, MA - Dr. Dewi Purnama Sari, M.Pd - Dr. Dina Hajja, M.Pd.Kons -
Dr. Beni Azwar, M.Pd.Kons - Dr. Hendra Harmi, M.Pd - Dr. Rini, SS., M.SI -
Dr. Rahmat Iswanto, M.Hum - Dr. H. Ifnaldi, M.Pd

Editor :
Dr. Sumarto, M.Pd.I

Pengantar :
Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd (Rektor IAIN Curup)
Dr. Fakhruddin, M.Pd.I (Direktur Pascasarjana IAIN Curup)
Dr. Ngainun Naim, M.HI (Ketua LPPM IAIN Tulungagung)

“Studi Islam Internasional; Kajian dan Pendekatan Multidisipliner”

Studi Islam Internasional; Kajian dan Pendekatan Multidisipliner

Penulis :

Dr. Fakhruddin, M.Pd.I - Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I - Dr. Sumarto, M.Pd.I –
Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd - Dr. Hartini, M.Pd.Kons - Dr. Hasep Saputra, MA
Dr. Sutarto, M.Pd - H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D - Dr. Istan, S.E, MM, M.Pd
Dr. Deri Wanto, MA - Dr. Dewi Purnama Sari, M.Pd - Dr. Dina Hajja, M.Pd.Kons
Dr. Beni Azwar, M.Pd.Kons - Dr. Hendra Harmi, M.Pd - Dr. Rini, SS., M.SI
Dr. Rahmat Iswanto, M.Hum - Dr. H. Ifnaldi, M.Pd

Kata Pengantar :

Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA
(Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Dr. RahmadHidayat, M.Ag., M.Pd
(Rektor IAIN Curup)

Dr. Ngainun Naim, M.HI
(Ketua LPPM IAIN Tulungagung)

Editor:

Dr. Sumarto, M.Pd.I



Penerbit LP2 IAIN Curup

Alamat Penerbit:

Pusat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, LPPM IAIN Curup
Jl. Dr. Ak Gani No. 01, Dusun Curup, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu,
Indonesia

Website : <http://book.iaincurup.ac.id/>

Studi Islam Internasional; Kajian dan Pendekatan Multidisipliner

Penulis :

Dr. Fakhruddin, M.Pd.I, Dkk

ISBN : 978-602-6884-58-9

Editor dan Lay Out :

Dr. Sumarto, M.Pd.I

Desain Sampul:

Deri Pasastian

Penerbit :

Penerbit LP2 IAIN Curup

Redaksi :

Pusat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, LPPM IAIN Curup

**Jl. Dr. Ak Gani No. 01, Dusun Curup, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu,
Indonesia**

Website : <http://book.iaincurup.ac.id/>

Cetakan Pertama, Februari 2021

Hak cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara

Apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN CURUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamiin, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, dan kekuatan dari-Nya, Tim Penulis Book Chapter dapat menyelesaikan buku ini dengan lancar dan baik. Tidak lupa shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya-pengikutnya, semoga kita diakui sebagai ummatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat-Nya di hari qiyamat. Aamiin.

Pascasarjana IAIN Curup menyambut baik atas terbitnya Buku Chapter dengan Judul “Studi Islam Internasional; Kajian dan Pendekatan Multidisipliner” hasil tulisan dari Dosen – Dosen Pascasarjana IAIN Curup dengan Reviewer Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Dr. Ngainun Naim, M.HI (Ketua LPPM IAIN Tulungagung). Banyak dinamika dalam penulisan dan penyempurnaan Buku Chapter ini, dengan harapan bisa lebih memberikan manfaat bagi Civitas Akademika IAIN Curup dan masyarakat secara luas.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan atas partisipasi bapak ibu dosen dalam penulisan Buku Chapter ini kami ucapkan terima kasih, semangat menulis, berkarya dan publikasi.

Rejang Lebong, Februari 2021
Direktur,

Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

REKTOR IAIN CURUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Rektor dan seluruh civitas akademika IAIN Curup menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terbitnya Buku Chpater dengan judul “Studi Islam Internasional; Kajian dan Pendekatan Multidisipliner” hasil tulisan dari Dosen – Dosen Pascasarjana IAIN Curup dengan Reviewer Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Dr. Ngainun Naim, M.HI (Ketua LPPM IAIN Tulungagung).

Pentingnya menulis bagi dosen tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Menulis adalah identitas bagi dosen, menunjukkan kepedulian dan peningkatan kesadaran untuk mempublikasikan karya – karyanya bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menulis Buku Chapter bersama, harapannya adalah sebagai konsumsi akademik untuk dilanjutkan dalam penelitian dan diskusi ilmiah selanjutnya. Selamat Membaca.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan atas partisipasi bapak ibu dosen dalam penulisan Buku Chapter ini kami ucapkan terima kasih, semangat menulis, berkarya dan publikasi.

Rejang Lebong, Februari 2021

Rektor,

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd

KATA PENGANTAR

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله واصحابه أجمعين

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia dari-Nya kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari – hari dengan baik dan penuh bersemangat. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya-pengikutnya, semoga kita mendapatkan syafaat-Nya di hari qiyamat. Aamiin.

Kami dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan apresiasi atas terbitnya Buku “Studi Islam Internasional; Kajian dan Pendekatan Multidisipliner” hasil tulisan dari Dosen – Dosen Pascasarjana IAIN Curup dengan Reviewer Saya dan Dr. Ngainun Naim, M.HI (Ketua LPPM IAIN Tulungagung). Tentunya setiap karya yang dihasilkan harus selalu memperhatikan keaslian karya mulai dari *Management Reference* dan hasil penelitian yang didapatkan walapun itu *Library Research*, kita harus juga mampu menghasilkan analisis pemikiran kita yang konstruktif terhadap temuan dan hasil bacaan kita.

Semua adalah proses untuk penyempurnaan, begitu juga karya yang dihasilkan oleh Dosen – Dosen Pascasarjana IAIN Curup, tetap masih ada perbaikan dan itu adalah proses akademik, untuk menghasilkan karya yang baik harus adanya proses, dimana proses itu adalah bimbingan, diskusi dan share *knowledge*. Buku yang di hadapan kita bersama ini adalah hasil dari proses tersebut. Kita bisa menikmati karya ini dengan sambil menum secangkir kopi,

atau berdiskusi dengan teman – teman sejawat kita di kampus, dengan mahasiswa kita untuk menjadi sumber ide – ide berikutnya. Selamat atas terbitnya karya yang bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk bangsa kita.

Yogyakarta, Februari 2021

Rektor,

Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA

DAFTAR ISI

Memperkuat Humanisme, Multikulturalisme, dan Pluralisme Islam.....	12
di tengah Krisis Pendidikan Modern	
Alquran dan Politik	44
Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Kepemimpinan di Brunei Darussalam	70
Mewujudkan Islam yang <i>Rahmatan lil alamin</i>	
Membangun Paradigma <i>Science</i> Islam Masa Depan.....	102
Persiapan Generasi Emas Abad 2045 :	127
kolaborasi Konselor Dengan Guru/Dosen Dalam Upaya Pengembangan Curiosity	
Peserta Didik Dalam Belajar	127
Membangun Kehidupan Harmonis dalam Lintas Budaya dan Agama	157
Perspektif Pendidikan Islam	
Pernikahan Dini Di Yaman	176
Tradisi Di tengah Kemiskinan Melanda	
Paradigma Kajian Islam.....	189
(Studi Analisis Pendekatan Kajian Hadis Pada Masa Modern)	
Implementasi Konsep Syariah Dalam Dunia Perbankan.....	216
Sosialisasi Anak Didik;	237
Pendekatan dan Proses Transfer Kompetensi	
Pencarian Identitas Baru, Menciptakan Kedamaian, Menghindari Konflik dan	
Kekerasan dalam Masyarakat Pluralis dan Multikultural.....	255
Upaya Preventif Radikalisme Melalui <i>Group Counseling Discussions</i>	275
Pelayanan Bimbingan Konseling (BK) Bagi.....	285
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di SMA Nuhammadiyah Curup	
Studi Tradisi Pendidikan Multikultural.....	292
Pada STIQ An Nur di Yogyakarta	
Pendekatan Multidisipliner Dalam Kajian Keislaman.....	318
Kontekstualisasi Bahasa Arab.....	334
Pembiayaan Pendidikan Islam	352
Daftar Pustaka	371

PROLOG BOOK CHAPTER
“STUDI ISLAM INTERNASIONAL;
KAJIAN DAN PENDEKATAN MULTIDISIPLINER”

Studi Islam, Pendekatan Multidisipliner, dan Pemahaman Islam Komprehensif

Dr. Ngainun Naim
Dosen IAIN Tulungagung

Islam Indonesia memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan Islam yang ada di belahan dunia yang lainnya. Keunikan itu ditandai—antara lain—oleh keragaman yang dimiliki, baik budaya, agama, pendidikan, seni, dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan. Aspek inilah yang menjadi salah satu daya dorong bagi peneliti dari berbagai belahan dunia untuk masuk dan meneliti berbagai bidang kehidupan Islam Indonesia.

Sejauh pengetahuan penulis belum ada data yang konkrit tentang jumlah peneliti yang memotret Islam Indonesia dari berbagai sudut pandang. Setiap waktu selalu saja ada peneliti yang menelisik sisi-sisi kehidupan Islam Indonesia dengan perspektif yang bermacam-macam, seperti sosial, ekonomi, politik, filsafat, dan berbagai perspektif lainnya. Perbedaan perspektif menjadikan potret yang dihasilkan berwarna-warni meskipun objeknya sama. Kejelian peneliti untuk menemukan “ruang kosong” menjadi aspek penting dalam pelaksanaan penelitian. Aspek mendasar yang harus muncul dalam setiap penelitian adalah kebaruan. Kebaruan bukan berarti hal yang harus baru sama sekali. Bisa jadi kebaruan itu berasal dari aspek kekurangan dari penelitian sebelumnya. Kebaruan, perbedaan perspektif, dan dialektika selama proses penggalian data menghasilkan penelitian yang tidak mungkin sama antara satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman produk penelitian penting untuk diapresiasi dan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisah dari kehidupan secara luas.

Islam Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan dinamis. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia memunculkan berbagai teori. Aspek yang tidak bisa dipisahkan adalah dialektika ajaran Islam dan budaya lokal. Konsekuensi dari interaksi ini adalah munculnya Islam dengan corak yang khas antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Setiap corak yang ada memiliki kelebihan dan keunikan sehingga penting untuk dipahami, diapresiasi, dan diposisikan sebagai bagian tidak terpisah dari khazanah Islam Indonesia.

Islam mengandung aspek yang bersifat normatif dan historis. Aspek normatif bersifat tetap, namun aspek historis memiliki peluang untuk kontekstualisasi karena sifatnya yang fleksibel. Fleksibilitas ini membuka ruang penerimaan terhadap unsur-unsur lokal yang sejalan dengan ajaran Islam. Islamisasi yang sukses di Indonesia sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kemampuan kaum sufi untuk mengadopsi “keyakinan lokal” menjadi bagian penting dari ritual-ritual Islam. Ajaran Islam dikemas dengan corak yang kompatibel dengan tradisi lokal sehingga penyebaran Islam berlangsung secara damai.

Runtuhnya Orde Baru membawa perubahan dalam kehidupan sosial keagamaan. Ruang keterbukaan dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk orang dan kelompok sosial keagamaan untuk mengekspresikan diri dan menarik anggota baru dengan memanfaatkan berbagai media. Islam Indonesia yang awalnya dikenal sebagai moderat kini memunculkan corak lain yang cenderung keras. Corak semacam ini lebih mementingkan formalitas keberagamaan daripada substansi. Implikasinya, dimensi agama yang sesungguhnya cukup substansial menjadi terpinggirkan. Visi profetis Islam sebagai seperangkat paradigma moral-etis yang bertujuan membebaskan manusia dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan menjadi kurang mendapatkan perhatian.

Salah satu kelemahan dari corak keberagamaan legalistik-formalistik adalah sifatnya yang individual. Dimensi sosial kurang mendapatkan perhatian secara memadai. Selain itu, sistem nilai moral-etis yang relevan bagi kehidupan juga kurang mendapatkan perhatian. Implikasi dari kelemahan ini bisa dilihat dari paradoks kehidupan keagamaan di Indonesia, yakni sebagian besar warga Indonesia merupakan umat Islam namun perilakunya tidak selalu mencerminkan dan sejalan dengan spirit ajaran Islam.

Bagaimana fenomena ini bisa dipahami? Tentu ada banyak cara. Satu kunci yang harus dimiliki adalah metodologi. Dalam konteks kehidupan keagamaan, metodologi memiliki peranan penting dalam membangun pemahaman keberagamaan. Metodologi bisa diibaratkan sebagai kunci untuk membuka pintu. Tanpa memegang kunci, kita tidak bisa masuk ke suatu tempat tertentu. Meskipun demikian, kunci tidak akan berfungsi jika tidak dipergunakan secara tepat. Konteks metodologi dalam kehidupan keagamaan bisa diibaratkan sebagaimana kunci. Kunci jika tidak dipergunakan untuk membuka pintu menjadikan posisi kunci tidak fungsional. Kunci juga tidak ada manfaatnya

ketika dipakai membuka pintu yang tidak sesuai dengan kunci. Kesesuaian antara kunci, pintu, dan aktivitas membuka merupakan trilogi yang saling berkaitan. Ketiganya merupakan rangkaian yang bersatu dan saling mendukung. Berkaitan dengan lembaga pendidikan, IAIN memiliki peranan yang sangat penting terhadap kehidupan bangsa ini. Sejarah panjang Islam Indonesia setelah kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari kontribusi IAIN. Salah satu sumbangannya adalah pada terbentuknya kelas sosial Muslim baru. Generasi muda Muslim mendapatkan kesempatan manaiki anak tangga untuk untuk melakukan “mobilitas sosial vertikal” dan berdiri sejajar dengan kalangan terpelajar Indonesia lainnya melalui jenjang pendidikan di IAIN. IAIN membuka peluang yang memungkinkan potensi-potensi para santri untuk mendapatkan tempat berkembang. Mereka tidak hanya berkenalan, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai baru—seperti sikap pluralis dalam merespon perbedaan, sikap understanding, bahkan pengakuan, terhadap keberadaan kelompok lain (the others), demokrasi, civil society, gender, dan sebagainya.

Realitas sekarang ini berkembang secara dinamis dan kompleks. Cara mengkaji Islam secara monodisipliner menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Diperlukan cara baru agar bisa mengkaji Islam yang sejalan dengan konteks dinamika perkembangan zaman. Lewat cara semacam ini ilmu yang dihasilkan memiliki relevansi dan kegunaan bagi masyarakat. Tren keilmuan yang berbasis pada integrasi dan interkoneksi dengan berbagai ilmu lain yang berbeda, sebagaimana terangkum dalam buku ini penting untuk terus ditumbuhkembangkan. Meskipun demikian penting juga di waktu mendatang untuk mengkaji Islam dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

Buku karya dosen IAIN Curup ini menempati posisi strategis dalam kerangka menjadikan Islam sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Kajian demi kajian di buku ini menghadirkan optimisme bahwa Islam Indonesia bisa lebih unggul di level global, meskipun untuk itu dibutuhkan proses perjuangan yang tidak ringan dan berkelanjutan. Secara pribadi saya mengapresiasi terbitnya buku ini. Khazanah keilmuan di Indonesia semakin diperkaya dengan hadirnya buku para intelektual yang termuat dalam buku ini. Selamat, sukses, dan barakah. Amin.

Tulungagung, 15-2-2021

BAHAN BACAAN

Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*. Edited by Mu'arif. 1st ed. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.

———. “Peluang Dan Tantangan Internasionalisasi Pemikiran Muhammadiyah.” *Jurnal Muhammadiyah Studies* 1, no. 1 (2020).

Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Prenada, 2011).

Andik Wahyun Muqoyyidin, “Dialektika Islam dan Budaya Lokal”, *Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam*, Volume 11, Nomor 1, 2013.

Arief Subhan, “Pesantren yang Membebaskan”, dalam Komaruddin Hidayat (ed.), *Dari Pesantren untuk Dunia, Kisah-Kisah Inspiratif Kaum Santri*, (Jakarta: Kencana, 2017), 315.

Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Haidar Bagir and Ulil Abshar Abdalla. *Sains “Religius” Agama “Saintifik” Dua Jalan Mencari Kebenaran*. Edited by Ahmad Baiquni & Azam Bahtiar. 1st ed. Bandung: Mizan, 2020. <https://mizanpublishing.com/akar-konflik-sains-dan-agama>.

Oki Rahadianto Sutopo, “Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia dalam Praktik”, *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Volume 15, Nomor 1, 2010. <http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/4999/3443>.

Memperkokuh Humanisme, Multikulturalisme, dan Pluralisme Islam di tengah Krisis Pendidikan Modern

Oleh. Fakhruddin

Pendahuluan

Kontradiksi – paradok dari hajat awal – modernitas yang awalnya menawarkan manusia untuk menjelajah alam ini untuk mencapai kebahagiaan. Namun, kenyataannya manusia modern akhirnya telah digiring ke dalam sebuah ruang yang mengakibatkan manusia larut dan mengambil jalan pintas yang bersifat amoral¹. Siklus inilah yang akhirnya menjerat manusia, sehingga tak mampu menemukan kedalaman *chronosnya* (nilai-nilai sepiritual).

Termasuk di dalam (dimensinya)-nya praksis pendidikan modern cenderung memisahkan antara pendidikan rohaniah dan jasmaniah – sangat pragmatis materialis -, sehingga mereka akhirnya terjerumus pada konsep *scientisme* dan *mesianisme*². Konsep ini memandang manusia sebagai mesin-mesin yang harus diawasi dan dimanipulir lewat kekuatan fisis-kimiawi dan alat-alat teknologi. Akibatnya terpisah nilai-nilai kemanusiaan dari pribadinya, manusia teraleni dari peradabannya sendiri, keadaan ini menimbulkan kecenderungan pikiran yang tak berjiwa dan bermuara pada tindakan-tindakan amoral. Diantara persoalan pokok yang menjadi sebab gagalnya berbagai upaya pendidikan dalam mengantarkan peserta didik sebagai manusia yang unik, bertuhan, mulia, memiliki berbagai potensi dinamis, merdeka, bertanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal, pada proporsi yang utuh. Kondisi ini mengakibatkan ketidakmampuan pendidikan menjadi wahana bagi membantu peserta didik untuk mampu mengembangkan dirinya – dengan berbagai potensinya -, secara optimal. manusia akan gagal dalam melaksanakan

Kesadaran akan gejala kerusakan nilai-nilai kemanusiaan yang di sebagai konsekuensi pragmatisme pendidikan modern, memunculkan konsep-konsep humanisasi pendidikan sebagai paradigma pembebasan. Namun menurut penulis konsep humanistik yang ditawarkan sangat antroposentris – sangat berbau barat -, sehingga gagal untuk menunjuk substansi kemanusiaan manusia. Seperti yang dilakukan oleh Alexis Carel; berupaya menyingkap hakikat manusia

¹ Marshall Berman, London, 1983

² Paulo Freire dalam *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman (Pilihan Artikel Basis)*, Sindhunata (editor), Kanisius, 2001 sebagaimana di kutip dalam Resensi Amanat, Edisi 84/Februari 2001 Hal. 16.

menjadi buntu karena tidak mampu menembus esensi keunikan manusia³, A. Boizard ; dengan pendekatan agama namun tidak komprehensif⁴, Hadari Nawawi dan Ali Syari'ati; mencoba menyingkap “tabir misteri” hakikat manusia namun terlalu umum belum mengaitkan dengan pendidikan⁵.

Fenomena ini mendorong penulis untuk mengkaji dan menawarkan konsep humanism, multikulturalisme, dan pluralisme – paradigma Islam terhadap nilai-nilai kemanusiaan, berkeragaman budaya dan toleransi – dalam krisis pendidikan modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan melahirkan gambaran yang utuh, bagaimana Islam memandang dan menempatkan peserta didik, sebagai manusia pada posisi yang utuh dan muliah. Dengan pokok bahasan “Bagaimana konsep humanisme, multikulturalisme, dan pluralisme ditinjau dari perspektif Islam” yang dirinci menjadi: *Pertama*, menelisik pendidikan modern yang mengalami krisis kemanusiaan, krisis keragaman, dan krisis toleransi. *Kedua*, Disain humanism, multikulturalisme, dan pluralisme Islam yang dialogis, kondusif, dan mampu mengembangkan serta membina nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman budaya, dan toleransi manusia pada posisi yang mulia, majemuk, dan hidup bersama. *Ketiga*, Kontribusi apa yang dapat diberikan dari pendesainan konsep humanism, Multikulturalisme, dan pluralisme Islami, bagi kesembuhan krisis pendidikan modern.

Menggugat Krisis Pendidikan Modern

Pendidikan merupakan sebuah proses dialektika manusia untuk mengembangkan kemampuan akal pikirnya, menerapkan ilmu pengetahuan dalam menjawab problem-problem sosial, serta mencari hipotesa-hipotesa baru yang kontekstual terhadap perkembangan manusia dan zaman. Sebuah institusi dalam dunia pendidikan yang bernama sekolah adalah salah satu faktor pendorong ke arah kemajuan menuju masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, berdaulat secara politik, demokratis secara hukum dan partisipasi secara budaya.

Paulo Freire⁶ dalam bukunya “Menggugat Pendidikan” sangat mengecam pendidikan yang selama ini dianggap sebagai sumber kebajikan telah

³ Muqtafa, M. Khoiril, Paradigma Multikultural, Sinar Harapan, CV. Bernews, 2002. Hal.121

⁴ A Borsard, Marcel, Prof. Dr., Humanisme dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990. Hal.78

⁵ Mas'ud, Abdurrahma, MA. Ph.D., Menggagas Format Pendekatan non Dikotomik, Humanisme Religius sebagai Paradigma, Gema Mdia, September, 2002. Hal. 43

⁶ Lihat juga Paulo Freire, “Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan”, dalam Menggugat Pendidikan, Pustaka Pelajar: Yogyakarta:, 2001, Hal. 457.

menjadi penindas yang ulung. Pendidikan yang pada umumnya dianggap memiliki misi umum untuk mencerdaskan bangsa ternyata malah berperan aktif mengkerdikan anak didik, karena tidak mampu membuat mereka lebih humanis atau lebih manusia.

Pendidikan yang selama ini dipercaya memiliki tugas untuk membukakan pikiran dan nurani manusia akan berbagai kesadaran palsu yang tumbuh dalam masyarakat justru turut serta menjadi pencipta kesadaran-kesadaran palsu sendiri dan menjadi pengekang kebebasan, dengan cara-caranya yang terselubung. Kata Freire: Pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan takkan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang tak beruntung, serta menyuguhkan kaum tertindas itu model panutan dari antara kaum penindas. Pendidikan seperti itu adalah alat mendehumanisasi manusia⁷.

Jika kita setuju dengan Freire, tentu kita akan dengan jeli mencermati kedudukan kita sebagai pendidik, untuk mempertanyakan apakah selama ini kita telah mampu membukakan mata anak didik kita terhadap berbagai kesadaran palsu, yang biasanya berjubah kedermawanan atau kemuliaan, atau kita, mungkin tanpa kita sadari, justru telah bersatu dengan para penindas dan menjadi ujung tombak mereka dalam rangka melipur lara anak didik kita agar tidak merasa bahwa mereka telah menjadi objek penindasan.

Paling tidak ada tiga macam paradigma⁸ yang biasa mewarnai gerak langkah lembaga-lembaga pendidikan. Bagi mereka yang menganut paradigma konservatif, ketidaksetaraan merupakan hukum alam, dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari, karena ia merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius, karena dikhawatirkan justru akan membawa manusia kepada kesengsaraan baru. Bagi penganut paradigma ini, menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri, karena kelalaian atau kemalasan mereka untuk belajar dan bekerja keras. Jika mereka mau keadaan dapat berbalik bagi mereka. Kaum konservatif beranggapan bahwa harmoni dalam masyarakat merupakan hal yang penting agar konflik dapat dihindari.

Paradigma liberal menganggap bahwa persoalan ekonomi dan politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-

⁷ *Ibid*, hal.460

⁸ Samuel Bowles dan Herbert Gintis, "Pendidikan Revolusioner" dalam *Menggugat Pendidikan* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001, Hal. 428-433.

usaha reformasi yang bersifat kosmetik seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, pengadaan laboratorium atau komputer dan sebagainya yang secara umum terisolasi dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada umumnya berupaya membangun kesadaran naif, di mana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan.

Paradigma yang ketiga adalah paradigma kritis, yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat di mana ia berada. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Dalam perspektif ini urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap the dominant ideology, ke arah transformasi sosial.

Tugas utama pendidik adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradigma kritis ini sekaligus mengadopsi kesadaran kritis dengan cara melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan yang mengejawantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya.

Alur dari skema di atas jelas memberi peluang yang sebesar-besarnya bagi lembaga pendidikan untuk mengadopsi paradigma kritis menuju pendidikan yang humanis dan ilmiah. Karena apabila di negeri ini pendidikan tidak berparadigma kritis maka pendidikan tidak akan bisa memanusiakan manusia (humanis) dan kita hanyalah sebagai penikmat canduisasi kemiskinan, kelatahan dan kebodohan di negeri sendiri.

Pendidikan mempunyai peran strategis sebagai sarana *human resources* dan *human investment*. Artinya, pendidikan selain bertujuan menumbuhkembangkan kehidupan yang lebih baik, juga telah ikut mewarnai dan menjadi landasan

moral dan etik dalam proses pemberdayaan jati diri bangsa⁹. Berangkat dari arti penting pendidikan ini, maka wajar jika hakekat pendidikan merupakan proses humanisasi¹⁰. Humanisasi bagi Malik Fadjar berimplikasi pada proses kependidikan dengan orientasi pengembangan aspek-aspek kemanusiaan manusia, yakni aspek fisik-biologis dan ruhaniah-psikologis. Aspek ruhaniah-psikologis inilah yang dicoba didewasakan dan di-*insan kamil*-kan melalui pendidikan sebagai elemen yang berpretensi positif dalam pembangunan kehidupan yang berkeadaban¹¹. Dari pemikiran ini, maka pendidikan merupakan tindakan sadar dengan tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi (sumber daya) insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*)¹².

Secara normatif, Islam telah memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan pendidikan. *Pertama*, Islam menekankan bahwa pendidikan merupakan kewajiban agama dimana proses pembelajaran dan transmisi Ilmu sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Inilah latar belakang turun wahyu pertama dengan perintah membaca, menulis, dan mengajar. (QS. Al-‘Alaq,96: 1-5)¹³. *Kedua*, seluruh rangkaian pelaksanaan pendidikan adalah ibadah kepada Allah SWT (QS. Al-Hajj,22: 54). Sebagai sebuah ibadah, maka pendidikan merupakan kewajiban individual sekaligus kolektif, *Ketiga*, Islam memberikan derajat tinggi bagi kaum terdidik, sarjana maupun ilmuwan (QS. Al-Mujadalah,58: 11, al Nahl,16: 43). *Keempat*, Islam memberikan landasan bahwa pendidikan merupakan aktivitas sepanjang hayat. (*long life education*). Sebagaimana Hadist Nabi tentang menuntut ilmu dari sejak buaian ibu sampai liang kubur¹⁴. *Kelima*, konstruksi pendidikan menurut Islam bersifat dialogis, inovatif dan terbuka dalam menerima ilmu pengetahuan baik dari Timur maupun Barat.

⁹ Karnadi Hasan “Konsep Pendidikan Jawa”, dalam *Jurnal Dinamika Islam dan Budaya Jawa*, No 3 tahun 2000, Pusat Pengkajian Islam Strategis, IAIN Walisongo Semarang, 2000, Hal. 29.

¹⁰ Paulo Freire dalam *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman (Pilihan Artikel Basis)*, Sindhunata (editor), Kanisius, 2001 sebagaimana di kutip dalam Resensi Amanat, Edisi 84/Februari 2001 Hal. 16.

¹¹ Baca Pengantar Malik Fadjar dalam Imam Tholkah, *Membuka Jendela Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. v

¹² Achmadi, *Islam paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta : Aditya Media, 1992, Hal. 16.

¹³ Perintah ini harus dimaknai seluas-luarnya dan sedalam-dalamnya yaitu melakukan observasi, eskplorasi ilmu, eksperimentasi, kajian, studi, analisis, penelitian, riset, penulisan ilmu secara komprehensif.

¹⁴ Simak Hadist yang dikutip al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, kairo, 1969, Hal. 5 dan 89.

Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW tidak alergi untuk memerintahkan umatnya menuntut ilmu walau ke negeri Cina.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan dengan landasan konseptual-normatif inilah yang menyebabkan warisan khazanah intelektual Islam sejak zaman Nabi hingga abad pertengahan mencapai kejayaan global. *Fajrul Islam*,¹⁵ meminjam istilah yang dipakai Abdurrahman Mas'ud untuk menggambarkan kondisi kejayaan Islam yang disinyalir terjadi antara abad 7-11 M dengan figur Muhammad SAW sebagai *modelling* mampu merubah karakteristik *'jabiliyyah'* Arab menuju masyarakat yang berbudaya¹⁶. Menurut Fazlurrahman, prestasi besar peradaban Islam saat itu merupakan keberhasilan yang ditopang pengembangan penalaran yang luar biasa¹⁷.

Dalam Fase ini, orisinalitas ajaran Islam benar-benar telah menjadi ilham bagi transmisi keilmuan di kalangan umat Islam dalam bentuk kerja-kerja empiris bagi perkembangan peradaban Islam, sehingga Islam secara normatif benar-benar menjadi teologi pembebasan (*liberating*) dan pencerdasan umat (*civilizing*). Munculnya berbagai lembaga pendidikan berkaliiber internasional dan banyaknya ilmuwan yang tidak hanya mahir dibidang teologi tetapi juga tangguh dalam sains dan teknologi merupakan bukti kehebatan yang ditoreh umat Islam pada era ini¹⁸. Prestasi besar Islam era inilah yang membuat orang seperti Mehdi

¹⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Pendidikan Nondikotomik*, Yogyakarta : Gama Media, 2002, Hal. 65.

¹⁶ Fazlurrahman mengindikasikan bahwa karakteristik masyarakat Arab pra Islam adalah suatu pra kondisi bagi perkembangan Islam sebagai sarana yang menyediakan aktivitas ekspansi Arab yang mencengangkan dan sarana terjadinya perubahan revolusioner. Fazlurrahman, *Islam*, Chicago : Chicago University Press, 1979, Hal. 1-2. Baca juga, Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia, pendekatan Semantik terhadap al Qur'an*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997 dan *Konsep-konsep Etika Relegius*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993.

¹⁷ H.A.R.Gibb, *Muhammadanism, A History Survey*, Oxford University Press, 1953, Hal. 90.

¹⁸ Dalam rentan Abad 7-11 M, Islam mencapai kejayaan sehingga menjadi kiblat dunia barat, terutama Eropa dan Spanyol. Hal ini ditandai dengan munculnya para pemikir Islam multi disiplin ilmu. Selain keempat madzhab sebagai teolog, muncul nama Al Tabari (w 923) ahli tafsir orisinal al Qur'an. Bidang tauhid dan sufistik, kita kenal Hasan al Basri (w 728) dan Asy'ari (w. 935). Juga muncul para ilmuwan di bidang filsafat dan sains seperti biologi, matematika, kimia, kedokteran. Mereka adalah filsuf sejati al Kindi (800-870), al Farabi (870-950), Ibnu Sina (980-1033 M), Ibnu Rusyd, al Jahiz (w. 255 H) ahli sastra Arab, Al Mas'udi (lahir 280 H/893 M) ahli filsafat dan geografi. al Razi (303H/925 M) ahli fisika, matematika, astronomi, logika, linguistic, dan kimia. Kedokteran. Karya al Razi ini menjadi sumber *paten* bidang kedokteran Barat sampai abad ke 18, al Khawarizmi seorang pakar matematika. Kita juga kenal Ibn Haitam, ahli cahaya. Ibn Hazm, (lahir 384 H/994 M) ahli sejarah. Ke belakang lagi, ada al Mawardi (w. 1058) ahli dalam teori politik dengan maha karyanya yang terkenal, *al abkam al shulthaniyah*. Nama besar al Ghazali (w. 1111 M) yang dikenal barat dengan istilah orang terpenting kedua

Nakosteen, dalam *History of Islamic Origin of Western Education*, Philip K. Hitti dalam *The Arab: A. Short History* dan Montgory Watt dalam *The Influence of The Islam* dan *Islamic Spain* mengaku bahwa di abad pertengahan, peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam bidang pendidikan kepada dunia barat¹⁹.

Namun Kontruksi spektakuler Islam masa lalu tersebut dalam perkembangan selanjutnya tidak mampu dipertahankan umat Islam. Fase ini semakin nampak ketika tahun 1258 M, Hulago Khan dari Mongolia menghancurkan Baghdad dan Granada sebagai Pusat Peradaban dan Kebudayaan Islam yang berlanjut pada imperialisme Barat atas negara-negara Islam²⁰. Pergulatannya dengan dunia barat bukanlah satu-satunya faktor penyebab kemunduran yang menjadikan umat gagap dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah beralih ke barat, tetapi ada faktor yang lebih serius dari internal umat Islam, seperti degradasi moral, pragmatis, hedonis, dan sekuler²¹.

Problem diatas masih diperparah dengan maraknya sintom dikotomik dan maraknya tradisi Taqlid dikalangan umat Islam. Menurut Abdurrahman Mas'ud sampai saat ini ada kesan umum bahwa *Islamic learning* identik dengan kejumudan, kemandegan dan kemunduran. Indikatornya adalah mayoritas umat Islam hidup di negara-negara dunia ketiga yang serba keterbelakangan ekonomi dan pendidikan. Kondisi ini diperparah dengan cara berfikir yang serba dikotomis seperti Islam versus non Islam, Timur versus Barat, ilmu agama versus ilmu non agama (*Secular Sciences*) dan bentuk – bentuk dikotomi lainnya²².

dalam Islam setelah Muhammad, ahli berbabagai hal mulai fiqh, filsafat, kalam dan tasawuf dan masih banyak lagi pemikir-pemikir multi ilmu lainnya.

¹⁹ Baca selengkapnya dalam Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origin of Western Education*, Colorado, 1964, Hal. 61-62. Baca juga, Faisal Ismail, *Masa Depan Pendidikan Islam*, Jakarta : Bakti Aksara Persada, 2003, Hal. 15-16.

²⁰ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal. 110.

²¹ Dalam skala makro dan tak langsung, Faisal Ismail menyebutkan beberapa faktor pemicu kemunduran peradaban Islam terutama di dunia pendidikan *pertama*, pada masa akhir pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad dan Bani Umayyah di Cordova (Andalusia/Spain), terjadi proses pengeroposan nilai-nilai moral, sosial dan politik dalam bentuk meluasnya cara hidup hedonis, materialistis dan pragmatis dalam kehidupan para khalifah. *Kedua*, sejak peristiwa penghancuran baghdad, umat Islam di seluruh dunia dijajah oleh kekuatan kolonialis-imperialis Barat. *Ketiga*, Islam yang datang dan menyebar ke berbagai belahan dunia adalah Islam pasca Baghdad dan Pasca Cordova yang telah kehilangan elanvital, potensi ilmiah dan dinamika intelektualitasnya. *Keempat*, kondisi sisio-ekonomi yang belum menggembirakan. Baca juga, Faisal Ismail, *Masa Depan Pendidikan Islam*, Op.Cit., Hal. 15-16.

²² Baca selengkapnya: Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik*, Op.Cit.

Paradigma ini dipengaruhi bahwa sains dan teknologi sebagai lambang peradaban dewasa ini tumbuh dan berkembang di dunia Barat yang notobene negara nonmuslim. Akibatnya, pemahaman penjajahan Barat atas Timur semakin menguat dan dominasinya telah menyisihkan umat Islam yang semakin terbelakang dalam bidang sains, teknologi modern, informasi, ekonomi dan kultur (*inferior complex*). Sintom dikotomik ini bukan hanya muncul dari lembaga pendidikan Islam, tetapi telah menjangkiti seluruh lapisan Islam²³.

Ilustrasi diatas menunjukkan terdapat ketidaktepatan antara teks ajaran terutama Al- Qur'an sebagai landasan normatif umat Islam dengan praktek pendidikan Islam di era global seperti sekarang ini. Artinya, pendidikan Islam sebagai misi pembentukan insan kamil di era modern dapat dianggap gagal dalam membumikan universalitas ajaran Islam dan terjebak dalam dehumanisasi. Dalam prakteknya, Institusi pendidikan lebih merupakan proses transfer ilmu dan keahlian daripada usaha pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik sebagai pembimbing moralnya melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki. Padahal, kecenderungan pendidikan yang sekedar transfer ilmu dan keahlian dan mengabaikan pembangunan moralitas merupakan ciri utama dehumanisasi pendidikan²⁴.

Dari pemikiran diatas, penulisan ini diharapkan mampu mengeksplorasi universalitas ajaran Islam dalam teks al Qur'an tentang *humanism*, *multikularisme*, dan *plurasme* serta implikasinya dalam pendidikan Islam sebagai kerangka paradigmatik.

²³ Menurut Abdurrahman Mas'ud, problem ini lebih dipicu adanya polarisasi yang tajam antara sunni dan syi'ah, Pergolakan ini kemudian berlanjut ke dalam lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Nizamiyyah di Baghdad (459H/1069 M) sebagai simbol pelestarian sekte, madzhab dan aliran keagamaan, lengkap dengan keyakinan keagamaannya. Akibatnya, Madrasah ini hanya dirancang dengan kurikulum fikih an sich. Jadi tujuan madrasah ini secara jelas dimaksudkan untuk memperkuat ideologi Syafi'i Asy'ari dan membendung serangan dari pihak lain seperti Hambaliyyah, Hanafiyah, syi'ah, mu'tazilah yang berseberangan ideologi keagamaan. Namun Abdurrahman juga memberikan informasi seimbang bahwa kemenangan sunni atas syi'ah dan mu'tazilah dalam rangka mengikis ideologi hellenisme yang mengandarkan rasio yang dikhawatirkan menyebabkan demoralitas keberagaman saat itu, sehingga tidak memperkenankan mata pelajaran filsafat yang mengandarkan rasio dan logika yang merupakan sumber ilmu-ilmu sains.

²⁴ Humanisasi dan dehumanisasi adalah dua hal yang bersifat antagonistik. Dehumanisasi dalam pendidikan dimaksudkan sebagai proses pendidikan yang terbatas pada pemindahan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*). Sedangkan humanisasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan. Lihat Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & READ, 2002, Hal. 190-1.

Memperkuat Humanisme Islam

Aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik²⁵. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda, beberapa ahlinya²⁶ bahkan masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi, yang sangat menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia.

Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik ia adalah alternatif, sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik yang lainnya merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalisis. Psikologi humanistik juga memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik (*humanistic education*). Pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarier menjadi fokus dalam model pendidikan humanistic.

Aliran Psikologi Humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah.

Secara etimologi: *“Humanisme is a derivation to the humanities or literang culture”*²⁷. Humanisme adalah kesetiaan pada manusia atau kebudayaan. Pencerahan kemanusiaan menjadi “spirit” untuk belajar kemudian berkembang pada akhir abad pertengahan dan kebangkitan baru tulisan-tulisan klasik dan sebuah pembaharuan yang percaya diri dalam kesanggupan kejadian manusia untuk menentukan kebenaran dan kesalahan terhadap diri mereka. Kultur humanisme adalah tradisi rasional dan empirik yang mula-mula sebagian besar bersal dari Yunani dan Romawi Kuno, kemudian berkembang melalui sejarah

²⁵ Roberts, T. B., 1975. *Four Psychologies Applied to Education : Freudian, Behavioral, Humanistic, Transpersonal*. New York: Schenkman Pub. Co.

²⁶ Abraham H. Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Carl Rogers menulis buku pertamanya, *Counseling and Psychotherapy* dan secara bertahap mengembangkan konsep Client-Centered Therapy. Arthur Combs (1912-1999) bersama dengan Donald Snygg (1904-1967) mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Aldous Huxley (Roberts, 1975) menekankan adanya pendidikan non-verbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. David Mills dan Stanley Scher (Roberts, 1975) mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar.

²⁷ Lamont, Corliss, *The Philosophy of Humanism*, 1977.

Eropa Humanisme menjadi sebagian dasar pendekatan Barat dalam pengetahuan, teori politik, etika dan hukum.

Humanisme agama adalah keyakinan di dalam aksi. Definisi agama digunakan oleh humanisme religius secara fungsional. Fungsi agama disini adalah untuk melayani kebutuhan personal atau kelompok sosial. Islam bukan hanya suatu kepercayaan akan tetapi suatu kehidupan yang perlu dihayati pada waktu ini. Religion harga dapat menerjemahkan penerimaan Islam secara tidak sempurna dan hanya sebagian karena arti religion adalah sangat luhur dan asal etimologi arab tidak ketahuan. Untuk itu perlu pula diketahui tentang ukuran nilai agama itu sendiri. Seperti disebutkan oleh Drs Sidi Gazalba bahwa “nilai agama itu tercermin dalam pahala, tiap tingkah laku yang mendatangkan pahala mengandung nilai”. Sebenarnya jika kita dapat menerapkan nilai-nilai agama dalam pergaulan dan kehidupan kita pasti akan tercapai suatu kepribadian manusia yang baik. Pada garis besarnya aspek-aspek kepribadian itu dapat digolongkan dalam 3 hal yaitu : 1) Aspek-aspek kejasmanian, 2) Aspek-aspek kejiwaan, 3) Aspek-aspek keridhanian yang luhur²⁸.

Sebenarnya manusia itu mempunyai potensi, potensi yang dapat dikembangkan dengan jalan yang baik. Namun sebaliknya jika potensi itu dibiarkan saja atau malah dirusak maka akan berdampak negatif. Jika kita dapat menerapkan dan mengamalkan religius kita dengan baik. Pasti akan mudah untuk mengembangkan potensi kita. Perlu kita ketahui juga pendidikan Islam dengan paradigma humanistik disini dihasilkan dari upaya refleksi dan rekonstruksi sejarah Islam yang ada, khususnya pada masa 5 abad pertama, serta dari nilai-nilai normatif Islam, dan dari trends humanisme universal. Dalam hal ini ada 6 hal besar yang harus dikembangkan dalam pendidikan Islam: 1) *Cammon sense* atau akal sehat, 2) Individualisme menuju kemandirian, 3) *Thirst of knowledge*, 4) Pendidikan pluralisme, 5) Kontekstualisme lebih mementingkan fungsi dari pada simbol, 6) Keseimbangan antara reward dan punishment. Dalam hal pendidikan Islam ke 6 hal diatas adalah penting dan harus mendapat sorotan dalam proses pendidikan Islam²⁹.

Makna kemanusiaan harus selalu dirumuskan secara baru dalam setiap perjumpaan dengan realitas dan konteks yang baru. Kemanusiaan perlu dilihat bukan sebagai esensi tetap atau situasi akhir. Makna kemanusiaan adalah proses

²⁸ Gazalba, Didi, Drs., Asas Kebudayaan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

²⁹ *Ibid*

menjadi manusiawi dalam interaksi antar manusia dengan konteks dan tantangan yang terus berkembang³⁰.

Menurut Sastrapratedja, dalam situasi pluralisasi kehidupan dan kebudayaan sekarang, tidak mungkin dirumuskan satu corak *humanisme*. Satu hal yang tak bisa ditiadakan dalam humanisme ialah harkat dan martabat manusia harus dihormati dan dikembangkan. Dalam hal ini filsafat berfungsi menafsirkan pengalaman manusia dan berbagai tradisi budaya. Dari sana tercipta pemahaman antara budaya yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi peningkatan hidup dan martabat manusia.

Menurutnya makna *humanisme* menjadi lebih kentara dan berfungsi justru pada saat konsep humanisme diperdebatkan. Makna itu selalu "menggelincir" dari pengertian yang tetap. Mengutip pendapat Bauman, seorang pemikir *pascamodernisme*, Sastrapratedja mengatakan, bila kita ingin mempertahankan arah perjalanan kita, kita perlu mendefinisikannya kembali. Sejauh manusia masih mempertanyakan apa artinya menjadi manusia, maka *humanisme* sebagai pandangan hidup dan sebagai filsafat masih relevan.

Humanisme dipandang sebagai sebuah gagasan positif oleh kebanyakan orang. *Humanisme* mengingatkan kita akan gagasan-gagasan seperti kecintaan akan peri kemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan. Tetapi, makna filosofis dari *humanisme* jauh lebih signifikan; *humanisme* adalah cara berpikir bahwa mengemukakan konsep peri kemanusiaan sebagai fokus dan satu-satunya tujuan. Dengan kata lain, *humanisme* mengajak manusia berpaling dari Tuhan yang menciptakan mereka, dan hanya mementingkan keberadaan dan identitas mereka sendiri. Kamus umum mendefinisikan *humanisme* sebagai sebuah sistem pemikiran yang berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik, dan tindak tanduk yang dipercaya terbaik bagi manusia, bukannya pada otoritas supernatural manapun³¹.

Namun, definisi paling jelas tentang *humanisme* dikemukakan oleh Corliss Lamont dalam bukunya *Philosophy of Humanism*, ia mengatakan; *humanisme* meyakini bahwa alam merupakan jumlah total dari realitas, bahwa materi-energi dan bukan pikiran yang merupakan bahan pembentuk alam semesta, dan bahwa entitas supernatural sama sekali tidak ada. Ketidaknyataan supernatural ini pada tingkat manusia berarti bahwa manusia tidak memiliki jiwa supernatural dan

³⁰ Pernyataan itu disampaikan oleh Prof Dr Michael Sastrapratedja SJ dalam pidato penguahan guru besar ilmu filsafatnya di Aula STF Driyarkara, Jakarta, Sabtu 8 Maret 2006.

³¹ Encarta, World English Dictionary, 1999, Microsoft Corporation Developed for Microsoft by Bloomsbury Publishing.

abadi; dan pada tingkat alam semesta sebagai keseluruhan, bahwa kosmos kita tidak memiliki Tuhan yang supernatural dan abadi³².

Sebagaimana dapat kita lihat, *humanisme* nyaris identik dengan ateisme, dan fakta ini dengan bebas diakui oleh kaum *humanis*. Terdapat dua manifesto penting yang diterbitkan oleh kaum *humanis* di abad yang lalu. Yang pertama dipublikasikan tahun 1933, dan ditandatangani oleh sebagian orang penting masa itu. Empat puluh tahun kemudian, di tahun 1973, manifesto *humanis* kedua dipublikasikan, menegaskan yang pertama, tetapi berisi beberapa tambahan yang berhubungan dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam pada itu. Ribuan pemikir, ilmuwan, penulis, dan praktisi media menandatangani manifesto kedua, yang didukung oleh Asosiasi Humanis Amerika yang masih sangat aktif.

Jika kita pelajari manifesto-manifesto itu, kita menemukan satu pondasi dasar pada masing-masingnya; dogma ateis bahwa alam semesta dan manusia tidak diciptakan tetapi ada secara bebas, bahwa manusia tidak bertanggung jawab kepada otoritas lain apa pun selain dirinya, dan bahwa kepercayaan kepada Tuhan menghambat perkembangan pribadi dan masyarakat. Enam pasal pertama dari Manifesto Humanis adalah; *Pertama*; Humanis memandang alam semesta ada dengan sendirinya dan tidak diciptakan. *Kedua*; Humanisme percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam dan bahwa dia muncul sebagai hasil dari proses yang berkelanjutan. *Ketiga*; Dengan memegang pandangan hidup organik, humanis menemukan bahwa dualisme tradisional tentang pikiran dan jasad harus ditolak. *Keempat*; Humanisme mengakui bahwa budaya religius dan peradaban manusia, sebagaimana digambarkan dengan jelas oleh antropologi dan sejarah, merupakan produk dari suatu perkembangan bertahap karena interaksinya dengan lingkungan alam dan warisan sosialnya. Individu yang lahir di dalam suatu budaya tertentu sebagian besar dibentuk oleh budaya tersebut. *Kelima*; Humanisme menyatakan bahwa sifat alam semesta digambarkan oleh sains modern membuat jaminan supernatural atau kosmik apa pun bagi nilai-nilai manusia tidak dapat diterima. *Keenam*; Kita yakin bahwa waktu telah berlalu bagi ateisme, deisme, modernisme, dan beberapa macam “pemikiran baru”³³.

Definisi humanisme di atas, nampak sekali para humanis menganggap bahwa manusia adalah segala pusat aktifitas dengan meninggalkan peran Tuhan

³² Corliss Lamont, *The Philosophy of Humanism*, 1977, Hal. 116.

³³ Dikutip dari www.jjnet.com/archives/documents/humanist.htm, Senin, 27 November 2006 jam 10.00.

dalam kehidupannya. Hal ini berbeda dengan Islam yang meyakini ada kekuatan lain pada diri manusia yaitu pencipta alam ini.

Humanisme yang dimaksud di dalam Islam adalah memanusiakan manusia sesuai dengan perannya sebagai khalifah di bumi ini. Al-Qur`an menggunakan empat term untuk menyebutkan manusia, yaitu *basyar*, *al-nas*, *bani adam* dan *al-insan*. Keempat term tersebut mengandung arti yang berbeda-beda sesuai dengan konteks yang dimaksud dalam al-Qur`an.

Pertama, term *basyar* diulang di dalam al-Qur`an sebanyak 36 kali dan 1 dengan derivasinya³⁴. Term *basyar* digunakan di dalam al-Qur`an untuk menjelaskan bahwa manusia itu sebagai makhluk biologis. Sebagai contoh manusia sebagai makhluk biologis adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah, 2:187 yang menjelaskan tentang perintah untuk beri`tikaf ketika bulan ramadhan dan jangan mempergauli istrinya ketika dalam masa i`tikaf, QS. Ali Imran 3:47 yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang telah menjadikan maryam memiliki anak sementara tidak ada seorangpun yang mempergaulinya.

Kedua, term *al-nas* diulang di dalam al-Qur`an sebanyak 240 kali³⁵. Term *al-nas* digunakan di dalam al-Qur`an untuk menjelaskan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Sebagai contoh manusia sebagai makhluk sosial adalah firman Allah dalam surat al-Hujurat, 49:13 yang menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal.

Ketiga, term *bani adam* diulang di dalam al-Qur`an sebanyak 7 kali³⁶. Term *bani adam* digunakan dalam al-Qur`an untuk menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk rasional, sebagai contoh di dalam QS. al-Isra, 17:70. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa akan memuliakan manusia dan memberikan sarana dan prasarana baik di darat maupun di lautan. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa manusia berpotensi melalui akalnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Keempat, term *al-insan* diulang di dalam al-Qur`an sebanyak 65 kali dan 24 derivasinya yaitu *insa* 18 kali dan *unas* 6 kali³⁷. Term *al-insan* digunakan di dalam al-Qur`an untuk menjelaskan bahwa manusia itu sebagai makhluk spiritual. Contohnya dalam QS. al-Dzariyat , 51:56 yang menjelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk menyembah

³⁴ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu`jam al-Mufabras li Alfadz al-Qur`an*, Beirut : Dar al-Fikr, 1997 M/1418H, Hal. 152-153.

³⁵ Ibid, Hal. 895-899.

³⁶ Ibid, Hal. 32.

³⁷ Ibid, Hal. 119-120.

kepada-Nya. QS. al-Ahzab, 33:72 menjelaskan tentang amanat yang diberikan Allah kepada manusia.

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia itu makhluk yang sempurna. Kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya yaitu dari mulai proses penciptaannya (QS. al-Sajdah, 32:7-9, al-Insan, 76:2-3), bentuknya (QS. al-Tin, 95:4) serta tugas yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi (QS. al-Baqarah, 2:30-34, al-An`am, 6:165) dan sebagai makhluk yang wajib untuk mengabdikan kepada Allah (QS. al-Dzariyat, 51:56).

Begitu tingginya derajat manusia, maka dalam pandangan Islam, manusia harus menggunakan potensi yang diberikan Allah kepadanya untuk mengembangkan dirinya baik dengan panca inderanya, akal maupun hatinya sehingga benar-benar menjadi manusia seutuhnya.

Memperkokuh Multikulturalisme dan Pluralisme Islam

Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar-manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.

Pluralisme adalah kenyataan yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran. (Q.S. 49 ayat 13)

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Tetapi yang paling penting adalah bagaimana umat Islam mengembangkan dimensi pluralitas itu sehingga menerima pluralisme yakni sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu

sendiri, dengan menerima sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin atas dasar kenyataan tersebut.³⁸

Kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Dalam konteks tersebut, memperbincangkan diskursus Islam multikultural di Indonesia menemukan momentumnya. Sebab, selama ini Islam secara realitas seringkali ditafsirkan tunggal bukan jamak atau multikultural. Padahal, di Nusantara realitas Islam multikultural sangat kental, baik secara sosio-historis maupun global (global-lokal). Secara lokal, misalnya, Islam di nusantara dibagi oleh Clifford Geertz dalam trikotomi: santri, abangan dan priyayi.³⁹ Islam multikultural menghendaki terwujudnya masyarakat Islam yang cinta damai, harmonis dan toleran.

Multikulturalisme sering dipersepsi sebagai politik pengajaran dan nilai keragaman pada tatanan masyarakat plural. Dua istilah tersebut sebenarnya terkait erat dengan dunia pendidikan yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengecualikan (mutually exclusive), bahkan dapat dikatakan ibarat dua sisi uang yang berbeda. Multikulturalisme sering dipersepsi sebagai politik pengajaran dan nilai keragaman pada tatanan masyarakat plural. Dua istilah tersebut sebenarnya terkait erat dengan dunia pendidikan yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengecualikan (mutually exclusive), bahkan dapat dikatakan ibarat dua sisi uang yang berbeda.⁴⁰

Islam sebagai suatu ajaran tentang kehidupan manusia merupakan suatu pandangan yang tidak dapat diperdebatkan lagi di kalangan kaum muslim. Akan tetapi, bagaimana Islam difahami dan diterapkan oleh pemeluknya dalam kehidupan, dalam konteks inilah, terletak persoalan yang sebenarnya. Karena Islam sebagai ajaran itu satu (tunggal) tetapi polyinterpretabel (pemahaman terhadap Islam itu beragam).⁴¹

Sampai batas tertentu, respons agama terhadap kecenderungan multikulturalisme memang masih ambigu. Hal itu disebabkan, agama kerap dipahami sebagai wilayah sakral, metafisik, abadi, samawi, dan mutlak. Bahkan, pada saat agama terlibat dengan urusan 'duniawi' sekalipun, hal ini tetap demi penunaian kewajiban untuk kepentingan 'samawi.' Berbagai agama, tentu saja,

³⁸ Adib Rubiyad. Dkk. Islam dan Pluralisme. Cirebon : Sekolah Tinggi Islam Negeri, 2009 Hal. 3

³⁹ Daniel L. Pals. Seven Theories of Religion. (Yogyakarta : IRCiSoD, 2012). Hal: 341.

⁴⁰ Muhammad Yahya. Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural. Makassar : Jurnal Lentera Pendidikan, Vol 13 No. 2 Desember 2010. Hal: 2.

⁴¹ Yusdani. Fiqih Poitik Muslim. Amara Books:Yogyakarta : 2011. Hal: 276.

berbeda-beda dalam perkara cara dan berbagai aspek, namun agama-agama tersebut hampir seluruhnya memiliki sifat-sifat demikian itu. Karena sakral dan mutlak, maka sulit bagi agama-agama tersebut untuk mentoleransi atau hidup berdampingan dengan tradisi kultural yang dianggap bersifat duniawi dan relativistik. Oleh karena itu, persentuhan agama dan budaya lebih banyak memunculkan persoalan daripada manfaat. Apalagi, misalnya dalam konteks Islam, kemudian dikembangkan konsep bid'ah yang sama sekali tidak memberikan ruang akomodasi bagi penyerapan budaya non-agama.⁴²

Secara ideal tidak ada masalah dalam ketentuan normatif agama, semua berujung pada kebaikan universal, baik dalam relasi vertikal antara manusia dengan Allah (hablun min-Allah), maupun dalam relasi horizontal sesama manusia (hablun min-annas), baik di dunia maupun di akherat kelak. Namun secara faktual, tidak jarang, agama justru menjadi dalih untuk memicu konflik, atau minimal menjadi sumber pembenaran atas berlangsungnya sengketa berdarah. Sampai-sampai sebagian sosiolog berpendapat, bahwa agama disamping berfungsi sebagai pemersatu, juga pemecah belah, seperti misalnya faktor fanatisme agama yang menjadi pemicu terjadinya perang salib (yang banyak merugikan dua belah pihak).⁴³

Karena itu, dengan asumsi agama berperan penting dalam pembentukan budaya, maka apa yang terkandung dalam gagasan multikulturalisme sesungguhnya menyangkut eksistensi agama itu sendiri. Agama bukan hanya diakui sebagai kekayaan yang unik, melainkan bisa menjadi sesuatu yang ikut lebur dalam tempat percampuran (melting pot) budaya yang diakui sebagai milik bersama. Kekalahan dalam perang nilai dapat melahirkan penyakit schizophrenia, kepribadian ganda, atau bahkan kehilangan jati diri sama sekali pada kalangan generasi muda.⁴⁴

Dalam upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, menurut Mun'im A Sirry minimal diperlukan dua hal yaitu: Pertama, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan juga memandu di garda depan

⁴² Ja'far Nashir. Respon Islam Terhadap Multikulturalisme. Diakses melalui situs http://nashir6768.multiply.com/journal/item/1?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem,

⁴³ Muhammad Yahya.. Hal. 3.

⁴⁴ Muhammad Yahya.. Hal. 3-4.

untuk mengantarkan demokrasi built-in dalam masyarakat-masyarakat beragama.⁴⁵

Kedua, mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Saat ini, umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur Barat modern. Kita tak mungkin menghindar dari ide-ide dan teori-teori sekuler. Itu berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu merupakan tugas paling menantang yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern ini.⁴⁶

Karakteristik ajaran yang multiinterpretasi mengisyaratkan keharusan pluralitas dalam tradisi Islam. karena itu, sebagaimana telah dikatakan oleh banyak pihak, Islam tidak dapat dan tidak seharusnya dilihat dan dipahami secara monolitik. Hal ini mengindikasikan Islam yang empirik dan aktual karena berbagai perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik akan berarti lain lagi bagi orang Islam lainnya.⁴⁷

Oleh karena realita kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri, maka sejatinya seorang muslim harus bersikap toleran, terbuka, dan dinamis. Berbagai konflik yang bersumber dari 'perbedaan-perbedaan' sering terjadi. Kata kunci untuk memecahkan persoalan kekerasan kemudian adalah "pluralisme", keragaman realitas. Pluralisme ingin memperkenalkan kepada manusia akan adanya keanekaragaman, kegandaan atau dualitas budaya, pikiran, ideologi, ras, keyakinan, jenis kelamin sosial, geografis dan sebagainya. Pluralisme sesungguhnya adalah fakta dan realitas kehidupan manusia yang tak bisa ditolak. Tuhanlah yang menciptakan keragaman tersebut. (Q.S. al-Rum, 22). Akan tetapi keanekaragaman seharusnya tidak hanya dilihat sebagai fakta atau realitas kultural semata-mata. Ia juga seharusnya tidak diberi label-label atau klasifikasi-klasifikasi yang dihadap-hadapkan secara dikotomis : kuat-lemah atau atas-bawah, kanan-kiri, positif-negatif, laki-laki-perempuan, dan dilanggengkan. Pluralisme seharusnya diberi makna sebagai proses saling melengkapi untuk menjadi "manunggal".⁴⁸

Sejauh yang dapat dibaca dalam sejarah peradaban Islam, upaya ke arah membangun toleransi dan membiarkan keberagaman realitas telah banyak dilakukan oleh sejumlah orang. Mereka berusaha mendorong orang untuk

⁴⁵ Ja'far Nashir.. Ibid.

⁴⁶ Ja'far Nashir.. Ibid.

⁴⁷ Yusdani. Hal.277-278.

⁴⁸ Usein Muhammad. [Pluralisme dan Multikulturalisme Sebagai Masalah Pergulatan Tafsir Dalam Islam*](http://www.gusdur.net/Opini/Detail/?Tafsir%20Dalam%20Islam*). dapat diakses melalui <http://www.gusdur.net/Opini/Detail/?>

"memikirkan". Mereka lalu bekerja memadukan antara pemaknaan tekstualis dan substansialis, antara naql dan aql, antara syari'ah dan hikmah dan antara yang lahir dan yang batin. Satu di antaranya adalah Ibnu Rusyd al Hafid melalui bukunya yang terkenal : "Fashl Maqal fi Maa Baina al Syari'ah wa al Hikmah min al Ittishal". Ibnu Rusyd melalui buku ini mencoba mencari jalan keluar bagi kemelut perebutan makna di atas. Dia terlebih dahulu menegaskan tidak adanya perbedaan kaum muslimin dalam hal bahwa agama Islam adalah ilahiyah, dan bahwa agama atau Tuhan menginginkan kehidupan manusia yang baik dan bahagia, seperti manusia menginginkannya. Menurutnya naql dan aql atau agama dan filsafat bukanlah dua hal yang berhadapan secara dikotomis. Ia mengatakan: "al haqqu la yudhad al haqq bal yuwafiquh wa yusyhadu lahu", kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran tetapi saling merestui dan mendukung.⁴⁹

Era multikulturalisme dan pluralisme, dimana seluruh masyarakat dengan segala unsurnya dituntut untuk saling tergantung dan menanggung nasib secara bersama-sama demi terciptanya perdamaian abadi. Salah satu bagian penting dari konsekuensi tata kehidupan global yang ditandai kemajemukan etnis, budaya, dan agama tersebut, adalah membangun dan menumbuhkan kembali teologi pluralisme dalam masyarakat.

Demi tujuan itu, maka pendidikan sebenarnya masih dianggap sebagai instrumen penting. Sebab, "pendidikan" sampai sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang dididiknya, dan mampu menjadi "*guiding light*" bagi generasi muda penerus bangsa. Dalam konteks inilah, pendidikan agama sebagai media penyadaran umat perlu membangun teologi inklusif dan pluralis, demi harmonisasi agama-agama (yang telah menjadi kebutuhan masyarakat agama sekarang). Hal tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa salah satu peran dan fungsi pendidikan agama diantaranya adalah untuk meningkatkan keberagaman peserta didik dengan keyakinan agama sendiri, dan memberikan kemungkinan keterbukaan untuk mempelajari dan mempermasalahkan agama lain sebatas untuk menumbuhkan sikap toleransi⁵⁰.

Ini artinya, pendidikan agama pada prinsipnya, juga ikut andil dan memainkan peranan yang sangat besar dalam menumbuh-kembangkan sikap-sikap pluralisme dalam diri siswa. Apalagi, kalau mencermati pernyataan yang

⁴⁹ Usein Muhammad, *ibid*

⁵⁰ Sealy, John, *Religious Education Philosophical Perspective*, London: George Allen & Unwin. 1986 Hal: 43-44

telah disampaikan oleh Alex R. Rodger bahwa “pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya dan berfungsi untuk membantu perkembangan pengertian yang dibutuhkan bagi orang-orang yang berbeda iman, sekaligus juga untuk memperkuat ortodoksikeimanan bagi mereka”⁵¹. Artinya pendidikan agama adalah sebagai wahana untuk mengeksplorasi sifat dasar keyakinan agama di dalam proses pendidikan dan secara khusus mempertanyakan adanya bagian dari pendidikan keimanan dalam masyarakat.

Pendidikan agama dengan begitu, seharusnya mampu merefleksikan persoalan pluralisme, dengan mentransmisikan nilai-nilai yang dapat menumbuhkan sikap toleran, terbuka dan kebebasan dalam diri generasi muda. Membangun dan menumbuh kembangkan teologi pluralisme dalam masyarakat, maka inovasi dan pengembangan Pendidikan Agama perlu dilakukan karena sifatnya yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang belajar. Mereka yang belajar mengalami perubahan maka langkah awal dalam perumusan pendidikan agama ialah penyelidikan mengenai situasi (*situation analysis*) yang kita hadapi, termasuk situasi lingkungan belajar dalam artian menyeluruh, situasi peserta didik, dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan⁵².

Melalui pengembangan pendidikan agama Islam berbasis kemajemukan dapat dijadikan sebagai jawaban atau solusi alternatif bagi keinginan untuk merespon persoalan-persoalan di atas. Sebab dalam pendidikannya, pemahaman Islam yang hendak dikembangkan oleh pendidikan berbasis pluralisme adalah pemahamandan pemikiran yang bersifat inklusif. Melalui sistem pendidikannya, sebuah pendidikan yang berbasis pluralisme akan berusaha memelihara dan berupaya menumbuhkan pemahaman yang inklusif pada peserta didik. Dengan suatu orientasi untuk memberikan penyadaran terhadap para peserta didiknya akan pentingnya saling menghargai, menghormati dan bekerja samadengan agama-agama lain.

Islam memerintahkan kepada umatnya untuk dapat berinteraksi terutama dengan agama Kristen dan Yahudi dan dapat menggali nilai-nilai keagamaan melalui diskusi dan debat intelektual/teologis secara bersama-sama dan dengan cara yang sebaik-baiknya (QS al-Ankabut/29: 46), tentu saja tanpa harus menimbulkan prejudice atau kecurigaan di antara mereka. Dalam Islam

⁵¹ Rodger, Alex R., 1982, *Educational and Faith in Open Society*, Britain: The Handel Press. 1982 Hal. 61

⁵² Rodger Hal. 21-30

berteologi secara inklusif dengan menampilkan wajah agama secara santun dan ramah sangat dianjurkan.

Dalam kaitannya yang langsung dengan prinsip untuk dapat menghargai agama lain dan dapat menjalin persahabatan dan perdamaian dengan ‘mereka’ inilah Allah, didalam al-Qur’an, menegur keras Nabi Muhammad SAW ketika ia menunjukkan keinginan dan kesediaan yang menggebu untuk memaksa manusia menerima dan mengikuti ajaran yang disampaikannya, sebagai berikut: *‘Jika Tuhanmu menghendaki, maka tentunya manusia yang ada di muka bumi ini akan beriman. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia, di luar kesediaan mereka sendiri?’* (Q.S. Yunus: 99).

Dari ayat tersebut tergambar dengan jelas bahwa persoalan kemerdekaan beragama dan keyakinan menjadi “tanggungjawab” Allah SWT, dimana kita semua dituntut toleran terhadap orang yang tidak satu dengan keyakinan kita. Bahkan nabi sendiri dilarang untuk memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Maka dengan begitu, tidaklah dibenarkan “kita” menunjukkan sikapkekerasan, paksaan, menteror dan menakut-nakuti orang lain dalam beragama. Sedangkan secara umum, pandangan Islam terhadap agama lain (Ahli Kitab—pen) sangat positif dan sangat konstruktif. Hal ini dapat dilihat dari nilai dan ajarannya yang memberikan peluang dan mendorong kepada umat Islam untuk dapat melakukan interaksi sosial, kerja sama dengan mereka.

Tentang hal ini, Farid Asaek⁵³, telah menunjukkan bukti-bukti sebagai berikut;

Pertama, Ahli Kitab, sebagai penerima wahyu, diakui sebagai bagian dari komunitas. Ditujukan kepada semua nabi, al-Qur’an mengatakan: *“ Dan sungguh inilah umatmu, umat yang satu”* (QS al-Mu’minun: 52). Sehingga konsep Islam tentang parapengikut Kitab Suci atau Ahli Kitab yaitu konsep yang memberikan pengakuan tertentu kepada para penganut agama lain, yang memiliki Kitab Suci dengan memberikan kebebasan menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Kedua, dalam dua bidang sosial terpenting, makanan dan perkawinan, sikap murah hati al-Qur’an terlihat jelas, bahwa makanan “orang-orang yang diberi Alkitab” dinyatakan sebagai sah (halal) bagi kaum muslim dan makanan kaum muslim sah bagi mereka (QS al-Maidah: 5). Demikian juga, pria muslim diperkenankan mengawini “wanita suci dari Ahli Kitab” (QS al-Maidah: 5). Jika kaum Muslim diperkenankan hidup berdampingan dengan golongan lain dalam hubungan yang seintim hubungan perkawinan, ini menunjukkan secara eksplisit

⁵³ Esack, Farid, *Qur’an, Liberation, and Pluralism*, Diterjemahkan oleh: Watung A. Budiman, Bandung: Mizan. 2000 Hal. 206-207

bahwa permusuhan tidak dianggap sebagai norma dalam hubungan Muslim-kaum lain.

Ketiga, dalam bidang hukum agama, norma-norma dan peraturan kaum Yahudi dan Nasrani diakui (QS al-Maidah: 47) dan bahkan dikuatkan oleh Nabi ketika beliau diseru untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka (QS al-Maidah: 42-43).

Keempat, kesucian kehidupan religius penganut agama wahyu lainnya ditegaskan oleh fakta bahwa izin pertama yang pernah diberikan bagi perjuangan bersenjata dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya kesucian ini, “*Dan sekiranya Allah tiada menolaki (keganasan) sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gerejadan sinagog-sinagog orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak di sebut nama Allah*” (QS al-Hajj: 40). Perintah untuk bersikap toleran, bukan hanya pada agama Yahudi dan Kristen, tetapi juga kepada agama-agama lain. Ayat 256 surat al-Baqarah mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam soal agama karena jalan lurus dan benar telah dapat dibedakan dengan jelas dari jalan salah dan sesat. Terserahlah kepada manusia memilih jalan yang dikehendakinya. Telah dijelaskan mana jalan benar yang akan membawa kepada kesengsaraan. Manusia merdeka memilih jalan yang dikehendakinya. Kemerdekaan ini diperkuat oleh ayat 6 surah al-Kafirun yang mengatakan: *Bagimulah agamamu dan bagiku agamaku*.

Konsepsi pluralisme dalam Islam sudah terbawa pada misi awal agama ini diturunkan, yakni membawa kasih terhadap seluruh alam tanpa batas-batas atau benturan-benturan dimensi apapun. Semua orang yang mengaku Islam haruslah menunjukkan sikap saling “mengasihi” kepada sesama manusia. Karena seseorang bisa disebut sebagai seorang muslim, menurut kanjeng nabi adalah *Al-Muslimu man salima Al-muslimuna min lisanibi wa yadibi*. Maksudnya adalah seorang muslim yang senantiasa menebarkan sikap damai dan rasa aman dihati masyarakatnya.

Pencarian bentuk pendidikan alternatif yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya, menumbuhkan akan tatanilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami, serta mengerjakan keterbukaan dan dialog mutlak diperlukan. Bentuk pendidikan seperti inilah yang banyak ditawarkan oleh “banyak ahli” dalam rangka mengantisipasi konflik keagamaan dan menuju perdamaian abadi, yang kemudian terkenal dengan sebutan “pendidikan pluralisme”.

Pendidikan pluralisme atau sering dikenal orang dengan sebutan “pendidikan multikultural”. dalam pengertian Sleeter adalah pendidikan multikultural sebagai *any set of proces by which schools work with rather than against oppressed group*⁵⁴. Banks, dalam bukunya *Multicultural education: historical development, dimension, and practice* (1993) menyatakan bahwa meskipun tidak ada konsensus tentang itu ia berkesimpulan bahwa di antara banyak pengertian tersebut maka yang dominan adalah pengertian pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*⁵⁵.

Secara sederhana pendidikan pluralisme dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman keagamaan dan kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Pendidikan disini, dituntut untuk dapat merespon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas⁵⁶.

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) juga merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa. Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh peserta didik tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama.

⁵⁴ G. Burnett, *Varieties of Multicultural Education: An Introduction*, Eric Clearinghouse on Urban Education, Digest, 1994 Hal. 1

⁵⁵ Banks, James, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, And Practice*, Review of Research in Education, 1993.

⁵⁶ Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo. 2004 Hal:36-38

Konflik sosial yang mewarnai pasang surutnya persatuan Indonesia harus menjadi perhatian dan perlu diwaspadai oleh kemampuan manajemen politik bangsa agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang memecah belah persatuan Indonesia. Salah satu caranya yang strategis adalah pendidikan multikultural yang dilakukan secara aktual, cerdas, dan jujur.

Pendidikan apa pun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan dan keilmuan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga halnya manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional.

Dengan digulirkannya isu pendidikan multikultural ini diharapkan mampu berperan banyak dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di masyarakat. Minimal, pendidikan multikultural ini mampu memberikan penyadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa konflik bukan suatu hal yang baik untuk dibudayakan.

Harapan-harapan seperti itu memang layak dialamatkan mengingat pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “indifference” dan “Non-recognition” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang “*ethnic studies*” untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.

Istilah “pendidikan multikultural” dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Dalam konteks teoritis, gagasan multikulturalisme dinilai dapat mengakomodir kesetaraan dalam perbedaan tersebut merupakan sebuah konsep yang mampu meredam konflik vertikal maupun horisontal dalam masyarakat yang heterogen, dimana tuntunan akan pengetahuan atas eksistensi dan keunikan budaya kelompok etnis sangat lumrah terjadi. Masyarakat multikultural dicitakan mampu memberikan ruang yang luas bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupan secara otonom. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem budaya (*cultural system*) dan tatanan sosial yang mapan dalam kehidupan masyarakat yang akan menjadi pilar kedamaian sebuah bangsa.

Dengan gagasan di atas, budaya akan dipahami sebagai sebuah gerak (*move*) kreativitas masyarakat yang dibangun oleh prinsip-prinsip yang berbeda kemudian membentuk sebuah kesepakatan bersama tentang nilai, pandangan, dan sikap masyarakat. Dalam artian budaya akan tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri yang dipengaruhi oleh faktor ekstern yang mengelilingi kehidupannya.

Adapun model pembelajaran dari pendidikan berbasis multikultural didasarkan pada lima pendekatan, yaitu: *pertama*, pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme; *kedua*, pendidikan mengenai perbedaan pemahaman kebudayaan; *ketiga*, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan; *keempat*, pendidikan dwi-budaya; *kelima*, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia⁵⁷.

Ketika lima pendekatan tersebut di atas dihayati, maka tampaknya pendidikan multikultural dapat diharapkan sebagai jawaban atas beberapa problematika kemajemukan tersebut. Hal demikian disebabkan oleh prinsip pendidikan multikultural yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural juga senantiasa menciptakan struktur dan proses dimana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi.

Mengembangkan sikap pluralisme pada peserta didik di era sekarang ini, adalah mutlak segera “dilakukan” oleh seluruh pendidikan agama di Indonesia demi kedamaian sejati. Pendidikan agama Islam perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya dengan tujuan dan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara

⁵⁷ Mahfud, Choirul. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011 Hal.

kolompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusifisme kelompok agama dan budaya yang sempit.

Sehingga sikap-sikap pluralisme itu akan dapat ditumbuhkembangkan dalam diri generasi muda kita melalui dimensi-dimensi pendidikan agama dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut:

1. Pendidikan agama seperti fiqih, tafsir tidak harus bersifat linier, namun menggunakan pendekatan *muqarom*. Ini menjadi sangat penting, karena anak tidak hanya dibekali pengetahuan atau pemahaman tentang ketentuan hukum dalam fiqih atau makna ayat yang tunggal, namun juga diberikan pandangan yang berbeda. Tentunya, bukan sekedar mengetahui yang berbeda, namun juga diberikan pengetahuan tentang mengapa bisa berbeda.
2. Untuk mengembangkan kecerdasan sosial, harus diberikan pendidikan lintas agama. Hal ini dapat dilakukan dengan program dialog antar agama yang perlu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam. Sebagai contoh, dialog tentang “puasa” yang bisa menghadirkan para bikhsu atau agamawan dari agama lain. Program ini menjadi sangat strategis, khususnya untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa ternyata puasa itu juga menjadi ajaran saudara-saudara kita yang beragama Budha. Dengan dialog seperti ini, peserta didik diharapkan akan mempunyai pemahaman khususnya dalam menilai keyakinan saudara-saudara kita yang berbeda agama. Karena memang pada kenyataanya “Di Luar Islampun Ada Keselamatan”.
3. Untuk memahami realitas perbedaan dalam beragama, lembaga-lembaga pendidikan Islam bukan hanya sekedar menyelenggarakan dialog antar agama, namun juga menyelenggarakan program *road show* lintas agama. Program *road show* lintas agama ini adalah program nyata untuk menanamkan kepedulian dan solidaritas terhadap komunitas agama lain. Hal ini dengan cara mengirimkan siswa-siswa untuk ikut kerja bhakti membersihkan gereja, wihara ataupun tempat suci lainnya. Kesadaran pluralitas bukan sekedar hanya memahami keberbedaan, namun juga harus ditunjukkan dengan sikap konkrit bahwa diantara kita sekalipun berbeda keyakinan, namun saudara dan saling membantu antar sesama.
4. Untuk menanamkan kesadaran spiritual, pendidikan Islam perlu menyelenggarakan program seperti *spiritual work camp* (SWC), hal ini bisa dilakukan dengan cara mengirimkan siswa untuk ikut dalam sebuah keluarga selama beberapa hari, termasuk kemungkinan ikut pada keluarga yang berbeda agama. Siswa harus melebur dalam keluarga tersebut. Ia juga

harus melakukan aktifitas sebagaimana aktifitas keseharian dari keluarga tersebut. Jika keluarga tersebut petani, maka ia harus pula membantu keluarga tersebut bertani dan sebagainya. Ini adalah suatu program yang sangat strategis untuk meningkatkan kepekaan serta solidaritas sosial. Pelajaran penting lainnya, adalah siswa dapat belajar bagaimana memahami kehidupan yang beragam. Dengan demikian, siswa akan mempunyai kesadaran dan kepekaan untuk menghargai dan menghormati orang lain.

5. Pada bulan Ramadhan, adalah bulan yang sangat strategis untuk menumbuhkan kepekaan sosial pada anak didik. Dengan menyelenggarakan “program sahur *on the road*”, misalnya. Karena dengan program ini, dapat dirancang sahur bersama antara siswa dengan anak-anak jalanan.

Selain beberapa hal di atas, perlu kiranya mengajarkan materi Aqidah Inklusif. Sebagaimana telah banyak diketahui umat Islam, aqidah berasal dari bahasa Arab yang berarti “kepercayaan”, maksudnya ialah hal-hal yang diyakini oleh orang-orang beragama. Dalam Islam, aqidah selalu berhubungan dengan iman. Aqidah adalah ajaran sentral dalam Islam dan menjadi inti risalah Islam melalui Muhammad. Tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah.

Masalahnya karena iman itu bersegiteoritis dan ideal yang hanya dapat diketahui dengan bukti lahiriah dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, terkadang menimbulkan “problem” tersendiri ketika harus berhadapan dengan “keimanan” dari orang yang beragama lain. Apalagi persoalan iman ini, juga merupakan inti bagi semua agama, jadi bukan hanya milik Islam saja. Maka, tak heran jika kemudian muncul persoalan *truth claim* dan *salvation claim* diantara agama-agama, yang sering berakhir dengan konflik antar agama. Untuk mengatasi persoalan seperti itu, pendidikan agama Islam melalui ajaran aqidahnya, perlu menekankan pentingnya “persaudaraan” umat beragama. Pelajaran aqidah, bukan sekedar menuntut pada setiap peserta didik untuk menghafal sejumlah materi yang berkaitan dengannya, seperti iman kepada Allah swt, nabi Muhamad saw, dan lain-lain. Tetapi sekaligus, menekankan arti pentingnya penghayatan keimanan tadi dalam kehidupan sehari-hari.

Intinya, aqidah harus berbuntut dengan amal perbuatan yang baik atau akhlak al-Karimah pada peserta didik. Memiliki akhlak yang baik pada Tuhan, alam dan sesama umat manusia. Pendidikan Islam harus sadar, bahwa kerusuhan-kerusuhan bernuansa SARA seperti yang sering terjadi di Indonesia ini adalah akibat ekspresi keberagaman yang salah dalam masyarakat kita, seperti ekspresi

keberagaman yang masih bersifat eksklusif dan monolitik serta fanatisme untuk memonopoli kebenaran secara keliru. Celakanya, ekspresi keagamaan seperti itu merupakan hasil dari “pendidikan agama”. Pendidikan agama dipandang masih banyak memproduksi manusia yang memandang golongan lain (tidak seakidah) sebagai musuh.

Maka di sinilah perlunya menampilkan pendidikan agama yang fokusnya adalah bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, melainkan juga akhlak sosial dan kemanusiaan. Pendidikan agama, merupakan sarana yang sangat efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai atau aqidah inklusif pada peserta didik. Perbedaan agama di antara peserta didik bukanlah menjadi penghalang untuk bisa bergaul dan bersosialisasi diri. Justru pendidikan agama dengan peserta didik berbeda agama, dapat dijadikan sarana untuk menggali dan menemukan nilai-nilai keagamaan pada agamanya masing-masing sekaligus dapat mengenal tradisi agama orang lain.

Target pendidikan Islam harus berorientasi pada akhlak. Bahkan dalam pengajaran akidahnya, kalau perlu semua peserta didik disuruh merasakan jadi orang yang beragama lain atau atheis sekalipun. Tujuannya adalah bukan untuk “konfersi”, melainkan dalam rangka agar mereka mempertahankan iman. Sebab, akidah itu harus dipahami sendiri, bukan dengan cara taklid, taklid tidak dibenarkan dalam persoalan akidah.

Selain itu, pada masalah-masalah syaria’ah. Dalam persoalan syaria’ah, sering umat Islam juga berbeda pendapat dan bertengkar. Maka dalam hal ini pendidikan Islam perlu memberikan pelajaran “fiqih muqarran” untuk memberikan penjelasan adanya perbedaan pendapat dalam Islam dan semua pendapat itu sama-sama memiliki argumen, dan wajib bagi kita untuk menghormati. Sekolah tidak menentukan salah satu mazhab yang harus diikuti oleh peserta didik, pilihan mazhab terserah kepada mereka masing-masing. Melalui suasana pendidikan seperti itu, tentu saja akan terbangun suasana saling menenami dalam kehidupan beragama secara dewasa, tidak ada perbedaan yang berarti diantara “perbedaan” manusia yang pada realitasnya memang berbeda. Tidak dikenal superior ataupun inferior, serta memungkinkan terbentuknya suasana dialog yang memungkinkan untuk membuka wawasan spiritualitas baru tentang keagamaan dan keimanan masing-masing.

Pendidikan Islam harus memandang “iman”, yang dimiliki oleh setiap pemeluk agama, bersifat dialogis artinya iman itu bisa didialogkan antara Tuhan dan manusia dan antara sesama manusia. Iman merupakan pengalaman kemanusiaan ketika berinteraksi dengan-Nya (dengan begitu, bahwa yang

menghayati dan menyakini iman itu adalah manusia, dan bukannya Tuhan), dan pada tingkat tertentu iman itu bias didialogkan oleh manusia, antar sesama manusia dan dengan menggunakan bahasamanusia. Tujuan untuk menumbuhkan saling menghormati kepada semua manusia yang memiliki iman berbeda atau mazhab berbeda dalam beragama, salah satunya bis diajarkan lewat pendidikan akidah yang inklusif.

Dalam pembelajarannya, tentu saja memberikan perbandingan dengan akidah yang dimiliki oleh agama lain (perbandingan agama). Meminjam bahasanya Alex Roger, pendidikan akidah seperti itu mensyaratkan adanya *fairly and sensitively* dan bersikap terbuka (*open minded*)⁵⁸. Tentu saja, pengajaran agama seperti itu, sekaligus menuntut untuk bersikap “objektif” sekaligus “subjektif”. Objektif, maksudnya sadar bahwa membicarakan banyak iman secara fair itu tanpa harus meminta pertanyaan mengenai benar atau validnya suatu agama. Subjektif berarti sadar bahwa pengajaran seperti itu sifatnya hanyalah untuk mengantarkan setiap peserta didik memahami dan merasakansejauh mana keimana tentang suatu agama itu dapat dirasakan oleh orang yang memercayainya.

Melalui pengajaran akidah inklusif seperti itu, tentu saja bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman, karena hal itu adalah sesuatu yang absurd dan agak mengkhianati tradisi suatu agama. yang dicari adalah mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis oleh masing-masing agama. setiap agama mempunyai sisi ideal secara filosofis dan teologis, dan inilah yang dibanggakan penganut suatu agama, serta yang akan menjadikan mereka tetap bertahan, jika mereka mencari dasar rasional atas keimanan mereka.

Akan tetapi, agama juga mempunyai sisi real, yaitu suatu agama menyejarah dengan keagungan atau kesalahan-kesalahan yang biasa dinilai dari sudut pandang sebagai sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu, suatu dialog dalam perbandingan agama harus selalu mengandalkan kerendahan hati untuk membandingkan konsep-konsep ideal yang dimiliki agama lain yang hendak dibandingkan, dan realitas agama – baik yang agung atau yang memalukan – dengan realitas agama lain yang agung atau memalukan itu dengan demikian, akan dapat terhindar dari suatu penilai standar ganda dalam melihat agama lain.

⁵⁸ Rodger, Alex R., *Educational and Faith in Open Society*, Britain: The Handel Press, 1982 Hal: 61-62

Penutup

Krisis modernitas (*crisis of modernity*) merupakan fenomena dan realitas yang meruanglingkupi berbagai sektor kehidupan yang diakibatkan struktur modernitas itu sendiri. Modernitas merupakan istilah sekaligus konsepsi yang berpijak dari kata modern akar kata modernisme, modernisasi, modernis dan modernitas itu sendiri. Derivasi kata modern tersebut mengandung pengertian berbeda-beda namun punya kesamaan substansi dan esensi. Secara historis, kata modern di atas identik dengan kemajuan baik berupa ide atau gagasan dan pemikiran maupun merujuk ke dalam perangkat dan alat teknologis sebagai simbolitas kemajuan tersebut. Hal ini didasarkan bahwa produksi teknologi merupakan pencapaian akhir dari manifestasi pengetahuan yang bersifat rasional dan empiris serta positif. Hal ini dengan sendirinya mempertegas bahwa dari sekian bentuk ilmu pengetahuan, hanya ilmu-ilmu yang berkategori hard sciences yakni fisika, matematika dan lainnya yang paling berkontribusi melahirkan perangkat teknologis sebagai simbolisasi modernitas.

Islam sangat memperhatikan tentang *humanisme* atau memanusiakan manusia, hal ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur`an yang menjelaskan tentang manusia dari mulai penciptaan, potensi yang dimilikinya, perannya di muka bumi ini dan ditinggikannya derajat manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, tetapi humanisasi yang diterapkan dalam al-Qur`an tidak meninggalkan peran manusia di bumi ini sebagai hamba yang diwajibkan untuk mengabdikan kepada khaliknya.

Adapun paradigma pendidikan Islam *humanis* yang terdapat didalam al-Qur`an adalah; *pertama*, pendidikan merupakan salah satu aktifitas yang bertujuan mencari ridha Allah, *kedua*, adanya perbandingan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum, *ketiga*, kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan *keempat*, mengkaji ilmu pengetahuan yang membumi sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Islam adalah agama terbuka, tidak menutup diri, dan memberikan kebebasan berpikir bagi penganutnya, dan ajarannya mengajak penganutnya untuk senantiasa berinteraksi antar sesama manusia tanpa membedakan antara satu dengan yang lain serta menghimbau untuk senantiasa berdialog mencari kebenaran yang hakiki dengan pihak lain dan dilakukan secara baik-baik. Masyarakat yang majemuk (plural) dimana penduduk dari pelbagai latar belakang etnik, suku, bangsa dan agama berkumpul dan hidup bersama akan menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri yang perlu dijawab oleh masyarakat perkotaan dengan mengembangkan sifat-sifat yang cocok dengan

keadaan. Sifat-sifat yang cocok dengan keadaan masyarakat inilah yang dimaksud dengan masyarakat madani-multikultural dan tentu saja melibatkan sikap-sikap tertentu yang menjadi tuntutan masyarakat multikultural. Sikap-sikap tersebut antara lain meliputi inklusivisme, humanisme/egalitarianisme, toleransi, dan demokrasi.

Daftar Pustaka

- A Borsard, Marcel, Prof. Dr., *Humanisme dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990
- Achmadi, *Islam paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta : Aditya Media, 1992
- Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, kairo, 1969
- al-Baqi, Muhammad Fuad Abd, *al-Mu`jam al-Mufabrus li Alfadz al-Qur`an*, Beirut : Dar al-Fikr, 1997 M/1418H
- Banks, James, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, And Practice*, Review of Research in Education, 1993.
- Encarta, *World English Dictionary*, 1999, Microsoft Corporation Developed for Microsoft by Bloomsbury Publishing.
- Esack, Farid, *Qur'an, Liberation, and Pluralism*, Diterjemahkan oleh: Watung A. Budiman, Bandung: Mizan. 2000
- Fazlurrahman, *Islam*, Chicago : Chicago University Press, 1979
- Freire, Paulo, *"Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan"*, dalam *Menggugat Pendidikan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001
- Freire, Paulo, *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman (Pilihan Artikel Basis)*, Sindhunata (editor), Kanisius, 2001 sebagaimana di kutip dalam Resensi Amanat, Edisi 84/Februari 2001.
- Freire, Paulo, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & READ, 2002
- G. Burnett, *Varieties of Multicultural Education: An Introduction*, Eric Clearinghouse on Urban Education, Digest, 1994
- Gazalba, Didi, Drs., *Asas Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- H.A.R.Gibb, *Muhammadanism, A History Survey*, Oxford University Press, 1953
- Hasan, Karnadi *"Konsep Pendidikan Jawa"*, dalam *Jurnal Dinamika Islam dan Budaya Jawa*, No 3 tahun 2000, Pusat Pengkajian Islam Strategis, IAIN Walisongo Semarang, 2000
- Ismail,Faisal, *Masa Depan Pendidikan Islam*, Jakarta : Bakti Aksara Persada, 2003

- Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan dan Manusia, pendekatan Semantik terhadap al Qur'an*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997 dan *Konsep-konsep Etika Relegius*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993
- Lamont, Corliss, *The Philosophy of Humanism*, 1977
- Lamont, Corliss, *The Philosophy of Humanism*, 1977
- Mahfud, Choirul. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011
- Mas'ud, Abdurrahma, *Menggagas Format Pendekatan non Dikotomik, Humanisme Religius sebagai Paradigma*, Gema Mdia, September, 2002
- Mas'ud, Abdurrahman *Menggagas Pendidikan Nondikotomik*, Yogyakarta : Gama Media, 2002
- Muqtafa, M. Khoiril, *Paradigma Multikultural*, Sinar Harapan, CV. Bernews, 2002
- Nakosteen, Mehdi, *History of Islamic Origin of Western Education*, Colorado, 1964
- Nashir, Ja'far. *Respon Islam Terhadap Multikulturalisme*.
- Pals., Daniel L. *Seven Theories of Religion*. IRCiSoD: Yogyakarta, 2012
- Roberts, T. B., 1975. *Four Psychologies Applied to Education : Freudian, Behavioral, Humanistic, Transpersonal*. New York: Schenkman Pub. Co.
- Rodger, Alex R., 1982, *Educational and Faith in Open Society*, Britain: The Handel Press. 1982
- Rubiyad, Adib Dkk. *Islam dan Pluralisme*. Cirebon : Sekolah Tinggi Islam Negeri, 2009
- Samuel Bowles dan Herbert Gintis, *"Pendidikan Revolusioner" dalam Menggugat Pendidikan* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001
- Sealy, John, *Religious Education Philosophical Perspective*, London: George Allen & Unwin. 1986
- Tholkah, *Membuka Jendela Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo. 2004
- Yahya, Muhammad, *Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural*. Makassar : Jurnal Lentera Pendidikan, Vol 13 No. 2 Desember 2010
- Yusdani. *Fiqh Poitik Muslim*. Amara Books:Yogyakarta : 2011

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara 2000
www.jjnet.com/archives/documents/humanist.htm, Senin, 27 November 2016
jam 10.00
situs http://nashir6768.multiply.com/journal/item/1?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem,
Usein Muhammad. [Pluralisme dan Multikulturalisme Sebagai Masalah Pergulatan Tafsir Dalam Islam*](#). dapat diakses
melalui <http://www.gusdur.net/Opini/Detail/?>

ALQURAN DAN POLITIK

Oleh: Lukman A.

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam raya, karena-Nya kita mampu dan bisa membaca, berkarya bahkan menulis karya ilmiah, mengetahui dan memahami sesuat termasuk hal politik yang Islami. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kehidupan tidak terlepas dari kegiatan politik, agar perjalanan menuju masa depan yang lebih baik, kehidupan bermasyarakat terpelihara, sesuai arah yang direncanakan secara matang dan berkelanjutan. Maka tulisan ini berjudul: “Alquran dan Politik”, karena ada keinginan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya petunjuk Alquran berkaitan dengan politik. Seiring pula ketika tulisan ini dituliskan beberapa daerah sedang menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak di Indonesia.

Dalam kajian ini akan dibicarakan persepsi terhadap Alquran, mengingat begitu banyak dan beragamnya persepsi tentang Alquran. Kemudian politik Islami, karena Islam sejak awal telah mengenal politik, Rasulullah telah mengawali dan melaksanakan kegiatan politik. Lalu sejarah politik Islam, melihat bahwa Islam memiliki sejarah yang panjang terkait politik. Selanjutnya Alquran dan politik, merupakan sajian utama untuk mengetahui konsep Alquran terhadap politik. Akhirnya mengkaji Pentingnya Kekuasaan. Melalui kekuasaan dapat menata suatu negeri menata kearah yang diinginkan sang pemimpin dalam rangka Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghafur.

Persepsi Terhadap Alquran

Persepsi kaum Muslim terhadap Alquran; Pertama, di antara mereka ada yang menolak Alquran digunakan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Persepsi ini jelas akan menjadikan Alquran tak bedanya dengan lembaran kertas dengan tulisan-tulisan yang tak memiliki makna. Ini adalah persepsi yang absurd (konyol) alias keliru. Kedua, di antara mereka ada yang hanya mengambil Alquran sebatas petunjuk untuk mengatur masalah ibadah mahdhah dan sebatas nilai-nilai moral saja. Inilah persepsi kaum sekular. Ketiga, di antara mereka ada yang meyakini bahwa Alquran wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka meyakini bahwa saat Alquran diterapkan pada seluruh aspek kehidupan

pasti akan membawa kebaikan. (Chirzin dan RI 2018), Inilah yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Alquran: “Tidaklah Kami mengutus engkau (dengan membawa Alquran) kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta”. QS. 21: 107.

Mereka pun yakin bahwa saat kaum Muslim berpegang teguh pada Alquran, mereka tidak akan tersesat selamanya. Inilah janji Allah SWT dan Rasul-Nya:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah (Alquran) dan Sunnah Rasul-Nya, (HR al-Hakim). Menurut Mu'jam al-Ghani, kata at-tamassuk semakna dengan al-i'tisham. Maknanya, berpegang teguh dan menggenggam kuat agar tidak terlepas. Memaknai hadis di atas bisa dengan merujuk pada penjelasan mufassir tentang ayat i'tisham. Allah SWT, misalnya, berfirman dalam Alquran:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali (agama) Allah secara keseluruhan dan jangan bercerai-berai. QS. 2: 103.

Menurut Imam al-Baidhawidi dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud dengan “tali Allah” adalah Islam atau Kitab-Nya (Alquran). Jadi, berpegang teguh pada “tali Allah” berarti berpedoman pada Alquran. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW : Ingatlah. Sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara berharga. Salah satunya Kitabullah ‘Azza wa Jalla. Ia adalah tali Allah. Siapa yang mengikutinya, niscaya berada atas petunjuk. Siapa saja yang meninggalkannya, niscaya tersesat. (HR Muslim). Selanjutnya kata jami’[an] pada ayat di atas bermakna keseluruhan. Artinya, ayat di atas memerintahkan agar berpedoman pada Alquran secara total. Alquran tidak boleh diambil sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya.

Berdasarkan hal ini, jelas Alquran adalah pedoman hidup untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Alquran merupakan wahyu Allah yang Maha Agung dan “Bacaan Mulia” serta dapat diyakini serta dipedomani kebenarannya oleh siapa saja, sekalipun akan menghadapi

tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih dan rumit (sophisticated).

Kata pertama dalam wahyu pertama (the first revelation), bahkan menyuruh manusia membaca dan menulis, membaca (iqra) lebih jauh dijabarkan sebagai usaha menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seperti melalui komputer, whatsapp, facebook, youtube, twitter, faxsimile dan lain-lain. Adalah hal yang sangat mengagumkan bagi para ilmuwan yang bertahun-tahun melaksanakan penelitian di laboratorium. Mereka menemukan keserasian antara ilmu pengetahuan hasil penelitian mereka, dengan pernyataan-pernyataan Alquran dalam ayat-ayatnya. Ayat itu sendiri dalam bahasa Arab berarti “tanda” maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sehingga dengan demikian ada dua jenis ayat yaitu yang ada di alam raya, dan yang ada di dalam Alquran. Kedua jenis ayat tersebut sangat erat signifikansinya. Jadi tepatlah kiranya bila para pakar mengatakan bahwa khusus untuk agama Islam, kitab sucinya yang bernama Alquran sama sekali tidak menghambat perkembangan ilmu bahkan sebaliknya mendorong perkembangan setiap disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri termasuk ilmu politik (as siyasah). (Chirzin dan RI 2018).

Setiap ilmuwan yang melakukan penemuan pembuktian ilmiah tentang hubungan Alquran dengan ilmu pengetahuan akan menyuburkan perasaan yang pada gilirannya melahirkan keimanan kepada Allah SWT serta dorongan kepada kehendak-Nya. Tidak pada tempatnya lagi orang-orang memisahkan ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial dengan segala cabangnya terhadap ilmu-ilmu Alquran. Para ilmuwan dapat sekuler tetapi ilmu pengetahuan itu sendiri tidak sekuler.

Bila penyelidikan tentang alam raya ini adalah ilmiah, mana mungkin Penciptaan alam raya itu sendiri tidak ilmiah. Bila percampuran dan persenyawaan unsur-unsur adalah ilmiah, mana mungkin Pencipta setiap unsur itu sendiri tidak ilmiah. Bila pengaturan alam raya ini mulai dari atom yang terkecil sampai planet yang terbesar adalah ilmiah, mana mungkin Pengatur alam raya itu sendiri tidak ilmiah. Begitu pula bila pembicaraan hal-hal kenegaraan adalah ilmiah, mana mungkin Pencipta perbedaan watak individu yang menjadikan beraneka ragam ideologi itu tidak ilmiah.

Alquran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa persatuan umat Islam sedunia. Pribadatan dilakukan dalam bahasa Arab, sehingga menimbulkan kesatuan yang dapat dilihat pada waktu shalat jamaah dan ibadah haji. Selain dari itu bahasa Arab tidak berubah. Jadi sangat mudah diketahui bila Alquran hendak ditambah atau dikurangi. Banyak orang buta burup terhadap bahasa nasionalnya, tetapi mahir membaca Alquran (mengaji) bahkan sanggup menghafal Alquran secara keseluruhan.

Alquran tidak lain adalah peringatan bagi seluruh umat manusia (bangsa-bangsa), Alquran dalam bahasa aslinya Arab mempunyai daya tarik tersendiri dan keindahan yang deduktif, didapatkan dalam gayanya yang singkat tetapi cemerlang, bertenaga ekspresip, berenergi eksplosif dan bermakna kata demi kata. Dalam Alquran ada 854 ayat-ayat yang menanyakan mengapa manusia tidak mempergunakan akal (afala ta'kilun), yang menyuruh manusia bertafakur memikirkan (tafakarun) terhadap Alquran dan alam semesta, serta menyuruh manusia mencari ilmu pengetahuan.

Jadi kata yang identik dengan akal dalam Alquran disebut 49 kali, seperti kata "yatadabbarun" dan kata "yatazakkarun", kata yang menganjurkan manusia menjadi ahli pikir, para sarjana para ilmuwan dan para pakar serta intelektual Islam, (ulul albab) dalam Alquran disebut 16 kali, sehingga jumlah keseluruhan seperti disebutkan di atas 854 kali. ("Mengenal Jumlah Hitungan Ayat dalam Al-Qur'an - Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an" t.t.) Perhatikan ayat-ayat berikut ini: "... maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui". QS. 16: 43. "Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Kitab kepada mereka, Kami jelaskan atas dasar ilmu pengetahuan...". QS. 7: 52. "...Dan perumpamaan ini Kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu". QS. 29:43. "...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...". QS. 58: 11. "Allah telah menciptakan bumi dan langit dengan kebenaran mutlak. Sungguh dalam hal yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang beriman". QS. 29:44. "...dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata: "Kami beriman kepada Kitab, semua itu datang dari Tuhan kami" Dan tidak mengambil pelajaran (dari padanya) melainkan orang-orang berakal". QS. 3:7.

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti, apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. QS. 39:18. Agar mudah dipahami Alquran tidak diwahyukan sekaligus tetapi berangsur-angsur, bahkan dalam jarak waktu yang tidak teratur, yang jumlah lamanya 22 tahun 2 bulan 22 hari. (iqshalauddin 2020)

Alquran terdiri dari 30 juz dan 114 surat, setiap surat masing-masing diberi nama, yaitu satu atau lebih nama untuk setiap surat, yang susunannya (tata letak), batas-batasnya, ayat-ayatnya adalah atas petunjuk langsung dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Selain itu Alquran dibagi pula atas 60 Hizb dan 554 Ruku', surat yang panjang terdiri dari beberapa Ruku' sedang yang pendek terdiri dari satu Ruku'. (iqshalauddin 2020)

Untuk batasan dalam hafalan dan amal ibadah (misalnya untuk bacaan dalam ibadah sembahyang) Alquran diberikan batas-batas pada setiap setengah, sepertiga, seperlima, septujuh, sepersembilan bagian Alquran dan seterusnya. Pertengahan Alquran (nishful Quran) yang terdapat pada surat 18 ayat 19, disebut Walyatalaththaf.

Walau bangsa Arab awal turun Alquran sebagian buta huruf tetapi mereka terkenal memiliki daya ingat yang kuat, sebab mereka terbiasa meriwayatkan syair-syair dari para pujangga dan menghafal silsilah keturunan. Dan Nabi Muhammad SAW selalu menyuruh menghafalnya bila tiap-tiap ayat diturunkan dan menuliskannya pada daun lontar, batu yang tipis dan licin, kulit binatang, pelepah tamar (kurma), tanah kering, tulang unta dan tulang kambing serta lain-lain yang bisa ditulis kepada yang bisa menulis, sehingga Alquran dihafal oleh ribuan orang. Nabi menganjurkan Alquran itu selalu dibaca dan diwajibkan membacanya dalam sembahyang. Dengan jalan begitu Surat yang satu macam dihafal oleh ribuan orang bahkan hafal sama sekali pun banyak orang sanggup, dari dahulu sampai sekarang ini.

Dalam pada itu tidak satu pun ayat Alquran yang tidak dituliskan. Penulis-penulis Nabi Muhammad SAW yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat baik Kaum Anshar (Madinah) maupun dari Kaum Muhajirin (mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah) sepakat memilih Abu Bakar menjadi Khalifah (Kepala Negara). Pada masa pemerintahan beliaulah banyak

penghafal Alquran yang gugur karena peperangan. Umar bin Khatab khawatir, karena itu mengusulkan agar Alquran dikumpulkan setiap kepingan dan helainya itu. Abu Bakar menjawab: “Mengapa akan melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi”. Tetapi sambut Umar bin Khatab: “Demi Allah, inilah perbuatan yang mulia”. Dengan alasan yang berulang-ulang disampaikan akhirnya usaha tersebut disepakati.

Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan Alquran kemudian dibukukan, oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit, karena beliau memang terkenal sebagai sekretaris Nabi Muhammad SAW yang setia, semasa Nabi hidup. Anggota Tim lain adalah Abdullah bin Zubair, Sa’id bin Ash dan Abdur Rahman bin Harits bin Hisyam.

Tetapi sebagaimana dengan kemungkinan adanya kesalahan penulisan dan subjektivitas penulis, jawabnya adalah sebagai berikut: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Alquran, dan sesungguhnya Kami tetap memeliharanya”. QS. 15:9. Paparan di atas memberi pemahaman bahwa Alquran sama sekali tidak bertentangan dengan politik, bahkan sangat dianjurkan dalam berpolitik mempedomani Alquran.

Politik Islami

Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah poks, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politik memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Arti lain kata politik, dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan policy, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang

pemimpin. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum; pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasaan dan wewenang memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (polity); dan distribusi atau alokasi sumber daya. (yunialhumaira 2014)

Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyat. Boleh dikatakan Negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakannya.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat, jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publikasi dari suatu Negara.

Kebijakan Umum

Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.

Distribusi

Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Dari berbagai sudut pandang pemahaman politik, pengertian-pengertian di atas dapat saling melengkapi dan memperluas wacana tentang politik. (“Asosiasi Ilmu Politik Indonesia - AIPI - Sekelumit DR. ALFIAN” t.t.)

Agama Islam tidak melarang berpolitik, namun Islam menganjurkan dalam berpolitik harus mempedomani Alquran, politik yang beretika, beradab dan santun, Sugianto Sabran mengatakan; “Meski bukan santri yang lulusan pesantren, namun sikap-sikap santri patut dicontoh dengan mendorong politik santun, menegakkan politik beradab, dan berakhlakul karimah,” Sugianto menyebutkan banyak nilai-nilai santri yang patut diterapkan dalam kehidupan berpolitik. (“Politik Santun ala Santri Harus Jadi Contoh - Medcom.id” t.t.)

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyebutkan, Muhammadiyah sangat kehilangan satu figur ulama santun, pada waktu Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., MA, meminggal dunia 2 Januari 2019. Selain itu, almarhum dikenal sangat menjunjung akhlak mulia. Beliau rutin mengajar tafsir di gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Jakarta serta dikenal ringan hati untuk memberi pengajian ke manapun. Almarhum sering mengatakan “Mari dalam hidup berbangsa mengedepankan sikap santun” karena sikap santun akan membawa kedamaian dan kesejukan. (“Haedar: Muhammadiyah Kehilangan Figur Ulama Santun | Republika Online” t.t.) Mengutip pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, definisi santri sangat luas. santri tidak harus lulusan pesantren. Intinya umat yang menerima ajaran Islam dari para kiyai melalui sanad dan silsilah guru-gurunya yang terhubung sampai Rasulullah SAW. (antaranews.com 2018).

Menghormati para ulama, orang tua, menyayangi anak-anak kecil, dan membangkitkan generasi milenial agar terus berkarya, dan berjuang sesuai minat dan keahlian serta mengedepankan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin," merupakan ajaran Islam yang harus dipelihara. ("Pilpres 2019 Tinggal Menghitung Hari, Ustadz Adi Hidayat Bongkar Capres Pilihan UAH dan UAS - Serambi Indonesia" t.t.) Dalam perayaan Hari Santri, Sugianto bertemu dengan Ustadz Abdul Somad (UAS). Pertemuan tersebut selain silaturahmi dengan para ulama, tokoh-tokoh umat, pemuka NU, dan Muhammadiyah serta elite politik, juga bermakna politik dalam Islam, komunikasih tentang keummatan.

Sebagai kaum beragama dan beradab, maka hari Santri menjadi peristiwa kebudayaan yang perlu dimaknai secara mendalam," kata Sugianto lebih lanjut. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad (UAS) mengatakan silaturahmi kepada para ulama sangat penting. Dia juga meminta semua pihak jangan melupakan jasa perjuangan santri memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda. Tokoh muslim KH. Mohammad Hasyim Asy'ari, menggelorakan semangat santri untuk melawan Belanda dan membela negara adalah jihad sehingga santri langsung turun untuk memperjuangkan kemerdekaan". ("Politik Santun ala Santri Harus Jadi Contoh - Medcom.id" t.t.)

Sejarah Politik Islam

Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun ke enam hijriah, telah terjadi Perjanjian Hudaibiyah yang waktu itu terjadi antara kaum Muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan Kafir Quraisy Makkah, Perjanjian itu terjadi dikarenakan ketika Rasulullah SAW akan ber haji ke Makkah akan tetapi tidak di perbolehkan oleh pemimpin kaum Musyrikin dan tertahan lah Rasulullah SAW dengan kaum Muslimin di kota Hudaibiyah yang jaraknya hanya beberapa mil dari kota Makkah, ketika itu terjadi satu kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan pemimpin kaum Musyrikin yang isinya adalah: kesepakatan genjatan senjata dan kaum Muslimin harus menunda umrah dengan kembali ke Madinah, tetapi tahun depan diberikan kebebasan melakukan umrah dan tinggal selama tiga hari di Makkah. Rasulullah menyetujui perjanjian ini meskipun para sahabat banyak yang kecewa, namun tidak ada yang berani menentang keputusan Junjungan mereka.

Sepintas isi perjanjian kelihatannya merugikan kaum Muslimin, tetapi secara politis sangat menguntungkan. “Perjanjian Hudaibiyah” merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam sebab untuk pertama kalinya kaum Quraisy di Makkah mengakui kedaulatan kaum Muslimin di Madinah. Politik apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mensiasati perjanjian tersebut yang dimana setelah perjanjian tersebut berlaku, kaum Muslim diperbolehkan untuk datang ke Makkah dan begitupun juga kaum Musyrikin bebas untuk datang ke Madinah, coba perhatikan:

Rasulullah SAW, sengaja mengirim kaum Muslimin yang berkualitas dan kuat datang ke Makkah untuk melakukan dakwah di Makkah terhadap kaum Musyrikin dan lambat laun, kaum Muslimin di Makkah membuat satu kekuatan di Makkah. Setiap kaum Musyrikin yang datang ke Madinah, oleh Rasulullah SAW dan umat Muslim di sambut dengan sangat antusias, ramah dan santun yang bertujuan mendakwahi mereka untuk bisa mengenal Islam dan membiarkan mereka kembali ke Makkah yang tentunya mereka sudah di bekali pengetahuan tentang Islam, bahkan kembalinya mereka ke Makkah mereka sudah banyak yang memeluk agama Islam, dan pada akhirnya lambat laun penduduk Makkah sangat banyak sekali yang masuk Islam, hingga penaklukan kota Makkah tidak dengan cara perang tetapi dengan politik Rasulullah SAW dalam mensiasati isi perjanjian Hudaibiyah tersebut, meskipun awalnya secara sepintas isi perjanjian tersebut merugikan kaum Muslim, di situlah cerdasnya Muhammad Rasulullah SAW yang setiap pemikiran dan segala tindakannya di bimbing oleh wahyu Allah SWT, (Tapak Tilas Kepemimpinan dalam Islam). (Zuhri 2002)

Islam dalam peradaban sejarah, lahir dan berkembang di wilayah Jazirah Arab, dimana tatanan kultur sosial masyarakatnya masih menganut kepercayaan Paganisme. Sifat yang keras dan persaingan antar suku atau golongan, merupakan ciri khas bagi bangsa-bangsa di Jazirah Arabiah tersebut. Lahirnya Islam yang dibawa oleh Muhammad, membawa pengaruh signifikan terhadap perubahan tatanan kehidupan dan budaya sosial masyarakat Arab. Pada masa pra kenabian, Muhammad telah memiliki sifat-sifat mulia yang ada pada dirinya. Sifat-sifat tersebut menjadi dasar bagi sebagian masyarakat, untuk dapat menerima kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad pasca ia di angkat menjadi Nabi dan Rasul.

Selama lebih kurang 11 tahun Rasulullah berjuang di Makkah bersama para sahabat Muslim yang telah memeluk Islam, tidak memperoleh pengikut yang banyak, bahkan Rasulullah dan umat Muslim lainnya yang tergolong kelompok minoritas, mendapatkan kecaman, tantangan dan juga tekanan dari kelompok kafir yang ada di Makkah. Karena itu, Rasulullah bersama para sahabat dan umat Muslim yang ada di Makkah, melakukan hijrah ke Yastrib. Hijrah inilah yang menjadi titik awal perkembangan Islam yang semula hanya merupakan komunitas sosial lemah, menjadi suatu komunitas umat yang kuat dan kokoh serta berdiri sendiri. Rasulullah sendiri menjadi pemimpin bagi komunitas yang baru dibentuk tersebut yang dengan segera akhirnya menjadi suatu Negara. (“PERADABAN ISLAM NUSANTARA (KAJIAN SASTRA SUFI MELAYU) | Ismail | Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam” t.t.)

Dalam sejarah politik Islam, Madinah merupakan negara Islam pertama yang terbentuk. Hal ini dinyatakan oleh D. B. MacDonald, sebagaimana yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan, (1996, hal. 2) bahwa; “di sini Madinah telah terbentuk negara Islam pertama dan telah diletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam”. Selanjutnya, masih dalam buku Suyuthi Pulungan, pernyataan D. B. MacDonald ini, diperkuat oleh Fazlur Rahman yang membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat Muslim.

Di masa Rasulullah, pemerintahan negara Madinah dipegang sepenuhnya oleh Rasulullah dan dibantu oleh para sahabat yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nabi Muhammad yang bersamaan pada waktu yang sama disebut sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik atau kepala negara, memainkan peranan pentingnya selaku seorang birokrat pemerintahan, yakni seorang kepala pemerintah, dengan kata lain dalam diri Rasulullah terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Dengan demikian, kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara. (“MAKALAH TUGAS AGAMA : POLITIK DALAM ISLAM” t.t.) Dalam hal ini, lebih lanjut Murtadha Muthahhari mengatakan: “sesungguhnya ada tiga kedudukan berbeda yang khusus dimiliki oleh Rasulullah. Kedudukan pertama ialah kenabian atau kerasulan, yakni kedudukan sebagai pembawa dan penyampai hukum-hukum Allah SWT yang diwahyukan kepada beliau. Kedudukan kedua ialah sebagai penentu dan pemutus hukum. Kedudukan ini

mewajibkan kepada Nabi untuk menegakkan kebenaran bila terjadi pertentangan dan perselisihan di antara manusia dengan bersandar pada suatu hukum. Untuk itu, Rasulullah berhak menjadi hakim di tengah-tengah manusia. Kedudukan ketiga ialah sebagai penguasa dan memegang kendali pemerintahan. Dari ketiga kedudukan tersebut yang dimiliki oleh Nabi, kedudukan pertama tidak mungkin akan tergantikan oleh siapapun setelah Rasulullah wafat, karena beliau adalah penutup para Nabi. Sedangkan dua dari kedudukan yang tersebut terakhir, yaitu kedudukan beliau sebagai penentu hukum dan sebagai penguasa atau pemimpin ummat setelah Rasulullah wafat, tidak ikut terkubur. Hal ini disebabkan manusia tetap memerlukan seorang pemberi keputusan (hakim) juga seorang pemimpin yang arif dan bijaksana untuk memimpin ummat. (Murthada Muthahhari, 2006). Kedudukan Rasulullah sebagai seorang pemimpin, secara teknis telah mendapat legitimasi oleh rakyat Madinah dikala itu sebagai kepala negara tanpa harus melalui pemilihan terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana praktik yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Proses pengangkatan Rasulullah sebagai pemimpin atau kepala negara bukan berdasarkan wahyu dari Allah SWT, akan tetapi berdasarkan atas kesepakatan yang disebut dengan perjanjian, yang dalam kajian ilmu politik, hal ini disebut dengan “kontrak sosial”. Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian antara penduduk Yastrib (Madinah) dengan Rasulullah yang dikenal dengan perjanjian Aqobah, yang terjadi pada tahun 621 M dan 622 M. (Zuhri 2002)

Hal tersebut dapat dipahami, di mana pernah terjadi kontrak politik antara Nabi dan masyarakat Madinah yang menginginkan Rasulullah dan ummat Islam Mekkah untuk segera melakukan hijrah ke Madinah. Beberapa orang dari penduduk Yastrib (penyebutan bagi Madinah sebelum Nabi hijrah) yang berasal dari suku Khazraj dan Aus datang untuk melaksanakan Haji dan kemudian bertemu dengan Rasulullah, mereka merasa terkesan dengan setiap tutur kata Rasulullah. (Alimuddin Hassan Palawa, 2006). Pertemuan itulah yang menjadi awal dari interaksi Rasulullah dengan para penduduk Madinah.

Peristiwa ini berlangsung dalam tiga tahap, pada tahap pertama, kedatangan mereka adalah untuk menunaikan ibadah haji yang pada waktu itu secara kebetulan bertemu dengan Rasulullah, dan menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tahap kedua, kedatangan utusan penduduk Yastrib yang berjumlah 13 (tiga belas) orang, menyatakan bai'at atau janji setia kepada

Rasulullah di suatu tempat yang bernama Aqabah. Peristiwa ini dikenal dengan “perjanjian Aqabah pertama”. Terakhir, tahap ketiga, yang terakhir ini delegasi penduduk Yastrib datang menghadap Rasulullah dengan membawa 73 (tujuh puluh tiga) orang, pada kesempatan ini mereka meminta Rasulullah untuk segera melakukan hijrah ke Yastrib dan mereka menyatakan janji setia dan bersedia untuk membela Rasulullah dari berbagai ancaman. Peristiwa tersebut dikenal dengan “perjanjian Aqabah kedua”. (Badri Yatim, 2002).

Dengan adanya peristiwa Aqabah ini, secara tidak langsung Rasulullah mendapat bai'at dari penduduk Madinah kala itu, yang di wakili oleh beberapa orang yang menjadi delegasi untuk menghadap Rasulullah. Delegasi itu sendiri tidak hanya dari satu golongan yang ada di Madinah, di antara mereka terdiri dari golongan ‘Aus dan Khazraj ditambah satu orang wanita, mereka mengatasnamakan penduduk Yastrib secara keseluruhan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Badri Yatim di atas. Ini bermakna bahwa Rasulullah sendiri telah memperoleh pengakuan kepemimpinan dari ummat Islam secara keseluruhan untuk mengatur dan mengurus segala macam persoalan keummatan.

Sebagai seorang pemimpin ummat, Rasulullah dengan segera menjadikan komunitas ummat Muslim menjadi suatu pemerintahan Islam yang mandiri dan berkedaulatan. Rasulullah meletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam. Rasulullah sendiri tampil dalam dua fungsi kepemimpinan utama yang melekat pada dirinya, disatu sisi ia merupakan pemimpin religius karena posisinya sebagai Nabi dan Rasul Allah SWT, dan di sisi lain ia juga bertindak sebagai pemimpin ummat Islam Madinah yang notabeneanya merupakan masyarakat majemuk dan pluralis. Karena penduduk Madinah saat itu, terdiri dari berbagai golongan yang berbeda, di dalamnya terdapat golongan Muhajirin, Anshar dan golongan lainnya yang berada di dalam kekuasaan Islam, yaitu golongan Yahudi dan Nashrani. Maka dari itu, Rasulullah melakukan langkah-langkah untuk dapat mempersatukan ummat Muslim dengan cara mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, langkah ini dianggap sebagai langkah efektif untuk membina ukhuwah Islamiyah di dalam Islam. Langkah kedua adalah merancang dan menetapkan perjanjian tertulis yang juga merupakan prinsip-prinsip kemasyarakatan yang harus dipatuhi oleh setiap pribadi orang yang berada di Madinah. Hal ini bertujuan untuk mempersatukan semua golongan yang heterogen di Madinah, sehingga akan tercipta keamanan dan kenyamanan antar golongan. Dalam tata Negara

modern, langkah-langkah tersebut merupakan fondasi awal terbentuknya kenegaraan dan pemerintahan di dalam Islam.

Selaku pemimpin ummat, Rasulullah telah berhasil menciptakan suatu komunitas masyarakat sosial politik. Sepanjang kepemimpinan Rasulullah di Madinah beliau telah menjadikan Negara Islam menjadi suatu Negara besar yang memiliki kekuasaan wilayah yang luas, fundamen politik yang kokoh, menetapkan aturan-aturan yang jelas bagi kehidupan masyarakat Madinah dengan mengikatnya melalui undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Pasca wafatnya Rasulullah, terjadi transisi kekuasaan dalam pemerintahan Islam. Sebelum meninggal dunia, Rasulullah tidak pernah menunjuk penggantinya sebagai kepala negara selanjutnya, bahkan Rasulullah juga tidak memberikan suatu aturan atau mekanisme pemilihan untuk memilih pemimpin pengganti beliau. Tidak satupun ayat maupun hadis yang menjelaskan bagaimana mekanisme untuk memilih seorang khalifah.

Kemudian, karena tidak adanya petunjuk dari Rasulullah untuk menentukan kepemimpinan beliau, maka ummat Muslim berinisiatif untuk mengadakan pertemuan yang bertempat di Balai Saqifah milik Bani Sa'adah. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari golongan Muhajriin dan golongan Anshar, di mana dalam pertemuan itu mereka bermusyawarah untuk mencari seorang pemimpin pengganti Rasulullah. Dalam pertemuan itu terjadilah konfrontasi antar golongan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Masing-masing menginginkan calon dari golongan mereka yang berhak menjadi khalifah Rasulullah. Ketegangan antar kelompok di Bani Saqifah segera diketahui oleh Umar ibn Khattab dan langsung diberitakan kepada Abu Bakar ash-Shiddiq, mereka khawatir akan terjadi perpecahan antar golongan. Abu Bakar beserta Umar ibn Khattab dan Abu Ubaidah ibn Jarrah langsung berangkat menuju ke pertemuan tersebut. Sesampainya Abu Bakar di sana, beliau segera memberikan solusi dari konflik yang sedang terjadi. Akhirnya, dengan kearifan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, peserta pertemuan tersebut menjadi tenang, ketegangan antar kelompok pun menjadi reda dan mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar ash-Shiddiq serta membai'atnya menjadi pemimpin ummat sebagai Khalifah Rasulullah. (Thaba, 2013).

Dari paparan historis di atas tergambar bahwa pertemuan politik itu merupakan implementasi dari ayat al-Quran tentang Syura, bahwa ummat Islam diperintahkan untuk bermusyawarah dan menyelesaikan urusan yang mereka

hadapi. Forum musyawarah itu berlangsung hangat, terbuka dan demokratis. Dalam hal ini D.B. Macdonald berkomentar, bahwa dalam forum musyawarah tersebut dapat disebut sebagai forum politik di mana di dalamnya terjadi diskusi dan dialog yang sesuai dengan cara-cara modern (Pulungan, 2002, hal. 106). Terpilihnya Abu Bakar pada waktu itu, merupakan pemilihan pemimpin pertama dalam sejarah politik Islam, dalam pemilihan tersebut terdapat dua kelompok besar yang melewati proses musyawarah untuk menentukan pemimpin pengganti Rasulullah.

Selanjutnya, ketika Abu Bakar ash-Shiddiq mulai menunjukkan gejala kesehatan yang semakin memburuk dan ajal kian dekat, maka Abu Bakar mengajak beberapa orang dari shahabat senior untuk bermusyawarah. Abu Bakar mengkonsultasikan kepada shahabat senior mengenai khalifah pengganti dirinya setelah ia wafat. Adapun para sahabat dari kaum Muhajirin yang diajak berkonsultasi adalah Usman ibn Affan dan Abdurrahman ibn Auf, sedangkan dari kaum Anshar adalah Asid ibn Khudair (Thaba 1996, hal. 103).

Dari hasil konsultasi tersebut, Abu Bakar menunjuk penggantinya, yaitu Umar Ibn Khattab. Alasan Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab sebagai khalifah selanjutnya, yaitu pertama, pada waktu itu, ekspansi wilayah kekuasaan Islam sudah meluas ke semenanjung Arab bahkan telah mulai meluas keluar Jazirah Arab dengan berperang dalam dua front yang berbeda melawan kaum Persia dan Romawi, Abu Bakar khawatir jika nantinya dalam keadaan genting tersebut persatuan dan kesatuan umat akan terpecah; kedua, Abu Bakar memandang dengan menunjuk penggantinya, merupakan cara yang paling tepat demi kemashlahatan umat, sehingga perselisihan antar golongan yang pernah terjadi di Bani Saidah tidak akan terulang kembali. Sekali lagi perlu dipertegas di sini, bahwa Penunjukan Abu Bakar kepada Umar ibn Khattab sebagai khalifah kedua setelah Rasulullah tidaklah serta merta berdasarkan keinginan pribadi Abu Bakar sendiri. Beliau telah terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan para shahabat senior atau orang-orang yang memang memiliki kualifikasi permusyawaratan. (Amin Rais, 2001).

Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar yang menunjuk pengganti dirinya, Umar ibn Khattab, ketika mendekati waktu kematiannya, para shahabat segera mendesak Umar ibn Khattab untuk menunjuk penggantinya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar, namun Umar menolak hal tersebut.

Maka dengan inisiatifnya sendiri Umar ibn Khattab lalu membentuk Team Formatur (ahl al-syura) yang terdiri dari enam orang sahabat, yaitu Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan, Saad ibn Abi Waqas, Abdur Rahman ibn Auf, Zubair ibn Awwam, Thalhah ibn Ubaidillah, sementara Abdullah ibn Umar (putra Umar ibn Khattab) menjadi anggota tanpa suara. Pembentukan Formatur ini merupakan jalan tengah yang efektif atas desakan dari para sahabat. Para sahabat merasa khawatir akan sakit yang dialami oleh Umar akibat ditikam oleh Abu Lu'luah akan menyebabkan kematian yang mendadak bagi Umar ibn Khattab, sedangkan pengganti beliau belum ada, maka jika itu terjadi ditakutkan akan terjadi perpecahan kembali dikalangan ummat karena kekosongan kekuasaan seperti yang pernah terjadi di Bani Saqifah.

Mekanisme pemilihan yang telah diatur oleh Umar ibn Khattab adalah sebagai berikut: Formatur ini harus memilih khalifah selambatnya tiga hari setelah Umar meninggal dunia. Penentuan khalifah harus melalui musyawarah. Jika empat sampai lima orang menyepakati sebuah nama, sedangkan satu sampai dua orang lainnya menolak dan ia tidak bisa disadarkan, maka hendaknya semua berusaha menyadarkannya. Jika suara berimbang, mereka harus menanyakan pemecahannya kepada Abdullah ibn Umar. Siapapun yang didukung oleh Abdullah ibn Umar, dialah yang menjadi khalifah. Namun jika mereka tidak mengikut sertakan Abdullah ibn Umar maka, pihak yang dipilih oleh Abdur Rahman ibn Auf lah yang harus diterima. Bila ada yang menentang maka hendaklah dibunuh. (Abdul Aziz, 2000).

Dari pemilihan tersebut disepakatilah satu nama yang akan menggantikan Umar ibn Khatab menjadi khalifah yaitu Utsman ibn Affan. Berbeda lagi dengan mekanisme pemilihan setelah wafatnya Utsman ibn Affan. Sepeninggal Utsman ibn Affan akibat terbunuh oleh kelompok pemberontak yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh khalifah Utsman ibn Affan, beliau tidak sempat menunjuk penggantinya seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar atau membentuk team formatur sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Kematian yang tidak terduga sama sekali, tanpa meninggalkan wasiat mengenai mekanisme pemilihan, ditambah lagi selama beliau menjadi khalifah, banyak yang tidak suka terhadap cara-cara maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuatnya, yang pada akhirnya muncul kaum-kaum pemberontak yang memusuhi Utsman ibn Affan. Ditambah dengan munculnya penyebar fitnah keburukan Utsman ibn Affan, kondisi ini semakin memperburuk kondisi

ummat yang sudah terpecah-pecah. Klimak dari kondisi ini semua, ditandai dengan timbulnya pemberontakan oleh ribuan orang dari Kuffah, Bashrah dan Mesir yang datang ke Madinah secara bersamaan. Mereka mengepung kota dan kediaman Utsman ibn Affan, dan akhirnya Utsman ibn Affan berhasil mereka bunuh ketika sedang membaca Al-Qur'an. ("PERADABAN ISLAM NUSANTARA (KAJIAN SASTRA SUFI MELAYU) | Ismail | Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam" t.t.)

Berkaitan dengan kekhalfahan Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah keempat Rasulullah, sesungguhnya berlangsung dalam kondisi yang tidak baik. Ali ibn Abi Thalib menjadi pemimpin pengganti Utsman ibn Affan tidak melalui proses pemilihan seperti yang terjadi pada masa Abu Bakar, Umar ibn Khattab dan Utsman ibn Affan, akan tetapi melalui pembaitan langsung oleh para pemberontak dari penduduk Madinah, kecuali sekelompok kalangan shahabat senior yang menolak. Di antara yang ikut memba'iat adalah sekelompok pemberontak yang menentang Utsman dan sebagian di antara mereka yang ikut bertanggung jawab atas kematian Utsman. Pembai'atan Ali Juga didukung oleh masyarakat Hijaz dan Irak, tetapi masyarakat Syam di bawah pimpinan Muawiyah menolak untuk memba'at. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang menentang pembai'atan Ali ibn Abi Thalib menganggap kekhalfahan Ali tidaklah sah dan mereka menuntut hukum Qishash terhadap pembunuh Utsman ibn Affan. (Hamka,1996).

Berbagai kekacauan yang terjadi di masa kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib, ummat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok yang saling membenci kelompok lainnya. Kelompok tersebut berasal dari keluarga Muawiyah dan dari golongan 'Aisyah. Seiring waktu, masing-masing kelompok saling menyerang, sehingga pada akhirnya terjadi perundingan damai yang dikenal dengan peristiwa Tahkim (arbitrase) atas permintaan Muawiyah yang merupakan siasat dari Amr ibn Ash. Namun realitanya, hasil dari tahkim ini bukan menyelesaikan masalah dan terwujudnya perdamaian, melainkan memunculkan dualisme pemerintahan. Dengan berbagai intrik politik yang dilancarkan oleh Muawiyah dan kelompoknya, mengakibatkan Ali kehilangan kekuasaannya. Atas rekayasa yang dibuat oleh Amr ibn Ash, Ali diberhentikan dari jabatannya sebagai khalifah dan mengangkat Muawiyah sebagai Khalifah. Kendati demikian, sebagian besar ummat yang merupakan pengikut setia Ali, tetap mengakui Ali sebagai Khalifah. ("PERADABAN ISLAM NUSANTARA (KAJIAN SASTRA

SUFI MELAYU) | Ismail | Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam” t.t.)

Pasca peristiwa tahkim tersebut, beberapa bulan kemudian Muawiyah diproklamasikan menjadi khalifah. Dengan demikian, kekhalifahan ummat Islam berpindah kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Perubahan utama yang terjadi dalam pemerintahan Muawiyah adalah perubahan pada bentuk sistem pemerintahan, dari bentuk khalifah yang bercorak demokratis menjadi sistem monarki dengan mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota menjadi khalifah selanjutnya untuk menggantikan kedudukannya. Hal ini berarti suksesi kepemimpinan berlangsung secara turun temurun. Inilah pertama kali dunia Islam mempraktikkan sistem monarki dalam sistem kenegaraan, dengan demikian ia telah mengawali perubahan tradisi era Khulafah Rasyidin, di mana khalifah dipilih dan ditetapkan melalui pemilihan ummat, yang berarti juga Muawiyah telah meninggalkan prinsip musyawarah dan melanggar ketentuan yang telah ada di dalam nash Alquran agar setiap urusan diputuskan melalui musyawarah. (“PERADABAN ISLAM NUSANTARA (KAJIAN SASTRA SUFI MELAYU) | Ismail | Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam” t.t.)

Alquran dan Politik

Diskusi seputar ruang lingkup pengamalan Alquran membawa perdebatan hingga saat ini. Terutama saat Alquran dikaitkan dengan politik. Ada yang menolak sama sekali Alquran dikaitkan dengan politik. Ada yang mengatakan Alquran dapat dikaitkan dengan politik, tetapi sebatas nilai-nilainya saja. Ada pula yang tegas mengatakan bahwa Alquran dan politik tak bisa dipisahkan.

Perdebatan di atas juga tak bisa dilepaskan dari bagaimana memaknai politik itu sendiri. Setidaknya ada dua perspektif tentang makna politik: Pertama, politik dimaknai sebagai seni untuk mendapatkan kekuasaan. Dari sini seorang “politisi” akan berusaha dengan segala cara untuk meraih kekuasaan. Tak peduli halal-haram. Inilah logika politik machiavellis. Makna politik menghalalkan segala cara inilah yang saat ini sedang berlangsung dan banyak digandrungi oleh para politisi di negeri ini. Kedua, politik dimaknai sebagai siyasah, yaitu pengaturan urusan umat (ri’ayah syu’un al-ummah). Inilah makna sesungguhnya dari politik. Penekanannya pada aspek pengurusan, pelayanan dan pengaturan urusan rakyat. Bukan pada kekuasaan. Kekuasaan hanya alat yang diperlukan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Inilah makna politik yang dikehendaki

Islam. Oleh karena itu politik Islam dapat dimaknai sebagai pengaturan urusan umat (rakyat) dengan hukum-hukum Islam. Definisi ini antara lain diambil dari sabda Rasulullah SAW, “Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat dan dia tidak benar-benar mengurus mereka, dia tidak akan mencium bau surga.” (HR al-Bukhari). Rasulullah SAW pun bersabda, “Dulu, Bani Israil selalu diurus (tasûsûhum) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi sesudahku. Yang akan ada adalah para khalifah.” (HR Muslim).

Kisah pengangkatan Khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat, seperti diketahui pada masa Rasulullah SAW, tugas Rasul tidak saja sebagai pembawa risalah Islam, akan tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Rasulullah SAW merasakan adanya kekosongan kepemimpinan di tengah masyarakat, dan para sahabat Nabi pun berkumpul untuk menentukan pilihannya. Para sejarawan seperti Ibnu Ishaq, al-Thabari menceritakan bahwa sesaat setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi pun dibuat tidak percaya akan hal tersebut. Sepeninggalnya Nabi, kondisi masyarakat masih dalam keadaan tidak menentu. Maka kaum Muslim di Madinah berusaha untuk mencari penggantinya. Ibnu Ishaq menceritakan bagaimana masyarakat Ansur dan Muhajirin berbeda pendapat terkait siapa yang menjadi suksesi Nabi pasca wafatnya. Suksesi di sini bukanlah dalam persoalan kenabian, tetapi menjadi pengganti Rasulullah SAW. Karena bagi para sahabat sangat mafhum bahwa tidak ada lagi Nabi setelah itu. Pertentangan terkait proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai khalifah berlangsung dramatis. Ketika kaum Muhajirin dan Ansur berkumpul di Saqifah bani Sa'idah terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Kaum Ansur mencalonkan Said bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku al-Khajraj sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi tersebut Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy.

Akan tetapi, hal tersebut mendapat perlawanan keras dari al-Hubab bin Munzir (kaum Ansur). Di tengah perdebatan tersebut Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah yaitu Abu Ubaidah bin Zahrah dan Umar bin Khattab, namun kedua tokoh ini menolak usulan tersebut. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit, maka dengan suara yang lantang beliau membai'at Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah.

Kemudian proses pembai'atan pun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Basyir bin Saad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar al-Shiddiq merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam shalat. Pesan secara tersirat bahwa Abu Bakar memang layak menggantikan Rasulullah. (Hamka, 1996). Di sisi lain, untuk menghindari perseteruan berkepanjangan antara kaum Muhajirin dan Ansor, di mana kaum Ansor sudah berkumpul di Bani Tsaqifah untuk mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin, Abu Bakar al-Shiddiq menghampiri mereka dan melakukan distribusi kekuasaan.

Abu Bakar al-Shiddiq mengatakan, kami adalah pemimpinnya, dan kalian adalah para menterinya (Nahnu al-Umara' wa Antum al-Wuzara'). Proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar, seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin al-Abbas, Zubair bin al-Awwam bin al-Ash, Khalid bin Sa'id, Miqdad bin Amir, Salman al-Farisi, Abu Zar al-Gifari, Amma bin Yasir, Bara bin Azib dan Ubai bin Ka'ab. Telah terjadi pertemuan sebagian kaum Muhajirin dan Ansor dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah, mereka bermaksud membai'at Ali bin Abi Thalib dengan anggapan bahwa beliau lebih patut menjadi khalifah karena berasal dari bani Hasyim yang berarti ahlul bait. (Hamka, 1996).

Proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai khalifah pertama, menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu, dikarenakan suku-suku Arab kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun temurun. ("Sejarah Pengangkatan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq" t.t.). Pasca pengangkatan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, ia diberi gelar dengan Khalifat Rasulillah (pengganti Rasulullah). Hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak mengklaim dirinya sebagai 'pemimpin' umat Islam atau amirul mukminin. Adapun gelar amirul mukminin baru ada ketika kekhalifahan al-Rasyidin berada di bawah sahabat Umar bin al-Khattab. Kemudian tentang cara Rasulullah meletakkan Hajar Aswad adalah upaya padamkan pertikaian Kabilah Arab, Ka'bah adalah bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as atas perintah Allah SWT. Ka'bah merupakan tempat paling disucikan dalam Islam dan letaknya berada di area Masjidil-Haram, Mekkah, Saudi Arabia. Sebagai

peninggalan bersejarah, di riwayat lain menyebut Ka'bah telah ada sejak Nabi Adam, namun bangunannya tak sekokoh saat ini. Bangunan Ka'bah ini mengalami beberapa kali pemugaran.

Ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, kabilah Quraisy pernah bertengkar bahkan hampir perang dahsyat saat merenovasi Ka'bah. Mereka bertikai saat akan meletakkan Hajar Aswad, sebuah batu yang diyakini berasal dari surga. Pertama kali ditemukan Nabi Ismail dan meletakkannya adalah Nabi Ibrahim. Dulunya, batu ini memiliki sinar terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Syekh Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury dalam Kitabnya *Ar-Rahiqul Makhtum* menceritakan, ketika 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasulullah, kondisi Ka'bah hanyalah berupa tumpukan batu-batu berukuran di atas tinggi badan manusia. Yaitu setinggi sembilan hasta di masa Nabi Ismail as dan tidak memiliki atap. (Ali Husni Al-Kharbuthli, 2001). Karenanya, harta terpendam yang ada di dalamnya berhasil dicuri oleh segerombolan para pencuri. Di samping itu, karena merupakan peninggalan sejarah, Ka'bah sering diserang pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunannya dan merontokkan sendi-sendinya. Kala itu, Mekkah dilanda banjir besar mencapai pelataran Baitul Haram sehingga menyebabkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya untuk menjaga reputasinya. Mereka bersepakat untuk tidak membangunnya dari sembarang sumber dana selain dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mau memakai dana dari mahar hasil pelacuran, transaksi riba dan hasil pemerasan terhadap orang-orang.

Mereka awalnya segan untuk merobohkan bangunannya, sampai akhirnya dimulai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi baru kemudian diikuti yang lainnya setelah mereka melihat tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Mereka terus melakukan perobohan hingga sampai ke pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrahim as. Mereka membagi bagian bangunan Ka'bah yang akan dikerjakan beberapa bagian, yaitu masing-masing kabilah mendapat satu bagian dan mengumpulkan sejumlah batu sesuai jatah masing-masing. Adapun yang menjadi pimpinan proyeknya adalah seorang arsitek asal Romawi bernama Baqum. Tatkala pengerjaannya sampai ke Hajar Aswad, mereka bertikai tentang siapa yang paling berhak meletakkannya ke tempat semula. Pertikaian pun terjadi dan berlangsung selama empat atau lima malam. Bahkan kian meruncing sehingga hampir terjadi peperangan di Tanah Suci.

Untunglah, Umayyah bin al-Mughirah al-Makhzumi menengahi dan menawarkan penyelesaian di antara mereka lewat perundingan damai. Tawarannya, siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid di antara mereka maka dialah yang berhak meletakkannya. Tawaran ini diterima oleh semua pihak atas kehendak Allah Ta'ala, Subhanallah, Rasulullah saat itu menjadi orang pertama yang memasukinya. Tatkala mereka melihatnya, dia disambut dengan teriakan: "Inilah Al-Amiin! Kami rela! Inilah Muhammad!". Ketika beliau mendekati para pemimpin kabilah dan diberitahu tentang hal itu, beliau SAW meminta sehelai selendang (surban). Kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu pemimpin-pemimpin kabilah yang bertikai itu diminta agar masing-masing memegang ujung (sudut) selendang. Setelah itu beliau memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi secara bersama. Hingga manakala mereka telah menggelingkannya dan sampai ke tempatnya, beliau SAW mengambilnya dengan tangannya dan meletakkannya di tempatnya semula. Inilah cara jitu Nabi yang diridhai oleh semua pihak. (Rusman Siregar, 2019).

Saat renovasi Ka'bah itu, orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik. Mereka terpaksa membuang enam hasta dari bagian utara, yang dinamakan dengan Al-Hijr (Hijr Isma'il) dan Al-Hathim. Lalu mereka tinggikan pintunya dari permukaan bumi agar tidak dapat dimasuki kecuali saat menginginkannya. Tatkala pembangunan sudah mencapai 15 hasta, mereka memasang atap yang disangga dengan enam tiang. Akhirnya Ka'bah yang baru diselesaikan tersebut berubah menjadi berbentuk kubus dengan ketinggian 15 meter. Panjang sisi yang berada di bagian Hajar Aswad dan bagian yang searah dengannya adalah 10,10 meter.

Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,50 meter dari permukaan pelataran thawaf. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu dan bagian yang searah dengannya adalah 12 meter. Sedangkan tinggi pintunya adalah 2 meter di atas permukaan bumi. Itulah tonggak pertama perpolitikan dalam Islam, Nabi Muhammad dengan bijaksana mengajak tokoh-tokoh dari kabila untuk ikut andil mengangkatnya bersama sehingga tidak ada lagi kelompok yang merasa paling berhak dan paling utama untuk mengangkat Hajarul Aswad ketempatnya.

Kesimpulan

Alquran adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT Tuhan Semesta Alam, kepada Rasul dan Nabi-Nya yang terakhir Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Alquran adalah bacaan, Alfurqon (pembeda). Adz-dzikir (peringatan). Sebagai kitab suci terakhir, Alquran bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu pengetahuan, serta merupakan sarana penyelesaian segala permasalahan sepanjang hidup manusia. Sementara politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Dengan demikian bahwa penentuan kebijakan umum; pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasaan dan wewenang memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Kemudian politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (polity); dan distribusi atatialokasi sumber daya. Dalam artian Alquran dan politik sangat sejalan bahkan Alquran memperkuat dan memberi arah dalam hal kegiatan perpolitikan. Sehingga politik yang dilaksanakan berdasarkan petunjuk Alquran akan sampai ketujuan dan sasaran seperti yang diharapkan, bahkan Alquran dan politik tidak bisa dipisahkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdul Bari Azed, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Abdul Hayyi al-Kattani, *Taratib al-Idariyah*, 1/395.
- Abu Haif, *Perjanjian Hudaibiyah, (Cermin Kepiawaian Nabi Muhammad SAW dalam Berdiplomasi)*,
journal.uinalauddin.com/jalaluddin+rahmat.perjanjian+hudaibiyah.
- Adi Hidayat, *Ceramah di Masjid Taqwa Bengkulu*, 2018.

- Ahmad Bambang Wiryawan, Politik dalam Islam, Makala Pendidikan Agama Islam 2015.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia 2006.
- Al-Ghazali, Ihya' 'Ulum ad-Din, 1/274; Ibnu al-Jauzi, Tadzkirah fi al-Wa'zh, 1/81.
- Al-Ghazali, Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk, 1/19.
- Alfian, Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Alimuddin Hassan Palawa, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 5, No. 1, 2006.
- Ali Husni Al-Kharbuthli, Sejarah Ka'ba, Surabaya: Tuross Pustaka, 2001.
- Amin Rais, Pemikiran tentang Politik Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Asih Kusumaningsih, Perjanjian Hudaibiyah, sejarahlengkap.com/agama/Islam, di akses 7 Nopember 2020.
- Badri Yatim, Sejarah Pradaban Islam, Jakarta: Rajawali Perrs, 2002.
- Bayu Surianingrat, Organisasi Pemerintahan Wilayah dan Daerah, Jakarta: Aksara Baru, 1990.
- Chirsin Muhammad Chirsin, Persepsi Ulama dan Cendikiawan tentang Al-Quran, 2018.
- Haedar Nashir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pidato Pelepasan Jenazah, 3 Januari 2019.
- Hadis Riwayat at-Tirmidzi; Al-Haitami, Al-Jawazir an Iqtiraf al-Kaba'ir, 1/238.
- Hamka, Sejarah Umat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, 5/111.
- Inu Kencana Syafii, Alquran dan Ilmu Politik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Kementerian Agama, Quran dan Terjemahan, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Alquran, 2001, QS. 16: 43.
- Muhammad Zuhri, Sejarah Politik Islam, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Vol. 3 No. 1, 2002.
- Murthada Muthahhari, Islam dan Tantangan Zaman, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.
- Quraish Shihab, Alquran dan Terjemahan, Jakarta: Insani Press, 2001.

- Said Aqil Siradj, Ketua PBNU, ungkapan ketika menghadiri undangan hari Santri Nasional 22 Oktober 2020 di Kalteng.
- Sugianto Sabran (Cagub Kalimantan Tengah) Tahun 2020, Turut memaknai Hari Santri Nasional yang jatuh, 22 Oktober 2020.
- Suyuthi Pulungan, Sejarah Kebudayaan Islam, Malang: Nizam, 1994.
- Suyuthi Pulungan, Peradaban Islam Nusantara (Kajian Sastra Sufi Melayu), Vol. 1, No. 1, 2016.
- Thaba, Paradigma Politik Islam tentang Relasi Agama dan Negara, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 2, No.1.
- Rusman Siregar, Cara Rasulullah Meletakkan Hajar Aswad Padamkan Pertikaian Kabilah Arab, Kamis, 30 Mei 2019.
- Ustadz Abdul Somad, ungkapannya ketika menghadiri undangan hari Santri Nasional 22 Oktober 2020 di Kalteng.
- Yuni Nur Halimah, Sejarah Politik Islam, Jakarta: FSIP, 2014.
- Zaenal Arifin M, Mengenal Jumlah Hitungan Ayat dalam Al-Qur'an, Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Alquran Kemenag RI, 11 September 2013.

Biografi Penulis

Lukman Asha, lahir 29 September 1959 di Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Pendidikan; MIN Bandung Marga 1974, PGAN 4 tahun 1978, PGAN Curup 1981, Sarjana Muda Fak. Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang 1984, S1 Fak. Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang 1988, S2 Manajemen Pendidikan Islam Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang 2006, S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 2013.

Pengalaman Pekerjaan; Guru SD 5 Curup, Wakil Kepala MTs. Nurul Curup, Guru SMAN 3 Curup, Guru SMAN 4 Curup, Asisten Dosen Fak. Ushuluudin IAIN RF di Curup, Sekretaris Perpustakaan, Kasubag. Umum, , Kasubag. AK., Kabag. Adm., Direktur Utama Radio Pesona FM, Kepala PIPK, Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Curup, WR III, Kepala SPI dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

Karya Ilmiah; Buku Pendidikan Pramuka, Buku Bunga Rampai Pengantar Penelitian, Buku Perkembangan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional, Buku Manajemen Madrasah, Terjemahan Alquran Bahasa Rejang, Buku Kecil Pedoman Penyelenggaraan Jenazah.

Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Kepemimpinan di Brunei Darussalam Mewujudkan Islam yang *Rahmatan lil alamin*

Sumarto

sumarto.manajemeno@gmail.com

Pendahuluan

Pada awalnya kami tidak menyangka bisa berkunjung ke Negara Brunei Darussalam, Negara Islam yang Kaya di Asia Tenggara, Negara yang menjalankan ajaran – ajaran agama dengan baik, dengan *kaffah* sesuai dengan mazhab Imam Syafe'i. Negara yang memberikan banyak kesejahteraan bagi masyarakatnya, tidak ada rakyat yang miskin menderita, tidak ada ditemukan di sudut – sudut jalan para pengemis apalagi di lampu merah. Masyarakatnya aman, damai dan sentosa. Dari berbagai informasi yang kami terima melalui tulisan – tulisan artikel jurnal, selalu menyebutkan Negara Brunei Darussalam adalah Negara yang kaya dan sejahtera, tentunya banyak indikator mengapa hal tersebut tersampaikan salah satu indikatornya karena pendidikan yang baik sesuai dengan ajaran–ajaran Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah, serta Kepemimpinan Sultan Hasanul Bolkihah yang adil.

Pada studi S3 program doctoral (Jambi, 2016), kami melakukan kunjungan studi ke Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, sekitar tahun 2016 dari Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Perjalanan akademik yang banyak kenangan akademiknya juga, dimulai dari kegiatan di Singapura, Malaysia hingga Brunei Darussalam, kegiatan diskusi dan *benchmarking* di kampus internasional, banyak belajar tentang betapa pesatnya kemajuan pendidikan dan kepemimpinan dunia, terasa ilmu yang dimiliki begitu amat sedikit ketika sudah mendengarkan penjelasan – penjelasan dari berbagai narasumber. Hal ini adalah pelajaran yang sangat penting, bahwa dimanapun berada, harus tetap mengedepankan kemajuan pendidikan, karena dengan pendidikan bisa membuka dunia, memberikan masa depan yang cerah, tentunya membuat perdamaian dan kesejahteraan. Disampaikan oleh Pimpinan UNISSA Brunei Darussalam, bahwa pendidikan berkembang dan maju bisa dengan *silaturrahim*, belajar ke Negara – Negara lain, mencontohkan kebaikan – kebaikan yang dilakukan disana, kemudian menjadi materi pembelajaran yang penting di Negara kita, UNISSA sebagai perguruan tinggi langsung dibawah manajemen kepemimpinan Sultan, sangat memperhatikan kajian – kajian Ke Islaman, karena menjadi pondasi hidup tidak hanya di dunia bahkan di akhirat.

Perjalanan berikutnya yaitu ketika terpilih menjadi salah satu reviewer yang berangkat ke Brunei Darussalam pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh DIKTIS Kementerian Agama RI dalam Program Penguatan Reviewer dan LPPM PTKIN Se- Indonesia (Indonesia, 2019). Kami ada 8 orang utusan dari perwakilan masing – masing PTKIN yang ada di Indonesia. Ketua Tim pak Dr. Ngainun Naim (IAIN Tulungagung), Dr. Kamarusdiana (UIN Jakarta), Dr. Ali Imron (UIN Wali Songo Semarang), Syawaluddin Hanafi, M.H (IAIN Bone - Sulawesi), Dr. Sumarto (IAIN Curup), Dr. Mus Mulyadi (IAIN Bengkulu), Dr. Ahmad Yani (IAIN Cirebon), Dr. Ismail Fahmi Nasution (IAIN Langsa - Aceh). Dimulai dari kegiatan *pre – departure* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di Hotel Syahida Inn. Ada beberapa hal yang di sampaikan oleh Dr. Suwendi Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat sebagai bahan untuk kegiatan di Brunei Darussalam; Brunei Darussalam adalah Negara Islam yang menjalankan syariat dengan baik dan benar, mazhab Imam Syafei yang sudah menjadi arah dari pemahaman ke-Islaman, pengembangan pembelajaran dan penelitian, peningkatan publikasi ilmiah, rencana kegiatan kerja sama, pengabdian masyarakat berbasis Asia Tenggara hingga manajemen organisasi atau komunitas masyarakat Islam di Brunei Darussalam. Hal ini menjadi bekal dan bahan dalam kegiatan di Brunei Darussalam, tepatnya di Universitas Sultan Syarif Ali.

Pertemuan dengan UNISSA ada beberapa agenda yang akan di laksanakan selama 8 hari ke depan; tanggal 7 - 14 Desember 2019, di antaranya (Ngainun Naim, 2020); 1. Kegiatan di UNISSA tentang Pengajaran dan Penelitian, 2. Bersama salah satu Dosen UNISSA yang pakar (Profesor dan Doktor) melaksanakan kegiatan diskusi tentang kepakaran keilmuan masing masing delegasi dari Indonesia ada Hukum Keluarga Islam, Bahasa Arab, *Halalan Toyiban* (produk halal), Ushuluddin dan Undang undang. 3. Joint Penelitian bersama dosen UNISSA tentang beberapa tema Penelitian yang di sepakati bisa diterbitkannya di Jurnal UNISSA atau di Kampus Indonesia 4. Program Kajian Ulama Brunei Darussalam yang memiliki kesamaan dengan Ulama Nusantara menjadi kajian tindak lanjut dari pertemuan, bisa mengirimkan proposal untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan kolaborasi riset bersama UNISSA. 5. Kegiatan berkunjung di beberapa Sekolah Dasar, Menengah dan Lanjutan di Brunei, seperti di Indonesia ada Madrasah, menghadiri kegiatan olahraga dengan masyarakat Brunei, menghadiri prosesi tata cara pernikahan di Brunei Darussalam. Beberapa agenda kegiatan yang akan

dilaksanakan, sungguh menyenangkan dan banyak mendapatkan hikmah dan pelajaran untuk diterapkan di Indonesia, khususnya di PTKIN.

Pada tulisan ini, kami menyampaikan tentang beberapa hal yang sangat penting, kami temukan selama perjalanan dan belajar di UNISSA Brunei Darussalam, yang menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki kami dalam hal menyampaikan pelajaran penting di Brunei Darussalam. Dari pendidikan tentunya yang pertama, bahwa di Brunei Darussalam sangat mengutamakan pendidikan Islam, mulai dari tingkat anak usia dini, madrasah hingga perguruan tinggi, Negara menjamin pendidikan setiap warga masyarakatnya tentunya dengan pemberian beasiswa dan penghargaan kepada setiap murid yang berprestasi. Kemudian system kepemimpinan yang dilakukan oleh Sultan Hasanul Bolkiah mencerminkan sikap pemimpin yang adil bagi warga masyarakatnya, sehingga sangat kecil ditemukan kemiskinan, kelaparan, tindak pidana atau perdata, apalagi pemikiran – pemikiran radikal dan *separatism*, hal ini adalah gambaran dari Islam yang *Rahmatan lil alamin*. Penulis sampaikan dalam tulisan ini.

Posisi Brunei Darussalam

Ketika sampai di Brunei Darussalam (Sumarto, Pengalaman Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam, 2019), tepatnya di Bandara Sri Begawan, kita dihadapkan dengan nuansa ke-Islaman, yaitu ada Masjid besar di Bandara yang digunakan tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi untuk kegiatan pengajian, proses pembelajaran dan musyawarah. Masjid yang megah dan desain infrastruktur yang menawan, bersih, indah dan rapi, sehingga para wisatawan atau pengunjung yang datang dari berbagai Negara bisa langsung menikmati keindahan Masjid yang merupakan symbol dari Negara Brunei Darussalam. Suasana Ke-Islam sangat kental, sangat dekat dengan para pengunjung, mulai dari petugas – petugas yang menggunakan busana muslim dan muslimah yang ramah dan bersahaja kepada setiap para pengunjung.

Membaca beberapa artikel tentang Brunei Darussalam, informasi yang penting bagi kita diantaranya; Brunei Darussalam sebuah negara kecil yang terletak di kawasan ASEAN tepatnya di Barat Daya Pulau Borneo (Sabah) (Ghofur, 2015). Luas wilayahnya ±5.765 Km² dengan ibu kota Bandar Sri Begawan. Sistem pemerintahan yang ada di Brunei menggunakan sistem Monarki absolut yaitu berdasar Hukum Islam dengan Sultan yang menjabat

sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, kemudian sebagaimana yang diketahui merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri.

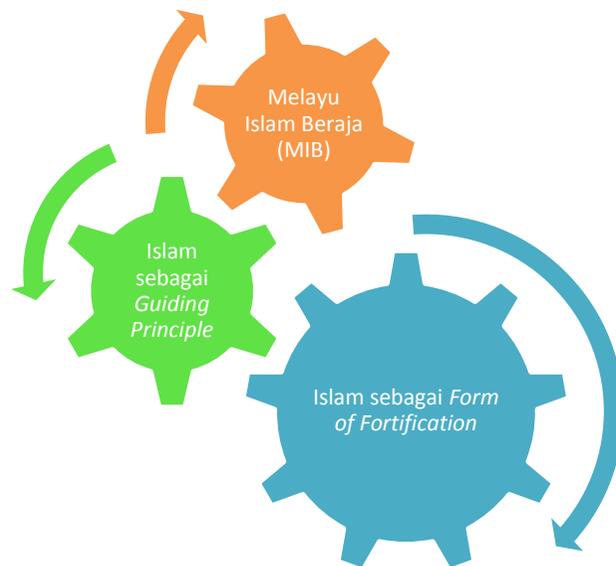
Sultan Brunei (yang Dipertuan Negara) merupakan bagian dari garis keturunan sultan yang telah memerintah secara terus-menerus selama 600 tahun. Sultan yang berkuasa pada saat ini, haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah penguasa yang ke-29. Brunei Darussalam memiliki populasi kecil sekitar 400 ribu jiwa, terdiri atas 66% Melayu dan wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, setiap wilayah bagian dikelilingi oleh negara bagian timur Malaysia, Sarawak. Setelah mencapai puncak kekuasaan pada abad ke-16, kesultanan melemah dan pada abad ke-19, wilayah kekuasaannya menjadi semakin menyusut karena tekanan dari Brooke Rajah (si "Raja putih"; James Brooke) dari wilayah tetangga Sarawak. (Talib, 2013)

Pembentukan wilayah residensi Inggris di Brunei Darussalam pada 1906 menjadi jalan keluar dari ancaman lenyapnya kesultanan. Pada akhir periode residensi Inggris pada tahun 1959, otonomi internal diberikan pada Brunei dan sang sultan diberikan kekuasaan eksekutif. Sebuah konstitusi baru mulai diberlakukan pada tahun 1959 yang menjadi dasar pembentukan Dewan Legislatif yang anggotanya sebagian dipilih berdasarkan pemilihan. Partai Rakyat Brunei (PRB) kemudian memenangkan semua kursi untuk Dewan Legislatif berdasarkan hasil pemilihan. Tetapi, adanya perlawanan bersenjata yang diprakarsai oleh PRB pada tahun 1962 terhadap rencana persatuan Brunei dan Malaysia menghambat para kandidat terpilih untuk memulai tugas mereka secara resmi. (Talib, 2013)

Perlawanan bersenjata tersebut, walaupun dengan cepat dipadamkan oleh Inggris, merupakan suatu peristiwa penting di dalam sejarah politik Brunei; peristiwa tersebut menyebabkan perasaan tak berdaya dan tidak aman yang masih bertahan sampai sekarang. Peristiwa tersebut juga menyediakan alasan bagi Omar Ali Saifuddin III, yang kemudian menjadi sultan Brunei, dengan dalih untuk memberlakukan peraturan-peraturan darurat, untuk menunda perubahan konstitusi dan juga mempengaruhi keputusan sultan untuk menolak penggabungan Brunei dengan Malaysia. Menolak untuk mengalah pada tekanan Inggris untuk mengadakan perubahan konstitusi, sang sultan mengundurkan diri pada tahun 1967 dan menyerahkan tahta kerajaan pada putranya, haji Hassanal Bolkiah. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kolonisasi Inggris memberi nafas kehidupan bagi kesultanan yang telah melemah dan terpecah-pecah, dan mengubahnya menjadi suatu autokrasi yang tersentralisasi. Sejarah

singkat bagaimana perjuangan Brunei Darussalam dalam proses memperoleh kemerdekaan dari Inggris. (Talib, 2013)

Bila di tinjau kembali bahwa filosofi politik yang diterapkan dan menjadi kekuatan di Brunei Darussalam yaitu menerapkan secara ketat Ideologi Melayu Islam Beraja yang terdiri dari 2 dasar yaitu: pertama, Islam sebagai *Guiding Principle*, dan yang kedua Islam sebagai *Form of Fortification*. Kemudian yang bertumpu dari dua dasar ini kemudian muncul penanaman nilai-nilai ke-Islaman dalam konteks kenegaraan yaitu dengan tiga konsep, yaitu Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafi'i – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah – dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan Negara Beraja. Jelas bagi kita bahwa Negara Brunei Darussalam sebagai Negara Islam yang Kaya, menegakkan syariat Islam untuk mewujudkan Islam yang *Rahmatan lil alamin*.



“Negara Brunei Darussalam memiliki Ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) yang memiliki makna yaitu Islam sebagai *Guiding Principle* dan Islam sebagai *Form of Fortification*, dimana Sultan menjadi Pusat Pemerintahan dalam mengambil segala bentuk Kebijakan dengan

tetap mempertimbangkan pandangan dari Mufti Kerajaan” (Sumarto, Analisis Terhadap Sistem Kesultanan Brunei Darussalam, 2020)

Kesultanan Brunei Darussalam

Kesultanan Brunei Darussalam berdiri sekitar tahun 1402 M dengan dipimpin oleh raja atau sultan yang telah menduduki hingga sekarang (Ghofur, 2015). Adapun beberapa raja yang punya peran penting bagi pengembangan Islam di antaranya; 1) *Sulthan Muhammad Syah* sultan ke-1 (sebelum masuk Islam ia lebih dikenal dengan Awang Alak Betatar). Ia memerintah sejak tahun 1402-1408. Pada masanya terjadi pengislaman pejabat dan perangkat kerajaan Brunei Darussalam 2) *Sulthan Bolkiah* (1485-1524) sultan ke-5. Pada masa kepemimpinannya Islam disebarkan secara *intensif* hingga masuk ke kawasan Borneo (Kalimantan) termasuk wilayah kesultanan Sulu (Filipina) 3) *Sulthan Abdul Mubin (Momin)* sultan ke-12, memerintah tahun 1852-1885. Pada masanya dilakukan penetapan mazhab secara resmi sebagai mazhab di kerajaan, yaitu untuk fiqih bermazhabkan *syafi'i* yaitu *Abli sunnah wal jamaah*.

Hal ini dilakukan karena sering terjadinya perselisihan masalah agama dalam masyarakat dan 4) *Sulthan Hassanal Bolkiah* sultan ke-19 memerintah dari tahun 1968 hingga sekarang. Pada masanya ditetapkan filosofi kerajaan Brunei Darussalam sebagai tonggak pemerintahan, yaitu dikenal dengan MIB (Melayu Islam Beraja). Setelah Brunei Darussalam merdeka tahun 1984, Brunei dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izaddin Wadaulah sultan ke 19. Sejak tahun 1991 Sultan menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu) sebagai ideologi negara, tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya, melaksanakan ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Penduduk Brunei seluruhnya, baik secara kultural maupun psikologis mampu mengatasi keragaman yang ada. Keragaman etnik mayoritas warga Melayu meliputi Melayu lokal, dusun, murut, kedayan, bisayah, dan etnik Melayu lain dari Malaysia dan Indonesia. *Kedua*, adanya proses birokrasi dalam pembentukan Negara modern, dan harus dipahami serta dipatuhi oleh masyarakat. *Ketiga*, adanya fenomena yang tampak perlunya membangun ideologi nasional dan mengartikulusikannya dalam budaya nasional di tengah-tengah ideologi yang ada di wilayah Asia Tenggara atau belahan dunia lain.

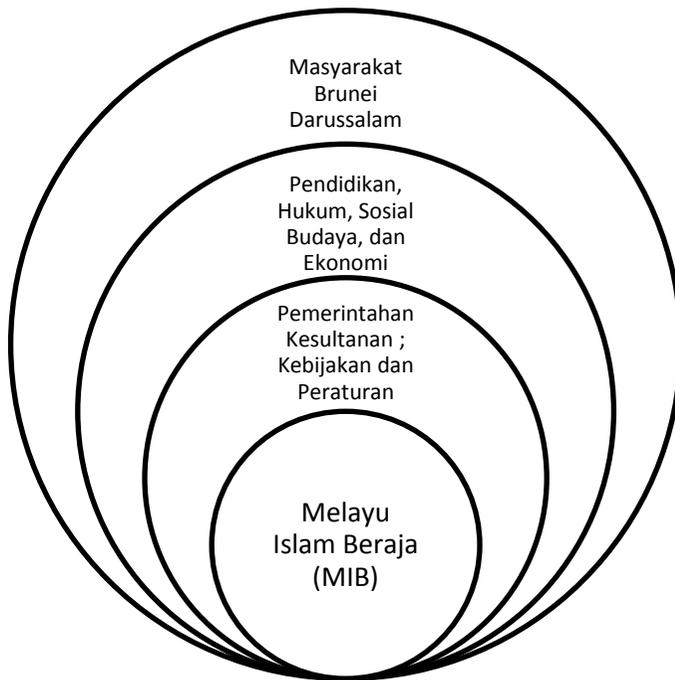
Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai hukum, ketertiban, kesejahteraan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi mendominasi kehidupan rakyat. Proses sosial ini menjadikan penduduk Brunei mampu memiliki pola hidup yang toleran, harmonis, dan hidup bersama. Melayu Islam Beraja (MIB) pada dasarnya berkaitan erat dengan evolusi adat istiadat dan tradisi Melayu Brunei serta acaraacara upacara keagamaan yang banyak tertera dalam kalendar muslim yang memberikan wawasan tentang bagaimana caranya ideologi nasional diungkapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikutip dari *Form of Courtesy of Brunei Darussalam*, 1991. (Ghofur, 2015).

Tentunya dari ragam kebijakan Kesultanan selalu mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, kedamaian dan kemajuan. Dari pengamatan yang kami lakukan ketika di Brunei Darussalam. Kebijakan Sultan adalah kebijakan yang harus di taati oleh seluruh rakyatnya, mulai dari kebijakan pendidikan, social – ekonomi hingga politik dan pemerintahan. Seperti pelaksanaan Konferensi Antar Bangsa Islam Borneo Ke – 12 (KAIB 12) dan 2nd Borneo International Halal Showcase (BIHAS 2) dengan tema Ilmu dan Amal Penentu Kebitaraan Ummah yang kami ikuti di Brunei Darussalam yang dihadiri beberapa Kampus di wilayah Asia Tenggara, termasuk Kampus – Kampus yang ada di Indonesia ada Universitas Mulawarman, Universitas Lambung Mangkurat, IAIN Samarinda, IAIN Palangkaraya, IAIN Pontianak dan UIN Antasari. Kemudian ada juga Kampus dari Negeri Jiran Malaysia yaitu UTM Serawak, UTM Sabah. Dari Brunei Darussalam ada kampus UNISSA, KUPU SB. (Jabatan Percetakan Kerajaan, 2019).

Sambutan Sultan Hassanal Bolkiah pada kegiatan KAIB 12 dan BIHAS 12 menyampaikan beberapa kebijakan – kebijakan yang ada di Brunei Darussalam begitu juga ucapan terima kasih kepada seluruh pembentang dari setiap Negara yang hadir dalam konferensi, diantaranya; kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan penegakan hukum syariat Islam, mengajarkan tentang Al Qur'an dan Sunnah, memahami dan melaksanakan ilmu yang diperoleh dalam amal – amal kehidupan sehari – hari, karena ilmu adalah bagian besar dari amal yang diterima. Kemudian pentingnya menjaga ke-Halalan setiap makan dan minuman karena itu yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi bagian dari darah daging kita, mempengaruhi amal ibadah yang kita lakukan, sehingga ini wajib dan penting untuk dilakukan. Mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhana Wata'ala. (Jabatan Percetakan Kerajaan, 2019).

Setelah peresmian Konferensi antar bangsa, di buka secara resmi oleh Sultan Hasanul Bolqiah, dengan susunan acara yang hikmah, di buka dengan lantunan ayat suci Al Qur'an, Dilanjutkan dengan Ceramah dari Mufti Kesultanan dan sambutan dari Menteri Ugama Negera Brunei Darussalam yaitu Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, State Mufti, Brunei Darussalam. Ada beberapa hal yang di sampaikan dalam peresmian Konferensi antar bangsa, diantara nya; 1. Bersama memikirkan kepentingan umat, untuk kemajuan dan kemakmuran 2. Orang berilmu harus beramal 3. Borneo (kepulauan Borneo) memiliki banyak culture dan sosial dalam kajian Islam, bisa dalam hal perniagaan, sosial dan pendidikan 4. Ilmu dan amal harus beriringan 5. Sultan menuturkan ucapan terima kasih kepada pihak penyelenggara dan hadirin yang datang, bentuk apresiasi Sultan dalam acara Konferensi.

Kemudian yang ke - 6. Orang berilmu beramal - Tidak mengambil harta riba 7. Orang berilmu beramal - Tidak meninggalkan sholat 8. Oranga berilmu beramal - Tidak memakan syubhat 9. Orang beramal dengan ilmunya 10 Kisah Sahabat Abu Bakar; memiliki pembantu, dan memakan makanan yang di bawa pembantu, ternyata makanan yang di bawa pembantu nya itu adalah hasil dari perbuatan syirik, Abu bakar berusaha mengeluarkan makanan yang haram itu dari mulut nya, hingga setengah mati, Alhamdulillah makanan itu bisa di muntahkan. 11. Pameran makanan halal Borneo 12. Jangan menganggap biasa aja mengiris perkara makanan halal dan haram, perlu ketegasan yang kuat dan perkasa. 13. Kegiatan Konferensi di hadiri sampai ribuan, antusias masyarakat Brunei dalam mengikutinya. (Ngainun Naim, 2020)



“Sebagai Negara Islam yang Berpengaruh Besar di Asia Tenggara dan Global, Kesultanan Brunei Darussalam memegang teguh prinsip Melayu Islam Beraja (MIB) dimana Al Qur’an dan Hadits sebagai prinsip dalam membimbing dan benteng kehidupan menuju keselamatan dunia hingga akhirat dengan bermazhab Imam Syafe’i, dimana system pemerintahan kebijakan dan peraturan berdasarkan ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) di segala aspek kehidupan yaitu pendidikan, hukum social budaya dan ekonomi yang hidup dan dipatuhi oleh seluruh rakyat Brunei Darussalam” (Sumarto, Analisis Terhadap Sistem Kesultanan Brunei Darussalam, 2020)

Melayu Islam Beraja (MIB)

Negara yang berbentuk Kesultanan Absolut dan Negara Modern, Brunei Darussalam memiliki system pemerintahan yang berbeda dengan Negara – Negara lain di Dunia atau Negara – Negara di Asia Tenggara. Dimana Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang Sultan yang menjadi sentral pemerintahan, semua harus taat dengan segala perintah dari Sultan yang tentunya tetap bermusyawarah dengan para menteri dan mufti Kerajaan, tidak bertindak sesuka hati atau bertindak semena – mena kepada rakyatnya. Brunei Darussalam yang dipimpin oleh Sultan menjadi keteladanan bagi seluruh rakyatnya, tidak terkecuali kepada siapa pun yang ada dan berkunjung di Brunei Darussalam, mengajarkan tentang penegakan hukum syariat Islam dengan benar dan memberikan hukuman kepada setiap orang – orang yang melanggar hukuman tersebut. Sehingga ketika kami belajar kajian tentang pendidikan dan penerapan hukum Islam di Brunei Darussalam disampaikan dengan tegas dan sesuai dengan ideologi yang dianut yaitu Melayu Islam Beraja (MIB). (Sumarto, Pengalaman Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam, 2019).

Dikutip dari (Talib, 2013) MIB diformulasikan oleh pejabat yang dekat dengan sultan sebagai upaya untuk mendefinisikan identitas nasional dalam kaitan dengan Islam, budaya Melayu, dan kesetiaan kepada sultan. Salah seorang pendukung setia MIB, Pehin Hj Abdul Aziz Umar, seorang mantan menteri pendidikan, menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang telah dipraktikan oleh kesultanan selama lebih dari 600 tahun itu unik dalam konteks dunia Melayu, dan kekuasaan sultan adalah mutlak. MIB juga digambarkan sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi Brunei dibanding konsep demokrasi negara Barat, karena ideologi ini menekankan pada hubungan yang istimewa dan intim antara sang sultan dan rakyatnya. Sang sultan menyatakan bahwa ideologi tersebut adalah kemauan Tuhan, ²⁴ tapi sangat menggoda untuk berargumen bahwa sebenarnya penerapan ideologi tersebut adalah upaya dengan niat terselubung untuk mensosialisasikan masyarakat Brunei agar menerima norma-norma dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kesultanan absolut.

Ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) dengan tujuan untuk meningkatkan kesetiaan rakyat terhadap negara. Ideologi ini telah menjadi dasar penting dari legitimasi politik sang sultan, ideologi ini mengangkat Islam sebagai agama nasional, menjamin hak-hak dari masyarakat etnis Melayu, dan membenarkan garis keturunan sang sultan sebagai sistem pemerintahan yang relevan (Talib,

2013). Ideologi ini memungkinkan kesultanan untuk memposisikan dirinya sebagai pelindung Islam dan dengan demikian memberikan legitimasi yang jauh lebih besar lagi kepada pemerintahan sang sultan. Sistem kesultanan Brunei bersifat patrialistik dan pribadi. Sultan digambarkan sebagai simbol negara dan subyek dari kesetiaan warga. Sang sultan memiliki minat yang sangat dalam dalam hal masalah publik, dan ia mengunjungi distrik-distrik jarak jauh untuk memonitor perkembangan dari proyek-proyek pembangunan. Sang sultan melakukan rotasi tempat ia beribadah shalat Jumat di mesjid-mesjid di seluruh Brunei untuk menunjukkan hubungannya yang dekat dengan Tuhan dan komitmennya yang kuat terhadap Islam. Tetapi, sebagai akibatnya, sang sultan juga harus menjadi pribadi.

Tanpa cela karena ia dipandang tidak hanya sebagai seorang pemimpin politik tapi sebagai seseorang yang tanpa cela dan tanpa tandingan. Pemerintahan yang baik dan bersih juga diharapkan dari anggota keluarga kerajaan yang lain. Publik menunjukkan ketertarikan terhadap persoalan hukum yang melibatkan saudara laki-laki termuda sang sultan dan mantan perdana menteri, pangeran Jefri, yang dituduh menggelapkan uang negara sebesar 15 juta dolar pada akhir tahun 1990-an. Untuk mempertahankan legitimasi kesultanan, sang sultan dengan segera menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan adiknya dan telah berupaya untuk memperoleh kembali aset-aset negara melalui prosedur hukum, meskipun upaya tersebut menghabiskan banyak biaya.

Sebagai sebuah negara neo-tradisional, Brunei Darussalam telah menunjukkan bahwa ia mampu untuk mengatasi kebutuhan modern dari warganya sekaligus menyediakan keamanan dan stabilitas. Tetapi, pada abad ke-21, saat Brunei menjadi matang sebagai suatu negara, hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan dalam mengatur suatu negara modern menjadi nyata. Sang sultan menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan negara untuk menyediakan layanan sosial dan kebutuhan publik senantiasa berada dalam tekanan seiring kenaikan harga barang-barang. Sampai pada saat ini, Brunei masih bergantung pada minyak dan gas sebagai sumber pemasukan negara dan upaya untuk meragamkan ekonomi belum memberikan hasil yang diharapkan. Negara juga sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan produksi minyak dan gas.

Tantangan bagi kesultanan Brunei Darussalam pada saat ini adalah bagaimana caranya negara bisa menjamin akan selalu mampu untuk memenuhi tuntutan publik dalam negeri akan keperluan umum dan standar kehidupan yang tinggi. Sultan harus berhati-hati dalam menjamin bahwa pendukung pemerintahannya, baik itu kaum elit anggota keluarga raja, atau kelas menengah

dengan status sosial yang beranjak naik, untuk terus mendukung pemerintahan yang ia pimpin. Dengan absennya partisipasi politik, sang sultan juga harus berusaha keras untuk memikat lebih banyak orang-orang desa dan perkotaan dan terus berupaya membuat mereka percaya bahwa ia menjalankan pemerintahan dengan baik.

Pendidikan di Brunei Darussalam

Pendidikan di Brunei Darussalam berdasarkan dari berbagai informasi artikel jurnal, media social dan kami turun langsung melaksanakan kunjungan akademik dan *benchmarking* di Brunei Darussalam. Pendidikan Agama Islam menjadi prioritas utama di Brunei Darussalam dimana setiap calon gurunya memang dipersiapkan oleh Negara untuk pendidikannya hingga diberikan kesempatan kuliah di berbagai perguruan tinggi di luar negeri seperti di Negara – Negara Timur Tengah dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman agama yang baik, benar dan secara *kaffah*. Diskusi dengan dosen – dosen di UNISSA Brunei Darussalam, menyampaikan selain mengutamakan Pendidikan Agama Islam mulai dari Taman Kanak – Kanak hingga perguruan tinggi, Brunei Darussalam juga mengintegrasikan antara sains dan teknologi dengan Pendidikan Agama Islam dan ini adalah perintah dalam ajaran Islam, dalam Al Qur'an dan Hadits juga disampaikan pentingnya sains dan teknologi dalam memberikan kebutuhan dan kesejahteraan manusia. (Sumarto, Pengalaman Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam, 2019)

Dikutip dari (Mislaini, 2019) secara substansial dasar negara Melayu Islam Beraja (MIB) dan kekuasaan raja terhadap Islam sebagai agama resmi negara, mengisi visi, misi dan tujuan serta isi kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai materi penting dalam sistem pendidikan Brunei Darussalam. Isi kurikulum sesuai kebijakan kerajaan yang memadukan agama dan sains dengan mempertahankan kemelayuan dan bahasa arab dan bahasa melayu (jawi), meskipun beberapa mata pelajaran seperti matematika, geografi diajarkan guru dengan menggunakan bahasa Inggris. (Daulay, 2009)

Pelajaran agama di negara Islam Brunei Darussalam ini lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berakhlak, bermoral dan berkepribadian luhur. Ini sejalan dengan tujuan tujuan pendidikan Brunei Darussalam adalah terbentuknya manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasai sains (ilmu dan teknologi) tinggi. Pendidikan Agama Islam mempunyai posisi kuat dalam pelaksanaan sistem pendidikan negara di Brunei Darussalam. Kekuatan eksistensi Pendidikan Agama Islam ini ditampung dalam

Standar Pendidikan Nasional Brunei Darussalam dikuatkan dasar dan filosofi negara yakni Melayu Islam Beraja (MIB). Berbeda dengan Pendidikan Agama Islam di Indonesia yang berdasarkan “Pancasila” dimasukkan dalam Sistem Pendidikan Nasional yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetapi pelaksanaannya terpisah dari pendidikan umum dan Madrasah dengan dominasi Pendidikan Agama Islam. (Mislaini, 2019)

Ada perbedaan mendasar dalam penjenjangan pendidikan di Brunei Darussalam dan Indonesia, di jenjang pendidikan dasar (SD) di Brunei Darussalam dimulai sejak usia Taman Kanak-kanak di Indonesia yakni ketika anak berumur 5 tahun sedangkan di Indonesia SD dimulai pada usia 6 tahun. Sistem pendidikan Brunei Darussalam memberikan peluang bagi siswa berprestasi untuk dapat menyelesaikan pendidikannya setahun lebih cepat dibandingkan dengan siswa lain di negara melayu seperti itu juga berbeda dengan di Indonesia meskipun ada kelas unggul. Sebenarnya ada kesamaan tetapi dengan konsep yang berbeda, di Indonesia siswa yang cerdas di masukkan dalam kelas unggulan dipisah dengan siswa biasa, sedangkan di Brunei Darussalam siswa cerdas bisa langsung naik kelas, diberikan kesempatan untuk melakukan percepatan study.

Ada beberapa isu penting yang menarik dikedepankan dalam pembicaraan Pendidikan Islam di Brunei Darussalam dewasa ini. Di antaranya, pertama, fenomena kemajuan pendidikan Brunei Darussalam berada pada peringkat kedua tertinggi kedua di ASEAN setelah Singapura; kedua, sistem Pendidikan Agama Islam memperkuat identitas negara Brunei Darussalam dengan konsep filosofi MIB (Melayu Islam Beraja) dan mendapat penganggaran besar serta fasilitasi untuk pendidikan yang menjanjikan dari Kerajaan; ketiga, para siswa Muslim Brunei Darussalam dapat menjadi model percontohan bagi para siswa melayu seperti sedang di lihat oleh Negara Philipina karena punya disiplin baik dan masih dapat mempertahankan budaya keagamaan mereka. Selain itu yang menarik pendidikan agama seperti Islam sendiri menjadi tanggung jawab Sultan. Ada madrasah yang langsung diselenggarakan kerajaanyang sepenuhnya bercirikan atau berkarakter ke-Islaman. (Mislaini, 2019)

Sekolah atau madrasah misalnya yang bernaung di bawah Yayasan Haji Sultan Hassanal Bolkiah (YSHHB) sistem pendidikannya memperlihatkan ciri ke-Islaman dan menarik perhatian dari pengamat pendidikan, terakhir mendapat perhatian 29 delegasi Departemen Pendidikan dan pengawas Sekolah Divisi 1 Wilayah Kota Urdueta Philipina yang baru saja mengadakan kunjungan ke Brunei Darussalam. Dr. Maria Celia Fernandez Pengawas Sekolah Devisi I

Philipina menyatakan kesannya terhadap cara belajar siswa Muslim di YSHHB itu. Mereka memperlihatkan cara belajar ajaran Islam dan ruangan kelas penuh dengan siswa membaca dan belajar Al-Qur'an yang mengagumkan seperti yang dilihat Ligaya Tan Miguel Direktur Wilayah Regional 1 dan dikesankannya kepada *The Brunei Times* dan keinginannya mengadopsi sistem itu di mana hal serupa itu belum ada dan belum menjadi bagian kurikulum yang ditawarkan dalam pembelakaran siswa muslim di Philipina. Justru komunitas muslim Philipina sedang merancang pendidikan Islam model sistem madrasah dan mengambil sistem baru yang ada di Brunei Darussalam termasuk yang baru di Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi mereka. (Mislaini, 2019)

Khusus bidang studi perbandingan pendidikan Islam Azyumardi didukung Zulmuqin melakukan pembahasannya yang meliputi studi sistem, kelembagaan, kebijakan, organisasi social keagamaan dan pemikiran tokoh tentang pendidikan Islam di berbagai negara. Melalui studi ini, diharapkan dapat memahami secara deskriptif dan analisis kritis dinamika pendidikan Islam di berbagai Negara dan memperbandingkannya dengan Negara lain. Meski bidang studi ini pada hakikatnya merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, ia mempunyai kaitan erat dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang secara substansial melihat *social movement* peserta didik dan pendidik di lembaga pendidikan yang menjadi basisnya mendalami ilmu pengetahuan dan mengembangkan kepribadian atau karakter. (Azra, 2002)

Di antaranya contoh pendidikan madrasah dalam aspek proses belajar-mengajar, dukungan struktural dalam implementasi program, dukungan pengelolaan sistem dan prosedur, seperangkat kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksana program, kurikulum, dan berbagi kisah sukses lain yang diraih pendidikan Madrasah Brunei Darussalam. Termasuk hal-hal yang menarik pada kegiatan ekstrakurikuler siswa muslim di YSHHB, jуда di *Ma'had Al-Qur'an Tutong*, mereka memiliki kegiatan dan kelas Al-Qur'an sendiri yang menyenangkan dukungan kerajaan, di samping cara-cara mereka belajar dan mempertahankan tradisi-tradisi ke-Islaman di negeri mereka. Tidak saja di madrasah terdapat banyak yang menarik dalam peningkatan pengajaran studi Islam bagi siswa-siswa Muslim, tetapi juga di tingkat pendidikan tinggi Brunei Darussalam. Seperti di UBD (Universiti Brunei Darussalam) di samping KUPU (Kolej Universiti Perguruan Ugama) Seri Begawan dalam mengajar studi Islam dan UNISSA (Universitas Islam Sultan Sharif Ali).

Dengan pola *top down* ini, maka pendidikan agama Islam dapat dengan cepat berkembang karena Islam terlebih dahulu telah dianut oleh raja. Raja bagi rakyat adalah penguasa yang harus ditaati. Dengan pola itu, Islam memungkinkan lebih cepat diterima dan berkembang. Pola ini juga terjadi dalam penerimaan Islam di Nusantara sehingga Islam dengan begitu cepat diterima oleh masyarakat hingga sekarang ini. (Sewang, 2004). Aman Diraja Dato Sri Utama mengatakan bahwa Brunei mengalami proses islamisasi ketika kerajaannya telah berdiri tidak jauh berbeda dengan Pattani atau Malaka. Tidak saja melihat ke pedalaman, tetapi juga seberang lautan, dalam menjalankan peranannya sebagai “jembatan penyeberangan” Islam. Keluarga kerajaan Brunei mendirikan suatu organisasi kekuasaan supredesa di Teluk Manila (*Luçon*). “Kesultanan” yang baru pada tahap pertumbuhan inilah yang dihadapi oleh Spanyol ketika mereka mendarat di Manila pada tahun 1570. Mislaini mengutip (al-Sufri, 1989).

Pendidikan formal di Brunei sebenarnya masih relatif baru, dimulai tahun 1912 diawali dengan membuka Sekolah Melayu di Bandar Seri Begawan. Usaha itu diikuti dengan pembukaan beberapa sekolah tahun 1918 di beberapa wilayah, yakni di Brunei-Muara, Kuala Belait dan Tutong khusus untuk murid laki-laki berusia 7-14 tahun dengan kurikulum pelajaran mencakup membaca dan menulis dalam bahasa Arab dan Latin di samping huruf tulisan jawi (arab pegon atau arab melayu). Komunitas keturunan bangsa asing mendapat peluang mendirikan sekolah di Brunei seperti sekolah Arab, Cina, Inggris, dan lain-lain. Sebelumnya tahun 1916, masyarakat Tionghoa telah mendirikan sekolah sendiri di Bandar Seri Begawan. Baru pada tahun 1931 sekolah dasar swasta pertama berbahasa Inggris berdiri di Seria. Sampai dengan tahun 1941, jumlah sekolah di Brunei baru mencapai 32 buah yang terdiri dari 24 sekolah Melayu, 3 sekolah swasta Inggris, 5 sekolah Cina dengan jumlah murid 1.714 orang dan 312 orang murid wanita. Namun reformasi pendidikan terus berlanjut di Brunei sejak abad ke-20. Karena filosofi Brunei “Melayu Islam Beraja”, maka dalam pengembangan pendidikan, terus ditingkatkan integrasi peran serta para ulama bersama pemerintah. Tahun 1950-an, Sultan Begawan juga melakukan reformasi pendidikan. (Mislaini, 2019)

Ada beberapa kebijakan dilahirkan, di antaranya (1) tahun 1954 membentuk MMS (Majelis Musyawarah Syari’ah), (2) membentuk Jabatan Hal Ehwal Uagama, Adat Istiadat dan Kebajikan, dan (3) Pendidikan Agama Islam Total. Tahun 1956 kelas-kelas baru pendidikan agama Islam pada 7 madrasah di Brunei Darussalam. Baru tahun 1966, sekolah Melayu pada tingkat pendidikan

menengah dibuka di Belait. Tahun 1984 kurikulum pendidikan nasional mewajibkan para siswa untuk menguasai dua bahasa yaitu bahasa Melayu dan Bahasa Inggris. Puncaknya berdirinya Universiti Brunei Darussalam (UBD) tahun 1985 sebagai lembaga pendidikan tinggi penting sekarang di samping, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Kolej University Perguruan Ugama (KUPU) yang sama konsepnya seperti IAIN, dan atau UIN di Indonesia, atau mirip IKIM dan IAIN (dirubah menjadi Universiti Insaniah) di Kedah Malaysia.

Secara kronologis sejarah pendidikan agama Brunei Darussalam disusun kembali dari berbagai sumber, sebagai berikut (Mislaini, 2019) 1) Brunei menerima agama Islam dengan resminya pada 1368 dalam zaman Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah merupakan raja atau pemerintahan pertama Islam Brunei Darussalam menganut Islam tahun 1363. Corak Islam dalam Pendidikan Brunei Darussalam, bertumpu pada dasar setelah kemerdekaan Brunei Darussalam 23 Februari 1985, di mana Islam dijadikan agama resmi negara. Segala perkembangan negara berdasarkan falsafah negara yaitu Melayu Islam Beraja (MIB) termasuk pengembangan pendidikan Islam. Bermula di rumah persendirian, masjid, balai oleh mubaligh Arab, ulama Aceh, Melaka, mulanya pusat Ilmu Ugama Pengajian ada dua bentuk: umum situasinya tidak pandai tulis baca, zikir, hadrah, mengaji al-Qur'an, sembahyang dan sebagainya, khusus pandai tulis baca, ilmu fiqh, faraidh, babun nikah, nahu, qawaid, tasawuf, akhlak. Kemudian pada tahun 1929 dibangun sekolah agama yang pertama. Tahun itu juga Balai ibadat didirikan sebagai sekolah dan menghantar kanak-kanak ke sekolah.

Tahun 1931, Pelajaran agama mula diajar di sekolah Melayu. Sekolah Melayu Jalan Pemanca kemudian dilaratkan ke Tutong & Belait 1940 sampai Kadi Besar mentadbir sekolah agama 1 Juli 1954, Jabatan Hal Ehwal Ugama didirikan. Pejabat Pelajaran Agama ditubuhkan (didirikan) Oktober 1956, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) dinaikkan taraf (kualifikasinya), Jabatan Pelajaran Urusan Agama ditingkatkan, Jabatan Pejabat ditingkatkan jadi Jabatan Pengajian Islam.

Tahun 1940-an Sultan Ahmad Tajuddin mengadakan Sekolah Arab tetapi tidak bertahan, tahun 1950-an SOAS III menghidupkan kembali, Sekolah Arab 15 Januari 1956 atas titah baginda, tahun 1966 Sekolah Menengah Arab Hassanal Bolkiah ada sebanyak 46 orang pelajar di Madrasah JHEU (Jabatan Hal Ehwal Ugama), disediakan guru-guru agama, pegawai-pegawai masjid/pegawai agama (Haji Awang Hasbol 2006). Tahun 1954 didirikan Jabatan Hal

Ehwal Ugama. Sebelum guru Johor, guru agama diambil/direkrut: i) pegawai masjid ii) orang yang boleh/dapat mengajar agama, iii) guru lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris Elaun, gaji \$25 00 sebulan \$25.00 sebulan. Tahun 1957, guru agama secara bersistem ada 3 kategori : 1) guru pelatih 2) guru tidak terlatih, dan 3) guru terlatih.

Tahun 1958 kelas dewasa agama kembali diadakan di kawasan bandar Seri Begawan bertujuan: a) tahu membaca al-Qur'an dengan baik tajwid, tertil serta irama/lagunya: b) tahu teori/praktik fardu 'ain/fardu kifayah, c) membiasakan taat kepada Allah, Rasul dan Sultan d) menanamkan perasaan aktif semarakkan masjid/syar Islam membentuk pribadi menurut ajaran

Islam e) saluran pemahaman ajaran Islam (Jabatan Pengajian Islam, 1996). Tahun 1965 diadakan Sekolah Rendah dan Menengah, dengan tujuan: a) memupuk/menggalakan pendidikan asas agama Islam b) menanam/mengembangkan rohani yang sehat c) menanam kepercayaan Islam dalam kehidupan secara utuh, d) memperkenalkan Islam sebagai agama yang benar tinggi/bertamaddun e) memupuk persaudaraan umat, bangsa dan agama.

Tahun 1966 didirikan Sekolah Menengah Agama dan menengah Arab. Tanggal 8 Juli 1968 KDYMM meletakkan batu asas (pertama) MPUSB dan beroperasi 8 Januari 1972. Tujuan MPUSB didirikan untuk: a) melatih guruguru mengajar agama b) mengadakan kursus: membaca Qur'an, mubaligh dan sebagainya, c) mengadakan kursus guru-guru/pegawai-pegawai KHEU, d) semua jabatan meninggikan nilai pelajaran untuk negara dan sumbangan kepada negara lain di rantau ini secara umum.

Pada 1 Januari 2007 didirikan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), pada 20 Januari 2007 Maktab Perguruan Ugama Sri Begawan (MPUSB) dinaikkan kualifikasinya menjadi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU-SB). Tahun 2007 itu pula, Sistem Pendidikan Negara (SPN) Brunei mengamanatkan sistem baru itu di mana pelajaran-pelajaran agama menjadi mata pelajaran teras (utama). Sejak awal tujuan (matlamat) Pendidikan Islam Negara Brunei adalah untuk pembentukan insan soleh dan masyarakat soleh. Dasar pendidikan Islam negara menekankan kepada: 1) kepercayaan dan taat kepada Allah Subhana Wata'ala, 2) keutamaan bahasa Melayu, 3) taat setia kepada Raja. Pendidikan Islam di Brunei dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama yang di tubuhkan pada 1986, untuk 1) mewujudkan sistem pendidikan agama yang tersusun kemas, 2) menyediakan lebih banyak kemudahan pengajaran dan pembelajaran agama, 3) membuat pemantauan yang berkesan dan berkesinambungan dalam semua

jenis persekolahan agama, 4) meningkatkan kualitas pegawai, guru dan staff jabatan pengajian Islam melalui latihan/keterampilan/kursus.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis juga di Brunei Darussalam, ketika belajar di UNISSA; menyaksikan bagaimana peserta didik belajar dengan baik di Masjid dan Mushola, setelah sholat berjma'ah mereka mulai mengaji dan menghafal ayat suci Al Qur'an di pandu oleh ustadznya, dengan penuh sabar dan ketelitian. Memberikan hormat kepada para guru atau ustadz, mendapatkan keberkahan dari setiap proses pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan ini berlangsung secara terus – menerus, tidak hanya beberapa kali, sehingga membuat peserta didik semakin dengan Al Qur'an dan melaksanakan ibadah sebagai bentuk kebutuhan hidup untuk mencapai ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan dunia hingga akhirat. (Sumarto, Pengalaman Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam, 2019)



“Proses perkembangan pendidikan di Brunei Darussalam, sebenarnya sudah dimulai sebelum tahun 1985 atau sebelum Brunei Darussalam merdeka, dimana Sultan Muhammad Shah sebagai Sultan Pertama sudah mulai mendirikan sekolah – sekolah pendidikan Agama Islam, sesuai dengan corak Negara pertama kali dibentuk yaitu Negara Islam, dimana sudah berdiri Sekolah – Sekolah Ugama, Sekolah Melayu dan Sekolah Arab walaupun dengan perkembangan zaman mengalami kemunduruan dikarenakan berbagai hal kesiapan kelengkapan Kesultanan dan Pemerintahan secara berdaulat dan diakui oleh Negara – Negara lainnya. Sehingga perkembangan begitu pesat ketika tahun 2007, mendirikan perguruan tinggi UNISSA, MPUSB yang kemudian berubah menjadi KUPU – SB, dan mengintegrasikan pendidikan Agama Islam dengan Sains dengan lahirnya perguruan tinggi UBD, dengan selalu melakukan perbaikan dalam system pendidikan secara nasional, sehingga Brunei Darussalam termasuk sebagai Negara dengan tingkat pendidikan terbaik di Asia Tenggara.” (Sumarto, Analisis Terhadap Sistem Kesultanan Brunei Darussalam, 2020)

Sosial Ekonomi

Keadaan social ekonomi masyarakat Brunei Darussalam berdasarkan hasil pengamatan kami ketika melaksanakan kegiatan Kunjungan akademik, *Benchmarking* dan Penguatan Reviewer di Brunei Darussalam, banyak temuan yang menarik dari kehidupan social masyarakat Brunei Darussalam (Ngainun Naim, 2020). Kehidupan social tersebut bisa tergambar dari kemegahan masjid – masjid yang ada di Brunei Darussalam, dimana masyarakatnya sangat taat menjalankan ibadah sholat di Masjid, masyarakatnya menggunakan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi untuk belajar mengaji bagi semua kalangan umur tidak hanya bagi anak – anak saja, kemudian sebagai tempat pengajian sebagaimana ketika kunjungan Ustadz Abdul Somad di Brunei Darussalam dan tempat bermusyawarah.

Ada beberapa hikmah dari perjalanan dan sholat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien yang kami amati dan rasakan langsung sebagai gambaran kehidupan social masyarakat Brunei Darussalam yang tergambar dari Masjid (Sumarto, Pengalaman Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam, 2019); 1. Masjid indah, bersih, rapi, wangi dan menjadi pusat pembelajaran Al Qur'an dan Al Sunnah di Brunei Darussalam, 2. Masjid di rawat dengan baik, dengan manajemen pengurus masjid yang di kelola langsung oleh pemerintah Brunei, sehingga sejahtera dan bertambah barokah, 3. Masjid adalah destinasi relegius yang sangat tepat untuk membuat diri lebih damai dan bersahaja dengan sesama, 4. Masjid menjadi tempat yang utama ketika hendak berkunjung ke Brunei Darussalam, seperti Musholla yang di bangun kembali oleh Sultan Hassanal Bolqiah di Bandara Sri Begawan, Musholla yang indah dan sejuk, menjadi simbol dan implementasi menyampaikan dakwah dan syariat oleh Sultan, 5. Masjid adalah dominasi Sangat penting di Brunei Darussalam, menjadi peran penting untuk kemakmuran rakyat, semua yang di hasrat kan adalah niat dari kita manusia, semua kembali kepada Allah, untuk jalan terbaik, mulia, berkah dan Kebermanfaatn hidup di dunia dan akhirat.

Status sosial ekonomi masyarakatnya, Brunei Darussalam merupakan Negara kaya berkat sumber daya alamnya seperti yang kita ketahui bersama dari berbagai sumber dan pengamatan kami langsung ketika berkunjung dan belajar di UNISSA Brunei Darussalam (Sumarto, Pengalaman Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam, 2019) yaitu ada minyak bumi, gas alam dan sumber daya alam lainnya seperti hasil alam dari sungai – sungai yang ada di Brunei Darussalam. Pembangunan berbagai fasilitas public

terus digalakkan pada fase berkembang untuk kemajuan demi mensejahterakan dan bahkan ada kalimat yang kami kuti dari artikel jurnal (Ghofur, 2015) membahaskannya dengan memanjakan rakyatnya.

Ketersediaan fasilitas umum seperti telpon, air, listrik, angkutan umum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain semuanya berada dalam tanggungan pemerintah atau gratis. Hal ini kami rasakan langsung (Sumarto, Pengalaman Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam, 2019) ketika teman kami Bapak Dr. Mus Mulyadi mengalami kurang sehat dikarenakan perjalanan, langsung pada malam hari kami membawanya ke Rumah Sakit Brunei Darussalam, *Alhamdulillah* dengan layanan yang baik, ramah dan maksimal serta biaya yang tergolong murah bagi para pengunjung yang datang ke Brunei Darussalam, tidak menunggu lama di ruang tunggu, langsung di arahkan ke Dokter Umum yang merupakan Dokter spesialis, yang masih ada walaupun sudah menjelang larut malam, Beliau melayani dengan baik, menanyakan penyakit yang dialami, hingga membuat resep obat yang terbaik. *Alhamdulillah* beberapa hari kemudian teman kami bapak Dr. Mus Mulyadi kembali sehat dan bisa mengikuti kembali rangkaian kegiatan di Brunei Darussalam.

Selanjutnya hal yang menarik dan memberikan gambaran kehidupan masyarakat secara ekonomi di Brunei Darussalam yaitu tidak ada kewajiban penduduk membayar pajak perorangan, dan yang ada hanya kewajiban membayar pajak bagi perusahaan (minyak). Kebutuhan hidupnya secara ekonomi sebagian besar dipenuhi melalui impor, baik makanan maupun alat-alat elektronik dari Negara jiran seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, termasuk dari Negara Jepang, Amerika dan Inggris. Sementara ekspor utama atau andalan dari Brunei Darussalam adalah minyak bumi dengan tujuan Amerika, Singapura dan Korea, dengan *surplus devisa* yang sangat besar. (Ghofur, 2015)

Penetapan Mazhab Syafi'i (fiqh)

Sebagaimana di Indonesia yang juga dominan bermazhab Syafi'i (fiqh) dalam menjalankan kegiatan ibadah, begitu juga di Brunei Darussalam yang secara aturan kenegaraan sudah memasukkan secara jelas, bahwa Mazhab Syafi'i (fiqh) yang diperlakukan di Negara Brunei Darussalam, sehingga setiap warga Negara harus mematuhi, tanpa terkecuali karena ini sudah menjadi aturan dari Kesultanan. Hal ini juga disampaikan Oleh Haji Sammali Bin Haji Adam sebagai Pengarah Hubungan Awam dari Brunei Darussalam, Mazhab Imam Syafe'i sudah menjadi nilai dan norma di Brunei Darussalam, setiap

masyarakatnya mematuhi dengan baik, menjalankan sesuai AL Qur'an dan Sunnah, karena tentunya di dalam Mazhab Syafi'i (fiqh) tidak ada yang bertentangan.

Dikutip dari (Ghofur, 2015) Penetapan Mazhab Syafi'i (fiqh) dan Mazhab *Ahl Sunnah wal Jamaah* yang termaktub dalam MIB sebenarnya dilatarbelakangi beberapa faktor historis yaitu: Sekitar abad ke-17 dan 18 M sampai masa abad ke-20-an di Kesultanan Brunei dijumpai kitab-kitab yang dijadikan standar kurikulum cenderung mengarah ke Mazhab Syafi'i dan Ahl Sunnah waj Jama'ah, seperti: *Sabilul Muhtadin* (karya Daud Fatani); *al-Mukhtasar* dan *Siratal Mustaqim* (karya ar-Raniry); *Ghayatut Taqrib fil Irthi wat-Ta'shib*, dan lainlain.

Mazhab Syafi'i juga menjadi pegangan para ulama Brunei dan kebanyakan ulama nusantara. Karena umumnya kitab yang dikarang berbahasa Arab Melayu. Pada tahun 1930-an s/d 1940-an terdapat pergesekan atau konflik dalam masyarakat, antara kelompok "bergondol" (tidak berkupiah) karena alasan modern dengan kelompok berkupiah. Dalam masyarakat ada yang saling mendukung dan menolak. Untuk menetralsisir perselisihan dalam masyarakat dari berbagai kelompok yang ada, maka sejak Sultan Abdul Momin (Raja ke-12 tahun 1852-1885) kerajaan terlibat menjadi pendukung salah satu mazhab yaitu mazhab Imam Syafii dan *Ahl Sunnah wal Jamaah*.

Adat di Brunei dijadikan undangundang tetapi berakulturasi dengan ajaran Islam. Undang-undang ini telah menjadi pegangan hidup masyarakat sebelum kedatangan Inggris ke Brunei. Apabila orang Melayu menganut Islam, maka undang-undang Islam telah diterima dan adat Melayu mulai disesuaikan dengan Islam supaya tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Sungguhpun adat tidak menjadi suatu sumber undang undang Islam, tetapi Islam membolehkan adat diterima dan diikuti oleh pemeluk Islam, selama adat itu tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Adat yang dianggap baik, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan Islam dapat diterima dan dijadikan pedoman bagi pemeluk Islam (Ghofur, 2015) mengutip dari (Ahmad Ibrahim dan Mahmud Saedon Awang Othman, 1988:1).

Eksistensi Islam

Eksistensi Islam di Brunei Darussalam sangat terlihat jelas dominasi dan pengaruhnya. Dari hasil kunjungan kami di Brunei Darussalam, terlihat dari setiap masyarakat Brunei Darussalam sangat terhubung dengan ajaran – ajaran Islam, mulai dari kegiatan – kegiatan ibadah di Masjid, di lingkungan kampus, sekolah, ruang terbuka public hingga pasar. Semua di dasarnya pada Al

Qur'an dan Sunnah. Ketika sholat Jum'at di Masjid Hassanal Bolqiah, kami memperhatikan proses pelaksanaan sholat Jum'at sesuai dengan Mazhab Imam Syafe'i, mulai dari persiapan khutbah, ketika khutbah, sholat Jum'at dan setelah selesai sholat Jum'at. Kemudian bertemu dengan saudara – saudara dari Timur Tengah dan Afrika yang belajar agama di Brunei Darussalam yaitu di UNISSA dan KUPU SB. Berdiskusi sejenak tentang bagaimana pandangan mereka tentang Brunei Darussalam, mereka menyampaikan bahwa Brunei Darussalam adalah salah satu destinasi pendidikan yang mereka tuju di dunia selain Negera – Negara di Timur Tengah, karena ajaran – ajaran Islam memang di tegakan dan di jalankan di Brunei Darussalam, sejalan dengan kebijakan dari Sultan Hassanal Bolqiah. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Islam di Brunei Darussalam tidak hanya secara nasional tetapi juga sudah berpengaruh pada dunia internasional. (Sumarto, Pengalaman Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam, 2019)

Dikutip dari (Najtama, 2018) memasuki tahun 2007 ini, penulis belum menemukan data yang akurat tentang berapa jumlah populasi umat Islam di Brunei Darussalam. Namun, jika berdasarkan pada data yang telah disinggung sebelumnya, yakni pada tahun 1991 kaum Muslim di Brunei 64% dan memasuki tahun 2004 penduduk Brunei berjumlah 443.653 jiwa, sementara umat Muslim masih tetap menjadi dominan sebagaimana sebelumnya, maka bisa saja diperkirakan bahwa saat ini jumlah mereka berkisar antara 80-90%. Selebihnya, 10% adalah China yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha, dan masyarakat campuran dari berbagai negara Eropa yang bekerja di Brunei.

Peningkatan jumlah populasi umat Islam antara 80-90% karena kebijakan pihak Kesultanan sebagai pemerintahan di Brunei Darussalam. Itu berarti sangat mustahil populasi umat Islam menurun, tetapi justru semakin mengalami perkembangan dari segi kuantitas, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kemapanan eksistensi Islam di Brunei dewasa ini dapat juga dilihat dari bangunan masjidnya yang sangat megah. Sebab, Lukman Hakim Hasibuan menyatakan, Keberadaan masjid pada suatu tempat menandakan kehidupan masyarakatnya maju (Hasibuan, 2003).

Masjid – Masjid di Brunei Darussalam dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam, masjid inilah yang kini menjadi mercu suar tanda dan keangunan dakwah Islam di Brunei. Di samping masjidnya yang berkubah, istana negara Brunei yang disebut Istana Nurul Iman, tempat keluarga sultan, sangat besar dengan kubah yang berlapis emas. Istana ini sebagai simbol eksistensi Islam di Brunei yang semakin mapan saat ini. Lebih

lanjut, pendidikan Islam di Brunei telah mengalami reformasi yang pada awalnya dilakukan secara pribadi oleh para ulama melalui lembaga yang dimilikinya. Pendidikan agama lebih sistematis, guru-guru agama dipersiapkan dengan baik pendidikannya oleh Kesultanan. (Thohir, 2002)

Ajaran pendidikan agama Islam merupakan program pengajaran moral inti sekolah-sekolah di Brunei Darussalam, dan tanpa mengabaikan pelajaran lain termasuk pelajaran – pelajaran lainnya. Semua disiplin ilmu tiga tahun dari pendidikan dasar diajarkan dalam bahasa Inggris. Penekanan pada bahasa Inggris ini diimbangi dengan pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa percakapan asli masyarakat Brunei Darussalam. Para alumni dari sekolah-sekolah yang memenuhi syarat, dikirim belajar ke Universitas al- Azhar Kairo dan Universitas terkemuka di Dunia. (Siddique, 2003)

Sebagian diarahkan untuk tetap melanjutkan kuliah di negeri sendiri, di Universitas Brunei Darussalam dan Universitas Sultan Syarif Ali UNISSA Brunei Darussalam. Masyarakat Muslim Brunei Darussalam tidak mengalami gerakan politik, terutama gerakan politik yang bernuansa keagamaan sebagaimana di negara-negara lain. Sejak tahun 1991, ketika diadakan peringatan Isra' Mi'raj, Sultan Hasanul Bolkihah dalam sambutan pidatonya memang telah mengeluarkan dekrit yang isinya melarang pergerakan *al-Arqam*. Paduka yang mulia selanjutnya memerintahkan kepada pihak penyelenggara pemerintahan untuk melarang orang-orang asing manapun yang dapat menjadi ancaman terhadap keharmonisan kehidupan beragama di Brunei Darussalam. Perintah atau Dekrit yang dikeluarkan pihak kerajaan Brunei ini sekaligus tanda bahwa eksistensi Islam di Brunei harus kuat, dan tidak terpecah-pecah. (Najtama, 2018)

Posisi sentral Islam diperkuat dengan kemajuan Brunei Darussalam dalam segala sektor, terutama sektor peminyakan dan industri yang tentu saja memiliki sumbangsih besar terhadap kejayaan Islam (Najtama, 2018). Negara ini menjadi kaya dengan sektor tersebut, dan akan menjadikan masyarakatnya semakin meningkat pula, terutama peningkatan dari segi pengalaman keagamaan. Kemakmuran dan kesejahteraan dalam bidang agama yang dinikmati masyarakat Muslim Brunei memang sangat beralasan kuat, karena dari pengamatan penulis sangat jelas kehidupan masyarakat di Brunei Darussalam sangat tertib, damai dan jauh dari kebisingan. Sebab, semua aktivitas kerajaan dan aturan pemerintah berfungsi untuk memperkokoh eksistensi Islam.

Pemerintah melarang jual beli minuman keras, pelarangan sekte-sekte Islam keras seperti *al-Arqam* dan selainnya sebagai indikator bahwa Brunei tetap menjadi Darussalam, sebuah negara aman yang sejahtera, terhindar dari

berbagai ancaman, gangguan, dan kekacauan baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negerinya. Hal ini kami lihat langsung ketika di Brunei Darussalam, untuk penjualan rokok sangat sulit di temukan dan bahkan tidak ada sama sekali, karena di Brunei Darussalam tidak memperbolehkan hal tersebut, sangat menjalankan perintah ajaran – ajaran Islam dengan baik.

Resiliensi Brunei Darussalam Terhadap Tantangan Global

Resiliensi atau ketahanan bisa dimaknai secara fisik dan psikis, dimana setiap Negara yang maju harus memiliki resilien yang kuat sehingga mampu bertahan dan maju memberikan pengaruh kepada Negara – Negara lain. Brunei Darussalam sebagai negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang tidak besar tapi mampu menjadi salah satu Negara Terkaya di Asia Tenggara dengan berbagai indicator pencapaiannya salah satunya adalah indeks kesejahteraan masyarakatnya dimana masyarakatnya hidup damai dan sejahtera, masyarakatnya memperoleh pekerjaan yang layak dengan penghasilan di atas standar, memiliki rumah tempat tinggal yang nyaman, hidup berdampingan dengan tetangga dan masyarakat secara bersahaja dan rukun, kemudian perhatian Negara begitu besar untuk mensejahterkan masyarakatnya.

Gempuran atau pengaruh budaya asing sudah meng-global di Negara – Negara lain termasuk di Indonesia, sehingga bisa mengakibatkan krisis dari identitas budaya bangsa. Tetapi Negara Brunei Darussalam memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai pengaruh budaya dan tantangan global yaitu tegaknya syariat Islam dengan baik dan benar, semua mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Kesultanan, tidak ada gerakan – gerakan yang provokatif apalagi tindakan radikal dan separatism di berbagai daerah, semua terkontrol dengan baik oleh Pemerintahan Kesultanan Brunei Darussalam.

Bila ditinjau lagi serbuan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama rupanya bukan hanya menjadi kecemasan masyarakat Muslim di Indonesia. Negara tetangga Indonesia, Brunei Darussalam, juga mengalaminya. Budaya asing dewasa ini memasuki Brunai Darusaalam dengan gencarnya, terutama yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, yang dikhawatirkan mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Selain itu, akan dapat pula memicu perselisihan dalam rumah tangga, problem ekonomi warga, krisis moral, ataupun masalah di bidang pendidikan. Persoalan-persoalan tersebut, bila sudah terlanjur membesar, akan sangat sulit untuk dibenahi. Salah satu yang disorot adalah kian gencarnya tayangan - tayangan hiburan dan promosi konser pemusik asing ke negara itu. Dalam setiap promosi yang diadakan, selalu saja

disertai kuis dan undian berhadiah dengan menggunakan fasilitas internet yang bisa mengakibatkan penipuan dengan berbagi sumber informasi yang tidak jelas atau bohong.

Dikutip dari (Imri, 2013) Dato Awang Haji juga mengingatkan kebiasaan buruk masyarakat yang kian bebas membelanjakan uang dan harta bendanya. Tokoh ini lantas meminta masyarakat kembali memperhatikan perintah agama, seperti tercantum dalam Alquran dan hadis. Salah satu upaya membendung pengaruh asing adalah menggencarkan dakwah di kalangan masyarakat. Sebenarnya, kegiatan dakwah di kalangan masyarakat telah berlangsung lama. Bahkan, pada tahun 1980-an, dakwah modern meraih keberhasilan yang antara lain digagas oleh sejumlah aliran tarekat. Memang, sebagai negara merdeka yang mengamalkan ajaran Islam, Brunei gencar melakukan Islamisasi dalam kehidupan publik. Selaras dengan kedudukan Islam sebagai agama resmi dan adanya falsafah “Melayu Islam Beraja (MIB)”, pemerintah kerajaan telah mendirikan beberapa lembaga publik yang berorientasi Islam.

Usaha meng-Islamkan hukum dengan memasukkan syariat telah dimulai dengan beberapa langkah, termasuk studi kelayakan, penelitian terhadap hukum yang berlaku guna memastikan tidak ada hal yang bertentangan dengan jiwa syariat, dan berbagai seminar mengenai penerapan hukum Islam. Juga, dalam usaha memberikan makna Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Pada akhir tahun 1980-an, dilakukan sejumlah langkah bagi pembentukan lembaga perbankan Islam. Sementara itu, dalam sendi kehidupan sosial, di Brunei orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat (dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi) dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis.

Brunei Darussalam terbagi menjadi 4 distrik, yaitu : distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Bandar Seri Begawan adalah Ibu Kota yang tertata rapi dengan penduduk hanya sekitar 60,000 jiwa. Salah satu bangunan yang termegah di negara ini adalah Mesjid Raya Omar Ali Saifuddin yang dibangun di atas sebuah laguna buatan dengan interior berhias marmer Italia. Kampung Ayer merupakan kawasan pemukiman umah panggung yang terdiri dari 28 desa dan telah ada selama beberapa abad lamanya. Pulau Rangu yang terletak di tengah sungai dekat Istana Nurul Iman, merupakan habitat beragam monyet khas Kalimantan. Brunei Darussalam menganut bentuk pemerintahan Kerajaan Mutlak (Monarchy Absolut) yang bersendikan kepada ajaran Islam menurut golongan Ahli Sunnah Waljamaah dengan berdasarkan kepada keadilan, amanah, dan kebebasan. (Imri, 2013)

Sultan Hassanal Bolkiah merupakan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Pemimpin Keagamaan sekaligus merangkap menteri pertahanan dan menteri keuangan. Sultan Bolkiah adalah keturunan ke-29 yang memerintah negeri tersebut dalam silsilah yang berumur 500 tahun. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri.

Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei Darussalam. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu Negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negara tetangga. Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekad 1960-an.

Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura. Brunei Darussalam memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan Negara negara ASEAN dan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan *Sprathly* yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar) dan Republik Cina. Rerlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei Darussalam menuntut wilayah di Sarawak, seperti daerah Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei Darussalam dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional. Walaupun demikian Brunei Darussalam tetap mempertahankan

eksistensinya sebagai Negara yang Merdeka, Berkembang dan Maju. (Imri, 2013)



“Kekuatan dan Kemajuan Negara Brunei Darussalam dapat dilihat dan terimplementasi dari ideologi yang dipegang teguh yaitu Melayu Islam Beraja atau MIB, dimana setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat berdasarkan Al Qur’an dan Hadits, kemudian adanya pertimbangan dari Mufti Kesultanan. Masjid – Masjid Besar, Megah dan Indah tidak sekedar menjadi symbol di Negara Brunei Darussalam, tetapi menjadi sumber kekuatan kehidupan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat, dimana Masjid – Masjid adalah tempat belajar, bermusyawarah dan tempat untuk mendapatkan banyak motivasi dan inspirasi, berkembang dan maju. Gambar sederhana ini, penulis gambar ketika berada di Brunei Darussalam, 9 September 2019, dimana Masjid adalah kita yang seharusnya senantiasa menngingat dan memuja Allah Subhana Wata’ala, tiada daya dan kekuatan kecuali bersumber dari Allah Subhana Wata’ala. Brunei Darussalam banyak mengajarkan makna kehidupan bahagia dunia dan akhirat.”

(Sumarto, Pengalaman Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam, 2019)

Kesimpulan

Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Kepemimpinan di Brunei Darussalam mewujudkan Islam yang *Rahmatan lil alamin* sesuai dengan pemaparan yang sudah kami sampaikan. 1) Pendidikan di Brunei Darussalam bercorak dominasi dari Pendidikan Agama Islam yang secara khusus dikelola oleh Kesultanan dalam Yayasan Haji Sultan Hassanal Bolkiah (YSHHB) begitu juga di tingkat perguruan tinggi seperti di UBD (Universiti Brunei Darussalam), KUPU (Kolej Universiti Perguruan Ugama) Seri Begawan dan UNISSA (Universitas Islam Sultan Sharif Ali). Pemerintahan Kesultanan sebagai penanggung jawab penuh proses pendidikan juga melakukan pengintegrasian antara pendidikan agama Islam dengan sains, dimana sesuai dengan ajaran – ajaran dalam Al Qur'an dan Hadits, semua memiliki keterhubungan dan kebermanfaat bagi manusia.

Kemudian ke - 2) Sosial Ekonomi yang ada di Brunei Darussalam yaitu masyarakatnya bersahaja, saling memberikan penghormatan kepada saudara – saudaranya, memberikan penghargaan dan menegur bila ada yang salah atau tidak sesuai dengan ajaran – ajaran Islam. Konsep perdamaian, hidup tertib dan teratur ada di Brunei Darussalam, dimana kita tidak pernah melihat tindakan kriminalitas di jalan, setiap pengendara mobil tidak saling membunyikan *klakson* dengan kencang bahkan menjadi bising, tidak ditemukan para pengemis atau peminta – minta sumbangan di jalan. Semuanya diberikan fasilitas dan kehidupan yang memadai oleh Kesultanan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab Negara. Begitu juga dengan perkembangan ekonomi yang begitu pesat di Brunei Darussalam, dimana penghasil alam yang utama adalah minyak bumi dan gas, sehingga Brunei Darussalam banyak melakukan ekspor ke Negara – Negara di Asia Tenggara bahkan dunia. Hal ini menjadi pemasukan atau pendapatan yang besar bagi Negara untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan baik dan makmur. Kemudian kehidupan masyarakat secara ekonomi di Brunei Darussalam juga tidak ada kewajiban penduduk membayar pajak perorangan, dan yang ada hanya kewajiban membayar pajak bagi perusahaan (minyak).

Selanjutnya yang ke – 3) Tentunya segala perkembangan dan kemajuan negara Brunei Darussalam berdasarkan falsafah negara yaitu Melayu Islam Beraja (MIB) termasuk sistem Kepemimpinan oleh Sultan yang sekarang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Falsafah Melayu Islam Beraja menjadikan Sultan sebagai Kepala Negara menjadi sosok utama dalam setiap

kebijakan dan peraturan yang diterapkan, begitu juga dengan kepribadian dan keluarga Sultan menjadi sosok teladan atau panutan bagi seluruh rakyatnya. Sultan Hassanal Bolkiah selalu menerapkan sikap keadilan bagi seluruh rakyatnya hal ini tercermin dari setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Negara mulai dari pemberian pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ruang terbuka untuk belajar, bermusyawarah, berdagang dan kegiatan lainnya yang harus bersumber pada ajaran – ajaran Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits. Kemudian Penetapan Mazhab Syafi'i (fiqh) dan Mazhab *Ahl Sunnah wal Jamaah* yang termaktub juga dalam Melayu Islam Beraja (MIB). Hal ini yang menurut pandangan penulis, menjadikan Islam yang *Rahmatan lil alamin* di Brunei Darussalam.

Bibliography

- Al-Sufri, P. A. (1989). *Islam in Brunei dalam Taufik Abdullah, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Azra, A. (2002). *Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran dalam Azyumardi Azra (Ed.), Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Bandung: Mizan.
- Daulay, H. P. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghofur, A. (2015). Islam Dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis). *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015.
- Hasibuan, L. H. (2003). *Pemberdayaan Masjid Masa Depan, Cet. II*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Imri, F. (2013). Brunai Darussalam: Negeri Dengan Sistem Pemerintahan. *Jurnal online westphalia*, Vol.12, NO.2 (Juli-Desember 2013), 353.
- Indonesia, D. K. (2019). *Laporan Kegiatan Pre Departure Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam*. Jakarta: DIKTIS Kementerian Agama RI.
- Jabatan Percetakan Kerajaan, J. P. (2019). *Konferensi Antar Bangsa Islam Borneo Ke - 12 Negara Brunei Darussalam dan BIHLAS 2*. Brunei Darussalam: Jabatan Percetakan Kerajaan.

- Jambi, P. U. (2016). *Kunjungan Akademik dan Benchmarking*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
- Mislaini. (2019). Pendidikan Islam di Brunei Darussalam. *Al-Kahfi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume IV, No. 2, Juli*, 5-10.
- Najtama, F. (2018). Perkembangan Islam di Brunei. *TASAMUH, Volume 10, Nomor 2, September* , 408.
- Ngainun Naim, D. (2020). *Membangun Relasi, Makna Penting Riset dan Publikasi*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Sewang, A. M. (2004). *Islamisasi Kerajaan Gowa*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Siddique, S. (2003). *Brunai Darussalam; Sebuah Bangsa Religius yang Potensial*. Bandung: Fokus Media.
- Sumarto. (2019). *Pengalaman Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM di UNISSA Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: Laporan Kegiatan.
- Sumarto. (2020). *Analisis Terhadap Sistem Kesultanan Brunei Darussalam*. Indonesia - Brunei Darussalam: Diktis Report Kegiatan Penguatan Reviewer dan LPPM PTKIN .
- Talib, N. S. (2013). Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern. *Kyoto Review of Southeast Asia Issue 13 (March 2013): Monarchies in Southeast Asia*, 5.
- Thohir, A. (2002). *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

BIODATA PENULIS



Dr. Sumarto, M.Pd.I,

Lahir di Tarutung 24 Maret 1990. Putra dari Bahrum Pohan dan Erni Siahaan, S.Pd. Istri Sumarto adalah Dr. Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I dengan 2 orang anak Mumtaz Nur Kholilah Al Faruq Pohan dan Balqis Zhafirah Muna Azizah Pohan. Alamat Rumah di Jl. Pemancar TVRI Desa Tasik Malaya, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, No. HP/ WA 082136949568.

E-mail: sumarto.manajemeno@gmail.com

Riwayat Pendidikan: SD Negeri 6 Kota Padangsidempuan 1996 s/d 2002, SMP Negeri 1 Padangsidempuan 2002 s/d 2005, SMA Negeri 1 Padangsidempuan 2005 s/d 2008, melanjutkan ke Pendidikan Tinggi: S1 (Komunikasi Penyiaran Islam) dan Program Anvulen Pendidikan Agama Islam (PAI) di STAIN Padangsidempuan 2008 s/d 2012, S2 (Bimbingan Konseling Islam) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 s/d 2014 dan S3 (Manajemen Pendidikan Islam) di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2014 s/d 2016.

Riwayat Kegiatan Ilmiah: Peserta Kunjungan Studi ke Singapura, Kuala Lumpur Malaysia dan Brunei Darussalam dari Pascasarjana IAIN STS Jambi Tahun 2015. Short Course Community Outreach di India (Aligarh – New Delhi – Dehradun - Kashmir), Short Course Penguatan Reviewer dan LPPM di Brunei Darussalam 2019. Presenter International Seminar “Educational Skills In The 21th Century Tahun 2016 FITK IAIN STS Jambi” Presenter ICON UCE 2016 International Conference on University-Community Engagement August 2-5, 2016 UIN Sunan Ampel Surabaya. Presenter Seminar Internasional Pascasarjana IAIN STS Jambi “Islam and Trans-Culture In Education” Tahun 2016. Peserta Short Course Community Outreach (SCCO) Diktis Kemenag RI-UIN Sunan Ampel Surabaya 27 Nopember-17 Desember 2017. Narasumber Workshop Penguatan Literasi bagi Guru PAI SMA/SMK se-Kota Bengkulu Tahun 2019. Narasumber Kegiatan Pelatihan “Mengubah Hasil Karya Penelitian menjadi Buku Ber - ISBN” melalui teknik dan validasi. Tahun 2019. Di Pascasarjana IAIN Curup.

Pengalaman Organisasi dan Karya Ilmiah: Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (FMPI) IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Pengurus Asosiasi Guru/Dosen Penulis Indonesia (AGUPENA) Provinsi Jambi, Pengurus Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI) Provinsi Jambi, Anggota Relawan Jurnal Indonesia (RJI), Anggota ICMI, Wakil Sekretaris Asosiasi Dosen Republik Indonesia ADRI Provinsi Jambi, Founder Literasi Kita Indonesia, Pembina Komunitas Pengawal Ideologi Bangsa KPIB IAIN Curup, Pembina Komunitas Sekolah Literasi Rejang Lebong dan Pengelola Taman Baca Masyarakat Tasik Malaya. Beberapa Karya Ilmiah yang dihasilkan bisa di akses melalui; <http://book.iaincurup.ac.id/index.php/lp2> , <https://jurnal.literasikitaindonesia.com/> , <https://ebook.literasikitaindonesia.com/>

Pengalaman Kerja: Sekarang sebagai ASN Dosen di Pascasarjana IAIN Curup, Pernah mengajar Dosen di UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, STAI Ma’arif Jambi, STAI Ahsanta Jambi, STIT Al Azhar Jambi.

Membangun Paradigma *Science Islam* Masa Depan Jumira Warlizasusi

Pendahuluan

Pada abad silam atau sebelumnya tidak dikenal istilah sains Islam atau Islamisasi sains, isu ini memang baru bergulir di sekitar tahun 1970-an seiring dengan berkembangnya berbagai kritik terhadap filsafat dan praktik keilmuan Barat dari tokoh-tokoh Islam seperti Syed Naquib Al-Attas, Seyyed Hossein Nasr, dan Ismail Al-Faruqi. Wacana ini adalah respon umat Islam terhadap paradigma keilmuan Barat sebagai paradigma paling berpengaruh dalam seabad terakhir yang dianggap memiliki banyak perbedaan dan pertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, Syed Muhammad Naquib Al-Attas secara tegas menyebutkan bahwa paradigma keilmuan Barat saat ini merupakan paradigma yang paling merusak sepanjang sejarah manusia⁵⁹

Seiring dengan perkembangan waktu, gagasan ini terus berkembang baik dari sisi konseptualnya maupun aplikasinya, khususnya di dunia pendidikan. Meski demikian, gagasan ini hingga saat ini belum sepenuhnya mapan dan masih banyak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan pelaku pendidikan Islam. Kesalahpahaman ini dapat dimengerti karena gagasan ini harus berhadapan dengan dominasi *worldview* sains modern yang sudah mapan selama ratusan tahun dan telah menyusup serta mengakar di dalam sistem pendidikan dunia Islam. Maka, ada dua tantangan besar yang akan dihadapi dalam hal ini. Pertama, adalah ketidakmampuan ilmuwan Muslim untuk menerjemahkan gagasan ini ke tingkat operasional di lingkup kurikulum pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Kedua, penolakan terhadap gagasan ini sendiri yang muncul bukan hanya dari kalangan non-Muslim, tetapi juga dari umat Islam sendiri. Oleh karena itu sebelum mewujudkan gagasan Islamisasi ke dalam sains, adalah penting bagi para ilmuwan dan praktisi pendidikan untuk memahami konsep dasar sains Islam secara utuh dan menyeluruh. Di sinilah letak pentingnya

⁵⁹ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, cet. ke-2, Bandung : Pimpin, 2011, hlm. 165

memahami pandangan hidup Islam (*worldview of Islam*) sebagai kerangka berpikir (*framework*) bagi Islamisasi kurikulum pendidikan sains.

Sains dan teknologi yang telah berkembang dengan sangat pesatnya di dunia Barat saat ini telah menimbulkan berbagai perubahan dan pergeseran yang luar biasa, tidak hanya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga telah merambah bidang filsafat dan agama, sehingga mengakibatkan globalisasi yang tidak lagi memperhatikan sentrisme tertentu (Aziz Azmeh, 1993). Yang menjadi masalah adalah bahwa setiap sistem ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh setiap peradaban tidak pernah bebas nilai (S.H. Nasr, 1995). Pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat *radics* dan *reductionic* (mendalam sampai ke akar-akarnya) dan prinsip *art for art* seringkali menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai agama, sebab siapa saja bisa mengembangkan apa saja demi memenuhi hasrat keingin-tahuannya, tanpa memikirkan apa dan bagaimana jadinya.

Modernisasi dengan segala kemajuannya ternyata mempunyai dampak sangat buruk, terutama bagi masyarakat Muslim yang belum betul-betul siap dengan segala perangkatnya.⁶⁰ Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun perangkat epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan yang didasarkan pada ruh Islam, yang akan membentuk paradigma pemikiran islami di tengah perkembangan masyarakat jagad (global) saat ini. Agama Islam berakar pada sikap percaya yang sungguh-sungguh atau tulus (iman). Meskipun mungkin pendekatan empiris dapat dilakukan, untuk menguji kebenaran suatu nilai keagamaan, tetapi dasar kebenaran suatu nilai keagamaan terutama terletak dalam verifikasi empiris, melainkan dalam percaya kepada pemberitaan dari atas (wahyu). Karena itu kedudukan sebuah kitab suci dalam agama adalah mutlak. Sebab itu dalam spektrum bidang kognitif manusia, agama menempati ujung yang berlawanan dengan pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan, baik yang alamiah maupun yang sosial adalah netral. Artinya tidak mengandung nilai kebaikan atau kejahatan pada dirinya sendiri. Nilainya diberikan oleh manusia yang memilikinya atau menguasainya.

⁶⁰ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi*. (1995)

Paradigma Integrasi Sains serta Upaya Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Hingga kini, masih kuat anggapan dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa “agama” dan “ilmu” adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Keduanya mempunyai wilayah sendiri-sendiri, terpisah antara satu dan lainnya, baik dari segi objek formal - material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan maupun status teori masing-masing bahkan sampai ke institusi keagamaan⁶¹.

Pembicaraan tentang ilmu akan selalu hangat dan menarik untuk diperbincangkan, karena ilmu akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ilmu tidak akan terhenti selama manusia masih mampu berpikir untuk mencermati segala fenomena-fenomena yang terjadi, baik fenomena dalam dirinya sendiri maupun di luar dirinya⁶².

Pada bagian lain, ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak selalu membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam waktu yang bersamaan, keduanya menimbulkan ancaman yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Tampaknya, sains dan teknologi itu melahirkan kondisi yang kontras: ada realitas yang positif dan ada pula realita yang negatif. Keduanya beriringan, realitas negatif menyertai realitas positif dan begitu juga sebaliknya. Akibat yang terjadi dari sains dan teknologi modern terhadap lingkungan semesta.

Dampak negatif dari sains dan teknologi modern itu dan itu bermula dari paradigma sekuler yakni model berpikir memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan duniawi, sehingga membahayakan kehidupan manusia. Ketika dampak negatif itu benar-benar merusak, Islam harus meresponsnya dengan memberikan solusi terbaik. Kunto Wijoyo menegaskan bahwa dalam sebuah dunia di mana kekuatan dan pengaruh ilmu pengetahuan menjadi destruktif, mengancam kehidupan umat manusia dan peradabannya, Islam jelas harus tampil untuk menawarkan alternatif paradigmatisnya di bidang ilmu. Islam di bidang keilmuan ini

⁶¹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 92.

⁶² Abuddin Nata, dkk., *Integrasi Ilmu Agama & Ilmu Umum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 11

bertitik tolak pada wahyu yang mengandung premis-premis normatif terutama dari Al-Qur'an kemudian dirumuskan cara berpikir.⁶³

Dalam pandangan Islam posisi ilmu menempati tingkat yang sangat tinggi, karena itu tidaklah heran jika banyak nash baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang menganjurkan kepada manusia untuk menuntut ilmu, di antaranya, firman Allah dalam surat Al-Alaq. Bentuk serta ilmu keislaman terangkum dalam syahadah, "kesaksian" yang menjadi dasar tauhid. Oleh karena itu, hal yang terpenting dari berbagai ilmu adalah ilmu tentang Tuhan, sedangkan ilmu tentang selain Tuhan merupakan sarana untuk mencapai ilmu tentang Tuhan, karena segala sesuatu pasti akan kembali kepada-Nya.

Dalam hal ilmu, Al-Ghazali membaginya menjadi tiga bagian. Pertama, ilmu-ilmu yang terkutuk baik sedikit maupun banyak, ilmu-ilmu ini tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun akhirat, seperti ilmu nujum, sihir, ilmu ramalan. Kedua, ilmu-ilmu yang terpuji baik sedikit maupun banyak, jenis ilmu ini dibagi menjadi dua, yaitu wajib ain dan wajib kifayah, yang termasuk kategori ilmu wajib ain untuk dipelajari ini mencakup ilmu-ilmu agama dengan segala jenisnya sedangkan ilmu yang termasuk fardhu kifayah mencakup ilmu keselamatan, kedokteran, hitungan, dan lain-lain. Ketiga, ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu, atau sedikit, dan akan tercela jika dipelajari secara mendalam, karena akan menyebabkan kekacauan antara keyakinan dan keraguan serta membawa ke kafiran, ilmu kategori ini mencakup filsafat, ilmu ilahiyat, logika dan lain-lain.

Berbeda dengan Al-Ghazali, Ibnu Arabi berpendapat bahwa ilmu terdiri dari ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang dunia yang akan datang, ilmu tentang dunia ini, ilmu tentang penciptaan serta pemeliharaan dunia, maka segala urusan manusia akan selalu berada "di tangannya" di mana pun dia berada dan manusia pun sadar akan diri dan segala perbuatannya. Masih menurutnya, bahwa ilmu adalah sifat Tuhan yang meliputi segala sesuatu, sehingga ia merupakan karunia Tuhan yang paling besar. Sebagai karunia yang paling besar, ilmu merupakan tuntutan di samping agama bagi manusia dalam mengabdikan dirinya sebagai khalifah di dunia. Dengan demikian, manusia dituntut memaknai hukum-hukum Allah yang kemudian diambil manfaatnya untuk

⁶³ Mujamil Qomar, *Pemikiran Islam Metodologis Model Pemikiran Alternatif Dalam Memajukan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 210 – 211

membangun dunia ini. Namun begitu bahwa ilmu yang dijadikan pegangan tidak bisa lepas begitu saja dari agama karena agama merupakan puncak dari pencapaian, sedangkan ilmu adalah alat atau jalan dari pencapaian tersebut. Agama tidak mengadakan perubahan dan memang bukan alat pembaruan, melainkan ilmulah yang mengadakan perubahan dan menjadi alat pembaruan.

Dari sini tampak jelas bahwa tidak ada dikotomi antara agama dan ilmu. Agama dan ilmu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena ketika kita membiarkannya berjalan terpisah, hal itu merupakan malapetaka bagi manusia itu sendiri.⁶⁴ Sejarah hubungan ilmu dan agama di barat mencatat bahwa pemimpin gereja menolak Teori Heliosentris Galileo atau teori Evolusi Darwin. Pemimpin gereja membuat pernyataan yang berada di luar kompetensinya. Sebaliknya Issac Newton dan tokoh-tokoh ilmu sekuler menempatkan Tuhan hanya sekedar sebagai penutup sementara lobang kesulitan (to fill gaps) yang tidak pernah terpecahkan dan terjawab oleh teori keilmuan mereka, sampai tiba waktunya diperoleh data yang lebih lengkap atau teori baru yang dapat menjawab kesulitan tersebut. Begitu kesulitan itu terjawab, maka secara otomatis intervensi Tuhan tidak lagi diperlukan. Akhirnya Tuhan dalam benak ilmuwan “sekuler” hanya ibarat pembuat jam (clock maker). Begitu alam semesta ini selesai diciptakan, Ia tidak peduli lagi dengan alam raya ciptaan-Nya dan alam semesta pun berjalan sendiri secara mekanis tanpa campur tangan tujuan agung ketuhanan.

Sementara dalam dunia timur, dalam hal ini dunia Islam, pengajaran ilmu-ilmu agama Islam yang normatif-tekstual terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu sosial, ekonomi, hukum dan humaniora pada umumnya.⁶⁵ Sejarah telah mencatat kontribusi peradaban Islam dalam peradaban umat manusia, lewat kontribusi mereka dalam peradaban barat. Untuk itu barangkali dapat kita susun sederet nama intelektual islam yang terdiri dari para filosof, sastrawan, penulis, maupun ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Berikut ini dapat kita ikuti deretan jenis kontribusi:

⁶⁴ Abuddin Nata, dkk., *Integrasi...*, hlm. 112 – 113.

⁶⁵ M. Amin Abdullah, *Islamic...*, hlm. 93 – 94.

1. Astronomi

Astronomi ternyata bukan hanya dipelajari oleh para ilmuwan melainkan juga menarik minat para sultan, khifah maupun alkhan yang menjadi raja dalam masyarakat muslim. Khalifah Al-Mansyur, misalnya, yang menjadi khalifah kedua dari bani Abasiyah yang berpusat di Baghdad (754-775 M), adalah termasuk salah seorang ahli astronomi dari mazhab Baghdad.

2. Matematika

Salah seorang ahli matematika muslim yang terkenal adalah Muhammad bin Musa bin Khawarizmi yang hidup di masa khalifah Al-Ma'mun, yang menulis buku Al-Jabar berjudul Al-Jabar Wal'maakalala (perhitungan dan simbol). Kata Al-jabar sendiri berarti perhitungan, dan istilah al-goritma berasal dari nama penemunya, yaitu Al-khawarizmi.

3. Kedokteran

Batang tubuh ilmu kedokteran telah ditulis oleh Rhases (Abu bakar ibnu zakaria Al-Razi) dalam judul havi, yang ditulis dalam khalifah Al-Mansur. Havi merupakan satu dari Sembilan jilid buku kedokteran yang terpampang dalam fakultas kedokteran di Paris pada tahun 1395

4. Filsafat

Abu Yusuf Ya'kub Al-Kindi dianggap termasuk ke dalam barisan terdepan para pemikir yang muncul pada periode pembentukan filsafat Islam dan pada permulaan periode-periode transisi kebudayaan dari masa teologi murni ke masa di mana pemikiran islam berakulturasi dengan filsafat Yunani, Persia, India.⁶⁶

Prinsip-Prinsip Dasar Islam Dalam Sains

Sains Islam adalah sains yang tumbuh dan berkembang dalam pandangan hidup Islam. Dengan pengertian ini Islamisasi sains pada dasarnya adalah sebuah proses menempatkan sains dalam kerangka pandangan hidup Islam (*worldview of Islam*). Dalam bahasa al-Attas Islamisasi merupakan sebuah gerakan membebaskan pemikiran umat

⁶⁶ Abu Su'ud, *Islamologi Sejarah, Ajaran dan peranannya dalam peradaban umat manusia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 201 – 206.

Islam dari kendali *worldview* sekuler dan kepercayaan dan tradisi lainnya yang bertentangan dengan Islam yang selama ini disusupkan melalui berbagai media, salah satunya adalah pendidikan.⁶⁷ Oleh karenanya, upaya ini bukan sekedar bermakna praktikal, tetapi juga fundamental karena menyentuh aspek keyakinan hidup seorang Muslim dan masyarakat Islam pada umumnya.

Penting untuk dipahami bahwa gagasan Islamisasi sains bukanlah untuk menolak sains Barat secara keseluruhan, sebab tidak semua yang dari Barat itu bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tidak sedikit darinya yang bermanfaat bagi kemajuan dunia Islam. Di masa lalu pengembangan sains dalam tamadun Islam banyak mengambil pelajaran dari tamadun non-Islam yang sudah lebih dahulu berkembang seperti Yunani, Cina, atau India dengan terlebih dahulu menyeleksinya menurut timbangan ajaran Islam. Meski demikian, mungkin saja ada ilmuwan tertentu terpengaruh dengan pandangan hidup tamadun tersebut, namun sebagai suatu umat yang diikat oleh pandangan hidup yang kuat berkat terpeliharanya wahyu (al-Qur'an dan as-Sunnah), selalu ada dari kalangan umat Islam yang mengoreksi kekeliruan tersebut kepada pandangan hidup Islam yang lurus. Islamisasi sains juga bukanlah sekedar labelisasi seperti matematika Islam, fisika Islam, astronomi Islam, dan seterusnya atau turunannya dalam bentuk teknologi Islam seperti pesawat Islam, komputer Islam, atau mobil Islam. Islamisasi sains juga hendaknya tidak dipersempit oleh aneka perbantahan mengenai kesesuaian Al-Qur'an dengan teori sains modern yang terkadang tidak produktif bagi perkembangan sains dunia Islam.

Untuk memahami sains dalam Islam perlu dipahami terlebih dahulu makna alam sebagai objek ilmu sains. Dalam pandangan hidup Islam, alam memiliki makna yang khas yang tercermin dari makna kata alam itu sendiri. Ditinjau dari Bahasa Arab, kata alam (*'alam*) berasal dari kata yang sama dengan ilmu (*'ilm*), yaitu *'-ilm* (*'ain-lam-mim*) atau *'alam*, yaitu adalah segala sesuatu selain Allah.⁶⁸ Dalam pandangan Islam, segala sesuatu selain Allah itu merupakan makhluk (ciptaan) Allah. Oleh karena itu alam pada hakikatnya merupakan

⁶⁷ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, cet. ke-2, Bandung : Pimpin, 2011, hlm. 55

⁶⁸ Omar M. Al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, hlm 58

ciptaan yang menunjukkan adanya sosok Pencipta (Khalik) makhluk tersebut, yaitu Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa alam ini disediakan Allah untuk memberi manfaat bagi manusia di dunia.⁶⁹ Sebagian dari manfaat alam itu masih berupa potensi-potensi dan baru bisa dimanfaatkan setelah melalui pengolahan tertentu. Hal ini menuntut manusia memiliki kemampuan untuk mengolah berbagai benda atau makhluk-makhluk di alam. Untuk dapat mengolah semua ini manusia memerlukan ilmu sains untuk mengetahui bagaimana cara kerja alam. Tanpa sains, banyak sekali potensi alam yang hanya akan menjadi bahan mentah yang masih terbatas manfaatnya. Itu berarti ilmu sains merupakan kunci bagi manusia untuk bisa mengaktualisasikan manfaat alam tersebut.

Ilmu sains tersebut dimungkinkan untuk berkembang karena Allah telah menciptakan alam ini dengan keteraturan sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu manusia disuruh Allah untuk memperhatikan dan mempelajarinya dengan mengembangkan sains agar bisa mengetahui pola-pola yang terdapat di alam. Semua manfaat-manfaat tersebut menunjukkan bahwa alam merupakan pengejawantahan kewujudan Allah berikut kebaikan-kebaikan-Nya sementara manusia tidak sedikit pun memiliki peran dalam penciptaan semua ini dan oleh karenanya ia berhutang kepada Tuhannya. Dengan merasakan manfaat alam ini diharapkan tumbuh rasa syukur manusia terhadap pemberian Tuhannya yang kemudian mendorongnya untuk menjadi hamba Allah yang baik.

Untuk memahami alam ini, manusia tidak hanya diberikan karunia berupa indra dan kecerdasan akal saja, tetapi juga wahyu. Melalui wahyu ini Allah membuka mata manusia mengenai berbagai isyarat ilmiah yang ada di alam. Dalam banyak kasus, informasi Al-Qur'an dapat berperan memberikan informasi yang penting guna membantu manusia memahami pola-pola alam. Hal itu ditunjukkan al-Qur'an lewat berbagai ayat yang berbicara tentang isyarat-isyarat ilmiah diantaranya tentang proses penciptaan manusia⁷⁰, khasiat madu bagi kesehatan, pergerakan benda langit, pergerakan air, dan lain sebagainya.

⁶⁹ QS. Ibrahim [14] : 32-33, an-Nahl [16] : 12-14, al-Hajj [22] : 65

⁷⁰ QS. Al-Mu'minuun [23] : 12-14

Shihab mengatakan bahwa Al-Qur'an sejatinya bukan kitab sains sebagaimana kitab sains lainnya, melainkan kitab petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurutnya, untuk mendukung fungsinya sebagai kitab petunjuk itu, maka tidak heran Al-Qur'an memuat berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan sains, di dalamnya. Pengetahuan ini dipaparkan dalam redaksi yang singkat dan sarat makna yang dapat memuaskan akal siapapun, baik orang kebanyakan atau orang pemikir.⁷¹ Itu berarti isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Qur'an membutuhkan pengkajian lebih lanjut untuk menguak rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian sains dalam pandangan Islam tidak hanya dibatasi pada spekulasi rasional dan pengamatan terhadap fenomena awal sebagaimana yang dianjurkan dalam metode saintifik (*scientific methods*), tetapi juga melalui pengkajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Sifat finalitas Al-Qur'an sebagai firman Allah telah membebaskan kitab itu dari segala bentuk koreksi dan kesalahan. Itu sebabnya Al-Qur'an sebenarnya bukan saja dapat menjadi sumber maklumat awal untuk penelitian sains, melainkan juga harus menjadi ukuran untuk menilai keabsahan teori-teori sains. Oleh karena itu juga, teori-teori sains yang bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam Al-Qur'an dengan sendirinya tidak dapat diterima. Hal yang sama juga berlaku bagi hadits-hadits Nabi yang terpercaya, karena Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dua sumber ilmu yang paling utama dan tidak terpisahkan. Meskipun sabda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bukanlah kalam Allah, namun perkataan beliau juga merefleksikan wahyu Allah. Sebab, pada dasarnya perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* merupakan pengetahuan yang berasal dari Allah juga dan bukan hasil pemikiran spekulatif Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* belaka. Sejumlah kajian mengenai hadits-hadits Nabi (termasuk yang dipandang janggal bagi sebagian orang seperti membenamkan lalat yang jatuh ke dalam minuman)

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*,

Bandung : Mizan, 2003, hlm. 165-166

menunjukkan perkataan beliau dapat dibenarkan jika ditinjau berdasarkan ilmu pengetahuan modern.⁷²

Meski demikian, Al-Qaththan mengingatkan perihal kekeliruan yang banyak dilakukan orang yang mencoba menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan teori-teori sains yang baru.⁷³ Padahal teori-teori sains bersifat terbuka terhadap koreksi sehingga senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, bahkan tidak jarang perubahan itu terjadi pada teorinya yang paling asas sekalipun. Sementara Al-Qur'an adalah kitab yang final dan mutlak yang tidak mungkin salah karena berasal dari Allah sehingga tidak mungkin adanya koreksi terhadapnya di kemudian hari. Menurutnya kemukjizatan Al-Qur'an terletak pada dorongannya kepada manusia untuk berpikir dan menggunakan akal serta memikirkan alam yang mana dorongan ini tidak ditemukan pada kitab suci lainnya. Selain itu, kemukjizatan Al-Qur'an adalah berarti bahwa tidak adanya pertentangan antara Al-Qur'an dengan kaidah ilmu pengetahuan yang telah valid dan mantap. Dengan demikian, al-Qur'an dalam konteks ini berfungsi untuk membimbing manusia memahami alam secara benar sehingga dapat mengantarkannya pada keimanan kepada Allah. Al-Qaththan mengatakan, "Al-Qur'an menjadikan pemikiran yang lurus dan perhatian yang tepat terhadap alam dan segala apa yang ada di dalamnya sebagai sarana terbesar untuk beriman kepada Allah."⁷⁴

Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan Allah sia-sia tanpa makna, bahkan hal-hal remeh seperti seekor nyamuk pun memiliki makna di sisi Allah.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan semua benda dan kejadian di alam ini sebenarnya mengandung pelajaran, meskipun dalam pandangan lahiriah yang dangkal hal itu terkadang tidak disadari, kecuali oleh orang-orang yang memadukan kegiatan berpikir dan berzikir, atau antara kegiatan ilmiah dengan ibadah. Dengan memadukan kedua aktivitas ini diharapkan makna-makna yang ada di balik kejadian-kejadian alam

⁷² Said Hawwa, *Ar-Rasul Šballallāhu 'Alaihi Wasallam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2007, hlm. 44-60

⁷³ Manna' Khalil al-Qaththan, , *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Jakarta : Litera Antarnusa, 2010, hlm 385

⁷⁴ Ibid, hal 387

⁷⁵ QS. Al Baqarah [2] : 26

menjadi jelas sehingga manusia dapat semakin mengenal Allah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan-Nya.

Bakar mengakui bahwa meskipun Al-Qur'an bukanlah kitab sains, namun ia memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip sains dan mengaitkannya dengan pengetahuan metafisik dan spiritual. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa perintah Al-Qur'an untuk "membaca dengan nama Tuhanmu" bahwa pencarian ilmu, termasuk ilmu sains, harus didasarkan pada fondasi pengetahuan mengenai realitas Tuhan.⁷⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap alam tidak semata-mata bersifat kebendaan (materialistik) tetapi juga terkait erat dengan keyakinan-keyakinan supra-rasional. Dengan kata lain, sains dalam pandangan Islam haruslah semakin meneguhkan keimanan seseorang.

Di titik inilah konsep sains dalam paham modern dengan Islam berpisah jalan. Dalam paradigma sains modern, penelitian alam bertujuan memahami alam sebagai sebuah realitas yang berdiri sendiri yang tidak berkaitan dengan makna ruhani apapun. Fokus perhatiannya diarahkan kepada alam itu sendiri sebagai realitas yang berdiri sendiri, terlepas apakah Tuhan itu ada atau tidak. Oleh karena itu perhatian terbesar sains modern ditujukan untuk mengungkap rahasia alam itu sedalam-dalamnya, baik untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan hidup manusia atau sekedar memenuhi rasa keingintahuan manusia saja. Sebaliknya di dalam Islam penelitian alam bukan hanya bertujuan untuk memperoleh manfaat praktisnya bagi kehidupan, tetapi juga bertujuan untuk menggali makna spiritual yang ada di baliknya. Oleh karenanya kedua tujuan ini harus berjalan beriringan. Indikasi kesepaduan tujuan ini dapat dilihat dari cara Al-Qur'an dalam menggambarkan berbagai kejadian di alam dengan cara menyandingkan penggambaran kejadian tersebut dengan pengungkapan sifat-sifat Allah. Semua ini untuk memberitahukan dan menegaskan kewujudan, kekuasaan, kemurahan, dan keagungan-Nya, sehingga manusia memahami dan mengenal siapa yang berada di balik semua kejadian di alam ini.

⁷⁶ Osman Bakar, *Tauhid dan Sains : Perspektif Islam mengenai Agama dan Sains*, Edisi Revisi, Bandung : Pustaka Hidayah, 2008, hlm 149

Kesamaan Al-Qur'an dan alam sebagai ayat-ayat Allah menyiratkan pula bahwa alam pun juga tersusun dari ayat-ayat yang jelas dan yang samar maknanya. Keduanya harus dilihat dalam kesatuan pandangan (tauhid) yang saling melengkapi (komplementer) satu dengan lainnya. Dalam ayat-ayat Allah banyak yang di dalamnya terkandung berbagai petunjuk kehidupan. Ada ayat Al-Qur'an yang mulanya masih samar maknanya dan baru dipahami di kemudian hari setelah diungkapkan oleh penelitian sains. Misalnya, Al-Qur'an mengisyaratkan tentang gerakan benda-benda langit yang bergerak teratur pada suatu lintasan.⁷⁷ Ketika ayat itu turun, ilmu astronomi belum berkembang seperti sekarang sehingga konsep lintasan ini belumlah benar-benar dipahami. Namun ketika ilmu astronomi telah berkembang, maka ayat tersebut menjadi jelas maknanya. Demikian juga, ada isyarat-isyarat alam yang tidak begitu jelas maknanya menjadi dapat dipahami setelah diperoleh pemahaman terhadap pesan yang ada di dalam Al-Qur'an (dan juga hadits). Misalnya, ilmuwan Muslim banyak merujuk Al-Qur'an dalam mengembangkan teori tentang psikologi manusia. Begitu juga sabda Nabi *ṣallallahu 'alaihī wasallam* banyak dipakai sebagai rujukan ilmu kedokteran atau kesehatan.

Dengan cara pandang seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu yang dihasilkan dari kegiatan memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam ini sekurangnya memiliki dua tujuan pokok. *Pertama*, tujuan spiritual atau ruhaniah, yaitu agar menjadi sarana manusia mengenal Allah. *Kedua*, tujuan praktis atau lahiriah, yaitu agar pola-pola alam dapat dipahami sehingga manusia dapat mempertahankan hidupnya dari berbagai kesulitan dan mengolah alam untuk diambil manfaatnya. Tujuan pertama merupakan tujuan yang tertinggi, sebab ia terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah.⁷⁸ Sekiranya manusia tidak mengenal Allah, maka tidak mungkin manusia dapat beribadah kepada-Nya. Semakin dalam pengenalan seseorang kepada Allah, maka semakin besar pula kualitas ibadahnya kepada Allah.

Kedua tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus berjalan bersama-sama, sebab tujuan kedua berfungsi untuk menyempurnakan tujuan pertama, dan begitu pula

⁷⁷ QS. Al-Anbiyaa' [21] : 33

⁷⁸ QS. Adz Dzariyaat [51] : 56

sebaliknya. Ketika manusia meneliti alam agar dapat merasakan manfaat dari alam, maka hal itu akan menjadi jalan baginya semakin bersyukur kepada Allah sebab semua manfaat itu tidak dapat diperolehnya kecuali dengan pertolongan Allah. Sedangkan ketika manusia meneliti alam ini sebagai upaya semakin mengenal Allah, maka manusia akan memanfaatkan alam ini dengan cara-cara yang diridhai Allah sehingga alam ini terjaga dari berbagai kerusakan yang dapat merugikan manusia sendiri.

Langkah-Langkah Strategis Integralisasi

Sejak diajukannya konsep sains islami oleh Sayyed Hosein Nasr dan program islamisasi pengetahuan oleh almarhum Isma'il Faruqi, terjadi perdebatan panjang yang tak berujung tentang sains dan Islam. Ada yang mengatakan sains yang sekarang tidak islami seperti kata Hosein Nasr dan ada yang mengatakan bahwa sains itu netral seperti kata almarhum Abdussalam. Yang mengatakan sains modern itu tak islami merujuk pada krisis peradaban kontemporer. Yang mengatakan bahwa sains sekarang tak islami berbeda pendapat mengenai sains mana yang islami. Hosein Nasr misalnya mengatakan sains tradisional Islam di masa lalu sebagai sains islami, sedangkan Ziauddin Sardar mengatakan bahwa sains islami masih harus dikonstruksi setelah membongkar sains modern yang ada.

Sementara itu terdapat pandangan bahwa sains sekarang telah islami karena banyak penemuan-penemuan baru sains bersesuaian dengan konsep-konsep Quran tentang alam. Oleh karena itu yang perlu dilakukan bukanlah islamisasi sains, tetapi modernisasi ilmu-ilmu kalam, fiqh dan tasawwuf. Kemunduran peradaban Islam bersumber pada ketidak mampuan umat Islam menggali Quran secara ilmiah di satu pihak dan kegagalan mengakomodasi tuntutan-tuntutan zaman sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi.

Dengan demikian terdapat WG sebuah spektrum pandangan mengenai relasi sains modern dan Islam. Dari sains itu tak islami, lewat sains itu netral hingga sains itu sudah islami. Tampaknya semua pandangan itu mempunyai argumen-argumen yang sama kuatnya. Namun sains itu bukan hanya sekumpulan pengetahuan, akan tetapi juga meliputi proses yang menghasilkannya. Sebagai proses, sains tak dapat dilepaskan dan konteks sosial dan kultural yang selalu berkembang

sesuai dengan kemajuan sains sebagai produk dan teknologi sebagai aplikasi sains.

Oleh karena itu, sains bukanlah suatu produk yang statis yang bisa diwarnai begitu saja oleh pemakainya. Sains Barat modern terus berkembang dan mengalami transformasi sesuai dengan adaptasi sosio-kultural terhadap teknologi sebagai aplikasi sains dan implikasi filosofis penemuan-penemuan teoritik di dalam sains itu sendiri. Sains adalah sebuah bagian dari proses ko-evolusi sosio-teknologi. Di awal milenium ini koevolusi sosio-teknologi mencapai masa transisi baru dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Bersamaan dengan itu sains mengalami transformasi paradigmatik suatu hal yang dilupakan oleh para peserta debat besar sains dan Islam

Itulah sebabnya dalam makalah ini kita tidak akan berdebat mengenai tingkat keislaman sains Barat masa kini, tetapi memeriksa keislaman sains barat masa depan. Dalam pandangan ini transformasi paradigmatik sains barat merupakan bagian dari islamisasi sains. Islamisasi sains adalah kelanjutan rasional dari reorientasi paradigmatik sains yang sedang berjalan sehubungan dengan kritik-kritik eksternal yang mengaitkan dampak-dampak eksternal negatif sains dengan paradigma sains modern. Oleh karena itu tahap-tahap transformasi paradigmatik sains itu kita jadikan langkah-langkah islamisasi menuju sains islami masa depan. Kita mulai dengan langkah pertama.

Langkah Pertama: Analisis Struktur Internal Sains

Menurut sejarah, sains Barat modern bermula dengan lahirnya mekanika Newton yang kemudian menjadi model untuk cabang-cabang ilmu lainnya. Pada awalnya sains alam adalah cabang filsafat dan disebut filsafat alam. Judul buku Isaac Newton yang berisi teorinya tentang gerak benda-benda berjudul *Principia Mathematica Philosophiae Naturalis* atau Prinsip Matematis Filsafat Alam. Sebelum terbitnya buku itu terjadi perdebatan filosofis di abad XVII antara aliran empirisme Francis Bacon dan aliran Rasionalisme Rene Descartes. Bacon mengatakan bahwa sains modern harus bermula pada fakta-fakta empiris yang bisa diamati, sedangkan teori dibuat berdasarkan generalisasi dari fakta-fakta tersebut. Sementara itu Descartes mengatakan sains harus dibangun seperti geometri Euklides yang terbentuk dari sejumlah aksioma, definisi

dan penurunan teorema-teorema secara deduktif dengan menggunakan logika.

Ketika menulis bukunya, Newton mengikuti contoh metoda matematik yang diberikan Descartes. Apa yang dilakukan Newton adalah menambahkan aksioma-aksioma tentang gerak yang dianggapnya melengkapi aksioma-aksioma geometri Euklides. Namun, berbeda dengan Descartes, Newton tidak menganggap aksiomanya sebagai pernyataan yang harus diterima benar dengan sendirinya seperti aksioma-aksioma geometri Euklides.

Aksioma-aksioma baru itu, bagi Newton, adalah hipotesa-hipotesa sementara yang konsekuensi-konsekuensinya harus bisa sesuai dengan pengamatan-pengamatan empiris. Dengan demikian, dia menyelesaikan pertikaian filosofis antara empirisme Francis Bacon dan rasionalisme Rene Descartes dengan mengajukan metoda hipotetiko-deduktif yang dikawinkan dengan metoda eksperimental-induktif. Artinya sains modern bukan sekedar rasional ataupun empiris saja. Hakekat sains adalah pengetahuan rasional empiris atau pengetahuan rasional obyektif.

Tujuan sains modern yang rasional obyektif itu adalah untuk pemanfaatan alam bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Ia bersifat rasional karena sains memiliki komponen pengetahuan teoritis dan sifatnya obyektif menunjukkan bahwa komponen lainnya adalah pengetahuan faktual yang diperoleh melalui eksperimen terhadap obyek-obyeknya.

Pengetahuan faktual terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah metoda eksperimen kuantitatif yang reproduisibel sehingga menjamin obyektivitas data-datanya. Yang kedua adalah fakta-fakta eksperimental yang diperoleh melalui analisis statistik data-data yang diperoleh dari eksperimen. Fakta-fakta itulah yang mencerminkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta.

Pengetahuan teoritis terdiri dua komponen. Yang pertama adalah perumusan hukum-hukum alam yang diasumsikan ada pada gejala-gejala alam. Yang kedua terdiri dari prinsip-prinsip logis matematis yang harus dipenuhi oleh hukum-hukum alam itu. Gabungan antara kedua komponen itu membentuk teori mengenai gejala-gejala alam yang direpresentasikan oleh pengetahuan faktual.

Keempat komponen pengetahuan ilmiah menjadi satu ketika terjadi kesesuaian antara ramalan-ramalan teoritis fakta-fakta eksperimental. Proses pengujian kebenaran pengetahuan teoritis melalui hasil-hasil eksperimen disebut proses verifikasi teori. Proses penemuan kesalahan suatu teori melalui percobaan-percobaan eksperimental disebut proses falsifikasi.

Sains tumbuh dengan semakin luasnya pengetahuan faktual yang memverifikasinya. Sains berkembang setelah terjadi pembangunan kembali teori yang difalsifikasi oleh pengamatan-pengamatan eksperimental. Teori berkembang jika digantikan oleh teori baru yang menjadikan teori lama sebagai hal khusus dari teori yang baru tersebut. Jadi sains tumbuh kembang melalui benturan antara pengetahuan teoritis yang rasional dan pengetahuan eksperimental yang obyektif.

Kedua komponen besar pengetahuan ilmiah mempunyai fungsinya masing-masing. Pengetahuan teoritis berfungsi untuk melukiskan menjelaskan dan menfasirkan pengetahuan faktual. Sedangkan pengetahuan faktual berfungsi untuk mengamati dan melukiskan semua fenomena alam yang obyektif. Dengan demikian sains modern mempunyai empat buah fungsi: observasional, deskriptif, eksplanatif dan interpretatif.

Keempat fungsi pengetahuan ilmiah tersebut memungkinkan manusia melakukan prakiraan-prakiraan terhadap apa yang terjadi jika manusia mengintervensi gejala-gejala alam. Hal ini diperlukan untuk mengendalikan dan mengaturnya sehingga mencapai tujuan-tujuan yang menguntungkan manusia. Hal inilah yang dilakukan oleh teknologi sebagai penerapan sains.

Langkah Kedua: Analisis Dampak Eksternal Negatif Sains

Masih terbayang di benak kita bahwa, di paruh kedua abad ke-20 yang lalu, kita dihantui oleh ancaman terjadinya perang nuklir yang akan menghancurkan planet bumi ini. Bahkan jika semua hulu-ledak nuklir dalam semua rudal yang dibangun selama perang dingin itu secara sekaligus, maka bumi akan hancur puluhan kali. Ledakan itu akan membuat ledakan bom atom sekutu di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir perang dunia kedua bagaikan mercon anak-anak. Dan semua itu bersumber pada surat rahasia ilmuwan Albert Einstein pada presiden

Amerika Serikat untuk membuat bom atom, mengingat Nazi Jerman pada waktu itu diketahui sedang mengusahakan bom yang sama.

Sejarah mencatat bahwa surat itu mencetuskan Proyek Manhattan yang berhasil membuat bom atom pertama di dunia. Eskalasi perlombaan senjata nuklir pasca Perang Dunia II merupakan konsekuensi politik militer global dari aplikasi fisika nuklir di akhir Perang Dunia II itu. Inilah dampak negatif sains yang pertama: pemanfaatannya untuk keperluan senjata pemusnah masal.

Kini masalah perang nuklir itu mungkin sudah mereda dengan runtuhnya Blok Timur yang dipimpin oleh negara adikuasa Uni Soviet Rusia. Namun, senjata pemusnah masal yang berdasarkan ilmu kimia dan biologi terus dikembangkan di berbagai negara. Aplikasi sains untuk pemusnahan masal masih merupakan dampak negatif yang harus dipertimbangkan.

Para ilmuwan biasanya berlindung terhadap kritik dari luar terhadap sains yang berdasarkan penggunaan sains menjadi senjata pemusnah dengan mengatakan sains itu netral, begitu juga teknologi yang merupakan penerapan sains. Teknologi itu bagaikan pisau: di tangan pembunuh dia menjadi senjata yang mematikan, di tangan dokter bedah dia menjadi penyelamat manusia. Begitu juga teknologi, misalnya teknologi nuklir bisa digunakan untuk penghancur, namun dia bisa digunakan untuk sumber energi pengganti teknologi energi yang menggunakan bahan bakar fosil. Namun bencana kebocoran radiasi dari reaktor-reaktor nuklir, seperti di Chernobyl misalnya, membuat kritikus memperluas wilayah serangannya: polusi.

Polusi radiasi nuklir yang berasal dari reaktor nuklir hanyalah sebagian dari polusi industri yang berbahaya terhadap lingkungan hidup. Pada umumnya industri merupakan penerapan sains untuk kesejahteraan manusia, akan tetapi limbah beracun industri menembus rantai kehidupan dan menumpuk secara perlahan-lahan sehingga pada suatu waktu daya peracunnya menjadi efektif. Jika waktu itu tiba, maka akan banyak spesies makhluk akan musnah, dan pada suatu waktu manusia akan mendapat gilirannya. Namun perusakan lingkungan hidup bukan hanya melalui rantai makanan ekologis, tetapi juga melalui lingkungan fisik secara langsung. Perusakan lingkungan hidup oleh percobaan nuklir, pertambangan yang menggaruk permukaan bumi adalah kenyataan sehari-hari masyarakat industri.

Tampaknya dampak-dampak yang menyakitkan ini tidak seharusnya dituduhkan pada sains itu sendiri kecuali pada teknologi yang merupakan penerapannya, namun seharusnya pada proses industrialisasi yang bersumber pada keserakahan manusia sebagai produsen dan konsumen. Sains justru dapat menyumbangkan penelitiannya untuk mencari bahan-bahan substitusi bagi bahan bakar dan bahan pendingin industri. Namun, sains dan teknologi adalah dua komponen yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi masyarakat. Loloh balik positip antara teknologi dan sains di satu pihak di samping hal sama antara teknologi dan ekonomi merupakan kenyataan yang tak dapat dibantah. Karena itu para ilmuwan harus ikut bertanggung jawab atas bencana lingkungan yang dibawa oleh kemajuan teknologi dan ekonomi.

Akan tetapi bencana lingkungan hidup biologis bukanlah satu-satunya dampak negatif tak langsung dari perkembangan sains. Belakangan banyak kritikus sains memusatkan perhatiannya pada aspek-aspek sosial yang dirusak oleh perkembangan sains, teknologi dan ekonomi. Industrialisasi telah mendorong urbanisasi yang mengundang penduduk desa untuk berbondong-bondong pindah ke kota.

Urbanisasi itu sendiri bukanlah hal yang negatif, namun tak dapat dibantah bahwa urbanisasi menimbulkan sejumlah masalah. Individualisasi yang dipicu oleh tata pemukiman dan pola kerja manusia urban, membuat masyarakat menjadi terfragmentasi dan teralienasi. Fragmentasi dan alienasi di keluarga di satu pihak, dan kompetisi yang berat di lain pihak, menimbulkan ketegangan psikologis yang sering berujung pada penyalah-gunaan obat-obatan yang dibuat oleh industri kimia.

Penyalahgunaan obat-obatan narkotik dan psikotropik, tentunya tak dapat dituduhkan pada pembuat obat-obatan itu sendiri, karena hal itu dipicu oleh tuntutan psikologi para pemakai dan tuntutan ekonomis para pengedarnya. Namun, kenyataan bahwa kedua tuntutan itu bersumber pada industrialisasi yang pada gilirannya bersumber pada kemajuan teknologi dan perkembangan sains, membuat para kritikus sains menjadi lebih kritis terhadap sains dan membuat para ilmuwan yang prihatin mulai mempertanyakan: apa yang salah pada sains itu sendiri? Inilah langkah ketiga islamisasi sains.

Langkah Ketiga: Analisis Kritis Fondasional Sains

Para agamawan melihat bahwa sains mempunyai sebuah kesalahan besar. Dampak-dampak negatif itu muncul karena kesalahan ini. Kesalahan ini adalah pengabaian realitas-realitas spiritual dari pembahasan pengetahuan ilmiah. Tuhan Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur itu dibuang dari wacana sains kealaman dan kemasyarakatan. Begitu juga alam gaib dan roh manusia sama sekali tidak diperhatikan. Dengan perkataan lain sains itu bersifat materialistis. Singkatnya, landasan filsafat sains adalah materialisme yang atheistik.

Para filosof juga mempunyai kritik mereka sendiri. Para fenomenolog yang diikuti oleh para eksistensialis, melihat sains sebagai sumber petaka sosial karena pandangan reduksionisme yang menyamaratakan manusia dengan benda-benda alam lainnya. Padahal, menurut mereka, pengetahuan manusia mengenai dirinya bersifat langsung dan kaya yang menjadi miskin ketika direduksi menjadi sekumpulan pembacaan angka-angka hasil pengamatan eksperimental. Jadi tidak mengherankan jika kesengsaraan manusia timbul begitu sains diterapkan menjadi teknologi.

Kaum neo-marxis melihat sains yang dikatakan rasional itu sebagai sebuah kekeliruan, karena sains itu tidak seluruhnya rasional. Rasionalitas sains bersifat terbatas karena rasionalitas sains hanya bersifat instrumental. Rasionalitas instrumental sains cenderung untuk mencari apa yang dibutuhkan oleh teknologi yang pada gilirannya diarahkan oleh kepentingan-kepentingan politik ekonomi kapitalisme. Padahal disamping rasionalitas instrumental terdapat rasionalitas komunikatif yang diperlukan proses demokrasi dalam rangka melihat realitas sosial kemanusiaan secara lebih utuh menyeluruh.

Kritik kaum neomarxis ini diperkuat oleh kritik kaum feminis. Kaum feminis juga membongkar asumsi-asumsi dibalik asumsi-asumsi sains. Kesalahan sains bukan hanya pada rasionalitas yang terbatas, tetapi pada rasionalitas itu sendiri. Penekanan pada rasionalitas itu sendiri merupakan bias patriarki yang melandasi kapitalisme yang diabdikan oleh teknologi sebagai penerapan sains. Rasionalisme yang bersifat analitis dan reduksionis itu mengabaikan fakultas pengetahuan manusia yang biasanya lebih banyak dimiliki oleh kaum perempuan yaitu intuisi. Intuisi yang relasional dan holistik itu telah ditinggalkan oleh para ilmuwan. Tak heran jika kecendrungan dominatif patriarki membayangkan-bayangi setiap gerak langkah sains.

Demikianlah, gerak langkah kapitalisme yang patriarkis itu melihat alam sebagai obyek yang harus ditaklukkan. Tak heran jika suku primitif Indian Amerika melihat gerak langkah ekono-teknologis kaum kapitalis barat sebagai pemerkosaan terhadap alam atau bumi. Tak mengherankan pula jika kerusakan lingkungan merupakan dampak yang tak dapat dihindarkan dari sains modern. Sejumlah spesies makhluk hidup musnah sebagai akibat perambahan hutan, gunung dan laut. Dari fakta ini kaum pencinta lingkungan hidup melihat sumber filosofis dari kegagalan sains untuk sepenuhnya mencapai tujuannya. Kaum ekologis melihat bahwa sains bukan saja bersifat rasional yang merupakan ciri manusia sebagai makhluk hidup tertinggi, tetapi sains itu bersifat antroposentris seperti terlihat dari definisi tujuannya. Netralisme sains adalah sebuah ilusi belaka.

Jadi antroposentrisme rasionalistis para kapitalis yang patriarkis itulah yang tersembunyi dalam praktek sehari-hari sains seperti yang ditemukan oleh kaum neomarxis, feminis dan ekologis. Penemuan mereka ini dipertajam oleh kaum etnoreligius yang menggabungkan kritik-kritik ideologis tersebut dengan kritik teologis dan filosofis.

Antroposentrisme rasionalis dan kapitalisme patriarkis itu merupakan ciri dominan peradaban barat modern sekularistik yang merupakan ibu kandung sains modern yang meninggalkan agama dari kehidupan budaya sehari-hari. Oleh karena itu sains Barat yang disebut sebagai sains modern itu harus diganti oleh ilmu-sains etnoreligius tradisional seperti sains Cina, sains Hindu, sains Islam dan lain sebagainya. Untuk itu kita periksa apa yang dilakukan di Barat menghadapi kritik-kritik tersebut sebagai langkah keempat islamisasi sains.

Langkah Keempat: Integralisasi Islami Paradigma Sains

Dalam peradaban Islam ilmu-ilmu kealaman tak dipisahkan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu keagamaan. Dalam terminologi modern ketiga jenis ilmu itu disebut sebagai sains, filsafat dan teologi. Paradigma holistik mengintegrasikan sains yang rasional empiris dan filsafat yang logis intuitif dalam suatu kesatuan ilmu yang empiris-rasional-intuitif. Intuisi tertinggi muncul dalam bentuk wahyu para nabi yang kemudian diekspresikan secara verbal dan dikodifikasi secara tekstual dalam bentuk kitab-kitab suci.

Islam berkeyakinan bahwa kitab suci terakhir adalah Quran al-Karim, oleh karena itu paradigma holisme sinergetik barat sebagai kelanjutan paradigma materialisme mekanistik harus dikembalikan pada landasan revelasional sehingga terjadi sebuah proses islamisasi sains dari bawah ke atas, dari fondasi filosofisnya ke aplikasi praktisnya. Jadi pada intinya islamisasi sains adalah integralisasi semua ilmu dengan meletakkannya dalam hirarki seperti yang terdapat dalam ilmu-ilmu Islam tradisional.

Pada dasarnya semua ilmu harus berdasarkan hikmat yang berdasarkan wahyu seperti yang dinyatakan dalam akhir ayat 113 surat *An-Nisa* . Dengan demikian kesatuan ilmu-hikmat-kitab, atau sains-filsafat-agama adalah kesatuan yang hirarkis yang menggantikan kesatuan polar antara pengetahuan sains dan kearifan filsafat seperti yang diyakini para penganut paradigma holistik Barat pasca-modern. Dengan demikian sains Islam bukan sekedar empiris-rasional-intuitif tetapi empiris-rasional-intuitif-revelasional.

Secara tradisional islami, empirisme ilmu berkaitan dengan *jism* dan *nafs*, rasional berkaitan dengan *'aql*, intuitif berkaitan dengan *qalb* dan revelasional berkaitan dengan *rub*. Jadi kesatuan hirarki ilmu islami berkaitan dengan kesatuan integral manusia sebagai subyek yang mengetahui yang terdiri dari *jism-nafs-'aql-qalb-rub*. Dalam bahasa modern kesatuan itu berkaitan erat dengan kesatuan materi-energi-informasi-nilai dengan sumber kesatuan transendental nilai-nilai tersebut.

Secara struktural ilmu islami terdiri dari *'ainal yaqin* yang bersifat eksperimental observasional, *'ilmal yaqin* yang bersifat teoretikal linguistik dan *haqqal yaqin* yang bersifat intuitif revelasional. Ketiga komponen ilmu islam itu berkaitan dengan tiga organon ilmu yaitu *al-sama'* , *al-absbara* dan *al-af'idab* seperti yang dinyatakan dalam ayat 9 surat *as-Sajadah* Ketiga komponen dan organon ilmu itu juga tersusun secara hirarkis integral dari yang material-energetik lewat yang informatik-valuasional hingga ke yang spiritual. Inilah paradigma ontologi integralis sains islami.

Instrumen-instrumen ilmu bersifat material, eksperimen ilmu bersifat energetik, fakta dan teori ilmu bersifat informatik dan prinsip dan norma ilmu bersifat valuasional. Instrumen itu adalah perpanjangan organ *jism*, eksperimen merupakan kelanjutan kegiatan eksplorasi instinktif *nafs*, teori merupakan produk nalar *'aql* dan prinsip dan nilai

ilmu merupakan hasil refleksi dan meditasi kebersihan *qalb* sebagai organ dari ruh manusia. Dengan demikian ilmu merupakan instrumen manusia untuk mengaktualisasikan kebebasan spiritualnya dalam pemenuhan kebutuhan materialnya. Ilmu itu merupakan bagian dari kegiatan transformatif manusia terhadap lingkungannya dalam rangka mensyukuri nikmat karunia Allah. Oleh karena itu ilmu mengenai benda-benda yang disebut sebagai sains tak dapat dipisahkan dari ilmu mengenai cara yang disebut sebagai teknologi. Teknologi sebagai penerapan sains juga terdiri dari empat komponen atau strata eksistensial yang berkaitan dengan materi, energi, informasi dan nilai.

Dalam sains islami, paradigma epistemologis dan paradigma aksiologis tak bisa dipisahkan dari paradigma ontologis. Paradigma ontologis sains islami juga bersifat integralis. Seperti dalam paradigma ontologi baru sains holistik barat, dalam materi adalah bentuk statik dari energi yang tersimpan secara struktural berjenjang yang merupakan produk proses evolusioner energetik bertahap. Hanya saja sains islami melihat struktur-struktur material itu merupakan *kehalqillah* atau makhluk ciptaan Allah sebagai produk proses-proses energetik yang merupakan *af'alullah* atau *sunatullah*. Dengan perkataan lain paradigma ontologis tak bisa dipisahkan dari teologi Islam.

Kesimpulan

1. Paradigma sains masa depan serta upaya islamisasi ilmu pengetahuan manusia dituntut memaknai hukum-hukum Allah yang kemudian diambil manfaatnya untuk membangun dunia ini. Namun begitu bahwa ilmu yang dijadikan pegangan tidak bisa lepas begitu saja dari agama karena agama merupakan puncak dari pencapaian, sedangkan ilmu adalah alat atau jalan dari pencapaian tersebut. Agama tidak mengadakan perubahan dan memang bukan alat pembaruan, melainkan ilmulah yang mengadakan perubahan dan menjadi alat pembaruan. Dari sini tampak jelas bahwa tidak ada dikotomi antara agama dan ilmu. Agama dan ilmu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena ketika kita membiarkannya berjalan terpisah, hal itu merupakan malapetaka bagi manusia itu sendiri.
2. Ilmu yang dihasilkan dari kegiatan memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam ini sekurangnya memiliki dua prinsip, *Pertama*, tujuan spiritual atau ruhaniah, yaitu agar menjadi sarana manusia mengenal

Allah. *Kedua*, tujuan praktis atau lahiriah, yaitu agar pola-pola alam dapat dipahami sehingga manusia dapat mempertahankan hidupnya dari berbagai kesulitan dan mengolah alam untuk diambil manfaatnya. Tujuan pertama merupakan tujuan yang tertinggi, sebab ia terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah.⁷⁹ Sekiranya manusia tidak mengenal Allah, maka tidak mungkin manusia dapat beribadah kepada-Nya. Semakin dalam pengenalan seseorang kepada Allah, maka semakin besar pula kualitas ibadahnya kepada Allah.

3. Langkah-langkah islamisasi menuju sains islami masa depan adalah : 1). Analisis Struktur Internal Sains, 2). Analisis Dampak Eksternal Negatif Sains, 3). Analisis Kritis Fondasional Sains, 4). Re-orientasi Holistik Paradigma Sains, 5). Integralisasi Islami Paradigma Sains

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, dkk., *Integrasi Ilmu Agama & Ilmu Umum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Abu Su'ud, *Islamologi Sejarah, Ajaran dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003)
- Al Quran dan Terjemahan.
- Alparslan Acikgenc, "A Concept of Philosophy in the Qur'anic Context", *American Journal of Islamic Social Sciences*, 11 : 2, 1994
- M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Maurice Bucaille, *Bible, Qur'an dan Sains Modern*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978
- M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung : Mizan, 2003
- Manna' Khalil al-Qaththan, , *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Jakarta : Litera Antarnusa
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbab : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Omar M. Al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*
- Osman Bakar, *Taubid dan Sains : Perspektif Islam mengenai Agama dan Sains*, Edisi Revisi, Bandung : Pustaka Hidayah, 2008

⁷⁹ QS. Adz Dzaariyaat [51] : 56

Said Hawwa, *Ar-Rasul Shallallâhu 'Alaihi Wasallam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2007

Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, cet. ke-2, Bandung : Pimpin, 2011

Biodata Penulis



Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd lahir di Tarusan-Pesisir Selatan Sumatera Barat 25 September 1966, anak pertama dari lima bersaudara pasangan dari H. Sabiruddin dan Hj. Syafna. Menikah pada tahun 1995 dengan Dr. H. Ifnaldi, M.Pd dikaruniai tiga orang anak: Farhan Fadhillah (mhs. Kedokteran Gigi Baiturrahmah Padang), Fathur Rizki (mhs. Prodi Political Science International, Istanbul Zaim University Turkey), Fayza Zahira Ikhwanina (santri MAN IC Bengkulu Tengah). **Riwayat Pendidikan:** SD Negeri 4 Kodya Sawahlunto lulus tahun 1978, SMP Negeri 1 Kodya Sawahlunto lulus tahun 1982, SMA Negeri 4 Padang lulus tahun 1985, D3 Sendratasik IKIP Negeri Padang lulus tahun 1989, S1 IKIP Negeri Yogyakarta lulus tahun 1993, S2 Manajemen Pendidikan Universitas Bengkulu lulus tahun 2008, S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta lulus tahun 2018. **Riwayat Pekerjaan:** Guru SMA Negeri 5 Curup tahun 1995 – 2000, Guru SMA Negeri 1 Curup tahun 2000 – 2004, Kasubdin Parsenibud pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong 2004 – 2007, Guru SMA Negeri 2 Curup tahun 2007 – 2010, Dosen IAIN Curup tahun 2010 hingga sekarang. **Pengalaman Organisasi:** Pengurus Bidang Seni Budaya pada Mathlaul Anwar Rejang Lebong tahun 1995, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Rejang Lebong tahun 1995, Wanita PGRI 1999, Ketua Harian Sanggar Pemda Rejang Lebong 2002-2005, Sekretaris Umum Dharmawanita STAIN Curup 2011-2015. Pengurus Ikatan Keluarga Minang (IKM) Rejang Lebong tahun 1995 hingga sekarang. **Penghargaan yang pernah diterima:** Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten

Rejang Lebong tahun 2007 dan tahun 2008, Finalis Lomba Menulis Cerpen Tk Nasional tahun 2003, Finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Tingkat Nasional 2004, Penata Tari Massal ‘Wahyu Illahi’ dalam rangka MTQ Tk Propinsi Bengkulu tahun 2005, Bengkulan Award 2008 dari Gubernur Bengkulu, Penata Tari Terbaik I Tingkat Propinsi Bengkulu tahun 2007, Seniman Rejang Lebong dari Bupati Rejang Lebong 2005. Buku yang sudah dihasilkan yaitu: Kepemimpinan Transformatif Pendidikan Tinggi (Literasiologi, 2019, ISBN 978-623-92481-3-02019), Komitmen Guru (Literasiologi, 2020, ISBN 978-623-92692-4-1), Kinerja Dokter (Literasiologi, 2019, ISBN 978-623-92481-6-1

**PERSIAPAN GENERASI EMAS ABAD 2045 :
KOLABORASI KONSELOR DENGAN GURU/DOSEN DALAM
UPAYA PENGEMBANGAN CURIOSITY PESERTA DIDIK
DALAM BELAJAR**

Hartini

hartini@iaincurup.ac.id

Pendahuluan

Islam sangat menekankan kewajiban menuntut ilmu, karena ilmu di dalam dunia Islam merupakan prasyarat utama dalam memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat⁸⁰. Membangun ilmu hendaknya dapat ditegakkan karena dapat dijadikan alat yang sangat halus dan tajam untuk menyebarluaskan cara dan pandangan hidup sesuatu kebudayaan⁸¹, namun ilmu bukan bebas-nilai (*value-free*), tetapi sarat nilai (*value-laden*),⁸² sehingga dalam pengembangan ilmu perlu dibatasi dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai adat,⁸³ baik dalam memilih objek kajian yang menjadi fokus pengembangan ilmu yang akan di teliti maupun dari cara meneliti, dan menggunakan ilmu hasil penelitiannya⁸⁴

Pada hakekatnya Ilmu bila dikaji dari bahasa arab berasal dari kata ‘ilm yang memiliki arti mengetahui, faham akar kata ‘ain-lammim yang diambil dari perkataan ‘alamah, yaitu ma‘rifah (pengenalan), syu‘ur (kesadaran), tadzakkur (pengingat), fahm dan fiqh (pengertian dan pemahaman), ‘aql (intelektual), dirayah dan riwayat (perkenalan, pengetahuan, narasi), hikmah (kearifan), ‘alamah (lambang), tanda atau indikasi yang dengan sesuatu atau seseorang dikenal.⁸⁵ Bila dikaji dari perspektif barat ilmu berasal dari bahasa latin yakni *scientia* atau dalam bahasa Inggris *science* yang mengandung arti pengetahuan. Pengembangan pengetahuan saat erat hubungannya dengan kondisi *curiosity* (keingintahuan) seseorang. Ilmu akan diperoleh jika seseorang memiliki *curiosity*

⁸⁰ Achmad Reza Hutama Al-Faruqi, “Konsep Ilmu Dalam Islam,” *Kalimah* 13, No. 2 (2015): 225.

⁸¹ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 49

⁸² Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC. Edisi kedua.

⁸³ Muhammad Zaini (2017) KONTROL NILAI TERHADAP SAINS. JURNAL Substantia, Volume 19 Nomor 1, April 2017.

⁸⁴ Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan* hal. 46-47

⁸⁵ Wan Mohd. Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Mohd. Naquib al-Attas*, terj. Hamid Fahmy, dkk, (Bandung: Mizan, 2003), 144.

yang mendalam sehingga akan diperolehnya pengetahuan, pengertian, pengenalan, pemahaman, kesadaran intelektual dan narasi terhadap objek yang menjadi fokus kajian. Hal ini menegaskan bahwa tingkatan curiosity seseorang dalam mengali ilmu pengetahuan akan berkontribusi besar terhadap perolehan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya, keingintahuan (*curiosity*) merupakan suatu ketertarikan (*interest*) individu terhadap sesuatu objek, yang mengandung unsur mencari kebaruan (*novelty-seeking*) yang dapat memunculkan keterbukaan terhadap pengalaman (*openess of experience*) dan melakukan penjelajahan (eksplorasi) yang mendalam sehingga diperolehnya berbagai pengetahuan dan pengalaman berkelanjutan (Seligman, 2004)⁸⁶. Kondisi ini menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan akan diperoleh jika individu memiliki ketertarikan terhadap objek yang menjadi fokus kajian sehingga akan mendorong keinginan untuk mencari kebaruan dan terbuka untuk mengali pengalaman melalui penjelajahan yang mendalam. Namun bila dikaji dari pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang nilai curiosity diterangkan bahwa Ilmu pengetahuan merupakan proses transfer suatu gambar (objek) yang diketahui dari luar (empirik) dan penetapannya di dalam jiwa yang akan terwujud melalui amal perbuatan (aktivitas) seseorang. Dengan kata lain ilmu pengetahuan adalah integrasi antara yang diketahui (objek) dan yang mengetahui (subjek) dalam mengimplementasi ilmu pengetahuan direalitas kehidupan yakni adanya kesesuaian antara ilmu dan amal perbuatan yang merupakan ilmu yang benar dan valid.⁸⁷ Bila kedua pandangan ini disatukan dalam penerapan pada satuan pendidikan maka akan diperoleh ilmu pengetahuan yang mendalam dan dapat diamalkan melalui perbuatan yang nyata dalam menjalani kehidupan. Keseimbangan pengetahuan, pemahaman dan perbuatan dapat juga diperoleh melalui aplikasi pilar pembelajaran yakni belajar untuk tahu (*to know*), belajar untuk melakukan (*to do*), belajar untuk hidup bersama (*to live together*) dan belajar untuk menjadi diri sendiri (*to be*) yang hendaknya dapat peserta didik terapkan karena mereka memiliki motivasi intrinsik yang kuat sehingga motivasi ekstrinsik hanyalah sebagai pelengkap dan penguatan terfasilitasinya curiosity (keingintahuan) pada materi pelajaran yang dibahas.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada satuan pendidikan jenjang SMA ditemukan bahwa lebih dari separuh memiliki

⁸⁶ Christopher Peterson Martin E. P. Seligman.2004. Character Strengths And Virtues. American Psychological Association. .Oxford University Press, Inc

⁸⁷ Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah. 2001. Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim. Terj. Muzaidi Hasbullah. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

siswa kecenderungan belajar dikarenakan motivasi extrinsic, hal ini menerangkan bahwa keingintahuan dalam belajar muncul mayoritas karena faktor dari luar diri.⁸⁸ sedangkan hasil penelitian pada jenjang Perguruan Tinggi ditemukan makin tinggi tingkat semester maka makin rendah keingintahuan dalam belajar yakni mahasiswa semester III memiliki keingintahuan yang lebih tinggi dalam belajar dibandingkan dengan siswa pada semester V dan VII,⁸⁹ bahkan ditemukan keingintahuan mahasiswa dalam belajar cenderung berada pada medium kategori bahkan cenderung rendah karena jumlah mahasiswa yang Jarang dan tidak pernah ingintahu dalam belajar lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa yang sering dan selalu ingintahu dalam belajar.⁹⁰

Berbagai hasil penelitian yang telah penulis lakukan menjadi data empiris yang dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan suatu tindakan yang nyata dalam membantu mengoptimalkan curiosity (keingintahuan) peserta didik dalam belajar sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam mengali ilmu pengetahuan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata setiap melaksanakan aktivitas melalui cara dan pandangan hidup pada sesuatu kebudayaan yang bernilai.

Analisis berbagai hasil penelitian pengembangan curiosity pada kurun waktu 10 tahun terakhir pada jenjang SD, SMP dan SMA juga penulis lakukan dan ditemukan bahwa proses pengembangan (curiosity) keingintahuan peserta didik dalam belajar banyak terfokus pada proses pembelajaran diantaranya ditemukan efek positif dalam membangun kepercayaan diri dan minat siswa melalui pengembangan keingintahuan siswa dalam belajar⁹¹, keingintahuan siswa mengalami peningkatan dalam belajar melalui pemberian pengajaran menggunakan buku cerita⁹², penerapan *Project Based Learning* dengan *scaffolding*

⁸⁸H Hartini (2018) [Cultural Learning of Rejang Ethnic](#). JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling. Vol 2 No. 1

⁸⁹ H Hartini et al. 2020. [Expressing the level of curiosity of students studying in college](#). Jurnal Konseling dan Pendidikan ISSN: 2337-6740 (Print) ISSN: 2337-6880

⁹⁰ H Hartini et al. 2019. The Curiosity of Education Faculty Students in Learning. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-2, December, 2019

⁹¹ Dakhi Saniago (2016) *Curious Students' Learning and Simple Sentence Construction: Responses to Negative Teaching Attitude Performed by English Teacher in South Nias, North Sumatera, Indonesia*. Conference Paper (PDF Available) · December 2016 with 231 Reads Conference: Proceeding of EED Collegiate Forum, 2016, At Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesi

⁹² Arditama, A., Wardani, S., & Purwanti, E. (2018). *Storybook Influence on Science Concept Comprehension Through Curiosity of Fifth Grade Elementary School Student*. *Journal of Primary Education*, 7(1), 1-9. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpe/article/view/21050>.

dalam pembelajaran dan terbukti dapat meningkatkan karakter keingintahuan dan keterampilan komunikasi matematis siswa dalam belajar⁹³, penerapan pembelajaran menggunakan media *Puzzle* juga ditemukan dapat peningkatan keingintahuan siswa dalam belajar sejarah⁹⁴.

Pengungkapan penelitian tentang curiosity dikaji dari segi jenis kelamin, tingkatan kelas dan jurusan melengkapi analisis penulis untuk mengidentifikasi dan memperkuat data empiris berkenaan pengembangan curiosity dalam belajar. hasil analisi ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan curiosity (keingintahuan) menjelaskan keingintahuan dalam belajar dilihat dari segi jenis kelamin, tingkatan kelas dan jurusan⁹⁵.

Berbagai hasil penelitian sebelumnya memberikan berbagai informasi berkenaan kekuatan, kelemahan dan faktor serta dampak yang diperoleh dalam mengembangkan keingintahuan dalam belajar. Hal ini dapat dijadikan landasan dan motivasi bagi penulis untuk mencari pendekatan baru melalui pengkajian lebih dalam mengenai konsep dan pendekatan dalam mengembangkan keingintahuan peserta didik dalam belajar. Pendekatan yang dirancang merupakan salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan dalam menyosong abad 2045 agar peserta didik menjadi generasi emas yang dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pembahasan

1. Tuntutan Pendidikan dalam Mempersiapkan Generasi Emas abad 2045

Pelaksanaan pendidikan dalam mempersiapkan generasi emas 2045 merupakan tantangan bagi pendidik di Indonesia. Generasi emas Indonesia merupakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menghargai keragaman dan menguasai kecakapan global-transkultural, sebagai warga dunia yang cakap berpikir tinggi, komunikasi dan kolaborasi serta menguasai teknologi informasi dan dengan meletakkan dasar pemanfaatan ilmu

⁹³ Paruntu, P., Sukestiyarno, Y., & Budi Prasetyo, A. (2018). *Analysis of Mathematical Communication Ability and Curiosity Through Project Based Learning Models With Scaffolding*. Unnes Journal of Mathematics Education Research, 7(1), 26-34. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujmer/article/view/21864>

⁹⁴ Silmi, Millati, and Yani Kusmarni. "Menumbuhkan karakter rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran sejarah melalui media puzzle." *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 6.2 (2016).

⁹⁵ Raharja, S *et al*, 2018. *Mengukur Rasa Ingin Tahu Siswa [Measuring Students' Curiosity*. A Journal Of Language, Literature, Culture, And Education Polyglot Vol. 14 No. 2 Juli 2018

dan teknologi pada nilai dan dituntut untuk etika universal, kultural bangsa, kemaslahatan dan kedamaian abadi⁹⁶.

Untuk membentuk generasi emas Indonesia ini, menuntut para pendidik lebih kreatif, inovatif dan memperkuat unsur kolaboratif yang ditompang oleh sistem pendidikan nasional agar peserta didik dapat pencapaian kemandirian, serta menguasai sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi generasi yang unggul. Solehuddin menjelaskan bahwa generasi yang unggul merupakan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipersaingkan, serta memiliki daya adaptabilitas yang tinggi terhadap berbagai perubahan dalam perkembangan kehidupan manusia yang terus terjadi⁹⁷.

Tuntutan pendidikan di atas diantanya dapat tercapai melalui guru yang profesional melalui strategi pengembangan kompetensi calon pendidik yakni pendidikan guru yang bermutu. Hal ini sesuai dengan harapan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk mempersiapkan generasi unggul dibutuhkan guru yang profesional, dan untuk mempersiapkan guru yang profesional perlu dilakukan penataan profesi guru yang merupakan tantangan bagi setiap lembaga Pendidikan Tinggi. Penataan Profesi Guru bertujuan untuk menghasilkan guru Abad 21 yang memiliki kompetensi yakni : kepribadian (patriotik, berkarakter kuat, cerdas, responsif dan inovatif), profesional (penguasaan substansi bidang studi), pedagogik, sosial (kemampuan komunikasi kependidikan yang unggul), yang sangat mendukung terbentuknya generasi yang unggul yakni generasi emas 2045⁹⁸.

Kompetensi calon guru akan menentukan kualitas dan arah kerja pendidikan yang akan dilaksanakan nantinya. Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di

⁹⁶ Kartadinata. S (2015) *Pendidikan Guru dan Generasi Emas Indonesia*. Seminar dan Temu Alumni Akbar dalam Rangkaian Dies Natalis Ke 61. Universitas Pendidikan Indonesia 17 Oktober 2015

⁹⁷ Solehuddin, (2015) *Disertasi. Peberdayaan Taman Kanak-kanak kurang beruntung melalui pembelajaran berbasis bimbingan*. Program Studi Bimbingan dan Konseling Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

⁹⁸ Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Kebijakan Kemristekdikti Untuk Pendidikan Bimbingan Dan Konseling. Temu Kolega Prodi*. Jogjakarta, 10 Maret 2018

bidang pekerjaan tertentu”, yang hendaknya dapat dicapai oleh para calon guru/pendidik sebelum menjalani profesinya di lapangan.⁹⁹

Dalam membentuk kompetensi calon pendidik, ada beberapa komponen yang hendaknya terkandung di dalamnya yakni : (1) *motives*, yaitu konsistensi berpikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang, sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif tingkah laku seperti mengendalikan, mengarahkan, membimbing, memilih untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu; (2) *traits*, yaitu karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu; (3) *self concept*, yaitu sikap, nilai, atau imajinasi seseorang; (4) *knowledge*, pengetahuan dalam lingkup yang diperlakukan dalam pekerjaan, (5) *skills*, yaitu kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu¹⁰⁰. Jika komponen kompetensi dapat dicapai maka calon pendidik akan menguasai berbagai pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang terefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sewaktu menjalankan profesi sebagai pendidik abad 21 dan juga akan berefek pada terbentuknya generasi yang unggul yakni generasi emas 2045.

2. Pendidikan Merupakan Kegiatan Pembelajaran dan Bimbingan Konseling yang Saling Bersinergi Dalam Menciptakan SDM Yang Berkualitas

Dalam penyiapan generasi abad 21, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan dapat menjadi sebuah *power* yang akan memainkan peran baru dalam perspektif pengembangan sosok generasi 2045^{101, 102}. Pada dasarnya pendidikan merupakan proses yang dapat membawa manusia dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya melalui upaya normative, tindakan

⁹⁹ Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi

¹⁰⁰ Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.

¹⁰¹ Kartadinata. S (2012) . *Pendidikan Harus Antarkan Generasi Emas Indonesia 2045*. Konperensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi)VII yang diselenggarakan Universitas Negeri Yogyakarta, di Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Kamis (1/11/2012).

¹⁰² Kartadinata. (2016) *Membangun Kesiapan Manusia Indonesia hidup Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Dunia Kerja Global : Tantangan Bagi Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Orasi Ilmiah, disampaikan pada acara Dies Natalis ke 60 Universitas Pendidikan Indonesia, 20 Oktober 2016

dan perbuatan mendidik melalui berbagai pendekatan ilmiah, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan bimbingan dan konseling¹⁰³.

Untuk melaksanakan proses pendidikan melalui pendekatan ilmiah maka usaha sadar dan terencana perlu diwujudkan oleh pendidik dan konselor dalam membentuk perilaku peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan ahlak mulia dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan melalui kegiatan pembelajaran dan layanan bimbingan konseling.

Keseimbangan pelaksanaan pembelajaran dan layanan bimbingan konseling akan mendukung ketercapaian tujuan pendidikan oleh karena itu kolaborasi yang bersinergi perlu dibina agar dalam pembentukan karakter dan perilaku belajar peserta didik yang tangguh dan memiliki daya saing dalam menyosong kehidupan global dapat tercapai.

Bahkan kolaborasi yang bersinergi antar pendidik juga terurai dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 111 Tahun 2014 yang memaparkan bahwa proses pendidikan akan mengembangkan kompetensi hidup peserta didik sehingga memerlukan sistem layanan pendidikan di satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen, tetapi juga layanan bantuan khusus yang lebih bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling¹⁰⁴. Kondisi ini menggambarkan bahwa kolaborasi akan mempermudah pencapaian fungsi dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹⁰⁵

¹⁰³ Kartadinata, S (2011). *Tindakan Mengukir Tabir Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Pedagogis. Kiat Mendidik Sebagai Landasan Profesional Konselor*. Bandung: UPI Press

¹⁰⁴ Pendidikan, P. M., & Nomor, K. R. I. (2014). 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. *Jakarta: Depdikbud*.

¹⁰⁵ Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.

Oleh karena itu perencanaan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan perlu direncanakan bersama, baik dalam bentuk kelompok maupun keseluruhan personil sehingga setiap pendidik dapat menjalankan rancangan proses pendidikan yang intensif, kolaboratif dan berkesinambungan sesuai dengan program yang telah disusun bersama dan sesuai dengan tupoksi yang diembankan sehingga visi maupun misi baik secara lokal maupun nasional dapat tercapai.

3. Curiosity peserta didik dalam belajar perlu dikembangkan dalam menyongsong generasi abad 21.

Perencanaan pendidikan abad 21 yang dirancang oleh suatu lembaga pendidikan hendaknya dapat mengembangkan kerangka belajar seutuhnya yakni peserta didik memiliki pengetahuan, kecakapan, motivasi, nilai, sikap, keyakinan, agama, perasaan, kesehatan, keamanan, dan kelenturan melalui mengkonstruksi paradigma pendidikan agar peserta didik dapat beriman dan bertaqwa kepada allah yang maha kuasa, memiliki cara berfikir tinggi, mengetahui cara bekerja, dapat menggunakan alat dalam bekerja, dan dapat hidup di dalam dunia¹⁰⁶.

Untuk mengembangkan kerangka belajar seutuhnya maka dalam pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan bimbingan dan konseling para pendidik dapat mengembangkan curiosity (hasrat ingintahu) yang tinggi dalam belajar. Pada dasarnya curiosity merupakan suatu komponen dasar dari kodrat manusia yang hampir tidak disadari akan besarnya kegunaan bagi kelangsungan hidup manusia.

Curiosity (keingintahuan) merupakan suatu ketertarikan (*interest*) individu terhadap sesuatu objek, yang didalamnya mengandung unsur mencari kebaruan (*novelty-seeking*) yang dapat memunculkan keterbukaan terhadap pengalaman (*openess of experience*) sehingga diperolehnya berbagai pengetahuan dan pengalaman berkelanjutan¹⁰⁷ (Seligman.2004). Curiosity pada diri individu dianggap sebagai bentuk apresiasi dan kehausan seseorang terhadap pengetahuan yang menjadi salah satu komponen penting untuk pencapaian

¹⁰⁶ Kartadinata. S (2015)a *Pengembangan Pedagogik Dari Perspektif Pendidikan Dan Pendidikan Guru Abad 21*. Seminar Internasional Pedagogik Ke 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kerjasama Komunitas Pendidik Serantau. Bandung, 15-17 September 2015. Universitas Pendidikan Indonesia

¹⁰⁷ Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification* (Vol. 1). Oxford University Press.

tujuan pendidikan karena proses pendidikan merupakan upaya untuk membuat peserta didik tahu (to know) terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang dipelajari.

Agar peserta didik dapat tahu berbagai ilmu pengetahuan, maka dalam proses pembelajaran perlu dilakukan berbagai pendekatan ilmiah dan penjelajahan secara mendalam baik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi sehingga peserta didik diarahkan pada cara berfikir tinggi yakni kreatif-inovatif, kritis, dapat memecahkan masalah, belajar untuk belajar dan dapat menganalisis metakognisi dengan menggunakan komunikasi dan kolaborasi melalui memanfaatkan berbagai informasi dan teknologi.

Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan curiosity dalam belajar dapat dijadikan salah satu komponen dalam mempersiapkan generasi unggul yakni generasi emas abad 21. Selain dapat mengembangkan berbagai kompetensi peserta didik, curiosity juga telah terbukti sejak lama yakni dapat meningkatkan kualitas dan prestasi dalam belajar.

Penelitian Maw dan Maw menemukan bahwa anak-anak yang memiliki curiosity tingkat tinggi akan dapat mengingat apa yang telah dipelajari lebih lama dibandingkan peserta didik yang kurang penasaran karena kurangnya curiosity terhadap berbagai informasi yang diberikan¹⁰⁸. Hogan dan Greenberger juga menemukan ada korelasi antara prestasi akademik dengan curiosity peserta didik saat belajar di sekolah, sehingga curiosity semakin dirasakan sebagai kebajikan dan sebagai salah satu ciri pendidikan yang diinginkan.¹⁰⁹

Namun hasil penelitian Kecskemeti. menemukan bahwa masih ada pendidik yang tidak terampil dalam memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan (curiosity) hasrat ingin tahu peserta didik dalam belajar sehingga penting dilakukan diskusi di antara konselor sekolah dan guru tentang peran dan kontribusi mereka masing-masing untuk siswa belajar.¹¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa peran dan kontribusi antar pengajar dan konselor penting di diskusikan dalam perencanaan pendidikan agar dapat mengembangkan curiosity peserta didik dalam belajar.

¹⁰⁸ Maw, W. H., & Maw, E. W. (1961). Nonhomeostatic experiences as stimuli of children with high curiosity. *California Journal of Educational Research*, 12 (2), 57-61

¹⁰⁹ Hogan, R., & Greenberger, E. (1969). The development of new measures of curiosity for children (Report No. 56). Baltimore, MD: Center for the Study of Social Organization of Schools. (ERIC Document Reproduction Services No. 107 744)

¹¹⁰ Kecskemeti. M 2013. *The Stance of Curiosity in the Classroom Is There a Place for Counselling Skills in Teachers' Work?*. New Zealand Journal of Counselling

Untuk membentuk lingkungan belajar yang dapat menumbuhkan hasrat ingin tahu (curiosity) dan penasaran peserta didik dalam belajar tidaklah mudah. Ada berbagai cara maupun metode yang dapat digunakan pendidik dan konselor dalam membangkitkan curiosity dalam belajar diantaranya pendidik dapat merancang berbagai materi, metode dan alat pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan curiosity peserta didik.

Kesesuaian tingkat perkembangan kognitif peserta didik dan pemberian tugas kontekstual kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik dengan memanfaatkan pengalaman mereka terbukti dapat mendorong berkembangnya curiosity peserta didik dalam belajar, apalagi penyajian material berkaitan dengan kebutuhan dasar dan pengembangan kompetensi¹¹¹.

Selain itu Schiefele,¹¹² memperkuat dengan pernyataan yakni bila bentuk topik yang disajikan dapat menarik minat peserta didik dan dapat menyorot konten implikasi dunia nyata dalam memenuhi kepentingan peserta didik, juga dapat dijadikan indikator dalam membentuk lingkungan belajar yang diharapkan sehingga curiosity peserta didik dalam memahami berbagai ilmu pengetahuan dari pendidik maupun konselor dapat mengembangkan berbagai kompetensi peserta didik yakni mereka dapat bertanggungjawab secara pribadi maupun sosial dalam menjalani kehidupan sebagai peserta didik dan perolehan berbagai ilmu pengetahuan yang dapat menunjang kehidupan karirnya di masa yang akan datang.

4. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pendidikan.

Cukup memprihatinkan, sementara pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi unggul yakni generasi emas abad 21, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi guru maupun calon guru belum sesuai dengan harapan. Selain itu seiring dengan gencarnya pemerintah melahirkan berbagai peraturan sebagai regulasi dalam pelaksanaan pendidikan, namun dalam pengaplikasiannya masih belum terkoordinasi sebagaimana mestinya sehingga diperlukan peningkatan. Akibatnya, program pendidikan yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan tidak berdampak maksimal terhadap peningkatan kualitas peserta didik.

¹¹¹ Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. *Journal of Instructional Development*, 10(3), 2–10.

¹¹² Schiefele, U. (2009). Situational and individual interest. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of motivation in schools* (pp. 197–223). New York, NY: Taylor and Francis

Berdasarkan hasil telaah peneliti dari berbagai sumber terhadap pelaksanaan pendidikan maka peneliti dapat mengklasifikasikan permasalahan di lapangan ke dalam 7 kategori yakni :

- a. Profesionalisme guru masih rendah : hasil evaluasi Kemristekdiktis¹¹³, menunjukkan bahwa profesionalisme guru di Indonesia masih rendah. Hal ini dikarenakan dari segi pengadaan (input) : masih banyak guru yang belum berkualifikasi S1, dari segi pengelolaan (proses) : Profesionalisme guru masih rendah sedangkan dari segi pendayagunaan (output) : Distribusi guru tidak merata (terutama di daerah DTPK sangat kurang)
- b. Pendidikan calon guru belum mampu membentuk guru profesional: data Kemristekdiktis menunjukkan bahwa pendidikan calon guru belum mampu membentuk guru profesional. Hal ini dikarenakan dari segi pengadaan (input) : Disparitas kualitas institusi pendidikan Calon Guru di LPTK (akreditasi prodi 2017 : 7 % A, 35 % B, 23 % C), dari segi pengelolaan (proses) : Pendidikan calon guru belum mampu membentuk guru profesional, sedangkan dari segi pendayagunaan (output) : terjadinya *Mismatched* antara latar belakang pendidikan dan tugas sebagai guru
- c. Pengajar/ dosen memiliki etos kerja pada kualitas rendah : Pada lembaga Perguruan Tinggi Islam, sumber daya manusia di dalamnya terdiri dari pengajar yang memiliki pengetahuan yang sangat cukup namun tidak sedikit tenaga dosen yang bekerja dengan etos dan kualitas rendah¹¹⁴. Bila di analisa lebih dalam, apakah rendahnya kompetensi peserta didik merupakan efek dari pendidikan di perguruan tinggi yang belum mampu membentuk calon guru yang profesional sehingga takala para lulusan telah mengabdikan menjadi guru akan mencerminkan kinerja yang belum sesuai dengan harapan yakni guru belum mampu mengembangkan berbagai kompetensi yang dimiliki peserta didik di sekolah. Hal ini perlu dilakukan pembuktian melalui berbagai penelitian sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Peserta didik belum memperoleh prestasi akademik sesuai dengan harapan : Hasil evaluasi dari PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang diinisiasi oleh OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) berkenaan dengan pengukuran kompetensi peserta didik pada 72 negara

¹¹³ Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Kebijakan Kemristekdikti Untuk Pendidikan Bimbingan Dan Konseling, Temu Kolega Prodi*. Jogjakarta, 10 Maret 2018

¹¹⁴ Hamengkubuwono, H. (2017). Implementasi Audit Mutu Internal Pada Perguruan Tinggi Agama. *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 55.

menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh peringkat ke 68 dari 72 negara¹¹⁵ sehingga secara umum kemampuan akademik peserta didik di Indonesia masih relative rendah bila dibandingkan dengan negara-negara dunia. Mengapa demikian? hal ini perlu dikaji lebih dalam agar proses pendidikan mengalami perubahan.`

- e. Rendahnya peran dan kontribusi pendidik dan konselor saat peserta didik belajar: Masih ada pendidik yang tidak terampil dalam memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan hasrat ingin tahu peserta didik¹¹⁶ sehingga pengetahuan peserta didik belum dapat berkembang sebagaimana mestinya bahkan berefek juga kepada perkembangan berbagai kompetensi yang dimiliki peserta didik dalam menempuh proses pendidikan. Jika kondisi itu terus terjadi maka gagasan ilmiah tidak akan terbentuk dalam proses pembelajaran bahkan akan menghambat perkembangan kognitif peserta didik yang berefek pada terhambatnya tujuan pendidikan oleh karena itu agar terjadi perubahan maka dalam proses pembelajaran harus dilakukan perbaikan dan bimbingan akademik juga harus dioptimalkan agar dapat menumbuh kembangkan curiosity peserta didik dalam belajar. Jadi pengembangan curiosity dalam belajar akan berhasil jika proses pembelajaran dan bimbingan akademik dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam membentuk maupun merangsang peserta didik untuk dapat mengoptimalakan curiosity dalam belajar.
- f. Perlunya pembenahan kinerja para pendidik : Evaluasi PISA untuk pendidik Indonesia bahwa "Ketika para pendidik sering menjelaskan dan menunjukkan gagasan ilmiah, dan mendiskusikan pertanyaan peserta didik maka mereka akan mendapatkan nilai lebih tinggi dalam sains dan memiliki keyakinan lebih kuat mengenai nilai penyelidikan ilmiah dan cenderung berharap akan bekerja dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan tersebut di kemudian hari¹¹⁷. Hal ini memperkuat data dari Ristekdiktis bahwa kinerja para pendidik di Indonesia perlu ditingkatkan, mulai pembentukan calon guru yang profesional sehingga akan akan berefek positif terhadap prestasi akademik dan proses pembelajaran yang dapat

¹¹⁵ OECD. 2016. PISA 2015 Result in focus. Di unduh pada (2017, 3 Mei) tersedia <https://www.oecd.org>

¹¹⁶ Kecskemeti. M 2013. *The Stance of Curiosity in the Classroom Is There a Place for Counselling Skills in Teachers' Work?*. New Zealand Journal of Counselling

¹¹⁷ Arnaldo Pellini. 2016. **Indonesia's PISA results show need to use education resources more efficiently**. Research Fellow, Overseas Development Institute.

menunjukkan gagasan ilmiah yang akan dilakoni calon pendidik saat dilapangan nantinya.

Untuk menunjukkan gagasan ilmiah pada proses pembelajaran maka materi pelajaran perlu dikaji secara ontologi, epistemologi dan aksiologi sehingga calon pendidik harus dapat memahami dan mengkaji lebih dalam dan intens setiap ilmu pengetahuan yang di transfer kepada peserta didik melalui proses pembelajaran yang dapat menarik hasrat ingintahu (*curiosity*). Hasrat penasaran peserta didik dalam setiap pengetahuan yang diberikan akan memunculkan berbagai pertanyaan yang akan membentuk penyelidikan terhadap materi yang dipelajari yang akan didiskusikan bersama secara ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk gagasan ilmiah terhadap materi pelajaran yang sedang di bahas.

- g. Perlunya kolaborasi antar pendidik dengan konselor agar peserta didik dapat belajar.

Kecskemeti Percaya bahwa penting bagi konselor sekolah dan guru untuk berdiskusi tentang peran masing-masing di sekolah mereka untuk meningkatkan (*curiosity*) keingintahuan siswa dalam belajar, dan untuk mengklarifikasi peran ini. Kecskemeti harap pertanyaan yang diajukan di sini akan mendorong dan berkontribusi pada diskusi berikutnya.¹¹⁸ Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perilaku yang nyata sehingga terjadi perubahan proses pendidikan dalam mempersiapkan generasi unggul yakni generasi emas abad 21.

Bentuk nyata kolaborasi ini akan terjadi jika proses pembelajaran dan bimbingan akademik dapat saling bersinergi dan berkerjasama dalam membentuk maupun merangsang peserta didik untuk dapat mengoptimalakan *curiosity* dalam belajar. Kondisi ini mencerminkan bahwa pada dasarnya proses pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran dan bimbingan yang dalam pelaksanaannya, bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam proses pendidikan, dimana tujuan bimbingan dan konseling mesti sejalan dengan tujuan pendidikan.¹¹⁹

Dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling pada bidang bimbingan akademik, ketepatan dan keefektifan penggunaan pendekatan dan metode yang digunakan untuk meningkatkan *curiosity* mahasiswa akan ikut

¹¹⁸ Kecskemeti. M 2013. *The Stance of Curiosity in the Classroom Is There a Place for Counselling Skills in Teachers' Work?*. New Zealand Journal of Counselling

¹¹⁹ Kartadinata. S (2011). *Tindakan Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Pedagogis. Kiat Mendidik Sebagai Landasan Profesional Konselor*. Bandung. UPI Press

mempengaruhi keberhasilan yang akan dicapai. Menurut Walter John Carl bahwa penelitian tentang curiosity banyak dikembangkan di sekolah dan tempat kerja karena tempat tersebut membutuhkan banyak waktu dan cocok untuk mengaplikasikan flow.

Pada dasarnya flow merupakan suatu kondisi individu sangat hanyut dalam sebuah aktivitas sehingga merasa tidak ada hal lain yang dapat mengganggu perhatiannya dan dilakukan dengan menyenangkan walaupun menghadapi tantangan dan membutuhkan waktu dalam menyelesaikan aktivitas tersebut. Mayers menemukan jumlah kenikmatan yang diterima peserta didik di kelas menjadi indikator yang lebih baik dari nilai akhir yang mereka peroleh dari pada prestasi skolastik ataupun bakat,¹²⁰ bahkan semakin banyak perhatian peserta didik berada di kelas, semakin besar kenikmatan yang diterima seorang pendidik mengajar mereka¹²¹. Sensasi dari flow saat melakukan aktivitas adalah adanya keterlibatan total dan konsentrasi penuh baik mental maupun fisik karena aktivitas yang dijalani memunculkan perasaan menantang sehingga dibutuhkan keterampilan dan ketekunan¹²².

Karakteristik flow akan membentuk budaya belajar yang dapat mengembangkan curiosity peserta didik. lingkungan belajar dan suasana yang hanyut dengan aktivitas akademik (flow akademik) diasumsikan berdampak pada peningkatan curiosity peserta didik dalam belajar sehingga pelayanan bimbingan dan konseling berbasis flow akademik perlu dikembangkan untuk mendukung dan melengkapi proses pembelajaran apalagi ditingkat universitas.

Untuk mencapai kompetensi tersebut maka peserta didik perlu diarahkan, dibimbing dan mendapatkan pengalaman sendiri melalui pemberian layanan bimbingan flow akademik, karena akan membentuk totalitas fisik dan psikis dalam belajar yang berdampak pada terbentuknya motivasi instrinsik dalam menjalani setiap proses pendidikan.

Kondisi flow akademik akan meningkatkan curiosity peserta didik karena suasana perkuliahan berlangsung aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan karena semua peserta didik akan berpartisipasi penuh dalam proses belajar, materi perkuliahan yang sulit sekalipun dianggap suatu tantangan

¹²⁰ Mayers, P. (1978). *Flow in adolescence and its relation to the school experience*. Unpublished doctoral dissertation, University of Chicago.

¹²¹ Csikszentmihályi, M. (1988), "The flow experience and its significance for human psychology", in Csikszentmihályi, M., *Optimal experience: psychological studies of flow in consciousness*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 15–35, ISBN 978-0-521-43809-477e

¹²² Csikszentmihályi, Mihály (1990), *Flow: The Psychology Of Optimal Experience*, New York: Harper And Row, Isbn 0-06-092043-2

dan hasrat penasarannya yang harus diselesaikan. Oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran yang menantang dan dapat menimbulkan rasa penasarannya sangat diperlukan dalam menumbuhkan kembangkan *curiosity* mahasiswa dalam belajar.

Namun untuk menjawab asumsi ataupun prediksi bimbingan *flow* akademik dapat meningkatkan *curiosity* peserta didik dalam belajar perlu dilakukan pembuktian melalui penelitian sehingga analisa yang penulis peroleh bukan hanya berdasarkan teori saja oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut “ efektivitas bimbingan *flow* akademik dalam peningkatan *curiosity* mahasiswa dalam belajar”.

5. Definisi *Curiosity* dalam belajar

Curiosity (keingintahuan) merupakan suatu interest individu terhadap sesuatu objek, yang didalamnya mengandung unsur kebaruan, sehingga dapat memunculkan keterbukaan terhadap pengalaman yang dapat mewakili keinginan intrinsik seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman berkelanjutan. *Curiosity* juga merupakan komponen motivasi fundamental dari semua aspek keterbukaan yang melibatkan pengakuan aktif untuk mengejar dan regulasi pengalaman dalam menanggapi peluang yang menantang sehingga munculnya kreativitas untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan yang diinginkan¹²³ hal ini seiring dengan pendapat Todd B. Kashdan, *et al*¹²⁴ menyatakan bahwa *Curiosity* ini dikonsepsi sebagai sistem emosional-motivasi positif yang terkait dengan pengakuan, mengejar, dan self-regulasi baru dan tantangan. Zuckerman¹²⁵ mengartikan *curiosity* sebagai keinginan untuk pengalaman mencari, sensasi dan mencari petualangan, kebosanan kerentanan, dan kemauan untuk mengambil risiko untuk mendapatkan hal-hal baru.

Curiosity pada individu meliputi keinginan untuk tahu lebih banyak pada multidimensi¹²⁶ sehingga individu mempelajari apa yang mereka tahu dan tidak tahu, dan kemudian menggunakan pengetahuan mereka untuk

¹²³ Christopher Peterson Martin E. P. Seligman.2004. *Character Strengths And Virtues*. American Psychological Association. .Oxford University Press, Inc

¹²⁴ Todd B. Kashdan, Paul Rose, and Frank D. Fincham.2004. *JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT*, 82(3), 291–305. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

¹²⁵ Zuckerman, M. (1994). *Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking*. New York: Cambridge University Press.

¹²⁶ Engel, S. (2011). Children’s need to know: *Curiosity in schools*. *Harvard Educational Review*, 81(4), 625–645.

belajar lebih banyak serta untuk memecahkan masalah mereka alami¹²⁷ bahkan curiosity sangat terkait dengan kebutuhan kompetensi¹²⁸ dan merupakan jantung dari rasa ingin tahu¹²⁹

6. Manfaat dan fungsi curiosity dalam belajar

Teori proses kognitif berpendapat bahwa rasa ingin tahu adalah fungsi dari asimilasi dan akomodatif rangsangan baru seseorang pada kerangka skema diri dan dunia¹³⁰. Lewis mencatat bahwa dialog memungkinkan individu untuk mengembangkan rasa ingin tahu yang dibius mereka menjadi “rasa ingin tahu epistemologis, yang metodologis memperkenalkan dunia dalam ketidaklengkapan sehingga dapat 'berpikir secara akurat' dan 'tepat' tentang hubungan antara teori dan praktek”¹³¹. Bahkan, menandai rasa ingin tahu sebagai “fakultas kognitif revolusioner” yakni rasa ingin tahu yang memungkinkan individu untuk mengekspos mitos budaya dan pengembalian kenyataan ke kondisi semula.

Shor berpendapat bahwa rasa ingin tahu yang kritis mendorong individu untuk menemukan kebenaran dan mengubah elemen masyarakat yang memiliki kesadaran kritis¹³². Mengingat bahwa Freire^{133 134} dan Shor¹³⁵ dianggap dialog yang terorganisasi sebagai modus utama untuk membina siswa rasa ingin tahu yang kritis. rasa ingin tahu dapat menguntungkan siswa maupun guru seperti dapat digunakan untuk memandu praktek mengajar, dalam berbagai konteks pendidikan, dan juga dapat memotivasi siswa untuk mencari informasi¹³⁶. secara sederhana seperti memberikan penilaian dan

¹²⁷ Shor, I. (1992). *Empowering education: Critical teaching for social change*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

¹²⁸ White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. *Psychological Review*, 66, 297–333.

¹²⁹ Deci, E. L. (1975). *Intrinsic motivation*. New York: Plenum.

¹³⁰ Beswick, D. G. (1971). Cognitive process theory of individual differences in curiosity. In H. I. Day, D. E. Berlyne, & D. E. Hunt (Eds.), *Intrinsic motivation: A new direction in education* (pp. 156–170). New York: Holt, Rinehart & Winston.

¹³¹ Lewis, T. E. (2012). Teaching with pensive images: Rethinking curiosity in Paulo Freire's. *Pedagogy of the oppressed*. *The Journal of Aesthetic Education*, 46(1), 27–45.

¹³² Shor, I. (1992). *Empowering education: Critical teaching for social change*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

¹³³ Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum..

¹³⁴ Freire, P. (1998). *Pedagogy of freedom: Ethics, democracy, and civic courage*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

¹³⁵ Shor, I. (1992). *Empowering education: Critical teaching for social change*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

¹³⁶ Pluck, Graham & Johnson, Helen. 2011. *Stimulating Curiosity To Enhance Learning*. *Gesj: Education Science And Psychology* 2011 | No.2(19) Issn 1512-1801

umpan balik secara teratur pada saat proses transfer pengetahuan pada siswa dapat membantu guru dalam meningkatkan pembelajaran melalui peningkatan rasa ingin tahu.

7. Pengembangan curiosity dalam belajar

Rasa ingin tahu dipupuk melalui interaksi antara individu dan lingkungannya¹³⁷. Dalam penelitian rasa ingin tahu, Berlyne berpendapat bahwa variabel kontekstual kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik membangkitkan rasa ingin tahu¹³⁸, bahkan dianggap sebagai interes model/kekurangan rasa ingin tahu seseorang dapat terusik baik oleh kepentingan individu dalam subjek atau, sebaliknya, dengan adanya keinginan untuk menghilangkan kesenjangan dalam pengetahuan^{139,140}. Demikian pula, Schiefele mengusulkan model dimana isyarat situasional informasi yang kompleks memicu minat situasional individu, pada gilirannya mengarah ke pengembangan motivasi intrinsik dan kepentingan individu yang sudah berjalan lama.^{141, 142}

Beberapa sarjana telah menyatakan bahwa kompetensi individu memiliki keterkaitan perasaan dan autonomy yang secara intrinsik terhubung dengan tingkat rasa ingin tahu dan minat^{143,144,145}. Selain itu, Mitchell mengusulkan penggunaan kompetensi dalam “menangkap aspek,” baru seperti teka-teki, untuk memicu (atau “menangkap”) rasa ingin tahu siswa, serta ‘menahan aspek,’ seperti menekankan makna dan nilai pribadi, untuk

¹³⁷ Kashdan, T. B. (2004). Curiosity. In C. Peterson, & M. E. P. Seligman (Eds.), *Character strengths and virtues: A handbook and classification* (pp. 125–141). New York, NY: Oxford University Press

¹³⁸ Berlyne, D. E. (1960). *Conflict, arousal and curiosity*. New York, NY: McGraw-Hill.

¹³⁹ Litman, J. A., & Jimerson, T. L. (2004). The measurement of curiosity as a feeling-of-deprivation. *Journal of Personality Assessment*, 82, 147–157.

¹⁴⁰ Litman, J. A. (2005). Curiosity and the pleasures of learning: Wanting and liking new information. *Cognition and Emotion*, 19(6), 793–814.

¹⁴¹ Litman, J. A., & Jimerson, T. L. (2004). The measurement of curiosity as a feeling-of-deprivation. *Journal of Personality Assessment*, 82, 147–157.

¹⁴² Schiefele, U. (2009). Situational and individual interest. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of motivation in schools* (pp. 197–223). New York, NY: Taylor and Francis

¹⁴³ Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.

¹⁴⁴ Krapp, A. (2005). Basic needs and the development of interest and intrinsic motivational orientations. *Learning and Instruction*, 15, 381–395.

¹⁴⁵ Litman, J. A., & Jimerson, T. L. (2004). The measurement of curiosity as a feeling-of-deprivation. *Journal of Personality Assessment*, 82, 147–157.

mempertahankan (atau “menahan”) minat siswa¹⁴⁶. berdasarkan text belajar, identifikasi karakter, kebaruan, tema hidup, citra, dan tindakan intens¹⁴⁷ serta “surprisingness,” emotiveness, dan kemudahan pemahaman¹⁴⁸ semuanya telah ditemukan terkait dengan perkembangan interest individu.

Sebagaimana dicatat, ahli lain berpendapat bahwa bahan-bahan harus dibuat bermakna dan relevan bagi siswa agar dapat mempertahankan rasa ingin tahu individu^{149,150}. Kepenuhan arti mengacu pada, apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan seseorang sehari-hari¹⁵¹ atau memenuhi kebutuhan pribadi seperti otonomi dan kompetensi¹⁵². Beberapa teori motivasi memperhatikan kebermaknaan rasa ingin tahu dan minat. Memang, Deci dan Ryan¹⁵³ berpendapat bahwa individu lebih mampu menginternalisasi dan mengintegrasikan kegiatan ketika dibuat bermakna bagi mereka, yang, pada gilirannya, menyebabkan motivasi intrinsik dan rasa ingin tahu menimbulkan perasaan untuk penentuan nasib^{154,155,156}, juga berpendapat untuk pentingnya membina motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Teorinya mengacu pada teori kepentingan motivasi, yang berpendapat bahwa individu termotivasi untuk mengikuti kegiatan dan mereka nilai bahwa mereka memiliki harapan untuk keberhasilan. Dalam hal ini perasaan akan

-
- ¹⁴⁶ Mitchell, M. (1993). Situational interest: Its multifaceted structure in the secondary school mathematics classroom. *Journal of Educational Psychology*, 85, 424–436.
- ¹⁴⁷ Krapp, A., Hidi, S., & Renninger, K. A. (1992). Interest, learning, and development. In K. A. Renninger, S. Hidi, & A. Krapp (Eds.), *The role of interest in learning and development* (pp. 3–26). New York, NY: Lawrence Erlbaum.
- ¹⁴⁸ Litman, J. A., & Jimerson, T. L. (2004). The measurement of curiosity as a feeling-of-deprivation. *Journal of Personality Assessment*, 82, 147–157.
- ¹⁴⁹ Kashdan, T. B., & Fincham, F. D. (2004). Facilitating curiosity: A social and self-regulatory perspective for scientifically based interventions. In P. A. Linley, & S. Joseph (Eds.), *Positive psychology in practice* (pp. 482–503). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- ¹⁵⁰ Mitchell, M. (1993). *Situational Interest: Its Multifaceted Structure In The Secondary School Mathematics Classroom. Journal Of Educational Psychology*, 85(3), 424–436. Doi:10.1037/0022-0663.85.3.424
- ¹⁵¹ Litman, J. A., & Jimerson, T. L. (2004). The measurement of curiosity as a feeling-of-deprivation. *Journal of Personality Assessment*, 82, 147–157.
- ¹⁵² rapp, A. (2005). Basic needs and the development of interest and intrinsic motivational orientations. *Learning and Instruction*, 15, 381–395.
- ¹⁵³ Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268
- ¹⁵⁴ Hidi, S., & Harackiewicz, J. M. (2000). Motivating the academically unmotivated: A critical issue for the 21st century. *Review of Educational Research*, 70(2), 151–179
- ¹⁵⁵ Kashdan, T. B., & Fincham, F. D. (2004). Facilitating curiosity: A social and self-regulatory perspective for scientifically based interventions. In P. A. Linley, & S. Joseph (Eds.), *Positive psychology in practice* (pp. 482–503). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- ¹⁵⁶ Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. *Journal of Instructional Development*, 10(3), 2–10

nilai mencakup interes siswa yakni, bagaimana menyenangkan kegiatan serta memperoleh kepuasan yang ingin dicapai sehingga relevan dan bermakna bagi siswa dalam menghadapi tugas¹⁵⁷.

Untuk membuat konten yang relevan, Keller¹⁵⁸ berpendapat bahwa guru harus memanfaatkan pengalaman siswa, menyajikan nilai material serta kegunaan bagi masa depan, dan memungkinkan untuk kepuasan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar otonomi dan kompetensi. Demikian juga, Schiefele¹⁵⁹ mengemukakan bahwa dalam mengajar hendaknya dapat mengungkapkan minat siswa dalam bentuk topik, dan menyorot implikasi dunia nyata dari konten untuk memenuhi kepentingan siswa. Sejalan dengan teori-teori sugesti, Rossing dan Long¹⁶⁰ menemukan bahwa nilai lebih penting daripada informasi yang mengejutkan dalam budidaya rasa ingin tahu siswa.

Hal ini penting untuk dicatat karena Durik dan Harackiewicz ini¹⁶¹ menemukan bahwa intervensi yang bertujuan untuk memicu minat situasional siswa dalam matematika menggunakan kompleksitas visual, ‘menangkap segi,’ hanya memiliki efek positif bagi individu yang memiliki kepentingan tingkat rendah, dan merusak kepentingan siswa yang sbelumnya memiliki kepentingan tingkat tinggi. Sebaliknya, yang menjadi fokus kedepan bahwa kebermaknaan tugas hendaknya dapat meningkatkan minat siswa yang memiliki kepentingan tinggi dan menurunkan minat siswa yang memiliki kepentingan yang rendah. Selain itu, Harackiewicz dan Hulleman¹⁶² telah menemukan intervensi nilai kepuasan, di mana kebermaknaan tugas ditekankan, dan menjadi sangat penting dalam meningkatkan minat siswa yang memiliki tingkat prestasi dan kompetensi yang rendah. Studi-studi ini

¹⁵⁷ Wigfield, A., & Cambria, J. (2010). Students’ achievement values, goal orientations, and interest: Definitions, development, and relations to achievement outcomes. *Developmental Review*, 30, 1–35.

¹⁵⁸ Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. *Journal of Instructional Development*, 10(3), 2–10.

¹⁵⁹ Schiefele, U. (2009). Situational and individual interest. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of motivation in schools* (pp. 197–223). New York, NY: Taylor and Francis.

¹⁶⁰ Rossing, B. E., & Long, H. B. (1981). Contributions of curiosity and relevance to adult learning motivation. *Adult Education Quarterly*, 32, 25–36.

¹⁶¹ Durik, A. M., & Harackiewicz, J. M. (2007). Different strokes for different folks: How individual interest moderates the effects of situational factors on task interest. *Journal of Educational Psychology*, 99(3), 597–610.

¹⁶² Harackiewicz, J. M., & Hulleman, C. S. (2010). The importance of interest: The role of achievement goals and task values in promoting the development of interest. *Social and Personality Psychology Compass*, 4(1), 42–52

menunjukkan bahwa kepentingan individu dan tingkat prestasi perlu dipertimbangkan ketika memilih intervensi pedagogis dalam membina rasa ingin tahu siswa.

Akhirnya, sejumlah penulis berpendapat bahwa rasa ingin tahu dapat dibudidayakan dalam lingkungan sosial^{163,164,165,166,167}. Misalnya, Thoman, Sansone, dan Pasupathi¹⁶⁸ telah menemukan bahwa rasa ingin tahu individu diperkuat ketika ia mampu mendiskusikan sesuatu yang menarik dengan orang lain. Mitchell¹⁶⁹, juga menemukan hubungan antara partisipasi dalam kerja kelompok dan tingkat interest di dalam kelas. Selain itu, interaksi dengan perspektif rekan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa melalui menyentuh keterbukaan pikiran siswa. Memang, Baron menyarankan bahwa keterbukaan pikiran, meliputi keterbukaan untuk ide-ide dan perspektif baru, yang erat terkaitnya dengan rasa ingin tahu, mengingat bahwa keduanya melibatkan pencarian untuk informasi baru. Depue,¹⁷⁰; Spielberger dan Starr¹⁷¹, mengandaikan bahwa rasa ingin tahu merupakan komponen motivasi yang penting (tapi bukan satu-satunya) yang menghubungkan isyarat yang mencerminkan hal baru dan tantangan (internal atau eksternal) dengan peluang pertumbuhan

Seorang fasilitator utama dari pertumbuhan pribadi adalah kepekaan terhadap syarat pra-nya. Rasa ingin tahu mendorong proaktif, iors perilaku disengaja dalam menanggapi rangsangan dan aktivitas dengan sifat sebagai

¹⁶³ Bergin, D. A. (1999). Influences on classroom interest. *Educational Psychologist*, 34(2), 87–98.

¹⁶⁴ Engel, S. (2011). Children's need to know: Curiosity in schools. *Harvard Educational Review*, 81(4), 625–645.

¹⁶⁵ Hidi, S., & Harackiewicz, J. M. (2000). Motivating the academically unmotivated: A critical issue for the 21st century. *Review of Educational Research*, 70(2), 151–179

¹⁶⁶ Kashdan, T. B. (2004). Curiosity. In C. Peterson, & M. E. P. Seligman (Eds.), *Character strengths and virtues: A handbook and classification* (pp. 125–141). New York, NY: Oxford University Press.

¹⁶⁷ Ritchhart, R. (2002). *Intellectual character: What it is, why it matters, and how to get it*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

¹⁶⁸ Thoman, D. B., Sansone, C., & Pasupathi, M. (2007). Talking about interest: Exploring the role of social interaction for regulating motivation and the interest experience. *Journal of Happiness Studies*, 8, 335–370.

¹⁶⁹ Mitchell, M. (1993). Situational interest: Its multifaceted structure in the secondary school mathematics classroom. *Journal of Educational Psychology*, 85, 424–436.

¹⁷⁰ Depue, R. A. (1996). A neurobiological framework for the structure of personality and emotion: Implications for personality disorders. In J. F. Clarkin & M. F. Lenzenweger (Eds.), *Major theories of personality disorder* (pp. 347–390). New York: Guilford.

¹⁷¹ Spielberger, C. D., & Starr, L. M. (1994). Curiosity and exploratory behavior. In H. F. O'Neil, Jr. & M. Drillings (Eds.), *Motivation: Theory and research* (221–243). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

berikut: kebaruan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik. Berlyne^{172, 173, 174} telah mengusulkan dua jenis kecenderungan ploratory mantan dalam menanggapi sifat ini: (a) diversive rasa ingin tahu-aktif mencari sumber-sumber bervariasi dari hal baru dan tantangan dan (b) tertentu kedalaman rasa ingin tahu-aktif mencari di satu pengetahuan dan pengalaman dengan kedalaman tertentu.

Memupuk rasa ingin tahu siswa dengan membentuk mindset bahwa: (a) pentingnya menyediakan informasi baru; (b) pentingnya menggunakan contoh "kehidupan nyata" yang relevan, dan (c) pentingnya memberikan perspektif baru¹⁷⁵. Menggunakan keterampilan yang baru dipelajari kemungkinan meningkatkan perasaan senang dan kompetensi, memperkuat keterlibatan lebih lanjut dalam kegiatan berbasis keterampilan dan keinginan untuk lebih banyak belajar¹⁷⁶. Teori yang lebih baru menggambarkan rasa ingin tahu sebagai sistem multifaset membangkitkan berbagai emosi manusia, kognisi, dan perilaku yang dapat kenyang dengan berbagai saluran sensorik dan kognitif^{177,178}.

Spielberger berpendapat bahwa mengejar pengalaman subjektif yang optimal memerlukan rasa ingin tahu dan kecemasan¹⁷⁹. Ketika Rasa ingin tahu lebih kuat dari kecemasan, individu mengeksplorasi lingkungan mereka (diversive rasa ingin tahu). Ketika kecemasan lebih kuat dari rasa ingin tahu, individu cenderung untuk melepaskan diri dari tujuan untuk mengurangi rangsangan ke tingkat yang lebih mudah dikelola. Stimulasi yang optimal konon terdiri dari kenikmatan subjektif dan tantangan, ditekankan dengan kecemasan ringan. Perilaku pencarian informasi (rasa ingin tahu yang spesifik) diaktifkan untuk mengurangi beberapa ketidakpastian awal yang timbul dari kegiatan baru, mempertahankan lebih moderat, tingkat optimal dari stimulasi.

¹⁷² Berlyne, D. E. (1960). *Conflict, arousal, and curiosity*. New York: McGraw-Hill.

¹⁷³ Berlyne, D. E. (1967). Arousal and reinforcement. In D. Levine (Ed.), *Nebraska symposium on motivation* (pp. 1–110). Lincoln: University of Nebraska Press.

¹⁷⁴ Berlyne, D. E. (1971). *Aesthetics and psychobiology*. New York: Appleton-Century-Crofts.

¹⁷⁵ Shelby Clark & Scott Seider (2017) Developing Critical Curiosity in Adolescents, *Equity & Excellence in Education*, 50:2, 125-141, DOI: 10.1080/10665684.2017.1301835

¹⁷⁶ Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.

¹⁷⁷ Boyle, G. J. (1989). Breadth-depth or state-trait curiosity? A factor analysis of state-trait curiosity and state anxiety scales. *Personality and Individual Differences*, 10, 175–183.

¹⁷⁸ Langevin, R. Is curiosity a unitary construct? *Canadian Journal of Psychology*, 1971. **25**, 360-374.

¹⁷⁹ Spielberger, C. D., & Starr, L. M. (1994). Curiosity and exploratory behavior. In H. F. O’Neil & M. Drillings (Eds.), *Motivation: Theory and research* (pp. 221– 243). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Kesimpulan

Keingintahuan (*curiosity*) dalam belajar merupakan gambaran ketertarikan (*interest*) mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam belajar yang ditunjukkan dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman (kognitif), emosi/perasaan (afektif), maupun perilaku (psikomor) yang berkaitan dengan minat, perhatian, rasa penasaran, dan tantangan yang dihadapi mahasiswa saat belajar. Mencari kebaruan pengetahuan dan menanggapi peluang yang menantang dalam melakukan proses pembelajaran (*novelty seeking*) perlu dilakukan dalam memecahkan masalah, mampu menerima perubahan dan kritikan serta memahami keutuhan materi dalam melakukan proses belajar.

Keterbukaan wawasan dan orisinal ide (*opennes of experience* merupakan) yang berkaitan dengan keterbukaan terhadap nilai-nilai baru, pembelajaran yang berorientasi masa depan, apresiasi estetika, kemampuan berimajinasi dan kreativitas dalam belajar, dan penjelajahan yang mendalam (*explorasi*) yang berkaitan penelusuran berbagai materi pelajaran dan mencari berbagai pengalaman dalam belajar juga perlu dikembangkan setiap pembahasan materi pelajaran agar memperoleh hasil yang maksimal dan diterapkan dalam bentuk perilaku yang nyata.

Pengembangan *curiosity* akan dapat terlaksana sesuai dengan harapan jika terbentuk kerjasama yang saling bersinergi antara guru pembimbing dengan guru mata pelajaran dalam pencapaian visi, misi sekolah dan pendidikan nasional sehingga peserta didik dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan dan masa depan. Pemanfaatan pelayanan bimbingan konseling pada satuan pendidikan akan memperkuat konsep dan skill siswa dalam menguasai berbagai keterampilan belajar yang dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai tugas sekolah yang diberikan.

Keterampilan belajar merupakan alat yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mengali berbagai ilmu pengetahuan pada setiap mata pelajaran. Oleh karena itu guru mata pelajaran/dosen hendaknya dapat memberikan berbagai tantangan dan tugas yang dapat memicu berkembangnya keingintahuan peserta didik untuk mengali lebih dalam berbagai fokus kajian. Pencapaian keseimbangan ini akan tercapai melalui kolaborasi yang saling bersinergi antar pendidik sehingga dapat saling berkontribusi dalam

menjalankan peran sebagai pendidik dan mendukung tercapainya pengoptimalan potensi peserta didik.

Perumusan program pelayanan bimbingan konseling hendaknya beriringan dengan semua program kerja guru mata pelajaran/dosen dengan kata lain guru pembimbing/konselor mempersiapkan dan mengembangkan berbagai keterampilan belajar yang dibutuhkan pada setiap tingkatan dan satuan pendidikan sedangkan guru mempersiapkan dan memfasilitasi berbagai keterampilan belajar yang dimiliki peserta didik melalui pemberian tantangan dan tugas yang dapat memacu keingintahuan dalam belajar yang ditandai dengan berkembangnya kreativitas berfikir dan ditemukan kebaruan dan inovasi dalam proses pembelajaran.

Kolaborasi dalam menyusun dan melaksanakan pendidikan di sekolah perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya : Pendidik yang akan merumuskan dan melaksanakan program bimbingan konseling yang terintegrasi dengan proses pembelajaran hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang teori belajar, teori *curiosity* (keingintahuan) dalam belajar, guru/dosen hendaknya memiliki kompetensi dalam menerapkan prinsip-prinsip bimbingan *flow* akademik di dalam pembelajaran, agar terjadinya keseimbangan antara tantangan yang diberikan dengan keterampilan yang dimiliki mahasiswa. Pengetahuan, pemahaman dan kompetensi dapat diperoleh melalui pelatihan, workshop maupun *Focus Group Discussion (FGD)* dengan konselor yang ada di kampus.

Guru mata pelajaran/dosen hendaknya dapat membentuk *teamwork* yang solid dalam merumuskan dan melaksanakan program bimbingan *flow* akademik yang terintegrasi dengan aktivitas pembelajaran sehingga diperoleh kejelasan tupoksi masing-masing dalam menerapkan aktivitas belajar dan pembelajaran *flow* akademik. selain itu guru mata pelajaran/dosen hendaknya mampu menerapkan metode pembelajaran *active learning* dalam pengajaran, terampil menggunakan perangkat pembelajaran berbasis *ICT*.

Daftar Pustaka

- Achmad Reza Hutama Al-Faruqi, "Konsep Ilmu Dalam Islam," *Kalimah* 13, No. 2 (2015): 225.
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*. hal. 46-47

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC. Edisi kedua.
- Arditama, A., Wardani, S., & Purwanti, E. (2018). Storybook Influence on Science Concept Comprehension Through Curiosity of Fifth Grade Elementary School Student. *Journal of Primary Education*, 7(1), 1-9. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpe/article/view/21050>.
- Arnaldo Pellini. 2016. Indonesia's PISA results show need to use education resources more efficiently. Research Fellow, Overseas Development Institute.
- Bergin, D. A. (1999). Influences on classroom interest. *Educational Psychologist*, 34(2), 87–98.
- Berlyne, D. E. (1960). *Conflict, arousal, and curiosity*. New York: McGraw-Hill.
- Berlyne, D. E. (1967). Arousal and reinforcement. In D. Levine (Ed.), *Nebraska symposium on motivation* (pp. 1–110). Lincoln: University of Nebraska Press.
- Berlyne, D. E. (1971). *Aesthetics and psychobiology*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Beswick, D. G. (1971). Cognitive process theory of individual differences in curiosity. In H. I. Day, D. E. Berlyne, & D. E. Hunt (Eds.), *Intrinsic motivation: A new direction in education* (pp. 156–170). New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Boyle, G. J. (1989). Breadth-depth or state-trait curiosity? A factor analysis of state-trait curiosity and state anxiety scales. *Personality and Individual Differences*, 10, 175–183.
- Christopher Peterson Martin E. P. Seligman. 2004. *Character Strengths And Virtues*. American Psychological Association. Oxford University Press, Inc
- Csikszentmihályi, M. (1988), "The flow experience and its significance for human psychology", in Csikszentmihályi, M., *Optimal experience: psychological studies of flow in consciousness*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 15–35, ISBN 978-0-521-43809-477e
- Csikszentmihályi, Mihály (1990), *Flow: The Psychology Of Optimal Experience*, New York: Harper And Row, Isbn 0-06-092043-2
- Dakhi Saniago (2016) Curious Students' Learning and Simple Sentence Construction: Responses to Negative Teaching Attitude Performed by English Teacher in South Nias, North Sumatera, Indonesia. Conference Paper (PDF Available) · December 2016 with 231 Reads Conference:

Proceeding of EED Collegiate Forum, 2016, At Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesi

- Deci, E. L. (1975). *Intrinsic motivation*. New York: Plenum.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Depue, R. A. (1996). A neurobiological framework for the structure of personality and emotion: Implications for personality disorders. In J. F. Clarkin & M. F. Lenzenweger (Eds.), *Major theories of personality disorder* (pp. 347–390). New York: Guilford.
- Durik, A. M., & Harackiewicz, J. M. (2007). Different strokes for different folks: How individual interest moderates the effects of situational factors on task interest. *Journal of Educational Psychology*, 99(3), 597–610.
- Engel, S. (2011). Children’s need to know: Curiosity in schools. *Harvard Educational Review*, 81(4), 625–645.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum..
- Freire, P. (1998). *Pedagogy of freedom: Ethics, democracy, and civic courage*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield
- H Hartini et al. 2019. The Curiosity of Education Faculty Students in Learning. *International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)* ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-2, December, 2019
- H Hartini et al. 2020. Expressing the level of curiosity of students studying in college. *Jurnal Konseling dan Pendidikan* ISSN: 2337-6740 (Print) ISSN: 2337-6880
- H Hartini (2018) Cultural Learning of Rejang Ethnic. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*. Vol 2 No. 1
- Hamengkubuwono, H. (2017). Implementasi Audit Mutu Internal Pada Perguruan Tinggi Agama. *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 55.
- Harackiewicz, J. M., & Hulleman, C. S. (2010). The importance of interest: The role of achievement goals and task values in promoting the development of interest. *Social and Personality Psychology Compass*, 4(1), 42–52
- Hidi, S., & Harackiewicz, J. M. (2000). Motivating the academically unmotivated: A critical issue for the 21st century. *Review of Educational Research*, 70(2), 151–179
- Hogan, R., & Greenberger, E. (1969). The development of new measures of curiosity for children (Report No. 56). Baltimore, MD: Center for

the Study of Social Organization of Schools. (ERIC Document
Reproduction Services No. 107 744)

- Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah. 2001. *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim*. Terj. Muzaidi Hasbullah. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Kartadinata. (2016) *Membangun Kesiapan Manusia Indonesia hidup Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Dunia Kerja Global : Tantangan Bagi Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Orasi Ilmiah, disampaikan pada acara Dies Natalis ke 60 Universitas Pendidikan Indonesia, 20 Oktober 2016
- Kartadinata. S (2011). *Tindakan Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Pedagogis. Kiat Mendidik Sebagai Landasan Profesional Konselor*. Bandung. UPI Press
- Kartadinata. S (2012) . *Pendidikan Harus Antarkan Generasi Emas Indonesia 2045*. Konperensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi)VII yang diselenggarakan Universitas Negeri Yogyakarta, di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (1/11/2012).
- Kartadinata. S (2015) *Pendidikan Guru dan Generasi Emas Indonesia*. Seminar dan Temu Alumni Akbar dalam Rangkaian Dies Natalis Ke 61. Universitas Pendidikan Indonesia 17 Oktober 2015
- Kartadinata. S (2015) *Pengembangan Pedagogik Dari Perspektif Pendidikan Dan Pendidikan Guru Abad 21*. Seminar Internasional Pedagogik Ke 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kerjasama Komunitas Pendidik Serantau. Bandung, 15-17 September 2015. Universitas Pendidikan Indonesia
- Kashdan, T. B. (2004). *Curiosity*. In C. Peterson, & M. E. P. Seligman (Eds.), *Character strengths and virtues: A handbook and classification* (pp. 125–141). New York, NY: Oxford University Press
- Kashdan, T. B., & Fincham, F. D. (2004). *Facilitating curiosity: A social and self-regulatory perspective for scientifically based interventions*. In P. A. Linley, & S. Joseph (Eds.), *Positive psychology in practice* (pp. 482–503). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Kecskemeti. M 2013. *The Stance of Curiosity in the Classroom Is There a Place for Counselling Skills in Teachers' Work?*. *New Zealand Journal of Counselling*
- Keller, J. M. (1987). *Development and use of the ARCS model of instructional design*. *Journal of Instructional Development*, 10(3), 2–10.

- Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. 2018. Kebijakan Kemristekdikti Untuk Pendidikan Bimbingan Dan Konseling. Temu Kolega Prodi. Jogjakarta, 10 Maret 2018
- Krapp, A. (2005). Basic needs and the development of interest and intrinsic motivational orientations. *Learning and Instruction*, 15, 381–395.
- Krapp, A., Hidi, S., & Renninger, K. A. (1992). Interest, learning, and development. In K. A. Renninger, S. Hidi, & A. Krapp (Eds.), *The role of interest in learning and development* (pp. 3–26). New York, NY: Lawrence Erlbaum.
- Langevin, R. Is curiosity a unitary construct? *Canadian Journal of Psychology*, 1971. **25**, 360-374.
- Lewis, T. E. (2012). Teaching with pensive images: Rethinking curiosity in Paulo Freire's. *Pedagogy of the oppressed*. *The Journal of Aesthetic Education*, 46(1), 27–45.
- Litman, J. A. (2005). Curiosity and the pleasures of learning: Wanting and liking new information. *Cognition and Emotion*, 19(6), 793–814.
- Litman, J. A., & Jimerson, T. L. (2004). The measurement of curiosity as a feeling-of-deprivation. *Journal of Personality Assessment*, 82, 147–157.
- Maw, W. H., & Maw, E. W. (1961). Nonhomeostatic experiences as stimuli of children with high curiosity. *California Journal of Educational Research*, 12 (2), 57-61
- Mayers, P. (1978). Flow in adolescence and its relation to the school experience. Unpublished doctoral dissertation, University of Chicago.
- Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2014). 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Depdikbud
- Mitchell, M. (1993). Situational Interest: Its Multifaceted Structure In The Secondary School Mathematics Classroom. *Journal Of Educational Psychology*, 85(3), 424–436. Doi:10.1037/0022-0663.85.3.424
- Muhammad Zaini (2017) Kontrol Nilai Terhadap Sains. *Jurnal Substantia*, Volume 19 Nomor 1, April 2017.
- OECD. 2016. PISA 2015 Result in focus. Di unduh pada (2017, 3 Mei) tersedia <https://www.oecd.org>
- Paruntu, P., Sukestiyarno, Y., & Budi Prasetyo, A. (2018). Analysis of Mathematical Communication Ability and Curiosity Through Project

Based Learning Models With Scaffolding. *Unnes Journal of Mathematics Education Research*, 7(1), 26-34. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujmer/article/view/21864>

- Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification* (Vol. 1). Oxford University Press
- Pluck, Graham & Johnson, Helen .2011.Stimulating Curiosity To Enhance Learning. *Gesj: Education Science And Psychology* 2011 | No.2(19) Issn 1512-1801
- Raharja, S et al, 2018. Mengukur Rasa Ingin Tahu Siswa [Measuring Students' Curiosity. *A Journal Of Language, Literature, Culture, And Education Polyglot* Vol. 14 No. 2 Juli 2018
- Ritchhart, R. (2002). *Intellectual character: What it is, why it matters, and how to get it*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Rossing, B. E., & Long, H. B. (1981). Contributions of curiosity and relevance to adult learning motivation. *Adult Education Quarterly*, 32, 25–36.
- Schiefele, U. (2009). Situational and individual interest. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of motivation in schools* (pp. 197–223). New York, NY: Taylor and Francis
- Shelby Clark & Scott Seider (2017) Developing Critical Curiosity in Adolescents, *Equity & Excellence in Education*, 50:2, 125-141, DOI: 10.1080/10665684.2017.1301835
- Shor, I. (1992). *Empowering education: Critical teaching for social change*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Silmi, Millati, and Yani Kusmarni. "Menumbuhkan karakter rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran sejarah melalui media puzzle." *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 6.2 (2016).
- Solehuddin, (2015) Disertasi. Peberdayaan Taman Kanak-kanak kurang beruntung melalui pembelajaran berbasis bimbingan. Program Studi Bimbingan dan Konseling Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Spielberger, C. D., & Starr, L. M. (1994). Curiosity and exploratory behavior. In H. F. O'Neil, Jr. & M. Drillings (Eds.), *Motivation: Theory and research* (221–243). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 49

- Thoman, D. B., Sansone, C., & Pasupathi, M. (2007). Talking about interest: Exploring the role of social interaction for regulating motivation and the interest experience. *Journal of Happiness Studies*, 8, 335–370.
- Todd B. Kashdan, Paul Rose, and Frank D. Fincham. 2004. *Journal Of Personality Assessment*, 82(3), 291–305. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wan Mohd. Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Mohd. Naquib al-Attas, terj. Hamid Fahmy, dkk, (Bandung: Mizan, 2003), 144.
- White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. *Psychological Review*, 66, 297–333.
- Wigfield, A., & Cambria, J. (2010). Students' achievement values, goal orientations, and interest: Definitions, development, and relations to achievement outcomes. *Developmental Review*, 30, 1–35.
- Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge University Press.

Biodata Penulis



Dr. Hartini, M.Pd., Kons. lahir di Curup, Bengkulu, Pada Tanggal 24 Desember 1978 anak ke enam dari enam bersaudara dari pasangan H. Masyur Daud Ys (*alm*) dan Hj. Syarifah (*alm*). Menikah dengan Edi Wahyudi. M.M.TPd dan dikarunai 3 orang anak yakni Rafif Hibrizi (16 tahun), Naila Nazhifah (12 tahun), Atifah Nazipah (tahun). Riwayat Pendidikan S1 di Universitas Negeri Padang program studi bimbingan dan konseling strata satu tamat tahun 2001, Pendidikan Profesi Konselor lulus tahun 2010 dan menyelesaikan program Pascasarjana strata dua tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2020 menyelesaikan pendidikan strata tiga program studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. setelah menyelesaikan pendidikan S1 penulis

memulai karir sebagai pendidik yakni i sebagai pengajar di Universitas Terbuka Bengkulu, Akper Curup dan STIA Bengkulu sejak tahun 2001 s/d 2004, penulis juga pernah menjadi guru bimbingan dan konseling tahun 2005-2007 dan sebagai pengajar di Program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Penulis juga pernah menjabat sebagai ketua prodi Bimbingan Konseling Islam pada fakultas tarbiyah tahun 2014 dan sekarang sedang diamanahkan sebagai ketua prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Strata dua pada Pascasarjana IAIN Curup.

Membangun Kehidupan Harmonis dalam Lintas Budaya dan Agama Perspektif Pendidikan Islam

Sutarto

sutarto@iaincurup.ac.id

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam budaya dan agama. Keragaman ini sesungguhnya dapat menjadi modal utama dalam membangun bangsa dan negara. Karena di dalam budaya dan agama terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan dasar beretika dalam berbangsa dan bernegara. Hilangnya etika ini, akan mengakibatkan pudarnya nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat kolektif dan memunculnya pemahaman, sikap dan perilaku individualis dalam beragama dan kebudayaan, mengklaim agama dan budayanya yang paling benar, yang lain salah dan harus dimusuhi. Jika hal ini terjadi, maka keharmonisan dalam berbudaya dan beragama menjadi terganggu bahkan dapat menimbulkan perpecahan. Amin Abudllah (dalam Agustin, A. A, 2018) menyatakan, kehidupan berbudaya dan beragama saat ini sudah mulai mengalami proses disrupsi yang mengarah pada perpecahan dan harus segera diantisipasi, jika tidak maka 20 atau 30 tahun mendatang agama dan budaya akan berdiri sendiri-sendiri, saling bermusuhan dan bisa memicu konflik.¹⁸⁰

Agama pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, salah satu diantaranya adalah untuk memupuk persaudaraan. Setiap agama menginginkan persatuan dan perdamaian, tidak ada satu agama pun menginginkan perpecahan dan permusuhan.¹⁸¹ Namun ditemukan fakta negatif, ada kalanya timbul perpecahan yang disebabkan oleh masalah agama.¹⁸² Perpecahan sering kali diawali oleh adanya perbedaan doktrin, perbedaan budaya, suku, ras, masalah mayoritas dan minoritas, kemudian ditarik ke wilayah agama atau suku atau budaya untuk mendapatkan dukungan.

¹⁸⁰ Agustin, A. A. (2018). Perdamaian Sebagai Perwujudan Dalam Dialog Antar Agama. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(2), 17-34.

¹⁸¹ Natalia, A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), 36-56.

¹⁸² Natalia, A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), 36-56.

Konflik juga dapat terjadi karena adanya perbedaan antar individu, budaya, suku, perbedaan kepentingan dan adanya perubahan sosial.¹⁸³ Konflik antar suku dan budaya, sering kali dipicu oleh adanya ketimpangan, seperti ketimpangan ekonomi, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya,¹⁸⁴ kemudian dibawa ke dalam isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Oleh karena itu, apapun bentuk konflinya, baik konflik anatar agama, atau budaya harus dihindari, karena akan mengganggu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kajian ini akan membahas tentang membangun kehidupan harmonis dalam lintas budaya dan agama dalam perspektif pendidikan Islam. Kajian ini diawali dengan uraian tentang misi utama pendidikan Islam. Dilanjutkan pembahasan tentang pentingnya maturity dan dialog untuk membangun keharmonisan dalam berbudaya dan beragama, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Pembahasan ini menggunakan metode *library research*, yaitu suatu kajian yang membahas topik tertentu dimana sumber datanya diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, kitab suci dan hasil penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan *reflektif thinking*.

Pembahasan

Misi Utama Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan agama, budaya, kemanusiaan, dan kehidupan bersama. Dengan berkembangnya keempat aspek ini kehidupan manusia akan damai dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan misi utama pendidikan Islam yang pada dasarnya adalah untuk mendidik manusia sehingga mencapai derajat mulia disisi-Nya, dapat berguna bagi dirinya dan orang lain. Menurut Abuddin Nata, misi pendidikan Islam sejalan dengan misi Islam, yaitu mengembangkan dan melindungi hak-hak kemanusiaan manusia.¹⁸⁵ Imam al-Syathibi mengatakan, hadirnya Islam ke muka bumi pada dasarnya adalah untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak

¹⁸³ Azhar, A. (2018). Efektivitas Komunikasi Antarbudaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga di Wilayah KUA Lhoksukon. *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya*, 9(1), 69-80.

¹⁸⁴ Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian atas Teori Sosial Kontemporer. *TEMAL: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157-183.

¹⁸⁵ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 19

untuk berfikir, hak untuk mendapatkan dan pemeliharaan keturunan serta hak atas harta bendanya.¹⁸⁶

Pemeliharaan terhadap hak-hak tersebut pada intinya diarahkan pada upaya memuliakan harkat dan derajat manusia. Seperti firman Allah dalam QS al-Israa' ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Sasaran akhir dari misi ajaran Islam adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sehingga menjadi mulia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸⁷ Misi ini yang kemudian dijabarkan menjadi misi pendidikan Islam, guna untuk mengembangkan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh manusia selaras dengan ajaran Islam.¹⁸⁸ Keistimewaan manusia yang demikian itu dalam sejarah pernah mengalami kemunduran. Berbagai karunia dan peluang hidup yang diberikan Allah telah disalahgunakan oleh manusia karena tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Manusia yang mengikuti dorongan hawa nafsu, materialistik, dan hedonistik telah membuat berbagai kerusakan dan bencana di muka bumi. Seperti dilukiskan dalam QS ar-Ruum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Misi pendidikan Islam terlihat dari respons dan komitmen ajaran Islam dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi manusia saat kedatangannya. Gambaran tentang kesesatan hidup manusia (saat kedatangan al-Qur'an) dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Di bidang akidah, manusia tidak lagi mempercayai Allah, Tuhan yang menciptakan alam

¹⁸⁶Bariyah, O. N., & Akma, N. (2015). Hak asasi manusia dalam Islam.

¹⁸⁷Nata, D. H. A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, h. 135

¹⁸⁸Nata, D. H. A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*....h. 136

semesta, melainkan mempercayai makhluk ciptaan Tuhan.¹⁸⁹ Di bidang ibadah, dengan sendirinya menyimpang, seperti menyembah kepada makhluk ciptaan Tuhan tersebut. Di bidang akhlak, tenggelam dalam perilaku yang melampaui batas seperti pelacuran, perjudian, dan membunuh anak-anak yang tidak berdosa.¹⁹⁰

Kerusakan di bidang akidah, ibadah, dan akhlak tersebut berimbas pada kerusakan di bidang kehidupan lain. Seperti di bidang politik, terlihat dari praktik raja-raja yang menjalankan kekuasaannya secara otoriter, absolut, diktator, dan kejam.¹⁹¹ Di bidang ekonomi, kerusakan terjadi ketika masyarakat dengan seenaknya mengurangi timbangan dan praktik meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi (riba), praktik penipuan, korupsi, dan sebagainya. Di bidang sosial, kerusakan terjadi ketika masyarakat membagi dirinya ke dalam kelas-kelas yang ditentukan berdasarkan latar belakang keturunan, asal daerah, warna kulit, status ekonomi, status sosial, dan jenis kelamin. Perbedaan kelas sosial yang demikian, membawa manusia untuk tetap pada kelasnya dan tidak boleh saling berhubungan antar kelas yang berbeda.¹⁹² Di bidang kebudayaan, masyarakat pada saat itu lebih memperturutkan hawa nafsu, hedonis, dan materialisme ketimbang pertimbangan akal sehat atau nilai-nilai ajaran agama. Di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, terlihat ketika masyarakat pada saat itu lebih mempercayai dukun, ahli nujum, tukang tenung, khurafat, dan tahayul ketimbang mempercayai ajaran agama dan akal sehat. Di bidang hukum, kerusakan terlihat pada saat hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran.¹⁹³

Berbagai kerusakan itulah yang direspons oleh Islam dengan cara mengatasinya melalui dakwah dan pendidikan. Di bidang akidah, al-Qur'an menyuruh agar manusia agar hanya menyembah Allah dan dilarang menyekutukan-Nya. Kemusyrikan itu dapat merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Di bidang ibadah, Allah menyuruh manusia hanya menyembah Allah semata. Dengan ibadah tersebut diharapkan dapat melahirkan akhlak yang mulia seperti memiliki iman yang kukuh, memiliki

¹⁸⁹Al-Ussairy, A. (2020). *Sejarah Islam*. Akbar.

¹⁹⁰Abdullah, A. (2019). Perkembangan Islam di Arab Saudi. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 4(1), 152-171.

¹⁹¹Firmansyah, H. (2019). Muhammad saw pada Periode Mekah. *At-Tafkir*, 12(1), 55-77.

¹⁹²Firmansyah, H. (2019). Muhammad saw pada Periode Mekah. *At-Tafkir*, 12(1), 55-77.

¹⁹³Rasyidah, A. (2020). Pendidikan pada Masa Rasulullah SAW di Makkah dan di Madinah. *al-bikmah (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)*, 2(1), 32-44.

kepekaan dan kepedulian sosial, menepati janji dan bersikap sabar, serta senantiasa bertakwa kepada Allah.

Respons al-Qur'an dalam mengatasi masalah di bidang ekonomi, al-Qur'an melarang praktik riba, memakan harta anak yatim, mengurangi timbangan, serta perintah berlaku adil. Di bidang politik, al-Qur'an menganjurkan perlunya ditegakkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah. Di bidang sosial, al-Qur'an menawarkan prinsip-prinsip *egaliter* (kesederajatan), tolong-menolong, saling menasihati, toleransi, dan kerjasama yang baik. Menurut al-Qur'an, kedudukan manusia bukan ditentukan oleh latar belakang jenis kelamin, suku bangsa, dan golongan, melainkan karena ketakwaan kepada Allah. Di bidang kebudayaan, al-Qur'an melarang meminum khamr, berjudi, dan berzina. Untuk mengangkat manusia dari keterbelakangan dan kebodohan, Allah memerintahkan manusia agar menggunakan jaksaknya untuk berfikir, membaca, memahami, mengkaji, menganalisis dan meneliti dalam makna yang seluas-luasnya. Hal ini diisyaratkan bahwa ayat pertama kali diturunkan Allah adalah perintah membaca. Artinya Islam menghendaki agar manusia terhindar dari keterbelakangan dan kebodohan.

Muhammad Anis, mengemukakan bahwa pendidikan Islam menjadikan al-Qur'an sebagai tempat konsultasi agar pendidikan yang dikembangkan tidak salah arah dan dapat mengembangkan potensi manusia secara optimal.¹⁹⁴ Hakikat pendidikan Islam adalah memanusiakan manusia dalam makna menumbuhkan secara optimal potensi yang ada dalam diri manusia sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah yang baik.¹⁹⁵ Pendidikan Islam mendesain proses pendidikannya tidak menjadikan peserta didik sebagai hamba Allah dan khalifah Allah yang baik, berarti belum memanusiakan manusia.

Pendidikan Islam mengembangkan rasa ketuhanan peserta didik. Manusia secara *fitriyah* adalah makhluk bertuhan. Manusia memiliki kebutuhan dasar (*basic need*) bertuhan (*homo religious*),¹⁹⁶ sehingga pendidikan yang tidak mengembangkan rasa ketuhanan peserta didik adalah pendidikan yang tidak memanusiakan manusia. Pendidikan yang memanusiakan manusia juga harus

¹⁹⁴Muhammad Anis, *Quantum al-Fatihah : Membangun Konsep Pendidikan Berdasarkan Surah al-Fatihah*, (Yogyakarta : Pedagogia, 2010), h. vii

¹⁹⁵Siddik, H. (2016). Hakikat Pendidikan Islam. *Al-Rimayah: Jurnal Kependidikan*, 8(1), 89-103.

¹⁹⁶Pransiska, T. (2016). Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 17(1), 1-17.

menyiapkan peserta didik untuk menjadi khalifat yang baik, yang mampu menjalani hidup di dunia dengan sebaik-baiknya, membuat kemakmuran masyarakatnya, menjaga keseimbangan dirinya sebagai individu sekaligus makhluk sosial, jasmani sekaligus rohani, dan menjaga keseimbangan alam dengan tidak membuat kerusakan di bumi.

Pendidikan Islam merupakan ujung tombak bagi pengembangan agama, budaya dan kemanusiaan, serta kehidupan bersama, karena pendidikan Islam mengemban misi menghidupkan nilai-nilai moral al-Qur'an. Menurut Harun Yahya, menghidupkan nilai-nilai moral al-Qur'an akan membuahkan keadilan sejati.¹⁹⁷ Seperti firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Banyaknya kemerosotan moral yang terjadi di masyarakat seperti penipuan, penyuapan, kecurangan, kezaliman, dan kemaksiatan akibat tidak diterapkannya prinsip-prinsip moral al-Qur'an. Solusi terhadap penyelesaian masalah-masalah sosial tersebut adalah dengan menghidupkan nilai-nilai moral al-Qur'an seperti nilai-nilai persahabatan, ikatan keluarga, spiritual, dan aturan sosial. Orang yang hidup dengan nilai-nilai moral al-Qur'an tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji dan tidak akan pernah menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral al-Qur'an.

Pendidikan Islam berusaha menghidupkan nilai-nilai moral al-Qur'an tersebut, yaitu nilai-nilai yang menuntun manusia untuk hidup sesuai seruan al-Qur'an. Pendidikan seperti inilah yang mencerahkan kehidupan manusia. Pendidikan yang mengarahkan tujuan hidup manusia dan menunjukkan bukti-bukti Allah di bumi dan di alam semesta. Atas dasar alasan inilah mengapa pendidikan Islam merupakan ujung tombak bagi pengembangan agama, budaya dan kemanusiaan, serta kehidupan bersama.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, misi pendidikan Islam adalah sejalan dengan misi utama al-Qur'an, yaitu mendidik manusia sehingga

¹⁹⁷Harun Yahya, *Moralitas al-Qur'an : Solusi atas Persoalan Umat Manusia*, (Jakarta : Robbani Press, 2002), h. 33

mencapai derajat yang mulia di sisi-Nya, dapat berguna bagi dirinya dan orang lain. Apa kriteria derajat mulia tersebut? Sebagian ahli,¹⁹⁸ mengemukakan beberapa indikator derajat mulia tersebut yang menjadi tujuan Pendidikan Islam, yaitu :

1. Bertakwa kepada Allah

Orang yang bertakwa kepada Allah adalah dengan penuh kesadaran dan ketulusan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Firman Allah dalam QS ali-Imran ayat 102 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim”.

M Quraish Shihab, menjelaskan bahwa maksud dari Surat Ali Imran ayat 102 adalah seruan Allah agar manusia senantiasa berserah diri kepada Allah dalam keadaan apapun sampai akhir hayat.¹⁹⁹ Penyerahan diri kepada Allah dapat dilakukan dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mengimani yang ghaib, mendirikan shalat, menginfakkan sebagian rizkinya, mengimani kitab-kitab Allah dan meyakini kebenaran akhirat (QS al-Baqarah : 3-4). Orang yang bertakwa adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, menahan amarahnya, memaafkan manusia, dan selalu ingat kepada Allah serta segera memohon ampun jika melakukan perbuatan dosa (QS ali-Imran : 133-136).

2. Berakhlak mulia

Rasulullah saw diutus ke muka bumi dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan pribadi muslim. Oleh karena itu, arah dari pendidikan Islam adalah untuk mendidik manusia agar memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah saw. Hal ini dapat difahami dari firman Allah dalam QS al-Qalam ayat 4 :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur”.

M Quraish Shihab, ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa makna kata *khuluq* bukan sebatas hanya perilaku, watak dan budi

¹⁹⁸Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 136

¹⁹⁹M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 2*, (Jakarta : Lentera Hati, 2003), h. 168

pekerti luhur, tetapi di atas dari makna itu, hal ini dijelaskan dalam ayat tersebut bukan hanya menggunakan kata *innaka*, melainkan diperkuat dengan tanda *tanwin* pada kata *kebuluqin* dan huruf *lam* dalam kata *la'alla*.²⁰⁰

3. Berkembangnya seluruh potensi diri (jasmani, indrawi, rohani, dan akal pikiran)

Rumusan tujuan ini berdasarkan firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 30 :

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

M Quraih Sihab,²⁰¹ menjelaskan tugas melaksanakan fungsi kekhalifahan tersebut diberikan oleh Allah kepada manusia karena Allah mengetahui rahasia dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yaitu kemampuan dan kekuatan akal pikiran manusia.

4. Membentuk manusia yang seutuhnya

Tujuan pendidikan Islam diarahkan pada upaya membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang hidupnya tidak untuk dunia saja melainkan juga untuk akhirat, aspek yang dikembangkan bukan jasmani saja melainkan juga aspek rohaninya, tidak mengembangkan akal saja melainkan juga mengembangkan hatinya. Seperti terdapat dalam QS al-Baqarah ayat 208 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَدْخُلُوْۤا فِى السَّلٰمِۙ كٰفَّةًۙ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۙ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”.

²⁰⁰M Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 14*, (Jakarta : Lentera Hati, 2003), h. 380

²⁰¹M Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2003), h. 142

5. Mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat

Persiapan untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat merupakan tujuan tertinggi bagi pendidikan. Seperti terdapat dalam QS al-Baqarah ayat 201 :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

Dalam realitas kehidupan berlintas agama dan budaya, pluralitas dan multikultural adalah sebuah keniscayaan. Di satu sisi beragam agama dan budaya adalah sebuah kekayaan bangsa, di sisi lain justru menjadi faktor pemicu konflik SARA dan kekerasan. Pendidikan Islam sesungguhnya sudah menawarkan sonsep sosulif menghadapi realitas tersebut. Ditinjau dari tujuan pendidikan Islam seperti yang telah diuraikan di atas, merupakan tujuan pendidikan yang sangat komprehensif. Dari tujuan pendidikan Islam yang sangat komprehensif tersebut dapat dikembangkan beberapa konsep solusif dalam realitas kehidupan berlintas agama dan budaya seperti yang ditawarkan oleh Jalaluddin Rakhmat,²⁰² yaitu :

- a. Pendidikan Islam hendaknya lebih berupaya mengembangkan sikap keberagamaan yang *instrinsik* daripada sekedar mengembangkan sikap keberagamaan yang *ekstrinsik*.

Orang yang beragama seharusnya lebih sehat mentalnya daripada orang-orang yang tidak beragama. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Hal ini sangat tergantung dari cara beragama. Allport menjelaskan, manusia dalam beragama dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, manusia beragama secara *ekstrinsik*, yaitu beragama untuk tujuan tertentu selain tujuan kehidupan, seperti untuk meningkatkan status sosial, mendapatkan rasa aman, harga diri dan sebagainya. Paradigma seperti inilah yang perlu dirubah dengan pendidikan Islam. Kedua, manusia beragama secara intrinsik, yaitu memandang agama sebagai sumber inspirasi, dan pedoman hidup yang mengatus semua aspek kehidupan manusia.²⁰³Cara beragama seperti ini terhunjam dalam hatinya sehingga mampu menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, membawa ketengan dan kesehatan mental.Cara

²⁰²Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, (Bandung : Mizan, 2003), h. 25-54

²⁰³Tahaha, H., & Rustan, E. (2017). Orientasi Religiusitas dan Efikasi Diri dalam Hubungannya dengan Kebermaknaan Pendidikan Agama Islam pada Mahasiswa IAIN Palopo. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 13(2), 163-179.

beragama secara *intrinsik* inilah yang harus dikembangkan dalam pendidikan Islam.

- b. Pendidikan Islam hendaknya memberi pemahaman yang menyeimbangkan antara *tauhidul ibadah* dengan *tauhidul ummah*.

Inti ajaran Islam adalah *tauhidul ibadah* dan *tauhidul ummah*, mempersatukan pengabdian dan mempersatukan umat.²⁰⁴ Manusia dihadapan Allah memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama-sama menjadi hamba Allah. Kemulyaan manusia di hadapan Allah bukan terletak pada tingginya status sosial, pangkat, jabatan, pengetahuan dan keturunan, tetapi terletak pada pada kualitas keimanan dan ketakwaan. Islam sangat melarang sikap mental yang melebihkan individu yang satu dengan individu lainnya, dan antara kelompok yang dengan kelompok lainnya yang disebabkan karena adanya faktor keturunan, kedudukan, status sosial, pengetahuan dan sebagainya. Keturunan bukan saja menimbulkan feodalisme, tetapi juga imperialisme. Kekuasaan sering dipakai untuk menindas orang lain. Kekuasaan dan kekayaan sering dijadikan alat untuk memeras orang lain. *Tauhidul ibadah* seharusnya dapat menegakkan *tauhidul ummah*, yaitu masyarakat yang ditegakkan di atas keadilan sosial.

- c. Pendidikan Islam hendaknya memberi pemahaman tentang peranan agama dalam kehidupan manusia.

Islam memandang bahwa kehadiran agama di dunia dimaksudkan untuk mengubah manusia menuju perubahan yang lebih baik (*taghyir*). Islam memandang bahwa perubahan sosial harus dimulai dari perubahan individu. Perubahan individu harus dimulai dari perubahan intelektual dan ideological. Dimensi ritual harus tercermin pada dimensi sosial.

- d. Pendidikan Islam hendaknya menjelaskan hubungan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah.

Secara sederhana urusan ibadah adalah urusan antara seorang hamba dengan Allah (*hablun minallah*), sedangkan urusan muamalah adalah urusan hamba dan hamba Allah lainnya (*hablun minannas*). Yang pertama adalah urusan ritual dan yang kedua adalah urusan sosial. Islam ternyata adalah agama yang tidak hanya memperhatikan aspek ritual, tetapi lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial. Inilah yang perlu dikembangkan

²⁰⁴Ulum, I. M. (2013). Konsepsi Tauhid Menurut Muhammad bin Abdul Wahab dan Implikasinya bagi Tujuan Pendidikan Islam. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 9(3), 94-105.

dalam pendidikan Islam sebagai upaya solusif dalam realitas kehidupan berlintas agama dan budaya.

Pentingnya “Maturity” dalam Beragama dan Berbudaya untuk Menciptakan Kehidupan Harmonis

Masyarakat yang hidup dalam berlintas agama dan budaya, sering menghadapi konflik SARA dan kekerasan. Banyak faktor yang memicu munculnya konflik SARA dan kekerasan tersebut. Salah satu faktor yang memegang peran penting adalah faktor “*maturity*” atau kedewasaan dalam berlintas agama dan budaya. Maturity atau kedewasaan adalah sikap menerima dan terbuka dengan perbedaan.²⁰⁵ Sikap yang tidak menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya saja yang benar, sementara kelompok lain yang berbeda dengan diri atau kelompoknya salah. Kedewasaan beragama bukan bersikap tertutup dalam melihat perbedaan.²⁰⁶ Sikap eksklusif dalam beragama dapat menimbulkan sikap klaim kebenaran secara sepihak, menolak, menyalahkan bahkan memusuhi perbedaan. Klaim kebenaran sepihak merupakan salah ciri dari sikap ketidaksewaan dalam beragama yang mengakibatkan timbulnya sikap ingin benar dan menang sendiri. Individu yang memiliki kedewasaan dalam beragama akan memiliki sikap rendah hati, saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan, termasuk dalam perbedaan keyakinan.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakdewasaan dalam beragama dan berbudaya adalah memahami ajaran Islam secara tektual dan mengabaikan pemahaman secara kontekstual dan aspek historis atau pemahaman tektual literalistik.²⁰⁷ Pemahaman seperti ini akan menimbulkan beberapa hal, pertama, klaim kebenaran. Kebenaran dikaim hanya miliknya sendiri. Kedua, monopoli tafsir keagamaan. Ketiga, munculnya kekerasan dengan mengatasnamakan agama.

Berdasarkan faktor penyebab ketidakdewasaan dalam berlintas agama dan budaya seperti yang dijelaskan di atas, maka konsep pembelajaran Pendidikan Islam khususnya di tingkat SMA dan Perguruan Tinggi, idealnya menggunakan melalui pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan ini lebih menekankan pada perkembangan aspek sosial, dan membangun pengetahuan secara bersama-sama

²⁰⁵Putra, W. (2013). Perkembangan Anak Ditinjau dari Teori Mature Religion. *Nadwa*, 7(1), 1-19.

²⁰⁶Halim, A., & Jambi, F. U. I. S. (2015). Pluralisme dan Dialog Antar Agama. *TAJIDID*, 14, 35-62.

²⁰⁷Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 166-171

dengan melibatkan orang lain. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat guna untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman yang sudah dimiliki.²⁰⁸ Piaget menjelaskan, dalam pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan memotivasi siswa agar dapat mengeksplorasi serta mengembangkan pemahamannya.²⁰⁹ Menurut Vygotsky, guru harus memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar dengan teman dan gurunya guna untuk mengkonstruksikan pengetahuan secara bersama-sama.²¹⁰

Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme menuntut guru untuk menggunakan sumber belajar yang bervariasi, memotivasi siswa agar aktif dalam proses pembelajaran dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan saling bertukar pikiran antar teman.²¹¹ Di sisi lain, pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme juga menuntut siswa untuk dapat menginterpretasikan, membuktikan dan membuat ulasan sendiri terkait materi pembelajaran.²¹² Guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa berfikir, menganalisis, memahami dan mengemukakan gagasan terkait dengan isu-isu sosial secara lebih mendalam.

Implementasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran pendidikan Islam memberikan manfaat kepada siswa jika siswa menyadari apa yang dipelajari berguna bagi dirinya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan kata lain, pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme akan memberikan manfaat kepada siswa, jika proses pembelajaran yang dilaksanakan bermakna bagi siswa.²¹³ Pembelajaran akan lebih bermakna jika dalam proses pembelajaran dilakukan interaksi di dalam kelas dengan mengkaji sedikit tapi penting secara mendalam melalui berbagai sudut pandang. Maksudnya pengkajian mendalam terhadap sedikit topik penting lebih memberi banyak manfaat ketimbang pengkajian dangkal atas banyak topik.

²⁰⁸John W Santrock, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 390

²⁰⁹Supardan, H. D. (2016). Teori dan praktik pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(1).

²¹⁰Fitriani, R., Ma'mun, T. N., & Suryani, E. (2019). Pendidikan Karakter dalam Naskah Puspakerma: Kajian Konstruktivisme Perspektif Lev Vygotsky. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 10(1), 125-139.

²¹¹Nurhidayati, E. (2017). Pedagogi konstruktivisme dalam praksis pendidikan Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 1(1), 1-14.

²¹²Nurhidayati, E. (2017). Pedagogi konstruktivisme dalam praksis pendidikan Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 1(1), 1-14.

²¹³Nurohman, S. (2008). Peningkatan thinking skills melalui pembelajaran ipa berbasis konstruktivisme di Sekolah Alam. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 11(1).

Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme selain memuntut siswa agar berfikir kritis terhadap isu-isu penting, juga berorientasi untuk mengembangkan kemampuan berfikir kritis terhadap nilai-nilai dan isu-isu kontofesial.²¹⁴Oleh karena itu, guru harus mampu memahami berbagai sudut pandang yang berbeda dan menghargai berbagai pandangan yang didasari dengan argumen logis dan kuat dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perubahan sosial. Dalam membahas satu topik penting dalam dimensi etis dan membahas isu-isu kontroversial, guru tidak serta merta memberi tahu secara langsung hal-hal yang yang dianggap etis terkait dengan topik yang dibahas, melainkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengjasi dan membahasnya dari berbagai sudut pandang.

Dengan demikian pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme, dari awal siswa sudah menyadari adanya keragaman pemahaman karena perbedaan cara pandang, diajak secara terbuka menerima keragaman cara pandang, serta dilatih bagaimana menyikapi keragaman pemahaman dari cara pandang yang berbeda tersebut. Pengalaman belajar (*learning experience*) yang diperoleh siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis ini adalah refleksi, pemahaman, menemukan makna, pemikiran kritis tentang nilai dan isu konoversial, dan pengkajian mendalam terhadap suatu topik permasalahan dalam kehidupan berlintas agama dan budaya sehingga diharapkan mereka lebih dapat mengembangkan sikap kedewasaan atau “*maturity*” hidup dalam masyarakat plural dan multikultur.

Mengedepankan Dialog dan Menghargai Perbedaan untuk Menciptakan Kedamaian

Persoalan terbesar dalam kehidupan berlintas agama dan budaya akhir-akhir ini adalah banyaknya kasus-kasus kekerasan dan mempengaruhi karakter seseorang, baik yang langsung ditunjukkan oleh sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, maupun melalui simbol kekerasan yang secara masif dikampanyekan lewat berbagai media sosial dan permainan elektronik. Guru memiliki peran penting untuk untuk mensosialisaikan dan mengembangkan budaya dalam kalangan siswa melalui pembelajaran pendidikan kedamaian. Menurut UNESCO, pendidikan perdamaian adalah menciptakan budaya damai, yaitu proses menumbuhkembangkan nilai, sikap,

²¹⁴Ula, N. H. (2019). *Penerapan Model Pembelajaran Konstruktivis dalam Melatih Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 dan 6 Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

perilaku, dan pandangan hidup yang berdasar pada pandangan antikekerasan, toleransi antar sesama, menjunjung tinggi hak dan kewajiban, saling berbagi, solidaritas antar sesama dan saling berkomunikasi.²¹⁵ Perdamaian akan terwujud jika dalam menyelesaikan masalah tidak menggunakan kekerasan, mengedepankan dialog dan saling menghargai. Begitu juga selama proses pendidikan di sekolah, sering kali ditemukan masalah baik di kelas maupun di luar kelas. Guru dalam menghadapi dinamika siswa selama proses pendidikan harus mengedepankan dialog, mengedepankan sentuhan-sentuhan psikologis dan menghindari kekerasan.

Salah satu upaya menghadapi realitas kehidupan berlintas agama dan budaya tersebut di atas adalah seperti yang dilakukan oleh The Asia Foundation pada beberapa pesantren, madrasah, dan sekolah di Indonesia melalui *Living Values Education Program (LVEP)*. LVEP merupakan program pendidikan guna untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan bersosial, nilai-nilai, interpersonal, emosional dan melatih siswa untuk mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sosial.²¹⁶ Dengan adanya program ini diharapkan nilai-nilai yang sudah ada dan masih relevan dihidupkan serta dikembangkan kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Selin itu juga untuk melatih siswa agar memiliki kemampuan untuk memimpin dengan memngedepankan nilai-nilai yang ada dan telah disepakati.

Salah satu kunci menciptakan hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan masyarakat adalah adanya sikap saling menghormati dan menghargai walaupun dalam perbedaan. Perbedaan merupakan sunatullah dan tidak bisa dihindari. Tidak mengakui adanya perbedaan berarti menentang sunatullah. Perbedaan yang ada harus disikapi secara arif dan bijaksana, bukan malah dijadikan alasan untuk menciptakan kebencian dan permusuhan. Prinsip utama yang harus menjadi komitmen setiap individu agar terwujud kedamaian adalah mencintai kedamaian itu sendiri. Cinta terhadap kedamaian merupakan salah satu dari ajaran Islam bahkan sejalan dengan makna Islam itu sendiri dan selaras dengan misi utama dari ajaran Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin (QS al-Anbiya ayat 107).

Tawaran solutif pendidikan Islam untuk mengembangkan dialog untuk mengembangkan sikap saling menghargai Perbedaan untuk menciptakan

²¹⁵Budhy Munawar Rachman (ed), *Pendidikan Karakter*, (Jakarta : The Asia Foundation, 2016), h. 17

²¹⁶Budhy Munawar Rachman (ed), *Pendidikan Kararakter...* h. xvii

kedamaian adalah dengan model pembelajaran reflektif. Model pembelajaran reflektif pada dasarnya adalah model pembelajaran untuk merefleksikan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki dalam tingkah laku sehari-hari guna untuk menumbuhkan kesadaran dalam beragama.²¹⁷ Dalam pelaksanaannya, model pembelajara ini merupakan gabungan antara *active learning* dan reflektif-dialogis.

Bonwell dan Eison menjelaskan, dalam pembelajaran *active learning*, guru dituntut untuk melibatkan siswa secara aktif untuk melakukan sesuatu yang dirasakan dan dipahami. Pembelajaran reflektif dialogis reflektif, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk melakukan berbagai kegiatan guna memberikan pengalaman belajar kepada siswa, kemudian mendialogkan dengan teman dan guru, atau disebut juga pembelajaran aktif reflektif.

Dengan demikian baik guru maupun siswa dapat menjadi pribadi pembelajar sepanjang hayat dan lebih independen. Inilah yang disebut dengan *learning being a journey, not a destination*,²¹⁸ pembelajaran adalah sebuah proses dan bukan sekedar tujuan. Sebagai sebuah proses maka pembelajaran akan dilakukan terus menerus dan tidak akan pernah berhenti selama masih hidup (*life-long learning*). Model pembelajaran seperti inilah yang akan dapat menghasilkan lulusan atau insan yang humanis dalam keberagamaan.

Tujuan akhir dari pendidikan Islam, pada hakikatnya adalah untuk membangun generasi yang kuat dan tangguh. Dalam al-Qur'an an-Nisa' ayat 9 dijelaskan :

وَلِيَحْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Surat an Nisa' ayat 9 menjelaskan bahwa Allah memperingatkan kepada manusia agar jangan meninggalkan generasi yang tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Generasi yang ditinggal hendaknya adalah generasi yang kuat, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan pendahulunya, baik ketangguhan jasmani maupun ketangguhan

²¹⁷Suliswiyadi, *Pembelajaran al-Islam Reflektif*, (Magelang : UMMgl Press, 2013), h. 85

²¹⁸Suliswiyadi, *Pembelajaran al-Islam Reflektif*.. h. 88

rohani.²¹⁹ Prayitno menjelaskan, ada empat dimensi rohaniah yang harus dikembangkan pada diri manusia agar manusia menjadi tanggung. Pertama, dimensi keindividualan, mencakup bakat, minat, potensi dan sebagainya. Kedua, dimensi kesosialan, yaitu kemampuan menjalin hubungan sosial secara baik antar sesama. Ketiga, dimensi kesulilaan, kemampuan berakhlak karimah.²²⁰ Keempat, dimensi keberagamaan, yang kemampuan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama yang diyakini. Jika pengembangan keempat dimensi kemanusiaan tersebut dilakukan secara maksimal dan seimbang maka manusia akan menjadi generasi yang tanggung, bukan hanya di hadapan sesama manusia tetapi juga dihadapan Allah SWT.

Kesimpulan

Tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah sejalan dengan misi diturunkan Islam ke muka bumi, yaitu memulyakan kemanusiaan manusia sehingga menduduki derjat yang ditinggi baik di dunia maupun di dihadapan Allah SWT. Ada empat dimensi penting yang perlu dikembangkan melalui pendidikan Islam, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesulilaan dan dimensi keberagamaan. Keempat dimensi ini harus dikembangkan secara maksimal dan seimbang.

Pendidikan Islam merupakan ujung tombak dalam membangun kehidupan yang harmonis baik dalam lintas agama maupun budaya. Kehidupan yang harmonis tersebut akan terjadi jika dimensi sosial yang ada dalam diri manusia dapat berkembang secara maksimal. Pengembangan dimensi sosial manusia dapat dilakukan melalui pendidikan Islam dengan menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran, salah satu diantaranya adalah dengan pendekatan konstruktivisme. Membangun kehidupan harmonis dalam lintas agama dan budaya sangat dipengaruhi oleh kematangan individu dalam beragama. Kematangan beragama dapat dibangun melalui peningkatan pemahaman terhadap ajaran dan melalui dialog. Dengan adanya kematangan dalam beragama, pada gilirannya akan melahirkan sikap terbuka dan menerima dalam perbedaan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip dasar agama yang diyakininya.

²¹⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Qur'an Tematik Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat, 2010), h. 11-12

²²⁰Erman, A. Prayitno. (2004), *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Renika Cipta, h. 17-20

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2019). Perkembangan Islam di Arab Saudi. *Jurnal Ilmiah AL-Jaubari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 4(1), 152-171.
- Abuddin Nata, (2016), *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Agustin, A. A. (2018). Perdamaian Sebagai Perwujudan Dalam Dialog Antar Agama. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(2), 17-34.
- Al-Usairy, A. (2020). *Sejarah islam*. Akbar.
- Azhar, A. (2018). Efektivitas Komunikasi Antarbudaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Di Wilayah KUA Lhoksukon. *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya*, 9(1), 69-80.
- Bariyah, O. N., & Akma, N. (2015). Hak asasi manusia dalam Islam.
- Budhy Munawar Rachman (ed), *Pendidikan Karakter*, (2016), Jakarta : The Asia Foundation
- Budhy Munawar Rachman, (2010), *Argumen Islam untuk Liberalisme*, Jakarta : Grasindo
- Firmansyah, H. (2019). Muhammad SAW pada Periode Mekah. *At-Tafkir*, 12(1), 55-77.
- Fitriani, R., Ma'mun, T. N., & Suryani, E. (2019). Pendidikan Karakter dalam Naskah Puspakerma: Kajian Konstruktivisme Perspektif Lev Vygotsky. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 10(1), 125-139.
- Halim, A., & Jambi, F. U. I. S. (2015). Pluralisme dan Dialog Antar Agama. *TAJDID*, 14, 35-62.
- Harun Yahya, (2002), *Moralitas al-Qur'an : Solusi atas Persoalan Umat Manusia*, Jakarta : Robbani Press
- Erman, A. Prayitno. (2004), *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Renika Cipta
- Jalaluddin Rakhmat, (2003), *Islam Alternatif*, Bandung : Mizan
- John W Santrock, (2016), *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : Kencana
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Qur'an Tematik Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat, 2010), h. 11-12
- M Quraish Shihab, (2003), *Tafsir al-Misbab Vol 1*, Jakarta : Lentera Hati
- M Quraish Shihab, (2003), *Tafsir al-Misbab Vol 14*, Jakarta : Lentera Hati
- M Quraish Shihab, (2003), *Tafsir al-Misbab Vol 2*, Jakarta : Lentera Hati
- Muhammad Anis, (2010), *Quantum al-Fatihah : Membangun Konsep Pendidikan Berdasarkan Surah al-Fatihah*, Yogyakarta : Pedagogia
- Nata, D. H. A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Natalia, A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), 36-56.

- Nurhidayati, E. (2017). Pedagogi Konstruktivisme dalam Praksis Pendidikan Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 1(1), 1-14.
- Nurhidayati, E. (2017). Pedagogi konstruktivisme dalam praksis pendidikan Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 1(1), 1-14.
- Nurohman, S. (2008). Peningkatan Thinking Skills melalui Pembelajaran IPA Berbasis Konstruktivisme di Sekolah Alam. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 11(1).
- Pransiska, T. (2016). Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 17(1), 1-17.
- Putra, W. (2013). Perkembangan Anak Ditinjau dari Teori Mature Religion. *Nadwa*, 7(1), 1-19.
- Rasyidah, A. (2020). Pendidikan pada Masa Rasulullah SAW di Makkah dan di Madinah. *al-hikmah (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)*, 2(1), 32-44.
- Siddik, H. (2016). Hakikat Pendidikan Islam. *Al-Rivayah: Jurnal Kependidikan*, 8(1), 89-103.
- Suliswiyadi, (2013), *Pembelajaran al-Islam Reflektif*, Magelang : UMMgl Press
- Supardan, H. D. (2016). Teori dan praktik pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(1).
- Tahaha, H., & Rustan, E. (2017). Orientasi Religiusitas dan Efikasi Diri dalam Hubungannya dengan Kebermaknaan Pendidikan Agama Islam pada Mahasiswa IAIN Palopo. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 13(2), 163-179.
- Ula, N. H. (2019). *Penerapan Model Pembelajaran Konstruktivis dalam Melatih Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 dan 6 Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ulum, I. M. (2013). Konsepsi Tauhid Menurut Muhammad bin Abdul Wahab dan Implikasinya bagi Tujuan Pendidikan Islam. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 9(3), 94-105.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian atas Teori Sosial Kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157-183.

Biodata Penulis



Sutarto, lahir di Bantan Tengah (Kabupaten Bengkalis Riau) pada tanggal 21 September 1974. Sejak tahun 2010 sampai sekarang adalah dosen tetap Institut Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Provinsi Bengkulu. Setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar tahun 1989, melanjutkan ke SMP tamat tahun 1991, tahun 1994 tamat Madrasah Aliah,

tahun 1998 menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (dulu Penerangan Penyiaran Agama Islam). Menyelesaikan S2 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Padang tahun 2004. Menamatkan Program Doktor pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang tahun 2018. Sejak tahun 2000 diangkat sebagai CPNS, tahun 2003-2008 menjadi Kepala KUA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat. Pernah menjadi tenaga pengajar (dosen) di Universitas Mahaputera Muhammad Yamin Kabupaten Solok tahun 2005-2008 dan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok Nan Indah Propinsi Sumatera Barat tahun 2002-2008 dalam mata kuliah bimbingan dan konseling, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, perkembangan peserta didik dan psikologi umum. Pada tahun 2008 pindah tugas ke Sekolah.

Beberapa karya tulis diantaranya: Teori kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran, Pengembangan Sikap Keberagamaan Peserta Didik, Teacher strategies in online learning to increase students' interest in learning during COVID-19 pandemic, Kiprah Muhammadiyah Dalam Pembaharuan Pendidikan dan Sosial Keagamaan di Nusantara: Kajian Terhadap Pemikiran KH. Ahmad Dahlan, Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif al Qur'an dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak, Konseling Eklektik Islami untuk Mengubah Konsep Diri Waria. Manajemen BK di Sekolah (Buku, tahun 2011), Konseling dalam Kurikulum Sekolah (Buku, tahun 2012), dan sebagainya.

Pernikahan Dini Di Yaman Tradisi Di tengah Kemiskinan Melanda

Rifanto Ridwan

Pendahuluan

Pada tahun 2013 dunia dihebohkan dengan berita meninggalnya Nayla Maknun (bukan nama sebenarnya) asal Hardh – Barat Daya Yaman, NM yang baru berusia 8 tahun meninggal dunia setelah mengalami pendarahan hebat. Tragisnya lagi peristiwa ini terjadi pada malam pertama dari pernikahannya dengan lelaki yang usianya lima kali lebih tua dari usia dirinya. NM mengalami pendarahan hebat dan luka dalam sebagai akibat ketidak siapan fisik dan mental dalam mengarungi malam pertamanya.

Kisah tragis di atas bukan kisa tunggal, masih banyak kisah-kisah menyayat hati dari gadis belia yang dinikahkan secara “paksa” oleh keluarganya di Yaman. Negeri dengan seribu duka lara yang membawa rakyatnya memilih jalannya sendiri dalam menafsirkan kebahagiaan hidup. Setiap individu berusaha untuk mencapai kebahagiaannya dengan caranya sendiri, salah satunya dengan menikahkan anaknya yang masih sangat belia. Demi mengurangi beban kehidupan yang terasa begitu berat bagi kebanyakan keluarga.

Pernikahan dini bukan suatu yang aneh di Yaman, tetapi ia menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat awam. Pada tahun 2018 Human Right Watch melaporkan bahwa 75% gadis Yaman menikah sebelum usia 18 tahun dan 14% darinya menikah di bawah 15 tahun. Undang-Undang Perkawinan Yaman sendiri memberikan batasan usia pernikahan tidak boleh kurang dari 15 tahun baik lelaki maupun perempuan. Namun pada tahun 2009 atas usul partai (politik) Islah Undang-undang ini dicabut dan membolehkan pernikahan di semua usia, artinya mau menikah di usia berapa saja maka tidak dilarang oleh negara. Pencabutan undang-undang ini menimbulkan huru-hara dan banyak stigma negatif diarahkan ke negara Yaman.

Pengertian Pernikahan Usia Dini

Mayoritas berpendapat bahwa pernikahan mesti dilakukan setelah calon mempelai memasuki usia dewasa. Dewasa dalam maksud bahwa calon mempelai sudah mengerti dan memahami makna pernikahan dan konsekuensi yang dihadapi pasca akad pernikahan berlangsung. Namun malangnya tidak ada batasan usia baku yang bisa dibuat sandaran dalam menentukan kedewasaan seseorang. Dalam konteks keindonesiaan beberapa undang-undang berbeda pendapat dalam menentukan batas usia kedewasaan seseorang.

Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur batas usia kedewasaan seseorang. Undang-undang hanya mengatur tentang, izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun.²²¹ Undang-undang juga mengatur batas usia terendah seseorang untuk mendapat izin pernikahan ketika sudah berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun.²²² Ini bermakna bagi seseorang yang ingin menikah sedang usia mereka belum genap 21 tahun maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari orang-tuanya, dan batas minimal seseorang untuk mendapat izin dari kedua orang-tuanya adalah 19 bagi pria dan 16 bagi wanita. Undang-undang juga menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua,²²³ atau berada di bawah kekuasaan walinya.²²⁴

Menurut undang-undang perkawinan di atas menunjukkan bahwa usia diperbolehkan menikah bagi orang lelaki adalah sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi perempuan tidak boleh kurang dari 16 tahun mesti melalui persetujuan kedua orang-tuanya. Jadi seseorang yang menikah di bawah 19 tahun bagi lelaki dan 16 bagi perempuan dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini.

Setiap peraturan selalu mempunyai pengecualian-pengecualian, biasanya pengecualian diberikan ketika keadaan mendesak. Demikian juga keadaan Undang-undang Perkawinan yang masih memberi ruang bagi calon pengantin yang masih di bawah umur yang ditentukan untuk melaksanakan pernikahan dengan syarat meminta izin dari pengadilan agar membenarkan mereka melaksanakan pernikahan. Bagi pengantin yang belum cukup umur dan ingin mendapat izin dari pengadilan, walaupun mereka dapat melaksanakan pernikahan namun mereka tidak dapat keluar dari pernikahan dini. Artinya pernikahan mereka disebut sebagai pernikahan dini, walaupun mendapat izin dari pemerintah, yang demikian itu karena usia mereka yang masih dibawah standar yang digariskan oleh undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.²²⁵ Kemudian dalam pasal lain juga

²²¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat 2

²²² Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 2

²²³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 47 ayat 2

²²⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 50 ayat 2

²²⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

ditegaskan bahwa keluarga dan orang-tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia kanak-kanak.²²⁶

Undang-undang ini membatasi usia pernikahan bagi kanak-kanak adalah ketika sudah menginjak usia 18 tahun tanpa memandang jenis kelamin. Jadi sesiapa yang menikah di bawah usia tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan usia dini. Bahkan Undang-undang ini dengan tegas melarang pernikahan anak di bawah usia 18 tahun, menghimbau kepada orang-tua dan keluarga dekat anak agar tidak mengizinkan pernikahan anak yang belum genap mencapai usia 18 tahun.

Ada perbedaan antara Undang-Undang Pernikahan dan Undang-undang Perlindungan Anak dalam menggariskan batasan usia anak untuk diperbolehkan menikah. Undang-undang pernikahan memperbolehkan anak-anak untuk menikah bagi laki-laki berusia 19 tahun sedang bagi perempuan 16 tahun, walaupun belum dewasa. Sedang Undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa usia yang diperbolehkan menikah adalah 18 tahun. Undang-undang pernikahan membedakan batas usia lelaki dan perempuan dalam menikah: 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara Undang-undang Perlindungan Anak membatasi usia 18 tanpa memandang jenis kelamin. Undang-undang Pernikahan memberikan pengecualian kepada mereka yang dalam keadaan tertentu ingin melaksanakan pernikahan, dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pengadilan. Sementara undang-undang Perlindungan anak tidak memberikan.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh lelaki atau perempuan yang masih di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan, walaupun ia mendapat izin dari pihak pengadilan. Merujuk kepada undang-undang pernikahan di negara Yaman, yang mensyaratkan bagi mempelai sekurang-kurangnya berusia 15 tahun untuk menikah. maka pernikahan dini di Yaman adalah pernikahan yang terjadi bila salah satu mempelai atau kedua-duanya belum berusia 15 tahun. Walaupun pada akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan.

²²⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1 butir c

Faktor Pendorong

Human Right Watch pada tahun 2006 merilis bahwa 60 persen gadis di Yaman menikah pada usia di bawah 18 tahun, kemudian pada tahun 2018 menemukan fakta yang luar biasa bahwa lebih dua pertiga gadis Yaman menikah dibawah usia 18 tahun dengan 14% dari mereka berusia antara 12-14 tahun, bahkan ada yang berusia 8 tahun. HRW menerangkan ada beberapa faktor yang melarbelakangi kondisi ini, diantaranya : kemiskinan, budaya konservatif, sosial politik, perundang-undangan. Perinciannya adalah sebagai berikut :

Kemiskinan, dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, Yaman merupakan negara termiskin. Dengan pendapatan perkapita USD 900 (sekitar Rp. 12.260.000)²²⁷ pertahun tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara di sekitarnya seperti Qatar yang mempunyai pendapatan perkapita USD 129.726 (Rp. 1.816.164.000). al-Jazeera TV. Merilis bahwa 79% penduduk Yaman hidup dalam kemiskinan dan 65% diantaranya hidup dalam keadaan miskin sekali. Dengan catatan ini maka Yaman menjadi negara termiskin di dunia. Sebelumnya, PBB telah menyebut bahwa konflik Yaman merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Auke Lootsma pemerhati krisis Timur Tengah mengatakan bahwa peperangaan memicu krisis pembangunan yang sangat parah.

Kemiskinan yang melanda memporak-porandakan tatanan sosial di Yaman. Penduduk merasa kesulitan mencukupi kebutuhan pangan dan air bersih. Sehingga anak-anak tumbuh dengan kekurangan gizi. Unicef sebagaimana dikutip oleh kompas.com melaporkan bahwa sekitar 2,2 juta anak-anak di Yaman mengalami kelaparan, dan 80% penduduk Yaman memerlukan bantuan kemanusiaan.

Kemiskinan yang berlaku di Yaman sebagai akibat krisis politik global yang berkepanjangan, ditambah dengan adanya pandemi covid19 yang mengharus penduduk untuk membatasi pergerakan, sehingga roda perekonomian tidak berjalan sepertimana mestinya. Keadaan yang sudah sangat susah menjadi semakin susah karena adanya peperangan dan pendemi covid19 sekarang ini.

Sebagai contoh yang dialami oleh Mahmud Basha, seorang pegawai kebersihan di San'a Ibu Kota Yaman, yang harus menghidupi 16 anak dari dua isteri. Dengan gaji yang minim harus menanggung beban yang begitu berat. Maka solusinya adalah mengurangi beban tanggungan dengan cara menikahkan

²²⁷ Dengan asumsi nilai tukar kurs dollar Rp. 14.000

anak gadisnya yang masih belia. Hanya cara ini yang bisa sedikit meringankan beban pikulannya.

Apa yang dialami oleh Mahmud Basha bukan bukan derita yang ditanggung olehnya sendiri akan tetapi masih banyak lagi Mahmud-mahmud yang lain yang harus menanggung beban yang sama atau lebih, dan mengambil solusi permasalahan dengan jalan yang sama, yaitu menikahkan salah satu putri walaupun masih di usia belia. Sebuah kenyataan memilukan, namun harus dijalani dengan tabah, sehingga kita yang melihatnya pun merasakan beratnya beban yang harus mereka tanggung, namun tentu lebih berat penderitaan yang mereka alami tanpa ada sebarang solusi menuju kebaikan, yang ada justru solusi yang membuka langkah ke model kesengsaraan-kesengsaraan berikutnya. Sepertimana pepatah melayu : Berat beban yang ditanggung lagi berat pundak yang memikul.

Budaya Konservatif pratrialistik : Patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.²²⁸ Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam konteks keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda.

Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam ranah personal, budaya patriarki adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar "hak istimewa" yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan.²²⁹

Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, *conservare*, melestarikan; "menjaga, memelihara, mengamalkan". Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda. Jadi konservatif patriarkis adalah pemahaman dimana lelaki (suami) mempunyai kekuasaan penuh dalam urusan kekeluargaan dan kepemimpinan dalam konsep mengamalkan dan melestarikan

²²⁸ Bressler, Charles E. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice* 4th-ed. Pearson Education, Inc. 2007

²²⁹ Ade Irma Sakina, Desy Hasanah Siti A. (2017). "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia". *Share: Social Work Journal*. 7 (1): b. 72

tradisi lama walapun banyak konsep kekinian yang lebih sesuai dan lebih diterima publik.

Budaya ini sangat kental dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Yaman atau masyarakat pada umumnya. Dimana lelaki berkuasa penuh atas keberlangsungan perjalanan hidup sebuah keluarga. Khusus dalam pernikahan corak ini begitu kuat terlihat pada masyarakat Yaman, seorang ayah sangat menentukan masa depan anggota keluarganya. Pahaman ni akan sangat baik jika si ayah adalah orang bijak yang mempunyai pandangan luas dalam menahkodai keluarganya. Maka dalam Islam ada istilah wali yang mempunyai otoritas keabsahan suatu pernikahan. Suatu pernikahan akan sah jika mendapat izin dari wali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ²³⁰

Maksudnya : “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”

Dlam hadis lain lebih ditekankan perlunya izin dari wali, jika tidak medapat izin dari walinya maka nikahnya tidak sah. Untuk mempertegas kepentingan wali Rasulullah SAW menyebut sampai tiga kali. Sepertimana sabda Rasulullah SAW :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ²³¹

Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil tapi yang terjadi justeru sebaliknya, seorang wali yang sepatutnya melindungi orang-orang yang berada dalam jagaannya, malah menjerumuskan ke dalam lembah kesengsaraan. Keputusan menikahkan anaknya dengan harap dapat meringankan beban yang mesti ditanggung, tapi disisi lain malah memahat jalan kenistaan.

Peperangan : Salah satu faktor penyumbang kemiskinan di Yaman adalah perang saudara yang berkepanjangan. Penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan menjadi negara Republik Yaman pada tahun 1990 adalah awal dari konflik dan perang saudara yang berlangsung hingga kini. Yaman utara dahulunya di kuasai oleh Syiah Zaidiyyah dengan sekte dominan al-Haothiyyah

²³⁰ Muhammad Nasir al-Albany, *Irwa' al-Ghalil*, no. Hadis 1858

²³¹ Abu Daud al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Kitab al-Nikah, Bab al-wali fi al-nikah, no.hadis 2083

pimpinan Husein Badruddin al-Haothy merasa disisihkan dan kebijakan pemerintah Republik Yaman yang resmi dalam segala lini kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya, walaupun mereka adalah mayoritas di Yaman Utara. Akan tetapi jika di banding Yaman keseluruhan jumlah mereka hanya mencapai 30%. Berangkat dari keadaan ini Husein bin Badruddin melakukan pemberontakan. Husein Badruddin tewas dalam sebuah operasi militer yang dilakukan oleh Pemerintah Yaman, keadaan ini memicu pengikut al-Haothy untuk menuntut bela kematian Husein Badruddin. Gerakan ini didukung oleh Iran. Pemberontakan ini semakin lama semakin meluas, bahkan bisa menguasai San'a sebagai Ibu Kota Yaman. Melihat keadaan ini Saudi dan beberapa sekutunya seperti Uni Emirat Arab (UEA) berinisiatif membantu Yaman memadamkan api pemberontakan. Dengan didukung oleh Amerika mereka melakukan operasi militer membasmi pemberontakan Haothi.

Apapun alasannya peperangan adalah tetap peperangan, walaupun tujuannya adalah untuk memerangi para pemberontak, tapi masyarakat sipil menjadi korban. Ketika terjadi peperangan maka pergerakan masyarakat sangat terbatas, roda kehidupan tidak berjalan, pasar sepi, sekolah-sekolah tutup, situasi mencekam. Jika keadaan berterusan maka yang menjadi korban adalah masyarakat.

Kanak-kanak yang sepatutnya pergi sekolah hanya bisa duduk dan bermain-main di sekitar rumah, orang-tua khawatir akan keselamatan anak-anaknya. Karena minimnya kegiatan bagi anak-anak, maka sebagian mereka berfikir untuk menikahkan putri-putri mereka. Alasannya sangat klasik, agar dapat membantu meringankan beban keluarga. Dalam keadaan serba susah, terhimpit beban ekonomi yang demikian berat, maka jalan satu-satunya yang bisa ditempuh adalah dengan mengurangi beban yang mereka pikul, yaitu menikahkan anak-anak gadis mereka. karena dengan menikah maka beban keluarga agak sedikit berkurang, anak-anak yang mereka nikahkan akan menjadi tanggungan suaminya.

Perundan-undangan : Undang-undang berperan penting dalam mengatur tatanan masyarakat dalam suatu negara. Jika undang-undang yang ditetapkan merangkumi keadilan dan kemaslahatan bersama, maka hasilnya akan nampak dalam kehidupan masyarakat yang tertata rapi, orang-orang tunduk terhadap aturan karena mereka yakin bahwa aturan yang dibuat akan membawa kemaslahatan bersama. Keadaan ini sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan :

Kebijakan Seorang pemimpin terhadap kepentingan rakyat harus berdasarkan maslahat. Al-Suyuti mengatakan : Kedudukan seorang pemimpin adalah seperti kedudukan wali bagi anak yatim, memastikan semua keperluannya tercukupi dan kehidupannya berjalan dengan baik.

Dari kaedah fiqh di atas dapat dipahami bahwa fungsi undang-undang adalah untuk mengatur kehidupan rakyat suatu negara menuju kepada yang lebih baik dan teratur. Jika suatu undang-undang digubal untuk menyengsarakan rakyat maka bertentangan dengan tujuan daripada pembuatan undang-undang itu sendiri. Kehidupan masyarakat akan semakin kacau dan sengsara. Seperti yang berlaku di Yaman, khususnya dalam hal pernikahan. Undang-undang yang berlaku tidak menuntun masyarakat menuju ke tatanan yang lebih teratur dan nyaman, namun sebaliknya malah mencipta keperitan. Sebelum tahun 1999 Yaman membatasi pernikahan bagi warganya yang berusia 15 tahun. Dengan artikata bahwa usia minimum diperbolehkan menikah adalah 15 tahun. Bagi warga negara yang ingin menikah hendaklah sudah mencapai usia minimal 15 tahun.²³³

Sayangnya pada tahun 1999 peraturan ini dibatalkan oleh Parlemen, dengan demikian tidak lagi ada batasan usia dalam menikah, siapapun dapat menikah tanpa harus menunggu sampai usia 15 tahun. Pada dasarnya pembatalan peraturan tersebut dimaksudkan agar muda-mudi tidak mudah terjerumus pada perzinaan, tapi pada kenyataannya dimanfaatkan oleh segelintir individu untuk memenuhi keinginan peribadi menikah dengan gadis-gadis belia yang berusia di bawah 15 tahun Dua dekade selanjutnya menjadi masa di mana baik laki-laki maupun perempuan Yaman bisa menikah di segala usia—secara teori. Kenyataannya, ketiadaan aturan hanya dimanfaatkan oleh pria-pria usia 25 ke atas untuk mencari pasangan usia di bawah 15 tahun.

²³² Abdul Rahman bin Abu Bakar Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadha'ir fi Qawa'id Fiqhiyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010)

²³³ Ahmad Muawwal Hasan, *Pernikahan Anak di Yaman : Atas nama Tradisi, Kemiskinan dan Perang*,

Profile Korban Pernikahan Dini Di Yaman

Data yang dilansir oleh Human Right Watch menunjukkan bahwa 75% wanita Yaman menikah di Bawah usia 18 tahun bahkan 14% daripadanya menikah di usia 12-14 tahun. Diantara mereka banyak yang merajut kebahagiaan dalam rumah tangganya, namun tidak sedikit yang merasakan betapa merananya kehidupan mereka setelah pernikahan tersebut. Berikut adalah profile sebagian dari mereka : Berikut adalah sebagian kanak-kanak yang terpaksa menikah di usia dini kemudian. Khadija Al-Salamiyya. Saat ini berprofesi sebagai Pembuat Film dokumenter dan menjadikan kamera sebagai alat perjuangan dalam untuk menyerukan kebenaran dalam melawan masyarakat konservatif yang meminggirkan hak asasi manusia dan kebebasan pribadi perempuan. Bertempat tinggal di Paris-Perancis, memilih tinggal di Paris demi merealisasikan perjuangan dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan Yaman, sebab kalau ia tinggal di Yaman maka tidak mudah baginya untuk menyuarakan perjuangannya ini. Bermula pada suatu peristiwa ketika berusia dua tahun Khadija Al-Salamiyya menyaksikan ibunya dipukuli oleh ayahnya secara brutal sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Kebencian itu terpendam hingga usia 11 tahun, saat si ayah menikahnya dengan seorang pria asing. Khadija memberontak. Ia berhasil menceraikan suaminya lewat ancaman bunuh diri. Pada usia 16 tahun ia pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan. Khadija juga mulai merekam penderitaan gadis-gadis Yaman lain yang dipaksa menikah di usia dini untuk diolah menjadi film dokumenter. Saat ini Khadija sudah berusia 50 tahun, berjuang terus menyerukan kebebasan bagi perempuan Yaman.

Nayla Maknun (bukan nama sebenarnya) asal Hardh – Barat Daya Yaman, NM yang baru berusia 8 tahun, dinikahkan dengan seorang pria berusia 40 tahun. Pada malam pertama NM meninggal dunia karena dipaksa berhubungan intim. Alat kelaminnya mengalami luka dalam dan pendarahan luar biasa. Malam itu NM dilarikan ke klinik terdekat, namun jiwanya tidak tertolong. NM meninggal pada malam pertama dari perkawinannya. Perkawinan semestinya membawa kebahagiaan, akan tetapi keadaan ini tidak dialami oleh NM, justru petaka yang didapat, bahkan sampai nyawanya melayang pada malam pertamanya.

Nada al-Ahdal, berusia 11 tahun akan dinikahkan oleh orang-tuanya dengan seseorang yang bekerja di Saudi. Nada melarikan diri dari rumahnya, dalam pelariannya ia dibantu oleh pamannya. Dari kecil Nada memang diasuh oleh pamannya, dan pamannya tidak rela Nada dinikahkan diusia yang masih sangat belia. Ketika melarikan diri, Nada sempat membuat rekaman video yang

kemudian mengunggahnya di Youtube. Dalam video tersebut Nada meluahkan perasaannya, bahwa ia tidak mau menikah (sekarang), ia masih ingin bersekolah mengejar mimpinya, ia mengancam akan bunuh diri kalau dinikahkan. Orang-tuanya marah dan meminta Nada untuk dikembalikan ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, orang-tuanya kembali memaksa untuk menikahkannya. Akhirnya Nada kabur kembali. Saat ditemukan kembali oleh pamannya, pamaannya membuat laporan ke Kantor HAM pada distrik terdekat di kotanya.

Nujood Ali : Perempuan kelahiran 1998, ayahnya seorang pekerja kebersihan di San'a yang memiliki 16 anak dari dua isteri. Karena kemiskinan yang melanda, pada usia 10 tahun Nujood dinikahkan dengan seorang lelaki pilihan ayahnya dengan harapan dapat meringankan beban keluarga dan melindunginya dari bahaya zina. Kebetulan salah satu saudaranya ada yang menjadi korban pemerkosaan. Ayahnya menikahkannya supaya tidak menjadi korban berikutnya. Nujood sering babak belur karena disiksa oleh mertuanya dan malam-malamnya dia lalui dengan melarikan diri dari kamar ke kamar untuk menghindari suaminya. Hal itu membuatnya memutuskan untuk meminta bantuan ke keluarganya, namun ibunya tetap berpikir bahwa pernikahan adalah hal terbaik untuk Nujood. Bibinya menyarankannya untuk pergi dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Disini Nujood memulai dunia barunya, ia melakukan sesuatu yang sangat tabu untuk dilakukan oleh perempuan Yaman pada waktu itu. Dengan dibantu oleh seorang pengacara Shada Nasser, akhirnya perceraian terwujud. Tindakannya mendapat dukungan luas dari dunia internasional, karena keberaniannya pada bulan november 2008 Nujood dianugerahi penghargaan "*Woman of The Year*" oleh majalah Amerika Serikat Glamour. Bahkan wanita tenar seperti Hillary Clinton dan Condoleezza Rice ikut memuji atas keberaniannya.

Islam dan Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak termasuk dalam permasalahan yang menjadi isu dikalangan para ulama, tidak banyak ulama yang membincangkannya dalam tajuk khusus pembahasan mereka. Namun demikian para ulama menyinggung pernikahan kanak-kanak dalam sub-bab pernikahan. Permasalahan yang dibicarakan bukan masalah usia yang masih sangat muda atau sah tidaknya pernikahan yang mereka laksanakan, tapi pembahasan berkisar hukum-hukum terkait pernikahan dan hak-hak mereka setelah akad berlangsung. Para ulama juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah

pernikahan yang berlangsung antara dua kanak-kanak atau salah satunya belum baligh.

Al-Syarakhsyi mengatakan bahwa pernikahan antara dua kanak-kanak yang belum baligh adalah tidak sah, yang demikian itu karena tujuan dari pernikahan adalah untuk menuntaskan hajat biologis dan juga mendapatkan keturunan, sementara keduanya tidak dapat dicapai oleh mereka yang masih kanak-kanak yang belum baligh.²³⁴ Namun jika pihak lelaki sudah baligh sedang pihak perempuan masih kanak-kanak para ulama bersepakat bahwa pernikahan mereka sah. Pendapat mereka berdasar kepada perkara-perkara berikut :

Islam tidak membatasi usia pernikahan, sehingga berapapun usia calon mempelai dianggap sah. yang demikian itu sesuai dengan kaidah : asas dari transaksi muamalah adalah mubah, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Firman Allah : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid".²³⁵ Ayat di atas menerangkan bahwa masa iddah bagi perempuan yang belum haid adalah 3bulan, dapat difahami secara tidak langsung bahwa Islam membolehkan pernikahan perempuan yang belum baligh dan usia sekali lagi bukan halangan bagi seorang perempuan untuk melaksanakan pernikahannya. Islam membincanakan masalah *iddah* bagi mereka yang belum haid (belum baligh), berarti Islam membolehkan pernikahan kanak-kanak yang belum baligh dan tidak membatasi umur tertentu bagi yang mau menikah.

Islam dibangun atas dasar kemaslahatan, jika pernikahan dapat membuka pintu kemaslahatan antara kedua mempelai maka pernikahan mesti segera dilaksanakan. Karena menunda-nunda kebaikan adalah adalah suatu kezaliman. Pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah yang masih sangat muda sekali, pernikahan berlangsung tanpa ada sebarang pertentangan dari pihak manapun, baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari pihak-pihak musuh Islam. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Arab ketika itu. Pada intinya Islam tidak membatasi usia pernikahan pada umatnya, tapi semuanya dikembalikan kepada kemaslahatan para pelakunya. Sekiranya pernikahan tersebut membawa kebaikan bagi kanak-kanak

²³⁴ Al-Syarakhsyi Muhammad bin Ahmad , Al-Mabsut, Bab Nikah al-shaghir wa al-Shaghirah, jilid 5 hlm. 491.

²³⁵ QS al-Thalaq, 65:4)

tersebut maka diperbolehkan, namun sekiranya pernikahan itu akan membawa kemudharatan maka tentu tidak bisa dibenarkan oleh agama.

Kesimpulan

Dari beberapa fakta yang dipaparkan di atas, ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi, diantaranya : Pada dasarnya Islam tidak membatasi usia pernikahan seseorang, tetapi menempatkan baligh sebagai syarat pernikahan, karena tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, sedang yang belum baligh belum bisa menurunkan keturunan. Fungsi wali dalam hal pernikahan adalah sebagai pelindung, ia bisa melihat kemaslahatan dari anak-anak atau orang yang dibawah kuasanya, sekiranya pernikahan akan membuat sengsara anaknya maka ia bisa mencegah dengan tidak memberi izin pernikahan tersebut. Di sisi ini kesadaran wali harus tingkatkan. Perlu perubahan pada kehidupan sosial ekonomi dan politik pada masyarakat Yaman, penggubalan undangundang hendaklah merujuk kepada kemaslahatan masyarakat luas, bukan berdasarkan pada kepentingan parsial yang akhirnya akan merugikan masyarakat awam.

Daftar Pustaka

- Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A. (2017). "*Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*". Share: Social Work Journal. 7 (1): h. 72
- Ahmad Muawwal Hasan, Pernikahan Anak di Yaman : *Atas nama Tradisi, Kemiskinan dan Perang*, 2018. <https://tirto.id/pernikahan-anak-di-yaman-atas-nama-tradisi-kemiskinan-dan-perang-eder>
- Al-Albany, Muhammad Nasir, *Irwa' al-Ghalil*, (Riyadh : Dar al-Ilmi, 2006)
- Bressler, Charles E. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice* 4th-ed. Pearson Education, Inc. 2007
- Al-Sajastani, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2010)
- Al-Suyuti, Abdul Rahman bin Abu Bakar Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nadha'ir fi Qawaid Fiqhiyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010)
- Al-Syarakhsyi Muhammad bin Ahmad , *Al-Mabsut*, (Cairo : Dar al-nahdhah, 2002)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Biografi Penulis



Rifanto Bin Ridwan, Grobogan, 27 Desember 1974 Riwayat Pendidikan : Pendidikan Menengah : Pondok Modern Gontor. S1 : al-Jami'ah al-Islamiyyah bi al-Madinah Madinah – KSA. S2 : Universiti Kebangsaan Malaysi – Bangi – Malaysia S3 : Universiti Kebangsaan Malaysia– Bangi – Malaysia

PARADIGMA KAJIAN ISLAM

(Studi Analisis Pendekatan Kajian Hadis Pada Masa Modern)

Hasep Saputra

hasepsaputra01@gmail.com

Paradigma Kajian Hadis

Pada dasarnya, hampir semua kajian keislaman sentral yang ada saat ini, embrionya telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Hanya saja bentuknya masih sangat sederhana dan tidak tersusun secara sistematis seperti masa sekarang ini. Begitu pula halnya dengan hadis sebagai suatu cabang ilmu. Dalam sudut pandang ini secara praktis Ilmu Hadis sesungguhnya sudah dikenal semenjak Nabi masih hidup. Tentu saja cakupan kajiannya masih sangat terbatas, karena semua kesulitan yang dihadapi para sahabat dengan mudah dapat berpulang langsung kepada Nabi untuk dilakukan klarifikasinya.

Kajian terhadap hadis-hadis Nabi, tidak hanya terbatas pada kajian ilmu *riwayah*, yakni ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis atau ilmu *dirayah*, yakni berupa kaedah-kaedah yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah hadis dapat diterima sebagai riwayat yang bersumber dari Nabi (*maqbul*) atau tidak (*mardud*).²³⁶ Tetapi secara lebih luas meliputi berbagai aspek-aspek kajian lainnya, seperti: aspek kesejarahan, aspek pemahaman, aspek literatur-literatur, para tokoh, dan kajian Barat terhadap hadis.²³⁷

Setelah berlalu beberapa generasi, sebagian hadis-hadis Nabi mulai tampak sulit dipahami (*mushkil*), baik karena kata-kata yang ada dalam redaksi hadis itu sulit dipahami karena asing atau juga karena sulit dipahami ketika berada dalam konteks redaksi tertentu (*gharib*)²³⁸ maupun karena dipandang

²³⁶ Meskipun demikian, kajian ilmu *dirayah* dan *riwayah* hadis lebih populer dibanding dengan aspek-aspek kajian hadis lainnya. Ini terlihat dari banyaknya karya-karya tentang ilmu *dirayah* dan *riwayah* hadis yang muncul sejak awal pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis itu sendiri. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth: Ulumuhu wa Muṣṭalabuhu* (Beirut: Dār al-Fikri, 1989), 7-8.

²³⁷ Hal ini wajar, karena kajian ilmu *dirayah* dan *riwayah* hadis sangat mendesak dan mendasar dalam menyiapkan hadis-hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai sumber ajaran agama. Di samping itu, ilmu *dirayah* dan *riwayah* hadis tumbuh dan berkembang secara simultan dengan periwayatan hadis itu sendiri. Dan tiba pada masa kodifikasi hadis, ilmu *dirayah* dan *riwayah* semakin menempati posisi yang sangat penting bagi para pengkodifikasi. Muhammad Abu Shuhbah, *Kitab Ṣaḥīḥ Yang Enam*, Terjemahan Maulana Hasanuddin, Judul Asli: *Fī Ribabī al-Sunnah al-Kutub al-Ṣiḥāḥ al-Sittah* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), 47-48.

²³⁸ *Gharib* menurut bahasa adalah orang yang menyendiri, mengasingkan diri, atau orang yang jauh dari sanak keluarganya. Menurut istilah *muhaddithin*, yang dimaksud dengan

bertentangan satu sama lainnya (*mukhtalif*).²³⁹ Pada abad modern saat ini, hadis-hadis tidak hanya dipandang bertentangan satu sama lainnya, tetapi juga dipandang bertentangan dengan logika dan pengetahuan modern.

Hadis-hadis ini dan juga beberapa hadis lain, adalah kontekstual dan komunikatif pada zamannya. Tetapi setelah begitu jauh berlalu jarak antara masa Nabi dengan dunia modern sekarang ini membuat sebagian hadis-hadis tersebut terasa tidak lagi komunikatif dengan realitas zaman kekinian. Hal ini wajar karena hadis lebih banyak sebagai penafsiran kontekstual dan situasional atas ayat-ayat al-Qur'an dalam merespons persoalan dan pertanyaan para sahabat Nabi. Dengan demikian ia merupakan interpretasi Nabi SAW yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para sahabat dalam mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka menguatkan kembali *Fiqh al-Hadith* dengan berbagai metode dan pendekatan untuk memahami kembali hadis-hadis Nabi dalam dunia modern dirasa cukup mendesak. Pemahaman kembali terhadap hadis-hadis Nabi ini dimaksudkan dalam rangka mempertahankan dan membela hadis-hadis selama hadis-hadis tersebut secara ilmu hadis dapat dikatakan dapat diterima validitasnya sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah (*maqbūl*).²⁴⁰ Pemahaman juga bertujuan tidak hanya sebatas mengkomunikasikan dengan realitas zaman, tetapi juga mengembangkan makna-makna sejauh yang dapat dijangkau oleh redaksi hadis.

Karena itu, memanfaatkan berbagai teori dari berbagai disiplin ilmu merupakan langkah positif dan maju dalam memahami kembali hadis-hadis Nabi dalam dunia modern. Perkembangan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah dan filsafat sangat membantu dalam memahami kembali hadis-hadis Nabi ini.

Akan tetapi, selama abad ke-20, kedudukan sunah terancam dengan berbagai cara, ketika para pemikir Muslim mencari basis kuat bagi kebangkitan

hadis *gharib* adalah hadis yang rawinya menyendiri dengannya baik menyendiri karena jauh dari seorang imam yang telah disepakati hadisnya maupun menyendiri karena jauh dari rawi lain, yang bukan imam sekalipun. Lihat Nūruddīn 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fi Ulūm al-Hadīth*, terj. Mujiyo (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 186.

²³⁹ Hadis *Mukhtalif* adalah hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan *naṣṣ shara'* yang lain. Nūruddīn 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fi Ulūm al-Hadīth*, terj. Mujiyo (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 114.

²⁴⁰ *Al-Qalb* menurut bahasa berarti memalingkan sesuatu dari jalurnya. Menurut istilah, hadis *maqlub* adalah hadis yang rawinya menggantikan suatu bagian darinya dengan yang lain, baik dalam sanad atau matan, dan bila karena lupa atau sengaja. Nūruddīn 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fi Ulūm al-Hadīth*, terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 237.

kembali Islam. Masalah sunah telah menjadi sisi paling penting dalam krisis Muslim modern seperti krisis otoritas keagamaan, yang menduduki tempat sentral di dalam wacana keagamaan muslim.

Namun semua ini berubah pada masa modern, ketika tekanan untuk mereformasi, mereformulasi, dan mengenalkan kembali hukum Islam muncul dan membuat studi hadis relevan kembali. Setelah pertengahan abad kesembilan belas, pada prakteknya mazhab-mazhab klasik digantikan oleh peraturan hukum sekuler yang diilhami Barat, dan kebanyakan masyarakat Muslim ditantang oleh gerakan seperti hadis *salafiyah*. Akibat tumbanganya dominasi mazhab-mazhab hukum klasik, terbukalah ruang bagi pengkajian kembali sumber-sumber hukum Islam dan kedudukan sunnah. Sejak terbebasnya masyarakat Muslim dari dominasi kolonial setelah tahun 1940-an, gerakan untuk memperkenalkan kembali hukum Islam dalam bentuk tertentu telah memunculkan urgensi praktis untuk mempertanyakan sumber-sumber syari'ah, dan metode untuk menghidupkan kembali syari'ah.²⁴¹

Sebagian gagasan Islam klasik tentang otoritas keagamaan dalam berbagai bidang telah mulai mendapat tantangan sejak pertengahan abad ke-19. Tantangan ini langsung dan terutama dihadapkan pada lembaga-lembaga dan etika-etika sosial Islam. Jelas sekali bahwa tantangan ini bukan berangkat dari anggapan bahwa lembaga-lembaga dan etika sosial Islam tersebut salah atau tidak rasionalisme,²⁴² tetapi adalah kenyataan bahwa sistem sosial yang ada perlu di-*modifisir* dan disesuaikan. Pada masa lalu sistem sosial ini betul-betul rasional

²⁴¹ Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25.

²⁴² Rasionalisme ialah faham yang mengedepankan logika. Istilah ini dipakai untuk beberapa pengertian: (a). Faham yang berpandangan bahwa segala yang ada mempunyai sebab keberadaannya. Dalam arti, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini melainkan pasti ada alasan penciptaannya secara rasional. (b). Faham yang berpandangan bahwa pengetahuan berasal dari prinsip-prinsip logika. Mirip seperti metode eksperimen yang mengatakan bahwa semua yang ada di benak atau pikiran, adalah lahir dari perasaan dan eksperimen. (c). Faham yang mengatakan bahwa keberadaan akal merupakan syarat untuk melakukan eksperimen. (d). Kepercayaan pada akal dan kemampuannya untuk menemukan kebenaran. Sebabnya menurut kaum rasionalis –bahwa undang-undang logika bersesuaian dengan undang-undang yang menghukum masalah-masalah eksternal. Dan bahwa segala yang ada adalah masuk akal dan segala yang masuk akal ada. (e). Rasionalisme menurut sebagian 'ulama agama ialah faham yang mengatakan bahwa kepercayaan imani sesuai dengan hukum-hukum akal. Secara umum, rasionalisme berpandangan bahwa semua yang ada harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip logika, seperti mazhab Descartes. Lihat Jamil Syaliba, *Al-Mu'jam al-Falsafi* (Beirut: Dār al Kitāb al Lubnāni, 1973), cet. I, Juz II, 90-91.

dan bekerja sempurna. Persoalannya adalah bahwa kaum muslim harus menghadapi perkembangan situasi.²⁴³

Kajian sarjana muslim modern cenderung kepada pengkajian persoalan kritik teks yang pada akhirnya akan meragukan beberapa catatan tentang hadis. Di antara mereka adalah M. Rashid Riḍa, Maḥmūd Abū Rayyah, Aḥmad Amīn, dan Ismā'īl Aḥmad Aḍam.²⁴⁴

Para pemikir Muslim menghadapi banyak tantangan terhadap gagasan Islam klasik tentang otoritas keagamaan. Pergolakan di dunia Muslim telah mendorong meluasnya pengujian kembali sumber-sumber klasik hukum Islam karena orang Muslim telah berjuang untuk memelihara, menyesuaikan, atau mendefinisikan kembali norma-norma sosial dan hukum dalam menghadapi kondisi yang berubah.²⁴⁵

Isu sentral dalam perjuangan yang terus berlangsung ini adalah masalah hakekat, status, dan otoritas sunnah (contoh-contoh normatif Nabi Muhammad SAW.). karena status Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, perkataan dan perbuatannya diterima oleh sebagian besar Muslim sebagai sebuah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Oleh karena itu, *imitatio Muhammadi* menjadi dasar bagi hukum Islam.²⁴⁶

Itulah penjelasan pembahasannya yang dibahas oleh banyak kaum orientalis dan beberapa sarjana dan kritikus Muslim modern yang menurutnya *muhādithīn* masa awal telah memberikan tekanan terhadap isnad dan saat melakukan kritik hadis, dan bahwa mereka telah mengabaikan kritik atas muatan hadis itu sendiri, tidak dapat diterima dan keliru, dan sesungguhnya para *muhādithīn* sudah melakukan pengkritikan baik dari segi sanad maupun matannya.

²⁴³ Tantangan terhadap sebagian gagasan Islam klasik tentu saja menimbulkan pergolakan pemikiran yang bermuara pada pengujian kembali sumber-sumber klasik. Sunnah Nabi—praktek normatif yang dicontohkan oleh Rasulullah—merupakan bagian yang paling penting dari pengujian ini, sebab ia merupakan simbol kewenangan Nabi saw sebagai sebuah sumber kewenangan keagamaan setelah al-Qur'an, dan merupakan sumber kesinambungan dengan masa lalu. Karenanya, diskusi-diskusi tentang sunah dari sarjana-sarjana muslim tak dapat lagi terhindarkan dan akhirnya meluas. Tidak hanya oleh pakar-pakar di bidangnya (*muhādithīn*) tapi juga melibatkan sarjana-sarjana di bidang lain semisal teolog dan filosof. Lihat Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), 313.

²⁴⁴ Membahas kritik matan, tidak dapat menerima hadis jika hadis-hadis tersebut tidak dapat diterima secara rasional maupun teologis atau jika hadis-hadis itu bertentangan dengan hadis.

²⁴⁵ Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern* (Bandung: Mizan, 1996), 15.

²⁴⁶ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Colorado: Westview Press, Inc., 1994), 45.

Dalam pemahaman kontekstual hadis di Indonesia, mengusung term dan konsep sosial dan politik. Untuk memahami sebuah teks pada masa kontemporer, khususnya di Indonesia tidak hanya bisa digunakan pendekatan *hermeneutik* saja, akan tetapi juga menggunakan beberapa pendekatan yang memungkinkan untuk pemahaman teks sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.²⁴⁷

Hadis Nabi Muhammad SAW bukanlah suatu perkembangan yang telat, akan tetapi hadis berkembang dengan skala yang besar sehingga hadis memerlukan banyak sekali pendekatan untuk dipahami sehingga tercapai pemahaman yang diinginkan sesuai dengan masa modern pada saat sekarang ini.²⁴⁸

Lahirnya syarah kontemporer juga bisa dikarenakan adanya kemunduran dalam keinginan memahami suatu hadis sesuai kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap hadis terus berkembang sampai kemudian bermunculan beberapa metode, misalkan metode hermeneutik, yang di asumsikan juga turut mewarnai beragamnya metode pensyarah, dipandang cukup memberikan solusi pembacaan yang cukup sesuai dengan problem masyarakat.

Kehadiran metode *hermeneutik* merupakan angin segar dalam pensyarah hadis. Masalah yang berkembang sekarang terlalu banyak dan membuat untuk menyegerakan penjabaran dan pembahasan dengan landasan yang ada. Metode *hermeneutik* dan dalam bingkai tematik agaknya mendesak dilakukan saat itu, seperti merespon kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Kehadiran *hermeneutik* juga tidak terlepas dari pertumbuhan dan kemajuan pemikiran tentang bahasa dalam wacana filsafat dan keilmuan lain.²⁴⁹

Pengkaji hadis di Indonesia juga berusaha untuk merekonstruksi metode pemahaman hadis sehingga hadis Nabi Muhammad SAW dapat diterima pada masa sekarang khususnya oleh masyarakat Indonesia. Di antara pengkaji hadis

²⁴⁷ Mark R. Woodward, *Textual Exegesis as Social Commentary: Religious, Social, and Political Meaning of Indonesian Translation of Arabic Hadith Texts*, The Journal of Asian Studies, Vol.52, No.3 (1993), 566. Association for Asian Studies. <http://www.jstor.org/stable/2058854>. (Accessed 27/01/2014).

²⁴⁸ Ahmad Hasan, *The Sunnah-its Early Concept and Development*, Journal Islamic Studies, Vol.7. No. 1, 50. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad.<http://www.jstor.org/stable/20832904>. (Accessed 27/01/2014).

²⁴⁹ Selama riwayat-riwayat ini membutuhkan penelitian dan kajian mendalam untuk mengetahui mana yang dapat diterima dan mana yang ditolak, maka mutlak diperlukan adanya kaidah-kaidah dan patokan sebagai acuan melakukan studi kritik. Berkenaan dengan hal ini, sebenarnya kaum muslimin telah memiliki metodologi yang komprehensif, sebuah teori kritik yang tiada duanya. Lihat Salahuddin ibn Ahmad al-Adabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 4.

yang mencoba merekonstruksi metode pemahaman hadis, yaitu: dari tamatan Timur Tengah yaitu Said Agil al-Munawar, Ali Mustafa Ya'qub, Daud Rasyid Sitorus dan Lutfi Fathullah; dari tamatan Barat yaitu, Kamarudin Amin; dari Indonesia yaitu Muhammad Syuhudi Ismail, Daniel Djuned, dan Buchari M.

Pengkaji hadis di Indonesia tersebut,²⁵⁰ menurut asumsi penulis mereka lebih kepada pengembangan terhadap pemahaman hadis atau studi hadis itu sendiri, yang sesuai kenyataan belum banyak ditulis. Hal ini senada dengan pernyataan R. Michael Feener dalam karyanya menjelaskan bahwa selama dekade pertengahan abad kedua puluh, sarjana Muslim Indonesia berpartisipasi dalam gerakan untuk menciptakan pembaharuan. Begitu juga perkembangan dalam ilmu hadis. Perkembangan belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi dalam konteks modernitas dimana Indonesia sedang menghadapi tantangan oleh pemikiran reformis Islam.²⁵¹

Muhammad Dede Rodliyana dalam karyanya *Pergeseran Pemikiran 'Ulūm al-Ḥadīth dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran 'Ulūm al-Ḥadīth di Indonesia*, mengatakan bahwa dalam catatan sejarah perkembangannya, para ahli hadis, baik sejak masa sahabat ketika dimulainya perkembangan periwayatan terhadap hadis maupun di masa sekarang ini, telah menghasilkan pemikiran-pemikiran baru seputar ilmu hadis.²⁵²

Kitab-kitab hadis yang telah ditulis hingga sekarang merupakan hasil pemahaman hadis secara normatif, ditulis oleh para ulama ahli hadis guna menyelesaikan problem pemahaman yang dihadapi oleh sebagian umat Islam pada zamannya. Terlepas dari segala kekurangannya, kitab-kitab tersebut merupakan karya ilmiah yang secara metodologis telah berkembang memenuhi tuntutan zamannya.²⁵³ Wajar apabila para ulama kontemporer merasa perlu mengembangkan lagi metodologi pemahaman hadis guna menjawab berbagai tuntutan kontemporer.

²⁵⁰ Alasan kenapa mereka disebut dengan pengkaji hadis karena mereka banyak membuat karya tulis mengenai hadis, dan mereka sangat berkompeten dalam hadis sesuai dengan pengakuan dari akademik dan masyarakat.

²⁵¹ R. Michael Feener, Indonesian Movements for the Creation of a 'National Madhhab' *Journal of Islamic Law and Society*, Vol. 9, No. 1 (2002), 83, <http://www.jstor.org/stable/3399202>. (Accessed: March 16, 2012).

²⁵² Muhammad Dede Rodliyana, "Pergeseran Pemikiran 'Ulūm al-Ḥadīth dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran 'Ulūm al-Ḥadīth di Indonesia" (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 2.

²⁵³ Mujiyo, "Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam: Genealogi dan Metodologi" (Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 41.

Setelah Rasulullah wafat, upaya pemahaman hadis sangat diperlukan dan proses pemahaman tersebut berkembang terus hingga sekarang. Pemahaman hadis, seperti dalam syarah-syarah terhadap kitab hadis yang sembilan, khususnya, banyak yang terpaku kepada gramatika bahasa dan kontekstual-historis. Belakangan ada yang memahaminya secara filosofis.²⁵⁴ Contohnya dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW melarang wanita sebagai pemimpin.²⁵⁵ Banyak ulama secara teoritis, melarang perempuan menjadi pemimpin berdasarkan hadis di atas larangan ini, menurut penulis, berasal dari metode pemahaman yang bersifat tekstual, dengan tidak melihat substansi variable kontekstual-historis.²⁵⁶

Bila dilihat realitas pada masa Rasulullah sampai akhir parohan kedua abad ke-20, apalagi dengan adanya prinsip egalitarian dimana perempuan menuntut kemitrasejajaran dengan laki-laki maka pesan hadis tersebut sulit dan bahkan tidak bisa direalisasikan. Implikasinya Islam akan ditinggalkan karena tidak mampu memberi jawaban terhadap problema zaman. Dengan demikian, prinsip Islam sebagai *rahmat li al-ālamīn* akan diragukan apabila pemahaman terhadap hadis tersebut tidak baik dan benar.²⁵⁷

Dari segi metodologi telah terjadi pergeseran yang cukup signifikan di antara para ahli hadis. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi lahirnya pemikiran terhadap karya yang ada. Perkembangan penyusunan kitab '*Ulūm al-Ḥadīth*' memiliki signifikansi perbedaan yang cukup kuat. Artinya, dalam setiap periode memiliki karakteristik tertentu yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang tertentu pula. Sebelum periode Ibn Ṣālah, manhaj penyusunan

²⁵⁴ Buchari M, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 8-9.

²⁵⁵ Dalam riwayatnya yang lengkap dijelaskan bahwa:

Usman ibn al-Haisam menyampaikan (riwayat) kepada kami, bahwa 'Auf menyampaikan (riwayat) kepada kami, (riwayat itu) dari al-Ḥasan, (riwayat itu) dari Abū Bakrah, (dia) berkata: "Allah memberikan kepadaku manfaat dengan ungkapan yang saya dengar sebelumnya dari Rasulullah SAW. Pada perang Jamal ketika saya hampir bertemu dengan pasukan unta dan berperang dengan mereka. (Abū Bakrah) berkata: "Ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia menjadikan anak perempuan Kisra menjadi Ratu, (Rasulullah) bersabda: "Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada perempuan."

Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jamī' al-Ṣāḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh SAW wa Sunanib wa Ayyamih* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Juz IV, 228; Abū 'Abdullāh Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Aḥmad ibn Hanbal* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979), Jilid V, 38.

²⁵⁶ Buchari M, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik*, 10.

²⁵⁷ Buchari M, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik*, 10.

seperti itu didasari rasa prihatin akan kondisi yang terjadi pada zamannya dan kemunduran dalam perlakuan ilmiah terhadap periwayatan hadis. Juga, dimaksudkan untuk mengoreksi kecendrungan tersebut. Oleh sebab itu, dalam manhaj penyusunannya dimulai dengan gambaran yang berupa memberikan rangsangan pada pembacanya untuk kembali memperhatikan dan mempelajari hadis.²⁵⁸

Namun perlu disadari bahwa tradisi kenabian jauh lebih kompleks dibanding penuturan sebuah hadis. Karena dalam sebuah teks (*within text*) terdapat sekian banyak variable serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar pembaca lebih mendekati kebenaran mengenai gagasan yang hendak disajikan Rasulullah SAW. Dikatakan demikian, karena hadis hanyalah sebagian personifikasi Rasulullah dan sahabatnya, sehingga jika hadis ditarik dan dipisahkan dari asumsi-asumsi sosial sangat mungkin terjadi distorsi informasi atau bahkan salah paham. Jadi, tanpa memahami motif dan tujuan dibalik penyampaian sebuah hadis, suasana sosio-historis-psikologis, dan audien yang dihadapi oleh Rasulullah, maka sangat mungkin pembaca akan salah paham ketika membaca sebuah hadis. Apalagi, ketika wacana yang bersifat spontan dan dialogis dituliskan dalam teks maka sangat potensial akan melahirkan salah paham dikalangan pembaca.²⁵⁹

Analisis pada tataran komparasi historis belum dapat dikatakan pemahaman hadis secara luas dan menyeluruh. Jika seorang pengamal hadis hanya terkurung pada analisis historis ini, maka setiap ada perbedaan lafal atau makna sekecil apapun pada sejumlah hadis langsung saja melakukan tarjih untuk penyelesaiannya. Ketika ada dua hadis misalnya yang sedikit saja berbeda maka pertanyaan yang dimunculkan, mana hadis yang lebih kuat sanadnya. Dalam hal ini terkadang juga terlihat sikap pemakai hadis hanya berpegang kepada tertib urutan martabat kitab-kitab hadis yang bersifat umum (*jumlatan*), bukan bersifat hadis perhadis (*tajsilan*).²⁶⁰

Menurut Daniel Djuned dalam karyanya ia menjelaskan bahwa segala hal yang berhubungan dengan upaya rekonstruksi kaedah-kaedah *Fiqh al-Hadith*

²⁵⁸ Hal tersebut sangat didukung pula dengan kondisi mereka yang masih dekat dengan tahun-tahun ketika korelasi besar riwayat dikumpulkan, dan mereka tetap menjadi rekan dalam karya-karya yang berisi pelengkap atau pengoreksi atas koleksi-koleksi ini. Lihat Muhammad Dede Rodliyana, "Pergeseran Pemikiran 'Ulum al-Hadith dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran 'Ulum al-Hadith di Indonesia'" (Tesis: UIN Jakarta, 2003), 102-103.

²⁵⁹ Buchari M, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik*, 14.

²⁶⁰ Daniel Djuned, *Paradigam Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fiqh al-Hadis* (Banda Aceh: Citra Karya, 2002), 21.

sesungguhnya bagi seorang analis ilmu hadis atau pengamal hadis tidak perlu melakukan sebuah ijhtihad yang rumit untuk merumuskan kaedah-kaedah baru. Semuanya sudah ada dalam khazanah masa lalu. Cuma saja kaedah-kaedah dimaksud terberai dalam kitab-kitab fikih dan *Uṣūl al-Fiqh*, kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitab tafsir, tidak tersusun secara sistematis dalam sebuah kitab khusus. Karena itu, ketika umat Islam zaman modern ini hendak kembali kepada hadis, kaedah-kaedah dimaksud kurang diperhatikan.²⁶¹ Upaya sistematisasi kaedah-kaedah pemahaman hadis ini dirasa sangat mendesak. Para ahli hadis khususnya di Indonesia mencoba merintis jalan ke arah sistematisasi keilmuan di bidang ilmu hadis yang secara fakta belum banyak ditemukan dan dibuat oleh ahli hadis lainnya, baik oleh ahli hadis di Timur Tengah ataupun di Barat sekalipun.

Penelitian terhadap hadis sangat diperlukan, karena hadis sampai kepada umat Islam melalui jalur dan jalan periwayatan yang panjang. Sehingga wajar apabila terdapat kesalahan-kesalahan terhadap pemahaman hadis Nabi SAW tersebut. Hadis tidak bertambah jumlahnya setelah wafatnya Rasulullah SAW sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terus berkembang sehubungan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, di dalam memahami hadis diperlukan metode pemahaman yang tepat melalui pendekatan yang komprehensif, baik tekstual maupun kontekstual dengan berbagai bentuk dan kaedah-kaedahnya.²⁶² Dan kemungkinan pemakaian metodologi baru dalam memahami hadis pada kondisi permasalahan masyarakat Indonesia yang kompleks sangatlah mungkin terjadi.

Dengan melihat keadaan yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis, maka terkadang sebuah hadis bisa dipahami secara tekstual maupun kontekstual, atau dipahami secara historis maupun *normative*. Oleh karena itu, Fazlurrahman menyebutkan hadis Nabi sebagai sunah yang hidup. Formalisasi

²⁶¹ Hadis sebagai sebuah ucapan dan teks sesungguhnya memiliki sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar kita lebih bisa mendekati kebenaran mengenai gagasan yang hendak disampaikan oleh Rasul. Tanpa memahami motif di balik penyampaian sebuah hadis, suasana-psikologis, dan sasaran ucapan Nabi, maka mungkin sekali kita akan salah paham dalam membacanya. Menyadari bahwa ucapan dan pengucapannya, suasana-psikologis dan sasaran ucapan saling bertautan, maka dalam setiap pemahaman dan penafsiran yang dilakukan, ketiga hal ini sangat berperan sekali.

Sebuah idealisme kembali kepada al-Qur'an dan hadis yang tidak dibarengi dengan penguasaan kaedah-kaedah dimaksud telah melahirkan fakta kontra produktif yang menunjukkan umat sendiri sebagai yang telah disebutkan di atas. Daniel Djuned, *Paradigam Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fiqh al-Hadis* (Banda Aceh: Citra Karya, 2002), 22.

²⁶² Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI, 1996), 3-4.

sunah atau verbalisasi sunah, dan oleh karenanya harus bersifat dinamis. Hadis Nabi harus ditafsirkan secara situasional dan diadaptasikan ke dalam situasi dewasa ini.²⁶³

Dalam Islam dan kehidupan kaum muslim, Nabi memiliki banyak fungsi: sebagai Rasul, panglima perang, suami, sahabat dan lain-lain. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fungsi-fungsi itu. Menurut Mahmud Shaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengkaitkannya pada fungsi beliau tatkala melakukan hal-hal itu sangat besar manfaatnya.²⁶⁴

Hadis sebagai sebuah pesan-pesan keagamaan disampaikan dalam sebuah bahasa yang tentunya juga bersifat keagamaan. Sebagai sebuah bahasa keagamaan tentu sedikit tidaknya berbeda dengan bahasa ilmiah atau bahasa umum. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam bahasa keagamaan adalah seringnya pemakaian bahasa metaforis. Hal ini agaknya tak dapat dihindari karena untuk membahasakan dan mengekspresikan tentang Tuhan dan objek yang abstrak, manusia tak bisa tidak mesti menggunakan ungkapan yang familiar dengan dunia indrawi, dengan bahasa kiasan dan simbol-simbol. Bahasa metaforis memiliki kekuatan yang bisa mempertemukan antara ikatan emosional dan pemahaman kognitif sehingga seseorang dimungkinkan untuk mampu melihat dan merasakan sesuatu yang berada jauh di belakang ucapan itu sendiri. Bahasa metaforis ini tampaknya cukup efektif menghancurkan kesombongan masyarakat Jahiliah.²⁶⁵

Bahasa metaforis atau majaz dalam bahasa Arab dapat diungkapkan sebagai kata yang dipakai bukan pada makna yang diperuntukkan baginya (bukan makna aslinya) karena adanya hubungan (*'alaqah*) diikuti dengan tanda-tanda yang mencegah penggunaan makna asli tersebut.²⁶⁶ Jadi pengalihan makna hakiki kepada *majazi* dilakukan karena adanya *'alaqah* (korelasi) dan *qarinah* (tanda-tanda) yang menghalangi pemakaian makna asli (hakiki) tersebut.

Bertolak dari kenyataan di atas, kiranya sangat mendesak upaya mencari format baru untuk studi dan pengembangan metoda pembelajaran ilmu yang bernilai strategis ini. Dengan itu, semangat kembali kepada al-Qur'an dan hadis yang tumbuh dan berkembang dapat diimbangi dengan penguasaan kerangka keilmuan dan metode pemahaman kedua sumber ajaran agama tersebut. Tanpa

²⁶³ Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad* (Bandung: Pustaka, 1984), 38.

²⁶⁴ Mahmūd Shaltut, *Al-Islām 'Aqidah wa Shari'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1996), 513.

²⁶⁵ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 82.

²⁶⁶ Ahmad Hashimi, *Jawābir al-Balaghah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 290.

keseimbangan ini, semangat yang bermuatan positif sebagai yang dimaksudkan di atas, sesuai dengan sejumlah kasus di lapangan, akan melahirkan kontra produktif terhadap pesan-pesan ruhaniah al-Qur'an dan hadis tersebut.²⁶⁷

Sejumlah kasus khilafiyah dalam masyarakat Islam, terutama dalam konteks kekinian di Indonesia lebih disebabkan oleh keminiman analisis filosofis terhadap ilmu hadis dan hadis itu sendiri dalam sebuah kerangka keilmuan yang jelas dan sistematis. Kenyataan lain, keminian ilmu dan kekakuan tekstual dalam pemaknaan hadis, gerakan yang berupaya memurnikan ajaran Islam, kadangkala tidak tepat dikatakan “pemurnian”, melainkan telah terjebak ke dalam “pengikisan”” sebagian ajaran Islam itu sendiri. Akibatnya, apa yang dihasilkan gerakan kembali kepada al-Qur'an dan hadis dalam memahami agama tidak lebih dari pada ijtihad para ulama yang sudah ada.

Kajian Hadis dilihat dari Beberapa Literatur Keilmuan

1. Historiografi

Secara semantik kata “historiografi” merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *histori* yang berarti sejarah dan *grafi* yang berarti deskripsi atau penulisan.²⁶⁸

Historiografi awal Islam pada hakikatnya merupakan historiografi Arab yang berkembang dalam periode sejak Islam pertama kali disampaikan Nabi Muhammad saw sampai abad ke-3 H. Perkembangan historiografi awal Islam tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ajaran Islam maupun komunitas Muslim itu sendiri.²⁶⁹

Perkembangan historiografi awal Islam tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ajaran Islam maupun komunitas Muslim itu sendiri. Seperti kita ketahui, ketika Nabi masih hidup berbagai masalah yang muncul di kalangan kaum Muslim dapat dipecahkan dengan otoritas al-Qur'an atau Nabi Muhammad SAW sendiri. Tetapi segera setelah Rasulullah wafat, ketika kaum Muslim menghadapi persoalan-persoalan

²⁶⁷ Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fiqh al-Hadis* (Banda Aceh: Citra Karya, 2002), 11.

²⁶⁸ *History* berasal dari kata benda Yunani “*istoria*” yang berarti ilmu. Akan tetapi dalam perkembangan zaman, kata latin yang sama artinya, yakni “*scientia*” lebih sering digunakan untuk menyebutkan pemaparan sistematis non-kronologis mengenai gejala alam, sedangkan kata “*istoria*” diperuntukkan bagi pemaparan mengenai gejala-gejala, terutama hal ihwal manusia, dalam urutan kronologis. Sekarang “*history*” menurut defenisi yang paling umum berarti “masa lampau umat manusia. Badri Yatim, *Historiografi Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 1.

²⁶⁹ Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 19.

baru dan tidak dapat menemukan bimbingan eksplisit dari al-Qur'an, atau ketika terdapat perbedaan penafsiran ayat al-Qur'an di kalangan Muslimin, maka otoritas terbaik adalah perbuatan dan perkataan Nabi, yakni hadis (sunnah). Kemudian, selama para sahabat masih hidup, mereka dapat merujuk langsung kepada hadis Nabi, karena mereka menyaksikan langsung kehidupan beliau. Tetapi ketika semakin banyak sahabat yang wafat, sejalan dengan kian banyaknya masalah yang muncul dalam masyarakat Islam yang terus berkembang, kaum Muslim semakin merasakan perlunya mengumpulkan informasi tentang Nabi. Begitulah, usaha mengumpulkan dan menyusun hadis secara tertulis terus menemukan momentumnya.²⁷⁰

Kreativitas manusia sepanjang sejarah meliputi banyak kegiatan, diantaranya dalam organisasi sosial dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan proses simbolis.²⁷¹ Ketika pertama kali hendak mempelajari ilmu-ilmu hadis yang kini begitu luas dan beragam, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah menentukan dimana titik tolak atau langkah awal kajian ilmu tersebut. Tanpa ini, para pengkaji akan sangat sulit menangkap apa yang sesungguhnya ilmu hadis tersebut. Dalam hubungan ini, yang pertama ditentukan adalah bahwa kajian ini berada dalam kapling sejarah, karena yang dipelajari adalah data-data historis yang berkaitan dengan Rasulullah saw dan para periwayat hadis.²⁷²

²⁷⁰ Literatur hadis, dengan demikian, sangat krusial apakah sebagai sumber pokok kedua ajaran Islam maupun sebagai tambang informasi bagi historiografi awal Islam. Hadis mempunyai peran amat penting dalam penulisan sejarah Islam di masa awal. Tulisan ini mencoba mengungkapkan peranan dan pengaruh hadis terhadap perkembangan historiografi awal Islam. Kita juga mencoba meninjau secara singkat bentuk dan metode historiografi awal Islam. Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 20.

²⁷¹ Proses simbolis yaitu kegiatan manusia dalam menciptakan makna yang menunjuk pada realitas yang lain daripada pengalaman sehari-hari, proses simbolis meliputi bidang-bidang agama, filsafat, seni, ilmu, sejarah, mitos, dan bahasa. Lihat Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 3.

²⁷² Hadis maupun sejarah menempati posisi yang istimewa dalam jantung kesadaran komunitas muslim. Hadis merupakan rekaman terhadap ucapan, tindakan, persetujuan, dan ihwal Nabi SAW yang masih terus menjadi rujukan umat Islam sampai kini. Sementara sejarah Islam merupakan rekaman terhadap seluruh aspek kehidupan Nabi SAW, sahabat, dan umat Islam di masa lampau yang seringkali dijadikan contoh teladan dalam kehidupan umat Islam dari dahulu hingga kini. Dengan demikian, hadis dan sejarah Islam bukanlah data-data kesejarahan yang mati atau hanya merupakan bagian dari masa silam, tetapi lebih dari itu keduanya merupakan fenomena yang terus hidup dalam jantung kesadaran komunitas muslim. Karenanya,

Rasulullah SAW dalam segenap kondisi dan kapasitasnya tergambar sebagai seorang guru atau pendidik, pendakwah dan pembimbing manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT dapat pula tergambar Rasulullah SAW dalam kedudukannya sebagai Nabi, seorang pemimpin, panglima perang, sebagai manusia biasa, sebagai seorang suami, dan sebagai orang Arab dengan segenap atribut budaya dan sosialnya. Secara umum, dapat digambarkan adanya Rasulullah SAW yang *ummi* penyampai dan pensyarah al-Qur'an sebagai pelaku sejarah yang dicitrakan oleh para sahabat sebagai pengikut dan sasaran risalahnya. Semua hal yang berhubungan dengan Rasulullah ini, baik berkaitan dengan misi kerasulannya atau tidak, menjadi kekayaan memorial para sahabat dalam kapasitas mereka sebagai teman, sebagai murid, sebagai prajurit, dan sebagainya; dan fakta inilah kemudian dikristalkan ke dalam batasan makna hadis oleh ulama ahli hadis.²⁷³

Rasulullah pada kata hadis akan menggiring pengkaji kepada pertanyaan bagaimana proses hadis-hadis tersebut terekam dari Rasulullah SAW dan tersampaikan dengan baik dari generasi awal abad pertama hijriah kepada generasi selanjutnya di abad kedua dan seterusnya. Bagaimana hadis-hadis tersebut kemudian tersusun rapi dalam kitab-kitab hadis pada abad kedua, tiga dan keempat. Bagaimana pula perkembangan selanjutnya di abad ke lima dan seterusnya. Apa batasan makna hadis pada masa awal pentadwinan hadis dimaksud serta bagaimana upaya para ulama menilai, mengkritik atau memilih dan memilah antara ribuan hadis yang bukan hanya bersumber dari Rasulullah SAW melainkan juga dari sahabat dan tabi'in. bagaimana mereka memilah yang tidak *ṣahih* dan yang *ṣahih*. Ketika mereka hendak memilah yang *ṣahih* dan yang tidak *ṣahih*. Ketika mereka

tadwin hadis dan historiografi Islam merupakan persoalan klasik yang senantiasa aktual dibicarakan.

Hadis dan sejarah Islam pada dasarnya merupakan dua cabang disiplin ilmu yang mempunyai keterkaitan erat. Lebih jauh, kajian sejarah Islam pada awalnya merupakan cabang dari studi hadis. Sehingga hampir dapat dipastikan jika historiografi Islam yang lebih awal banyak dipengaruhi oleh studi hadis.

Ketika kata hadis hendak diberi batasan maknanya, maka satu hal yang langsung tergambar atau terlintas dalam pikiran adalah bahwa adanya sosok Muhammad Rasulullah SAW yang membimbing umat dengan ucapan, perbuatan atau sikap beliau lima belas abad yang lalu. Ini bermakna bahwa kata hadis lepas dari makna etimologisnya sangat erat hubungannya dengan Rasulullah SAW. Lihat Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 6-7.

²⁷³ Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis*, 19.

hendak melihat keabsahan sebuah riwayat, apa pula yang menjadi sasaran pertama dan utama dalam kajiannya. Bagaimanapun mereka merumuskan berbagai macam dan bentuk istilah teknis untuk kepentingan sistematisasi keilmuan dan sebagainya.

Menjawab pertanyaan di atas, dalam bagian ini pokok-pokok bahasan keilmuan di dekati lewat pendekatan kronologi historis sejak hadis itu keluar dari sumber pertamanya Rasulullah hingga mengalir (dalam proses riwayat) dan menggenangi waduk-waduk besar (kitab-kitab hadis) di abad kedua, ketiga dan keempat. Tema-tema pokok yang perlu mendapat uraian dalam analisis historis ini adalah penulisan hadis zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat.²⁷⁴ Kondisi sosio politis abad pertama, riwayat hadis dan berbagai hal; kedua sistematisasi ilmu hadis dan kristalisasi istilah-istilah teknis dalam analisis ilmu hadis, ilmu dalam makna substantif dan dalam makna sistematis, perumusan makna hadis, ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*, berbagai aspek yang berhubungan dengan kritik sanad dan kritik matan, dan berbagai aspek yang berhubungan dengan *takhrīj al-Ḥadīth*.

Selanjutnya, dalam analisis historis terutama pada proses kritik matan sesungguhnya perhatian ahli hadis pada muatan makna hadis sudah pernah dilakukan. Ketika sebuah hadis misalnya dinyatakan *shaz*, disitu sudah berlangsung sebuah proses komparatif yang diakibatkan oleh adanya sejumlah matan dalam kasus yang sama bertentangan (dan tidak dapat dikompromikan) maknanya. Namun dalam hal ini, penyelesaiannya masih lebih terkurung pada analisis historis. Karena penyelesaiannya dilakukan dengan membandingkan kualitas sanad dalam pendekatan *tarjih*. Sanad yang lebih kuat dinyatakan *rajah* dan matannya *mahfuz* sementara yang lain. Karena bertentangan dengan sanad yang lebih kuat dinyatakan *shaz*. Hadis *shaz* ini merupakan hadis yang *marjub*, *da'if* dan *ghair mahfuzin* serta *ghair ma'mul bih*.

²⁷⁴ Analisis historis yang puncaknya proses kritik sanad dan matan mengantar kepada kita puluh ribu hadis yang *ṣahih* atau minimal *hasan*. Persoalan selanjutnya, bagaimana khazanah hadis ini dipahami untuk dapat diamalkan atau dijadikan pegangan hidup. Hadis-hadis yang dinyatakan telah memenuhi kriteria *ṣahih* atau dalam pengertian lebih luas *maqbul* sebagai hasil analisis historis ulama ahli hadis di atas, tidak seluruhnya berhubungan dengan agama atau dengan risalah atau tidak semua hadis yang ada bersumber dari Rasulullah SAW setelah menjadi rasul. Ketika hadis hendak dijadikan sumber ajaran, hal-hal yang berhubungan dengan cakupan mana hadis ini perlu ada perumusan khusus. Lihat Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis*, 19.

Analisis pada tatanan komparasi historis ini belum dapat dikatakan pemahaman hadis secara luas dan menyeluruh. Jika seorang pengamal hadis hanya terkurung pada analisis historis ini, maka setiap ada perbedaan lafal atau makna sekecil apapun pada sejumlah hadis langsung saja melakukan tarjih untuk penyelesaiannya.²⁷⁵

Kajian mendalam terhadap *sirah Nabawiyah* menjadi bagian yang sangat penting. Sebab, pemahaman terhadap *sirah Nabawiyah* akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Kalau pendapat ini diterima maka mereka yang mendalami sejarah Rasulullah sudah tentu akan memiliki pemahaman berbeda dari yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis.²⁷⁶

2. Linguistik

Kemampuan manusia untuk berpikir, demikian juga merasakan, merupakan perkembangan awal dalam memberikan makna yang lebih berarti terhadap manfaat bahasa yang dimilikinya. Berbeda dengan makhluk hidup yang lain, manusia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menjelaskan suatu benda dengan sesuatu yang lain.²⁷⁷

Para ahli baik psikolog, antropolog, filsuf maupun teolog telah banyak yang mengkaji asal usul bahasa. Secara umum pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga teori, yaitu teologis, naturalis dan konvensionalis.²⁷⁸

²⁷⁵ Ketika ada dua hadis misalnya yang sedikit saja berbeda maka pertanyaan yang dimunculkan, mana hadis yang lebih kuat sanadnya. Dalam hal ini terkadang juga terlihat sikap pemakai hadis yang hanya berpegang kepada tertib urutan martabat kitab-kitab hadis yang bersifat umum, bukan bersifat hadis per hadis. Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis*, 20-21

²⁷⁶ Perkembangan literatur Islam mencapai puncaknya pada abad ketiga hijriyah. Berbagai karya literatur Islam merupakan sumber informasi penting tentang sejarah Islam. Hadis yang dipahami sebagai suatu laporan atau informasi tentang nilai-nilai keberagaman yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu bagian penting yang dapat menunjukkan sejarah perkembangan literatur Islam. Periwiyatan hadis yang sudah berjalan sejak masa Nabi sampai dibukukan secara resmi pada abad ketiga merupakan kumpulan informasi yang secara sinergis dapat dibuktikan originalitasnya melalui *isnad*. Lihat Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), 68. Dan juga M. Dede Rodliana, Hegemoni Fiqh Terhadap Penulisan Kitab Hadis, *Journal Qur'an dan Hadith Studies* Vol I, No.I, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 119.

²⁷⁷ Nyoman Kutha Ratna, *Estetika Sastra dan Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 38.

²⁷⁸ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: sebuah kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 29-31.

- 1) Pendukung aliran Teologis mengatakan bahwa manusia bisa berbahasa karena anugerah Allah pada mulanya Allah mengajarkannya kepada Adam, nenek moyang seluruh manusia.
- 2) Teori Naturalis beranggapan bahwa kemampuan manusia berbahasa merupakan bawaan alam, sebagaimana kemampuan melihat, mendengar maupun berjalan.
- 3) Teori Konvensional, beranggapan bahwa bahasa pada awalnya muncul sebagai produk sosial. Ia merupakan hasil konvensi yang disepakati dan kemudian dilestarikan oleh masyarakatnya.

Manusia menjadi makhluk yang paling sempurna, karena eksistensinya dimuka bumi ini dibuktikan dengan pengoptimalan akal yang dianugerahkan kepada manusia,²⁷⁹ yang mampu menampung sekaligus memberikan solusi bagi keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri.

Kemampuan untuk mempergunakan bahasa adalah satu sifat khusus bagi manusia.²⁸⁰ Tanpa bahasa tertulis, tidak ada kemajuan dan juga dalam perkembangan bahasa telah memungkinkan bertambahnya pengetahuan secara cepat serta bercabangnya dalam bidang-bidang khusus yang bermacam-macam, dengan tercapainya keuntungan-keuntungan besar, terjadi pula problem-problem baru.

Bahasa memang sarana utama bagi kehidupan bermasyarakat dan alat untuk saling memahami antar sesama anggotanya, dan lebih jauh lagi untuk mengatur urusan-urusan administrasi, politik, pendidikan, juga aspek-aspek kehidupan lainnya.²⁸¹

Bahasa sangat erat kaitannya dengan pengalaman manusia, lebih daripada yang bisa diakui. Seperti halnya hadis yang tidak terlepas dari

²⁷⁹ Pemerolehan bahasa atau akuisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa (*language learning*). Abdul Chaer, *Psikolinguistik Kajian Teoritik* (Jakarta: Rineka Putra, 2003), 167.

²⁸⁰ Bahasa adalah system simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbiter dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Lihat Wahyu Wibowo, *Manajemen Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2001), 3.

²⁸¹ Hubungan antara bahasa dan masyarakat sangat erat. Bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain seperti perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan sebagainya. Lihat Abdul Chaer, *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 3.

bahasa, karena Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis dengan bahasa yaitu bahasa Arab.²⁸²

Ahmad al-Iskandari menjelaskan bahwa bahasa Arab adalah salah satu bahasa Samiyah yang merupakan bahasa bangsa Arab purbakala. Selanjutnya al-Iskandarī membagi bangsa Arab secara garis besar menjadi tiga bagian:²⁸³

- 1) Arab Purbakala (*Baidab*), yakni bangsa-bangsa Arab yang telah punah, karenanya informasi akurat tentang bangsa ini sangat terbatas, seperti dari al-Qur'an atau Hadis Nabi SAW di antara suku yang populer dari bangsa Arab kelompok ini adalah seperti kaum *'Aād, Thamud, Jadis, Tasm, 'Imliq, 'Abdu Dlahm*.
- 2) Arab *'Aribah*, yaitu bangsa Arab keturunan *Qaṭan* tinggal di sepanjang sisi sungai Eufрат lalu pindah ke daerah Yaman. Diantara kabilah yang populer adalah Kahlan dan Himyar.
- 3) Arab *Musta'ribah*, yakni bangsa-bangsa Arab keturunan Isma'il yang dikenal dengan *bani Adnan*. Diantara kabilah yang terkenal adalah *Rabi'ah, Muḍar*, dan *Iyad*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab sudah sangat tua dan para sejarawan sepakat bahwa Nabi Ismail adalah moyang bangsa Arab modern.

Dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Arab akhirnya berkelompok menjadi dua kelompok besar, yaitu Arab Selatan (*Qaḥṭan*) dan Arab Utara (*Adnan*). Kedua kelompok bangsa ini sering terjadi perselisihan, hingga pada akhirnya bangsa Arab Utara berhasil mendominasi kelompok selatan.²⁸⁴ Sejak itu bahasa Arab kelompok utara menjadi bahasa bagi seluruh penduduk jazirah Arab. Sedangkan sebelumnya, kedua kelompok Arab tersebut mempunyai bahasa sendiri.

²⁸² Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Samiyah, yang dimaksud dengan bahasa Smit adalah bahasa yang digunakan oleh anak keturunan Sam ibn Nuh as. Yang tinggal di antara dua sungai (Tigris dan Eufрат) dan semenanjung Arab termasuk wilayah syam. Adapun kelompok bahasa Smit yang populer adalah Arab, Suryani, Finiqi, Ibrani, Asyuri, Babili, dan Habasyah. Namun yang hingga kini masih lestari adalah bahasa Arab, Habasyah, Ibrani dan Suryani. Lihat Jurji Zaidan, *Tarikh Adab al-Lughab al-Arabiyah, Juz 1* (Beirut: Dar a-Fikr, 1996), 26.

²⁸³ Ahmad al-Iskandarī dan Mustafa 'Ananī, *al-Waṣit fi al-Adab al-Arabi wa Tarikhibi* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1916), 5.

²⁸⁴ Abdal-Ghafar Ḥamid Hilāl, *Aṭṭarūḥ Lughab al-Arabiyah*, 157.

Bahasa Arab Selatan ini lebih dekat ke bahasa Suryani, sedang hurufnya lebih dekat ke bahasa Punisia.²⁸⁵

Sebagaimana dikenal umum, bahwa bangsa Arab sejak dahulu kala memiliki tradisi klasik yakni berhaji tiap tahun. Dan sejak suku Quraish menjadi penjaga Mekah, maka dengan sendirinya suku Quraish dominan dikalangan bangsa-bangsa Arab lainnya. Kemudian, setelah Islam datang, secara otomatis agama ini menghilangkan kata-kata atau kalimat-kalimat Arab yang tidak Islami, terutama yang berkaitan dengan adat-istiadat Jahiliyah, seperti kata *mirba'*, *nashitab*, *fudul*, dan sejenisnya. Sebaliknya Islam mengokohkan penggunaan kata-kata baru yang ada hubungan dengan ajaran Islam seperti kata mu'min, munafiq, shalat, zakat, dan sebagainya.²⁸⁶

Konsep Genealogi dan Pemetaan Studi Hadis

Setiap disiplin ilmu tumbuh berkembang melalui tahap-tahap tertentu dan secara historis dapat ditelusuri genealoginya, yaitu asal-usulnya dan jaringan keilmuannya, terutama dengan disiplin ilmu-ilmu yang berada dalam rumpunan keilmuan yang sama.²⁸⁷

Rosenthal telah membagi isi karya historiografi sebagai berikut: (a) Genealogi (nasab); (b) biografi; (c) geografi dan kosmografi; (d) astrologi; (e)

²⁸⁵ Bahkan menurut Ghafar, ketika menegaskan bahasa kedua kelompok itu berbeda, mengutip perkataan Abi Amr ibn 'Ala: "antara kedua bahasa Arab tersebut tidak ada hubungan, karena bahasa Arab Selatan bukan bahasa Arab kita". Namun meskipun berbeda tetapi asalnya sama, yang menyebabkan berbeda, karena kabilah pengguna bahasa Arab tersebut hijrah ke wilayah selatan lalu tinggal di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan Arab Utara. Lihat Abd al-Ghafar Hamid Hilal, *Atwarul Lughah al-Arabiyah*, 157, dan juga Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Pustaka Nasional, 2005), 76-77.

²⁸⁶ Di Arab, bagi anak muda yang ingin belajar bahasa Arab asli, ia harus tinggal di luar kota di kampung-kampung atau gurun-gurun untuk bergabung dengan masyarakat Badui yang budayanya masih asli Arab, belum tersentuh budaya lain. Lihat Jalaluddin al-Suyuti, *Kitabul Iqtirakh fi Ulmi 'Ushulin Nakhwī* (Dā'irah al-Ma'arif al-Uthmāniyah, t.th), 14-20.

²⁸⁷ Istilah "sejarah" dari kata Arab "*shajarah*" yang berarti "pohon". Pengembalian istilah ini agaknya berkaitan dengan kenyataan, bahwa "sejarah"-setidaknya dalam pandangan orang pertama yang menggunakan kata ini- menyangkut tentang, antara lain, *shajarat al-nasab*, pohon genealogis, yang dalam masa sekarang agaknya bisa disebut "sejarah keluarga" (*family history*). Atau boleh jadi juga karena kata kerja *shajarah* juga punya arti "to happen", "to develop". Namun selanjutnya, "sejarah" dipahami mempunyai makna yang sama dengan "*tarikh*" (Arab), "*istoria*" (Yunani), "*history*" atau "*geschichte*" (Jerman), yang secara sederhana berarti "kejadian-kejadian menyangkut manusia pada masa silam". Lihat Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 72.

filosof; (f) Ilmu sosial dan politik; dan (g) penggunaan dokumen, prasasti, dan koin. Pembagian itu juga disetujui oleh Muin Umar.²⁸⁸

Istilah genealogi merupakan ungkapan bahasa yang mempunyai makna asal muasal sesuatu. Jika kata genealogi disandingkan dengan kata manusia, maka yang dimaksud adalah garis keturunan manusia di dalam hubungan keluarga sedarah. Karenanya yang dimaksud dengan genealogi pemikiran seseorang adalah mencari benang merah orisinalitas pemikiran seseorang dalam mengembangkan sumber Islam beserta metodologinya.²⁸⁹

Pemikiran seseorang mempunyai karakter yang berbeda-beda dipengaruhi oleh beberapa pengetahuan dan kondisi empiris yang dialami.²⁹⁰ Menurut Michel Foucault bahwa kemunculan periode-periode panjang sejarah ini bukan berarti “kembali ke filsuf-filsuf sejarah, kembali pada masa-masa keemasan dunia, atau kembali pada catatan-catatan tentang timbul tenggelamnya berbagai peradaban.”²⁹¹

Secara umum, sejarah ide-ide bersentuhan dengan wilayah diskursus sejarah dia merupakan domain yang memuat dua nilai; elemen apa pun yang ditempatkan disitu bisa dikenali sebagai “yang lama” atau “yang baru”; tradisional atau original; berkaitan dengan tipe rata-rata atau tipe yang lain dari biasanya. Oleh sebab itu, kita bisa membedakan dua kategori formulasi: *pertama*, yang memiliki ni

²⁸⁸ *Historical Narrative* adalah salah satu referensi dari referensi sistem dari sesuatu yang dapat dibaca dan direkonstruksi struktur dan genealogi maknanya mengenai pengaruh kebudayaan. Lihat Franz Rosenthal, *A History of Muslim Historiography* (Leiden: E.J Brill, 1968), 245. Dan Claudia Lenz, *Genealogy and Archeology: Analyzing Generational Positioning in Historical Narratives*, *Journal of Comparative Family Studies*, 2001, 324. <http://proquest.org>. (Accessed: 3/10/2014).

²⁸⁹ Abdul Fatah Idris, *Hadis-badis Prediktif dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)* (Semarang: Putaka Rizki Putra, 2012), 249.

²⁹⁰ Abdul Fatah Idris, *Hadis-badis Prediktif dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)* (Semarang: Putaka Rizki Putra, 2012), 249.

²⁹¹ Kesan itu hanyalah efek metodologis dari perkembangan rangkaian-rangkaian peristiwa sejarah. Sebaliknya, dalam sejarah ide, pemikiran dan sains mutasi yang sama malah memberikan dampak berbeda, yaitu menceraikan-beraikan rangkaian-rangkaian yang dibentuk oleh kemajuan kesadaran (*consciousness*). Dia lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah proses pertemuan dan kulminasi antar ide, pemikiran dan sains serta telah melihat ketidakmungkinan terciptanya satu totalitas utuh. Dia cenderung mencari kekhasan yang ada pada masing-masing rangkaian yang mungkin bisa disejajarkan, diurutkan atau disilangkan dengan rangkaian lain tanpa mereduksinya menjadi sebuah skema linear. Oleh sebab itu, dengan adanya kronologi rasio yang berkesinambungan dan asal-usulnya tidak mungkin dilacak dengan pasti, maka muncullah skala-skala yang jelas, bisa dibedakan dengan yang lain dan tidak bisa direduksi menjadi keajegan tunggal. Sejarah apa pun mesti memiliki kekhasan masing-masing dan tidak bisa direduksi menjadi bentuk umum kesadaran yang selalu mendapatkan sesuatu, bergerak maju dan akan selalu diingat. Lihat Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 25-26.

lain lebih dan jarang, muncul pada kali pertama dan tidak memiliki anteseden yang sama, menjadi model bagi yang lain dan berdasarkan kenyataan ini bisa dipandang sebagai proses penciptaan; dan yang *kedua*, formulasi-formulasi yang bersifat biasa-biasa saja, terdapat dalam keseharian kita, dan terhujam kokoh dalam rutinitas, tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan diturunkan dari apa yang telah dikatakan, bahkan kadang kala berdasarkan kata per kata.²⁹²

Sejarah ide-ide dapat memberikan semacam status kepada kedua kelompok ini; dan dia tidak menggiring kedua kelompok tersebut ke dalam ranah analisis yang sama; dalam mendeskripsikan kelompok pertama, sejarah ide-ide menjelaskan penemuan, perubahan, transformasi; dia memperlihatkan bagaimana kebenaran melepaskan diri dari kesalahan, bagaimana kesadaran bangun dari tidur panjangnya, bagaimana bentuk-bentuk baru mulai bersemi untuk kemudian menghasilkan kerangka pandang seperti yang kita kenal saat ini; yang menjadi tugas para sejarawan adalah menemukan kembali berdasarkan titik-titik yang diisolasi ini, retakan-retakan suksesif, garis kontinyu evolusi. Sedangkan kelompok kedua mengedepankan sejarah sebagai sebuah keberlimpahan dan muatan penuh, sebagai akumulasi pelan-pelan masa lalu, proses pengendapan diam-diam dari apa yang telah dikatakan; di dalam kelompok kedua ini, pernyataan-pernyataan harus ditangani berdasarkan muatan dan sesuai dengan anggapan umum terhadap pernyataan itu sendiri; dengan sendirinya, keunikan proses kemunculan pernyataan-pernyataan harus ditangani berdasarkan muatan dan sesuai dengan anggapan umum terhadap pernyataan itu sendiri; dengan sendirinya, keunikan proses kemunculan pernyataan tersebut menjadi ternetralisir; arti penting identitas pengarang, waktu dan tempat kehadirannya juga terabaikan; sebaliknya yang harus diukur dan dihitung adalah ekstensinya, yaitu ekstensi perulangannya dalam waktu dan ruang, jaringan-jaringan yang dilalui ketika berdifusi, kelompok-kelompok tempat mereka beredar; horizon umum yang mereka ciptakan dalam pemikiran manusia, batasan-batasan yang mereka cangkokkan ke dalam pemikiran tersebut; dan ketika menentukan periode-periode tertentu, bagaimana mereka bisa membedakan diri dari yang lain; dengan begitu orang kemudian mendeskripsikan seluruh figur yang terlibat.

Ada tiga konsep yang diterapkan oleh Michel Foucault dalam penelitian sejarah ide,²⁹³ yaitu:

- 1) Susunan pertama-tama mengandung bentuk *suksesif*.

²⁹² Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan* (Jogyakarta: IRCiSoD, 2012), 253-254.

²⁹³ Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan* (Jogyakarta: IRCiSoD, 2012), 108-111.

Susunan rangkaian penyampaian (apakah dalam susunan penalaran inferensi, implikasi suksesif dan demonstratif; susunan deskriptif, skema generalisasi atau spesifikasi progresif di mana mereka menjadi subjek, distribusi spasial yang mereka cakup; atau susunan penjelasan-penjelasan deskriptif dan cara peristiwa-peristiwa ditempatkan ke dalam suksesi linear pernyataan-pernyataan).

2) Konfigurasi wilayah penyampaian juga melibatkan bentuk-bentuk *koeksistensi*.

Ini berarti memerlukan satu wilayah kehadiran (untuk memahami seluruh pernyataan yang telah diformulasikan dan memasukkannya ke dalam sebuah diskursus, dianggap benar, melibatkan deskripsi jernih, penalaran yang lurus atau pengandaian-pengandaian tertentu; kita juga memperhatikan pernyataan-pernyataan yang dikritisi, diperdebatkan dan dinilai sebagaimana juga terhadap pernyataan-pernyataan yang ditolak); di wilayah kehadiran ini, relasi-relasi yang terjadi dapat berasal dari susunan-susunan verifikasi eksperimental, validasi logika, pengulangan, justifikasi berdasarkan tradisi atau otoritas, komentar, penyelidikan makna-makna tersembunyi, analisa kesalahan; relasi-relasi ini bisa dalam bentuk eksplisit (kadang-kadang diformulasikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan khusus; seperti referensi-referensi, diskusi-diskusi kritis dan sebagainya) atau implisit dan terdapat dalam pernyataan-pernyataan biasa.

3) Menentukan prosedur-prosedur intervensi yang mungkin diterapkan pada pernyataan-pernyataan.

Prosedur ini tidak sama untuk setiap formasi diskursif, prosedur dipakai (untuk menyisihkan formasi-formasi yang tidak dikehendaki), relasi-relasi yang menghubungkannya dengan kesatuan yang memungkinkannya mendapat kekhasan masing-masing.

Deskripsi arkeologis tentang perubahan, apapun bentuk kritik teoritis yang dilakukan orang terhadap sejarah tradisional ide-ide, dia tidak akan meletakkan fenomena temporal suksesi dan rentetan peristiwa sebagai tema utamanya, menganalisisnya berdasarkan skema evolusi, dan kemudian mendeskripsikan penyebaran historis diskursus-diskursus. Arkeologi ketika menangani sejarah hanya ingin menyegarkannya (*to freeze*). Di satu sisi, dengan mendeskripsikan formasi-formasi diskursif, dia tidak terlalu mengindahkan relasi-relasi temporal yang termanifestasi di dalam formasi-formasi tersebut; dia

hanya mencari aturan-aturan general yang valid, dengan cara mendeskripsikan, dan di tiap titik waktu: tidaklah arkeologi melekatkan sosok sinkronis yang telah terciutkan ke dalam perkembangan yang barangkali akan memperlambat lajunya perkembangan itu sendiri dan tidak dapat diketahui.²⁹⁴

Dalam konteks studi sejarah, pengukuran terhadap pengaruh sendiri pada dasarnya merupakan proses yang bersifat subjektif. Walaupun begitu, Louis Gottschalk telah mengajukan konsiderasi-konsiderasi yang dapat menegaskan bahwa suatu tokoh, benda, dan peristiwa sejarah memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap yang lain.²⁹⁵

- 1) Jika A mempunyai pengaruh terhadap B, maka A tentunya merupakan antededen (hal yang mendahului) atau minimal bersamaan dengan waktunya dengan B.
- 2) Kemiripan pikiran atau perilaku B dengan A mungkin pula merupakan indikasi mengenai adanya pengaruh, namun secara intrinsik dalam dirinya sendiri tidak cukup untuk membuktikan hal itu.²⁹⁶
- 3) Pengakuan B mengenai pengaruh A, mungkin pula membantu dalam menegaskan pengaruh, tetapi pengaruh itu mungkin saja dapat bekerja secara efektif meski tidak diketahui dan karenanya juga tidak diakui.²⁹⁷
- 4) Karena semua bentuk pengujian tersebut, kecuali ujian waktu, tidak bersifat memastikan, padahal waktu hanya memberikan kepastian apabila dapat dibuktikan adanya suatu anakronisme dalam urutan sebab akibat, maka bukti yang paling baik bahwa B dipengaruhi oleh A adalah mengeliminasi sebab akibat lain yang muncul pada pikiran dan tindakan B.

²⁹⁴ Michel Faucault, *Arkeologi Pengetahuan* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 296.

²⁹⁵ Dalam konteks penelitian sejarah, defenisi pengaruh (*influence*) sendiri yaitu suatu bentuk efek yang bersifat teguh dan membentuk terhadap pemikiran dan tingkah laku manusia, baik secara perorangan ataupun kolektif. Louis Gottschalk, *Understanding History: A Premier of Historical Method* (New York: Alfred A. Knopf, 1964), 249-250. Dan juga Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 18-19.

²⁹⁶ Begitupun ketidakmiripan bukan merupakan bukti tentang tidak adanya pengaruh, karena pengaruh itu mungkin merupakan suatu protes atau reaksi nyata yang menghasilkan seperangkat gagasan atau perilaku yang tidak dapat diterangkan dengan cara lain. Lihat Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 18.

²⁹⁷ Di lain pihak, suatu pengaruh mungkin diakui secara tulus, namun dalam kenyataannya lebih merupakan imajinasi daripada realitas, misalnya apabila pengarang memperlihatkan preferensi dan kesetiaan sastra atau seni, atau apabila pengarang mempergunakan kutipan untuk memperoleh efek retorik. Lihat Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 18.

Kesimpulan

Kajian terhadap hadis-hadis Nabi, tidak hanya terbatas pada kajian ilmu *riwayah*, yakni ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis atau ilmu *dirayah*, yakni berupa kaedah-kaedah yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah hadis dapat diterima sebagai riwayat yang bersumber dari Nabi (*maqbul*) atau tidak (*mardud*). Tetapi secara lebih luas meliputi berbagai aspek-aspek kajian lainnya, seperti: aspek kesejarahan, aspek pemahaman, aspek literatur-literatur, para tokoh, dan kajian Barat terhadap hadis.

Setiap disiplin ilmu tumbuh berkembang melalui tahap-tahap tertentu dan secara historis dapat ditelusuri genealoginya, yaitu asal-usulnya dan jaringan keilmuannya, terutama dengan disiplin ilmu-ilmu yang berada dalam rumpunan keilmuan yang sama. Rosenthal telah membagi isi karya historiografi sebagai berikut: (a) Genealogi (nasab); (b) biografi; (c) geografi dan kosmografi; (d) astrologi; (e) filsafat; (f) Ilmu sosial dan politik; dan (g) penggunaan dokumen, prasasti, dan koin.

Daftar Pustaka

- Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, Colorado: Westview Press, Inc., 1994.
- Abdul Fatah Idris, *Hadis-hadis Prediktif dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, Semarang: Putaka Rizki Putra, 2012.
- Abū ‘Abdullāh Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979
- al-Bukhāri, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā’il, *al-Jamī’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh SAW wa Sunanih wa Ayyāmih*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, *Uṣul al-Ḥadīth: Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dār al-Fikri, 1989.
- al-Iskandarī, Aḥmad dan Mustafa ‘Ananī, *al-Waṣit fi al-Adab al-Arabī wa Tarīkhihi*, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1916.
- Brown, Daniel W. *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*, Bandung: Mizan, 1996.
- Chaer, Abdul, *Psikolinguistik Kajian Teoritik*, Jakarta: Rineka Putra, 2003.

- Djuned, Daniel, *Paradigam Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fiqh al-Hadis*, Banda Aceh: Citra Karya, 2002.
- Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Faucault, Michel, *Arkeologi Pengetahuan*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
- Feener, R. Michael, Indonesian Movements for the Creation of a 'National Madhhab' *Journal of Islamic Law and Society*, Vol. 9, No. 1 (2002), 83,
<http://www.jstor.org/stable/3399202>. (Accessed: March 16, 2012).
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Pustaka Nasional, 2005.
- Hasan, Ahmad, *The Sunnah-its Early Concept and Development*, *Journal Islamic Studies*, Vol.7. No. 1, 50. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad.
<http://www.jstor.org/stable/20832904>. (Accessed 27/01/2014).
- Ḥashimi, Aḥmad, *Jawāhir al-Balaghah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ilyas, Yunahar dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, Yogyakarta: LPPI, 1996.
- ‘Itr, Nūruddīn, *Manhaj an-Naqd Fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*, terj. Mujiyo, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- M, Buchari, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Muhammad Dede Rodliyana, “Pergeseran Pemikiran ‘Ulūm al-Ḥadīth dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran ‘Ulūm al-Ḥadīth di Indonesia”
 Tesis: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

- Mujiyo, "Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam: Genealogi dan Metodologi" Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Nasution, Harun, *Pembaruan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rodliyana, Muhammad Dede, "Pergeseran Pemikiran 'Ulum al-Ḥadīth dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran 'Ulum al-Ḥadīth di Indonesia" Tesis: UIN Jakarta, 2003.
- Rosenthal, Franz, *A History of Muslim Historiography* (Leiden: E.J Brill, 1968), 245. Dan Claudia Lenz, Genealogy and Archeology: Analyzing Generational Positioning in Historical Narratives, *Journal of Comparative Family Studies*, 2001, 324. <http://proquest.org>. (Accessed: 3/10/2014).
- Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Salahuddīn ibn Aḥmad al-Adabī, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Shaltut, Maḥmūd, *Al-Islām 'Aqidah wa Shāri'ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1996.
- Shuhbah, Muhammad Muhammad Abu, *Kitab Ṣaḥīḥ Yang Enam*, Terjemahan Maulana Hasanuddin, Judul Asli: *Fī Rihabi al-Sunnah al-Kutub al-Ṣiḥaḥ al-Sittah*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991.
- Syaliba, Jamil, *Al-Mu'jān al-Falsafi*, Beirut: Dār al Kitāb al Lubnāni, 1973.
- Wibowo, Wahyu, *Manajemen Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Woodward, Mark R. *Textual Exegesis as Social Commentary: Religious, Social, and Political Meaning of Indonesian Translation of Arabic Hadith Texts*, *The Journal of Asian Studies*, Vol.52, No.3 (1993), 566. Association for Asian Studies. <http://www.jstor.org/stable/2058854>. (Accessed 27/01/2014).
- Yatim, Badri, *Historiografi Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zaidan, Jurji, *Tarikh Adab al-Lughah al-Arabiyah, Juz 1*, Beirut: Dar a-Fikr, 1996.

Biodata Penulis



Nama : Hasep Saputra
TTL : Tanjung Pauh Mudik, Kab.
Kerinci, 01 Oktober 1985
No Hp/Telp : 085272430949
Alamat : Desa Pancuran Tiga Kec. Keliling
Danau Kab. Kerinci
Email : hasepsaputra01@gmail.com

Ayah : H. Magek Abas.
Ibu : Ertini, S.Pd.
Isteri : Roza Eva, SKM.
Anak : Qowiyya Lathifa Qamra.
Gibran Khalid Asshiddieqy.
Qinthara Lubna Qamra.

Pendidikan:

1. SDN No.137/III Tanjung Pauh Mudik, tahun 1998.
2. MTsN Model Sungai Penuh, tahun 2001.
3. MAN 1 Sungai Penuh, tahun 2004.
4. S1. Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis IAIN Imam Bonjol Padang, tahun 2008.
5. S2. Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, tahun 2010.
6. S3. SPs Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Bidang Kaderisasi UKM KSI Ulul al-Bab IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2004-2005.
2. Sekretaris Umum Forum Kajian Riyadh al-Shalihin Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2005-2006
3. Ketua Kerohanian Ikatan Mahasiswa Kerinci-Padang tahun 2005-2006
4. Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2007-2008
5. Anggota Bidang Jaringan Komunikasi Nasional Pusat Studi Islam Mahasiswa Kerinci-Padang tahun 2007-2008.
6. Anggota Bidang Intelektual Forum Mahasiswa Ushuluddin Nasional tahun 2006-2008.

7. Anggota Himpunan Mahasiswa Kerinci-Jakarta 2012-2014
8. Sebagai Jurnal Manajer di Jurnal Al-Quds IAIN Curup 2018 s/d sekarang
9. Sebagai Editor di Jurnal AJIS IAIN Curup 2016 s/d sekarang
10. Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Curup tahun 2017-2018
11. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup tahun 2019 s/d sekarang

IMPLEMENTASI KONSEP SYARIAH DALAM DUNIA PERBANKAN

Muhammad Istan

Email: muhammadistan@iaincurup.ac.id

Pendahuluan

Bank syariah pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 1963 dan sejak saat itu telah berdiri lebih dari 300 institusi di lebih dari 75 negara (Noor & Ahmad, 2012; Sufian & Akbar Noor Mohamad Noor, 2009). Industri perbankan syariah berkembang pesat dan semakin populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perbankan syariah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sekelompok pengusaha Muslim, dan Pemerintah Indonesia (Putritama, 2018).

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia diawali dengan kelahiran Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua undang-undang di atas belum secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah, sehingga untuk memperkuat eksistensi perbankan syariah maka lahir Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008.

Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Indonesia, 2008). Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat” (Indonesia, 2008)

Dalam undang-undang No 21 Tahun 2008 dimuat dalam Pasal 4 ayat 1-4 dibunyikan sebagai berikut: “(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*naẓhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang RI, 2008).

Berdasarkan undang-undang ini, maka aktivitas kegiatan perbankan yang berbasis syariah harus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam bermuamalah. Nilai-nilai Islam tersebut harus melekat pada berbagai aktivitas perbankan baik secara implisit maupun eksplisit. Aktivitas perbankan yang secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan jasa kliring antar bank. Aktivitas ini semua harus berlandaskan nilai-nilai Islami.

Fenomena yang banyak terdengar dari masyarakat bahwa aktivitas perbankan syariah nyaris tidak ada perbedaan dengan sistem operasional perbankan konvensional. Berita ini kalau kita melihat dari satu aspek saja yaitu hanya melihat salah satu aktivitas yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat yaitu pembiayaan atau peminjaman yang dilakukan pada perbankan syariah. Namun masyarakat atau kita semua belum memahami atau bahkan tidak memahami bagaimana proses pemberian pinjaman yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Dengan kondisi ini saja membuat perbankan syariah agak kesulitan untuk cepat tumbuh kembang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Bank syariah merupakan perusahaan yang berorientasi profit dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam pencapaiannya. Untuk mendapatkan profit tersebut harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku, serta tingkat laba tidak menjurus pada eksploitasi, gangguan fungsi pasar, dan kejahatan sehingga penetapan harga yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat jelas tidak diperkenankan (Basah & Yusuf, 2013); (Istan et al., 2019). Selanjutnya bahwa pencapaian ekonomi terkait dengan keyakinan, ibadah, juga moral seorang muslim dan etika bisnis Islam yang utama adalah kejujuran, kebenaran, pemenuhan hak, dan tingkah laku baik (Al-Syatibi, 2003;

Mayangsari R & Noor, 2014). Pada tatanan bawah masyarakat menganggap bahwa tingkat laba atau keuntungan yang diambil oleh perbankan syariah sama saja atau bahkan lebih tinggi dari perbankan konvensional. Sehingga ada kesan di masyarakat bahwa perbankan syariah itu sama saja dengan perbankan konvensional.

Fakta lain adalah tampilan layanan baik dari sumberdaya manusia, fasilitas, dan perbankan syariah menampilkan nilai-nilai Islam yang sekarang ini sudah banyak ditiru dan diikuti oleh perbankan konvensional. Misalnya perbankan konvensional diizinkan untuk membuka unit layanan bisnis syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), sedangkan bank syariah sendiri tidak boleh membuka layanan konvensional. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin nilai-nilai Islam dalam aktivitasnya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka dalam tulisan kali ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa nilai-nilai Islam yang menjadi landasan operasional perbankan syariah?
2. Bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kandungan nilai-nilai Islam dalam aktivitas layanan perbankan?

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, maka ulasan penulis diharapkan dapat membantu baik masyarakat pengguna jasa perbankan syariah maupun pihak perbankan syariah dalam memberikan pencerahan tentang kandungan nilai-nilai Islam dalam kegiatan perbankan syariah.

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka akan dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Islam yang menjadi landasan operasional perbankan syariah

Agama Islam memiliki konsepsi nilai sebagai dasar kebenaran yang mengatur semua bidang kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik itu dalam hubungan vertikal dengan Sang Pencipta (*habl min Allāh*) maupun hubungan secara horizontal sesama manusia (*habl min an-nās*). “Adapun tiga nilai dalam ajaran Islam tersebut meliputi:

- a. Akidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

- b. Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminanna*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.
- c. Akhlak: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis Nabi saw yang menyatakan, “Tidaklah aku diutus kecuali untuk untuk menyempurnakan akhlak mulia” (Fitri, 2016); (Yunus, 2014).

Secara umum, prinsip bisnis dalam Islam menurut Qardhawi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akidah, Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Ta’ala maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.
2. Shiddiq, Sifat shiddiq mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah.
3. Fathanah, Sifat fathanah ini mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw.
4. Amanah/ jujur, Hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis.
5. Tabligh Kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik.
6. Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah, antara lain:
 - 1) Produk dan jasa yang dijual haram;
 - 2) Gharar Gharar adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas;
 - 3) Al-Gabn dan Tadlis Al Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah maupun lebih tinggi, sedangkan Tadlis

- adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi;
- 4) Riba Riba jual beli yaitu riba fadlal adalah kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tukar-menukar barang;
 - 5) Ihtikar Ihtikar adalah menimbun barang dengan harapan mendapatkan harga tinggi di kemudian hari;
 - 6) Mengurangi timbangan atau takaran (Qaradhawi, 1997; Qardhawi, 2001; Yusuf, 1999).

Selanjutnya berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas, maka kita dapat mengidentifikasi perbedaan dasar Bank Konvensional dan Syariah. Sesungguhnya terdapat lima poin perbedaan yang dapat dilihat dari kedua jenis bank tersebut, yaitu:

a. Fungsi dan Kegiatan Bank

Dalam menjalankan kegiatannya, bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sedangkan bank syariah, selain menjadi intermediasi, jenis bank yang satu ini juga memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan.

b. Prinsip Dasar

Pada bank konvensional maupun bank syariah. Prinsip pertama menyangkut nilai. Bank konvensional berprinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai. Prinsip kedua yaitu mengenai pandangan terhadap uang. Bank konvensional melihat uang sebagai komoditas. Artinya, uang dipandang sebagai barang yang dapat diperjual-belikan. Sementara itu, bank syariah memandang uang sebagai alat tukar. Jadi, dalam bank syariah, uang tidak dapat diperjual-belikan, namun dapat ditukarkan kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Prinsip ketiga menyangkut tentang pertumbuhan dana yang disimpan nasabah di kedua jenis bank tersebut. Di bank konvensional, uang akan bertumbuh dengan adanya pemberian bunga yang didapat dari pengelolaan pihak bank. Namun, bank syariah menolak sistem bunga tersebut, Untuk menumbuhkan uang nasabahnya, bank ini menerapkan sistem bagi hasil.

c. Sumber Likuiditas Jangka Pendek

Kedua jenis bank ini sama-sama memperoleh likuiditasnya dari dua sumber, yakni pasar uang dan bank sentral. Di Indonesia, yang dimaksud dengan bank sentral adalah Bank Indonesia. Hal yang membedakan antara likuiditas bank konvensional dengan bank syariah terletak di pasar uang.

Likuiditas bank konvensional dari pasar uang bebas didapatkan dari emiten mana saja. Sementara itu, bank syariah hanya mengambil sumber dari pasar uang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

d. Risiko Usaha

Mengenai risiko usaha, bank syariah menerapkan poin “*ringan sama dijinjing, berat sama dipikul*” antara bank dan nasabah. Hal ini membuat semua hal yang terjadi ditanggung secara bersama-sama, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Sementara itu pada bank konvensional biasa, pihak bank tidak berurusan dengan risiko yang mungkin dihadapi nasabahnya. Pihak nasabah juga tidak perlu memikirkan risiko yang mungkin terjadi kepada bank tempatnya melakukan transaksi keuangan ataupun menyimpan dana.

e. Struktur Pengawas

Untuk menghindari penyimpangan tujuan dan fungsinya, setiap bank memiliki dewan pengawas yang tersusun dalam struktur organisasi lembaga tersebut. Di bank konvensional, struktur pengawas dijabat oleh dewan komisaris. Namun di bank syariah, Anda akan menemui struktur pengawas yang lebih kompleks, mulai dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah, hingga dewan syariah nasional.

Fungsi bank dalam prinsip syariah meliputi: fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial (Antonio, 2016; Sukardi, 2016). Keempat fungsi bank tersebut diatas apabila diuraikan secara operasional adalah:

- a) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
- c) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- d) Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

Aspek Kelembagaan Bank Dalam Prinsip Syariah Pengertian syariah (UU No. 10/1998) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sedangkan perbankan syariah adalah sistem pelayanan perbankan yang berdasarkan syariah (hukum) Islam. Dimana untuk memulainya perlu dilandasi sebuah kesepakatan (akad) yang merupakan keterikatan antara bank syariah dan nasabahnya yang merupakan dasar untuk melakukan transaksi di bank syariah (Bankir Indonesia, 2014; Kodriyah; Suprihatin, Neneng Sri; Oktavianti, 2017; OJK, 2017; Sjahdeini, 2014).

Akad keterikatan yang dimaksud dalam prinsip syariah disini adalah menempatkan posisi bank syariah dan nasabah bank syariah dalam relasi azas kemitraan, keadilan, dan transparan, bukan relasi antara peminjam dan pemberi pinjaman. Selanjutnya berangkat dari prinsip ekonomi berdasarkan Islam dan azas kemitraan maka transaksi perbankan syariah harus memenuhi sejumlah unsur sebagai berikut :

1. Tidak mengandung unsur riba.
2. Tidak mengenal konsep “time-value of money”
3. Tidak memiliki potensi mencelakai/membahayakan pihak lain maupun diri sendiri,
4. Tidak ada unsur penipuan (gharār)
5. Tidak ada unsur judi (maisīr) (Janosik, 2005; Sjahdeini, 2014; Soemitra, 2019).

Sedangkan menurut Agustin ada tiga aktivitas keuangan yang harus berlandaskan etika bisnis Islam yaitu:

- a. Aktivitas perolehan dana. Harus memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna’, ijarah, sharf, wadi’ah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.
- b. Aktivitas pengelolaan aktiva. Memperhatikan prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bnk syariah atau reksadana syariah.
- c. Aktivitas penggunaan dana. Harus digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya (Agustin, 2017); (Amir Machmud, 2014; Machmud et al., 2018).

Kritik terhadap bank konvensional oleh konsep perbankan syariah bukanlah menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi

keuangan melainkan dalam karakteristik kegiatan bank konvensional masih terdapat unsur riba, judi (maysir), ketidakpastian (gharar), dan bathil. Dengan dilarangnya riba, maysir, gharar, dan bathil dalam transaksi perbankan maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Ada lima hal yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu (Haniffa & Hudaib, 2007): (1) filosofi dan nilai dasar organisasi; (2) provisi produk dan jasa bebas bunga; (3) pembatasan pada perjanjian yang diperbolehkan menurut syariat Islam; (4) fokus pada pengembangan dan tujuan sosial; (5) adanya review tambahan dari dewan pengawas syariah. Filosofi yang mendasari pengembangan perbankan syariah adalah untuk menyelamatkan jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan umat Islam dari transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam, khususnya transaksi dalam bidang perbankan. Keberadaan industri perbankan syariah yang menjunjung tinggi prinsip etika bisnis Islam adalah mutlak diperlukan sebagai fasilitator transaksi yang halal menurut syariat Islam.

Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional sehingga apabila perbankan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan bank konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perbankan syariah di masa depan.

Pendapat Ulama tentang Bunga Bank

Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi. Juhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama ”sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama’ terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank”. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu ‘ala al-Maududi Abdullah al-‘Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan

bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa (Hafnizal, 2017), (Qaradhawi, 1997; Qardhawi, 2001; Yusuf, 1999); Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Manfaat Menggunakan Produk Bank Syariah

Di bawah ini adalah manfaat-manfaat dari penggunaan produk bank syariah.

1. Terhindar dari Riba

Keuntungan pertama dari melakukan transaksi keuangan di bank syariah adalah terhindar dari riba. Karena di dalam Islam, riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Dengan menabung uang di bank syariah, akan menghindarkan Anda dari dosa riba.

2. Berdasarkan Syariah Islam

Manfaat kedua dari menabung di bank syariah adalah Anda juga turut serta dalam melaksanakan syariah Islam dan telah melakukan *muamalah* berdasarkan Islam. Hal ini tentu akan menghadirkan pahala bagi mereka yang melakukannya.

3. Keuntungannya Diberikan berdasarkan Bagi Hasil

Tidak seperti bank konvensional yang memberikan bunga kepada nasabahnya, di bank syariah keuntungan yang Anda dapatkan didasarkan pada sistem bagi hasil.

4. Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Meskipun berbasis syariah, bukan berarti uang yang ditempatkan tidak dijamin. Dana nasabah bank syariah tetap dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menanggung risiko kehilangan dana nasabah hingga Rp2 miliar.

5. Bank Syariah Sudah Dilengkapi Fasilitas *Net Banking*

Bank syariah di Indonesia saat ini sudah mengadopsi teknologi yang populer digunakan masyarakat. Bank syariah juga memberikan fasilitas berupa kemudahan melakukan transaksi perbankan melalui internet.

6. Sistem Bagi Hasil Lebih Adil dan Transparan

Keuntungan dari sistem bagi hasil adalah Anda terhindar dari risiko bunga yang menjadi riba. Selain itu, sistem bagi hasil akan menguntungkan pihak nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah.

7. Memberlakukan Saldo Tabungan yang Rendah

Salah satu keuntungan dari menabung di bank syariah adalah hampir semua bank syariah nasional memberlakukan saldo tabungan yang rendah kepada nasabah-nasabahnya. Nilai saldo minimal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka yang ingin memiliki tabungan dengan saldo mengendap yang nilainya kecil.

8. Penabung atau Nasabah adalah Mitra Bank

Tidak seperti bank konvensional, hubungan yang terjalin antara penabung dan bank lebih cenderung menjadi hubungan antara debitur dan kreditur. Sementara di bank syariah, pihak bank akan menganggap penabung adalah mitra sehingga berhak menerima hasil dari investasi yang ditanamkan di bank.

9. Dana Nasabah Dipergunakan Sesuai dengan Syariah

Salah satu keunggulan dan manfaat dari menabung di bank syariah adalah dana yang dimanfaatkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah. Sementara nasabah bank konvensional tidak akan tahu uangnya akan ditempatkan atau dipergunakan untuk apa sehingga tidak menutup kemungkinan keuntungan yang diperoleh karena riba.

10. Adanya Peringatan Dini tentang Bahaya karena Sifatnya yang Transparan

Manfaat yang satu ini mungkin tidak didapatkan jika Anda menabung di bank konvensional. Nasabah yang menabung di bank syariah akan diberikan isyarat bahwa terjadi sesuatu yang tidak baik. Dengan adanya informasi tersebut, nasabah bisa melakukan antisipasi terkait apa yang perlu mereka lakukan untuk menyelamatkan dananya.

11. Dana Ditujukan untuk Kepentingan dan Kemaslahatan Umat

Keunggulan yang Anda dapatkan bila menabung di bank syariah ialah dana yang disimpan ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Dengan kata lain, dana tersebut adalah dana umat yang didapatkan dari umat dan akan dikembalikan untuk kepentingan umat.

Karakteristik Bank Syariah

Pada poin-poin yang telah disebutkan perbedaan mendasar yang terdapat antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional memang sudah banyak dipahami oleh banyak orang mengenai sistem kerjanya

dan karakteristiknya. Begitu pula bank syariah yang juga memiliki cirinya tersendiri. Berikut beberapa karakteristik khas dari bank syariah yang mesti Anda tahu untuk memahami apa itu bank syariah yang sebenarnya.

1. Sistem Bagi Hasil

Pembeda paling jelas antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat dari sistem pertumbuhan dana simpanannya. Sistem bagi hasil menjadi ciri khas paten yang dimiliki oleh bank syariah. Ini berbeda dengan sistem bunga yang diberlakukan oleh bank-bank konvensional.

Sistem bagi hasil terjadi ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha. Dari kegiatan kerja sama tersebut, didapatkan untung yang nantinya kedua belah pihak akan membagi dua keuntungan tersebut sesuai kesepakatan. Namun jika kegiatan usahanya menimbulkan kerugian, pemilik modal dan pengusaha juga harus sama-sama menanggungnya.

Menariknya lagi, kesepakatan rasio bagi hasil dari kedua pihak tidak akan pernah berubah sampai kesepakatan baru yang dibuat dengan kesadaran bersama. Banyak orang melihat sistem ini lebih mengakomodasi keadilan dan transparansi sebab jika diterapkan sistem bunga, pengusaha dalam hal ini adalah pihak bank bebas dapat saja menaikkan atau menurunkan angka persen bunga sesuai keadaan bunga patokan maupun kondisi ekonomi.

2. Akad Transaksi

Yang dimaksud dengan akad dalam bank syariah adalah keputusan atau perjanjian yang telah dijadikan komitmen berdasarkan nilai-nilai syariah. Secara fikih atau sumber hukum Islam, akad dapat diartikan sebagai tekad dari pihak tertentu untuk menjalankan ketentuan yang muncul, baik dari satu pihak maupun dari kedua pihak.

Dalam bank syariah, akad transaksi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni akad transaksi yang mencari keuntungan dengan akad transaksi yang tidak mencari keuntungan. Akad-akad transaksi inilah yang menjadi produk pada bank syariah.

Akad transaksi atau yang mencari keuntungan terbagi menjadi dua produk, yakni pembiayaan dan pendanaan. Sementara itu, akad transaksi yang tidak mencari keuntungan terdiri atas tiga produk bank syariah, yaitu pendanaan, jasa pelayanan, dan kegiatan sosial.

3. Pola Produk

Jika bank konvensional menamai tiap produknya sesuai dengan aktivitasnya, bank syariah menerapkan pola untuk membedakan antar kegiatan

dari produk-produk yang diterbitkannya. Pola pada produk bank syariah juga bergantung dari akad transaksinya.

Secara umum, ada enam kegiatan yang biasa dipakai dan diatur bank syariah dalam tiap produk keuangannya, yaitu:

- a. Pola Titipan, menjunjung prinsip bahwa tiap barang ataupun aset nasabah adalah titipan yang mesti dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan sesuai kesepakatannya. Ada dua dasar yang harus dipahami dalam pola titipan, yakni *wadi'ah yadamanah* dan *wadi'ah yaddhamanah*. *Wadi'ah yadamanah* menyatakan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau pun kerusakan yang terjadi pada aset selama di luar kelalaian penerima titipan. Contohnya jika ada kerusakan akibat bencana alam, maka pihak penerima titipan berhak melepaskan tanggung jawabnya terhadap kondisi barang ataupun aset titipannya. Contoh produknya serupa safe deposit box. Sementara itu, *wadi'ah yad dhamanah* berarti penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau pun aset dari pemberi titipan sesuai izin yang telah diberikan. Namun harus dipastikan, penerima dapat mengembalikan barang dan aset tersebut dalam kondisi utuh. Produk dengan pola seperti ini bisa dijumpai dalam bentuk giro.
- b. Pola Pinjaman, pola pinjaman dalam bank syariah juga terbagi menjadi dua, yakni *qardh* dan *qardhul hasan*. Keduanya sama-sama ditujukan untuk produk pinjaman syariah. *Qardh* merupakan pola pinjaman kebaikan yang bersifat lunak atau tanpa imbalan saat pengembaliannya. Melalui *qardh*, masyarakat cukup mengembalikan uang sesuai jumlah pinjaman pokok tanpa harus memikirkan bunga atau pun biaya yang mesti diberikan kepada pihak bank. Pola yang satu lagi adalah *qardhul hasan*. Produk yang dihasilkan dari *qardhul hasan* ditujukan untuk membantu usaha kecil maupun aktivitas sosial. Dalam pemberian pinjaman, penerima bahkan tidak harus mengembalikan dana yang telah dipinjamnya tersebut.
- c. Pola Bagi Hasil Ada tiga jenis pola bagi hasil yang biasa digunakan oleh bank-bank syariah. Pola tersebut dibagi menjadi *mudharabah*, *musyarakah*, serta *mutanaqisab*. Di pola *mudharabah*, laba dibagi menurut rasio yang telah ditetapkan kepada bank yang memberi modal dan kepada nasabah yang memberikan keahlian. Pola ini pun mengandung dua tipe, yaitu *mutlaqah* yang merupakan kondisi pengelola dana diberikan keleluasaan, dan *muqayyadah* di mana nasabah dapat menentukan syarat dan batasan penggunaan kepada pengelola. Pola lain dari bagi hasil adalah *musyarakah*. Dalam penerapannya, bank dan nasabah berperan sebagai

mitra usaha yang memiliki kesepakatan rasio pembagian hasil dari tiap keuntungan atau pun kerugian yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, pola bagi hasil *mutanaqisab* menunjukkan situasi kerja sama antara bank dan nasabah. Pada kerja sama tersebut, salah satu pihak dapat membeli bagian yang dimiliki pihak lain.

- d. Pola Jual Beli, dalam jual beli, ada tiga pola yang diusung oleh bank syariah. Pertama adalah pola *murabahab*. Pola ini terjadi saat bank menyediakan barang atau pun aset yang diinginkan konsumen dengan imbalan yang telah disepakati. Di sini bank berperan sebagai perantara jual beli tersebut. Kedua adalah pola *salam*. Pola ini layaknya pemesanan barang atau pun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, pembayaran dilakukan pada awal transaksi, sedangkan barang baru akan diberikan di kemudian hari. Ketiga adalah pola *istishna*. Pola ini hampir sama dengan *salam*. Hal yang membedakannya ada di sistem pembayarannya. Dengan pola *istishna*, nasabah dapat melakukan pembayaran di tengah atau pun akhir pemesanan.
- e. Pola Sewa Menyangkut kegiatan atau pun produk sewa, ada dua pola yang digunakan oleh bank syariah. Pola pertama dikenal sebagai *ijarah*, sementara yang kedua disebut sebagai *ijarah wa iqtina*. *Ijarah* merupakan kegiatan penyewaan di mana bank dapat menyewakan barang ataupun aset tertentu kepada nasabah dengan imbalan jasa sewa. Sementara itu, *ijarah wa iqtina* lebih mengarah pada pola sewa-beli dengan perjanjian untuk menjual atau pun menghibahkan barang atau pun aset tersebut pada akhir masa sewa.
- f. Pola Lainnya Kegiatan bank yang beragam membuat bank syariah ikut menentukan berbagai pola yang tidak termasuk dalam lima kegiatan di atas. Hingga kini, terdapat enam pola lain yang aturannya telah dipakai oleh bank syariah. Kelima pola tersebut antara lain adalah pola perwalian yang sering disebut sebagai *warkalah*. Di sini, bank diberikan kuasa oleh nasabah untuk melakukan transaksi keuangan yang mewakilinya, seperti pembayaran gaji maupun transfer. Penerima kuasa akan menerima imbalan dari nasabah setelah transaksinya berhasil. Selain perwalian, ada pola *rahn* yang menjadi produk pelimpahan kekuasaan dari nasabah, seperti dalam produk gadai. Ada pula pola tentang pengalihan tanggung jawab yang dikenal sebagai *kafulah*. Selain itu, ada *hivalah* yang menjadi pola dalam pengalihan utang maupun piutang. Selanjutnya ada pola *sbarf*. Pola ini dipakai dalam jual-beli valuta asing. Yang terakhir adalah pola *ujrah*, di mana bank akan selalu mendapat imbalan dari transaksi yang dilakukannya.

2. Upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kandungan nilai-nilai Islam dalam aktivitas layanan perbankan

Karena dari sisi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan berkeyakinan penuh bahwa dalam konsepsi perbankan syariah terdapat nilai-nilai:

- a. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam;
- b. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam;
- c. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank;
- d. Ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah atas jalannya usaha bank syariah (Fitri, 2016).

Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kandungan nilai-nilai Islam dalam aktivitas perbankan syariah adalah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti seminar, workshop, pelatihan, famplet, brosur, job fair dan lain-lain. Berbagai kegiatan ini harus dilakukan secara komprehensif oleh berbagai pihak agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan berkesinambungan.

Selanjutnya semua komponen yang bekepentingan dalam memasyarakatkan perbankan syariah kepada masyarakat, maka pihak-pihak seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pengawas Syariah, dan Perbankan Syariah serta Pemerintah baik pusat maupun daerah harus konsisten dalam memasyarakatkan dan mengembangkan Bank Syariah ini.

Sementara dari sisi bank, bahwa agar keyakinan nasabah ini direspon sebagai pemberian amanah maka kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional perbankan syariah maka harus memiliki kualifikasi yang shidiq (benar dan jujur), tabligh (mengembangkan lingkungan/bawahan menuju kebaikan), amānah (dapat dipercaya), fathānah (kompeten dan profesional) dan memiliki komitmen dalam pengembangan SDM secara berkelanjutan.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang untuk selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Perkembangan industri keuangan syari'ah khususnya sektor perbankan di negara Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan LKS. Sistem tata kelola lembaga keuangan syari'ah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syari'ah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen perbankan syari'ah. Oleh karena, perbankan syari'ah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syari'ah (Rama, 2014).

Sistem tata kelola yang dimaksud adalah sistem tata kelola syari'ah atau biasa disebut dengan istilah syariah governance (SG) bagi lembaga keuangan syari'ah. SG menurut Isra memiliki kesamaan dengan konsep hisbah dalam sejarah. Dengan demikian sistem tata kelola syari'ah merupakan sistem tata kelola yang unik yang hanya ada pada lembaga keuangan syari'ah. Salah satu elemen penting dari sistem tersebut adalah keberadaan dewan syari'ah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan (Rahman, 2008).

Tata kelola syari'ah menurut IFSB ialah "Seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syari'ah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syari'ah melalui proses penerbitan fatwa syari'ah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syari'ah. Definisi tersebut memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu (1) struktur organisasi perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syari'ah dan fungsi yang koheren seperti Divisi Syari'ah dan Internal Audit; (2) pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan terhadap syari'ah; dan (3) proses review terhadap pemenuhan syari'ah (Khan & Jabeen, 2009); (OJK, 2017).

Sangat penting untuk memastikan semua aktivitas, transaksi dan operasi LKS mematuhi prinsip-prinsip syari'ah dan moral Islam. Dewan Pengawas Syari'ah sebagai elemen penting dari syariah governance menjadi lembaga ideal yang dapat menjalankan fungsi muhtasib sebagai institusi internal dari sistem

hisbah dalam konteks LKS modern. ruang lingkup kerangka syariah governance meliputi aspek ex-ante dan ex-post kepatuhan syari'ah.

Ex-ante merujuk kepada proses penerbitan fatwa dan penyebarannya. Sementara ex-post merujuk kepada proses review sharia internal secara periodik dan tahunan. Adapun proses ex-ante melalui tahapan pengajuan proposal produk, dokumentasi hukum, review syari'ah dan penyebaran fatwa. Sementara proses ex-post terdiri dari review syari'ah secara berkala dan tahunan (Rama, 2015).

Status keorganisasian DSN adalah organisasi non-pemerintah tetapi fatwa yang dikeluarkannya bersifat mengikat bagi industri keuangan syari'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 UU No.21/2008 tentang Perbankan Syari'ah. Pada level perusahaan terdapat DPS yang melakukan pengawasan pelaksanaan fatwa DSN tentang prinsip syari'ah. Proses pengangkatan anggota DPS merupakan hasil kerjasama antara Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan DSN. Dengan demikian, DPS berperan dalam menjembatani hubungan antara BI sebagai organisasi pemerintah dan DSN sebagai organisasi nonpemerintah.

Tugas dari Dewan Pengawas Syari'ah menurut UU No.21/2008 tentang Perbankan Syari'ah adalah untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Operasionalisasi dari tugas DPS tersebut selanjutnya yaitu: (i) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; (ii) menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank; (iii) memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; (iv) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; dan (v) menyampaikan laporan hasil pengawasan syari'ah sekurang kurangnya setiap enam (6) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia, OJK (Rama, 2015). (Ahmad Syaroza, 2008).

Fatwa Pertama: tentang Murabahah Kontemporer. Akad Murabahah adalah satu produk LKS yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad murabahah,

sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah. DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014).

Tentu anda mengetahui bahwa perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank maupun LKS tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN MUI di atas secara terang.

Fatwa Kedua, Tentang Akad Mudharabah (Bagi Hasil). Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktek LKS perlu ditinjau ulang.

Fatwa Ketiga, Tentang Gadai Emas, Gadai emas merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak orang sejak harga emas terus membumbung tinggi.

Dewan Syariah Nasioanal melalui fatwanya no: 25/DSN-MUI/III/2002 membolehkan praktek ini. Pada fatwa tersebut DSN menyatakan: “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.” Sementara dalam fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas, dinyatakan: “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Ketidak syariahan bank syariah justru dalam taraf mendasarnya yaitu ketidak sesuaian operasional dengan fatwa DSN, Menerapkan Hilah dengan mengistinbathkan dengan hal yang tidak sesuai. Ketidak sesuaian bank syariah ini pada akhirnya diakui oleh Direktur direktorat perbankan syariah Mulya E. Siregar menyatakan bahwa perbankan syariah belum benar benar

menerapkan system syariah. Menurut Mulya tidak ada Bank Syariah yang benar benar syariah, bahkan IDB sekalipun.

Ungkapan Direktur BI ini merupakan sesuatu yang riil bahwa perbankan maupun LKS belum ada yang benar benar berprinsip sesuai syariah walaupun sangat mengejutkan karena segenap peraturan, bahkan dibuat struktur guna pengawasan pun masih belum sepenuhnya sesuai syariah. Menjadi kebutuhan untuk LKS agar dapat hidup dan berkembang dan yang terpenting sesuai dengan syariah.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut: Nilai-nilai Islam yang harus dimunculkan dalam aktivitas bank syariah baik implisit maupun eksplisit adalah akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian syarat utama dalam bisnis bank syariah tersebut adalah akidah, shiddiq, fathanah, amanah/ jujur, tabligh dan tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah. Upaya dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terhadap kandungan nilai-nilai Islam dalam aktivitas bank syariah adalah perlunya sinergitas berbagai pihak dalam menyentuh masyarakat sasaran pengguna layanan jasa perbankan. Kemudian konten dan konteks kegiatan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan hanya bersifat seremonial. Penekanan kepada masyarakat bahwa jasa layanan perbankan syariah adalah bank tersebut tidak menempatkan uang sebagai komoditas yang diperdagangkan, bank tersebut tidak menerapkan suku bunga atas balas jasa layanan pembiayaan, tetapi dengan bagi hasil atau nisbah marjin yang disepakati di awal, adanya akad sebagai bentuk keterikatan berdasarkan azas kemitraan, keadilan, dan transparan, tidak mengenal konsep “time-value of money”, tidak memiliki potensi mencelakai/membahayakan pihak lain maupun diri sendiri,

Daftar Pustaka

- Agustin, H. (2017). Analisis Keuangan Kelayakan Bisnis Syariah Hamdi's Model (Studi Kasus Usaha Swalayan Syariah Di Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i3.125>
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, Tt)*.
- Amir Machmud. (2014). Struktur Industri Perbankan Syariah di Indonesia. *QE Journal*.
- Antonio, M. S. (2016). Bank Islam: Teori dan Praktek. *Economic Modelling*.

- Bankir Indonesia, I. (2014). Memahami Bisnis Bank Syariah. *Jakarta: Gramedia Pustaka.*
- Basah, M., & Yusuf, M. (2013). Islamic Bank and Corporate Social Responsibility (CSR). *European Journal of Business and Management.*
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). HIMPUNAN FATWA KEUANGAN SYARIAH. In *PENERBIT ERLANGGA.*
- Fitri, M. (2016). PRINSIP KESYARIAHAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam.*
<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>
- Hafnizal, V. M. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Tasyri'.*
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic Banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics.*
<https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Indonesia, P. R. (2008). UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Undang Undang Republik Indonesia.*
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Istan, M., Asnamawati, L., & ... (2019). Financial Inclusion and Poverty Alleviation in Rejang Lebong Regency. *Madania: Jurnal*
- Janosik, S. M. (2005). Bank Syariah. *NASPA Journal.*
- Khan, S., & Jabeen, Z. (2009). Comparative study of Assessment of Capital Adequacy Ratio (CAR) for Islamic Banks in Pakistan under Basel II and IFSB formulae for Capital Adequacy. *Management.*
- Kodriyah; Suprihatin, Neneng Sri; Oktavianti, S. (2017). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS DALAM MENDETEKSI PRAKTIK MANAJEMEN LABA. *Jurnal Akuntansi.*
- Machmud, A., Herlinawati, E., & Supriyadi, D. (2018). The Determinants of Sharia Banking Finance Performance in Indonesia. *Advanced Science Letters.*
<https://doi.org/10.1166/asl.2018.11223>
- Mayangsari R, G. N. kartika, & Noor, H. H. (2014). Konsep Maqashid al-Syariah dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah.*
- Noor, M. A. N. M., & Ahmad, N. H. B. (2012). The Determinants of Islamic Banks' Efficiency Changes: Empirical Evidence from the World Banking Sectors. *Global Business Review.*
<https://doi.org/10.1177/097215091201300201>

- OJK. (2017). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Putritama, A. (2018). PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>
- Qaradhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. In *Gema Insani*.
- Qardhawi, Y. Al. (2001). Halal dan Haram dalam Islam. In *Pustaka Nasional Pte Ltd*.
- Rahman, A. R. A. (2008). Shari ' Ah Audit for Islamic Financial Services : the Need and Challenges. *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance*.
- Rama, A. (2014). POTENSI PASAR PRODUK HALAL DUNIA. *Fajar*.
- Rama, A. (2015). Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Bimas Islam*.
- Sjahdeini, S. R. (2014). Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. In *Perbankan Syariah*.
- Soemitra, A. (2019). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. In *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Sufian, F., & Akbar Noor Mohamad Noor, M. (2009). The determinants of Islamic banks' efficiency changes: Empirical evidence from the MENA and Asian banking sectors. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/17538390910965149>
- Sukardi, B. (2016). Inklusivisme Maqâsid Syari'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia. *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.375>
- Undang-Undang RI, P. S. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. In *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Yunus, H. M. (2014). Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer. *Anida'*.
- Yusuf, Q. (1999). Norma dan Etika Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain. In *Gema Insani*.

Biodata Penulis



Muhammad Istan, lahir di Desa Keban Agung Lahat, 19 Pebruari 1975. Pendidikan Sekolah Dasar ditamatkannya pada SDN No.208 Palembang tahun1987, pendidikan SMP-nya ditamatkannya pada SMP Swasta PIONIR Palembang pada tahun 1990, pendidikan SMA-nya jurusan IPA ditamatkannya pada SMA Swasta PGRI Betung di Betung, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan pada tahun 1993. Tahun 1995, memasuki Fakultas Ekonomi dan mengambil jurusan Manajemen di Universitas Terbuka pada UPBJJ Bengkulu dan gelar Sarjana Ekonomi diperolehnya pada tahun 2000. Magister Pendidikan pada FKIP Universitas Bengkulu Tamat Tahun 2008, Magister Manajemen pada FEB Universitas Bengkulu Tamat Tahun 2015. Tahun 2015 Menempuh Pendidikan Program Doktor pada FEB Universitas Bengkulu dan tamat tahun 2018. Pernah bertugas di SMPN 2 Kotapadang dan SMA Tamansiswa Curup. Sejak tahun 2010 sampai sekarang ini bertugas di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Kabupaten Rejang Lebong. Beliau telah menikah dengan Desi Arisandi dan dikarunia 3 (tiga) orang Anak yang bernama Delfiani Anggias Putri (19 tahun), dan Azizah Al-rahma Putri (10 tahun) serta Azimah Khoirunnisa (06 tahun). Sekarang ini beliau bertempat tinggal di Jalan Madrasan No. 03 Dusun IV Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kodepos 39119 HP No.085267073796.

SOSIALISASI ANAK DIDIK; Pendekatan dan Proses Transfer Kompetensi Deri Wanto

Pendahuluan

Individu adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Aristoteles mengungkapkan bahwa individu adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, individu dengan individu lainya atau dengan kelompok lainnya selalu berhubungan erat dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan bersosialisasi individu dapat mengerti, memahami, dan mempelajari tingkah laku, kebiasaan, keterampilan, dan sebagainya. Karena hal tersebut, individu membutuhkan bimbingan, dorongan yang positif agar dapat menjadi individu yang tangguh.

Anak didik dalam lingkungannya tentu akan mengalami proses sosialisasi, anak didik adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Mengenai proses sosialisasi anak didik, kita akan melihat dari apa yang akan dipaparkan dibawah ini.

Sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial yang berlangsung dalam interaksi individu dengan lingkungannya . Dalam proses sosialisasi individu belajar tingkah laku, kebiasaan serta pola-pola kebudayaan lainnya, juga keterampilan-keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Jadi, segala sesuatu yang dipelajari individu dalam interaksinya (berupa kebiasaan, tingkah laku, dan keterampilan sosial) dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah sosialisasi.

A. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi dalam sosiologi pendidikan merupakan kajian yang sangat utama, karena untuk mempelajari manusia perlu diperhatikan dan dipelajari bagaimana kepribadianya (*personality*). Untuk melihat bagaimana jati diri seseorang (*self*) maka pendekatan yang harus kita lihat adalah pendekatan sosiologi dengan mengacu kepada bagaimana seseorang tersebut bisa bersosialisasi dan bergaul di tengah-tengah masyarakat.

Ada beberapa pengertian yang dimunculkan oleh para tokoh sosiologi mengenai arti dari sosialisasi itu sendiri, diantaranya Horton dan Hunt seperti yang dikutip oleh Damsar menjelaskan bahwa sosialisasi sebagai suatu proses dengan mana seseorang menghayati (mendarah dagingkan)

norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik.²⁹⁸

Brinkerhoff dan White justru memberikan penekanan yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Horton dan Hunt. Bagi Brinkerhoff dan White, sosialisasi diberi pengertian sebagai suatu proses belajar peran, status dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial. Ada juga pengertian sosialisasi yang dikemukakan oleh Zanden yang mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.²⁹⁹

Jika dipahami dari ketiga pengertian sosialisasi tersebut, maka sosialisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses, yang mana proses tersebut merupakan perubahan sikap, tingkah laku, etika, nilai, norma dan pengetahuan yang diperoleh dalam kontak sosial agar seseorang mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

S. Nasution menuturkan bahwa sosialisasi merupakan proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan dalam berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan.³⁰⁰

Abdullah Idi mengartikan sosialisasi sebagai suatu proses belajar atau pembelajaran bagi setiap orang tentang segala sesuatu di dalam masyarakat agar nanti dapat hidup dengan layak di tengah masyarakat.³⁰¹ Sosialisasi dalam artian proses belajar yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dan terkontaminasi oleh aturan dan nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Tujuan sosialisasi yang hendak dicapai nantinya ialah untuk memudahkan dan menjadikan seseorang mampu menjalin hubungan sosial di tengah-tengah masyarakatnya.

Jika disandingkan bagaimana hubungan sosialisasi dengan filsafat pendidikan maka kita akan memperoleh kutipan berikut, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan itu ialah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan

²⁹⁸ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 65

²⁹⁹ *Ibid.*, hal. 66

³⁰⁰ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 126

³⁰¹ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 100

itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat dicapai seperti yang dicita-citakan.³⁰² Sosialisasi terhadap anak didik merupakan bagian dari upaya yang dilakukan manusia secara sadar dalam rangka pengembangan kemampuan sepenuhnya. Oleh sebab itu seluruh perangkat yang terkait dengan sosialisasi perlu tujuan yang jelas dan sampai kepada yang direncanakan.

Sosialisasi juga erat kaitannya dengan pendidikan Islam, karena yang *pertama* pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. *Kedua* pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.³⁰³

Dengan aktivitas dan sistem, sosialisasi berupaya melakukan pendekatan terhadap anak didik dengan berbagai cara dari bermacam-macam kondisi atau keadaan. Sosialisasi anak didik itulah yang dinamakan proses dari pendidikan, bagaimana melakukan pendekatan dan transfer kompetensi kepadanya.

Urgensi Anak Didik

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah individu/ anak didik yang mengalami perubahan dan perkembangan dan memerlukan bimbingan serta arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktur proses pendidikan.

Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis.³⁰⁴

Istilah peserta didik bermacam-macam, pada pendidikan formal disebut dengan "siswa/ peserta didik", pendidikan non formal mengistilahkannya sebagai "warga belajar/ peserta belajar", dunia pesantren

³⁰² Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan; Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. Ke IV, hal. 13

³⁰³ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), cet. Ke III, hal. 14

³⁰⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hal. 77

lebih identik dengan "santri", dan pendidikan keluarga dikenal dengan sebutan "anak".

Sebagai individu yang sedang mengalami fase perkembangan, tentu peserta didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan untuk menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan ketika peserta didik berada pada usia balita seorang selalu banyak mendapat bantuan dari orang tua maupun dari saudara yang lebih tua. Dengan demikian peserta didik dapat disimpulkan sebagai *raw material* yang harus diolah dan di bentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa peserta didik memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sebuah lingkungan, seperti halnya sekolah, keluarga, pesantren dan bahkan dalam lingkungan masyarakat. Dengan diakuinya keberadaan seseorang peserta didik dalam konteks kehadiran dan keindividuannya, maka tugas yang harus dilakukan oleh agen pendidik adalah memberikan arahan dan bimbingan serta bantuan kepada peserta didik menuju kesempurnaan atau kedewasaannya.

Jenis Sosialisasi

Menurut Damsar ada beberapa jenis sosialisasi antara lain sosialisasi berdasarkan kebutuhan, sosialisasi berdasarkan cara yang dipakai, dan sosialisasi berdasarkan keberadaan perencanaan.³⁰⁵

1. Sosialisasi Berdasarkan Kebutuhan

Jika dilihat dari kebutuhannya maka sosialisasi diklasifikasikan menjadi sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer merupakan kebutuhan sosial primer bagi anak manusia yang apabila mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sosial primer, maka mereka akan mengalami kepincangan sosial dalam bermasyarakat. Sosialisasi ini merupakan suatu proses belajar serta bagaimana anak menerima sistem nilai, pengetahuan, norma, sikap serta dapat berperan aktif dan menjadi anggota masyarakat.

Sedangkan sosialisasi sekunder menurut Berger dan Luckmann yang dikutip oleh Damsar adalah setiap proses selanjutnya yang mengimbas individu yang telah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dari dunia objektif masyarakat. Lebih lanjut Henslin menambahkan bahwa sosialisasi sekunder dikenal juga sebagai resosialisasi, secara harfiah berarti sosialisasi kembali, yaitu suatu proses

³⁰⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan, op.cit.*, hal. 66

mempelajari norma, nilai, sikap, dan perilaku baru agar sepadan dengan situasi baru yang mereka hadapi dalam kehidupan.³⁰⁶

2. Sosialisasi Berdasarkan Cara yang Dipakai

Sosialisasi dalam bentuk ini dapat berlangsung dalam dua bentuk:

1). Sosialisasi represif ialah sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan anak dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru. 2). Sosialisasi partisipatif ialah sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap perilaku anak yang baik.³⁰⁷

Pada sosialisasi berdasarkan cara yang digunakan dapat membentuk kepribadian anak dalam hubungan sosial, penugasan, kemampuan anak untuk berkelompok, dan kemandirian serta memimpin dirinya sendiri. Dari sosialisasi represif, anak serasa dikekang dan tidak mampu berdiri di atas kemampuan dan kemandiriannya sendiri. Sedangkan sosialisasi partisipatif akan memberikan kebebasan positif yang dapat menumbuhkan anak menjadi pribadi yang mandiri dan mempunyai intensitas sosial yang baik.

3. Sosialisasi Berdasarkan Keberadaan Perencanaan

Jenis sosialisasi ini dibagi atas dua, yakni sosialisasi berdasarkan perencanaan dan tanpa perencanaan.³⁰⁸ Sosialisasi berdasarkan perencanaan merupakan sosialisasi dilakukan atas dasar rencana yang berkelanjutan dan sistematis. Adapun sosialisasi tanpa perencanaan terjadi dalam suatu proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat, misalnya dalam keluarga, kelompok teman sebaya, atau lingkungan tempat tinggal.

Dari pembagian sosialisasi berdasarkan keberadaan perencanaan di atas maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi berdasarkan perencanaan mengacu kepada lembaga formal dan nonformal. Sedangkan sosialisasi tanpa perencanaan yang mengacu kepada pendidikan informal.

Sosialisasi yang berdasarkan atas perencanaan memiliki program yang telah direncanakan di awal, memiliki tujuan instruksional umum dan khusus, bahan ajar, media, teknik dan direncanakan secara struktur serta memiliki tingkat penilaian. Sosialisasi tanpa perencanaan hanya dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan sosial. Sosialisasi ini hanya memberikan contoh sikap, tingkah laku dan etika kepada individu lain untuk diteladani dan diikuti.

³⁰⁶ *Ibid.*, hal 67

³⁰⁷ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: LPFE, 2004), hal. 31

³⁰⁸ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan, op cit.*, hal. 69

Pelaku Sosialisasi

Sosialisasi menunjukkan pada semua faktor dan proses yang membuat setiap manusia menjadi selaras dalam hidupnya di tengah-tengah orang lain. Setiap orang akan memperoleh proses belajar tentang kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat berbagai aturan, norma dan tradisi. Proses ini bertujuan agar seorang dapat menjalani hidup di tengah masyarakat secara layak. Seorang, dalam hal ini perlu memperoleh beragam pengetahuan tentang masyarakat melalui proses pembelajaran sosial.³⁰⁹

Untuk mencapai hal di atas, maka perlu adanya agen sosialisasi karena individu memerlukan proses bimbingan dari agen sosialisasi. Damsar menyebutkan ada beberapa agen sosialisasi antara lain; keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, agama, lingkungan tempat tinggal, dan tempat kerja. Agen inilah yang dipandang berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan-harapan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat.³¹⁰

1. Keluarga

Lingkungan pendidikan pertama yang akan diterima oleh anak ialah lingkungan keluarga, karena dalam keluarga inilah anak akan menerima berbagai macam sosialisasi baik dalam pendidikan maupun bimbingan. Keluarga juga memberikan sosialisasi yang signifikan terhadap anak dikarenakan sebagian besar kehidupannya ada dalam lingkungan keluarga.

Ada tugas penting dari keluarga terhadap anak yakni sebagai peletak pondasi akhlak dan agama. Sebagian besar sikap dan sifat anak diadopsi dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang karena sosialisasi yang anak terima hampir setiap waktu adalah sosialisasi keluarga.

Henslin menemukan bahwa kelas sosial suatu keluarga mempengaruhi cara dan isi sosialisasi dalam keluarga. Pada kelas pekerja, orang tua cenderung memperhatikan nilai-nilai konformitas seperti taat, rapi, dan bersih kepada anak-anak mereka. Agar anak-anak mereka dapat menginternalisasikan nilai-nilai ketaatan, maka orang tua akan cenderung menggunakan hukuman fisik. Sedangkan orang tua dari kelas menengah cenderung mengembangkan rasa ingin tahu, ekspresi

³⁰⁹ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan individu, masyarakat dan pendidikan, op cit.*, hal. 100

³¹⁰ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan, op cit.*, hal. 70

diri, dan pengendalian diri terhadap anak-anak mereka. Oleh karenanya, orang tua dari kelas menengah cenderung mengembangkan motivasi dan penggunaan nalar bagi anak-anak mereka ketimbang ancaman dan hukuman fisik.³¹¹

Dari penelitian Henslin di atas dapat dilihat bahwa pola pertama yakni pada kelas pekerja, orang tua yang selalu disiplin di kantor dan pada atasannya akan memberikan pengalaman serta penerapan kondisi kerjanya terhadap anak pada saat mereka berada di tengah-tengah keluarga. Mereka memandang pola ini sangatlah penting untuk disosialisasikan serta diinternalisasikan kepada anak agar nantinya mereka dapat mengikuti apa yang mereka dapat dan rasakan pada saat itu. Pola kedua orang tua dari kelas menengah menerapkan kepada anaknya bahwa keberhasilan dan kesuksesan hidup terletak pada pengambilan keputusan dan inisiatif.

Dari dua pola di atas dapat dilihat betapa besar tanggung jawab orang tua/ lingkungan keluarga dalam pelaksanaan sosialisasi kepada anak. Lingkungan keluarga merupakan wadah bagi anak untuk mendapatkan pengetahuan dan fungsi sosial bagi mereka. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa lingkungan keluarga bertanggung jawab terhadap penanaman nilai-nilai sosial anak.

2. Sekolah

Lembaga pendidikan membantu lingkungan keluarga dalam mendidik, mengajar, memperlurus dan memperbaiki tingkah laku anak yang di bawa dari lingkungan keluarganya.

Dalam perkembangan sosialisasi anak didik di sekolah, peranan yang diberikan sekolah itu bisa dalam bentuk belajar bergaul dengan sesama individu, guru, dan karyawan. Sekolah juga mengajarkan anak didik untuk taat kepada aturan, dan mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, nusa bangsa dan negara.

Kamanto Sunarto mengutip pendapat Dreeben,³¹² seorang anak belajar kemandirian lebih intensif di sekolah dibandingkan di tempat lain. Ketika di rumah seorang anak dimungkinkan memperoleh bantuan

³¹¹ Henslin J.M, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, (terj.), Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 77

³¹² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi, op cit.*, hal 25

anggota keluarga (orang tua dan para saudaranya) untuk melaksanakan bermacam tugas dan pekerjaan, sedangkan di sekolah sebagian tugas dan pekerjaan dilaksanakan secara mandiri yang disertai dengan tanggungjawab. Guru menuntut kemandirian dan tanggungjawab pribadi peserta didik terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan. Kerjasama hanya dibenarkan bilamana tidak meyeritai unsur penipuan atau kecurangan.

Selanjutnya sosialisasi yang diberikan oleh sekolah kepada anak didik adalah nilai prestasi. Posisi anak didik di antara peserta didik lainnya tergantung kepada raihan prestasi yang dicapai oleh anakini, yang akan diperlihatkan oleh ranking nilai rapaor atau hasil ujian lainnya. Sekolah memotivasi anak didik hampir disetiap aktivitasnya di sekolah, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, untuk mengembangkan kemampuan dan bersaing untuk meraih prestasi dan menghindari kegagalan. Semua ini dipandang akan mempengaruhi peran yang akan dimainkan di masa yang akan datang.

Sekolah juga mensosialisasikan anak didik secara universal, yaitu perlakuan yang sama pada setiap anak didik. Pada saat peserta didik berada di sekolah, mereka diperlakukan sama antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan latar belakang status sosial ekonomi tidak menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap peserta didik. Perlakuan berbeda terhadap peserta didik bilamana seorang siswa tidak mengindahkan nilai dan aturan yang berlaku sehingga dia diperlakukan berbeda dengan memberikan hukuman atau suatu penyadaran sosial.

Guru di sekolah juga mengajarkan kepada anak didik tentang nilai spesifisitas. Seorang anak akan ditangani secara spesifik terhadap apa yang dikerjakannya. Apabila anak didik memiliki kelemahan atau kekeliruan dalam suatu bidang kegiatan, maka dia dipandang lemah di bidang itu saja. Tidak pada bidang yang lain, sehingga keunggulan anak didik pada bidang yang lain akan mendapat pujian dari guru.

Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa sebagian besar sosialisasi dilaksanakan oleh sekolah, kenyataan ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya sekolah dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga sekolah dianggap sebagai penerus dari kehidupan keluarga ke dalam kehidupan masyarakat.

3. Peer Group

Kelompok teman sebaya atau yang dikenal dengan *peer group* ialah sekelompok individu yang memiliki umur yang hampir sama, status dan kedekatan yang telah lama dibina dalam pergaulan sehari-hari.

Peer group memiliki daya paksa bagi individu yang masuk ke dalamnya. Kelompok teman sebaya akan memandang jika individu dalam kelompoknya tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, maka individu itu dianggap bukan kelompok mereka. Biasanya kelompok teman sebaya menyukai secara bersamaan apa yang dilakukan oleh anggota kelompok mereka.

Kita dapat melihat ketika kelompok teman sebaya melakukan demonstrasi maka seluruh individu yang tergabung dalam kelompok itu akan ikut turun kejalan, meneriakan aspirasi mereka, bahkan bentrok dengan aparat kepolisian secara bersama-sama dengan kelompoknya. Hal positif juga tercermin pada kelompok teman sebaya ketika banyak anggota dalam kelompoknya yang bercita-cita menjadi TNI, POLRI, sarjana, maka individu yang lain juga akan demikian.

4. Media Massa

Secara tidak sadar individu belajar dengan mendapatkan informasi secara insidental dalam berbagai situasi sambil mengamati kelakuan orang lain, seperti membaca buku, menonton TV.³¹³ Pengaruh media massa seperti media cetak dan media elektronik memegang peranan penting dalam membentuk karakter, pola pikir, dan tindakan anak.

Perkembangan teknologi diibaratkan seperti dua sisi mata uang, ia memiliki dampak positif dan negatif. Dalam perkembangan teknologi dapat membantu manusia untuk mendekatkan jarak dan memudahkan pekerjaan. Teknologi seperti radio, TV, internet dan lain sebagainya dapat merubah dan membentuk karakter manusia menjadi baik. Meningkatkan pemahaman akan nilai, aturan dan norma serta memberikan pengetahuan terhadap individu dan efektifitas individu dalam hubungannya dengan masyarakat.

Sebaliknya teknologi juga dapat merubah karakter individu menjadi karakter yang keras dan pribadi buruk. Dengan pemahan yang salah serta penyalahgunaan penggunaan teknologi membuat individu ingin melakukan dan mempraktekkan peran yang ia tonton itu. Dampak negatif media massa inilah yang sering menyebabkan pelanggaran

³¹³ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan, op cit.*, hal. 101

asusila, pornografi, pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya yang merupakan hasil dari meniru dan mencontohkan terhadap yang ditontonnya.

Dalam mengantisipasi dampak negatif media massa tersebut maka diperlukan bimbingan orang tua yang harus mengawasi informasi yang masuk ke dalam ruang privat keluarganya. Dalam hal ini orang tua masa kini mempunyai tugas ekstra keras jika dibandingkan dengan orang tua masa dulu dalam mensosialisasikan nilai, aturan dan norma bagi anak-anaknya.

5. Agama

Pengertian agama secara ringan yang sering kita temui dari berbagai bahan bacaan berasal dari bahasa *Sangsekerta* (A = tidak, gama = tak teratur/ kacau) agama berarti tidak kacau, melainkan teratur. Dalam bahasa latin "agama" sama dengan "ikatan". Bahasa Belanda menyebutkan agama dengan *relige* dan dalam bahasa Inggris "*religion*".

Rangkuman ilmu perbandingan agama dan filsafat karangan Ali Anwar Yusuf dan Tono mengutip pengertian agama dari berbagai ahli sebagai berikut. Agama adalah hubungan yang tetap antara diri manusia dan bukan manusia yang bersifat suci dan supernatur, dan yang bersifat berada dengan sendirinya, yang mempunyai kekuasaan absolut/ mutlak (Prof. Dr. Bauquest). Sedangkan Emil Durkheim mendefinisikan agama sebagai suatu keseluruhannya yang bagian-bagiannya saling bersandar, terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan penyembahan, semuanya dihubungkan dengan hal-hal yang suci dan mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat.³¹⁴

Agama tidak hanya mengatur hubungan *vertikal* antara manusia dan Tuhannya saja, tetapi agama juga merambah dan mempengaruhi sikap ekonomi, tindakan sosial, dan aktivitas budaya manusia. Bagaimana agama dapat melakukan sosialisasi terhadap individu pemeluknya? Hal ini dapat dilihat ketika agama mengatur dan menerapkan aturan yang harus ditaati oleh penganutnya dalam kehidupan sehari-hari.

6. Lingkungan Tempat Tinggal

Untuk memilih lingkungan tempat tinggal bagi seseorang harus mempertimbangkan banyak hal, mereka akan melihat bagaimana tingkat

³¹⁴ Ali Anwar Yusuf dan Tono, *Rangkuman Ilmu Perbandingan Agama dan Filsafat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 50

keamanan, kenyamanan dan perkembangan sosialisasi bagi anak mereka kedepannya. Mereka yang akan memilih lingkungan tempat tinggal juga akan mempertimbangkan bagaimana keadaan sosial, ekonomi, budaya dan agama seandainya keluarganya berada dan menetap di lingkungan tersebut.

Dapat kita contohkan bagaimana sosialisasi yang diperoleh individu pada masyarakat perdesaan dan perkotaan. Pada masyarakat perdesaan mungkin sebagian besar merupakan kelas menengah ke bawah, mereka lebih suka untuk tinggal bersama-sama dengan keluarga besar dan saudara-saudaranya yang berdekatan rumah sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga. Di samping itu perdesaan juga masih memiliki interaksi sosial yang erat serta masih kentalnya budaya, tradisi dan adat istiadat yang selalu mempertimbangkan norma, aturan dan sistem nilai.

Sebaliknya pada masyarakat perkotaan yang lebih didominasi oleh kelas *elite* dan homogen yang secara sosial kurang memiliki hubungan yang erat antara satu individu dengan individu lainnya. Masyarakat perkotaan biasanya jarang melakukan komunikasi dan kontak sosial secara langsung dengan warga disekelilingnya. Hal ini mungkin mereka lakukan untuk menghindari efek negatif dari pergaulan serta menghindari mereka dari berbagai masalah sosial.

7. Tempat Kerja

Pada sosialisasi tempat kerja individu diharapkan mampu untuk melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan pekerjaan. Cita-cita dan tujuan pekerjaan akan tercapai dan berhasil jika secara bersama-sama individu dalam lingkungan tersebut membangun dan menjalin komunikasi yang baik.

Sosialisasi ini identik dengan makna penyesuaian (*adjustment*). Konsep penyesuaian diri berasal dari biologi, dan merupakan konsep dasar dari teori evolusi Darwin. Dalam biologi, istilah yang digunakan adalah adaptasi. Menurut teori tersebut hanya organisme yang paling berhasil menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisiknya sajalah yang dapat bertahan hidup. Tingkah laku manusia dapat diterangkan sebagai reaksi-reaksi terhadap tuntutan atau tekanan dari lingkungannya. Manusia dalam hidup di masyarakat, tingkah lakunya tidak saja merupakan penyesuaian diri terhadap tuntutan fisik lingkungannya,

melainkan juga penyesuaian diri terhadap tuntutan dan tekanan sosial orang lain.³¹⁵

Henslin, mengatakan bahwa semakin lama kita terlibat pada suatu jenis pekerjaan, maka pekerjaan ini semakin menjadi bagian dari konsep diri kita. Pada akhirnya, kita akan melihat diri kita dalam kerangka pekerjaan ini, sehingga jika seseorang meminta kita mendeskripsikan diri kita, kita akan cenderung memasukkan pekerjaan dalam deskripsi diri kita. Kita mungkin akan menjelaskan: "saya adalah dosen", "saya jurnalis", atau "saya adalah pebisnis".³¹⁶

Sosialisasi dalam Tahap Perkembangan

Erik H. Erikson dalam konsep *life cycle* (siklus kehidupan) membagi sosialisasi ke dalam delapan tahapan siklus kehidupan. Masing-masing siklus tahapan pada siklus tersebut mempunyai pelbagai masalah dan kemampuan yang harus dikembangkan lagi.³¹⁷

4. Masa Bayi (0-1 Tahun)

Bayi akan mengalami krisis identitas pada siklus awal kehidupan, yakni kepercayaan dasar dan kecurigaan dasar. Rasa aman serta rasa kepercayaan bayi akan terbentuk jika ibu atau pengasuh pengganti memenuhi cinta dan kebutuhan fisik bayi secara konsisten. Apabila ibu atau pengasuh pengganti berlaku kejam, mengabaikan perhatian maka bayi akan merasa tidak aman dan memiliki kecurigaan pada orang lain. Intinya pada masa ini kebijakan yang harus ditekankan adalah tentang harapan. Yang paling diperhatikan oleh seorang ibu di sini adalah pribadi ibu itu sendiri terhadap sang bayi.

5. Kanak-kanak Awal (2-3 Tahun)

Individu akan mengalami krisis identitas antara otonomi, rasa bimbang dan malu pada masa ini. Pada masa kanak-kanak awal, mereka mulai belajar berjalan, berbicara, menggunakan tangan, dan melakukan bermacam hal. Individu juga telah memiliki kemampuan otonom untuk memilih, keinginan, kehendak, atau kemauan serta pencapaian harapan.

Pada masa ini sangat diperlukan dorongan kepada anak agar ia tidak merasa bimbang dan malu dalam berinteraksi dengan orang lain.

³¹⁵ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan Individu Masyarakat dan Pendidikan*, *op cit.*, hal. 101

³¹⁶ Henslin J.M, *Sosialisasi dengan Pendekatan Membumi.*, *op cit.*, hal.79

³¹⁷ Erik H. Erikson, *Jati Diri, Kebudayaan dan Sejarah*, (terj) Agus Cremers, (Flores: LPBAJ), hal. 220-234

Pribadi orang tua sangat diperlukan dalam hubungannya dengan kehendak anak.

6. Masa Bermain (4-5 Tahun)

Pada masa ini individu mengalami krisis identitas antara inisiatif melawan rasa bersalah. Anak mulai berani untuk mempertimbangkan sesuatu dengan pertimbangan suara hati. Hubungan yang perlu dipupuk pada masa ini adalah keluarga bathin karena kebijakan dasar yang dikembangkan oleh anak pada masa ini ialah tentang tujuan.

7. Masa Sekolah (6-11 Tahun)

Individu pada masa ini mengalami krisis identitas antara kerajinan dan rasa rendah diri. Kerajinan anak pada masa ini dia mulai mengerti dunia alat yang berada dalam kebudayaannya serta sangat bergairah dalam dunia sekolahnya yang secara tidak langsung merubah dunia bermainnya.

Pada masa ini anak bisa saja mengalami rasa ketidak sanggupaan dan putus asa jika ia tidak dapat mengembangkan kecakapan dan kompetensi dalam menguasai dunia alat. Hal ini dapat menjadikan anak merasa rendah diri. Oleh sebab itu sekolah dan tetangga sangat dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi sang anak.

8. Remaja (12-18 Tahun)

Masa remaja yang harus diselesaikan ialah penemuan identitas dan kebingungan identitas. Masa ini remaja mengembangkan identitas diri bersama orang lain, terutama kelompok teman sebaya. Pada masa remaja mereka banyak mendapatkan pemahaman, ajaran, dan ideologi yang bisa membuat mereka mengadopsi pemahaman bahwa yang baik akan menjadi pemimpin. Kelompok teman sebaya sangat diperlukan dalam kebijakan dasar tentang penemuan identitas pada masa ini. Sebab remaja akan mengalami kebingungan tatkala kelompoknya tidak mampu untuk meneguhkan identitas sosial temannya serta ideologi yang lemah dalam masyarakat.

9. Dewasa (19-35 Tahun)

Orang dewasa menurut Erikson dapat berjanji setia pada hubungan pasangan bahkan apabila mereka menuntut bermacam pengorbanan dan kompromi yang berarti. Pada masa ini yang dikembangkan adalah rasa kasih sayang dan cinta. Yang paling penting dalam masa ini ialah hubungan patner dalam persahabatan seks.

10. Paruh Baya (36-50 Tahun)

Dalam usia paruh baya individu akan mengalami identitas yang harus diselesaikan antara generativitas dan keasyikan dengan diri sendiri. Mereka yang termasuk ke dalam usia paruh baya akan mengembangkan keluarga, masyarakat, karier kerja dan pengabdian pada masyarakat.

Pemeliharaan dan perhatian adalah kebijakan dasar yang dikembangkan pada masa ini. Pada masa ini yang paling penting adalah pembagian kerja dengan pengaturan rumah tangga secara bersama.

11. Usia Tua (50 Tahun ke atas)

Pada usia tua, individu dihadapi dengan integritas dan keputusan. Dengan banyaknya pengalaman hidup, kebijaksanaan, kematangan jiwa, pikiran dan tindakan akan mempengaruhi keputusan akhir mereka. Ketidakmampuan membangun integritas akan menyebabkan orang tua mengalami keputusasaan dengan ketakutan akan mati. Kebijaksanaan sangatlah diperlukan pada masa ini. Hal yang paling penting dibangun pada masa ini adalah umat manusia yang satu.

Sosialisasi Terhadap Anak yang Berkebutuhan Khusus

Masalah kesehatan mental dalam hidup manusia merupakan hal yang sangat penting karena ia menyangkut soal kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Tanpa kesehatan mental yang baik orang tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Hal itu disebabkan kesehatan mental itu masuk dalam segala aspek dan aktivitas kehidupan manusia, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, sosial, politik, agama serta sampai pada bidang pekerjaan dan profesi hidup manusia.³¹⁸ Kebahagiaan dan kesejahteraan itu sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh faktor kejiwaan, kesehatan mental dan keagamaan yang dimiliki seseorang, karena ketiga faktor ini sangat berpengaruh dalam segala aspek dan aktivitas kehidupan manusia.

Banyak hal yang harus dilakukan dalam pemberian pencerahan serta pemahaman terhadap lembaga, orang tua, keluarga, guru, dan media masa tentang bagaimana sosialisasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus atau yang sering disingkat dengan ABK. Seluruh elemen masyarakat hendaknya dapat menerima keberadaan ABK sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi dengan wajar baik secara rohani, jasmani

³¹⁸ Yahya Jaya, *Psikoterapi Agama Islam*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang Press, 1999), hal. 48

maupun sosial sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ada anggapan yang harus ditepis yang mengatakan bahwa ABK merupakan beban, aib, bencana dan kutukan, mengakibatkan masih banyak orang tua, keluarga dan masyarakat yang menyembunyikannya, sehingga anak berkebutuhan khusus mengalami deskriminasi dan tidak terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan sebagaimana anak lain seusianya, termasuk juga akta untuk memperoleh akta kelahiran. Anggapan ini juga mengakibatkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan kekerasan termasuk penelantaran dan pemasangan karena anak tersebut sering melakukan perusakan dan tidak bisa diatur serta meresahkan lingkungannya.

Dalam buku Psikologi Agama (Kepribadian Muslim Pancasila) karangan Abdul Aziz Ahyadi dijelaskan bahwa humor dapat membantu mengintegrasikan kepribadian seseorang dengan mengabaikan semua konflik bathin yang sedang dialami. Dalam humor terdapat pula relaksasi atau pengenduran mental dari ketegangan hidup. Walaupun humor merupakan dunia main-main yang nampak berlawanan dengan kehidupan beragama yang penuh dengan kesungguhan, namun keduanya dapat menimbulkan relaksasi dan refleksi tersendiri.³¹⁹ Dalam melakukan sosialisasi terhadap ABK memang segala macam pendekatan harus dilakukan, agar nantinya mereka akan berbaur bersama dan tanpa disadari sosialisasi dan komunikasi terhadap mereka akan mudah terjalin, dalam istilah quantum teaching ”bawalah duniamu ke dunia mereka, dan bawalah dunia mereka ke duniamu”.

Penutup

Individu adalah makhluk sosial, begitu pun anak didik bagian dari individu. Anak didik dalam lingkungannya selalu berinteraksi baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial yang berlangsung dalam interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam proses sosialisasi individu belajar tingkah laku, kebiasaan serta pola-pola kebudayaan lainnya, juga keterampilan-keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, dan sebagainya.

Setelah dibahas materi di atas, dapat diketahui bahwa sosialisasi itu berlangsung pada banyak tempat, sosialisasi hampir kita lakukan di

³¹⁹ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama; Kepribadian Muslim Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), cet. Ke V, hal. 210-211

mana saja. Bahkan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi itu berlangsung seumur hidup mulai dari bayi sampai menjadi orang dewasa. Oleh sebab itu sosialisasi perlu ditonjolkan hal-hal yang positif agar mulai dari hidup sampai mati nantinya dapat menjadi individu yang baik dan diingat oleh masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Ahyadi, Abdul Aziz, (2005), *Psikologi Agama; Kepribadian Muslim Pancasila*, cet. Ke V, Bandung: Sinar Baru Algensindo

Anwar, Ali Yusuf dan Tono, (2005), *Rangkuman Ilmu Perbandingan Agama dan Filsafat*, Bandung: Pustaka Setia

Damsar, (2012), *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Erikson, Erik J, (2001), *Jati Diri, Kebudayaan dan Sejarah*, (terj), Agus Cremers, Flores: LPBAJ

Idi, Abdullah, (2014), *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers

_____, (2015), *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

_____, (2015), *Dinamika Sosiologis Indonesia*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara

Jalaluddin dan Idi, Abdullah, (2014), *Filsafat Pendidikan; Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers

Jaya, Yahya, (1999), *Psikoterapi Agama Islam*, Padang: IAIN Imam Bonjol Press

M. Henslin J, (2007), *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, (terj), Jilid 1, Jakarta: Erlangga

Muhaimin, (2013), *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, cet. Ke III, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Nasution, S, (2009), *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara

Ramayulis, (2010), *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia

Sunarto, Katamso, (2004), *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: LPFE

Biodata Penulis



Dr. Deri Wanto, MA., Lahir di Desa Dusun Diilir Kecamatan Hamparan Rawang yang berada di Kota Sungai Penuh Jambi, pada tanggal 08 November 1987, anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Zahyar (ayah) dan Nisdar (ibu). Sejak kecil hingga remaja ia menempuh pendidikan di kampung halamannya yakni Kerinci Jambi. Jenjang pendidikan ia mulai dari TK PGRI Rawang, SDN No. 272/ III Koto Teluk 1999, MTsN Model Sungai Penuh 2002, MAN 1 Sungai Penuh 2005. Pada tahun 2007 menamatkan Diploma Dua (DII) pada prodi PGMI di STAIN Kerinci, tahun 2010 menamatkan Strata Satu (S1) prodi Pendidikan Agama Islam (STAIN Kerinci), karena di kampung halamannya belum ada program Magister (S2) maka melanjutkan Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dengan prodi Pendidikan Islam (2012) dengan beasiswa penuh oleh Pemerintah Provinsi Jambi, gelar doktor (S3) di bidang “promotor integritas” ia peroleh di UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018 pada prodi Pendidikan Agama Islam dengan IPK 3,97 (Pujian) ditempuh selama 2,5 tahun. Pengalaman mengajar diperoleh pertamakali sebagai tenaga honorer SDN 14/III Cempaka, Dosen Luar Biasa STAIN Kerinci, Dosen Luar Biasa Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Dosen Kontrak dan Dosen Tetap STAIN Curup, kini penulis sebagai PNS dan menjabat sebagai ketua program studi Pendidikan Agama Islam-IAIN Curup. Pada tanggal 09 Agustus 2015 penulis menikah dengan perempuan bernama Relly Marselina, ST (Alumni Mahasiswa Planologi Universitas Diponegoro Semarang) yang merupakan anak dari H. Rusdi Takdin (ayah mertua) Hj. Marlina, SE (ibu mertua) dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Inesha Selwa elMazhirah yang lahir pada 22 Juni 2016. Adapun karya-karya yang telah ditulis

antaratn; 1) Teknologi Informasi dalam Perspektif Pendidikan Islam, 2) Perspektif Islam tentang Teknologi dan Manfaatnya Bagi Pendidikan Agama Islam, 3) Penerapan non-Corporal Punishment di Madrasah Aliyah, 4) Multikultural dalam Bingkai Moderasi, Kendala dan Perbaikan Pendidikan Islam yang Ideal, 5) Sindang Jati; Multi Kultural dalam Bingkai Moderasi, 6) Sosiologi Agama dan Kesehatan Mental, 7) Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar, 8) *The Hijrah Communities and Religious Superficiality: Ideology and Religiosity of the Islamic Hijrah Communities on Social Media*. Di samping kegiatan pendidikan dan pengajaran serta penelitian, penulis juga aktif di organisasi GP Ansor Kerinci, Nahdatul Ulama Kota Sungai Penuh, Nahdatul Ulama Rejang Lebong, dan IKA PMII Bengkulu. Penulis dapat dihubungi via email; deriwanto@iaincurup.ac.id Google Scholar; Deri Wanto atau dengan nomor kontak 0852-6606-5817.

Pencarian Identitas Baru, Menciptakan Kedamaian, Menghindari Konflik dan Kekerasan dalam Masyarakat Pluralis dan Multikultural

Dewi Purnama Sari
fatiya.dewi@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara pluralis dan multikultural. Di katakan pluralis karena masyarakat Indonesia memiliki beragam agama, ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buda dan sebagainya. Bahkan dalam satu agama, Islam misalnya terdapat beberapa mazhab dan organisasi keagamaan, antara satu dengan lainnya memiliki beberapa perbedaan pemahaman. Dikatakan Indonesia sebagai negara multikultural, karena masyarakat Indonesai terdiri dari berbagai suku, badaya, adat istiadat dan bahasa, antara satu dengan lainnya memiliki perbedaan.

Keragaman agama dan budaya merupakan suatu keniscayaan dan tidak bisa dihindari, karena keragama merupakan sunatullah. Tugas manusia adalah mengelola agar keragaman itu bersatu padu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam membangun bangsa dan negara. Masyarakat akan menjadi kuat jika keragama yang ada saling menguatkan, menghargai, menghormati dan saling bekerja sama. Negara akan menjadi kokoh jika mampu mengelola kegarama yang menjadi satu kesatu bahu membahu membangun bangsa. Hal ini sejalan semboyan bangsa Indonesai yaitu Bhinneka Tunggal Ika, “berbeda-beda tetapi bersatu”.

Keragama di satu sisi merupakan anugerah yang harus disykuri dan dipelihara, karena di dalam keragaman ada potensi yang luar biasa jika keragama itu dikelola dengan baik. Keragaman menjadi identitas bangsa Indonesia, tidak ada bangsa lain yang memiliki keragaman yang luar biasa kecuali Indonesia. Di lihat dari keragam suku, Indonesia memiliki lebih dari 500 suku. Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Indonesia juga memilik banyak pulau, memilik puluhan daerah tingkat propinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Masing-masing di samping memiliki kesamaan juga banyak ditemukan keragaman. Di sisi lain, keragaman juga dapat menjadi daya tari wisata. Turis dari menca negara berkunjung ke Indonesai salah satunya ingin melihat dan mengamati keragaman yang ada di Indonesia secara lebih dekat. Tentu hal ini mendatangkan keungungan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Namun di sisi lain, di dalam keragaman menyimpan potensi yang dapat memicu terjadinya konflik yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman dapat memicu konflik, jika dalam keragaman muncul sikap saling tidak menghargai, tidak menghormati, menganggap paling benar dan yang lain salah. Oleh karena itu, penting kiranya adanya kesadaran bagi setiap individu bahwa keragaman merupakan suatu keniscayaan yang harus dipelihara dan dijaga agar jangan menjadi pemicu munculnya konflik, baik konflik antar agama maupun konflik antara suku, budaya dan antar daerah. Dalam keragaman perlu dikembangkan sikap lapang dada dalam perbedaan, sikap toleransi dalam perbedaan, kerja sama dan dialog antar sesama.

Di Indonesia sering kali terjadi konflik yang membawa isu SARA (Suku, Agama, Rasa dan Antar Golongn). Agama merupakan menjadi isu sangat sensitif yang dapat memicu konflik. Konflik yang membawa isu SARA sering kali diawali adanya konflik antar pribadi, keluarga atau kelompok tertentu. Kemudian ditarik ke dalam isu SARA guna mendapatkan pengakuan dan dukungan untuk kepentingan tertentu.³²⁰ Tulisan ini akan membahas tentang menciptakan kedamaian, menghindari konflik dan kekerasan dalam masyarakat pluralis dan multikultural.

Pembahasan

1. Pluralitas dan Multikultural serta Pencarian Identitas Baru

Pluralitas dan multikultural merupakan realitas kehidupan yang tidak bisa dihindari dan ditolak. Penciptaan manusia itu sendiri oleh Allah swt juga bersifat pluralis dan multikultural, seperti yang terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”

Secara etimologi, pluralisme terdiri dari dua kata *plural* artinya beragam, banyak atau lebih dari satudan *isme* berarti paham. Pluralisme secara etimologi

³²⁰Pettalongi, S. S. (2013). Islam dan Pendidikan Humanis dalam resolusi konflik sosial. *Cakrawala Pendidikan*, (2), 95142.

berarti paham atas keberagaman.³²¹Dalam bahasa Arab diterjemahkan *ta'addud*, dalam bahasa Inggris *pluralism*. Pluralisme merupakan suatu paham yang ada dalam masyarakat majemuk, berkaitan dengan sistem social politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat.³²²Pluralisme jura sering kali dimaknai sebagai doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pada pemerintahan suatu Negara tidak boleh dimonopoli oleh satu golongan, melainkan harus dibagi-bagi antara berbagai gelombang.³²³Secara umum, ada 3 terminologi terkait dengan pluralisme. *Pertama*, terminologi berkaitan dengan sistem kegerejaan. Pluralisme digunakan untuk sebutan orang memiliki jabatan lebih dari satu dalam struktur kegerejaan maupun diluar struktur kegerejaan secara bersama-sama. *Kedua*, terminologi secara filosofis. Pluralisme dimaknai sebagai sistem pemikiran yang memiliki landasan lebih dari satu.*Ketiga*,terminologi secara sosiopolitis. Pluralisme diartikan sebagai sistem yang mengakui adanya keberagaman, baik kelompok, suku, ras, aliran, agama, partai dengan tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.³²⁴

Para ahli cenderung memaknai pluralisme sebagai paham yang mentoleransi keragaman yang ada, baik keragaman suku, ras, agama, perdaban, kebudayaan, keragaman ide, pendapat, gagasan dan pemikiran.³²⁵ Pluralisme menghendaki adanya interaksi yang positif berbagai kelompok yang berbeda sehingga menghasilkan kerukunan dan terhindar dari konflik.³²⁶ Pluralisme erat kaitannya dengan “kemajemukan atau keberagaman” disertai dengan sikap dan perilaku toleran dalam kemajemukan dan keberagaman.³²⁷ Kemajemukan dan keberagaman dalam konteks ini aspek agama, sosial dan budaya. Namun, banyak literatur yang cenderung mengaitkan pluralisme dengan keragaman dan kemajemukan dalam aspek agama. Dalam masyarakat majemuk, akan muncul pluralisme jika masyarakat mengaplikasikan sikap toleransi antar

³²¹Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke II (Jakarta: Balai Pustaka,1990),h. 777.

³²²Rahman, M. S. (2014). Islam dan pluralisme. *Fikrah*, 2(2).

³²³Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia....h. 777

³²⁴Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme Agama : Tinjauan Kritis*, (Jakarta : Perspektif, 2005), h. 14

³²⁵Moko, C. W. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) dalam Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Intelektualita*, 6(1).

³²⁶Febrianto, M. R., & Nurani, F. Toleransi dan Pluralisme: Kontribusi Budaya Indonesia bagi Dunia.

³²⁷Makmun, F. (2020). Konsep Pengembangan Masyarakat Plural Perspektif Al-Qur'an. *Bina'Al-Ummah*, 15(1), 1-20.

sesama.³²⁸ Dengan kata lain, apabila setiap individu menerapkan sikap toleransi antar sesama maka akan lahir pluralisme.

Pluralisme bukan hanya sebatas pengakuan kenyataan adanya keragaman dan kemajemukan, tetapi jauh dari itu, pluralisme harus dimanifestasikan ke dalam sikap menghargai, menghormati dan memelihara keadaan yang bersifat majemuk atau pliral.³²⁹ Pluralisme menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan manusia.³³⁰ Ada empat hal penting yang harus ada dalam pluralisme, *Pertama*, pluralisme bukanlah keanekaragaman saja, tetapi keterlibatan energik dengan keanekaragaman. *Kedua*, pluralisme bukan hanya toleransi, tetapi pencarian pemahaman secara aktif melintasi garis perbedaan. *Ketiga*, pluralisme bukanlah relativisme, tetapi pertemuan komitmen. *Keempat*, pluralisme berdasarkan dialog, pertemuan, memberi dan menerima, kritik dan kritik diri.³³¹

Multikultural merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman yang ada dalam masyarakat. Keragaman tersebut menyangkut aspek budaya, adat istiadat, sistem nilai dan paham politik yang dianut.³³² Subtansi dari paham multikultural sesungguhnya adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dari berbagai kelompok budaya dan sistem politik yang berbeda dalam kehidupan masyarakat modern.³³³

Dilihat secara etimologi, kata multikultural berasal dari dua kata, yaitu *muliti* berarti banyak dan *kultural* berarti budaya. Multikultural berarti banyak budaya atau keragaman budaya.³³⁴ Para ahli juga ada yang mengatakan, multikultural merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang ada dalam suatu negara yang hidup rukun dan bersatu dalam keragaman budaya dan etnis.³³⁵ Budaya dalam konteks ini memiliki makna

³²⁸Makmun, F. (2020). Konsep Pengembangan Masyarakat Plural Perspektif Al-Qur'an. *Bina'Al-Ummah*, 15(1), 1-20.

³²⁹AIFIS, *Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion* tanggal 17 Februari 2015, h. 2

³³⁰Qomarudin, A. (2018). Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 158-168.

³³¹Eck, D. L. (2006). What is pluralism. *The pluralism project at Harvard University*.

³³²M Ato Mudzakar, *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke Depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan dan Praktek Kerukunan Umat Beragama di Indonesia)*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI, 2005), h. 174

³³³Mubit, R. (2016). Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 163-184.

³³⁴Irhandayaningsih, A. (2012). Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia. *Humanika*, 15(9).

³³⁵Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan multikultural*. Erlangga, h. 5

yang luas. Semua hasil cipta, karya dan karsa manusia merupakan budaya.³³⁶Selain itu, istilah multikulturali juga digunakan untuk menggambarkan adanya kesetaraan antara budaya yang satu dengan budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat.³³⁷

Pluralisme merupakan salah satu ciri dari multikulturalisme, maka pluralisme diartikan sebagai "menerima perbedaan" atau "menerima perbedaan yang banyak".³³⁸Manusia pada hakekatnya mampu menjalani kehidupan plural, sebab manusia merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Seiring dengan perkembangan waktu, kehidupan manusia dihadapkan dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan ideologis, agama, ekonomi, politik dan sebagainya, maka kehidupan pluralis yang ada pada diri manusia berubah guna untuk memenuhi keinginan dan pentingnya.

Kehidupan pluralis dan multikultural menimbulkan berbagai persoalan, antara lain persoalan minoritas dan mayoritas. Minoritas dan mayoritas menjadi salah satu faktor pemicu konflik SARA.³³⁹ Beberapa peristiwa SARA yang terjadi di Indonesia sesungguhnya awal munculnya bukan disebabkan oleh faktor idilogi atau agama, melainkan disebabkan oleh faktor lain yang saling keterkaitan, kemudian ditarik ke dalam isu agama atau idiologi untuk mengaburkan fonflik yang sesungguhnya atau untuk mendapatkan dukungan.³⁴⁰Pendapat lain menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi pemicu konflik, Pertama, adanya ketidakadilan dalam sosial ekonomi, mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kedua, faktor politik dan kelembagaan, yaitu adanya tekanan politik terhadap kelompok tertentu, adanya sistem kelembagaan yang menguntungkan sekelompok orang dan mengekang kelompok lain. Ketiga, akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula paham keagamaan yang semakin menciptakan *eksklusivitas* dan *sensitivitas* kepentingan kelompok.³⁴¹

³³⁶Ibrahim, R. (2015). Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Addin*, 7(1).

³³⁷Rois, A. (2013). Pendidikan Islam multikultural: Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah. *Epistémè: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(2), 301-322.

³³⁸Nurhayati, I., & Agustina, L. (2020). Masyarakat Multikultural: Konsep, Ciri Dan Faktor Pembentuknya. *Akademika*, 14(01).

³³⁹Kharisma, T. (2017). Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup WhatsApp dengan Anggota Multikultural. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2).

³⁴⁰Muzaki, I. A., & Tafsir, A. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islamic Worldview. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, [SL]*, 6(1), 57-76.

³⁴¹Wahab, A. J. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisa Latar Belakang Konflik*. Elex Media Komputindo.

Pendapat lain menjelaskan, konflik muncul dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya *Pertama*, adanya klaim kebenaran yang mengakibatkan paham fanatis, diiringi dengan kekurangpahaman dan diikuti adanya paksaan untuk menerima kebenaran kepada orang lain.³⁴²*Kedua*, adanya kesalahan dalam memahami doktrin Jihad.³⁴³ Konflik juga dapat ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendirian atau perasaan individu, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok dan adanya perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.³⁴⁴

Berbagai macam *research* yang dilakukan pada tahun 2010, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan intoleransi di kalangan masyarakat Indonesia.³⁴⁵ Hasil survey bidang juga menunjukkan banyak masyarakat yang mendukung berbagai bentuk kekerasan atas nama agama.³⁴⁶ Penelitian yang dilakukan oleh The Wahid Institut dan Setara Institut pada tahun 2008 mendapatkan 107 kasus pelanggaran kebebasan beragama pada masyarakat Indonesia.³⁴⁷ Pelanggaran kebebasan beragama tersebut meliputi masalah paham keagamaan (67%), tempat ibadah (14%), dan aktivitas keagamaan (11%).³⁴⁸ Hasil *research* yang dilakukan PPIM pada tahun 2011 menggambarkan bahwa 60.4% responden mendukung sikap intolerans dan kekerasan.³⁴⁹ Lazuardi Biru (t-th) menjelaskan, Indonesia termasuk negara yang berada diambang baras kerawan dari pengaruh paham radikalisme dan terorisme dengan indeks 43,6%.

Di antara banyak kasus kekerasan, kasus kekerasan mengatasnamakan agama agama merupakan isu yang sangat sensitif,³⁵⁰ dan perlu penanganan cepat, serius dan tuntas. Kekerasan agama yang bukan hanya terjadi pada kelompok minoritas, melainkan juga terjadi pada kelompok mayoritas. Contoh kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok mayoritas adalah

³⁴²Muhamad Fajar Pramono1&Dzakiyyah Fauziyah Rifat. *Potret Konflik antar Umat Beragama di Indonesia: in proceeding afro-asian university forum* (p. 773), h. 777

³⁴³Firdaus M. Yunus, 2014, —Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya, dalam *Jurnal Substansia* Vol. 16, No. 2, Oktober, 220-221

³⁴⁴St. Aisyah BM, 2014, —Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama, dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 2, Desember, 195-196

³⁴⁵Budhy Munawar Rachman (ed), *Membela Kebebasan Beragama*, (Jakarta : The Asia Foundation, 2016), h. xvi-xvii

³⁴⁶Budhy Munawar Rachman (ed), *Membela Kebebasan Beragama....* h. xvi-xvii

³⁴⁷Budhy Munawar Rachman (ed), *Membela Kebebasan Beragama....* h. xvi-xvii

³⁴⁸Budhy Munawar Rachman (ed), *Membela Kebebasan Beragama....*h. xvi-xvii

³⁴⁹Achmad Zainal Arifin, *Membela yang Lemah Menggali Ide Pluralisme Gusdur* dalam *Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion...*h. 5

³⁵⁰ Achmad Zainal Arifin, *Membela yang Lemah Menggali Ide Pluralisme Gusdur* dalam *Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion...*h. 6

penghentian kegiatan peringatan Maulid Nabi di Yogyakarta pada akhir tahun 2010 yang lalu.³⁵¹ Permintaan penghentian kegiatan peringatan Maulid Nabi hanya dilakukan oleh satu orang, dengan alasan kegiatan tersebut mengganggu warga pada malam hari.³⁵²

Sebenarnya yang perlu diperhatikan dari konteks kekerasan yang mengatasnamakan agama (Islam) adalah kekerasan yang mengatasnamakan agama yang bersifat trans-nasional. Wibowo, E. K menjelaskan, kelompok keagamaan yang bersifat trans-nasional memiliki beberapa karakteristik, antara lain menekankan otentisitas doktrin keagamaan, *eksklusivitas* kelompok, dan anti-tradisi, mengusung ide-ide Islamisme (mendukung pendirian negara Islam atau penerapan syariah Islam).³⁵³

Bagaimanakah menghadapi tantangan pencarian identitas baru untuk mengatasi masalah minoritas dan mayoritas di atas? Ada dua ide yang ditawarkan oleh KH Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, yaitu ; ide kebangsaan dan ide kemanusiaan yang universal. Konsep kebangsaan menurut Gus Dur sudah final, Gus Dur tidak memilih legalisasi Islam atau syariat Islam. Atau disebut sebagai dinamika konformitas : pluralitas dan identitas nasional.³⁵⁴

Ide kemanusiaan universal yang dibangun oleh Gus Dur membela siapa pun yang disakiti, karena yang dilihat adalah sisi kemanusiaan. Untuk mengembangkan ide kemanusiaan yang universal, Gus Dur menawarkan konsep pluralisme sosial.³⁵⁵ Titik temu pada pluralisme sosial terletak pada nilai-nilai kemanusiaan yang dijanjikan oleh agama.³⁵⁶ Individu tidak dibenarkan untuk memaksa orang lain agar sama dengan dirinya, individu bisa jadi mempunyai klaim kebenaran tentang agama yang diyakininya, tetapi tidak punya hak untuk memaksakan pemeluk agama lain untuk mengakuinya.³⁵⁷ Dasar utama

³⁵¹ Achmad Zainal Arifin, *Membela yang Lemah Menggali Ide Pluralisme Gusdur* dalam *Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion...*h. 6

³⁵² Achmad Zainal Arifin, *Membela yang Lemah Menggali Ide Pluralisme Gusdur* dalam *Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion...*h. 6

³⁵³Wibowo, E. K. (2018). Membincang Gerakan Islam Transnasional. *Diegesis: Jurnal Teologi*, 3(2), 60-69.

³⁵⁴Alef Theria Wasim, Kumpulan Materi Kuliah Psikologi Lintas Agama dan Budaya Tahun 2013-2014, h. 2

³⁵⁵ Achmad Zainal Arifin, *Membela yang Lemah Menggali Ide Pluralisme Gusdur* dalam *Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion...*h. 12

³⁵⁶Saihu, M. (2019). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)*. Deepublish, h. 7-8

³⁵⁷Santalia, I. (2016). KH Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi. *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama*, 1(02).

pluralisme dalam Islam adalah akidah. Ini mengandung makna bahwa sebelum memahami agama orang lain, terlebih dahulu harus memahami Islam secara benar. Hal ini penting untuk dilakukan agar individu mengetahui batas-batas mana yang boleh dilakukan terkait dengan pluralisme beragama. Di sisi lain, dengan memiliki pemahaman yang benar tentang Islam, ketika melakukan dialog antar agama individu yakin apa yang dilakukan tidak akan berpengaruh terhadap keislamannya. Menerima pendapat orang lain, bukan berarti harus mengikutinya, menerima kepercayaan orang lain dengan tidak menerima kebenarannya.³⁵⁸

Agama Islam adalah agama universal, diturunkan untuk semua manusia. Keyakinan seperti itu juga dimiliki penganut agama lain, seperti Yahudi dan Kristen. Tugas setiap pemeluk agama hanya menyampaikan, bukan memaksakan kepada orang lain. Kesadaran tersebut melahirkan sikap-sikap sosial keagamaan yang unik, yaitu kesadaran tentang kemajemukan keagamaan (*religious pluralism*).³⁵⁹ Dalam kemajemukan keagamaan, sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap toleran, adil, terbuka, jujur, menghargai dan menghormati hak-hak orang, dengan tetap meyakini dan mengamalkan ajaran agama yang dianut secara baik. Kesadaran akan kemajemukan keagamaan akan melahirkan sikap inklusif.³⁶⁰ Sikap inklusif ini pada gilirannya dapat mendorong antar pemeluk agama hidup rukun dan damai. Menciptakan kerukunan dan kedamaian antar sesama manusia merupakan tuntunan agama dan mutlak harus dilakukan. Untuk memutuskan agama siapa yang paling benar dan agama siapa yang salah, sepenuhnya diserahkan kepada Alla SWT.

Dengan demikian identitas baru yang harus ditampilkan oleh setiap pemeluk agama dalam kehidupan yang pluralis dan multikultural adalah menampilkan pluralisme sosial, kesadaran tentang kemajemukan keagamaan, dan sikap inklusif serta moderasi dalam beragama. Ciri seorang muslim yang moderasi adalah menampilkan Islam dan umat Islam sebagai sarana bagi dipersaksikannya rahmat dan kasih sayang Allah dihadapan semua manusia.³⁶¹ Jika dua nilai mendasar Islam ini, kasih sayang dan moderasi, diingat dan dikembangkan dalam hati umat Islam, maka *ekstremisme* tak akan punya tempat.

³⁵⁸Wibisono, Y. M. (2016). Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam. *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, 1, 12-24.

³⁵⁹Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta : Paramadina, 2002), h. 179

³⁶⁰M Quraih Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2003), h. 209

³⁶¹Khaled Abu el-Fadel, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 347

Kebersamaan dalam menegakkan nilai-nilai kebertuhanan di antara semua umat manusia adalah sebuah keniscayaan.

2. Kedamaian dalam Kehidupan serta Relevansi Psikologi Lintas Agama dan Budaya bagi Pendidikan Islam

Budaya dan agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dengan budaya kehidupan manusia terasa indah dan mudah. Dengan agama hidup manusia akan terarah. Psikologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, selain mengkaji tingkah laku manusia juga mengkaji budaya dan agama dalam kaitannya dengan tingkah laku manusia. Dalam konteks psikologi, dengan memahami budaya dan agama manusia, maka akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang perilaku manusia dan hal-hal yang melatar belakangi munculnya perilaku tersebut. Di samping itu, juga dapat memahami pembentukan kepribadian pada manusia terkait konteks budaya dan agama yang dianutnya. Budaya dan agama juga dapat menjelaskan kemunculan perilaku abnormal pada manusia. Psikologi yang mengkaji tentang tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan budaya disebut dengan psikologi lintas budaya.

Menurut Matsumoto dan Juang, psikologi lintas budaya mengkaji secara kritis dan komprehensif terkait pengaruh budaya terhadap tingkah laku manusia.³⁶² Pendapat lain menjelaskan, kajian psikologi lintas budaya lebih menekankan pada kajian tingkah laku manusia dalam beragam latar belakang budaya, adat istiadat, suku, ras, gaya hidup dan sebagainya.³⁶³

Dalam studi psikologi, manusia tidak hanya menjadi objek melainkan sekaligus menjadi subjek. Manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Keberadaan manusia bukanlah makhluk yang sudah jadi, melainkan perlu proses dan perlu dikembangkan. Manusia juga bukan hanya sebatas makhluk yang dapat diamati dan dikaji, melainkan juga mengamati dan mengkaji. Manusia juga bukan hanya sebatas menjadi akibat, melainkan juga dapat berperan menjadi penyebab perubahan lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial maupun budaya.

Di Indonesia terdapat ratusan etnis, budaya, bahasa, dan agama, serta ribuan kombinasi antara faktor-faktor tersebut. Maka studi lintas budaya dan agama menjadi diperlukan untuk melakukan kajian komparatif dan kritis mengenai pengaruh-pengaruh budaya dan agama terhadap kondisi psikologis manusia. Setidaknya ada tiga tujuan mempelajari psikologi lintas budaya, yaitu :

³⁶²Sarlito W Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016), h. 3

³⁶³ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*,...h. 3

- a. Memahami kuatnya interaksi manusia, budaya, dan ekologi yang membentuk tingkah laku manusia.
- b. Menganalisis implikasi dari interaksi budaya, ekologi, tingkah laku manusia pada berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengaplikasikan konsep-konsep dasar penelitian lintas budaya dan mengembangkannya dalam bidang pengetahuan yang diminati.³⁶⁴

Di dalam mempelajari psikologi lintas budaya, ada empat macam pengetahuan yang diperoleh, yaitu :

- a. Pengetahuan yang bersifat ilmiah yang diperoleh dari penelitian-penelitian lintas budaya yang dilakukan oleh berbagai penelidunia.
- b. Pengetahuan yang bersifat populer, berasal dari dongeng, mitos, kepercayaan, atau takhayul yang berkembang di dalam kelompok masyarakat.
- c. Pengetahuan yang bersifat ideologi (nilai), terdiri dari pemahaman yang tidak berubah tentang dunia, penilaian baik dan buruk, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut biasanya berkaitan dengan agama, adat, dan sebagainya.
- d. Pengetahuan hukum, yaitu sesuatu yang mengatur fungsi atau perilaku manusia.³⁶⁵

Menurut Shiraev dan Levy, ada dua jenis pengaruh budaya saat ini yaitu budaya tradisional dan budaya non-tradisional (modern).³⁶⁶ Budaya tradisional berakar pada tradisi, simbol, dan prinsip yang dibuat di masa lalu. Sedangkan budaya non-tradisional adalah budaya yang berdasarkan kepada prinsip, ide, dan kebiasaan yang relatif baru.³⁶⁷ Baik budaya tradisional maupun budaya non-tradisional membawa dampak terhadap masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat tradisional melalui religiusitas dan budayanya yang harus dipatuhi memahami kebaikan dan keburukan secara kaku. Sementara masyarakat non-tradisional menganggap perbedaan antara kebaikan dan keburukan bersifat relatif, sehingga tidak kaku seperti masyarakat tradisional.

Bagaimana relevansi psikologi lintas agama dan budaya dengan pendidikan Islam? Menurut Muhammad Anis, di antara watak pendidikan Islam adalah berwatak pembebasan dan *taghyir* (perubahan). Pendidikan berwatak pembebasan mengandung makna membebaskan (membersihkan) jiwa manusia dari hal-hal yang menghambat pertumbuhan manusia untuk menjadi hamba

³⁶⁴ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*...h. vii

³⁶⁵ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*...h. 5

³⁶⁶ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*...h. 6

³⁶⁷ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*...h. 6

Allah yang baik dan menjadi khalifah Allah di bumi.³⁶⁸ Seperti terdapat dalam QS al-Baqarah ayat 151 dan QS al-Jumu'ah ayat 2:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui”.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.

Pendidikan Islam juga mengacu pada konsep *taghyir* (perubahan). Pendidikan yang berwatak *taghyir* (perubahan) berorientasi pada adanya perubahan ke arah masa depan yang lebih baik. Seperti yang terdapat dalam QS ar-Ra'd ayat 11 dan QS al-Hasyr ayat 19 :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik”.

³⁶⁸ Muhammad Anis, *Watak Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Telaah Normatif)*, Makalah disampaikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* Program Pasca Sarjana UMY tanggal 12 November 2016

Abuddin Nata, menggarisbawahi tujuan utama pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia untuk menghambakan diri kepada Allah dan membentuk akhlak yang mulia.³⁶⁹ Tujuan ini dapat dicapai apabila pendidikan tersebut dapat membebaskan manusia dari pemahaman ideologi (nilai) yang kaku serta mendorong terjadinya perubahan terhadap pemahaman ideologi (nilai) yang kaku tersebut. Pemahaman ideologi (nilai) seperti yang telah dijelaskan di atas dipengaruhi oleh budaya. Studi psikologi lintas agama dan budaya menjadi penting dalam pendidikan Islam untuk memahami latar belakang terbentuknya pemahaman ideologi (nilai), terutama latar belakang pemahaman ideologi (nilai) yang kaku.³⁷⁰ Seperti contoh mewujudkan kedamaian dalam kehidupan. Budhy Munawar Rachman menjelaskan, di dalam al Quran dan Hadis tidak ditemukan perintah untuk menebarkan kebencian dan kermusuhan, melakukan tindakan yang meresahkan dan mengganggu stabilitas kedamaian. Islam mengajarkan kebersamaan (*ijtima'iyah*), persamaan (*musawah*), kasih sayang (*mahabbah*), keadilan (*'adalah*), dan persaudaraan (*ukhuwah*), serta menghargai perbedaan.³⁷¹

Islam diturunkan ke muka bumi untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan, menyelematkan dari kegelapan dan membimbing manusia agar menemukan kedamaian. Hal ini sejalan dengan makna Islam itu sendiri, yang secara berasal diambil dari kata *salima-yaslamu-salaman*, berarti selamat dan damai, atau dari akar kata *Sedangkan aslama-yuslimu-islaman*, berarti mendamaikan dan menyelamatkan.³⁷² Islam yang berakar pada kata *salam* berarti aman (*to be safe*), keseluruhan (*whole*), dan menyeluruh (*integral*). Kata *salam* yang berarti perdamaian dalam al-Qur'an lebih banyak yang berbentuk kata benda daripada kata kerja. Secara normatif, setiap muslim dianjurkan mengucapkan salam perdamaian (*al-salam-u 'alaykum*).³⁷³ Ini maknanya adalah umat Islam harus menebarkan kedamaian dan mendamaikan orang lain. Makna ini semestinya diinternalisasikan dalam sanubari setiap muslim sehingga kedamaian benar terwujud walau dalam keragaman dan kemajemukan.

³⁶⁹Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al Qur'an*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 146

³⁷⁰Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al Qur'an*..h. 146

³⁷¹Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 156

³⁷²Safri, A. N. Membangun Keagamaan yang Inklusif dan Dialogis (Reinterpretasi Term al-Islam dalam al-Qur'an).

³⁷³Hermanto, A. (2018). Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(2), 239-262.

Hakikat keimanan seseorang di dalam al-Qur'an (QS al-Hujurat ayat 9) ditentukan sejauhmana ia bisa melakukan aksi-aksi keselamatan, sehingga apa pun persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat bisa diselesaikannya dengan jalan damai. Teologi perdamaian ini merupakan khazanah keagamaan yang perlu ditanamkan kepada setiap individu melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang mentransfer nilai-nilai Islam sebagai hidup secara damai dan memahami keragaman, sehingga perbedaan agama dan budaya tidak lagi menimbulkan konflik, membenci, dan memusuhi orang lain. Jika pendidikan Islam dapat menanamkan prinsip "sejauh upaya perdamaian yang dilakukan oleh setiap individu, disitulah sebenarnya esensi agama ditegakkan", maka kedamaian dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan.

3. Menghindari konflik dan kekerasan agama dalam kehidupan berlintas agama

Persoalan yang muncul dalam fenomena konflik kehidupan berlintas agama dalam realitas kehidupan penyebab utamanya bukan terkait masalah agama atau ideologi, melainkan disebabkan oleh faktor lain yang saling berkaitan. Agama biasanya dibawa serta sebagai faktor legitimasi atau untuk menutupi konflik yang sesungguhnya.³⁷⁴

Adanya pluralitas agama dan keragaman sosial pemeluknya dapat menimbulkan berbagai keragaman dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, bahkan dapat mengakibatkan saling mengklaim kebenaran dan menyalahkan pemahaman lainnya. Hal seperti ini harus dihindari karena dapat memicu munculnya konflik. Konflik sering kali menjadi problem keagamaan dan kebangsaan yang penyelesaiannya tidak bisa hanya menggunakan pendekatan teologi normatif. Tetapi diperlukan juga pendekatan lain yang sesuai dengan kearifan lokal dan sosial sesuai dengan kepentingan kelompok pemeluk agama dan paham keagamaan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang pluralitas agama, di antaranya adalah QS al-Maidah ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan

³⁷⁴Ulya, I. (2016). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia. *Fikrah*, 4(1), 20-35.

menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

Jalaluddin Rakhmat, mengemukakan kandungan Surat al-Maidah ayat 48 di atas dapat disimpulkan :

- a. Setiap agama memiliki aturan dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Pluralisme bukan berarti menyamakan semua agama. Perbedaan yang ada merupakan keniscayaan.
- b. Manusia diciptakan Tuhan bukan dalam bentuk agama tunggal, melainkan adanya keragaman agama. Adanya keragaman agama ini menjadi ujian bagi manusia agar dapat memilih dan menentukan agama yang terbaik menurut kayakinananya. Selain itu menjadi tantangan bagi manusia agar melakukan sesuatu untuk bersaing dalam berbuat kebaikan berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing untuk kemaslahatan manusia.
- c. Penyelesaian perbedaan keyakinan umat manusia merupakan wewenang dan tugas Allah. Manusia tidak boleh mengambil wewenang tersebut untuk menyelesaikan perbedaan tersebut.³⁷⁵

Dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Menjadi pertanyaan, jika perbedaan itu adalah rahmat, mengapa perbedaan agama seringkali menjadi faktor pemicu konflik dan kekerasan agama? Hasan Hanafi, mengemukakan bahwa pemahaman secara literal terhadap teks Kitab Suci (dalam Islam al-Qur'an), akan memunculkan pemahaman yang ekstrem, kaku, dan keras. Pembacaan yang literal ini membuat teks suci menjadi tertutup sehingga memutus teks suci dari konteks masa risalah maupun konteks masa sekarang. Hal ini menyebabkan agama (Islam) tidak lagi komunikatif dengan konteks para penganutnya. Pembacaan teks secara literal ini tidak akan pernah mampu melihat, apalagi memahami kebenaran lain yang berbeda dari kebenaran harfiah yang dicapainya. Bahkan tidak akan pernah mampu memahami kompleksitas teks suci, apalagi kaitannya dengan kompleksitas realitas sosial.³⁷⁶

³⁷⁵Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme : Akhlak al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 53

³⁷⁶Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme...* h. 168

Pemaknaan simbol dan penghayatan agama yang tertutup melahirkan sikap fundamentalisme³⁷⁷ dan kelompok keagamaan yang radikal.³⁷⁸ Sikap tertutup juga dapat mengakibatkan timbulnya sikap yang mengklaim kebenaran secara sepihak (*one-sided truth claims*), kebenaran dianggap hanya miliknya dan sesuai dengan pemahamannya pada gilirannya akan menolah dan menyalahkan yang berbeda.³⁷⁹ Oleh karena itu, perlu kiranya setiap pemeluk agama memiliki keyakinan yang dewasa dan rendah hati. Orang yang memiliki keyakinan yang dewasa dan rendah hati, tidak akan pernah terganggu oleh keyakinan lain yang berbeda, bahkan akan berbagi secara terbuka untuk mencapai kebenaran hakiki.

Dengan demikian, agar dapat menghindari konflik dan kekerasan agama dalam kehidupan berlintas agama (baik antara muslim-non muslim, maupun antara muslim-muslim), pada setiap pemeluk agama harus mengembangkan sikap beragama yang dewasa. Bagaimanakah mengembangkan sikap beragama yang dewasa tersebut? Nurcholish Madjid, atau yang akrab disapa dengan Cak Nur menawarkan konsep yang komprehensif.³⁸⁰ Untuk membahas pluralisme agama, beliau menawarkan konsep iman, islam, dan takwa. Selain itu beliau juga menjelaskan, membangun pluralisme beragama dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap positif, terbuka dan aktif dalam keberagaman.³⁸¹

³⁷⁷Ciri yang menonjol dari sikap fundamentalisme adalah pemahaman yang literal atau skriptual terhadap teks-teks agama, dan pandangan yang negatif pada kemajuan (modern). Pada gerakan fundamentalisme kemudian dilekatkan ciri perlawanan atau perjuangan. Gerakan fundamentalisme ditandai setidaknya oleh lima jenis perlawanan. Pertama, *fight back*, melawan kembali kelompok yang mengancam keberadaannya. Kedua, *fight for*, berjuang untuk menegakkan cita-cita yang mencakup persoalan hidup secara umum, seperti keluarga dan institusi sosial. Ketiga, *fight with*, berjuang dengan kerangka nilai atau identitas tertentu yang diambil dari warisan masa lalu maupun konstruksi baru. Keempat, *fight against*, berjuang melawan musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang. Kelima, *fight under*, berjuang atas nama Tuhan atau ide-ide lain. Syamsul Arifin, *Studi Agama Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer*, (Malang : UMM Press, 2009), h. 189

³⁷⁸Penelitian yang dilakukan oleh Khamami Zada (2002), kelompok keagamaan yang radikal seperti FPI, Majelis Mujahidin, Laskar Ahlul Sunnah Waljamaah, dan KISDI memiliki karakteristik yang sama, yaitu ; Pertama, memperjuangkan Islam secara kaffah (totalitas). Kedua, mendasarkan praktik keagamaan pada masa lalu (salaf). Ketiga, Sangat memusuhi Barat dan segala praktik peradabannya seperti modernisasi, sekularisasi, dan sebagainya. Keempat, perlawanannya dengan liberalisme Islam yang tengah berkembang di tengah kalangan muslim Indonesia. Syamsul Arifin, (2009), *Studi Agama Perspektif Sosiologis*.... h. 183

³⁷⁹Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme*,, h. 168

³⁸⁰Samsul Ma'arif, *Rekontekstualisasi Pluralisme Islam Studi Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion*... h. 40-41

³⁸¹Samsul Ma'arif, *Rekontekstualisasi Pluralisme Islam Studi Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion*...h. 40-41

Kesimpulan

Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu anugerah Allah SWT yang harus disyukuri, dijaga dan dipelihara agar jangan sampai memicunya konflik antar sesama. Banyak cara yang harus dilakukan diantaranya adalah *Pertama*, meyakini bahwa keragaman merupakan sunatullah dan tidak bisa dihindari, tugas manusia adalah mengelola agar keragaman menjadi suatu kekuatan untuk mewujudkan perdamaian. *Kedua*, mengembangkan dan merealisasikan sikap lapang dada, saling menghormati, menghargai, toleransi, kerjasama, dialog dan terbuka antar sesama dalam keragaman dengan tatap berpegang teguh pada keyakinan masing-masing.

Konflik adakalanya terjadi, bahkan sering kali konflik tersebut dikaitkan dengan masalah keagamaan dan kebangsaan. Penyelesaian konflik tidak hanya menggunakan pendekatan teologi normatif, tetapi juga diperlukan pendekatan lain yang selaras dengan kearifan lokal, psikologis dan sosial sesuai dengan kepentingan kelompok pemeluk agama dan paham keagamaan. Pemerataan keadilan dibidang sosial, ekonomi, politik dan menjunjung tinggi hak-hak antar sesama perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik.

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, (2016), *Pendidikan dalam Perspektif al Qur'an*, Jakarta : Kencana
- Achmad Zainal Arifin, *Membela yang Lemah Menggali Ide Pluralisme Gusdur dalam Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion* tanggal 17 Februari 2015
- Alef Theria Wasim, Kumpulan Materi Kuliah Psikologi Lintas Agama dan Budaya Tahun 2013-2014. Psikologi Pendidikan Islam Program Pasca Sarjana UMY
- Arifin, S. (2009). *Studi agama: perspektif sosiologis dan isu-isu kontemporer*. UMM Press.
- Anis Malik Toha, (2005), *Tren Pluralisme Agama : Tinjauan Kritis*, Jakarta : Perspektif
- Baidhawry, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan multikultural*. Jakarta: Erlangga
- Budhy Munawar Rachman (ed), 2016, *Membela Kebebasan Beragama*, Jakarta : The Asia Foundation

- Budhy Munawar Rachman, (2010), *Argumen Islam untuk Liberalisme*, Jakarta : Grasindo
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke II Jakarta: Balai Pustaka
- Eck, D. L. (2006). What is pluralism. *The pluralism project at Harvard University*.
- Febrianto, M. R., & Nurani, F. Toleransi dan Pluralisme: Kontribusi Budaya Indonesia bagi Dunia.
- Firdaus M. Yunus, (2014), Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya, dalam Jurnal Substansia Vol. 16, No. 2, Oktober, 220-221
- Hermanto, A. (2018). Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan. *Jurnal Mabkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(2), 239-262.
- Ibrahim, R. (2015). Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Addin*, 7(1).
- Irhandayaningsih, A. (2012). Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia. *Humanika*, 15(9).
- Jalaluddin Rakhmat, (2006) *Islam dan Pluralisme : Akhlak al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta
- Khaled Abu el-Fadel, (2005), *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta
- Kharisma, T. (2017). Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup WhatsApp dengan Anggota Multikultural. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2).
- M Atho Mudzahar, (2005), *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia)*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI
- M Quraih Shihab, (2003), *Tafsir al-Misbah Vol 1*, Jakarta : Lentera Hati
- Makmun, F. (2020). Konsep Pengembangan Masyarakat Plural Perspektif Al-Qur'an. *Bina'Al-Ummah*, 15(1), 1-20.
- Makmun, F. (2020). Konsep Pengembangan Masyarakat Plural Perspektif Al-Qur'an. *Bina'Al-Ummah*, 15(1), 1-20.

- Moko, C. W. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) dalam Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Intelektualita*, 6(1).
- Mubit, R. (2016). Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 163-184.
- Muhamad Fajar Pramono1&Dzakiiyah Fauziyah RiFat. *Potret Konflik antar Umat Beragama di Indonesia: in proceeding afro-asian university forum* (p. 773), h. 777
- Muhammad Anis, *Watak Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Telaah Normatif)*, Makalah disampaikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* Program Pasca Sarjana UMY tanggal 12 November 2016
- Muzaki, I. A., & Tafsir, A. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islamic Worldview. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, [SL]*, 6(1), 57-76.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (2002), Jakarta : Paramadina
- Nurhayati, I., & Agustina, L. (2020). Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri Dan Faktor Pembentuknya. *Akademika*, 14(01).
- Pettalongi, S. S. (2013). Islam dan Pendidikan Humanis dalam resolusi konflik sosial. *Cakrawala Pendidikan*, (2), 95142.
- Qomarudin, A. (2018). Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 158-168.
- Rahman, M. S. (2014). Islam dan pluralisme. *Fikrah*, 2(2).
- Rois, A. (2013). Pendidikan Islam multikultural: Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(2), 301-322.
- Safri, A. N. Membangun Keagamaan yang Inklusif dan Dialogis (Reinterpretasi Term al-Islam dalam al-Qur'an).
- Saihu, M. (2019). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)*. Deepublish, h. 7-8
- Samsul Ma'arif, *Rekontekstualisasi Pluralisme Islam Studi Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion* tanggal 17 Februari 2015
- Santalia, I. (2016). KH Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi. *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama*, 1(02).

- Sarlito W Sarwono, (2016) *Psikologi Lintas Budaya*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- St. Aisyah BM, 2014, Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama, dalam Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 2, Desember, 195-196
- Syamsul Arifin, (2009), *Studi Agama Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer*, Malang : UMM Press
- Ulya, I. (2016). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia. *Fikrah*, 4(1), 20-35.
- Wahab, A. J. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisa Latar Belakang Konflik)*. Elex Media Komputindo.
- Wibisono, Y. M. (2016). Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam. *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, 1, 12-24.
- Wibowo, E. K. (2018). Membincang Gerakan Islam Transnasional. *Diegesis: Jurnal Teologi*, 3(2), 60-69.

Biodata Penulis



Dr. Dewi Purnama Sari, M.Pd lahir di Koto Baru-Solok, Sumatera Barat. Merupakan putri keempat dari Bapak H. Amris Dt. Marajo (alm) dan Ibu Hj. Yusniar. Menyelesaikan pendidikan di SD 4/82 Perumnas Koto Baru (1989), MTsN Koto Baru (1991), dan SMA N I Solok (1994). Melanjutkan pendidikan ke Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang (1998), Bimbingan dan Konseling Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang (2002), dan Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019).

Menikah dengan Sutarto (2000) dan dikaruniai tiga orang anak, Taufiq Rahman Saleh (2002), Afif Rahman Saleh (2007), dan Fathiyah Rahima Saliha (2010). Memulai karir sebagai dosen Bimbingan Konseling dan Psikologi pada Fakultas Tarbiyah STAIN Curup (2005). Selama berkarir sudah menghasilkan

beberapa karya ilmiah seperti penelitian, artikel, dan buku. Di antara buku yang sudah diterbitkan adalah Psikologi Perkembangan Anak (LP2 STAIN Curup, 2009), Psikologi Perkembangan Remaja (LP2 STAIN Curup, 2010), Psikologi Perkembangan Dewasa (LP2 STAIN Curup, 2012), Bimbingan Konseling Kelompok bersama Dina Hajja Ristianti (LP2 STAIN Curup, 2013).

Selain mengajar juga aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat Woman Crisis Center (WCC) Cahaya Perempuan Bengkulu (2015-sekarang), organisasi sosial keagamaan, serta pembina kelompok berbasis komunitas anti kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Rejang Lebong. Sekarang lebih banyak mengisi waktu untuk menulis dan memberi pengajian ibu-ibu majelis taklim.

Upaya Preventif Radikalisme Melalui *Group Counseling Discussions*

Dina Hajja Ristianti

dinahajja@iaincurup.ac.id

Pendahuluan

Radikalisme dianggap gejala umum yang terjadi pada sebuah masyarakat yang menginginkan perubahan. Annajih, dkk (2017) menjelaskan bahwa motif yang melatarbelakangi radikalisme ini berbagai macam baik itu social, politik, budaya maupun agama. Fanani (2013) mengutip dari penjelasan Syafii Maarif bahwa radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keberagamaan seseorang. Namun radikalisme kadang-kala bisa berubah menjadi terorisme. Fenomena radikalisme banyak merambah generasi muda dalam hal ini mahasiswa. Berbagai kejadian dan penelitian di kalangan pelajar dan mahasiswa telah membuktikan bahwa radikalisme sudah menjangkiti merka. Kejadian pada tahun 2018, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 berhasil mengamankan 3 orang diduga teroris dengan sejumlah barang bukti, termasuk 4 bom siap ledak dan beberapa bahan pembuatnya di Universitas Riau atau UNRI (Bertuahpos, 2018). Kejadian ini membuktikan bahwa segala macam cara yang dilakukan oleh pihak kampus, seperti mengawasi, mengontrol dan memberikan arahan agar tidak terpapar radikalisme, kalangan mahasiswa masih saja terlibat dalam aksi-aksi radikalisme.

Mengapa mahasiswa gampang terpapar radikalisme? Azca (2013) menjelaskan bahwa para mahasiswa yang merupakan para generasi muda, termotivasi oleh peran kunci para pemuda dan mahasiswa pada periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada 1966 serta peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada babak baru yang acap disebut sebagai “era Reformasi”. Para pemuda tersebut, mampu melakukan perubahan besar-besaran untuk mendapatkan Indonesia yang lebih maju. Azca menambahkan bahwa radikalisme kaum muda yang marak pada periode setelah Orde Baru di Indonesia bisa dilihat sebagai ‘aksi identitas’ atau *act of identity* merupakan sebuah upaya untuk merespon dan mengatasi ‘krisis identitas’ yang dialami oleh kaum muda baik pada aras individual maupun kolektif dalam konteks schismogenesis atau perubahan drastis yang terjadi dalam situasi transisi politik menuju demokrasi (Komaruddin, 2018; Angga, Natalia. 2016; Anas Saidi. 2016).

Kaum muda (*youth*) sebagai agensi memiliki kecenderungan lebih kuat dan kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam gerakan sosial radikal

dibandingkan dengan, misalnya, orang dewasa (*adult*). Dari analisis psikologi, Azca MN menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh fase transisi dalam pertumbuhan usia yang dialami pemuda membuat mereka lebih rentan mengalami apa yang disebut oleh ahli psikologi Erik H. Erikson sebagai ‘krisis identitas’ (*identity crisis*). Apa yang terjadi dalam ‘krisis identitas’ menyebabkan pemuda berkemungkinan untuk mengalami apa yang disebut Quintan W sebagai *cognitive opening* (pembukaan kognitif), sebuah proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal. Setelah krisis identitas ini dan menemukan pemahaman baru yang lebih dapat diterima, pemuda akan melakukan aksi identitas dengan slogan ‘aku menjadi radikal, itu yang menjadikan aku ada dan bermakna.

Sedangkan dari sisi sosiologis, mengapa para kaum muda banyak terlibat dalam aksi radikalisme, hal ini dikarenakan pemuda dianggap sebagai *agent of change* atau agen perubahan (Sunyoto, 2017). Sebagai *agent of change* ini menjadikan pemuda menempati posisi krusial sebagai mediator dalam reproduksi societal dan transformasi sosial. Ditambah lagi dengan adanya ketidakadilan baik itu secara social mapupun politik sehingga menimbulkan *moral sock* dimana terjadi sebuah peristiwa atau sebuah informasi yang tidak terduga menimbulkan perasaan marah atau geram yang akhirnya menjadikan pemuda terlibat dalam aksi politik baik itu memang dikenalnya atau belum (Rubaidi, 2008, Nur Syam, 2009).

Berbagai penyebab mahasiswa sebagai generasi muda terlibat gerakan radikalisme seperti yang disebutkan di atas, ada beberapa indikator seseorang dikatakan melakukan radikalisme. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mubarak (2013) dimana indikator itu dapat dilihat dari pemikiran radikal dan sikap radikal. Pemikiran radikal ini terkait dengan keinginan seseorang agar Indonesia menjadi Negara Islam, keinginan untuk menggantikan UUD 1945 dengan al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar negara Indonesia dan keinginan untuk menerapkan syari’at Islam. Khozin menjelaskan juga bahwa salah satu pemahaman yang radikal adalah sifat eksklusivisme dimana hanya bergaul dengan orang yang ada pada lingkungannya saja dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang berasal dari luar lingkungannya (Khozin, 2013; Djelantik, 2010; Cohen, 2009).

Sedangkan sikap dan tindakan radikal terkait dengan perilaku kekerasan dengan mengatasnamakan jihad (Esti, 2018). Perilaku kekerasan ini dilakukan karena menentang kemaksiatan, menentang aliran sesat, menentang pendirian gereja tanpa izin dan menentang Israel dalam penyerangan Palestina.

Radikalisme menjadikan rusaknya istilah Islam Rahmatan Lil'alam. Seharusnya sebagai mahasiswa, bukanlah tindakan radikal yang harus ditunjukkan karena mahasiswa adalah insan-insan yang bijak, berpengetahuan dan toleran (Qodir, 2014; Zainuddin, 2014; Bambang, dkk. 2018). Khozin (2013) menjelaskan bahwa wujud ekspresi radikalisme di kalangan mahasiswa adalah melakukan *sweeping/razia* ke tempat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

Pembahasan

Konseling Kelompok (*Group Counseling Discussions*)

Diskusi Konseling kelompok (*group Counseling Discussion*) merupakan sebuah kegiatan dalam Bimbingan dan Konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas dan memahami masalah anggota kelompok serta membantu memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok (Prayitno, dkk: 2017; Winkel, dkk: 1991). Dengan kegiatan ini maka anggota kelompok akan saling memahami dan mengerti satu sama lainnya. Bisa saling berbagi dan membantu satu sama lainnya dan pemimpin kelompok dapat mengarahkan dan memfasilitasi anggota kelompok mencapai pribadi yang efektif. Yacob, dkk (2015) menjelaskan bahwa konseling kelompok merupakan proses antara pribadi yang mengandung ciri-ciri terapeutik diciptakan seperti pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi pada kenyataan, pembukaan diri mengenai perasaan-perasaan mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian dan saling mendukung. Ciri-ciri terapeutik itu diciptakan dan dibina dalam suatu kelompok kecil dengan cara mengemukakan kesulitan dan keprihatinan pribadi kepada sesama anggota kelompok dan konselor. Para anggota kelompok adalah orang yang menghadapi berbagai masalah yang tidak memerlukan perubahan dalam struktur kepribadian. Anggota kelompok dapat memanfaatkan suasana antar pribadi dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai kehidupan dan tujuan-tujuan hidup, serta untuk belajar atau menghilangkan sikap-sikap dan perilaku tertentu. Dari kegiatan ini akan memudahkan anggota organisasi untuk saling memahami perilaku anggota lainnya (Yacob, dkk, 2015; Wilcoxon, dkk, 1989)

Group Counseling Discussions merupakan proses antara pribadi yang mengandung ciri-ciri terapeutik diciptakan seperti pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi pada kenyataan, pembukaan diri mengenai perasaan-perasaan mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian dan saling mendukung. Ciri-ciri terapeutik itu diciptakan dan

dibina dalam suatu kelompok kecil dengan cara mengemukakan kesulitan dan keprihatinan pribadi kepada sesama anggota kelompok dan konselor. Para anggota kelompok adalah orang yang menghadapi berbagai masalah yang tidak memerlukan perubahan dalam struktur kepribadian. Anggota kelompok dapat memanfaatkan suasana antar pribadi dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai kehidupan dan tujuan-tujuan hidup, serta untuk belajar atau menghilangkan sikap-sikap dan perilaku tertentu.

Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok, masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Konseling Kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor (yang jumlahnya mungkin lebih dari seorang) dan ada klien, yaitu para anggota kelompok (yang jumlahnya paling kurang dua orang). Di sana terjadi hubungan konseling dalam suasana yang diusahakan sama seperti dalam konseling perorangan, yaitu hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Pada saat itu juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelurusan sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah (jika perlu menerapkan metode-metode khusus), evaluasi kegiatan dan tindak lanjut.

Unsur-unsur konseling perorangan tampil secara nyata dalam konseling kelompok. Jika demikian, apa yang membedakan konseling kelompok dengan konseling perorangan? Satu hal yang paling pokok adalah dinamika interaksi sosial yang dapat berkembang dengan intensif dalam suasana kelompok yang tidak dijumpai dalam konseling perorangan. Melalui dinamika interaksi sosial yang terjadi di antara anggota kelompok, masalah yang dialami oleh masing-masing individu anggota kelompok dicoba untuk dientaskan. Peranan konselor sebagai “agen pembangunan” dalam konseling perorangan diperkuat oleh peranan dinamika interaksi sosial dalam suasana kelompok. Dengan demikian, proses pengentasan masalah individu dalam konseling kelompok mendapatkan dimensi yang lebih luas. Kalau dalam konseling perorangan klien hanya memetik manfaat dari hubungannya dengan konselor saja, dalam konseling kelompok klien memperoleh bahan-bahan bagi pengembangan diri dan pengentasan masalahnya baik dari konselor maupun rekan-rekan anggota kelompok. Lebih dari itu, dinamika interaksi sosial yang secara intensif terjadi dalam suasana kelompok akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan keterampilan sosial lainnya seperti meningkatkan kemampuan pengendalian diri,

tenggang rasa atau teposliro. Dalam kaitan itu suasana kelompok menjadi tempat penempatan sikap, keterampilan, dan keberanian sosial bertenggang rasa (Koutra, dkk, 2010).

Untuk memasuki konseling kelompok para anggota atau klien pada awalnya tidak memerlukan persiapan tertentu. Dengan demikian masalah yang akan mereka bawa masing-masing ke dalam kelompok besar kemungkinan berbeda-beda, atau bahkan ada di antara mereka yang tidak bermasalah. Masalah-masalah yang dibawa oleh masing-masing anggota itu nantinya akan dikemukakan dalam kegiatan kelompok. Oleh karena itu akan muncul sejumlah masalah yang berbeda-beda yang akan dibicarakan melalui dinamika interaksi sosial dalam kelompok itu.

Mengenai masalah yang dibahas dalam konseling kelompok, selain masalah yang bervariasi seperti tersebut, konselor dapat menetapkan (melalui persetujuan para anggota kelompok) masalah tertentu yang akan dibahas dalam kelompok. Pengajuan masalah atau topic tunggal seperti itu dilakukan apabila tujuan utama konseling kelompok adalah untuk pengembangan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial para anggota. Dengan pembahasan satu topic itu konselor membawa dan mengarahkan seluruh anggota kelompok untuk terlibat langsung dalam dinamika interaksi sosial kelompok. Dengan tujuan seperti itu topic atau masalah yang diajukan haruslah topik yang hangat, merangsang, dan menantang serta sesuai dengan tingkat kemampuan anggota, sehingga seluruh anggota merasa terpenggil untuk ikut membicarakannya.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sifat isi pembicaraan dalam konseling kelompok. Seperti konseling perorangan, konseling kelompok menghendaki agar para klien (para peserta) dapat mengungkapkan dan mengemukakan keadaan diri masing-masing menjadi menonjol. Masing-masing klien perlu mempercayai konselor dan rekan-rekan mereka sesama anggota kelompok, terutama kerahasiaan apa yang mereka kemukakan terjamin. Kurangnya kepercayaan anggota tentang terjaminnya kerahasiaan itu akan mengurangi sikap keterbukaan para anggota. Pernyataan konselor yang meyakinkan di hadapan segenap anggota kelompok bahwa ia akan benar-benar menjaga kerahasiaan seluruh anggota kelompok secara signifikan mempengaruhi kehendak dan sikap para anggota itu mengemukakan apa yang ingin dikemukakan di dalam kelompok itu. Lebih jauh, konselor juga harus membina semua anggota kelompok agar mereka menyadari pentingnya menjaga rahasia itu, dan agar mereka juga saling menjaga rahasia temannya sehingga mereka saling mempercayai. Sikap konselor dan para anggota serta

suasana yang sepenuhnya sejalan dengan asas kerahasiaan itu merupakan salah satu aturan yang khas harus diikuti oleh seluruh warga kelompok, dan hal itu merupakan ciri khusus dari konseling kelompok.

Pelaksanaan kegiatan *group counseling discussions* untuk mencegah radikalisme membahas tentang masalah-masalah radikalisme, factor-faktor yang menimbulkan masalah dan upaya yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dan jauh dari perbuatan-perbuatan radikalisme. Dalam kegiatan *group counseling discuss* semua anggota kelompok diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan mewujudkan kediriannya masing-masing. Kesempatan ini menjadikan anggota kelompok mengetahui dan memahami pikiran, sifat dan sikap masing-masing anggota. Namun, sikap perwujudan kedirian ini tentu saja tidak boleh melanggar aturan dalam kelompok dimana semua anggota berkewajiban menjaga kehidupan kelompok yang kondusif. Sehingga kemandirian setiap anggota perlu disertai dengan sikap tenggang rasa yang selaras, serasi dan seimbang. Dinamika kelompok yang ditimbulkan dalam kegiatan *group counseling discuss* ialah dalam rangka membina pribadi yang melahirkan sikap, keterampilan, dan keberanian sosial yang bertenggang rasa (Hartina, 2009).

Kegiatan *group counseling discuss*, mengajarkan kepada anggota kelompok untuk menghormati semua perbedaan. Perbedaan cara pandang, perbedaan kesukaan, perbedaan tujuan yang disikapi dengan tenggang rasa, akan melahirkan rasa persatuan (Andi Hadiyanto, dkk. 2017). Hal ini sangat sejalan dengan tujuan kementerian agama Republik Indonesia dalam upaya moderasi agama dimana mencari persamaan bukan malah mempertajam perbedaan (Kementerian Agama, 2019). Karakter moderasi agama yang dicanangkan kemenag adalah mementingkan keterbukaan, penerimaan dan kerjasama dari masing-masing individu atau kelompok yang berbeda.

Kegiatan *group counseling discussions* menjadi salah satu cara dalam upaya manajemen perilaku organisasi karena pada kegiatan ini anggota kelompok secara tidak langsung dapat memahami karakteristik anggota kelompok, seperti hobi dan cara pandang mereka. Pengetahuan tentang ini akan mempengaruhi rasa ikatan emosional antar anggota organisasi. Ikatan emosional ini lah yang membuat adanya rasa kebersamaan dan kekompakan yang akan menyatukan aktivitas anggota dalam mencapai tujuan organisasi (First, dkk, 2018).

Kegiatan *group counseling discussions* dapat menghindarkan anggota sebuah organisasi untuk melakukan aktivitas radikalisme.

Daftar Pustaka

- Anas Saidi. 2016. *Radikalisme Ideologi Menguasai Kampus*. Dikutip dari lipi.go.id. Diakses 19 Februari 2019.
- Annajih, ZH dkk. 2017. *Konseling Multibudaya Dalam Penanggulangan Radikalisme Remaja*. Proseding Seminar Bimbingan dan Konseling Vol. 1. No, 1
- Angga, Natalia. 2016. *Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme Dalam Beragama*. *Jurnal Al-Adyan, Januari-Juni 2016, XI, No.1*
- Andi Hadiyanto, dkk. 2017. Deradikalisasi Keagamaan: Studi Kasus Pada Lembaga Dakwah Kampus di Universitas Jakarta. *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani 1, No 1 (2017)*. Di kutip dari situs <https://journal.unsika.ac.id>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2018.
- Azca, MN. 2013. *Yang Muda, Yang Radikal*. Jurnal Maarif. Vol. 8. Hal: 16.
- Bambang, dkk. 2018. Strategi Kontra Propaganda BNPT dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Peperangan Asimetris, Vol.4 No.3*. Dikutip dari jurnalprodi.idu.ac.id. diakses pada tanggal 23 Februari 2019.
- Bertuahpos.com . 2018. Unri Kecolongan, WR UIN Suska: Kita Rutin Kontrol Kesekretariatan Mahasiswa. Dikutip dari www.bertuahpos.com
- Cohen, Jared A. 2009. *Features:Diverting The Radicalization Track*. Dikutip Dari <https://eric.ed.gov>. Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2019.
- Esti Zaduqisti. 2018. *Pengaruh Identifikasi Kelompok, Persepsi Ancaman Antarkelompok, Dan Kepribadian Terhadap Pemahaman Konsep Jihad*, dikutip dari <http://repository.iainpekalongan.ac.id> diakses pada tanggal 4 Juli 2018
- Fanani AF. 2013. *Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda*. Jurnal Maarif. Vol. 8.
- First, Jenifer, Nathan L. First & J. Brian Houston. 2018. Resilience and Coping Intervention (RCI): A Group Intervention to Foster College Student Resilience. *Journal Sosial Work with Groups, vol, 41*. H: 198-21.
- Djelantik. 2010. *Terorisme: Tinjauan Psiko-politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hartinah, Sitti. 2009. *Konsep Dasar Bimbingan Kelompok*. Bandung : Refika Aditama.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khozin, Wahid. 2013. *Sikap Keagamaan dan Potensi Radikalisme Agama Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama*. Jurnal EDUKASI Vol. 11 No. 3.

- Komaruddin Hidayat, 2018. *Mengurai Radikalisme di UIN*. Dikutip dari internasional.republika.co.id, diakses pada 11 Juni 2018
- Koutra. A , Katsiadrami.A & Diakogiannis, G. 2010. The Effect of Group Psychological Counselling in Greek University Students' Anxiety, Depression, and Self-Esteem. *European Journal of Psychotherapy & Counselling, Volume 12, Issue 2*. H: 101-111.
- Mubarak, M. Z. 2013. *Dari Semangat Islam menjadi Perilaku Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keberagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah*. Jurnal Ma'arif Vo. 8 Hal. 192.
- Nur Syam. 2009. *Tantangan Multikulturalisme di Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Jakarta: Kanisius.
- Prayitno, Dahlan, I., Afdal, & Ardi, Z. 2017. *Konseling Kelompok yang Berhasil*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qodir, Zuly. 2014. *Radikalisme Agama dalam Kajian Sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Rubaidi. 2008. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama dan Masa Depan Moderasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Saifuddin, "Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)". Dikutip dari <http://ejournal.radenintan.ac.id> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018
- Sunyoto Usman, 2017. Arah Gerakan Mahasiswa : Gerakan Politik ataukah Gerakan Moral. *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, vol.3, no.2. Yogyakarta.
- Wilcoxon, S. A., Wilcoxon, C. W., & Tingle, C. M. 1989. Enriching the Adult Student Environment (EASE): A counseling group for adult students. *Journal for Specialists in Group Work*, 14(1), 40-45
- WS Winkel, dkk. 1991. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Yacob, E.E, Schimmel, C.J, Masson, R.L & Harvill, R.L. 2015. *Group Counseling Strategies And Skills*. United States: Cengage Learning, Inc.
- Zainuddin, 2014. *Konstruksi Sosial Aktivistis Muda Islam Kampus Tentang Jihad Dan Negara Islam Di Kota Malang*. Di kutip dari situs <http://repository.uin-malang.ac.id> diakses pada tanggal 10 Juni 2018

Biodata Penulis



Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd., Kons, lahir di Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 1982, menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2005, menyandang keahlian profesi Konselor pada tahun 2009 sekaligus menyelesaikan gelar Magister Pendidikan Bimbingan dan Konseling pada kampus yang sama dan selesai pada tahun 2010. Pendidikan Doktor diselesaikan pada Tahun 2019 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu, menjadi dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sejak bulan April Tahun 2006, pada tahun 2013 s.d. 2019 mendapat amanah sebagai Kepala Laboratorium Konseling dan Pengembangan Karier Mahasiswa (LKPKM) yang merupakan ujung tombak kampus dalam pemberian layanan Bimbingan dan Konseling kepada segenap civitas akademika IAIN Curup, selain itu juga menjadi pusat rujukan bagi sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Rejang Lebong dalam menentukan kriteria penerimaan peserta didik baru untuk menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran peserta didik dalam menempuh pembelajaran di sekolah. Saat ini selain aktif mengajar pada program sarjana Fakultas Tarbiyah juga menjadi Dosen pada program Pascasarjana IAIN Curup.

Penulis menikah dengan Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd, dosen pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup, dikarunia tiga orang buah hati, yaitu Muhammad Syafiq Safar Rahman (11 Tahun), Syauqina Ramadhani (8 Tahun) dan Syafira Putri Adelia (lahir pada bulan September 2020).

Penulis konsen melakukan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling sejak tahun 2010, diantara Penelitian Hibah yang telah di peroleh antara lain adalah Manajemen Perilaku Organisasi Melalui Group Counseling Discussion (Upaya Preventif Radikalisme di Lembaga Dakwah Kampus Unit Kegiatan Mahasiswa Cahaya Islam IAIN Curup) Tahun 2019, Konseling Islami Untuk Meningkatkan Efikasi Diri Pasien HIV/AIDS Tahun 2018, Analisis Hubungan Interpersonal Mahasiswa Terhadap Dosen Dalam Proses Bimbingan

Skripsi (Studi pada Mahasiswa Semester VIII Jurusan Tarbiyah STAIN Curup) Tahun 2017, dan beberapa penelitian lainnya.

Penulis telah menghasilkan beberapa buah buku dalam bidang Bimbingan dan Konseling, diantaranya adalah *Facing the ASEAN Economic Community We Prepare Guidance and Counseling Personnel Who Professional and Religius* (Editor, 2016), Buku *Bimbingan Konseling Kelompok (BKK)* (2013), Buku *Psikologi Lintas Budaya* (2015) dan Buku *Penilaian Konseling Kelompok* (2020). Penelitian yang telah dihasilkan oleh penulis dapat diakses pada SCOPUS Profile berikut ini : <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211433372>. Profil lengkap penulis dapat diakses pada laman ORCID berikut ini : <https://orcid.org/0000-0002-7307-6546> dan link Google Scholar berikut ini : <https://scholar.google.co.id/citations?user=pvSVmWIAAAAJ&hl=id>.

PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING (BK) BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DI SMA NUHAMMADIYAH CURUP

Beni Azwar

Pendidikan menurut UU Nomor 20 tahun 2013 pasal 1 dikatakan, bahwa: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara.³⁸² Pendidikan dengan demikian adalah proses yang disengaja dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) menjadi manusia yang cerdas, terampil dan kreatif, sehingga potensi-potensi yang dimiliki akan berkembang dengan optimal, dan akhirnya terbentuk kedewasaan secara psikopisik.

Di samping dari pelaksanaan pendidikan secara merata, baik di perkotaan hingga ke pelosok pedesaan bahwa pendidikan itu untuk semua, tanpa memperhatikan latar belakang sosial ekonomi, budaya, agama, dan latar belakang psikopisik dari peserta didik, sebab ada peserta didik/siswa normal serta yang mengalami keterbatasan baik fisik maupun psikis yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus (ABK)—dalam bahasa hukum dan perundang-undangan disebut dengan penyandang disabilitas. Semua siswa memiliki hak dan perlakuan yang sama dalam pendidikan, sebab pendidikan bertujuan supaya siswa dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, baik fisik, psikis dan religi, sehingga akan menjadi makhluk yang bernilai disisi Allah SWT. Pencapaian tujuan tersebut pemerintah telah merumuskan penyusunan delapan standar nasional pendidikan, diantara standar tersebut ada standar proses pada pasal 1 ayat 1 dinyatakan, bahwa; Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mendakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.³⁸³

Untuk melaksanakan tugas diperlukan guru yang memiliki fungsi strategis, dan ditinjau dari jenisnya guru terbagi menjadi guru bidang studi, guru kelas,

³⁸² UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, pasal 1, ayat 1

³⁸³ 2Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

guru praktik dan guru bimbingan konseling (BK). Guru BK adalah guru yang melaksanakan bimbingan konseling di sekolah dan berlatar belakang dari bimbingan konseling, dengan tujuan untuk membantu tugas-tugas perkembangan peserta didik/siswa. baik itu siswa di sekolah umum, siswa di sekolah khusus (SLB), maupun gabungan siswa normal dan anak berkebutuhan khusus dengan program pendidikan inklusif, dimana anak normal dengan ABK belajar bersama dalam satu kelas, dengan kurikulum dan mata pelajaran yang sama, serta guru yang sama, tentunya dengan pelayanan yang sama.

Berdasarkan data UNESCO tentang pendidikan Inklusif di Indonesia untuk tahun 2007 dari 130 negara, Indonesia berada diposisi 58. Hal ini karena berbagai faktor; kurangnya dukungan pemerintah, sehingga pelaksanaannya belum menyeluruh. Untuk 2008 Indonesia urutan 63, selanjutnya 2009 turun menjadi 71³⁸⁴. Jumlah ABK (ABK) di Indonesia ternyata cukup besar, diperkirakan 4,2 juta ABK di Indonesia, jika 10 %(anak usia 5,4 tahun) Jumlah anak usia sekolah berdasarkan data dari BPS 2005 sebesar 42.871.041 jiwa, maka di Indonesia ada 4,2 juta ABK.³⁸⁵

ABK di Indonesia yang mendapatkan pendidikan formal menurut data resmi Direktorat PSLB tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah ABK yang sudah mengikuti pendidikan formal baru mencapai 24,7% atau 78.689 anak dari populasi anak cacat di Indonesia, yaitu 318.600 anak (Direktorat PSLB, 2008). Ini artinya masih terdapat sebanyak 65,3% ABK yang masih terseklusi, termarginalisasikan dan terabaikan hak pendidikan. Bahkan angka ini diperkirakan lebih besar, karena hanya 0,7% jumlah populasi penduduk serta sistem pendataan yang masih buruknya.³⁸⁶

Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dari pemerintah, khususnya dalam hal ketenagakerjaan. Pada tahun 2010 untuk 24 provinsi di Indonesia, data BPS menerangkan terdapat 1.235.320 penyandang disabilitas, dengan rincian 687.020 orang laki-laki, dan 548.300 orang perempuan.⁵ Sebagian besar dari mereka tidak tamat sekolah dasar sebesar 58,9 %, dan berpendidikan sekolah dasar sebesar 28,1 %, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya penyandang disabilitas masih berpendidikan rendah, ditambah dengan masih banyak penyandang disabilitas yang tidak

³⁸⁴ Lihat Koran *Kompas*, tanggal 30 November 2009

³⁸⁵Fasli Jalal, "Pembukaan Parenting Education dalam Rangka Hari Anak 17 Juli 2013", Auditorium BKKBN Jakarta Timur.

³⁸⁶ Alimin Z, "Memahami Pendidikan Inklusif dan ABK", dalam *Makalah*, tidak diterbitkan, (Bandung: Jurusan PLB FIP UPI, 2005), hlm. 1

mempunyai keterampilan, membuat para penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan persoalan di atas dan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan Inklusif bagi penyandang disabilitas tahun 2002, secara resmi pemerintah melakukan ujicoba pada 9 propinsi, dan sejak saat itu 1500 lebih siswa telah belajar di sekolah reguler. Tahun 2005 menjadi 6.000 orang atau setara 5,11% dari jumlah ABK. Sedangkan pada 2007 menjadi 7,5% setara dengan 15.181 orang dan tersebar di 796 sekolah Inklusif dengan rincian 17 Taman Kanak-kanak, 648 Sekolah Dasar, 75 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan 56 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.³⁸⁷

Berkaitan dengan fakta penelitian setelah pelaksanaan pendidikan inklusif terungkap, siswa dengan hasil belajar rendah ada kecenderungan mengidap gangguan/kelainan. Survei terhadap 696 siswa SLTA dari 4 provinsi dengan nilai rata-rata di bawah 6,0 (enam, nol), terlihat 71,8% orang terkena disgrafia, 66,8% orang disleksia, 62,2% orang diskalkulia, juga 33% orang mengalami gangguan emosi dan perilaku, 31% orang gangguan komunikasi, 7,9% orang cacat / kelainan anggota tubuh, 6,6% orang gangguan gizi dan kesehatan, 6% orang gangguan penglihatan, dan 2% orang gangguan pendengaran.³⁸⁸

Menyikapi persoalan di atas diperlukan pendidikan yang berdaya guna yang melibatkan seluruh komponen dalam pendidikan. Guru Pembimbing atau guru Bimbingan Konseling dengan kompetensi personal, sosial, paedagogik, profesional dan instrumental seyogyanya dapat memberikan pelayanan BK untuk menumbuhkembangkan anak normal dan ABK. Ada beberapa tugas guru BK yang sangat esensial bagi ABK, disamping membantu tugas-tugas perkembangannya, juga memandirikan ABK dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya, baik permasalahan pribadi, belajar, sosial, karir. sehubungan dengan itu Carmcal and Calvin, mengemukakan lima tugas konselor di lingkungan pendidikan. Pertama, *providing the students an oppurtunity to talk through his problems*, (konseling memberi kesempatan bagi siswa untuk membicarakan seluruh permasalahannya melalui proses konseliling).

Kedua, *counseling with potential drop outs* (mengonseling siswa-siswa yang berpotensi *drop out*). Ketiga, *counseling with students concerning academic failure* (konseling tentangkegagalan siswa dalam belajar). Keempat, *counseling with students in evaluatingpersonal assets and limitations* (konseling tentang evaluasi potensi-

6 Sunaryo, *Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa*, (Jurusan PLB, FIP UPI, 2009), hlm.8

³⁸⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Identifikasi ABK Dalam Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007), hlm. 43

potensi siswa dan hambatan-hambatannya). *Kelima, counseling with students concerning learning difficulties* (konseling tentang kesulitan belajar siswa).³⁸⁹ Berkaitan dengan hal di atas terutama pada bagian empat dan lima, terlihat bahwa konseling membantu mengevaluasi potensi-potensi siswa dan hambatannya, serta bimbingan dan konseling tentang kesulitan belajar siswa. Fenomena selama ini di sekolah, Bimbingan dan konseling diperuntukkan untuk anak-anak normal bermasalah, sehingga dengan masalah tersebut mereka terhambat mengisi tahapan-tahapan perkembangannya.

Dengan kebijakan pemerintah tentang penyandang disabilitas yang diatur dalam UU No. 8 Th 2016 mengharuskan sekolah menerima ABK dengan program pendidikan Inklusif dan sekolah harus memberikan pelayanan yang sama tanpa mendiskriminasi ABK dengan siswa biasa dalam proses pembelajaran. Begitu pula dasar pelaksanaan BK di sekolah Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, dan dijelaskan: Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan non formal.³⁹⁰

Berdasarkan aturan itu bahwa guru BK/konselor harus memberikan pelayanan untuk semua peserta didik, tanpa terkecuali ABK. ABK dibagi dua bagian, yaitu anak berbakat khusus dengan bakat dan potensi khusus yang memiliki IQ di atas rata-rata dan ABK/difabel.

Berkaitan dengan hal di atas bahwa BK dengan berbagai jenis layanannya selama ini, hanya untuk siswa normal bermasalah, dengan masalah tersebut mereka terhambat dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, terutama tugas-tugas belajarnya. Siswa yang memiliki bakat khusus dengan IQ relatif tinggi, atau kemampuannya di atas kawan-kawannya, serta perlu program pengayaan untuk optimalisasi kemampuan yang dimilikinya. Khusus untuk ABK dengan segala keterbatasannya belum menjadi wilayah kerja BK. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya sekolah yang merespon kebijakan pemerintah untuk menangani pendidikan ABK di sekolah inklusif.

³⁸⁹Belkin, *Guidance and Counseling*, (New York : Published, 1982), hlm.67

³⁹⁰ ⁹Permendiknas No. 27 tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

Penelitian ini mengambil 3 sekolah sebagai objek penelitian, yaitu: MAN 2 Payakumbuh, SMKN 2 Bukittinggi dan SMA Muhammadiyah Curup, dengan alasan sebagai berikut. Pertama, masing-masing sekolah mewakili karakteristik sekolah, yaitu MAN 2 Payakumbuh mewakili madrasah di bawah Kementerian Agama dengan kurikulum nasional dan kurikulum keagamaan, SMKN 2 Bukittinggi mewakili sekolah kejuruan dan SMA Muhammadiyah Curup mewakili sekolah umum. Kedua, jarak antar sekolah relatif jauh, sehingga data bias relatif kecil. Ketiga, dalam pelaksanaan layanan BK ketiga sekolah memakai BK Pola 17 Plus. Keempat, belum ada pengangkatan GPK dari PLB.

Dari hasil observasi, guru BK dalam memberikan berbagai layanan Bimbingan Konseling memakai BK Pola 17 di 3 sekolah yang dijadikan objek penelitian, yaitu MAN 2 Payakumbuh, SMKN 2 Bukittinggi dan SMA Muhammadiyah Curup. Ketiga sekolah ini melaksanakan program pendidikan Inklusif dengan jenis program Inklusif yang berbeda. MAN 2 Payakumbuh melaksanakan program Pendidikan Inklusif untuk ABK tunanetra, SMKN 2 Bukittinggi dengan program Inklusif untuk anak *low vision* (keterbatasan pandangan) dan *slow learner* (lambat dalam belajar). Sedangkan SMA Muhammadiyah Curup melaksanakan program Inklusif untuk ABK Tunanetra, tunagrahita, tunarunggu, autisme ringan.

Dari hasil wawancara di 3 sekolah yang dijadikan objek penelitian, pelaksanaan Bimbingan Konseling sudah dilaksanakan oleh guru BK. Untuk MAN 2 Payakumbuh dan SMKN 2 Bukittinggi guru BK berlatar belakang S1 BK, sedangkan SMA Muhammadiyah Curup adalah guru bidang studi yang sudah mendapatkan pendidikan dan latihan BK dengan pola dan jam memadai untuk melaksanakan layanan BK. Dalam melaksanakan program BK untuk ABK sudah terlaksana, hanya saja jumlah guru BK di MAN 2 Payakumbuh berjumlah 6 orang, SMKN 2 Bukittinggi berjumlah 6 orang, sedangkan di SMA Muhammadiyah Curup jumlah 1 orang, sementara jumlah ABK 12 orang dengan jenis keterbatasan yang lebih banyak dibanding 2 sekolah lainnya, sedangkan untuk membantu tugas guru BK kadangkala mendatangkan guru pembimbing khusus dari SLB yang tidak jauh dari SMA Muhammadiyah.

Fakta lain dari observasi 9 September 2015 terlihat di MAN 2 Payakumbuh terdapat 4 orang anak tunanetra. Sekolah ini memiliki 6 orang guru BK. Adapun di SMKN 2 Bukittinggi yang diobservasi pada 10 September 2015 terlihat bahwa jenis Inklusif di sekolah ini adalah *low vision* dan *slow learner*. Sekolah ini memiliki 6 orang guru BK dan semuanya berlatar belakang bimbingan konseling, dan ABK sudah mendapatkan layanan bimbingan

konseling.. Berbeda dengan SMA Muhammadiyah Curup yang diobservasi pada 12 september 2015, di sekolah ini guru BK bukan dari S1 BK, tetapi guru lain yang sudah Diklat BK. Di sekolah ini ABK sangat variatif, terdiri dari anak tunanetra, tuna grahita, tunarungu, dan autis ringan.

Semua fenomena tersebut juga terjadi di MAN 2 Payakumbuh Sumatera Barat dan SMKN 2 Bukittinggi Sumatera barat, serta SMA Muhammadiyah Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu yang akan dijadikan objek penelitian. Permasalahan yang muncul pada ABK ini adalah hasil belajar rendah, bahkan ada yang tinggal kelas 2 tahun berturut-turut, sekolah tidak memiliki alat ukur kecerdasan (IQ) untuk anak berkebutuhan khusus yang menjadikan hasil belajarnya rendah, fasilitas belajar yang kurang, aksesibilitas dalam pembelajaran yang dilakukan guru dengan mengabaikan perbedaan individu, sehingga ABK ini dianggap memperlambat pencapaian target kurikulum dan menurunkan peringkat sekolah.

Berbeda dengan 2 sekolah di atas, SMA Muhammadiyah Curup Bengkulu juga mengalami masalah belajar siswa, bahkan lebih kelihatan permasalahan belajar yang belum optimal penanganannya. seperti keluar masuk sewaktu guru menerangkan materi pembelajaran, hasil belajar di bawah KKM, bahkan ada anak tunagrahita yang muntah, karena tidak mampu mengerjakan soal matematika, begitu juga dengan pola pelayanan belajar yang belum optimal, siswa tidak mau dipaksa belajar, karena guru takut kalau siswanya pindah, sedangkan mencari siswa tambahan susah. Permasalahan untuk anak tunanetra adalah kesulitan memahami rumus matematika dan IPA. Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul : Pelayanan Bimbingan Konseling bagi ABK di Sekolah inklusif

Daftar Pustaka

- Alimin Z, “Memahami Pendidikan Inklusif dan ABK”, dalam *Makalah*, tidak diterbitkan, (Bandung: Jurusan PLB FIP UPI, 2005), hlm. 1
- Belkin, *Guidance and Counseling*, (New York : Published, 1982), hlm.67
- Departemen Pendidikan Nasional, *Identifikasi ABK Dalam Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007), hlm. 43
- Fasli Jalal, “Pembukaan Parenting Education dalam Rangka Hari Anak 17 Juli 2013”, Auditorium BKKBN Jakarta Timur.
- Lihat Koran *Kompas*, tanggal 30 November 2009

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2007
tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendiknas No. 27 tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Konselor

Sunaryo, *Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan
Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa*, (Jurusan PLB,
FIP UPI, 2009), hlm.8

UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, pasal 1,
ayat 1

Studi Tradisi Pendidikan Multikultural Pada STIQ An Nur di Yogyakarta Hendra Harmi

Pendahuluan

Keragaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat ditolak dan inheren dengan kehidupan manusia. Nyaris tidak ada negara terbebas dari keragaman atau yang disebut juga dengan multikultural. Indonesia sebagai sebuah negara memiliki keragaman dari sisi agama, bahasa, etnisitas, strata ekonomi, aspirasi politik dan budaya,³⁹¹ sehingga masyarakat Indonesia di kenal dengan negara yang multicultural.³⁹²

Keragaman bangsa Indonesia tidak hanya berada di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, tetapi hampir seluruh wilayah NKRI memiliki keragaman dari sisi budaya. Menurut catatan BPS, total etnis dan subetnis yang tersebar di Indonesia berjumlah 1.072. Keragaman etnisitas tersebar di diberbagai kota/kabupaten dan propinsi yang ada di wilayah NKRI.³⁹³ Ada sebanyak 1341suku/ sub suku,³⁹⁴ pada tahun 2018 tercatat ada sebanyak 652 bahasa.³⁹⁵ yang tersebar di 6 ribu pulau dari 17.504 pulau yang tersebar di Indonesia.³⁹⁶

Kemajemukan bangsa Indonesia tersebut di atas, satu sisi menjadi kekuatan sosial dan sumber daya manusia yang kaya dan khas, apabila dapat dikelola dengan baik, namun di sisi lain, kemajemukan menjadi sumber bencana dan sumber konflik apabila tidak dapat ditata dan dikelola dengan baik. Menurut Pierre L.Van den Berghe, pada masyarakat majemuk sering terjadi konflik, karena adanya segmentasi kelompok, struktur sosial dan ekonomi yang berbeda, integrasi antar etnik tidak terjadi secara sukarela, konsensus antara anggota kurang dikembangkan, serta adanya dominasi politik kelompok (suku, agama, etnis, organisasi masyarakat, dan

³⁹¹ Choirul Mafudz, 2011, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V., h. 8

³⁹² Azyumardi Azra, dalam pengantar Zakiyuddin Baydhowi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta : Erlangga, h. vii

³⁹³ <http://opinion-publika.blogspot.com/2011/06/masyarakat-majemuk-indonesia.html>

³⁹⁴ <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>

³⁹⁵ <https://tirto.id/jumlah-bahasa-daerah-di-indonesia-mencapai-652-pada-2018-cSQY>

³⁹⁶ <https://www.99.co/blog/indonesia/jumlah-pulau-di-indonesia/>

partai politik tertentu).³⁹⁷ Kegagal negara dalam mengelola sumber konflik di atas, berakibat terjadinya disintegrasi bangsa, bahkan berujung pada bubarnya suatu negara.

Indonesia sebagai negara yang majemuk, juga menghadapi tantangan berupa konflik-konflik sosial-ekonomi, politik, dan keagamaan, seperti yang kerusuhan yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 1980 yang dilatar belakangi oleh kecemburuan sosial-ekonomi terhadap etnis Cina, kerusuhan antara etnis Dayak dengan Madura di Kalimantan Barat pada tahun 1930, 1990, dan meluas ke wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2001, konflik atas nama agama yang muncul pada tahun 2011, yang berujung pada kekerasan dan pembakaran pesantren milik warga Syiah di Sampang Madura. Terjadinya penghianatan G 30 S PKI pada tahun 1965 dan demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1998, yang berujung pada pergantian presiden RI menunjukkan adanya dominasi kekuasaan politik kelompok tertentu. Terakhir, terbelahnya sikap politik masyarakat pada waktu pemilihan presiden tahun 2014 hingga saat ini, antara kelompok yang pro dan kontra antar pendukung calon presiden, munculnya narasi kelompok yang pro terhadap Presiden terpilih adalah paling NKRI, dan yang kontra dianggap pecundang dan tidak NKRI.

Pada tataran ini, transformasi di bidang pendidikan bagi segenap masyarakat dan bangsa Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengelola masyarakat majemuk atau multikultur. Pendidikan sejatinya mampu mengurai berbagai sumber konflik, mencari solusi, membangun budaya nasional, melestarikan dan mentransmisikan nilai-nilai budaya nasional pada generasi yang akan datang.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang ada dibawah binaan Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan bagian integral dari system pendidikan nasional yang juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan praktek baik nilai-nilai budaya bangsa, melakukan terobosan baru, responsif terhadap perkembangan dinamika masyarakat multikultur Indonesia, serta mampu melakukan inovasi kurikulum yang relevan dengan kepentingan masyarakat multikultur dan dunia dewasa ini. Lebih dari itu pendidikan merupakan proses “memanusiakan manusia”

³⁹⁷ Pierre L. Van den Berghe dalam <http://induct.blog.fisip.uns.ac.id/2011/01/05/struktur-majemuk-masyarakat-indonesia/>

dimana manusia diharapkan mampu memahami dirinya, orang lain, alam dan lingkungan budayanya.

Pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk pemersatu masyarakat bangsa Indonesia, pengembangan potensi diri bagi semua kelompok dan golongan, memiliki hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan merata. Untuk itu pendidikan multikultural, perlu menjadi perhatian bagi semua kalangan terlebih di perguruan tinggi, agar spektrum pemikiran dan nilai-nilai pendidikan multikultural dapat berlangsung dan berkembang pada institusi pendidikan. Karena pendidikan multikultural sebagai sebuah gagasan akan menjelaskan tentang pentingnya kesetaraan dalam memperoleh akses pendidikan tanpa memperhatikan perbedaan gender, suku, ras, budaya, kelas sosial, dan agama.³⁹⁸

Sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi PTKIN untuk memperhatikan khusus dalam perumusan (*blue print*) kurikulum berwawasan pendidikan multicultural. Di mana PTKIN bertanggung jawab untuk mempersiapkan *agent of change*, tokoh agama dan guru agama Islam yang mengajar di masyarakat, sekolah-sekolah umum ataupun madrasah/pondok pesantren, mereka dituntut untuk memiliki wawasan multicultural, mampu menampilkan Islam sebagai *rahmatan lil'alam*, menumbuhkembangkan kesadaran nilai-nilai kehidupan multicultural, inklusifisme dan toleransi terhadap masyarakat. Sehingga pendidikan agama diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik-konflik social di tengah masyarakat.

STIQ An-Nur adalah Perguruan Tinggi Islam Swasta yang memiliki karakteristik multi kultural. Hal tersebut didasari atas: *pertama* STIQ An Nur tersebut berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana daerah ini adalah representasi penduduk Indonesia. Yogyakarta adalah pertemuan setiap suku, bahasa dan agama yang ada di Indonesia. *Kedua*, STIQ An-Nur berada di wilayah yang secara kultural sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya (kultur) yang ada (*local wisdom*). Dimana ajaran-ajaran yang berbasis pada budaya tersebut sangat menghormati perbedaan kultur. *Ketiga*, civitas akademika memiliki faham keagamaan yang juga berbeda, karena dipengaruhi oleh organisasi keagamaan yang ada seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa STIQ An-Nur

³⁹⁸ Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme; Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), 203

berafiliasi dengan NU. *Keempat*, perbedaan organisasi ekstra kampus juga memberikan warna tersendiri kepada ego sektoral antar mahasiswa seperti PMII, KAMMI, HMI, organisasi kedaerahan, dll sebagainya. *Kelima*, pada khususnya di STIQ An-Nur adalah Perguruan Tinggi Islam Swasta yang berbasis pada nilai-nilai pesantren, dimana pesantren adalah lembaga pendidikan yang melebur dengan kultur masyarakat dan budaya masyarakat setempat.

Atas dasar perbedaan karakteristik multikultural inilah, maka pendidikan multikultural menjadi penting untuk mengelola perbedaan atau keragaman yang di STIQ An-Nur, sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan multikultural, serta mampu beradaptasi pada lingkungan, budaya, agama karakteristik yang juga berbeda pada lingkungan masyarakat dimana mereka berada.

Misi utama dari hadirnya PTKIS, STIQ An-Nur, adalah menghadirkan nilai-nilai Islam yang menghargai keragaman budaya, etnik, suku, bahkan agama, sehingga meniscayakan materi-materi keislaman yang “akomodatif” dan berbasis *rahmat lil ‘alamin*. Melihat realita multi-etnik, multi-kultur dan multi-madzhab di STIQ An-Nur berimplikasi pada paradigma multikultural seperti ini telah berjalan di lingkungan STIQ An-Nur sejak lama dan terus menerus dikembangkan untuk semua ranah, terutama dalam proses pembelajaran dan materi atau bahan ajarnya. Para dosen dan mahasiswa STIQ An-Nur telah diperkenalkan paradigma multikultur dalam perkuliahan sebagaimana tercermin dalam kurikulum, silabi, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), *course outline*, bahan ajar, sampai pada kompetensi lulusannya.

Gambaran materi pokok dan bahan ajar matakuliah keislaman yang selama ini berjalan memperlihatkan penekanan pada substansi kajian Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis yang disampaikan secara deduktif-normatif. Sementara upaya internalisasi dengan nilai-nilai multikultural dalam ranah filosofis dan etis belum dilakukan secara memadai. Materi fiqh, misalnya, umumnya disampaikan dengan penekanan pada sumber hukum Islam primer berupa penggalian hukum dari dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis dan produk hukumnya berujung pada ketentuan halal, haram, mubah, sunnah, dan makruh, dimana dalam penjelasannya belum diintegrasikan dengan perspektif “multi” dan dasar pemikiran filosofis-etis. Penelitian ini hendak mencemati apakah hadirnya multi-etnik, multi-kultur dan multi-madzhab di lingkungan STIQ An-Nur diikuti dengan perubahan muatan keilmuan dosen matakuliah keislaman ditersebut.

Implementasi keilmuan keislaman berbasis multikultural ini tentu saja perlu dievaluasi dan diteliti agar dapat diketahui sejauhnya mana dampak dan efektifitasnya dalam merubah orientasi keilmuan di STIQ An-Nur. Hasil penelitiannya juga amat bermanfaat bagi hadirnya kebijakan dan program selanjutnya dari pihak STIQ An-Nur. Atas dasar itulah, maka dipandang signifikan dan kontributif bilamana penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan mengevaluasi muatan pendidikan multikultural dalam materi pokok dan bahan ajar matakuliah keislaman dosen STIQ An-Nur, mengingat perkuliahan dan dosen sebagai *core figure* merupakan ujung tombak bagi suksesnya pengembangan dan penerapan keilmuan keislaman yang berparadigma *islam rahmat lil Alamin*.

Pembahasan

1. Relasi Pendidikan Multikultural dan Tradisi Pesantren

Memahami struktur, dan tradisi pendidikan multikulturalisme di STIQ An-Nur, agaknya tidak dapat dilepaskan dari beberapa konteks, yakni: konteks sosial-historis pendidikan multikultural, relasi kultural antara pesantren dan nilai-nilai multikulturalisme yang tumbuh dan diajarkan di pesantren. Dua hal ini perlu diselidiki, hingga relasi antara pendidikan multikultural dan pesantren yang diwujudkan dalam kampus pesantren di STIQ An-Nur dapat dipahami.

2. Indonesia dan Konteks Sosial-Historis Pendidikan Multikultural

Setiap sistem, dan gerakan rekognisi seperti pendidikan multikultural memiliki konteks yang khas dimana ia tumbuh. Tidak terkecuali untuk konteks pendidikan multikultural di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Tidak hanya dari aspek etnis, bahasa, pandangan politik, tetapi juga agama. Kondisi ini menuntut Indonesia agar merumuskan sebuah pola pengelolaan multikulturalisme secara baik. Robert Gribb (2002) menguatkan fakta tersebut, dimana menurutnya:

“Memandang peta rasanya cukup untuk memberikan kesan tidak mungkin mengenai adanya Negara Indonesia. Dengan lebih 13.000 pulau, yang terbentang dari Barat ke Timur sepanjang lebih dari 5.000 km melintasi tiga zona waktu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Orang akan menduga bahwa di sekumpulan pulau yang banyak itu sekurang-kurangnya terdapat beberapa negara. Tetapi, ternyata hanya ada satu, Republik Indonesia. Di sisi lain, keheranan akan adanya satu Indonesia, hanyalah timbul di hati orang memandang peta.

Bagi presiden pertama negara ini, Sukarno, kesatuan Indonesia bukanlah suatu anomali: itu sudah ditakdirkan.”³⁹⁹

Gribb berhasil memetakan betapa anomalnya Indonesia dengan fakta multikultur yang ada di atasnya. Tapi ia belum mampu memahami mengapa anomali itu berlangsung dan bahkan menjadi modal bagi *nation-state* Republik Indonesia? Realitas tersebut berdiri di atas landasan ontologis yang khas, yakni pluralisme. Ia tidak hanya sebagai sebuah realitas yang beraneka ragam, tetapi juga memuat ide yang hampir universal di seluruh dunia. Negara yang majemuk, ini yang sering diungkapkan sebagai istilah atas landasan ontologis multikulturalisme Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah *landscape* multikultural atau istilah lainnya, ia adalah barometer dari multikulturalisme dunia.

Secara historis, sejak Indonesia menjadi sebuah *nations-state*, negara ini tidak mengalami persoalan dengan pluralitas bangsa. Kemajemukan tidak menjadi ancaman, bahkan di mata dunia internasional pluralitas di Indonesia adalah modalitas yang sangat langka. Seiring perkembangan politik-ekonomi, dan transformasi sosial-ekonomi, di beberapa zona, pluralitas telah menimbulkan persoalan pelik bagi Republik Indonesia. Adam Schwarz melalui bukunya *A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability*, telah memaparkan bahwa sikap anti pluralitas di Indonesia, hampir tidak dapat dilepaskan dari tensi politik dan ekonomi. Reformasi 1998 meletus di samping karena peliknya persoalan politik-otoritarian Orde Baru, tapi juga munculnya gerakan anti-china. Akhirnya, etnis China menjadi sasaran kemarahan pribumi karena China dianggap sebagai kelompok yang terlalu dominan, dan kapitalistik yang dihidupi oleh negara.⁴⁰⁰

Tidak hanya itu, konflik horizontal perlahan mengganggu stabilitas Indonesia sebagai negara bangsa. Rentang waktu 1996-2000 adalah tahun panceklik multikulturalisme di Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa konflik berbasis etnis dan agama terjadi mengawali reformasi di Indonesia. Konflik Poso, Ambon, dan Aceh adalah fakta dimana Indonesia pernah mengalami “panceklik” multikulturalisme. Terkait gerakan anti china misalnya, gerakan ini merupakan respon terhadap peran etnis China yang

³⁹⁹ Lihat dalam Donald Emerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 3.

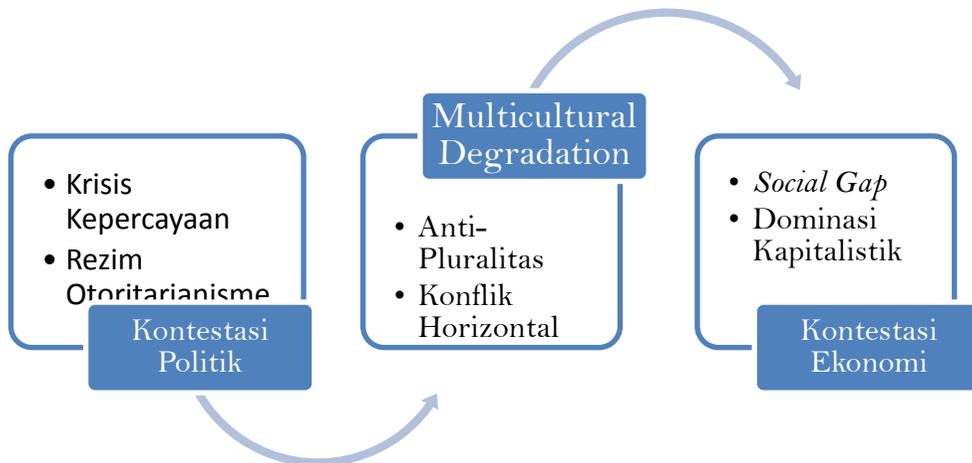
⁴⁰⁰ Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability* (Colorado: Westview Press, 2000), hlm. 98.

menjadi bagian integral, tak terpisahkan dari perekonomian Indonesia di abad ke-19. Faktanya, 70% aktivitas ekonomi privat berupa perusahaan dan industri dimiliki oleh China.⁴⁰¹ Tidak mengherankan jika kemudian tatkala krisis moneter menghantam Indonesia, etnis China dan kapitalis Tiongkok dianggap sebagai “biang” dan akar dari krisis tersebut. Tidak berlebihan jika kemudian ‘amuk massa’ ditujukan kepada segala sesuatu yang berbau China, dan bahkan Soeharto pun akhirnya dilengserkan.

Konteks historis di atas melahirkan dua tesis utama, yakni: *Pertama*, bahwa Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa berdiri di atas landasan ontologis yang khas, yakni pluralisme. Ini otomatis mendorong Indonesia menjadi barometer multikulturalisme dunia. Ketika Indonesia berhasil mengelola pluralitasnya sebagai sebuah bangsa, maka negara lain akan ‘berkaca’ dan menjadikan Indonesia sebagai model. Tetapi sebaliknya, jika tidak, maka Indonesia diibandingkan kebangkrutan sebagai sebuah *nations-state*. *Kedua*, krisis etnisitas dan konflik horizontal yang ditimbulkannya adalah produk dari dilema serta krisis ekonomi; politik dan runtuhnya modal sosial antar komponen anak bangsa⁴⁰².

Diagram 1

Relasi Politik; Ekonomi dan Multikulturalisme



Dari diagram di atas dapat dipahami bahwa ada dua kontestasi yang secara empiris-teoritik, menyebabkan degradasi multikultural, dan itu

⁴⁰¹ *A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability*.

⁴⁰² Persoalan kebudayaan yang kemudian dianggap sebagai ancaman terhadap multikulturalisme adalah hal yang kompleks dimana di dalamnya termuat persoalan kontestasi identitas; degradasi kemampuan *local wisdom* dalam menyelesaikan konflik. Bahkan ironisnya, peran budaya sebagai modal untuk merawat multikultural tergerus oleh birokratisasi budaya yang disebabkan salah urus oleh negara.

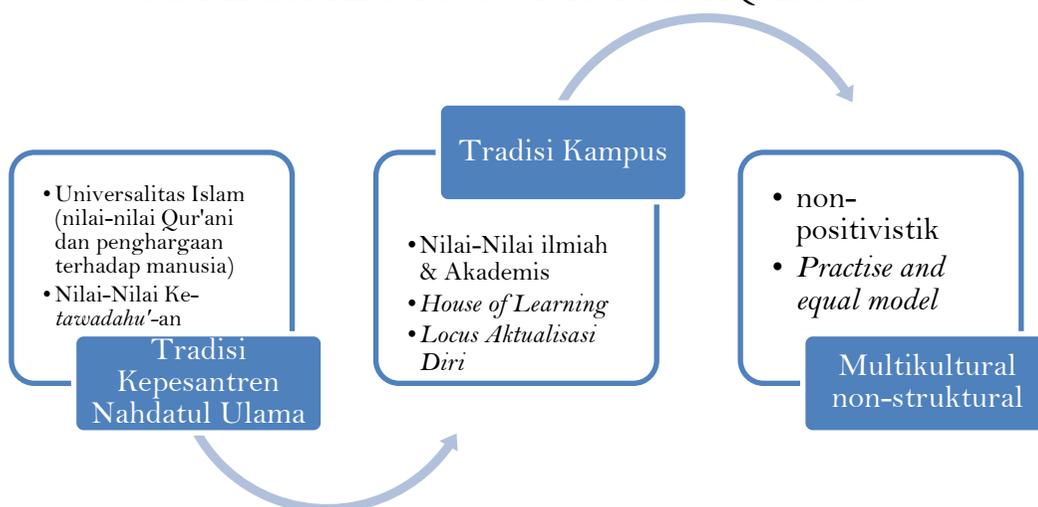
adalah “kontestasi politik”, dan “kontestasi ekonomi.” Dua hal ini diidentifikasi sebagai pra-kondisi bagi degradasi multikultural karena kontestasi politik dan ekonomi dapat melahirkan gelombang anti-pluralitas dan terjadinya konflik horizontal. Kontestasi ekonomi yang biasanya mewujud dalam bentuk dominasi kapitalistik yang berlebihan, dan melebarnya ketimpangan sosial. Ini akhirnya akan menyebabkan lahirnya rasa “tersingkirkan”, “diskriminatif” yang diterima oleh satu etnis. Sementara, kontestasi politik yang dimuat oleh krisis kepercayaan dan munculnya rezim otoritarianisme, akan menyebabkan hilangnya legitimasi negara dalam mengelola pluralitas dan kemajemukan.

Menyadari kondisi ini, maka Indonesia sebagai sebuah negara berupaya mengelola pluralitas yang sudah ditakdirkan melekat pada bangsa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari kebijakan desentralisasi hingga strategi kebudayaan melalui sistem pendidikan multikultural. Ini dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Amitav Acharya melalui bukunya *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*, bahwa setelah kotak pandora reformasi terbuka, Indonesia sesungguhnya tengah berjalan pada suatu fase dimana Republik Indonesia ini berusaha membangun atau *recovery* tiga fondasi domestik, yakni: demokrasi, pembangunan dan stabilitas.⁴⁰³ Dalam konteks ini kemudian negara merasa penting untuk menguatkan pendidikan multikultural. Tidak hanya untuk menumbuhkan kesadaran akan pluralitas bangsa, tetapi sesungguhnya lebih pragmatis adalah untuk menguatkan rasa nasionalisme dan meminimalisir politik identitas yang mengedap nilai-nilai primodial ketimbang nilai-nilai kebangsaan. Jika dihubungkan dengan konteks ini, maka pendidikan multikultural yang dikembangkan di STIQ An-Nur tampak tidak terlalu berkorelasi dengan konteks historis kebangsaan. Sejatinya, pendidikan multikultural di STIQ An-Nur bukan lahir dari konteks pendidikan nasional sebagai sebuah respon terhadap pluralitas bangsa. Tetapi ia lahir dari rahim tradisi kepesantrenan yang secara utuh punya hubungan yang cukup kuat dengan tradisi Nahdatul ‘Ulama.

⁴⁰³ Amitav Acharya, *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power* (New Jersey: World Scientific Publishing, 2014), hlm. 19.

Diagram 2

Pendidikan Multikultural berbasis Tradisi di STIQ An-Nur



Ada dua tradisi secara empiris yang membentuk sistem pendidikan multikultural di STIQ An-Nur, dan keduanya memperlihatkan bahwa konteks munculnya pendidikan multikultural di STIQ An-Nur justeru bukan dari konteks pluralitas bangsa yang bersipat *collective-values oriented*, atau didasarkan pada nilai-nilai kolektif dimana bangsa Indonesia berdiri. Kendati demikian, tradisi kapesantrenan yang kemudian diadopsi oleh STIQ An-Nur tentu tidak dapat dipisahkan dari konteks keindonesiaan sebagai *nations-state*. Jika ditelisik lebih dalam lagi seperti yang diurai pada digram 4.2 di atas terlihat dengan jelas bahwa tradisi kapesantrenan Nahdatul ‘Ulama berbasis nilai-nilai ke-*tawadhu*’an dan nilai-nilai universalitas Islam itu sendiri. Tradisi pendidikan multikultural di pesantren Nahdatul ‘Ulama bercirikan pada posisi agama yang dijadikan media pembelajaran pendidikan multikultural secara teoretis dan pembekalan terhadap para peserta didik terhadap sikap yang demokratis, humanis, dan pluralis.⁴⁰⁴ Sementara kampus pada umumnya melembagakan pendidikan multikultural secara struktural, melalui implementasi kurikulum berbasis model kurikulum nasional. Hal ini dimaklumi karena sesungguhnya perguruan tinggi merupakan *locus* dimana nilai-nilai akademik dan ilmiah sangat dijunjung tinggi. Segala hal diukur secara positivistik. Muaranya, perguruan tinggi dinilai sebagai *house of learning*, dan ranah aktualisasi diri mahasiswa. Pada dasarnya mahasiswa dikondisikan untuk mandiri, dan

⁴⁰⁴ “Wajah Multikulturalisme Pesantren | NU Online,” accessed August 11, 2016, <http://www.nu.or.id/post/read/27538/wajah-multikulturalisme-pesantren>.

belajar secara langsung dari masyarakat serta mampu menerapkan nilai-nilai akademik di masyarakat. Konteks ini kemudian yang mendorong STIQ An-Nur merumuskan formula pendidikan multikultural yang spesifik sesuai dengan nilai-nilai dasar kepesantrenan Nahdatul ‘Ulama. Muaranya, model pendidikan multikultural yang ditradisikan di STIQ An-Nur lebih tampak sebagai *practice and equal model*: sebuah tradisi pengajaran pendidikan multikultural yang berorientasi pada tauladan dan internalisasi nilai-nilai kepesantrenan.

3. Relasi Pesantren, Perguruan Tinggi dan Pendidikan Multikultural

Memahami relasi antara pesantren, perguruan tinggi dan pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui penelusuran tesis yang telah dikemukakan oleh beberapa sarjana. Jihan Abdullah (2014) menegaskan bahwa pendidikan Islam multikultural yang ditradisikan di pesantren telah berhasil membentuk kepribadian santri yang mengedapankan nilai-nilai *utility*, persaudaraan, moralitas, dan saling menghormati serta respek terhadap perbedaan etnis, ras dan budaya santri.⁴⁰⁵ Tidak mengherankan jika santri yang dibina dan diajarkan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural lebih mampu mengekspresikan sikap-sikap multikultural.

Pesantren seperti yang dikemukakan oleh KM. Akhiruddin telah berhasil menjadi pusat pengajaran Islam yang mendalam. Bahkan ia telah menjadi lokomotif dalam mengembangkan kehidupan beragama masyarakat, juga telah mampu mendorong transformasi sosial yang sangat signifikan di Indonesia.⁴⁰⁶ Transformasi sosial yang didorong oleh eksistensi pesantren dapat dilihat pada berbagai kehidupan sosial umat Islam. Ada banyak komunitas pesantren yang mampu memberikan pemahaman beragama yang luruf atau *hanif*, dan mampu menampilkan Islam dalam wajah universalnya, yakni *rahmatan lil’alamin*. Tidak hanya itu, Azyumardy Azra melalui artikelnya *Genealogy of Indonesia Islamic Education: Roles in The Modernization of Muslim Society*, menegaskan bahwa Pendidikan Islam Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan panjang. Pada kenyataannya, pendidikan Islam adalah salah satu aspek warisan Islam Indonesia

⁴⁰⁵ Jihan Abdullah, “Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Studi Kasus Pada Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor Poso,” *Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, no. 1 (2014): hlm. 97.

⁴⁰⁶ KM. Akhiruddin, “Lembaga Pendidikan Islam Di Nusantara,” *Jurnal Tarbiyah* 1, no. 1 (2015): hlm. 197.

terpenting. Meskipun terdapat perubahan dinamik dalam sejarah Indonesia, pendidikan Islam baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, seperti madrasah, sekolah Islam, dan pesantren, tetap mengalami perkembangan pesat. Demikian pula terjadi pada jenjang pendidikan tinggi yang terdiri dari PTKIN/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan PTKIS/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Keduanya menunjukkan dan membuktikan bahwa lembaga pendidikan tinggi Islam merupakan sistem terbesar di dunia Islam. Pada dua dekade terakhir, perkembangan penting lainnya di PTKIN adalah perluasan mandat dan fungsi PTKIN untuk sepenuhnya menjadi Universitas Islam (UIN/Universitas Islam Negeri). Seiring proses transformasi ini, maka peran perguruan tinggi Islam di Indonesia menempati posisi sangat penting.⁴⁰⁷

Tesis yang diajukan Azra di atas secara implisit dapat dipahami bahwa kontribusi pendidikan Islam terhadap transformasi sosial, dan dalam aspek lainnya tidak terlepas dari internalisasi nilai-nilai Islam itu sendiri. Pesantren, tulis Azra, adalah institusi penting dalam pembangunan, dinamika, dan proses Islam Indonesia.⁴⁰⁸ Melalui pesantrenlah sesungguhnya santri dikenalkan dengan wajah Islam yang inklusif. Ada banyak fakta yang menunjukkan bahwa pesantren telah berperan penting dalam mendorong transformasi Islam Indonesia. Pesantren Tebu Ireng misalnya. Pesantren yang menjadi basis Nahdatul ‘Ulama ini telah menunjukan bukti penting bahwa pesantren Nahdatul ‘Ulama telah mengerakkan terjadi transformasi Islam. Tidak hanya sebagai pusat pengajaran Islam *rahmatan lil-‘alamin*, tetapi Pesantren Tebu Ireng juga menjadi pusat pergerakan muslim terbesar dan berpengaruh di Indonesia pada zaman kolonial Belanda, Imperialis Jepang, pada masa-masa revolusi Indonesia. Bahkan saat ini pesantren telah dipercaya sebagai model terbaik dalam membentuk kepribadian generasi Islam. Tidak berlebihan jika Azra mengajukan pandangan bahwa setidaknya tiga dekade belakangan ini, umat Islam telah merubah persepsi mereka terhadap pesantren. Saat ini, tidak sedikit orang tua kaum Muslimin mempercayakan anak-anak mereka untuk

⁴⁰⁷ Azyumardi Azra, “Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in The Modernization of Muslim Society,” *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 4, no. 01 June (2015): hlm. 86.

⁴⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

dididik di pesantren. Alasannya sederhana, melalui pesantren mereka percaya anak mereka dapat menjadi muslim yang baik.⁴⁰⁹

Menjadi muslim yang baik adalah persoalan definisi dan kategori yang tumbuh berdasarkan struktur masyarakat. Barangkali untuk konteks saat ini—zaman modern, menjadi muslim yang baik tidak hanya mampu memahami Islam dengan baik. Tapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan generasi yang dididik di pesantren menjadi figur yang baik, dan pantas di contoh oleh masyarakat. Mereka adalah pribadi yang *tawadhu'*, *faqih*, dan tentunya sangat menyadari nilai-nilai kemajemukan. Dengan karakter itu, maka citra pesantren perlahan akan mengalami perubahan. Pesantren tidak dapat dipandang sebelah mata, dan dinilai kolot. Tapi pesantren idealnya menjadi pusat pendidikan Islam multikultural. Pusat dimana Islam diajarkan lebih ramah, dan mampu memayungi semua lapisan sosial tanpa terjebak pada sikap eksklusif.

Abad ke-19 telah menjadi tonggak penting perkembangan pesantren di Indonesia. Pesantren tidak hanya menentukan bagaimana kualitas pemahaman umat dibentuk. Tapi pesantren telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan keagamaan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia seperti Sekolah Tinggi Islam, Institut Agama Islam, bahkan Universitas Islam. Hubungan antara pesantren dan perguruan tinggi dapat dijabarkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, hubungan yang bersifat sistemik-politis: sebuah hubungan yang ditandai dengan adopsi sistem kurikulum nasional yang dikonstruksi, dan dirumuskan oleh Kementerian Agama, terutama oleh *madrasah* maupun pesantren. Sebaliknya, perguruan tinggi Islam diuntungkan dengan pangsa pasar terbesar justeru datang dari pesantren.

Kedua, relasi kultural-organik: sebuah hubungan yang tercipta secara alamiah, dimana pesantren menyediakan model nilai-nilai ideal yang kemudian diadopsi kampus. Pesantren juga menjadi sumber khazanah keilmuan seperti studi Islam yang kemudian dikembangkan pada perguruan tinggi. Dalam hubungannya dengan pendidikan Islam multikultural, pesantren menjadi model bagaimana nilai-nilai Islam yang sepenuh sejalan dengan semangat multikultural diajarkan, dan STIQ An-Nur adalah contoh paling relevan untuk konteks ini. Berbeda dengan model pendidikan

⁴⁰⁹ Ibid., hlm. 99.

multikultural yang dibangun dan dikembangkan pada kampus-kampus non-pesantren. Pendidikan Islam multikultural di STIQ An-Nur lebih tampak sebagai model non-mainstream yang tidak berorientasi kurikulum. Tapi pembelajaran pendidikan Islam multikultural lebih menekankan aspek kultural dan sosial. Bentuknya adalah penghayatan nilai-nilai multikultural sebagai bagian dari penghayatan tradisi pesantren, kemudian dipraktekkan dalam interaksi sosial.

Abdullah Aly menegaskan bahwa nilai-nilai pendidikan multikultural dalam bentuk apapun terdiri dari nilai keragaman, nilai perdamaian, dan nilai keadilan dalam Islam.⁴¹⁰ Nilai-nilai ini kemudian yang diadopsi oleh perguruan tinggi dari pesantren. Kendati tidak mudah juga untuk melakukan generalisir bahwa nilai-nilai multikultural yang disebutkan tersebut orisinal milik pesantren. Tetapi nilai-nilai multikultural tersebut sesungguhnya lebih mudah ditemukan dalam materi ajar tentang moralitas dan spiritualitas santri di berbagai pesantren, terutama pesantren Nahdatul 'Ulama. Agaknya tidak berlebihan jika relasi antara pesantren, perguruan tinggi dan pendidikan Islam multikultural adalah hubungan bersipat organik dimana perguruan tinggi tidak secara umum mengadopsi tradisi pesantren. Hanya perguruan tinggi yang memiliki hubungan primordial yang sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai yang bersumber dari tradisi kepesantrenan seperti halnya STIQ An-Nur.

Jika pada perguruan tinggi yang merancang pendidikan multikultural secara khusus, dan spesifik lebih berorientasi pada kurikulum multikultural. Maka tidak demikian dengan STIQ An-Nur yang lebih berorientasi pada pembelajaran dialogis di semua mata kuliah. Nilai-nilai multikultural dipraktekkan langsung melalui metode pembelajaran yang interaktif, aktif, kolaboratif, diskusi kelompok, bahkan yang lebih penting dari semua metode itu adalah dosen memberikan ketaladanan layaknya ketauladanan yang ditunjukkan oleh ustad pada santri, atau Kyai pada santrinya.⁴¹¹

⁴¹⁰ Abdullah Aly, "Model Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta," *Jurnal Varia Pendidikan* 24, no. 1 (2012): hlm. 28.

⁴¹¹ *Ibid.*, hlm. 29.

Diagram 3

Relasi Pesantren, Perguruan Tinggi dan Pendidikan Multikultural

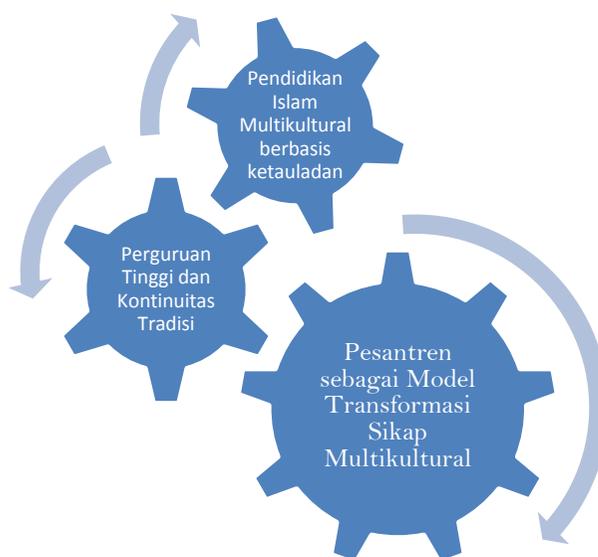


Diagram di atas memperlihatkan relasi yang cukup erat antara pesantren, perguruan tinggi dan pendidikan multikultural sebagai muara dari interaksi dari pesantren—tradisi dan nilai-nilai kepesantrenan, dengan perguruan tinggi sebagai pewaris dan rekonstruksi nilai-nilai kepesantrenan seperti halnya STIQ An-Nur. Relasi ini, pada akhirnya, memungkinkan STIQ An-Nur menyerap nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dari tradisi kepesantrenan. Abdullah Aly (2011) mengemukakan satu tesis dimana pesantren sesungguhnya telah akrab dengan nilai-nilai multikultural, meskipun sebenarnya pesantren pada umumnya tidak terlalu ‘akrab’, bahkan dapat dinilai asing ketika dihadapkan pada kurikulum multikultural sebagaimana yang dipahami oleh sistem pendidikan modern. Kendati demikian, pesantren akan mustahil bertahan jika tidak mengelola keragaman santrinya dengan baik. Fakta menunjukkan bahwa pesantren memiliki santri dari berbagai latar belakang daerah asal santri tersebut. Kondisi ini tidak akan bisa dikelola tanpa memperhatikan nilai-nilai multikultural.⁴¹²

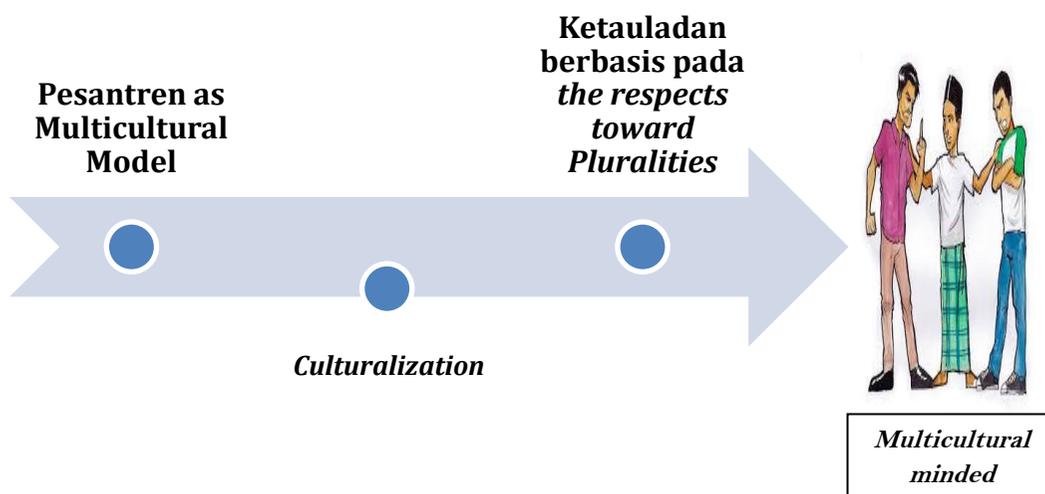
Demikian juga terjadi, dan dapat ditemukan pada perguruan tinggi Islam seperti STIQ An-Nur. Fakta menunjukkan bahwa STIQ An-Nur memiliki mahasiswa yang juga berasal dari keragaman latar belakang, baik

⁴¹² Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 9.

daerah asal maupun dari segi etnisitas. Tesis yang dikemukakan oleh Abdullah Aly setidaknya juga berlaku untuk STIQ An-Nur, dimana mengelola keragaman itu tidak akan berhasil tanpa melibatkan nilai-nilai multikultural. Merujuk pada definisi Ainurrafiq Dawam bahwa pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama).⁴¹³ Pemaknaan Ainurrafiq Dawam ini, meskipun tidak sistematis dan terstruktur dengan baik, tetapi secara kultural nilai-nilai multikultural sudah ditemukan begitu lekat dalam tradisi kampus-pesantren yang dikembangkan oleh STIQ An-Nur.

Diagram 4

Kampus-Pesantren dan Nilai-Nilai Multikultural



Alur di atas memperlihatkan bahwa pesantren Nahdatul ‘Ulama melalui pengajaran nilai-nilai Islami, dan inklusif dalam beragama telah menjadi model pendidikan Islam multikultural yang unik. Menanamkan nilai-nilai multikultural tanpa perlu mengistilahkannya dengan nilai-nilai multikultural. Tapi cukup mengajarkan bagaimana tradisi pesantren dalam bersikap dan respek terhadap *the others*. Ini kemudian disebut dengan kulturisasi: sebuah proses dimana pesantren lebih mengedepankan

⁴¹³ Ngainun Naim Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 50.

intenasiasi sekaligus praktek dari nilai-nilai Islam, yang sejalan dengan nilai-nilai multikultural. Sehingga pada akhirnya, santri dengan sendirinya mampu memperlihatkan kepribadian yang sangat respek terhadap perbedaan. Kulturisasi ini kemudian yang juga diterapkan oleh STIQ An-Nur sebagai sebuah perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa STIQ An-Nur juga mampu bersikap, dan mempunyai jiwa multikultural atau *multicultural minded*. Kampus pesantren ini istilah yang paling relevan untuk menggambarkan bagaimana STIQ An-Nur berjalan sebagai sebuah perguruan tinggi. Tidak hanya mengedepankan nilai-nilai akademik-ilmiah *an sich*. Tapi juga mengutamakan pembentukan kepribadian mahasiswa sebagai santri. Menariknya tidak berhenti pada titik ini, tapi juga nilai-nilai kepesantrenan juga diterapkan hampir disegala lini kehidupan kampus. Mulai dari bagaimana mengambil keputusan; merumuskan arah dan kebijakan pendidikan, hingga penyusunan kurikulum juga disemangati oleh nilai dan tradisi kepesantrenan yang sepenuhnya tidak terlepas dari nilai-nilai multikultural.

4. Proses Pembelajaran dan Kurikulum: Dua Ranah Multikulturalisme

Terkait makna pendidikan multikultural, Ainurrofiq Dawam mengemukakan tiga makna, yakni: *Pertama*, pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pengembangan. Pengembangan atau *developing* adalah proses yang berusaha meningkatkan sesuatu sejak awal atau sebelumnya sudah ada. Pengembangan di sini lebih dimaknai sebagai proses, sebab tidak dibatasi oleh ruang, waktu, subjek, objek dan relasinya. Proses ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan berkaitan dengan siapa saja. *Kedua*, pendidikan multikultural adalah mengembangkan seluruh potensi manusia. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia. Potensi-potensi yang ada sebelumnya atau sejak awal sudah ada dalam diri manusia adalah potensi intelektual, potensi sosial, potensi moral, potensi religius, potensi ekonomi, potensi teknis, potensi kesopanan, dan tentunya potensi budaya.

Ketiga, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai pluralitas dan heterogenitas. Pluralitas dan heterogenitas adalah keniscayaan ketika berada pada masyarakat sekarang ini. Dewasa ini bisa dikatakan mustahil jika sebuah negara atau wilayah tidak mengalami pluralisasi dan heterogenitas dalam masyarakatnya. Pluralitas bukan hanya dipahami

keragaman etnis atau suku, akan tetapi juga dipahami sebagai keragaman berpikir, keragaman paradigma, keragaman paham, keragaman kebijakan, keragaman model ekonomi, keragaman aspirasi politik, dan sebagainya. *Keempat*, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama.⁴¹⁴ Empat makna yang dikemukakan oleh Ainurrofiq ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural sesungguhnya melampaui batas-batas primordial manusia. Batas-batas primordial manusia merupakan batas-batas modern dewasa ini yang selalu menghantui manusia yang masih berpikir waras berdasarkan *trilogi common sense*,⁴¹⁵ yaitu akal (rasio), hati nurani, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Implementasi keempat makna pendidikan multikultural di atas, prakteknya mengalami differensiasi. Ada banyak model yang lahir terkait implementasinya. Model yang berbeda-beda ini tentu sesuai dengan konteks dan misi dan dimensi pendidikan multikultural yang ingin dicapai oleh lembaga penyelenggara pendidikan multikultural. Mulai dari dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik.⁴¹⁶ Perbedaan model ini tentu menjadi bagian dari multikulturalisme itu sendiri. Secara empiris setiap perguruan tinggi memiliki kekhasan, dan keunikan yang terdifferensiasi antara satu perguruan tinggi dan perguruan tinggi lainnya. Perbedaan tersebut agaknya dapat diidentifikasi ke dalam beberapa hal: *Pertama*, fondasi model pendidikan multikultural. Hal ini mencakup muatan nilai-nilai multikultural, serta sumber nilai-nilai tersebut. Dalam konteks STIQ An-Nur misalnya, nilai-nilai multikultural dipadankan dengan nilai-nilai Islam *rahmatan lil-'alamin* seperti demokrasi; kesetaraan; dan keadilan yang jika ditelisik ke dalam sumber utama Islam kompatibel dengan doktrin-doktrin Islam dan pengalaman historis umat Islam. Adapun doktrin Islam yang mengandung prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, antara lain ditemukan keberadaannya dalam Al-Qur'an surat Al-Syura (42): 38, Al-Hadid (57): 25, dan Al-'Araf (7): 81.⁴¹⁷ Diperkuat oleh Abdul Latif, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Aly, ketiga ayat tersebut merupakan landasan moral

⁴¹⁴ Ainurrofiq Dawam, *Pendidikan Multikultural*, 1st ed. (Yogyakarta: Inspeal Penerbit, 2006), hlm. 75-76.

⁴¹⁵ Ibid., hlm. 77.

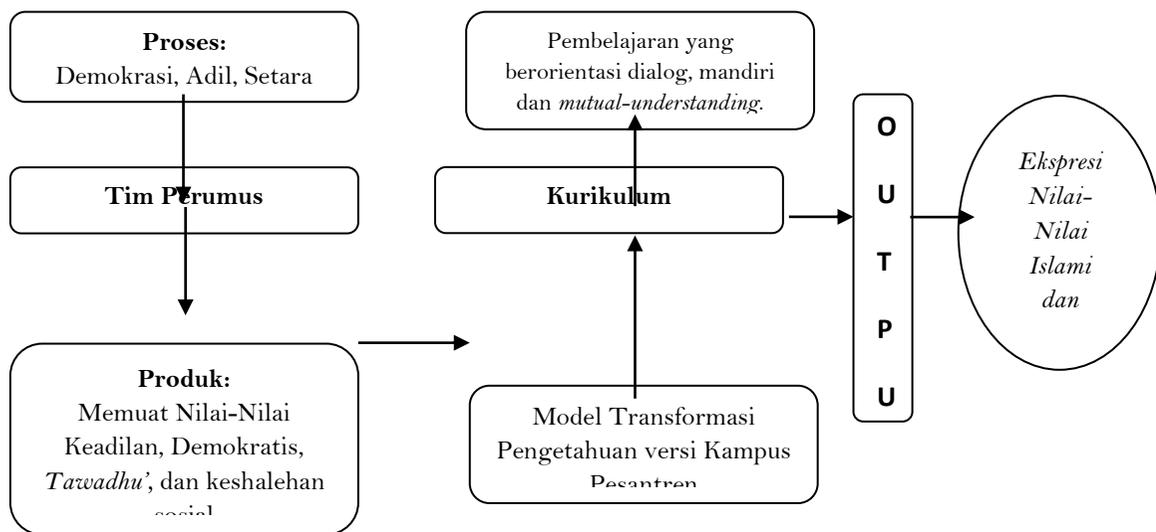
⁴¹⁶ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 13.

⁴¹⁷ *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta*, hlm. 111.

dan etik bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, baik dalam soal ucapan, sikap, maupun perbuatan.⁴¹⁸ Nilai-nilai ini kemudian yang ditradisikan oleh STIQ An-Nur yang mentasbihkan lembaga ini sebagai kampus yang berbasis pesantren. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, terutama proses pembelajaran dan muatan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum.

Diagram 5

Model Perencanaan Kurikulum Kampus-Pesantren Multikultural



Model perencanaan kurikulum yang diterapkan oleh STIQ An-Nur sesungguhnya unik dan khas. Ada muatan nilai-nilai kepesantrenan dalam setiap kurikulum yang dirumuskan. Layaknya pesantren, STIQ An-Nur tetap merawat keragaman dengan mengutamakan *unity*, atau kesatuan mahasiswa meskipun pada dasarnya mereka berasal dari latar belakang yang beragam. Namun tradisi pesantren, meskipun sejatinya mereka adalah mahasiswa pada perguruan tinggi, secara kultural mereka dituntut untuk mengekspresikan nilai-nilai kepesantrenan seperti *tawadhu'*, *mutual-understanding* atau *musawatulljabm*, respek antara satu dan lainnya, dan tentunya solidaritas organik. Nilai-nilai ini sesungguhnya ditemukan pada pesantren, tetapi kemudian direproduksi kembali oleh STIQ An-Nur dalam

⁴¹⁸ Ibid., hlm. 112.

proses belajar mengajar termasuk juga melalui mata kuliah muatan lokal seperti kepribadian, dan mata kuliah kewirausahaan versi pesantren. Mengapa nilai-nilai kepesantrenan diejawatahkan pada dua *locus*, yakni proses pembelajaran dan kurikulum? Karena dua ranah inilah sesungguhnya yang menjadi *field* dimana mahasiswa dibentuk secara intens, baik dari aspek intelektualitas maupun dalam aspek mentalitas mereka. Agaknya tidak berlebihan jika “proses pembelajaran” dan “kurikulum” di STIQ An-Nur dinilai sebagai ranah dimana nilai-nilai multikultural yang dipadankan dengan nilai-nilai kepesantrenan disemai dan diinternalisasi.

Melalui metode ini kemudian nilai estetis kepesantrenan dan kesadaran multikultural dapat dihayati oleh mahasiswa, dan dilihat secara nyata oleh masyarakat. Dengan demikian pula, seperti yang pernah ditulis oleh Willy Kymlicka, multikulturalisme hidup di dada individu hingga pada akhirnya keragaman dalam segala aspek kehidupan manusia dianggap berharga, baik dalam arti yang nyaris estetis sehingga menciptakan dunia yang lebih menarik, dan karena kebudayaan lain berisi model alternatif organisasi sosial yang dapat berguna dalam menyesuaikan pada keadaan baru.⁴¹⁹ Nilai-nilai kepesantrenan yang berintegrasi dengan nilai-nilai akademik yang ditradisikan pada STIQ An-Nur setidaknya telah melahirkan satu warna dan karakter yang unik dan itu melekat pada diri mahasiswa STIQ An-Nur. Proses ini yang terus berlangsung hingga saat ini. Sehingga STIQ An-Nur sebagai kampus-pesantren selalu konsisten merawat tradisi kepesantrenan melalui penguatan dimensi lokalitas, nilai-nilai etis, dan spritualitas secara terintegral dan konsisten.

Merujuk pada tesis yang diajukan oleh Irwan Abdullah, sebagaimana yang dikutip oleh Choirul Mahfud, bahwa multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi yang ada. Penekannya adalah kesetaraan budaya.⁴²⁰ Tesis Irwan Abdullah ini kemudian direproduksi oleh STIQ An-Nur melalui penguatan tradisi kepesantrenan, sehingga nilai-nilai kesetaraan diartikan sebagai kesadaran etis mahasiswa terhadap perbedaan dan kemudian menganggap perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Tentu kesadaran semacam itu tidak muncul dan terkristalisasi begitu saja dengan instan, melainkan ia mesti diinternalisasi secara sistematis melalui dua metode pembelajaran dan

⁴¹⁹ Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 183.

⁴²⁰ *Pendidikan Multikultural*, 2011, hlm. 90.

sekaligus muatan nilai yang ada dalam kurikulum yang diimplementasikan oleh STIQ An-Nur.

STIQ An-Nur memang tidak secara spesifik merumuskan kurikulum multikultural sebagaimana yang diteoritisasikan oleh Burnett dan Banks seperti isu; tema; topik; dan konsep-konsep yang berkaitan dengan multikulturalisme, atau seperti desain yang ditawarkan oleh Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn dimana mereka memaksukkan ke dalam kurikulum pendidikan multikultural tema-tema seperti rasisme; seksisme; prasangka; diskriminasi; penindasan; ketidakberdayaan; ketidakadilan kekuasaan; keadilan dan steroetip.⁴²¹ Tapi STIQ An-Nur melalui integrasi tradisi kepesantrenan pada kurikulum lokal setidaknya intens melakukan internalisasi nilai-nilai Islami yang sepadan dengan nilai-nilai multikulturalisme. Sehingga *output*-nya tidak berbeda dengan desain kurikulum struktural versi dua teori tadi. Pada tatanan praksis, mahasiswa STIQ An-Nur mampu menunjukkan dan mengekspresikan sikap-sikap multikultural sehingga mereka lebih mudah diterima oleh khalayak di berbagai aspek dan bidang kehidupan sosial, agama dan budaya masyarakat.

Demikian, sesungguhnya sudah relevan dengan tujuan pendidikan multikultural yang berorientasi pada hasil dimana peserta didik idealnya mampu mengekspresikan nilai-nilai multikultural. Hal ini juga telah mengaktualkan paradigma baru yang tertuang dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013, dimana dengan tegas mengatur bahwa sistem pendidikan nasional mesti didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan keseimbangan. Tidak seimbang dan setara dalam menyelenggarakannya antara pemerintah dan masyarakat,⁴²² tapi proses transformasi pengetahuan oleh guru dan pengampu idealnya juga menganut dua nilai ini. Dalam konteks ini kemudian model pembelajaran dan proses perencanaan kurikulum STIQ An-Nur layak dimaknai.

⁴²¹ *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta*, hlm. 134.

⁴²² *Pendidikan Multikultural*, 2011, hlm. 64.

Diagram 6

Dua Ranah Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural di STIQ An-Nur

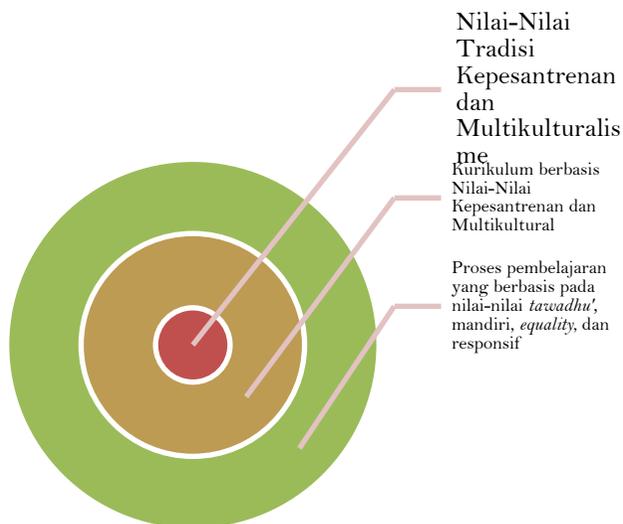


Diagram di atas memperlihatkan bahwa *core* dari ranah pembelajaran dan perencanaan kurikulum di STIQ An-Nur adalah nilai-nilai tradisi kepesantrenan seperti *tawadhu'*, saling menghormati, responsif, *unity* atau persatuan serta memiliki spritualitas dan integritas moral. Kendati demikian tradisi kepesantrenan, lengkap dengan nilainya juga ditopang oleh nilai-nilai multikultural yang direproduksi seperti kesetaraan/*equality*; keseimbangan; dan keadilan. Integrasi semacam ini kemudian yang menjadikan konsep kampus-pesantren versi STIQ An-Nur mendorong implementasi nilai-nilai multikultural secara non-struktural dan tidak mainstream layaknya di perguruan tinggi lainnya.

Menguatkan pandangan di atas, merujuk pada pandangan M. Gollnick dan Philip C. Chinn bahwa kompetensi dari pendidikan multikultural adalah “peserta didik memiliki perspektif multikultural melalui program dan kegiatan pendidikan.”⁴²³ Dua kata kunci yang diajukan oleh M.Gollnick dan Philip C.Chinn tersebut, yakni: “perspektif multikultural” dan “melalui program dan kegiatan pendidikan”, setidaknya juga ditemukan di STIQ An-Nur. Namun tentu dalam kadar, dan model yang berbeda serta spesifik. Jika di perguruan tinggi lain, terutama perguruan tinggi yang

⁴²³ Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta, hlm. 124.

merujuk secara utuh pada undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, rancangan kurikulum dan muatan nilai-nilai multikultural di dalam menjadi *trendsetters* yang tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Berbeda dengan STIQ An-Nur yang lebih tepat disebut sebagai pengadopsian model *integrity and practise*: sebuah model internalisasi nilai-nilai multikultural melalui integrasi nilai-nilai kepesantrenan dan multikulturalisme. Tidak berhenti pada level itu, pendidik juga memberikan contoh bagaimana nilai-nilai kultural yang ideal dan harus diekspresikan oleh civitas akademika dalam kehidupan di kampus, maupun dalam kehidupan sosial lainnya.

Tabel 1

Komparasi Karakteristik Pendidikan Multikultural

Karakteristik	Perspektif Barat	Multikulturalisme versi Kampus-Pesantren
Berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan.	Demokrasi, Kesetaraan, dan keadilan.	<i>Tawadhu</i> , toleransi, peduli, dan <i>al-wahdah/unity</i> .
Berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, kedamaian.	Kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian.	<i>Hablum min al-nass; al-ta'aruf, al-taa'wun</i> dan kesederhanaan.
Mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman	Toleransi, empati, simpati, dan solidaritas sosial.	<i>Al-ta'addudiyat; al-rahmah; al-ibsan</i> ; dan berorientasi pada perbedaan adalah fitrah.

Abdullah Aly (2011) memahami bahwa baik perspektif Barat atau Islam, sesungguhnya nilai-nilai multikultural memiliki kesamaan atau kompatibel. Akan tetapi sumbernya saja yang berbeda. Barat dalam membangun konsep dan nilai-nilai multikultural dibangun dari filsafat yang bertumpu pada hak-hak asasi manusia. Sementara dalam Islam, nilai-nilai multikultural diproduksi dari sumber otentik, yakni Qur'an dan Hadist.⁴²⁴ Dalam konteks, STIQ An-Nur nilai-nilai multikultural yang diinternalisasi melalui dua ranah—proses pembelajaran dan perencanaan kurikulum, bersumber dari dua hal yang esentrik dan otentik, yakni “wahyu” dan “tradisi” kepesantrenan. Apa yang ditradisikan dan dirawat oleh STIQ An-

⁴²⁴ Ibid.

Nur yang akhir bermuara pada “penghargaan terhadap orang lain”, baik sesama, maupun kepada orang lain. Ini kemudian sesuai dengan tesis Lynch yang merumuskan kompetensi pendidikan multikultural yang bersifat pada keterampilan dengan orientasi pada penghargaan kepada orang lain dan diri sendiri.⁴²⁵ Keterampilan yang dimaksud oleh Lynch, barangkali adalah keterampilan yang dibangun dari program pendidikan seperti kewirausahaan; dan kemampuan lainnya yang akhirnya menjadikan mahasiswa atau peserta menjadi pribadi yang mandiri. Tentu itu, tidak cukup. Mahasiswa juga didorong menjadi pribadi yang dapat menghargai orang lain. Bentuk terakhir ini dapat dilihat dari orientasi STIQ An-Nur dalam membentuk kepribadian mahasiswa dan peserta didiknya, sehingga menjadi pribadi yang terbiasa menghargai orang lain. Inilah muara dari kesuksesan STIQ An-Nur dalam mengintegrasikan nilai-nilai kepesantrenan dan multikulturalisme.

Kesimpulan

Dari kajian terhadap pendidikan multikultural pada perguruan tinggi di Yogyakarta, dengan kasus di STIQ An-Nur dapat diajukan tesis atau teori, yakni: “bahwa integrasi kultural antara tradisi kepesantrenan dan perspektif multikulturalisme, telah menjadi pra-kondisi yang baik untuk tumbuhnya nilai-nilai multikultural dalam diri mahasiswa. Proses ini kemudian disebut dengan “kampus-pesantren”: sebuah entitas dimana kampus dihidupi dengan nilai-nilai kepesantrenan dalam menumbuhkan kesadaran multikultural mahasiswa.” Teori ini berangkat dari kesimpulan empiris, atau temuan kajian sebagai berikut:

1. *Pertama*, konstruksi dan muatan keilmuan pendidikan multikultural di STIQ An-Nur lebih tampak cenderung mempertahankan tradisi kepesantrenan. Ini ditujukan untuk membentuk karakter mahasiswa, hingga secara alamiah akan menjadikan mereka berbeda dengan alumni yang tamat di perguruan lain. Kendati demikian, STIQ An-Nur juga tidak menutup mata dari desain kurikulum nasional. Hal tersebut adalah strategi, agar kemampuan dan kualitas akademik mahasiswa STIQ An-Nur tidak tertinggal jika dibandingkan dengan alumni perguruan tinggi lain, yang terkadang hanya mengandalkan desain kurikulum nasional *an sich*. Faktanya, tidak sedikit perguruan tinggi yang hanya berorientasi untuk peningkatan akademik. Tetapi luput mengembangkan dan meningkatkan integritas moral dan etika mahasiswa. Sehingga setelah tamat kuliah, mereka cenderung menjadi individu yang pasif—malas bergaul, dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Sadar akan

⁴²⁵ *Ibid.*, hlm. 130.

kenyataan ini, STIQ An-Nur merumuskan sebuah strategi baru yang relatif berbeda dalam menempa dan mentransformasikan pengetahuan kepada mahasiswa mereka.

2. *Kedua*, Pendidikan multikultural substantif—pendidikan multikultural berbasis pada nilai ketimbang kognitif *an sich*. Pendidikan multikultural seperti ini lebih mengutamakan penghayatan, dan aplikasi sikap multikulturalisme. Ini pula kemudian yang menjadikan mahasiswa STIQ An-Nur mempraktekan nilai-nilai multikultural—saling menghargai; *tawadhu*; dan menyikapi perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa praktek nilai-nilai tersebut adalah manifesto dari pendidikan multikultural. Mereka, tandas informan, sangat menghargai orang lain, bahkan sangat menghargai ilmu. Nilai-nilai penghargaan terhadap pengetahuan ini ditanamkan oleh dosen melalui teladan yang baik terhadap mahasiswa. Larangan mem*photo-copy* sebagai bentuk penghargaan terhadap penulis dan pencetus pengetahuan.⁴²⁶ Penghargaan, dan memahami orang lain bahkan diterapkan secara detail dalam kehidupan akademis. Hal tersebut tercermin, pada penghargaan terhadap hak intelektual melalui pelarangan *photo-copy* buku.
3. *Ketiga*, sikap inklusif mahasiswa STIQ An-Nur sudah terbentuk melalui integrasi nilai-nilai kepesantrenan dan multikulturalisme. Hal ini dibuktikan secara empiris dari sikap dan respon mahasiswa terhadap perbedaan, dan pluralitas. Fakta menunjukkan bahwa 55% partisipan memahami perbedaan adalah keniscayaan yang mesti diterima, dan tidak dapat dihindarkan. Ia adalah bagian dari *sunnatullah*. Partisipan, dalam hal ini adalah mahasiswa STIQ An-Nur, menyadari sebagai seorang muslim idealnya merina perbedaan sebagai hal yang sudah digariskan oleh Allah *azza wa jalla*. Mereka tidak hendak menentang, apalagi mengingkari itu. Maka cara terbaik untuk menyikapi perbedaan seperti diversitas etnis dan budaya, mereka lebih dominan menghargai perbedaan etnis dan budaya, bahkan mereka terlibat berinteraksi dengan berbagai etnis dan suku tanpa mempersoalkan perbedaan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan angka dimana 60% partisipan menyadari pentingnya menghargai perbedaan budaya, dan terlibat aktif berinteraksi dengan etnis lain.

⁴²⁶ Wawancara dengan Dr. H. Munjahidin, M.Ag. Tanggal 22 Juni 2016. Pukul 14:00 wib.

Daftar Pustaka

- Ainurrofiq Dawam, *Pendidikan Multikultural*, 1st ed. (Yogyakarta: Inspeal Penerbit, 2006).
- Abdullah Aly, "Model Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta," *Jurnal Varia Pendidikan* 24, no. 1 (2012).
- Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability* (Colorado: Westview Press, 2000).
- Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme; Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media Publishing, 2011)
- Amitav Acharya, *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power* (New Jersey: World Scientific Publishing, 2014)
- A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability.*
- Azyumardi Azra, dalam pengantar Zakiyuddin Baydhowi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta : Erlangga
- Azyumardi Azra, "Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in The Modernization of Muslim Society," *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 4, no. 01 June (2015)
- Choirul Mafudz, 2011, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V.
- <http://opinion-publika.blogspot.com/2011/06/masyarakat-majemuk-indonesia.html>
- <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- <https://tirto.id/jumlah-bahasa-daerah-di-indonesia-mencapai-652-pada-2018-cSQY>
- <https://www.99.co/blog/indonesia/jumlah-pulau-di-indonesia/>
- Pierre L. Van den Berghe dalam <http://indudt.blog.fisip.uns.ac.id/2011/01/05/struktur-majemuk-masyarakat-indonesia/>
- Jihan Abdullah, "Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Studi Kasus Pada Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor Poso," *Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, no. 1 (2014):

KM. Akhiruddin, "Lembaga Pendidikan Islam Di Nusantara," *Jurnal Tarbiyah* 1, no. 1 (2015).

Lihat dalam Donald Emerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto* (Jakarta: Gramedia, 2002)

Ngainun Naim Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta

"Wajah Multikulturalisme Pesantren | NU Online," accessed August 11, 2016, <http://www.nu.or.id/post/read/27538/wajah-multikulturalisme-pesantren>.

Wawancara dengan Dr. H. Munjahidin, M.Ag. Tanggal 22 Juni 2016.

Biodata Penulis



Dr. Hendra Harmi, M.Pd. Tempat/tanggal lahir : Lawang Mandahiling/08 Nop 1975. NIP 19751108 200312 1001. Pangkat/Gol. Ruang : Lektor Kepala/IV.a. Jabatan Ketua LPPM IAIN Curup. Unit Organisasi IAIN Curup. Alamat rumah Jalan Bakti Osis I Belakang Kopi Gentong Mas Perumahan Citra Garden Blok A No. 02 Air Bang Curup Telp/HP 085267399374 Email hendra3_harmi@yahoo.co.id

PENDEKATAN MULTIDISIPLINER DALAM KAJIAN KEISLAMAN

Rini

rinwan06@gmail.com/rini@iaincurup.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah menuntut adanya era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Untuk itu maka tentunya umat manusia membutuhkan aturan, nilai, dan norma serta pegangan hidup yang universal dan diakui atau diterima oleh semua manusia tanpa sekat bangsa dan negara demi terciptanya keharmonisan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup dalam kehidupan umat manusia.

Perubahan yang terjadi terus menerus akan mengubah pandangan bahwa dunia ini penuh keteraturan menjadi dunia yang penuh tantangan untuk mencapai ketenangan. Hal tersebut diindikasikan dengan berubahnya fase Newtonian menjadi fase quantum dan economical capital menjadi intellectual capital. Perubahan-perubahan ini juga akan berimbas pada realitas konsumtif menuju realitas reinventor bahkan juga membangun realitas kompetitif-regional menjadi realitas kompetitif-global.(ZA, 2014).

Adanya berbagai problematika kehidupan yang terjadi saat ini, menjadi tantangan bukan hanya bagi bangsa modern yang memunculkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, namun tantangan ini juga berlaku bagi seluruh umat manusia termasuk umat Islam dan agama Islam.

Islam sebagai agama penyempurna bagi agama-agama sebelumnya, sesungguhnya memiliki nilai komprehensifitas yang tidak diragukan lagi. Komprehensifitas Islam hadir dalam bentuk tatanan dan pedoman yang sudah ada pada agama Islam, mulai dari urusan pribadi individual hingga kepada urusan yang lebih kompleks menyangkut persoalan masyarakat dan Negara.

Pada hahikatnya komprehensifitas Islam ini menunjukkan sifat rahmatan lil alamin yang dimiliki oleh Islam, yang bisa diterima oleh semua orang, yang sesuai dengan berbagai rempat dan kondisi. Kalaulah kemudian Islam memiliki corak yang beragam, maka kesemuanya itu tidak melunturkan komprehensifitas Islam dan rahmat lill alamin yang dimiliki oleh agama Islam. Corak beragama yang berbeda timbul sebagai akibat dari latar belakang sosial dan budaya pemeluknya, bukan merupakan ajaran mendasar dari agama Islam.

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya bahwa Islam merupakan agama yang sangat bersahabat dan merangkul semua manusia,

bahkan makhluk hidup lainnya selain manusia. Rahmah yang dibawa Islam telah nampak nyata dalam ajaran-ajaran yang dibawa Rosulullah Saw sebagai utusan Allah. Dalam ajaran Islam sifat rahmah teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari kehidupan individu, antar sesama hingga kepada kehidupan global.

Dari konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin inilah, maka sangat perlu dilakukan kajian-kajian yang sifatnya internasional yang mampu menghadirkan Islam yang humanis dan universal. Kajian internasional artinya bahwa kajian yang dilakukan bersifat mendunia tidak terbatas pada suku dan bangsa tertentu. Kajian internasional adalah kajian-kajian terkini yang faktual dan kontemporer.

Secara konsep kajian Islam internasional sebenarnya telah tersaji dalam ajaran Islam, namun belum terumuskan secara baik yang kemudian dapat dijadikan rujukan dan pegangan bagi para peneliti, penggiat kajian internasional, umat Islam dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, maka sangat perlu dirumuskan pendekatan kajian keislaman multidisipliner yang rahmatan lil alamin.

Pembahasan

1. Sumber Ajaran Islam

Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Swt diturunkan melalui lisan nabiNya Rosulullah Saw, yang tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kebenaran-Nya. Islam lahir sebagai Agama penyempurna agama-agama terdahulu yang sudah banyak hilang kemurnian ajarannya karena penyimpangan dari pemeluknya. Islam memiliki sumber ajaran utama yaitu al-Qur'an yang kebenarannya mutlak karena bersumber langsung dari Allah Swt, selanjutnya sumber ajaran Islam yaitu Hadis sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. Di dalam Islam juga dikenal adanya akal pikiran atau diistilahkan lain dengan istilah ijtihad yang digunakan sebagai sumber pendukung untuk mendapatkan hukum apabila di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak didapati hukum yang dimaksud. Islam juga mempunyai berbagai karakteristik yang sangat luwes dan toleran, sehingga Islam menjadi sangat menarik bagi pemeluknya. Di dalam Islam dikenal juga pembaharuan atau modernisasi yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan beriringan dengan perkembangan dan tuntutan masa maupun keadaan.

Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw (Harun Nasution, 2011). Secara istilah Islam adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada

wahyu yang datang dari Allah Swt, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad Saw (Abuddin Nata, 1998). Artinya bahwa Islam adalah agama yang berasal dari Allah yang Allah turunkan melalui lisan nabi Nya Muhammad Saw. Rosulullah berfungsi sebagai utusan Allah yang menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Selanjutnya para ulama sepakat bahwa al Qur'an yang merupakan wahyu Allah SWT merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menjadikan hadits yang berisi sabda Rosulullah sebagai sumber hukum kedua setelah al Qur'an. Adapun sumber hukum lainnya yang disepakati ulama adalah ijtihad sebagai sumber hukum pendukung yang digunakan manakala ada persoalan hukum syariat yang tidak terdapat baik dalam al qur'an maupun hadits Rosulullah Saw.

Al-Qur'an secara etimologi berasal dari kata *qara'a-yaqra'u-qiraa'atan*, atau *qur'anan* yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan secara terminologi al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah, melalui Jibril dengan menggunakan bahasa Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasul, bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Ia terhimpun dalam mushaf, dimulai dari surat Al-fatihah dan diakhiri dengan surat An-nas, disampaikan kepada kita secara mutawatir dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tulisan serta terjaga dari perubahan dan penggantian (Abdul Wahab al Khallaf, 1972).

Al-Hadis berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Selain didasarkan pada keterangan-keterangan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis juga didasarkan kepada pendapat kesepakatan para sahabat. Yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat (Harun Nasution, 2011).

Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata *jabada*. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan atau yang tidak disenangi (Abd Hakim Atang, 2000). Secara Bahasa ra'yi berarti pendapat dan pertimbangan. Tetapi orang-orang Arab telah mempergunakannya bagi pendapat dan keahlian yang dipertimbangkan dengan baik dalam menangani urusan yang dihadapi (Hasan ahmad, 1984).

Sementara itu Amin Abdullah mengemukakan bahwa dalam agama tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan (sains). Karena sumber pengetahuan itu ada dua macam, yaitu

pengetahuan yang berasal dari Tuhan (teosentris) dan pengetahuan yang berasal dari manusia (antroposentris), perpaduan antara keduanya disebut teoantroposentris. (M. Amin Abdullah, 2004). Amin Abdullah berjuang mengajak kaum muslimin Indonesia khususnya, untuk menghidupkan dan membangkitkan kembali (revitalisasi) ajaran Islam dari keterpurukan, sehingga umat Islam tidak ketinggalan dalam peradaban. (Abdullah Dju, n.d.).

2. Kebutuhan Manusia terhadap Agama

Pada umumnya, kata “agama” diartikan tidak kacau, yang secara analitis diuraikan dengan cara memisahkan kata demi kata, yaitu “a” berarti “tidak” dan “gama” berarti “kacau”. Dapat dimaknai bahwa orang yang memeluk agama dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan sungguh-sungguh, maka hidupnya tidak akan mengalami kekacauan. (Ali Anwar Yusuf, n.d.).

Secara etimologis Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata “a” berarti “tidak” dan “gam” berarti “pergi”. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, kata agama berarti “tidak pergi”, tetap di tempat, langgeng, abadi yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi kepada generasi yang lainnya”. (Jalaludin, n.d.).

Secara terminologi menurut sebagian orang, agama merupakan sebuah fenomena yang sulit didefinisikan. WC Smith mengatakan, “Tidak berlebihan jika kita katakan bahwa hingga saat ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima”. Meski demikian, para cendekiawan besar dunia memiliki definisi, atau yang lebih tepatnya kita sebut dengan kesimpulan mereka tentang fenomena agama. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Emile Durkheim mengartikan, agama sebagai suatu kesatuan sistem kepercayaan dan pengalaman terhadap suatu yang sakral, kemudian kepercayaan dan pengalaman tersebut menyatu ke dalam suatu komunitas moral.
- b. Karl Mark berpendapat bahwa agama adalah keluhan kesah dari makhluk yang tertekan hati dari dunia yang tidak berhati, jiwa dari keadaan yang tidak berjiwa, bahkan menurut pendapatnya pula bahwa agama dijadikan sebagai candu bagi masyarakat.
- c. Spencer mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan akan sesuatu yang Maha mutlak.
- d. Dewey menyebutkan agama sebagai pencarian manusia akan cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya, agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat

- e. Sebagian pemikir mengatakan bahwa apa saja yang memiliki tiga ciri khas di bawah ini dapat disebut sebagai agama: 1) Keyakinan bahwa di balik alam materi ini ada alam yang lain, 2) Penciptaan alam memiliki tujuan, 3) Alam memiliki konsep etika. (Rozali, 2020).

Secara naluri, manusia mengakui adanya kekuatan dalam kehidupan ini yang ada di luar dirinya. Hal Ini dapat terlihat secara jelas manakala manusia mengalami kesengsaraan dan kesulitan hidup berupa musibah, bencana ataupun hal lain yang tidak mengenakkan. Manusia akan mengeluh dan meminta pertolongan kepada sesuatu yang serba maha diluar dirinya, yang ia yakini dapat membebaskannya dari keadaan sulit yang dihadapi. Naluri inilah yang menjadi bukti bahwa manusia membutuhkan agama dan Sang Penciptanya. (M. Yatimin, 2006). Oleh sebab itu kebutuhan manusia terhadap agama merupakan kebutuhan dasar manusia yang dirasakan oleh setiap manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki akal pikiran dan kata hati. Dengan dua bekal pemberian Tuhan inilah manusia dapat berfikir dan merasakan kebutuhannya terhadap Tuhan dan agama sebagai pedoman dan pegangan hidup untuk meraih kebahagiaan hidup yang diinginkan. Selanjutnya melalui agama manusia belajar mengenal Tuhan termasuk mengajarkan manusia cara berkomunikasi dengan sesamanya, dan lingkungannya.

3. Pendekatan dalam kajian keislaman

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., saat ini sudah berusia kurang lebih empat belas abad, yakni dari sejak abad VII hingga abad XXI ini. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang itu Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadist telah dipahami oleh para penganutnya yang memiliki latar belakang sosial, kultural, politik, pendidikan, kecenderungan, kecerdasan, disiplin, aliran dan sebagainya yang berbeda-beda. (Sassi, n.d.). Dari latar belakang yang berbeda ini selanjutnya melahirkan berbagai pendekatan yang digunakan dalam kajian keislaman.

Pendekatan dapat dimaknai sebagai cara memperlakukan sesuatu (*a way of dealing with something*). Dalam kajian keislaman terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, antara lain : (Rozali, 2020)

1. Pendekatan teologis

Pendekatan teologis dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud

empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.

2. Pendekatan antropologis

Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban.

3. Pendekatan sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.

4. Pendekatan historis

Pendekatan historis adalah usaha meninjau suatu permasalahan dari sudut pandang sejarah, dan menjawab permasalahan, serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan sebenarnya.

5. Pendekatan psikologis

Pendekatan psikologi merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati. Dengan ilmu jiwa ini, selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, diamalkan, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama kedalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usiannya.

4. Pendekatan Multidisipliner dalam kajian keislaman

Kajian keislaman adalah proses memperoleh pengetahuan Islam yang disamping bersifat normative teologis, juga bersifat empiris dan historis dengan prosedur ilmiah. Islam dikaji dari berbagai aspeknya seperti aspek ibadah dan latihan spritual, teologi, filsafat, tasawuf, politik sejarah kebudayaan Islam dan lain-lain. (Murthadlo, 2018).

Pendekatan multidipliner dalam kajian keislaman yang dimaksud di sini adalah kajian yang menggunakan berbagai pendekatan dan sudut pandang (pespektif). Misalnya dalam sebuah kajian keislaman digunakan pendekatan teologis, sosiologis dan normative secara bersamaan. Contoh lain adalah dalam mengkaji teks agama yang berasal dari al Qur'an dan sunnah tidak hanya mengandalkan pendekatan tekstual saja, tetapi perlu juga dilengkapi dengan pendekatan sosiologis, historis bahkan pendekatan linguistik dan hermenetik.

Pendekatan multidisipliner dalam kajian keislaman menjadi penting untuk dilakukan dengan tetap memperhatikan beberapa hal Antara lain : *Pertama*, perkembangan pembedaan studi islam dan pendekatannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. *Kedua*, adanya penekanan terhadap bidang dan pendekatan tertentu dimaksudkan agar mampu memahami ajaran islam lebih lengkap (komprehensif) sesuai dengan kebutuhan tuntutan yang semakin lengkap dan kompleks. *Ketiga*, perkembangan tersebut adalah satu hal yang wajar dan seharusnya memang terjadi, kalau tidak menjadi pertanda agama semakin tidak mendapat perhatian. (Rohmatika, 2019).

Kebutuhan akan kajian keislaman dengan pendekatan multidisipliner saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat terelakkan lagi. Hal ini sebagai respon terhadap perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi dan informasi yang tidak terbendung perkembangannya. Namun yang perlu juga diingat bahwa kajian keislaman dengan pendekatan multidisipliner harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

5. Contoh pendekatan multidisipliner dalam kajian keislaman

Salah satu contoh penggunaan pendekatan multidisipliner dalam kajian keislaman adalah dalam kasus nusyuz. Ibnu Mandzur (630-711 H) dalam Lisanul Arab mendefenisikan Nusyuz adalah rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Wahbah Az Zuhaili, guru besar ilmu fiqh pada Universitas Damascus, mengartikan Nusyuz sebagai ketidakpatuhan salah seorang pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci

terhadap pasangannya. Lebih jelas lagi, Nusyuz berarti tidak taatnya istri terhadap suami dan suami terhadap istri dan tidak mempunyai alasan yang cukup kuat untuk tidak taat, kecuali pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi maka tidak dikategorikan sebagai nusyuz, misalnya suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat dan sebaliknya.

Inti dari arti Nusyuz adalah pelanggaran terhadap nilai moral dan sosial, apabila istri melakukan pelanggaran tersebut maka bagi suami diperintahkan untuk menasehati istrinya dengan perkataan yang lemah lembut untuk mengingatkan akan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri yang telah diberikan oleh Allah SWT yang merupakan bagian dari masalah sosial, apabila belum berhasil dalam mengingatkannya cara kedua adalah pisah ranjang sebagai tekanan agar ia lebih berfikir tentang hak dan kewajibannya. Jika kedua cara tersebut belum juga berhasil, agama membolehkan untuk memukul sebagai ungkapan rasa ketidakrealan melihatnya lalai dalam melaksanakan kewajiban ataupun ungkapan kemarahan. Akan tetapi haruslah diingat bahwa pukulan itu janganlah sampai meninggalkan bekas apalagi melukai. Tidaklah menjadi keharusan bagi suami untuk memukul karena semua ulama menganjurkan agar suami menjauhi dari perbuatan tercela tersebut, begitupun jika suami yang melanggar dan lalai akan kewajibannya maka istri harus mengingatkannya.

Ketika bicara tentang nusyuz, biasanya para mufassir akan mengutip Q.S. al-Nisa' (4): 34. Adapun bunyi ayat tersebut adalah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat tersebut seringkali ditafsirkan dan dijadikan legitimasi oleh kaum “laki-laki” untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istri (perempuan) yang dianggap telah nusyuz. Di dalam kitab-kitab fiqh atau tafsir klasik, kata nusyuz sering dibawa pengertiannya pada istri yang tidak taat kepada suami.

Dalam al-Qur’an kata nusyuz juga dapat merujuk kepada kaum laki-laki. (Q.S. al-Nisa’ [4]: 128, sebagaimana Allah berfirman :

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Para mufasir memaknai kedua kata ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk pada perempuan, kata nusyuz berarti ketidakpatuhan istri kepada suami, sedangkan ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya, tidak mau memberikan haknya.

Kalau kita mengkaji kata nusyuz ini dengan teori transformatif generative, maka sesungguhnya perbedaan makna yang nampak dari kata ini tatkala digunakan kepada seorang perempuan dan laki-laki, hakekatnya adalah makna secara dzohirnya saja yang berbeda, namun secara makna dalam (*deep structure*) tentunya makna keduanya adalah sama. Kita bisa menyimpulkan bahwa makna dalam yang diinginkan dari kata nusyuz ini adalah terjadinya ketidak harmonisan antara istri dan suami, baik ketidak harmonisan itu disebabkan oleh istri yang tidak mentaati suaminya maupun sikap suami yang tidak bijaksana

dengan istrinya seperti bertindak kasar, tidak menafkahi istri ataupun sikap acuh tak acuh dengan keluarga.

Lalu bagaimana solusi ketika terjadi nusyuz baik oleh laki-laki atau perempuan? Al-Qur'an rupanya menawarkan berbagai solusi: Pertama, saling memaafkan, yaitu dengan cara menegur langsung dan menasehati antara keduanya (*fa'idhuhunna*), seperti dalam Q.S. al-Nisa' [4] : 34), atau dengan melakukan musyawarah diantara keduanya, berdamai dan bicara dengan baik-baik untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi seperti dalam yang disebut dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 128. Pada solusi yang pertama ini, nampak sekali bahwa Islam mengajarkan perdamaian dan keselamatan serta melarang kepada kekerasan dan kebrutalan dalam mengatasi persoalan-persoalan kehidupan.

Jika solusi ini belum manjur, alias masih menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi kedua yaitu boleh dipisahkan (*pisah ranjang*). Maknanya adalah solusi yang kedua ini mengajak kepada muhasabah (*introspeksi diri*), masing-masing dari suami dan istri diharapkan bisa melakukan mediasi, berfikir secara jernih terhadap permasalahan yang dihadapi. Terkadang melalui introspeksi diri seseorang dapat menyadari kesalahannya secara penuh tanpa paksaan orang lain. Sesungguhnya "dipisahkan" dalam artinya sesungguhnya adalah suatu hukuman psikis bagi pelaku nusyuz baik suami ataupun istri.

Langkah terakhir hanya boleh dilakukan dalam kasus-kasus yang ekstrim, yakni memukul mereka (*jadribuhunna*). Karena ini darurat, maka logikanya jika diluar kondisi darurat, haram hukumnya memukul istri.

Namun demikian, berkaitan dengan melakukan harmonisasi dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang perlu diingat Pertama: al-Qur'an menekankan pentingnya berdamai kembali. Dengan ungkapan lain, tidak perlu dilakukan tindakan kekerasan tertentu untuk menghadapi percekocokan antara suami-istri, apabila dapat diselesaikan secara damai. Kedua: jika proses langkah-langkah kompromi mengikuti cara yang diajarkan al-Qur'an dilakukan, maka sangat mungkin harmonisasi itu akan dapat kembali, sebelum langkah terakhir dilakukan. Jika tahap ketiga terpaksa harus dilakukan, maka hakikat memukul istri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan, atau perkelahian antara keduanya, karena tindakan tersebut sama sekali tidak islami.

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa solusi pertama merupakan solusi yang terbaik yang ditawarkan dan disukai oleh al-Qur'an. Ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar al-Qur'an yaitu musyawarah (*syura*), yang merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dua pihak yang bertikai.

Berdamailah itu yang lebih baik (Q.S. al-Nisa' [4]:128). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa perdamaian itulah yang menjadi tujuan al-Qur'an, bukan kekerasan atau memaksa pasangannya untuk patuh. Kepatuhan yang tulus sesungguhnya tidak dapat dicapai dengan kekerasan, melainkan antara lain dengan sikap pengertian, mawaddah (kasih sayang) lutf (kelembutan). Sesungguhnya hati seseorang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan, oleh sebab itu tatkala ada kasus disharmonis antara suami dan istri hendaklah yang diajak bicara adalah hatinya, bukan jasad dan emosi belaka. Tatkala hati seseorang dapat tersentuh, maka tidak ada sesuatupun yang dapat menghalangi terjainya hamonisasi kembali diantara kedua pasangan suami istri.

Berkaitan dengan memukul, sesungguhnya kata *dharaba* mempunyai banyak makna, tidak harus berarti memukul. *Dharaba* tidak harus berarti merujuk pada penggunaan paksaan atau kekerasan. Kata *dharaba* memang dapat berarti membuat atau memberikan contoh, seperti ayat: *Wadharaba Allahu masalan ...* Kata *dharaba* juga digunakan untuk pengertian meninggalkan. Bahkan lebih dari itu, kata *dharaba* ada yang bermakna *a'radba `anh wan sarafa* (berpalinglah dan meninggalkan untuk pergi), Demikian pula, kata *dharaba* ada yang berarti *mana 'anbu at-Tasharruf bi malibi* (mencegahnya untuk tidak memberikan hartanya kepadanya). Selain itu kata *dharaba* juga dapat digunakan dalam pengertian menetapkan, menahan, memisahkan, mengabaikan atau berpaling. (Munawwir, 2002) Jika demikian, ada kemungkinan banyak penafsiran kata *fadhribubunna* dalam Q.S al-Nisa' [4]: 34. Apakah tidak lebih baik, kata *fadhribubunna* kita tafsirkan dengan berpalinglah dan tinggalkanlah mereka atau kita tafsirkan janganlah mereka dikasih nafkah atau biaya hidup. Tafsir semacam ini nampaknya akan lebih dapat menghindarkan kekerasan dalam keluarga, ketika terjadi disharmoni atau percekocokan antar suami istri.

Kemudian kalau kita melihat akan tujuan yang diinginkan oleh ayat ini adalah ingin mengembalikan keharmonisan hubungan antara suami istri, maka tindakan *dharaba* tidak lain adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyadarkan pihak yang melakukan nusyuz. Tatkala kita memaknai kata *dharaba* adalah memukul, maka yang akan terjadi adalah bukannya harmonisasi tetapi pertengkaran dan pertikaian. Karena secara manusiawi, tindakan kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima oleh hati manusia. Dengan kekerasan yang sakit bukan hanyalah fisik saja sebagai akibat dari suatu pukulan namun lebih daripada itu hati juga akan tersakiti merasa tidak dihargai dan lain

sebagainya. Kalau hati telah terkoyak, maka akan sangat sulit untuk dapat mengembalikan kondisinya seperti semula.

Dalam teori transformasi generative, bahasa manusia memiliki potensi untuk berkembang. Jika demikian, apakah tidak lebih baik, kata *fadhribubunna* kita maknai dengan berpalinglah dan tinggalkanlah mereka atau kita maknai janganlah mereka dikasih nafkah atau biaya hidup. Pemaknaan semacam ini nampaknya akan lebih dapat menghindari terjadinya kekerasan dalam keluarga, ketika terjadi disharmoni atau percekocokan antar suami istri. Dan yang terpenting adalah *deep structure* yang dapat kita ambil dari kata dharaba ini adalah memberikan hukuman sebagai upaya penyadaran.

Dalam teori hermenetika, setiap manusia memiliki kemampuan untuk dapat melakukan suatu proses pemahaman. Sebab pada dasarnya pemahaman berkaitan erat dengan hubungan antarmakna dalam sebuah teks, serta pemahaman tentang realitas yang kita perbincangkan.

Dalam hermenetika juga dikatakan bahwa bahasa itu lebih dari sekedar teks, struktur dan makna. Bahasa juga adalah pengalaman yang dihayati. Pengalaman yang dihayatilah yang terungkap dalam bahasa dan yang memberi kepada bahasa makna-makna eksistensinya. Bahasa adalah rumah bagi segala jenis pengalaman yang bermakna. Melalui hal ini dapat kita katakan bahwa pemaknaan terhadap satu kata dapat dilatar belakangi oleh pengalaman seseorang. Artinya disini bahwa bahasa bersifat kontekstual dan bahasa merupakan ungkapan kehidupan. Pada prakteknya ketika kita memaknai kata dharada, maka makna yang bisa kita ambil dari kata ini menjadi beragam, disesuaikan dengan keinginan dan situasi pada saat kata ini digunakan. Dalam hermenetika, tidak ada penafsiran yang salah dan benar, yang ada adalah proses melakukan reinterpretasi secara terus menerus.

Rasulullah SAW mensunahkan kepada orang muslim agar tidak memukul istrinya, Nabi sendiri tidak pernah memukul istrinya hal itu menunjukkan bahwa memukul adalah tercela yang tergolong ke dalam perbuatan makruh bahkan haram, karena Nabi sangat marah dan murka terhadap para suami yang memukul istri mereka, sebagaimana yang terdapat dalam sunan Abi Dawud hal 245, banyaknya suami-suami yang memukul istrinya sehingga mereka mengadu kepada rasul SAW, seraya Rasul marah keras terhadap suami-suami yang telah memukul istrinya. Kalaupun terpaksa dan tak bisa mengelak untuk memukul, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk memukul dengan siwak seperti sikat gigi dan sebagainya. Menurut Muhammad Ali As Shabuni dan Wahbah Az Zuhaili, saat suami melakukan pemukulan terhadap istri

haruslah dihindari, 1. bagian wajah, sebab wajah adalah bagian tubuh yang paling dihormati, 2. Bagian perut dan bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan hal yang negatif atau kematian, sebab pemukulan tidak dimaksudkan untuk mencederai apalagi membunuh istri yang nusyuz melainkan untuk mengubah sikap nusyuznya, 3. Memukul hanya pada suatu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya di daerah lain. Dalam soal memukul istri yang nusyuz, dalam mazhab Hanafi dianjurkan agar menggunakan alat berupa sepuluh lidi atau kurang atau dengan alat yang tidak akan melukai istri.

Apabila dilihat dari aspek psikologis seseorang memutuskan untuk menjalin hubungan keluarga (pernikahan) maka hubungan suami istri dalam suatu bangunan rumah tangga harus dibangun dengan tubuh (body), jiwa/pikiran (soul) dan ruh (spirit). Tubuh lebih lemah dari pikiran sedangkan pikiran lebih lemah dari perasaan dan perasaan lebih lemah dari alam sadar. Oleh sebab itu, perasaan harus selalu dijaga antar suami istri. Manakala perasaan tersakiti maka pikiran bisa tertutup dan tidak bisa berfikir secara rasional. Demikian juga pada konsep nusyuz ini, apabila seorang istri atau suami melakukan nusyuz maka dalam proses islah harus dilakukan secara sadar baik oleh suami maupun istri bukan karena emosional semata.

Dari aspek teologis tujuan pernikahan yang harus dikedepankan adalah menciptakan kehidupan baru yang *mawaddah wa rohmah* antara suami dan istri. Tingkat kematangan suami istri dapat dilihat dari peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dalam menjalani rumah tangga suami sebagai pemimpin bagi laki-laki. Kepemimpinan suami sangatlah penting karena diibaratkan sebuah mobil maka perlu sopir untuk mengendarainya dan tidak mungkin untuk menjadi sopir semua. Namun begitu suami juga harus memberikan hak-hak pengurusan rumah tangga kepada istri. Artinya disini ada kerja sama antara suami dan istri saling melengkapi satu sama lainnya.

Kepemimpinan laki-laki atas wanita terbatas pada fungsi laki-laki sebagai kepala keluarga, bukan pemimpin dalam urusan segala-galanya. Superioritas laki-laki hanyalah terletak pada fungsinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangganya saja dan tidak superioritas semua urusan. Oleh sebab itulah, apabila ada seorang wanita yang memiliki kemampuan dan kemapanan dalam segi material, namun tetap yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki. Karena sebagai pemimpin tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang laki-laki bukan hanya segi materi saja, namun tanggung jawab yang lebih besar lagi adalah tanggung jawab laki-laki

dalam seluruh urusan rumah tangga antara lain perlindungan, kejahatan terhadap rumah tangga dan lain sebagainya.

Adanya suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga sangatlah penting, Dalam prakteknya keluarga sebagai suatu bangunan kasih sayang, kebersamaan dan solidaritas yang saling melengkapi dalam Islam. Sehingga kata *qowwamah* sesungguhnya mengandung dua arti penting yaitu : pertama, seorang laki-laki bertanggung jawab untk memenuhi kebutuhan perempuan secara finansial dan material, yaitu dengan menyediakan apa yang diinginkannya dan ia merasa aman dan tentram. Kedua, memelihara dan melindungi keluarga serta mengurusnya dengan adil. (Nawal al Sa'dawi, 2002)

Al-Qur'an telah menetapkan tugas yang seimbang bagi lelaki dan wanita. Tugas ini diberikan sesuai dengan fitrah dan kemampuan masing-masing, berdasarkan kepada fitrah wanita yang berbeda dengan lelaki. Dari segi fisik, emosi dan psikologi hanya wanita yang dapat menjalankan tugas keibuan dengan baik. Ini karena wanita berbanding lelaki lebih penyayang, lembut, cepat bertindak secara naluri dan instinct keibuan dapat memenuhi tuntutan tugas dengan baik. Adapun kaum lelaki biasanya lambat bertindak dan mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak ditambah lagi kecenderungan suka kehidupan yang keras penuh tantangan memang sesuai untuk bekerja keras di luar rumah untuk memenuhi keperluan keluarga. Jelas sekali bukan kerendahan wanita dan kelebihan lelaki yang membuat perbedaan tugas tersebut akan tetapi fitrah dan psikologi keduanya yang menjadi pertimbangan agar masing-masing tugas dapat diemban dengan baik.

Perbedaan dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa Rohmah*) di lingkungan keluarga. Hal tersebut merupakan cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negri yang damai penuh ampunan (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*). Hal ini bisda terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keselaran antara keduanya (laki-laki dan perempuan). (Siti Musdah Mulia, 2001)

Diatas adalah salah satu contoh kajian keislaman menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu menggunakan pendekatan teologis, pendekatan linguisti, pendekatan hermenetik, pendekatan psikologis serta pendekatan sosiologis.

Kesimpulan

Melalui pendekatan multidisipliner dalam kajian keislaman akan didapatkan wajah Islam yang humanis dan rahmatan lil alamin. Selanjutnya dengan sendirinya kesan Islam yang keras dan tidak bersahabat akan sirna.

Dalam melakukan kajian keislaman melalui pendekatan multidipliner akan didapatkan kajian dan pemaknaan terhadap teks agama yang bersifat universal dan tidak sempit hanya sekedar pemaknaan literal. Pada suatu kata atau konsep terkadang mengandung banyak makna yang dapat diambil, oleh sebab itu kajian keagamaan dalam kehidupan hendaknya terus dilakukan pemaknaan ulang atau reinterpretasi, sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Daftar Pustaka

- Abd Hakim Atang, J. M. (2000). *Metodologi studi Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Abdul Wahab al Khallaf. (1972). *Ilmu Ushul al Fiqh*. al Majelis al 'ala al Indonesia li al da'wah al Islamiyah.
- Abdullah Dju. (n.d.). Pemikiran M. Amin Abdullah tentang Pendidikan Islam dalam Pendekatan Integrasi-Interkoneksi. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (IJAJ)*, 3(1), 1–15.
- Abuddin Nata. (1998). *Metodologi studi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Ali Anwar Yusuf. (n.d.). *Studi agama Islam*. Pustaka setia.
- Harun Nasution. (2011). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. UI Press.
- Hasan ahmad. (1984). *Pintu Ijtihad sebelum tutup*. Pustaka Bandung.
- Jalaludin. (n.d.). *Psikologi agama*. Raja Grafindo Persada.
- M. Amin Abdullah. (2004). *Integrasi Sains Islam dalam mempertemukan epistemologi Islam dan sains*. SUKA Press.
- M. Yatimin. (2006). *Studi Islam kontemporer*. Amzah.
- Munawwir. (2002). *kamus al Munawwir*. Pusaka Progresif.
- Murthadlo, G. (2018). Urgensi Mempelajari Islam Secara Inter-Multidisipliner. *Tarbiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(01), 202–236. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/view/1019>
- Nawal al Sa'dawi, H. R. I. (2002). *Perempuan, agama dan moralitas antara nalar feminis dan Islam revitalis*. terj. Erlangga.
- Rohmatika, R. V. (2019). Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam

Studi Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 115–132.
<https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4681>

Rozali. (2020). *Metodologi studi Islam dalam perspectives multydisiplin keilmuan*. Rajawali buana pusaka.

Sassi, K. (n.d.). *ARTIKULASI ISLAM MODERNIS-KONTEMPORER : 1*(01), 35–54.

Siti Musdah Mulia, M. A. (2001). *Keadilan dan kesetaraan gender (perspektif Islam)*. Tim Pemberdayaan Perempuan.

ZA, T. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v2i2.32>

Biodata Penulis

Rini, lahir di Palembang pada tanggal 5 Februari 1978. Pendidikan SD 306 Palembang (1984-1990), MTs Raudhatul Ulum Sakatiga Palembang (1990-1993), MA Raudhatul Ulum Sakatiga Palembang (1993-1996), S-1 Bahasa dan Sastra Arab (2001-2005), S-2 Pendidikan Bahasa Arab (2008-2010), S-3 Pendidikan Bahasa Arab (2014-2018).

Pengalaman sebagai pengajar Bahasa Arab di Pondok pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga 1997-2008, Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) Bengkulu 2010-2011 dan program studi pendidikan bahasa Arab IAIN Curup sejak 2011.

Penulis aktif meneliti dan menulis karya ilmiah yang disajikan di berbagai seminar nasional dan jurnal ilmiah, menjadi peserta dan penyaji makalah dalam seminar nasional dan internasional, aktif dalam organisasi profesi (IMLA) dan editor in chief jurnal ilmiah Arabiyatuna.

KONTEKSTUALISASI BAHASA ARAB

Rahmat Iswanto

Pendahuluan

Kata “*bahasa*” dalam bahasa Indonesia semakna atau sama dengan kata *lughat* dalam bahasa Arab, *language* dalam bahasa Inggris, *taal* dalam bahasa Belanda, *kokugo* dalam bahasa Jepang dan *bbasa* dalam bahasa Sansekerta. Atas dasar perbedaan sebutan ini tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengertian untuk sebagian orang yang belum tepat. Hingga kini “*bahasa*” didefinisikan dengan beragam pengertian. Sebagian mengatakan bahwa bahasa adalah perkataan-perkataan yang diucapkan atau ditulis. Sebagian lainnya mengatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia. Sekelompok lainnya mendefinisikan bahasa sebagai kata benda, kata kerja, kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan dan sebagainya yang dipelajari di sekolah. Ada juga yang mendefinisikan bahasa hanya sebagai kumpulan kata-kata, kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan. Bila dicermati secara lebih seksama dan akurat, beberapa definisi tersebut hanya menyentuh dan menerangkan sebagian dari *hakikat wujud* dan *fungsi* bahasa. Sebenarnya, bahasa merupakan sistem lambang-lambang (simbol-simbol) berupa bunyi yang digunakan sekelompok orang atau masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi.

Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur’an. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa tertua di dunia. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang awal mula munculnya bahasa Arab. Teori pertama menyebutkan bahwa manusia pertama yang melafalkan bahasa Arab adalah Nabi Adam as. Analisa yang digunakan Nabi Adam as (sebelum turun ke bumi) adalah penduduk syurga, dan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa bahasa penduduk syurga adalah bahasa Arab, maka secara otomatis bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam as adalah bahasa Arab dan tentunya anak-anak keturunan Nabi Adam pun menggunakan bahasa Arab. Setelah jumlah keturunan Adam as bertambah banyak dan tersebar ke berbagai tempat, bahasa Arab yang digunakan saat ini berkembang menjadi jutaan bahasa yang berbeda. Teori ini kurang populer di kalangan ahli bahasa modern, khususnya di kalangan orientalis, dengan asumsi bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa Adam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Sedangkan Schlozer, seorang tokoh orientalis, mengemukakan bahwa bahasa Arab termasuk rumpun bahasa semit. Teori ini diambil dari pembagian bangsa-bangsa di dunia yang terdapat di dalam kitab perjanjian lama. Teori ini menggambarkan bahwa setelah terjadinya banjir Nabi

Nuh, semua bangsa di dunia berasal dari tiga orang putra Nabi Nuh as yaitu Syam, Ham dan Yafis. Nama semit di ambil dari nama Syam putra Nabi Nuh as yang tertua. Namun teori ini juga mempunyai kelemahan. Tabel penyebaran putra-putra Nabi Nuh as yang disebutkan dalam perjanjian lama hanya membagi bangsa berdasarkan pertimbangan politik dan geografis semata, tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa.

Di permukaan bumi, manusia melakukan komunikasi untuk menyampaikan hal-hal yang penting bagi mereka terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia untuk mencari kenikmatan di atas dunia dilakukan dengan melakukan komunikasi terhadap alam, melakukan penilaian secara terukur yang disebut dengan metode ilmiah, dan kemudian hasil penelitian manusia dituangkan ke dalam media atau melalui media agar dapat disampaikan kepada manusia lain sehingga terjadi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian fungsi bahasa sangat urgen dalam menciptakan keberlanjutan dan kesinambungan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.

Bahasa yang mewakili alat komunikasi manusia hingga sekarang sangat beragam. Adapun bahasa yang disepakati dalam berkomunikasi secara internasional adalah bahasa Inggris. Baik untuk menyampaikan perkembangan ilmu pengetahuan maupun dalam kegiatan hubungan antar negara. Bahasa-bahasa lain tetap menjadi bahasa penting khususnya bagi suatu negara, hal ini juga menyangkut permasalahan budaya dan kemampuan manusia tertentu untuk menggunakan secara turun temurun.

Bahasa Arab sebagai bahasa tertua dan digunakan oleh sebagian negara yang menjadikannya bahasa negaranya mengambil peran yang penting tidak hanya bagi negara tersebut akan tetapi juga bagi kaum muslimin yang memiliki pegangan hidup al-Quran dan al-Hadits yang dituangkan dalam bahasa Arab.

Mengapa bahasa Arab tidak menjadi bahasa Internasional padahal bahasa Arab adalah bahasa yang tertua. Suatu asumsi muncul bahwa hal ini terjadi oleh beberapa sebab antara lain bahasa Inggris adalah bahasa dimana para ilmuan dunia lebih menonjolkan karyanya berasal dari negara-negara yang mengembangkan dan menggunakan bahasa Inggris; para ilmuan dunia mengutamakan bahasa lain selain bahasa Arab karena bahasa Arab dianggap bahasa Agama; urusan agama yang disampaikan dengan bahasa Arab tidak memberikan keleluasaan sikap dan aspirasi ilmuan dalam mengkomunikasikan pengembangan ilmu; para ilmuan Islam yang menggunakan bahasa Arab

menyebarkan karya-karya keilmuannya tidak lebih antusias daripada ilmuan Eropa yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

Seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa Inggris lebih dominan dari bahasa Arab akan tetapi bahasa Arab tetap memiliki dasar yang kuat dan selalu tetap ada dalam setiap kajian yang menjadi solusi bagi manusia modern. Mengapa demikian? Hal ini karena bahasa Arab merupakan bahasa kitab suci al-Quran sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia. Bahasa Arab digunakan oleh para pewaris Nabi yang ada dan eksis untuk kepentingan manusia dari berbagai kebutuhan dan permasalahan hidup.

Melihat fenomena bahwa bahasa Arab menjadi bahasa dasar bagi umat Islam dan sebagai alat komunikasi penting bagi umat manusia, maka bahasa Arab hendaknya dipergunakan dengan lebih menyentuh tidak hanya untuk pengembangan nilai-nilai agama, akan tetapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Indonesia adalah negara dimana penduduknya adalah mayoritas beragama Islam dan merupakan umat Islam yang terbesar di dunia. Dengan demikian kebutuhan terhadap bahasa Arab adalah hal yang pokok. Keberadaan bahasa Arab dan kiprah tokoh-tokoh Islam dan Ilmuan Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan meninggalkan suatu harapan untuk dapat menggunakan bahasa Arab tidak hanya untuk alat kajian dan komunikasi agama akan tetapi juga untuk dapat menyandingkan bahasa Arab dengan bahasa lainnya dalam hal kajian ilmu pengetahuan teknologi dan perkembangan dunia.

Di Indonesia, penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan melalui dua payung departemen yang besar yaitu Pendidikan Nasional dan Pendidikan Agama. Khususnya Pendidikan Agama, yang pada saat ini di bawah Kementerian Agama menyiapkan program pendidikan dari tingkat bawah hingga tingkat tinggi. Semua jenjang pendidikan agama Islam tersebut menempatkan bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari.

Pada penyelenggaraan pendidikan tinggi bahasa Arab adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Bahasa Arab berfungsi sebagai bahasa Agama meskipun disamping itu fungsi bahasa Arab adalah sebagai bahasa politik, bahasa ekonomi, bahasa budaya, dan lain sebagainya.

Setiap program studi dalam pendidikan tinggi agama Islam menempatkan bahasa Arab sebagai mata kuliah yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Permasalahan yang muncul ketika bahasa Arab menjadi materi yang harus dipelajari adalah sasaran pencapaian penguasaan bahasa Arab yang masih perlu dievaluasi dan dirancang sesuai dengan terbatasnya waktu.

Sementara mahasiswa yang mengambil pendidikan dalam suatu program studi belum tentu mengenal bahasa Arab dengan baik. Program Studi Ilmu Ekonomi Islam contohnya, mahasiswa yang menempuh pendidikan ini memiliki latar belakang pembelajaran bahasa Arab yang sangat berbeda. Mulai dari yang sudah memiliki kemampuan yang sangat baik karena berasal dari pondok pesantren hingga pada mahasiswa yang sama sekali belum mempelajari bahasa Arab.

Dengan kondisi tersebut di atas, maka perlu kiranya merancang pembelajaran bahasa Arab dengan melihat kebutuhan setiap program studi. Maka suatu konsep yang perlu dikembangkan adalah pembelajaran bahasa Arab sesuai konteks keilmuan yang dikembangkan di pendidikan tinggi agama Islam. Kondisi seperti ini juga dapat disebutkan dengan kontekstualisasi bahasa Arab.

Ada beberapa permasalahan yang dibahas dan dipaparkan pada kajian tentang kontekstualisasi bahasa Arab, yaitu karakteristik bahasa Arab, konsep kontekstual, program studi yang dikembangkan oleh pendidikan tinggi agama Islam, model-model kontekstualisasi yang dipandang baik untuk diteliti dan dikembangkan.

Pembahasan

Karakteristik Bahasa Arab

Sebelum memasuki pengertian bahasa Arab, maka penulis akan mengungkapkan pengertian bahasa arab menurut sebagian ahli bahasa antara lain:

1. Menurut AG. Pringgodigdo dkk, bahasa ialah; ungkapan fikiran dan perasaan manusia yang secara teratur dinyatakan dengan memakai alat bunyi.
2. Menurut WJS. Poerwadarminta, bahasa ialah; perkataan, perbuatan yang dipakai oleh suatu bangsa (suku bangsa, negara, daerah dan sebagainya) misalnya; Indonesia, Batak, Jawa.
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa ialah; sistem lambang bunyi berartikulasi (yang dihasilkan oleh alat-alat ucap) yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan fikiran.

Dari beberapa pengertian bahasa yang telah dikemukakan di atas, ternyata para ahli dalam mengemukakan pengertian bahasa satu sama lainnya tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, tetapi justru terdapat persamaan, bahkan antara pengertian yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Adapun pengertian bahasa Arab dari kalangan ahli nahwu antara lain:

1. Menurut Syaikh Musthafa al-Ghulayainiy, bahasa arab ialah kalimat yang diungkapkan oleh Allah untuk menyatakan maksud mereka.

2. Menurut Ismail HS. Idris, bahasa Arab ialah bahasa yang dipilih oleh Allah untuk berkomunikasi oleh hamba-Nya yang telah menurunkan sebagai penutup syari'at-syari'at-Nya kepada utusan yang mulia ialah Nabi Muhammad Saw, yaitu Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Nabi.

3. Menurut Abd. Rauf Shadry, bahasa Arab ialah bahasa umat manusia yang dipilih oleh Allah untuk berkomunikasi dengan hamba-Nya, Nabi Muhammad Saw, yang diabadikan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits Nabi yang sampai kepada kita dan tersebar luas ke seluruh pelosok bumi lantaran agama, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi.

Bahasa Arab adalah bahasa yang lengkap dan sempurna bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Kesempurnaan dan kelengkapannya itulah merupakan keistimewaan baginya. Karena bahasa Arab mempunyai keistimewaan di bidang tata bahasa di samping keistimewaannya yang lain, maka banyak orang menganggap bahasa Arab itu rumit, kompleks, sukar dan lain sebagainya, terutama

di kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah bukti keistimewaan bahasa arab itu adalah kemampuannya mengurai sesuatu dan yang sukar menjadi mudah, dan yang belum dimengerti dapat dimengerti dan yang belum baik (indah) menjadi baik dan indah dan lain sebagainya.

Sejarah Bahasa Arab

Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa tertua di dunia. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang awal mula munculnya bahasa Arab. Teori pertama menyebutkan bahwa manusia pertama yang melafalkan bahasa Arab adalah Nabi Adam as. Analisa yang digunakan Nabi Adam as (sebelum turun ke bumi) adalah penduduk syurga, dan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa bahasa penduduk syurga adalah bahasa Arab, maka secara otomatis bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam as adalah bahasa Arab dan tentunya anak-anak keturunan Nabi Adam pun menggunakan bahasa Arab. Setelah jumlah keturunan Adam as bertambah banyak dan tersebar ke berbagai tempat, bahasa Arab yang digunakan saat ini berkembang menjadi jutaan bahasa yang berbeda. Teori ini kurang populer di kalangan ahli bahasa modern, khususnya di kalangan orientalis, dengan asumsi bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa Adam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari.

Sedangkan Schlozer, seorang tokoh orientalis, mengemukakan bahwa bahasa Arab termasuk rumpun bahasa semit. Teori ini diambil dari pembagian bangsa-bangsa di dunia yang terdapat di dalam kitab perjanjian lama. Teori ini menggambarkan bahwa setelah terjadinya banjir Nabi Nuh, semua bangsa di dunia berasal dari tiga orang putra Nabi Nuh as yaitu Syam, Ham dan yafis. Nama semit di ambil dari nama Syam putra Nabi Nuh as yang tertua. Namun teori ini juga mempunyai kelemahan. Tabel penyebaran putra-putra Nabi Nuh as yang disebutkan dalam perjanjian lama hanya membagi bangsa berdasarkan pertimbangan polotik dan geografis semata, tidak ada sangkut autnya dengan bahasa.

Pertumbuhan Bahasa Arab

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang termasuk rumpun bahasa-bahasa Semit yang berdiam di sebelah selatan, tepatnya di wilayah irak. Dengan demikian, hubungan bahasa Arab dengan Semit sangat kuat.

Menurut Abdul Wahid Wa'fiy, informasi yang sempat terekam dalam sejarah yang sampai kepada kita tentang sejarah Arab adalah temuan dari prasasti tentang Arab Baidah yang diperkirakan hidup pada abad pertama sebelum Masehi, sedangkan Arab baqiyah nanti setelah abad kelima Masehi, sehingga periodisasi pertumbuhan bahasa Arab sangat sulit untuk dilacak.

Hal yang senada dikemukakan oleh Anwar G. Chejne bahwa data bahasa Arab secara tertulis masih sangat sedikit jika dibanding dengan bahasa-bahasa lain, sehingga periodisasi bahasa Arab dan kesustranya hanya terbatas pada masa jahiliyah, masa munculnya Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, masa bani Umayyah dan masa Bani Abbasiah, masa kemunduran dan masa modern. Berkaitan dengan periodisasi tersebut di atas, bahwa yang diperangi oleh para ahli tentang pertumbuhan bahasa Arab, yaitu sejak pra Islam (Jahiliyah) yang mana pada saat itu sudah ada karya-karya sastra Arab baik syair ataupun pidato yang tidak menonjolkan dialek-dialek tertentu, menggunakan bahasa Arab mudah dipahami. Dengan jalan ini, kemudian terbentuklah suatu bahasa Arab kesusastraan, yang menjadi bahasa baku (standar) yang dipergunakan oleh setiap penyair dalam menyampaikan ide-idenya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa menjelang datangnya Islam telah lahir bahasa Arab standar, yang menjadi *lingua franca* bagi masyarakat Arab.

Perkembangan Bahasa Arab

a. Zaman Sesudah datangnya Islam

Dengan datangnya Islam dan turunnya Al-Qur'an dalam bahasa Arab standar, kedudukan bahasa Arab standar menjadi lebih penting dan menarik perhatian kalangan masyarakat yang lebih luas. Semakin besar jumlah pemeluk Islam, semakin meluas pengaruh bahasa Arab standar ini sampai pada kehidupan kalangan orang-orang awam. Karena didorong oleh jiwa dan semangat keagamaan, pemeluk agama Islam mempunyai kecintaan membaca Al-Qur'an, baik untuk ibadah dengan bacaan Al-Qur'an itu semata ataupun lebih lanjut untuk memahami isi Al-Qur'an dan menggali ajaran-ajaran Islam.

Dari sinilah mulai terbina hubungan yang menjalin bahasa Arab dengan agama Islam, sehingga membawa akibat yang jauh sekali bagi masa depan bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa agama dan kebudayaan bagi umat Islam.

b. Perkembangan Bahasa Arab di zaman Bani Umayyah

Di zaman pemerintahan Bani Umayyah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Islam. Orang Arab mulai berasimilasi dengan penduduk asli, karena kelompok sosial itu makin hari makin bercampur. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, tentara Islam dan pendatang-pendatang baru (Arab) itu tidak dapat menghindari hubungan dengan penduduk asli. Penduduk asli inipun berkepentingan mempelajari bahasa Arab untuk dapat saling mengerti dalam berkomunikasi dengan orang-orang tersebut, maka lahirlah suatu dialek khusus yang mereka pergunakan sehari-hari.

Berbicara tentang bahasa Arab yang *fasih* (bahasa Arab standar), menunjukkan ketinggian martabat sosial dan sebaliknya menggunakan bahasa atau dialek-dialek lain itu menandakan kerendahan tingkat sosial mereka.

Dalam konteks kehidupan sosial seperti itu tidak mengherankan kalau para pejabat dan pemimpin masyarakat sangat berkeinginan mendidik putra-putra mereka dalam lingkungan Arab Badui, dengan maksud agar dikemudian hari memiliki kelebihan dan keistimewaan atas masyarakat kelas rendah, dengan demikian mudah tergolong orang-orang yang berkelayakan untuk memangku jabatan pemerintahan, sehingga mereka mengirim putra-putra mereka ke pelosok desa untuk belajar bahasa Arab pada orang-orang Badui.

Faktor lain pula yang perlu diketahui bahwa akhir abad pertama Hijriyah di mana bahasa Arab telah mencapai posisi tinggi, terhormat dan kuat dalam wilayah negara Islam disebabkan:

1. Setelah “pengaraban” (Arabisasi) administrasi pemerintahan di mulai sejak kira-kira tahun 87 H, bahasa Arab dengan sendirinya telah menjadi bahasa resmi negara Islam.

2. Bahasa Arab adalah bahasa masyarakat kelas tinggi, yang digunakan para pejabat dan petugas pemerintahan yaitu penggunaan bahasa Arab *fashih*.

3. Bahasa Arab yang *fashih* tetap menjadi bahasa *syair* (puisi), dengan *syair* bagi masyarakat kelas tinggi menjadi kebanggaan.

4. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur’an, bahasa yang dipergunakan dalam ibadah, oleh karena itu umat Islam berkepentingan mempelajarinya.

c. Perkembangan Bahasa Arab di Zaman Bani Abbasiyah

Pemerintahan Arab Bani Umayyah) jatuh, tetapi bahasa Arab tidak ikut jatuh. Bahasa Arab tetap menempati posisi yang tinggi dan berperan seperti semula, meskipun zaman bani Abbas menurut ahli-ahli sejarah merupakan kemenangan bagi orang-orang Persia terhadap orang-orang Arab Bani Umayyah.

Bani Abbas sejak semula memang mengetahui dan berkeyakinan bahwa pengaruh dan kekuasaan mereka tergantung pada perkembangan dan kemajuan agama Islam, karena pemerintahan ini ditegakkan di atas landasan agama. Kitab suci dan mukjizat terbesar agama Islam adalah Al-Qur’an, sedang Al-Qur’an itu berbahasa Arab. Karena itu dalam pandangan dan perasaan setiap muslim apapun bahasa aslinya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hakekat Islam.

Inilah sebabnya, maka dalam alam pemerintahan Bani Abbas, bahasa Arab memperoleh perhatian serius dan usaha-usaha pemeliharaan serta pengembangan sebaik-baiknya.

Kalau Bani Umayyah mempunyai pertalian dengan masyarakat Badui, seperti dijelaskan diatas, untuk menguasai bahasa Arab yang baik dan benar putra-putra mereka dikirim ketengah-tengah masyarakat Badui, yang masih terisolir dari percampuran dengan orang-orang *‘ajam* (non-Arab).

Bani Abbas tetap yakin bahwa pentingnya menguasai bahasa Arab bagi putra-putra mereka. Namun dalam hal orientasi berfikir maupun secara perasaan tidak bersangkutan-paut dengan masyarakat Badui, Bani Abbas tidaklah mengirim putra-putra mereka ke masyarakat Badui. Karena itu pada abad II H, orang-orang Badilah yang didatangkan ke Baghdad dan muncul istana-istana para penguasa sebagai guru-guru bahasa Arab.

Satu hal yang perlu diingat bahwa karena terjadinya asimilasi Arab dan non-Arab, maka bagi orang awam mereka menggunakan bahasa Arab

'Ammiyyah atau bahasa Arab campuran kemudian menjadi bahasa percakapan dan alat komunikasi di antara mereka.

Pada abad III H pengaruh bahasa *'Ammiyyah* nampak lebih jelas pada kelompok awam, bahkan sudah mulai terdapat buku-buku ilmiah ditulis dengan bahasa yang kurang murni, karena mengandung gaya bahasa dan kata-kata bahasa Arab *Muwalladah*. Jadi, pada pertengahan abad III H, bahasa percakapan mengalami kemunduran yang menyedihkan, banyak para pejabat yang berbicara menggunakan bahasa *'Ammiyyah*, akibat unsur non-Arab semakin banyak menduduki jabatan penting dan semakin jauh mencampuri masalah-masalah politik dan pemerintahan.

Peristiwa ini muncullah pemikiran baru untuk mengoreksi penggunaan yang salah dalam bahasa percakapan dengan menggunakan bahasa *'ammiyyah*, maka para pemerhati menulis kritikan-kritikan dan menuangkan tulisan-tulisannya dalam bentuk buku-buku tentang penggunaan bahasa Arab *fushah* di kalangan masyarakat.

Kehadiran buku-buku tersebut mencerminkan suatu langkah maju bagi orang yang ingin mempelajari bahasa Arab, maka pada abad IV H dapat dikatakan hampir tidak ada lagi orang yang mempelajari bahasa Arab dengan mendatangkan dan menerima langsung dari orang-orang Badui. Bahasa Arab dipelajari melalui buku-buku pelajaran mulai saat itu banyak tersebar dimanamana.

d. Perkembangan Bahasa Arab sesudah Abad IV

Sesudah dunia Arab terpecah belah dan diperintah oleh penguasapenguasa politik non-Arab, bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa politik dan bahasa administrasi dalam pemerintahan. Bahasa Arab tersudut menjadi bahasa hanya semata-mata bahasa agama.

Sejak itu orang-orang Saljuk yang berkuasa pada abad V H bahasa Persia diumumkan sebagai bahasa resmi negara yang mereka pimpin. Sejak itu orang-orang Persia (Iran) mulai mengarang dengan bahasa Persia. Sebagian orang mulai meninggalkan penggunaan bahasa Arab.

Pada tahun 459 H dibangunlah sebuah lembaga pendidikan yang menangani pengajaran bahasa Arab yakni madrasah An-Nidhamiyyah. Dibangunnya madrasah ini menunjukkan perhatian kaum Saljuk terhadap bahasa Arab *fushah* meskipun untuk kehidupan sosial politik bahasa Persia dianggap penting. Mereka berpendapat bahwa bahasa Arab adalah kunci untuk memperdalam pengetahuan agama Islam dari Al-Qur'an dan As-Sunah.

Pada abad VI H ini ada perkembangan baru yang perlu dicatat, yaitu munculnya “*lahn*” atau kekeliruan dalam berbahasa dan membaca al-Qur’an, dan ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat termasuk di kalangan masyarakat terpelajar, padahal pada abad II H yang membuat kesalahan dalam berbahasa adalah orang awam.

e. Bahasa Arab di Zama Modern

Seperti diketahui, karena situasi umum yang statis selama pemerintahan Usmaniyah, maka bahasa Arab dalam periode itu juga mengalami keadaan statis, tidak berkembang mengikuti kemajuan hidup modern yang dibawa oleh zaman sesudah terjadinya kebangkitan di Eropa.

Sesudah kekuasaan politik Perancis mulai menjajah Mesir akibat dari berhasilnya serbuan Napoleon (tahun 1798 M), di Mesir mulailah berkembang keadaan untuk bangkit dan maju dengan landasan ilmu pengetahuan modern. Kesadaran tersebut lahir di kalangan sekelompok masyarakat di Mesir setelah mereka terpengaruh oleh golongan intelektual Eropa yang datang ke Mesir bersama serbuan Napoleon.

Golongan intelektula Eropa tersebut di Mesir membangun berbagai sarana yang melandasi dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di Mesir seperti: lembaga ilmu pengetahuan, perpustakaan, sekolah, surat kabar, laboratorium penelitian, percetakan Arab dan lain sebagainya.

Sekolah-sekolah dibuka untuk mempelajari macam-macam ilmu pengetahuan. Bahasa Arab adalah bahasa pengantar pada sekolah-sekolah tersebut, karena guru-guru yang mengajar pada umumnya adalah sebagian besar alumni Eropa dari group misi mahasiswa Mesir yang beberapa tahun sebelumnya telah berhasil melanjutkan studi di Eropa. Kuliahkuliah yang diberikan oleh guru-guru besar asing juga disampaikan dalam bahasa Aab setelah melalui penerjemahan.

Inilah salah satu langkah yang berhasil dalam rangka usaha mengatasi keterbelakangan bahasa Arab, dan sekaligus meletakkan dasar kokoh bagi bahasa Arab untuk menjadi bahasa yang dinamis dan mampu berkembang secara wajar.

Periode modern (1800-seterusnya), merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Raja-raja dan pemuka-pemuka Islam kembali. Periode modern inilah timbulnya ide-ide pembaharuan dalam Islam.

Pendekatan Kontekstual

1. Pengertian Pendekatan Kontekstual

Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dengan pendekatan kontekstual diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa, sehingga siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang.

Pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktifitas siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Elaine B. Johnson bahwa kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan otak (IQ) tidak lepas dari faktor lingkungan atau faktor konteks, karena ada interface antara otak dan lingkungan.

Pendekatan pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk selalu aktif dalam menemukan konsep dan mengaitkan antara pengalaman yang dimiliki siswa dengan materi yang dipelajari. Hal ini sesuai dengan “pembelajaran spiral” sebagai konsekuensi dalil J. Bruner. Dalam matematika setiap konsep saling berkaitan dengan konsep lain, dan suatu konsep menjadi prasyarat bagi konsep lain. Sehingga siswa harus lebih banyak diberi kesempatan untuk melakukan keterkaitan tersebut.

Contextual Teaching and Learning merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa. Pembelajaran ini digunakan untuk memahami makna materi pelajaran yang sedang dipelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa (konteks pribadi, sosial, dan kultural), sehingga siswa memiliki pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu konteks ke konteks lainnya.

Dengan pendekatan pembelajaran kontekstual siswa akan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan sebagai bekal untuk memecahkan masalah kehidupannya di lingkungan masyarakat. Siswa adalah generasi yang dipersiapkan untuk menghadapi dan memecahkan masalah di masa mendatang sehingga perlu dilatih dari sekarang. Menurut S. Nasution memecahkan masalah adalah metode belajar yang mengharuskan pelajar untuk menemukan jawabannya (discovery) tanpa bantuan khusus. Masalah yang dipecahkan ,

ditemukan sendiri tanpa bantuan khusus akan memberi hasil yang lebih unggul dibanding pemecahan masalah yang mendapat bantuan khusus.

Dengan demikian pendekatan pembelajaran kontekstual pembelajaran adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan konsep dan mengaitkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman yang dimiliki sebagai pengetahuan prasyarat untuk membangun konsep baru. Dengan pendekatan pembelajaran kontekstual pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan siswa dapat mengaplikasikan konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata mereka untuk memecahkan masalah kehidupan di lingkungannya.

2. Komponen Pendekatan Kontekstual

Komponen - komponen yang menyusun Pendekatan kontekstual adalah sebagai berikut :

1. Membangun hubungan untuk menemukan makna (*relating*),
2. Melakukan sesuatu yang bermakna (*experiencing*),
3. Belajar secara mandiri,
4. Kolaborasi (*collaborating*),
5. Berpikir kritis dan kreatif (*applying*),
6. Mengembangkan potensi individu (*transferring*),
7. Standar pencapaian yang tinggi,
8. Asesmen yang autentik.

3. Karakteristik Pendekatan Kontekstual

Ada beberapa karakteristik dalam pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, yaitu:

- a. Kerjasama
- b. Saling menunjang
- c. Menyenangkan, tidak membosankan
- d. Belajar dengan bergairah
- e. Pembelajaran terintegrasi
- f. Menggunakan berbagai sumber
- g. Siswa aktif
- h. Sharing dengan teman
- i. Siswa kritis guru kreatif
- j. Dinding dan lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain
- k. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapot tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pendekatan kontekstual mempunyai ciri khas adanya kerjasama dan sharing antar siswa agar dapat saling menunjang dalam pembelajaran, siswa aktif, senang dan bergairah dalam belajar, pembelajaran terintegrasi dengan mata pelajaran lain, dengan kebebasan berpendapat membuat siswa kritis, dan suasana kelas menjadi indah dan membuat siswa nyaman untuk belajar.

4. Langkah-langkah Pendekatan Kontekstual

Dalam pendekatan kontekstual ada beberapa langkah yang harus dilalui yang disebut dengan fase, ada 6 fase dalam pembelajaran antara lain :

a. Fase 1 (menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa), guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan memotivasi siswa.

b. Fase 2 (Menyampaikan Informasi), guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan.

c. Fase 3 (Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar), guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien.

d. Fase 4 (Membimbing kelompok belajar dan bekerja), guru membimbing kelompok belajar pada saat mengerjakan tugas mereka.

e. Fase 5 (Evaluasi), guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari/ meminta kelompok untuk presentasi hasil kerja.

f. Fase 6 (Memberikan Penghargaan), guru mengharagai baik upaya maupun hasil belajar individu maupun kelompok.

Telah banyak berdiri PTAI di Indonesia yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa wajib untuk memahami al-Qur'an dan al-Hadits. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang berhasil mengantarkan peserta didik untuk mampu menguasai dan berkomunikasi dengan bahasa Arab secara efektif (Hamzah, 2007: 87).

Salah satu faktor adalah lamanya masa pembelajaran dan rasa bosan yang banyak mengganggu minat terhadap mahasiswa untuk belajar bahasa Arab. Hal tersebut ditambah padatnya aktifitas di luar jam kursus, sehingga lembaga kursus mulai mengalihkan programnya menjadi reguler atau non intensive course dengan alokasi waktu 2 sampai 3 jam seminggu, dari sisi ini saja sudah terlihat kegagalan

dalam melaksanakan program bahasa Arab yang optimal.

Semua itu kemudian diperparah kualitas pengajar yang umumnya juga orang Indonesia, di mana secara teori mungkin menguasai dasar-dasar gramatika

bahasa Arab, tetapi secara dzauq, kemampuan mereka amat terbatas. Banyak sekali para pengajar yang mampu berbicara dalam bahasa Arab, namun dengan ta'bir yang bukan digunakan oleh orang Arab. Sehingga orang Arab sendiri pun kalau mendengarnya tidaklah paham dengan baik.

Masalah kurikulum pengajaran yang belum terpadu seringkali menjadi faktor penghalang besar bagi keberhasilan intensive course bahasa arab. Yaitu ketika para peserta dijejali dengan berbagai macam aturan, rumus, kaidah dan lain-lainnya, tapi kurang praktek langsung. Bisa jadi secara teori mereka sangat paham, tapi tatkala praktik berbahasa itu baik secara lisan, tulisan atau menyimak, ternyata masih jauh dari kompetensi yang diharapkan.

Model-Model Kontekstualisasi Bahasa Arab

Kartu Permainan merupakan salah satu media kontekstual karena media ini secara tidak langsung dapat membawa peserta didik ke alam nyata dalam konteks pembelajaran. Ada 12 kartu permainan bahasa Arab yang mudah digunakan yaitu: Kartu pertanyaan dan jawaban (*Bithoqab al As-ilah wa al-ijabah*), Kartu Penyempurna (*Bithoqab alTakmilah*), Kartu Kosa kata (*Bithoqab al mufradat*), Kartu Tiruan (*Bithoqab al mushoghor*), Kartu Stick Figures (gambar hasil tangan) atau yang disebut *bithoqab tashwir al yadi*, "Kartu susun kata (*Bithoqab tarkib al mufradat*), Kartu tusuk kata, Kartu pindah gambar, Papan tulis berkata, Temukan pasanganku.

Perlu upaya bagi pendidik atau bahkan pihak lain yang berkompeten untuk mengkontekstualisasikan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjadikan materi bahasa Arab lebih relevan dengan konteks lingkungan peserta didik adalah sebagai berikut.

1. Menyesuaikan bahan ajar, khususnya substansi dan kosa kata (mufradat) dengan konteks sosial budaya penutur. Ini perlu diupayakan karena faktanya cukup banyak lembaga pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi yang langsung menggunakan buku ajar bahasa Arab terbitan timur tengah yang sedikit banyak pasti memiliki perbedaan dengan kultur penutur lokal seperti istilah-istilah yang berkaitan dengan penamaan benda, alat, makanan, dan lain sebagainya.

2. Mengadaptasikan konten-konten bahan ajar bahasa Arab yang memiliki kemungkinan untuk disesuaikan dengan kondisi faktual di lingkungan penutur, seperti nama orang, tempat, dan lainnya.

3. Mengembangkan bahan ajar bahasa Arab berbasis kearifan lokal sehingga peserta didik menjadi kaya pengetahuan akan budaya lokal di daerahnya sendiri. Dengan Kearifan lokal adalah berupa prinsip-prinsip dan cara tertentu yang dianut, dipahami, dan di-aplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan diformulasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat. hal ini, maka konten-konten bahan ajar dapat memuat kebiasaan-kebiasaan setempat yang memungkinkan untuk dijadikan materi seperti makanan tradisional, permainan tradisional, tempat / artefak bersejarah atau hal lainnya yang dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat “*local genius*”.

4. Mengkontekstualisasikan konten-konten yang bersentuhan dengan gender. penanaman nilai-nilai berperspektif gender sejak dini penting untuk dilakukan agar tercipta masyarakat yang berkeadilan gender, saling menghormati dan menghargai antar sesama serta merasakan kesetaraan tanpa membedakan. Dunia pendidikan merupakan ranah yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai berperspektif gender pada generasi muda. Sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan”. Hal ini dapat diterapkan dalam konten-konten yang sifatnya ilustrasi atau yang memiliki hubungan dengan profesi atau pekerjaan yang melekat pada gender tertentu yang selalu digunakan secara tetap.

Kesimpulan

Dalam pembelajaran bahasa arab juga terdapat kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya memuat metode dan pendekatan pembelajaran. Ke duanya ini di lakukan demi tercapainya kesuksesan siswa memperoleh ilmu bahasa. Penciptaan kondisi sekaligus suasana pembelajaran bahasa arab yang menyenangkan adalah salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dalam belajar bahasa khususnya bahasa arab. Model pembelajaran yang konservatif, menakutkan dan kaku perlu di jauhkan agar siswa tidak membenci materi yang diajarkan.

Pembelajaran bahasa arab agar lebih efektif dan efisien maka perlu pendekatan yang bisa menolong sekaligus memfasilitasi peserta didik untuk melihat makna di dalam bahan ajar yang mereka pelajari dengan cara

mengaitkan subyek akademik dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari yaitu dengan pendekatan Pendekatan kontekstual teaching learning (CTL).

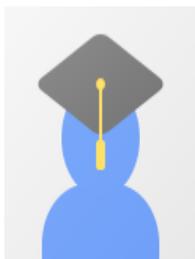
Pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan kontekstual akan lebih menarik untuk dipelajari karena isi materinya menghubungkan peserta didik dengan dunia nyata atau pengalaman masing-masing. Belajar percakapan lebih menarik jika materi yang diangkat berkaitan dengan lingkungan sekitar pembelajar bahasa itu sendiri. Siswa yang lingkungannya berada di sekitar pantai maka mereka akan lebih termotivasi untuk belajar bahasa. Pembelajaran bahasa arab dengan pendekatan CTL dapat diaplikasikan dengan menggunakan model teknik Field Study.

Daftar Pustaka

- Abd Aziz, 2010, Orientasi Sistem Pendidikan Agama di Sekolah, Yogyakarta: Teras.
- Depag RI, 2007, Al-Quran dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin. Bandung: Gema Risalah Press.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2008, Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hamalik, Oemar, 2010. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamzah, 2007, Manajemen Program Pendidikan; Untuk Kompetensi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Falah.
- Kemendiknas, 2010, Membangun Jejaring Kerja, Jakarta: Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
- Kemendiknas, 2010, Mengembangkan Daya Saing, Jakarta: Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
- Lexy J Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Manulang, 1983, Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhaimin, 2006, Manajemen Program Bahasa Arab, Malang. Materi yang disajikan pada perkuliahan Manajemen Program Bahasa Arab pada semester 2 program Magister
- Mujamil Qomar, 2007, Manajemen Pendidikan Islam, Jakarta: Erlangga
- Oey Liang Lee, Pengertian Manajemen, Yogyakarta: Balai Pustaka Administrasi (Buletin).

- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Abdul Hamid, H.M., Uril Baharuddin, H. Mustofa, Bisri. *Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi Materi, dan Media*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Oemar Hamalik, *Media Pendidikan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Hermawan, Acep. *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Darwanto, *Televisi Sebagai Media Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, *Metode Permainan Edukatif dalam belajar Bahasa Arab*, Jogjakarta: DIVA Press, 2011
- Sadiman, Arief S., R. Rahardjo, Anung Hryono, Rahardjito, *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Wahab Rosyidi, Abdul. *Media Pembelajaran Bahasa Arab*, Malang: UIN Malang Press, 2009

Biodata Penulis



Dr. Rahmat Iswanto, M.Hum, lahir di Palembang, pada tanggal 22 November 1973. Mendapatkan pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2000, S1 Ilmu Perpustakaan dan Program Pascasarjana Magister Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2002 dan 2009. Mendapatkan gelar Doktor dalam Pendidikan Bahasa Arab di UIN Maliki Malang tahun 2018.

Kariernya diawali sebagai pustakawan STAIN Curup pada tahun 2003 hingga pada tahun 2018 menjabat pustakawan muda. Pada tahun 2018 diangkat menjadi dosen Ilmu Perpustakaan pada Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam IAIN Curup sekaligus menjadi ketua program studi.

Karya-karya yang telah dihasilkan adalah berbentuk buku referensi ilmu perpustakaan berjudul “Ilmu Perpustakaan dan Informasi : Sebuah Pengantar” tahun 2019. Adapun karya ilmiah yang telah ditulis adalah:

- Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pemanfaatan Teknologi, 2017
- Peningkatan Program Studi Melalui Perencanaan Strategis dalam Pemenuhan Kebutuhan Sumber Informasi Kajian Keilmuan Sivitas Akademika (Analisis Pelaksanaan di Perpustakaan ...2017
- Prospek Pusat Informasi dan Perpustakaan dalam Perkembangan Information And Communication Technology (ICT): Tinjauan Komprehensif Nilai Filosofi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, 2018
- Kebijakan Pengembangan Koleksi dan Pemanfaatannya di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Analisis Penerapan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Utama Universitas Islam ...2017
- Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SliMS dalam Meningkatkan Kinerja Pustakawan pada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019
- Analisis Sumber Informasi Budaya Suku Rejang dalam Menciptakan Layanan Rejang Corner Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019
- Problematika Layanan Digital Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Curup dalam Meningkatkan Pemanfaatan Karya Ilmiah Institusi, 2019
- Konsep Model Formulasi Rasio Kebutuhan Bahan Perpustakaan (Analisis Kuantitatif Kebutuhan Bahan Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup Tahun 2017), 2018
- Nilai Filosofis Bangunan Perpustakaan Ditinjau dari Pemikiran Arsitektur Posmodern, 2018
- Model-Model Penelitian Untuk Perbaikan Mutu Pendidikan Bahasa Arab, 2016

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM

Ifnaldi

Pendahuluan

Proses pendidikan adalah proses yang melibatkan penggunaan berbagai sumberdaya yang cukup besar. Aktivitas pendidikan melibatkan produksi dan distribusi pengetahuan, baik itu dilakukan lewat lembaga reguler formal maupun dengan cara lain. Di sejumlah negara, seperti Amerika, pendidikan bahkan sudah menjadi salah satu industri besar. Maka pendidikan jelas mencakup aspek keuangan, pembiayaan atau pendanaan.⁴²⁷

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, makin tumbuh minat terhadap aspek-aspek ekonomi dari pendidikan. Hal itu selain karena pendidikan merupakan industri yang besar, ia juga mempekerjakan banyak tenaga kerja berketerampilan tinggi.⁴²⁸ Keterpurukan suatu bangsa yang selalu diangkat ke permukaan seringkali selalu dihubungkan dengan pendidikan. Pendidikan dinilai paling bertanggung jawab atas berbagai ketimpangan yang ada. Tentu hal ini tidak sepenuhnya benar dan salah. Pendidikan memang salah satu bidang yang strategis dalam membangun suatu bangsa. Kelalaian dan ketidakpedulian dalam membangun pendidikan akan berakibat fatal bagi output sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan. Pada hakikatnya, pendidikan selama ini tidak dipandang begitu penting, atau terpenting oleh sebagian masyarakat. Kesadaran akan nilai investasi pendidikan masih belum nampak dan terlihat. Dukungan negara dalam membangun pendidikan di Indonesia pun masih belum maksimal. Sudah ada upaya untuk memaksimalkan pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia, namun hal itu belum begitu signifikan tampak, lebih-lebih dalam bidang pembiayaan.

Semua pihak mengharapkan adanya pendidikan yang berkualitas, namun di sisi lain banyak pihak yang merasa keberatan untuk mengeluarkan dana sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Masyarakat berhujjah, pendidikan merupakan tanggung jawab Negara dan pendapat tersebut tidaklah salah juga. Kualitas pendidikan, sebagaimana negara dan masyarakat harapkan sangat ditentukan oleh tingkat pembiayaan yang dilakukan. Guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi diperlukan pembiayaan secara optimal. Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan

⁴²⁷ Cohn, Elchanan, dan Terry G. Geske. 2004. *The Economics of Education. Third Edition*. Ohio: South-western College Publishing. p. 2-7.

⁴²⁸ O'Donoghue, Martin. 2008. *Economic Dimensions in Education*. New Jersey: Transaction Publishers. p. 1.

pembangunan sistem pendidikan. Uang memang tidak segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan pembiayaan atau uang. Oleh karena itu jika performance sistem pendidikan diperbaiki, manajemen penganggarannya juga tidak mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran mesti mendukung kegiatan. Tidak semua masyarakat Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa biaya pendidikan yang cukup akan dapat mengatasi berbagai masalah pendidikan, meskipun tidak semua masalah akan dapat dipecahkan secara tuntas

Dalam berbagai tingkat kehidupan, pendidikan memiliki peran yang begitu sangat strategis. Pendidikan banyak memberikan peluang untuk meningkatkan taraf atau mutu kehidupan. Dengan pendidikan yang baik, potensi kemanusiaan yang begitu kaya pada diri seseorang dapat terus dikembangkan. Pada tingkat sosial, pendidikan dapat mengantarkan seseorang pada pencapaian tujuan yang diinginkan dan strata sosial yang lebih mapan. Secara akumulatif, pendidikan dapat membuat suatu masyarakat lebih beradab. Dengan demikian, pendidikan, dalam pengertian yang luas, berperan sangat penting dalam proses transformasi seseorang dan masyarakat. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan ini, tidak mungkin terjadi secara alamiah dalam arti tanpa suatu usaha dan pengorbanan.

Pembiayaan pendidikan (*financing of education*) merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan pendidikan di hampir semua negara di dunia. Negara-negara berkembang umumnya membelanjakan dananya untuk pendidikan relative lebih rendah dibandingkan Negara-negara maju. Rendahnya pembiayaan pendidikan di negara berkembang dibanding dengan negara maju tersebut tidak saja pada prosentasenya akan tetapi juga nominalnya. Rendahnya pembiayaan pendidikan di negara berkembang tersebut sudah menjadi wacana publik (*public discourse*) yang setiap saat selalu ingin dicarikan jalan keluar, namun karena rumitnya dan kompleksnya masalah ini menjadikan upaya penyelesaian masalah ini tidak tuntas. Untuk konteks Indonesia sebagian besar pembiayaan pendidikan disekolah-sekolah negeri lebih diarahkan untuk keperluan administrasi dan tenaga pengajar. Sedangkan untuk keperluan kegiatan operasional dan pemeliharaan masih sangat terbatas. Lebih-lebih untuk kegiatan pengembangan akademik dalam rangka mencari pola-pola pembelajaran yang lebih efektif masih belum terjangkau. Sehingga secara umum disamping telah terjadi rendahnya biaya pendidikan di semua jenjang pendidikan juga telah terjadi ketimpangan distribusi/ pengelolaan pendidikan.

Lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan. Kegiatan pendidikan sebenarnya dapat dipandang sebagai pelayanan (*services*) terhadap siswa atau peserta didik selama ia belajar. Lembaga pendidikan sebagai sarana penting pembentuk manusia di masa depan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari unsur pembiayaan. Masing-masing Negara mempunyai perspektif yang berbeda terhadap fungsi lembaga pendidikan. Konsekuensinya pengalokasian anggaran pendidikan juga berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kesadaran pejabat Negara atas kepentingan lembaga pendidikan, semakin tinggi penetapan anggaran pendidikan dalam kebijakannya, demikian sebaliknya, kesadaran pejabat negara terhadap kepentingan pendidikan mempunyai hubungan positif dengan besaran anggaran dunia pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari pembiayaan pemerintah dan dari pembiayaan masyarakat. Pihak pemerintah pun dapat dikelompokkan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun dari kalangan masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat umum dan orang tua siswa. Mengingat adanya berbagai pihak yang harus terlibat dalam hal penyandang dana pendidikan, maka perlu dicermati unsur kejelasan/ketajaman (*acuity*) dalam pendistribusiannya.

Jika kita hendak membahas aspek ekonomi atau pembiayaan dari suatu industri –dan sektor pendidikan bukanlah suatu kekecualian mau tak mau kita juga harus berurusan dengan masalah efektivitas dan efisiensi. Masalah efisiensi ini agak rumit karena karakteristik khusus yang terkait dengan hasil (*output*) pendidikan.⁴²⁹ Pendidikan dalam operasionalnya jelas tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Namun, biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat.

Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orangtua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya bukanlah uang untuk konsumsi semata-mata, tetapi harus dipandang sebagai investasi pada periode tertentu. Investasi ini di masa mendatang harus dapat menghasilkan keuntungan (*benefit*) atau manfaat, baik dalam bentuk uang (finansial) maupun nonfinansial.⁴³⁰ Investasi

⁴²⁹ *Ibid*, p. 148.

⁴³⁰ Fattah, Nanang. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. P. 6-7.

sumberdaya manusia ini penting karena adanya kaitan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

Di dunia Islam, khususnya pada zaman klasik (abad ke-7 hingga 13 M), kesadaran untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan sesungguhnya sudah pula terjadi. Namun berbeda motif dan tujuannya dengan motif dan tujuan yang dilakukan negara-negara maju sebagaimana tersebut di atas. Di zaman klasik atau kejayaan Islam, motif dan tujuan pengeluaran biaya pendidikan yang besar bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat material atau komersial, melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia, dengan cara memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradabannya.⁴³¹

Pengertian Pembiayaan Pendidikan Islam

Biaya menurut Usri dan Hammer adalah sebagai *cost as an exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit*.⁴³² Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa.

Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang.⁴³³

Dari beberapa pengertian biaya di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah jumlah uang atau jasa yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk melaksanakan berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan insrumental (*instrumen input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan.

Apabila dikontekskan dalam pendidikan, lembaga pendidikan sebagai lembaga non profit yang bergerak di bidang jasa, maka faktor-faktor yang menjadi pemicu biaya di antaranya jumlah jam mengajar guru, media pengajaran, buku teks yang digunakan, fasilitas pendukung yang sifatnya temporer. Program-program pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah yang secara akumulatif dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan lulusan serta dapat juga dijadikan sebagai pemicu biaya di dalam pendidikan.

⁴³¹ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010

⁴³² Baharuddin dan M. Makin. 2010. *Manajemen Pendidikan Islam*. UIN Malang, Maliki Press

⁴³³ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, 2014. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Dalam teori dan praktek pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan. Pertama, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*Indirec cost*). Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi disekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*opprotunity cost*).

Kedua, biaya pribadi (*Private cost*) dan biaya sosial (*social cost*). Adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya social adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan. Baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan pendidikan pada dasarnya termasuk biaya sosial. Ketiga, biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-Monetary cost*).

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat.

Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan dan sebagainya.

Jadi dapat diartikan bahwa pembiayaan pendidikan Islam adalah merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana yang diterima dan bagaimana cara penggunaan dana untuk kemaslahatan sekolah agar tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Baharuddin dan Moh. Makin juga memberikan pernyataan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan Islam merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah/madrasah untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan.⁴³⁴

⁴³⁴ Baharuddin dan M. Makin. 2010. Manajemen Pendidikan Islam. UIN Malang, Maliki Press

Satu hal yang perlu disadari bersama bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kunci sukses penyelenggaraan pendidikan yang pada gilirannya akan memiliki dampak terhadap negara atau daerah otonom tertentu.

Sejarah Pembiayaan Pendidikan Islam Nusantara pada Masa Kerajaan Islam

1. Pembiayaan Pendidikan Islam pada Masa Pra-Kemerdekaan.

Pendidikan Islam telah mulai berlangsung di Indonesia sejak masuknya para pedagang muslim ke negeri ini pada abad VII M. Mula-mula pendidikan agama hanya berlangsung antara individu dengan individu lainnya. Materi yang diajarkan pun hanya berkisar pada prasyarat seseorang menjadi muslim. Proses pendidikan Islam kemudian berkembang ke arah kolektif ketika sudah memberi pengaruh yang signifikan di masyarakat Indonesia.

Pengaruh pendidikan agama yang dilaksanakan oleh para dai muslim menemukan hasilnya ketika pada abad X berdiri kerajaan Islam pertama di Aceh yang bernama Pase atau kerajaan samudra (kerajaan ini juga dikenal dengan samudera pasai). Di kerajaan ini dilangsungkan pendidikan agama dengan menggunakan bahasa Arab sebagai pengantarnya.

Hal ini sesuai dengan laporan Ibnu Batutah dalam bukunya Rihlah Ibnu Batutah bahwa ketika ia berkunjung ke samudra pasai pada tahun 1354 ia mengikuti raja mengadakan halaqah setelah shalat jumat sampai waktu asar. Dari keterangan itu diduga kerajaan samudra pasai ketika itu sudah merupakan pusat agama Islam dan tempat berkumpul ulama dari berbagai negara Islam untuk berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan keduniawian sekaligus.

Zuhairi dkk. melihat bahwa pendidikan agama semi formal pertama yang berlangsung di Indonesia adalah majlis ilmu yang berlangsung di kerajaan samudera pasai. Sistem pendidikan agama yang berlangsung di kerajaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat ialah fiqh Madzhab Syafi'i.
- b. Sistem pendidikannya secara nonformal berupa majlis taklim dan halaqah.
- c. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh ulama.
- d. Biaya pendidikan agama bersumber dari negara.

Jadi, pada masa kerajaan Islam Pasai ini, pendidikan agama dilangsungkan oleh kerajaan dan dibiayai oleh kerajaan itu sendiri. Bahkan,

setelah berdirinya Kerajaan Perlak pendidikan agama berkembang sangat baik. Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin, Raja keenam Perlak, mendirikan perguruan tinggi Islam yang diperuntukkan bagi siswa yang telah alim. Dengan dukungan pendanaan dari kerajaan, perguruan ini dapat mengajarkan dan membacakan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi seperti Kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i dan sebagainya.

Berawal dari Aceh, Pendidikan Islam terus berkembang ke penjuru nusantara. Di Jawa, misi ini diusung oleh Sunan Giri menitikberatkan kegiatannya pada bidang pendidikan. Dalam hal kurikulumnya ia mengadakan kontak dengan kerajaan Pase yang bermadzhab Syafi'i.

Pendidikan Islam selanjutnya berkembang dari majlis taklim di kerajaan terus berkembang ke surau-surau dan masjid. Di Sumatera Barat surau-surau berkembang menjadi tempat pengajian untuk pemuda-pemuda muslim. Salah satunya surau besar yang mirip konsep pesantren muncul di Batuhampar Payakumbuh yang didirikan oleh Syaikh Abdurrahman pada tahun 1777.⁴³⁵

Kompleks ini kemudian dikenal sebagai "Kampung Dagang". Kampung Dagang dibangun dengan sarana dan fasilitas penunjang yang cukup lengkap. Di dalam kawasan yang luasnya sekitar 3 hektare ini ada sebuah pasar kecil, di mana terdapat beberapa kedai tempat menjual berbagai kebutuhan murid sehari-hari. Jumlah orang siak (santri) yang belajar di Kampung Dagang ini berkisar antara 1000 sampai 2000 orang.

Untuk mengikuti pelajaran di surau santri tidak dikenakan pungutan atau pembayaran apapun, tidak dikenakan uang sekolah, uang asrama atau uang makan. Jarang sekali santri memberikan uang kepada syaikh. Kalaupun ada, di samping oleh keluarga yang bersangkutan, diberikan atas dasar kerelaan dan keikhlasan.

Biaya hidup dari santri berasal dari orang kampung yang berdekatan dengan surau, biasanya dijemput sendiri atau diantarkan oleh orang tua mereka. dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup santri, masyarakat kota yang berdekatan, seperti payakumbuh, juga tidak kurang pula partisipasinya. Setiap hari minggu mereka mengantarkan beras, sayur dan kebutuhan pokok lainnya ke surau dengan pedati. Sedangkan santri yang datang dari negeri yang jauh, biasanya tiap hari kamis menyebar ke negeri-negeri sekitar Batuhampar dengan membawa buntil (tempat beras seperti kantong terigu) dan sore harinya kembali dengan membawa buntilan beras dan uang untuk biaya seminggu.

⁴³⁵ ibid

2. Pembiayaan Pendidikan Islam pada Masa Pasca-Kemerdekaan

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa sebagai lembaga pendidikan tertua di Jawa pesantren telah berupaya memperbaharui sistem pendidikannya. Pada masa ini telah muncul pesantren-pesantren yang berupaya mengadaptasi perubahan sistem pendidikan konvensional. Sedikitnya terdapat dua cara yang dilakukan pesantren dalam merespon perubahan ini : Pertama, merevisi kurikulumnya dengan memasukkan sebagian mata pelajaran dan keterampilan umum. Kedua, membuka kelembangan dan fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum.

Dengan kedua cara tersebut maka persentuhan antara sistem pesantren dengan sistem madrasah sudah sangat terasa. Untuk itu, setidaknya pada masa ini muncul empat tipe pondok pesantren di Nusantara:

- a. Ponpes tipe A adalah pondok yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional;
- b. Ponpes tipe B adalah pondok yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madrasi);
- c. Ponpes tipe C adalah pondok yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar di luar;
- d. Ponpes tipe D adalah pondok yang menyelenggarakan sistem ponpes sekaligus sistem sekolah dan madrasah.

Namun dari segi manajemen pembiayaan belum muncul konsep yang baru dari beberapa tipe pesantren yang muncul. Meski kemandirian telah menjadi pola hidup pesantren, tetapi pada umumnya pembiayaan pesantren masih bergantung pada usaha yang dilakukan oleh kyai dan sumbangan pihak luar. Rata-rata pesantren tidak memiliki usaha yang dapat menjamin keberlangsungan pesantren.

Hal ini tentu bukan realitas yang menggembirakan, mengingat usaha yang dilakukan kyai secara individu tidak berjalan selamanya. Di samping itu, pada dasarnya setiap lembaga pendidikan membutuhkan penopang dana abadi demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan pesantren di masa yang akan datang.

Hingga muncul harapan baru dari beberapa pengasuh pesantren yang mencoba mengggagas alternatif sumber pendanaan lembaga pendidikannya. Di antaranya adalah dilakukan oleh Pesantren Pertanian Darul Falah Bogor, Pesantren Al Zaitun, Pesantren Gontor dan lain-lain.

Sebagai gambaran, akan diuraikan salah satu gagasan dari konsep pembiayaan berbasis wakaf yang ditawarkan oleh pesantren Gontor. Meniru apa yang dilakukan oleh pengelola al-Azhar di Mesir dan Aligarh di India yang terjamin kelangsungan lembaganya karena kekayaan wakaf yang di miliki, maka

di pesantren ini juga berupaya mengelola perekonomiannya dengan basis wakaf. Untuk itu, pesantren ini memulai pewakafan pondok pada tanggal 28 Rabiul Awwal 1378/12 Oktober 1958. Pewakafan dilakukan oleh pendiri pesantren Gontor kepada Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor yang diwakili oleh 15 orang yang dipercaya sebagai nadhir. Para nadhir yang berjumlah 15 orang tersebut kemudian dilembagakan menjadi Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor.

Badan Wakaf Gontor kemudian menjadi badan tertinggi yang membawahi beberapa lembaga di pesantren tersebut. Demi menjaga dan mengembangkan harta wakaf yang dimiliki maka Badan Wakaf Gontor membentuk Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) yang merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab besar dalam mengatur jalur perekonomian, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga dapat menjadi sumber dana yang halal serta dapat menjamin kemandirian Pondok. Lembaga ini berada di bawah kendali langsung badan tertinggi pondok, yaitu Badan Wakaf Pesantren Gontor.

Problem Pembiayaan Pendidikan Islam dan Solusinya.

Pada umumnya, masalah yang dihadapi madrasah, dalam hal ini sekolah yang berbasiskan agama, adalah persoalan pembiayaan pendidikan. Apabila dilihat dari aspek penyebabnya, hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan tahun 2006 tentang pembiayaan pendidikan di madrasah menyebutkan bahwa kesulitan yang dihadapi madrasah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan ternyata berawal dari persoalan penggalan dana itu sendiri.

Kendala utamanya adalah karena terbatasnya sumber dana yang dapat digali. Selama ini sumber dana utama operasional madrasah, rata-rata diperoleh dari iuran SPP siswa. Sumber dana ini merupakan sumber dana tetap, meskipun secara nominal sebenarnya jumlah dana yang dapat dikumpulkan tidak seberapa, mengingat kebanyakan madrasah berada di pinggiran kota/pedesaan dan melayani pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tingkat ekonomi kurang mampu; seperti petani, buruh, dan pegawai rendah lainnya.

Pendeknya, madrasah memperoleh pemasukan dari komponen SPP dalam jumlah yang tidak besar karena madrasah sendiri harus menetapkan besaran biaya SPP yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di mana ia berada. Namun hal ini sudah mengalami perubahan seiring dengan kebijakan

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada seluruh Sekolah Dasar dan Menengah. Namun hal ini tetap saja tidak bisa menutup pembiayaan pendidikan yang diperlukan. Sumber dana lainnya adalah bantuan yang diberikan masyarakat berupa zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Sumber dana ini terbilang tidak tetap. Selain itu, jumlah dan keberadaannya tidak dapat dipastikan. Ini dapat dimengerti, mengingat masalah pengelolaan zakat dan peruntukannya sendiri. Bantuan lain yang bersifat insidental adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana halnya dengan ZIS, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, selain lebih bersifat insidental dan tidak menyeluruh, juga tidak seluruh madrasah memperolehnya. Dalam hal ini, faktor kedekatan unsur penyelenggara madrasah dengan pihak pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap kelancaran bantuan tersebut. Adapun madrasah yang tidak memiliki akses kepada pihak-pihak tertentu sangat sulit mendapatkannya.

Di sisi lain, persoalan SDM yang bisa dikatakan belum memadai, selain keterbatasan pengetahuan mengenai sirkulasi dan pengaturan mengenai anggaran dalam pembiayaan, merupakan suatu kekurangan yang menyebabkan tidak adanya analisis yang panjang mengenai, bagaimana, mengapa, dan seperti apa pembiayaan itu dilakukan. Masalah lain yang biasanya muncul ialah daya dukung masyarakat sekitar yang rendah. Padahal, hal ini sangat penting mengingat masyarakat sebagai partisipan dan pendorong ke arah suksesi program lembaga pendidikan. Keberadaannya sangat penting guna menunjang pembiayaan pendidikan. Kenapa hal ini terjadi? Karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penganggaran, sehingga tingkat perhatian mereka terhadap lembaga berhenti pada wilayah *memasrabkan* anak didiknya saja. Selanjutnya untuk solusi Perbaikan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam adalah menelaah problem yang cukup dilematis di atas, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam pemecahannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, persoalan pembiayaan adalah hal yang sangat sensitif keberadaannya. Hal ini karena bisa membawa kemajuan lembaga jika dikelola dengan baik, sebaliknya akan membawa lembaga menjadi terpuruk, apabila komponen/pihak di lembaga tidak mengelola secara profesional, tidak berprinsip pada keterbukaan, tidak berorientasi pada perbaikan, kepentingan yang sifatnya personal untuk membangun lembaga sehingga mencari peluang hanya untuk

personal dirinya. Oleh karena itu, seluruh komponen yang ada dalam lembaga pendidikan, kaitannya dengan proses penyusunan pembiayaan pendidikan, harus dilibatkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan, kebersamaan, serta bertanggung jawab atas amanah kelembagaan yang harus dipikul bersama. Baik dan buruknya lembaga menjadi akuntabilitas bersama.

Kedua, terkait dengan penempatan alokasi dana, pihak di dalamnya diupayakan mampu menyusun dan mengelola dengan baik, berapa anggaran yang ada, bagaimana anggaran itu dibelanjakan atau dialokasikan, serta bagaimana sistem pelaporannya. Apabila komponen di dalamnya ada yang kurang mengerti, perlu dilakukan Diklat tentang bagaimana menyusun anggaran yang baik. Bisa dengan pelatihan penyusunan anggaran atau hal lain yang sejenis.

Ketiga, kepala sekolah sebagai motor penggerak, diharapkan mempunyai keterampilan *entrepreneurship* (keterampilan kewirausahaan) dan kemampuan manajerial serta supervisian. *Keempat*, madrasah hendaknya melibatkan masyarakat dalam penganggaran pembiayaan pendidikan, melalui rapat rutin ataupun bisa diselipkan pada rapat musyawarah kenaikan sekolah/kelulusan. Hal demikian dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan. *Kelima*, lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah, sebagai lembaga yang berbasiskan agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur, diharapkan memegang teguh prinsip keadilan, prinsip amanah, kejujuran, musyawarah, keterbukaan, kedisiplinan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh seluruh elemen lembaga. Dengan demikian, diharapkan ada solusi manajemen pembiayaan pendidikan Islam, sehingga akan terbentuk suatu lembaga pendidikan Islam yang baik, khususnya dalam persoalan pembiayaan pendidikannya

Dasar dan Sumber Biaya Pendidikan Islam

Sumber dana dapat diperoleh melalui :

1. Wakaf

Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah. Orang

muslim yang memiliki harta banyak, akan mewakafkan hartanya untuk keperluan pendidikan seperti di Ponpes Gontor. Awalnya dulu Gontor berdiri di Ponorogo, namun sekarang Ponpes Gontor sudah memiliki 15 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendiri Ponpes Gontor terdiri dari 3 orang ulama yang bekajar pendidikan di Perguruan Thawalib Padang Panjang dan kembali dari pendidikan di Sumater Barat tersebut kemudian mewakafkan tanahnya untuk membangun Ponpes Gontor di Jawa Timur hingga kini berkembang pesat dari wakaf-wakaf para ulama.

2. Zakat

Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam. Zakat dari para wali santri juga bisa membantu pembiayaan pendidikan.

3. *Shodaqoh*

Shodaqoh atau disebut juga *shodaqoh sunnah*, merupakan anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu. Dari penjelasan di atas maka sedekah pula dapat dijadikan sumber pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.

4. Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan dan ilmiah. Melihat pengertian hibbah, jelas bahwa hibbah ini termasuk salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan.⁴³⁶ Hibah bisa juga disebut dana bantuan untuk pendidikan.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan dalam Islam

Terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pegangan dalam pengelolaan dana pendidikan dalam Islam. Prinsip ini sebagai berikut :

- Prinsip keikhlasan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf sebagaimana tersebut di atas.
- Prinsip tanggung jawab kepada Tuhan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari para wali murid. Mereka mengeluarkan dana atas

⁴³⁶ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal.293-298

dasar kewajiban mendidik anak yang diperintahkan oleh Tuhan, dengan cara membiayai pendidikan anak tersebut.

- Prinsip suka rela. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari bantuan hibah perorangan yang tergolong mampu dan menyukai kemajuan Islam.
- Prinsip halal. Prinsip ini terlihat pada seluruh dana yang digunakan untuk pendidikan yang berasal dari dana yang halal dan sah menurut hukum Islam.
- Prinsip kecukupan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dari kas negara.
- Prinsip berkelanjutan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf yang menegaskan bahwa sumber (pokok) dana tersebut tidak boleh hilang atau dialihkan kepada orang lain, yang menyebabkan hilangnya hasil dari dana pokok tersebut.
- Prinsip keseimbangan dan proporsional. Prinsip ini antara lain terlihat dari pengalokasian dana untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, seperti dana untuk membangun infrastruktur, sarana prasarana, peralatan belajar mengajar, gaji guru, beasiswa para pelajar dan sebagainya.⁴³⁷

Sumber Dana Lainnya yang Halal dan Tidak Mengikat

Bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti pesantren dan madrasah selain sumber diatas bisa pula memperoleh dana yang berasal dari sumber lainnya baik sumber intern maupun sumber ekstern. Sumber Dana Intern
Sumber dana lembaga pendidikan Islam dapat diperoleh dari :

- Membentuk Badan Usaha atau Koperasi
- Upaya lain yang dapat menjadi sumber dana bagi lembaga pendidikan Islam ialah adanya Badan Usaha dalam bentuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Koperasi dan BMT (Baitulmal Watamwil). Badan Usaha tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dimana lembaga Pendidikan itu berada.
- Membentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf.
- Membentuk Badan Kerjasama antara Lembaga Pendidikan Islam/Yayasan dengan Orangtua Murid.

⁴³⁷ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010

Sumber Dana Ekstern. Sumber Dana Ekstern dapat diusahakan dengan cara : Membentuk donatur tetap. Mengupayakan bantuan Pemerintah. Bantuan luar negeri⁴³⁸

Pendapatan Guru Madrasah dan Ulama yang Mengajar di Masjid

Suatu hal yang perlu didasari bahwa pengajar di masjid adalah ulama-ulama yang sudah terkenal keilmuan mereka serta sudah teruji dihadapan syeikh dan termasyhur kesalihannya di tengah-tengah masyarakat. Adapun sumber-sumber penghasilan mereka bermacam-macam dan sangat tergantung pada pribadi ulama itu sendiri. Sumber-sumber tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Kekayaan sendiri Hasil karya tulis Sumbangan dan hadiah dermawan.⁴³⁹

Mengukur Biaya Pendidikan

Konsep biaya pendidikan bersifat lebih rumit dari sekadar keuntungan (profit), karena komponen biaya terdiri dari lembaga, jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan ini sering disebut *income forgone*, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi.⁴⁴⁰ Misalnya, seorang lulusan Madrasah Tsanawiyah yang tidak diterima untuk melanjutkan studi ke Madrasah Alyah. Jika ia lantas bekerja selama 3 tahun, tentu ia akan memperoleh penghasilan (upah/gaji). Tetapi jika ia diterima di SMU dan menjalani studi di MA selama 3 tahun, tentu ia tidak bekerja selama waktu itu dan kehilangan peluang mendapatkan upah selama 3 tahun tersebut. Maka biaya keseluruhan (C) selama siswa itu belajar di MA terdiri dari biaya langsung (D) dan biaya tidak langsung (K) atau pendapatan lulusan M.T's.

$$C = D + K$$

C = biaya pendidikan.

D = biaya langsung dibayarkan untuk bersekolah di MA.

K = jumlah rata-rata penghasilan tamatan M.T's

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberi gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam

⁴³⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal.293-298

⁴³⁹ Usman Husein, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press, 2008), hal. 81-83

⁴⁴⁰ *Ibid*, p. 25-26.

pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (*output*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan (*unit cost*) per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah (*enrollment*) dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan, hal ini berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi maka pendidikan yang berkualitas hanya akan ada dalam angan-angan. Menurut Mulyono (2010), “Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien.”⁴⁴¹

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pada Bab V Pasal 50 peraturan pemerintah itu dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Penjelasannya sebagai berikut:

- Prinsip keadilan yang dimaksud berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- Prinsip kecukupan berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- Sedangkan prinsip keberlanjutan berarti pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.⁴⁴²

Sedangkan dalam pasal 51 mengatakan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari: pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dari gambar bagan di atas dapat dijelaskan bahwa setiap sumber pembiayaan tersebut dapat diterapkan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi

⁴⁴¹ Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, p.78

⁴⁴² *Ibid*, p. 261.

pembiayaan berdasarkan sumber-sumber dana ini merupakan alternatif dari strategi pembiayaan yang berbasis sekolah (*school based management*).

Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan

1) Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebenarnya efektivitas tidak hanya berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada hasil kualitatif yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga.

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas, kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, dan hasil kualitatif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2) Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

- a) Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat di jelaska melalui hubungan antara penggunaan waktu, biaya dan hasil yang diharapkan yang dapat dilihat pada gambar berikut
- b) Kegiatan juga dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya.⁴⁴³

Dalam biaya pendidikan, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar siswa.

Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan, biasanya digunakan metode analisis keefektivan biaya (*cost effectiveness method*) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar.

⁴⁴³ Siti Minarti, 2011, *Manajemen Sekolah*, Jakarta:Ar-Ruzz Media,p.227

Kesimpulan

1. Pendidikan Islam memiliki aspek ekonomi dan moneter, khususnya yang menyangkut masalah anggaran dan pembiayaan. Dalam kaitan pembiayaan ini tentu juga terdapat aspek efektivitas dan efisiensi.
2. Masalah efisiensi ini agak rumit karena karakteristik khusus dunia pendidikan. Selain karena output pendidikan tidak bisa diukur secara sederhana seperti industri biasa, biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat.
3. Biaya dalam pendidikan Islam meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.
4. Pembiayaan pendidikan Islam pada dasarnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien.
5. Sumber pendanaan pendidikan di Indonesia ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
6. Di Indonesia tidak ada aturan baku model pembiayaan pendidikan yang digunakan. Tetapi, pembiayaan yang ada lebih menunjukkan bauran pembiayaan pendidikan, meliputi pembiayaan oleh pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), masyarakat, dan sebagian investor.
7. Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan, biasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya (*cost effectiveness method*) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar.

Daftar Pustaka

- Akadon, Dedy Achmad Kurniady dan Deni Darmawan, 2015. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya
- Abuddin Nata, 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana
- Baharuddin dan M. Makin. 2010. *Manajemen Pendidikan Islam*. UIN Malang, Maliki Press
- Cohn, Elchanan, dan Terry G. Geske. 2004. *The Economics of Education. Third Edition*. Ohio: South-western College Publishing.
- Fattah, Nanang. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Minarti, Siti. 2011. *Manajemen Sekolah*. Jakarta: Ar-Ruzz Media
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- O'Donoghue, Martin. 2008. *Economic Dimensions in Education*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 2002. Jakarta: Kalam Mulia
- Usman Husein, *Sejarah Pendidikan Islam*, 2008. Yogyakarta: Ar-Raniry Press

Biodata Penulis



Dr. H. Ifnaldi Nurmal, M.Pd lahir di Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat anak ke 2 pasangan dari Nurmal (alm) dan Darwinis sampai saat ini masih tinggal di Jorong Tanjung Tengah Tanjung Bonai Lintau Buo lahir pada tanggal 27 Juni 1965. Menikah pada tahun 1995 dengan Dr. Hj Jumira Warlizasusi, M. Pd dikaruniai tiga orang anak: Farhan

Fadhillah (mhs. Kedokteran Gigi Baiturrahmah Padang), Fathur Rizki (mhs. Prodi Political Science International, Istanbul Zaim University Turkey), Fayza Zahira Ikhwanina (santri MAN IC Bengkulu Tengah). Riwayat Pendidikan: SD Negeri 01 Tanjung Bonai lulus tahun 1977, SMP Negeri 01 Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar lulus tahun 1981, SMA Negeri Lintau lulus tahun 1984, Pendidikan , S1 di Universitas Bang Hatta Padang Fakultas Sastra Jurusan sastra Indonesia lulus tahun 1990, S2 Universitas Negeri Padang prodi Manajemen Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Bahasa lulus tahun 1999, sedangkan S3 di Universitas Negeri Jakarta Prodi Pendidikan Bahasa lulus tahun 2012. Riwayat Pekerjaan: (1) Dosen Yayasan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPM Bangko Provinsi Jambi dari tahun 1992-1998; (2) Dosen luar biasa di Akademi Perhotelan Padang tahun 1996-1998; (3) dosen luar biasa di STKIP PGRI Padang 1997-1998; (4) Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 1998-2000; (5) Dosen luar biasa di Univeritas Persada Nusantara Jakarta. Tahun 2008-2010; (6) Dosen luar biasa di Universitas Bina Nusantara Jakarta tahun 2009-2010; (7) Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2000 sampai sekarang. (8) sebagai Tutor di UT dari tahun 2010 – sampai sekarang. Jabatan yang pernah diduduki: (1) Sebagai Ketua Jurusan Bahasa dan Seni STKIP YPM Bangko Jambi tahun 1998- 2000; (2) Staf perpustakaan STAIN Curup tahun 2000-2002; (3) Staf P3M Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2003-2004; (4) Sekretaris P3M STAIN Curup tahun 2004-2007; (5) Direktur Pascasarjana STAIN Curup 2014-2018; (6) Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup 2019 sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya.
- Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fiqh al-Hadis* (Banda Aceh: Citra Karya, 2002), 11.
- Kartadinata. S (2015) *a Pengembangan Pedagogik Dari Perspektif Pendidikan Dan Pendidikan Guru Abad 21*. Seminar Internasional Pedagogik Ke 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kerjasama Komunitas Pendidik Serantau. Bandung, 15-17 September 2015. Universitas Pendidikan Indonesia
- Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat 2
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal.293-298
- “Wajah Multikulturalisme Pesantren | NU Online,” accessed August 11, 2016, <http://www.nu.or.id/post/read/27538/wajah-multikulturalisme-pesantren>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendiknas No. 27 tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
- Abdal-Ghafar Ḥamid Hilāl, *Atṭawarūḥ Lughah al-Arabiyah*, 157.
- Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama; Kepribadian Muslim Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), cet. Ke V, hal. 210-211
- Abdul Fatah Idris, *Hadis-badis Prediktif dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)* (Semarang: Putaka Rizki Putra, 2012), 249.
- Abdul Rahman bin Abu Bakar Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadba'ir fi Qawaid Fiqhiyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010)
- Abdullah Aly, “Model Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta,” *Jurnal Varia Pendidikan* 24, no. 1 (2012): hlm. 28.
- Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 9.

Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan Individu Masyarakat dan Pendidikan*, op cit., hal. 101

Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Pendidikan Nondikotomik*, Yogyakarta : Gama Media, 2002, Hal. 65.

Abraham H. Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Carl Rogers menulis buku pertamanya, *Counseling and Psychotherapy* dan secara bertahap mengembangkan konsep Client-Centered Therapy. Arthur Combs (1912-1999) bersama dengan Donald Snygg (1904-1967) mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Aldous Huxley (Roberts, 1975) menekankan adanya pendidikan non-verbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. David Mills dan Stanley Scher (Roberts, 1975) mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar.

Abu Daud al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Kitab al-Nikah, Bab al-wali fi al-nikah, no.hadis 2083

Abu Su'ud, *Islamologi Sejarah, Ajaran dan peranannya dalam peradaban umat manusia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 201 – 206.

Abuddin Nata, dkk., *Integrasi Ilmu Agama & Ilmu Umum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 11

Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 19

Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010

Achmad Reza Hutama Al-Faruqi, "Konsep Ilmu Dalam Islam," *Kalimah* 13, No. 2 (2015): 225.

Achmad Zainal Arifin, *Membela yang Lemah Menggali Ide Pluralisme Gusdur dalam Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion...*h. 6

Achmadi, *Islam paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta : Aditya Media, 1992, Hal. 16.

Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability* (Colorado: Westview Press, 2000), hlm. 98.

Ade Irma Sakina, Desy Hasanah Siti A. (2017). *"Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia"*. *Share: Social Work Journal*. 7 (1): h. 72

Adib Rubiyad. Dkk. *Islam dan Pluralisme*. Cirebon : Sekolah Tinggi Islam Negeri, 2009 Hal. 3

Agustin, A. A. (2018). *Perdamaian Sebagai Perwujudan Dalam Dialog Antar Agama*. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(2), 17-34.

Aḥmad al-Iskandarī dan Mustāfa ‘Ananī, *al-Waṣīṭ fi al-Adab al-Arabī wa Tarīkibihi* (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1916), 5.

Ahmad Hasan, *The Sunnah-its Early Concept and Development*, Journal Islamic Studies, Vol.7. No. 1, 50. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad.<http://www.jstor.org/stable/20832904>. (Accessed 27/01/2014).

Aḥmad Ḥashimi, *Jawābir al-Balaghah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 290.

Ahmad Muawwal Hasan, *Pernikahan Anak di Yaman : Atas nama Tradisi, Kemiskinan dan Perang*,

Ainurrofiq Dawam, *Pendidikan Multikultural*, 1st ed. (Yogyakarta: Inspeal Penerbit, 2006), hlm. 75-76.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC. Edisi kedua.

Ali Anwar Yusuf dan Tono, *Rangkuman Ilmu Perbandingan Agama dan Filsafat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 50

Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme; Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), 203

Alimin Z, “Memahami Pendidikan Inklusif dan ABK”, dalam *Makalah*, tidak diterbitkan, (Bandung: Jurusan PLB FIP UPI, 2005), hlm. 1

Al-Syarakhsyi Muhammad bin Ahmad , Al-Mabsut, Bab Nikah al-shaghir wa al-Shaghirah, jilid 5 hlm. 491.

Amitav Acharya, *Indonesia Matters: Asia’s Emerging Democratic Power* (New Jersey: World Scientific Publishing, 2014), hlm. 19.

Arditama, A., Wardani, S., & Purwanti, E. (2018). *Storybook Influence on Science Concept Comprehension Through Curiosity of Fifth Grade Elementary School Student. Journal of Primary Education*, 7(1), 1-9. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpc/article/view/21050>.

Arnaldo Pellini. 2016. **Indonesia’s PISA results show need to use education resources more efficiently**. Research Fellow, Overseas Development Institute.

Azhar, A. (2018). Efektivitas Komunikasi Antarbudaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga di Wilayah KUA Lhoksukon. *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya*, 9(1), 69-80.

Azyumardi Azra, “Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in The Modernization of Muslim Society,” *Heritage of Nusantra: International Journal of Religious Literature and Heritage* 4, no. 01 June (2015): hlm. 86.

Azyumardi Azra, dalam pengantar Zakiyuddin Baydhowi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta : Erlangga, h. vii

Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 19.

Baharuddin dan M. Makin. 2010. *Manajemen Pendidikan Islam*. UIN Malang, Maliki Press

Baharuddin dan M. Makin. 2010. *Manajemen Pendidikan Islam*. UIN Malang, Maliki Press

Banks, James, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, And Practice, Review of Research in Education*, 1993.

Bergin, D. A. (1999). Influences on classroom interest. *Educational Psychologist*, 34(2), 87–98.

Berlyne, D. E. (1960). *Conflict, arousal and curiosity*. New York, NY: McGraw-Hill.

Berlyne, D. E. (1960). *Conflict, arousal, and curiosity*. New York: McGraw-Hill.

Berlyne, D. E. (1967). Arousal and reinforcement. In D. Levine (Ed.), *Nebraska symposium on motivation* (pp. 1–110). Lincoln: University of Nebraska Press.

Berlyne, D. E. (1971). *Aesthetics and psychobiology*. New York: Appleton-Century-Crofts.

Beswick, D. G. (1971). Cognitive process theory of individual differences in curiosity. In H. I. Day, D. E. Berlyne, & D. E. Hunt (Eds.), *Intrinsic motivation: A new direction in education* (pp. 156–170). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Boyle, G. J. (1989). Breadth-depth or state-trait curiosity? A factor analysis of state-trait curiosity and state anxiety scales. *Personality and Individual Differences*, 10, 175–183.

Bressler, Charles E. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice* 4th-ed. Pearson Education, Inc. 2007

Buchari M, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 8-9.

Buchari M, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik*, 10.

Choirul Mafudz, 2011, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V., h. 8

Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 13.

Christopher Peterson Martin E. P. Seligman. 2004. *Character Strengths And Virtues*. American Psychological Association. .Oxford University Press, Inc

Christopher Peterson Martin E. P. Seligman. 2004. *Character Strengths And Virtues*. American Psychological Association. .Oxford University Press, Inc

Cohn, Elchanan, dan Terry G. Geske. 2004. *The Economics of Education. Third Edition*. Ohio: South-western College Publishing. p. 2-7.

Corliss Lamont, *The Philosophy of Humanism*, 1977, Hal. 116. Csikszentmihályi, M. (1988), "The flow experience and its significance for human psychology", in Csikszentmihályi, M., [*Optimal experience: psychological studies of flow in consciousness*](#), Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 15–35, ISBN 978-0-521-43809-477

Csikszentmihályi, Mihály (1990), *Flow: The Psychology Of Optimal Experience*, New York: Harper And Row, Isbn 0-06-092043-2

Dakhi Saniago (2016) *Curious Students' Learning and Simple Sentence Construction: Responses to Negative Teaching Attitude Performed by English Teacher in South Nias, North Sumatera, Indonesia*. Conference Paper (PDF Available) · December 2016 with 231 Reads Conference: Proceeding of EED Collegiate Forum, 2016, At Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 65

Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan, op cit.*, hal. 69

Daniel Djuned, *Paradigam Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fiqh al-Hadis* (Banda Aceh: Citra Karya, 2002), 21.

Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis*, 19.

Daniel L. Pals. *Seven Theories of Religion*. (Yogyakarta : IRCiSoD, 2012). Hal: 341.

Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern* (Bandung: Mizan, 1996), 15.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268

Departemen Pendidikan Nasional, *Identifikasi ABK Dalam Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007), hlm. 43

Depue, R. A. (1996). A neurobiological framework for the structure of personality and emotion: Implications for personality disorders. In J. F. Clarkin & M. F. Lenzenweger (Eds.), *Major theories of personality disorder* (pp. 347–390). New York: Guilford.

Dikutip dari www.jjnet.com/archives/documents/humanist.htm, Senin, 27 November 2006 jam 10.00.

Durik, A. M., & Harackiewicz, J. M. (2007). Different strokes for different folks: How individual interest moderates the effects of situational factors on task interest. *Journal of Educational Psychology*, 99(3), 597–610.

Encarta, World English Dictionary, 1999, Microsoft Corporation Developed for Microsoft by Bloomsbury Publishing.

Engel, S. (2011). Children’s need to know: Curiosity in schools. *Harvard Educational Review*, 81(4), 625–645.

Engel, S. (2011). Children’s need to know: Curiosity in schools. *Harvard Educational Review*, 81(4), 625–645.

Erik H. Erikson, *Jati Diri, Kebudayaan dan Sejarah*, (terj) Agus Cremers, (Flores: LPBAJ), hal. 220-234

Esack, Farid, *Qur’an, Liberation, and Pluralism*, Diterjemahkan oleh: Watung A. Budiman, Bandung: Mizan. 2000 Hal. 206-207

Fattah, Nanang. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. P. 6-7.

Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad* (Bandung: Pustaka, 1984), 38.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum.

Freire, P. (1998). *Pedagogy of freedom: Ethics, democracy, and civic courage*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield .

G. Burnett, *Varieties of Multicultural Education: An Introduction*, Eric Clearinghouse on Urban Education, Digest, 1994 Hal. 1

Gazalba, Didi, Drs., *Asas Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

H Hartini et al. 2019. The Curiosity of Education Faculty Students in Learning. *International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)* ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-2, December, 2019

H Hartini et al. 2020. [Expressing the level of curiosity of students studying in college](#). *Jurnal Konseling dan Pendidikan* ISSN: 2337-6740 (Print) ISSN: 2337-6880

H.A.R.Gibb, *Muhammadanism, A History Survey*, Oxford University Press, 1953, Hal. 90.

Hamengkubuwono, H. (2017). Implementasi Audit Mutu Internal Pada Perguruan Tinggi Agama. *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 55.

Harackiewicz, J. M., & Hulleman, C. S. (2010). The importance of interest: The role of achievement goals and task values in promoting the development of interest. *Social and Personality Psychology Compass*, 4(1), 42–52

Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25.

Henslin J.M, *Sosialisasi dengan Pendekatan Membumi.*, *op cit.*, hal.79

Henslin J.M, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, (terj.), Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 77

Hidi, S., & Harackiewicz, J. M. (2000). Motivating the academically unmotivated: A critical issue for the 21st century. *Review of Educational Research*, 70(2), 151–179

Hidi, S., & Harackiewicz, J. M. (2000). Motivating the academically unmotivated: A critical issue for the 21st century. *Review of Educational Research*, 70(2), 151–179

Hogan, R., & Greenberger, E. (1969). The development of new measures of curiosity for children (Report No. 56). Baltimore, MD: Center for the Study of Social Organization of Schools. (ERIC Document Reproduction Services No. 107 744)

<https://tirto.id/jumlah-bahasa-daerah-di-indonesia-mencapai-652-pada-2018-cSQY>

<https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>

Ja'far Nashir. Respon Islam Terhadap Multikulturalisme. Diakses melalui situs http://nashir6768.multiply.com/journal/item/1?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem,

Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan; Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. Ke IV, hal. 13

Jihan Abdullah, "Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Studi Kasus Pada Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor Poso," *Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, no. 1 (2014): hlm. 97.

Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: LPFE, 2004), hal. 31

Kartadinata. (2016) *Membangun Kesiapan Manusia Indonesia hidup Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Dunia Kerja Global : Tantangan Bagi Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Orasi Ilmiah, disampaikan pada acara Dies Natalis ke 60 Universitas Pendidikan Indonesia, 20 Oktober 2016

Kartadinata. S (2011). *Tindakan Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Pedagogis. Kiat Mendidik Sebagai Landasan Profesional Konselor*. Bandung. UPI Press

Kartadinata. S (2011). *Tindakan Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Pedagogis. Kiat Mendidik Sebagai Landasan Profesional Konselor*. Bandung. UPI Press

Kartadinata. S (2012) . [Pendidikan Harus Antarkan Generasi Emas Indonesia 2045](#). Konferensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi)VII yang diselenggarakan Universitas Negeri Yogyakarta, di Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Kamis (1/11/2012).

Kartadinata. S (2015) *Pendidikan Guru dan Generasi Emas Indonesia*. Seminar dan Temu Alumni Akbar dalam Rangkaian Dies Natalis Ke 61. Universitas Pendidikan Indonesia 17 Oktober 2015

Kashdan, T. B. (2004). Curiosity. In C. Peterson, & M. E. P. Seligman (Eds.), *Character strengths and virtues: A handbook and classification* (pp. 125–141). New York, NY: Oxford University Press

Kecskemeti. M 2013. *The Stance of Curiosity in the Classroom Is There a Place for Counselling Skills in Teachers' Work?*. New Zealand Journal of Counselling

Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. *Journal of Instructional Development*, 10(3), 2–10.

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Kebijakan Kemristekdikti Untuk Pendidikan Bimbingan Dan Konseling. Temu Kolega Prodi*. Jogjakarta, 10 Maret 2018

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Kebijakan Kemristekdikti Untuk Pendidikan Bimbingan Dan Konseling. Temu Kolega Prodi*. Jogjakarta, 10 Maret 2018

KM. Akhiruddin, "Lembaga Pendidikan Islam Di Nusantara," *Jurnal Tarbiyah* 1, no. 1 (2015): hlm. 197.

Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 82.

Krapp, A. (2005). Basic needs and the development of interest and intrinsic motivational orientations. *Learning and Instruction*, 15, 381–395.

Krapp, A., Hidi, S., & Renninger, K. A. (1992). Interest, learning, and development. In K. A. Renninger, S. Hidi, & A. Krapp (Eds.), *The role of interest in learning and development* (pp. 3–26). New York, NY: Lawrence Erlbaum.

Langevin, R. Is curiosity a unitary construct? *Canadian Journal of Psychology*, 1971. **25**, 360-374.

Lewis, T. E. (2012). Teaching with pensive images: Rethinking curiosity in Paulo Freire's. *Pedagogy of the oppressed*. *The Journal of Aesthetic Education*, 46(1), 27–45.

Litman, J. A. (2005). Curiosity and the pleasures of learning: Wanting and liking new information. *Cognition and Emotion*, 19(6), 793–814.

M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 92.

M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*

Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011 Hal. 46

Maḥmūd Shaltut, *Al-Islām 'Aqidah wa Shāri'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1996), 513.

Manna' Khalil al-Qaththan, , *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Jakarta : Litera Antarnusa, 2010, hlm 385

Mark R. Woodward, *Textual Exegesis as Social Commentary: Religious, Social, and Political Meaning of Indonesian Translation of Arabic Hadith Texts*, *The Journal of Asian Studies*, Vol.52, No.3 (1993), 566. Association for Asian Studies. <http://www.jstor.org/stable/2058854>. (Accesed 27/01/2014).

Matin, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, 2014. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Maw, W. H., & Maw, E. W. (1961). Nonhomeostatic experiences as stimuli of children with high curiosity. *California Journal of Educational Research* , 12 (2), 57-61

Mayers, P. (1978). *Flow in adolescence and its relation to the school experience*. Unpublished doctoral dissertation, University of Chicago.

Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 253-254.

Mitchell, M. (1993). Situational interest: Its multifaceted structure in the secondary school mathematics classroom. *Journal of Educational Psychology*, 85, 424–436.

Mitchell, M. (1993). *Situational Interest: Its Multifaceted Structure In The Secondary School Mathematics Classroom*. *Journal Of Educational Psychology*, 85(3), 424–436. Doi:10.1037/0022-0663.85.3.424

Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Colorado: Westview Press, Inc., 1994), 45.

Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), cet. Ke III, hal. 14

Muhammad Anis, *Watak Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Telaah Normatif)*, Makalah disampaikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* Program Pasca Sarjana UMY tanggal 12 November 2016

Muhammad Dede Rodliyana, “Pergeseran Pemikiran ‘Ulūm al-Ḥadīth dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran ‘Ulūm al-Ḥadīth di Indonesia” (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 2.

Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfadḥ al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, 1997 M/1418H, Hal. 152-153.

Muhammad Yahya. Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural. Makassar : Jurnal Lentera Pendidikan, Vol 13 No. 2 Desember 2010. Hal: 2.

Muhammad Zaini (2017) KONTROL NILAI TERHADAP SAINS. *JURNAL Substantia*, Volume 19 Nomor 1, April 2017.

Mujamil Qomar, *Pemikiran Islam Metodologis Model Pemikiran Alternatif Dalam Memajukan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 210 – 211

Mujiyo, “Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam: Genealogi dan Metodologi” (Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 41.

Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, p.78

Natalia, A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), 36-56.

Natalia, A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), 36-56.

Ngainun Naim Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 50.

Nyoman Kutha Ratna, *Estetika Sastra dan Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 38.

O'Donoghue, Martin. 2008. *Economic Dimensions in Education*. New Jersey: Transaction Publishers. p. 1.

OECD. 2016. PISA 2015 Result in focus. Di unduh pada (2017, 3 Mei) tersedia <https://www.oecd.org>

Omar M. Al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, hlm 58

Osman Bakar, *Tauhid dan Sains : Perspektif Islam mengenai Agama dan Sains*, Edisi Revisi, Bandung : Pustaka Hidayah, 2008, hlm 149

Paruntu, P., Sukestiyarno, Y., & Budi Prasetyo, A. (2018). *Analysis of Mathematical Communication Ability and Curiosity Through Project Based Learning Models With Scaffolding*. *Unnes Journal of Mathematics Education Research*, 7(1), 26-34. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujmer/article/view/21864>

Paulo Freire dalam *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman (Pilihan Artikel Basis)*, Sindhunata (editor), Kanisius, 2001 sebagaimana di kutip dalam Resensi Amanat, Edisi 84/Februari 2001 Hal. 16.

Pemerolehan bahasa atau akuisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa (*language learning*). Abdul Chaer, *Psikolinguistik Kajian Teoritik* (Jakarta: Rineka Putra, 2003), 167.

Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta, hlm. 111.

Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta, hlm. 134.

Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta, hlm. 124.

Pendidikan, P. M., & Nomor, K. R. I. (2014). 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. *Jakarta: Depdikbud*.

- Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification* (Vol. 1). Oxford University Press. Pierre L. Van den Berghe dalam <http://indudt.blog.fisip.uns.ac.id/2011/01/05/struktur-majemuk-masyarakat-indonesia/>
- Pluck, Graham & Johnson, Helen .2011. Stimulating Curiosity To Enhance Learning. *Gesj: Education Science And Psychology* 2011 | No.2(19) Issn 1512-1801
- R. Michael Feener, Indonesian Movements for the Creation of a 'National Madhhab' *Journal of Islamic Law and Society*, Vol. 9, No. 1 (2002), 83,
- Raharja, S *et al*, 2018. *Mengukur Rasa Ingin Tabu Siswa [Measuring Students' Curiosity]*. A Journal Of Language, Literature, Culture, And Education Polyglot Vol. 14 No. 2 Juli 2018
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hal. 77
- Ritchhart, R. (2002). *Intellectual character: What it is, why it matters, and how to get it*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Roberts, T. B., 1975. *Four Psychologies Applied to Education : Freudian, Behavioral, Humanistic, Transpersonal*. New York: Schenkman Pub. Co.
- Rodger, Alex R., 1982, *Educational and Faith in Open Society*, Britain: The Handel Press. 1982 Hal. 61
- Rodger, Alex R., *Educational and Faith in Open Society*, Britain: The Handel Press, 1982 Hal: 61-62
- Rossing, B. E., & Long, H. B. (1981). Contributions of curiosity and relevance to adult learning motivation. *Adult Education Quarterly*, 32, 25–36.
- S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 126
- Said Hawwa, *Ar-Rasul Shallallâhu 'Alaihi Wasallam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2007, hlm. 44-60
- Schiefele, U. (2009). Situational and individual interest. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of motivation in schools* (pp. 197–223). New York, NY: Taylor and Francis
- Schiefele, U. (2009). Situational and individual interest. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of motivation in schools* (pp. 197–223). New York, NY: Taylor and Francis
- Sealy, John, *Religious Education Philosophical Perspective*, London: George Allen & Unwin. 1986 Hal: 43-44

- Shelby Clark & Scott Seider (2017) Developing Critical Curiosity in Adolescents, *Equity & Excellence in Education*, 50:2, 125-141, DOI: 10.1080/10665684.2017.1301835
- Shor, I. (1992). *Empowering education: Critical teaching for social change*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Silmi, Millati, and Yani Kusmarni. "Menumbuhkan karakter rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran sejarah melalui media puzzle." *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 6.2 (2016).
- Simak Hadist yang dikutip al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, kairo, 1969, Hal. 5 dan 89.
- Siti Minarti, 2011, *Manajemen Sekolah*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, p.227
- Solehuddin, (2015) *Disertasi. Peberdayaan Taman Kanak-kanak kurang beruntung melalui pembelajaran berbasis bimbingan*. Program Studi Bimbingan dan Konseling Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Spielberger, C. D., & Starr, L. M. (1994). Curiosity and exploratory behavior. In H. F. O'Neil, Jr. & M. Drillings (Eds.), *Motivation: Theory and research* (221–243). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, cet. ke-2, Bandung : Pimpin, 2011, hlm. 165
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 49
- Thoman, D. B., Sansone, C., & Pasupathi, M. (2007). Talking about interest: Exploring the role of social interaction for regulating motivation and the interest experience. *Journal of Happiness Studies*, 8, 335–370.
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo. 2004 Hal:36-38
- Todd B. Kashdan, Paul Rose, and Frank D. Fincham. 2004. *JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT*, 82(3), 291–305. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Usman Husein, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press, 2008), hal. 81-83
- UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wan Mohd. Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Mohd. Naquib al-Attas*, terj. Hamid Fahmy, dkk, (Bandung: Mizan, 2003),

- White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. *Psychological Review*, 66, 297–333.
- Wigfield, A., & Cambria, J. (2010). Students' achievement values, goal orientations, and interest: Definitions, development, and relations to achievement outcomes. *Developmental Review*, 30, 1–35.
- Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 183.
- Yahya Jaya, *Psikoterapi Agama Islam*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang Press, 1999), hal. 48
- Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI, 1996), 3-4.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim*. Amara Books:Yogyakarta : 2011. Hal: 276.
- Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge University Press.
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal. 110.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian atas Teori Sosial Kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157-183
- A Borsard, Marcel, Prof. Dr., *Humanisme dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990. Hal.78
- Abdullah, A. (2019). Perkembangan Islam di Arab Saudi. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 4(1), 152-171
- Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhāri, *al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar min Umūr Rasūlullah SAW wa Sunanih wa Ayyāmih* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Juz IV, 228; Abū ‘Abdullāh Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979), Jilid V, 38.
- Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al Qur’an*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 146
- Achmad Zainal Arifin, *Membela yang Lemah Menggali Ide Pluralisme Gusdur dalam Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion...*h. 5
- AIFIS, *Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion* tanggal 17 Februari 2015, h. 2
- Alef Theria Wasim, *Kumpulan Materi Kuliah Psikologi Lintas Agama dan Budaya Tahun 2013-2014*, h. 2
- Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme Agama : Tinjauan Kritis*, (Jakarta : Perspektif, 2005), h. 14

- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan multikultural*. Erlangga, h. 5
- Bandung : Mizan, 2003, hlm. 165-166
- Bariyah, O. N., & Akma, N. (2015). Hak asasi manusia dalam Islam.
- Belkin, *Guidance and Counseling*, (New York : Published, 1982), hlm.67
- Budhy Munawar Rachman (ed), *Membela Kebebasan Beragama*, (Jakarta : The Asia Foundation, 2016), h. xvi-xvii
- Budhy Munawar Rachman (ed), *Pendidikan Karakter*, (Jakarta : The Asia Foundation, 2016), h. 17
- Budhy Munawar Rachman (ed), *Pendidikan Karakter... h. Xvii*
- Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 166-171
- Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 156
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke II (Jakarta: Balai Pustaka,1990),h. 777.
- Eck, D. L. (2006). What is pluralism. *The pluralism project at Harvard University*.
- Erman, A. Prayitno. (2004), *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Renika Cipta, h. 17-20
- Fasli Jalal, “Pembukaan Parenting Education dalam Rangka Hari Anak 17 Juli 2013”, Auditorium BKKBN Jakarta Timur.
- Febrianto, M. R., & Nurani, F. Toleransi dan Pluralisme: Kontribusi Budaya Indonesia bagi Dunia.
- Firdaus M. Yunus, 2014, —Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya, dalam Jurnal Substansia Vol. 16, No. 2, Oktober, 220-221
- Firmansyah, H. (2019). Muhammad saw pada Periode Mekah. *At-Tafkir*, 12(1), 55-77.
- Fitriani, R., Ma'mun, T. N., & Suryani, E. (2019). Pendidikan Karakter dalam Naskah Puspakerma: Kajian Konstruktivisme Perspektif Lev Vygotsky. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 10(1), 125-139.
- H Hartini (2018) [Cultural Learning of Rejang Ethnic](#). JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling. Vol 2 No. 1

Halim, A., & Jambi, F. U. I. S. (2015). Pluralisme dan Dialog Antar Agama. *TAJDIR*, 14, 35-62.

Harun Yahya, *Moralitas al-Qur'an : Solusi atas Persoalan Umat Manusia*, (Jakarta : Robbani Press, 2002), h. 33

Hermanto, A. (2018). Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(2), 239-262.

<http://www.jstor.org/stable/3399202> . (Accessed: March 16, 2012).

Ibrahim, R. (2015). Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Addin*, 7(1).

Irhandayaningsih, A. (2012). Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia. *Humanika*, 15(9).

Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, (Bandung : Mizan, 2003), h. 25-54

Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme : Akhlak al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 53

John W Santrock, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 390

Karnadi Hasan "Konsep Pendidikan Jawa", dalam *Jurnal Dinamika Islam dan Budaya Jawa*, No 3 tahun 2000, Pusat Pengkajian Islam Strategis, IAIN Walisongo Semarang, 2000, Hal. 29.

Kementerian Agama RI, *Tafsir Qur'an Tematik Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat, 2010), h. 11-12

Khaled Abu el-Fadel, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 347

Kharisma, T. (2017). Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup WhatsApp dengan Anggota Multikultural. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2).

M Atho Mudzahar, *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia)*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI, 2005), h. 174

M Quraih Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2003), h. 209

Makmun, F. (2020). Konsep Pengembangan Masyarakat Plural Perspektif Al-Qur'an. *Bina'Al-Ummah*, 15(1), 1-20.

Makmun, F. (2020). Konsep Pengembangan Masyarakat Plural Perspektif Al-Qur'an. *Bina'Al-Ummah*, 15(1), 1-20.

Mas'ud, Abdurrahma, MA. Ph.D., Menggagas Format Pendekatan non Dikotomik, Humanisme Religius sebagai Paradigma, Gema Mdia, September, 2002. Hal. 43

Moko, C. W. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) dalam Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Intelektualita*, 6(1).

Mubit, R. (2016). Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 163-184.

Muhamad Fajar Pramono¹&Dzakiyyah Fauziyah Rif'at. *Potret Konflik antar Umat Beragama di Indonesia: in proceeding afro-asian university forum* (p. 773), h. 777

Muhammad Anis, *Quantum al-Fatihah : Membangun Konsep Pendidikan Berdasarkan Surah al-Fatihah*, (Yogyakarta : Pedagogia, 2010), h. Vii

Muqtafa, M. Khoirul, Paradigma Multikultural, Sinar Harapan, CV. Bernews, 2002. Hal.121

Muzaki, I. A., & Tafsir, A. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islamic Worldview. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, [SL]*, 6(1), 57-76.

Nata, D. H. A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, h. 135

Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta : Paramadina, 2002), h. 179

Nurhayati, I., & Agustina, L. (2020). Masyarakat Multikultural: Konsep, Ciri Dan Faktor Pembentuknya. *Akademika*, 14(01).

Nurhidayati, E. (2017). Pedagogi konstruktivisme dalam praksis pendidikan Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 1(1), 1-14.

Nurohman, S. (2008). Peningkatan thinking skills melalui pembelajaran ipa berbasis konstruktivisme di Sekolah Alam. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 11(1).

Paulo Freire dalam *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman (Pilihan Artikel Basis)*, Sindhunata (editor), Kanisius, 2001 sebagaimana di kutip dalam Resensi Amanat, Edisi 84/Februari 2001 Hal. 16.

Pettalongi, S. S. (2013). Islam dan Pendidikan Humanis dalam resolusi konflik sosial. *Cakrawala Pendidikan*, (2), 95142.

Pransiska, T. (2016). Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 17(1), 1-17.

Putra, W. (2013). Perkembangan Anak Ditinjau dari Teori Mature Religion. *Nadwa*, 7(1), 1-19.

Qomarudin, A. (2018). Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 158-168.

Rahman, M. S. (2014). Islam dan pluralisme. *Fikrah*, 2(2).

Rasyidah, A. (2020). Pendidikan pada Masa Rasulullah SAW di Makkah dan di Madinah. *al-bikmah (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)*, 2(1), 32-44.

Rois, A. (2013). Pendidikan Islam multikultural: Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(2), 301-322.

Safri, A. N. Membangun Keagamaan yang Inklusif dan Dialogis (Reinterpretasi Term al-Islam dalam al-Qur'an).

Saihu, M. (2019). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)*. Deepublish, h. 7-8

Samsul Ma'arif, *Rekontekstualisasi Pluralisme Islam Studi Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia : AIFIS Serial Discussion...* h. 40-41

Samuel Bowles dan Herbert Gintis, "Pendidikan Revolusioner" dalam *Mengugat Pendidikan Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001, Hal. 428-433.*

Santalia, I. (2016). KH Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi. *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama*, 1(02).

Sarlito W Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016), h. 3

Siddik, H. (2016). Hakikat Pendidikan Islam. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 8(1), 89-103.

St. Aisyah BM, 2014, —Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama, dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 2, Desember, 195-196

Suliswiyadi, *Pembelajaran al-Islam Reflektif*, (Magelang : UMMgl Press, 2013), h. 85

Sunaryo, *Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa*, (Jurusan PLB, FIP UPI, 2009), hlm.8

Supardan, H. D. (2016). Teori dan praktik pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(1).

Tahaha, H., & Rustan, E. (2017). Orientasi Religiusitas dan Efikasi Diri dalam Hubungannya dengan Kebermaknaan Pendidikan Agama Islam pada Mahasiswa IAIN Palopo. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 13(2), 163-179.

Ula, N. H. (2019). *Penerapan Model Pembelajaran Konstruktivis dalam Melatih Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 dan 6 Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Ulum, I. M. (2013). Konsepsi Tauhid Menurut Muhammad bin Abdul Wahab dan Implikasinya bagi Tujuan Pendidikan Islam. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 9(3), 94-105.

Ulya, I. (2016). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia. *Fikrah*, 4(1), 20-35.

Wahab, A. J. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisa Latar Belakang Konflik)*. Elex Media Komputindo.

Wibisono, Y. M. (2016). Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam. *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, 1, 12-24.

Wibowo, E. K. (2018). Membincang Gerakan Islam Transnasional. *Diegesis: Jurnal Teologi*, 3(2), 60-69.